

BENCANA UMMAT ISLAM DI INDONESIA TAHUN 1980-2000

Diterjemahkan dari:

Mihnatul Islam Fi Indonesia

Karya Tulis:

Iddatu Askhas Amilu Li Hisabi Tapol

(Team Peduli Tapol, 1985)

Penerjemah Arab:

Ismail Shadiq

Penerbit:

Zahratif (Az-Zahro lil I'lami al-Arabi) 1989

P.O 102 Madinat Nasr Cairo Mesir

Edisi Indonesia:

BENCANA KAUM MUSLIMIN DI INDONESIA, 1980 - 2000

Penerjemah:

Mohammad Thalib

Editor:

Irfan S. Awwas

Disain Cover:

Haetamy el-jaed

Type Lay Out / Setting:

Muflich. Asy

Cetakan I, 16 Juli 1998

Cetakan II, 1 Agustus 1998

Cetakan III, 21 Agustus 1998

Cetakan IV, 20 Oktober 1998

Cetakan V, 15 April 2000

Penerbit :

WIHDAH PRESS

Penerbit dan Penyebar Buku Islami

Jl. Kusumanegara No. 98, Yogyakarta

Telp./ Fax. (0274) 389135

ISBN : 979-9311-05-5

Distributor :

CV. ADIPURA, YOGYAKARTA. Telp. (0274) 373019

Hak Pengarang Dilindungi Undang-undang

All Rights Reserved

Penjara itu adalah,
Kuburan bagi orang yang hidup,
Gembiranya musuh di atas penderitaan orang lain
Dan ujian bagi kesetiakawanan

Nabi Yusuf as

Kami persembahkan buku ini
Kepada ratusan kaum muslimin yang menjadi korban
penyiksaan dan penghinaan para Jallad (algojo)
Sebagian besar dari mereka kini sudah uzur,
dan sebagian lainnya menerima perlakuan keji yang tidak adil

Team Peduli Tapol

AMNESTI INTERNASIONAL

PENGANTAR PENERBIT

PENTAS ZAMAN modern masih saja menghadirkan duka lara. Ketika memasuki gerbang tahun baru Hijrah, 1 Muharram 1421 H/6 April 2000 M, kaum muslimin bangsa Indonesia, tinggal menuai badai-menghitung korban tragedi. Darah tertumpah, air mata pilu, wanita diperkosa, anak-anak menjadi yatim piatu, harta benda dijarah atau dibakar musnah. Semuanya berpadu dalam tragedi akibat bencana yang menimpa kaum muslimin, sejak peristiwa Tanjung Priok (1984), Lampung-Talang Sari Berdarah (1989), DOM di Aceh (1989) hingga Ambon (1999) dan Maluku Utara (2000).

Seluruh peristiwa ini terjadi, bukan lantaran kaum muslimin ikut menabur angin, lalu akhirnya menuai badai, melainkan karena: *Pertama*, amanat kepemimpinan bangsa ini tidak berada di tangan mereka yang berhak menerimanya. Dan manakala amanat diberikan kepada mereka yang tidak seharusnya menerimanya, dan karena itu dia tidak menunaikan amanah tersebut secara benar, maka bencanalah yang akan timbul. Untuk hal ini, Allah Swt. telah mengingatkan dengan firman-Nya: "*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menunaikan amanah kepada ahlinya*". (Qs. An-Nisa' 58). *Kedua*, lantaran konspirasi musuh-musuh kafirin dan munafiqin yang ingin menghancurkan Islam dan kaum muslimin.

Bencana politik yang menimpa ummat Islam di Indonesia, secara sederhana dapat dikelompokkan ke dalam dua hal, yaitu bencana di bidang ekonomi dan HAM. Bencana kelompok pertama dapat dilihat melalui diterbitkannya berbagai kebijakan ekonomi-moneter yang tidak memihak rakyat mayoritas.

Sedangkan bencana di bidang HAM, dapat dilihat dari berbagai tragedi berdarah yang dialami ummat Islam, seperti tragedi Tanjung Priok, Woyla, tragedi DOM di Aceh, Lampung (Talangsari) Berdarah, tragedi pembunuhan ulama Banyuwangi (dengan dalih dukun santet), tragedi genocida di Ambon-Maluku, dan sebagainya. Juga berbagai tragedi tak berdarah lainnya, seperti kasus Usrah, Pesantren Kilat, maupun Komando Jihad yang terjadi di awal hingga pertengahan 1980-an.

Buku ini merupakan suatu upaya kodifikasi terhadap berbagai bencana kemanusiaan (pelanggaran HAM) yang menimpa ummat Islam, sepanjang tahun 1980 hingga tahun 2000. Sebagian dari sumber buku ini, tujuh bab pertama berasal dari laporan "*Tim Peduli Tapol Amnesti Internasional*", yang pada kesempatan sebelumnya telah diterbitkan dalam bentuk buku tersendiri, hasil terjemahan dari buku: *Mihnatul Islam fie Indonesia*. Dalam edisi Indonesia diberi judul "*Fakta Diskriminasi Rezim Soeharto Terhadap Ummat Islam*", dan telah mengalami empat kali cetak ulang.

Sumber lain, khususnya tiga bab terakhir dari buku ini ditulis oleh Al Chaidar, seorang penulis muda yang sangat produktif, dengan berbagai judul bukunya yang tergolong *best seller* dan kontroversial.

Al Chaidar pada buku ini menyoroti seputar "*Rekayasa Militer dalam Kasus Lampung Berdarah*", kemudian "*DOM dan Akibatnya bagi Ummat Islam*," serta "*Sikap Pemerintahan Gus Dur terhadap Musibah yang Menimpa Ummat Islam seperti Maluku, Aceh dan sebagainya*."

Selain itu, Brigjen. (Pur) Rustam Kastor, penulis buku: **Konspirasi Politik RMS dan Kristen Menghancurkan Ummat Islam di Ambon-Maluku**, juga tidak ketinggalan menyumbang sebuah tulisan mengenai sikap pemerintahan Gus Dur dalam menangani musibah kemanusiaan di Maluku, sehingga buku ini semakin kaya akan informasi.

Sumber tulisan yang berasal dari "*Tim Peduli Tapol Amnesti Internasional*" banyak mengandalkan berbagai data dan fakta yang tidak pernah diungkap media massa, karena merupakan hasil "liputan" langsung dari arena persidangan. Sedangkan Al Chaidar mendasarkan tulisannya dari hasil investigasi lapangan dan kepustakaan yang juga jarang (atau bahkan belum pernah) dipublikasikan oleh media massa. Salah satu

fakta yang diungkapkan oleh buku ini antara lain kasus Komando Jihad, yang heboh pada awal tahun 1980-an, dan pada dasarnya merupakan gerakan yang direkayasa oleh orang-orang yang menginginkan hancurnya gerakan Islam, dan merupakan rekayasa badan intelijen militer ketika itu. Begitu juga dengan kasus Pembajakan WOYLA. Fakta yang antara lain diungkapkan dari kasus tersebut adalah tentang adanya kegagalan pada proses pengadilan: "Pengadilan yang menangani kasus Imran Cs. menolak untuk melakukan penyelidikan tentang terjadinya pembunuhan terhadap 6 orang pembajak pesawat".

Fakta lain yang juga berusaha digambarkan buku ini adalah adanya berbagai bentuk kecurangan dan intimidasi, baik terhadap tersangka, pembela, bahkan hakim, serta rekayasa hukum. Gambaran itu tidak saja terdapat pada persidangan kasus Tanjung Priok, juga pada kasus-kasus lainnya seperti pembajakan WOYLA (1982), Peledakan BCA (Oktober 1984), Pengeboman Candi Borobudur di Magelang, Peledakan Bis Pemudi Ekspres di Malang (1984), kasus Pesantren Kilat di Malang (1985), serta kasus Gerakan Ushrah di Jawa Tengah dan DIY (1986).

Pada persidangan kasus peledakan BCA misalnya, pembaca dipertemukan dengan tokoh nasional, yaitu Ir. HM. Sanusi, yang didakwa mendanai dan memerintahkan melakukan peledakan di berbagai tempat. Ir. H.M. Sanusi adalah tokoh organisasi Muhammadiyah, tokoh Partai Masyumi, mantan anggota DPR periode 1971-1977 bahkan pernah menjabat menteri perindustrian pada masa Orde Lama.

Kasus pemboman BCA (Oktober 1984) merupakan reaksi atas tragedi berdarah di Tanjung Priok (12 September 1984), karena pemerintah (dan ABRI) tidak mampu memberikan jawaban yang memuaskan terhadap berbagai pernyataan yang menggelayuti masyarakat ketika itu (bahkan hingga kini).

Mengapa penguasa (pemerintah) dan militer begitu membenci kalangan Islam, sehingga merasa perlu merekayasa berbagai kejadian yang menyudutkan ummat Islam? Alasan pertama, karena mereka para elit politik sesungguhnya bukanlah kalangan yang layak menerima amanah. Dan kedua, kemungkinan besar petinggi kita (pemerintah dan militer) kala itu sangat terpengaruh oleh sejenis tesis yang pernah dipopulerkan oleh Samuel P. Huntington, yang menyatakan Islam merupakan ancaman berikutnya setelah komunisme tumbang.

Bahkan lembaga studi CSIS (*Center for Strategic and International Studies*) yang dibidani dan dibina mendiang Ali Murtopo, pada awal-awal berdirinya pernah membuat kesimpulan bahwa, **Islam adalah faktor penghambat pembangunan bangsa**. Kesimpulan itu dituangkan di dalam buku rencana kerja CSIS yang berjudul *Master Plan Pembangunan Bangsa*.

Bencana yang dialami kaum muslimin di Indonesia belum juga sirna, dan masih terus berlanjut hingga kini, ketika duet Gus Dur dan Megawati memimpin negara ini. Lihatlah kasus *Muslim Cleansing* di Ambon-Maluku yang tak kunjung usai. Lihatlah juga pembantaian ummat Islam di Aceh yang masih berlangsung. Padahal, Presidennya berasal dari kalangan ulama NU (Nahdlatul Ulama), Ketua MPR-nya berasal dari kalangan ulama Muhammadiyah, dan Ketua DPR-nya mantan petinggi HMI (Himpunan Mahasiswa Islam).

Tinjauan dari ulasan Al Chaidar seputar sikap pemerintahan Gus Dur terhadap berbagai bencana yang menimpa ummat Islam (khususnya kasus genosida di Ambon-Maluku), seperti menunjukkan dengan jelas, bahwa mereka sebenarnya bukanlah kalangan yang layak menerima amanah dari ummat Islam. Dengarlah apa komentar Gus Dur mensikapi pertikaian antar ummat beragama di Maluku. Gejolak Maluku, katanya "Akibat Ummat Islam Dianakemaskan". Ketika membuka seminar internasional "Mencari Bentuk Ideal Negara Indonesia Masa Depan" di Istana Negara, Selasa 28 Maret 2000, Gus Dur mengatakan: "Masa sepuluh tahun terakhir pemerintah lalu, telah memberikan perlakuan istimewa sebagai anak emas (*golden boy*) bagi masyarakat Islam di Maluku". Kondisi itu, sambungnya, mengakibatkan keseimbangan antara Kristen dan Islam telah terganggu.

Menurut Abdurrahman, jika dulu Belanda mengambil orang-orang Kristen untuk posisi militer dan pemerintahan, dalam era Soeharto pemerintah merekrut Muslim sangat banyak dibanding Kristen". (Republika, 29 Maret 2000).

Mengapa bencana itu masih juga menimpa kaum muslimin? Karena hukum yang diterapkan adalah hukum jahiliyah, sistem yang jahiliyah, hukum dan undang-undang yang sudah terbukti lebih dari setengah abad, tidak mampu menyelamatkan bangsa ini dari bencana ekonomi, politik dan HAM. Oleh karena itu, yang sebenarnya dibutuhkan adalah institusi berupa negara yang memberikan keselamatan (Darussalam), pemimpin

yang amanah, dan aturan hukum serta sistem yang alamiah yang datangnya dari Sang Pencipta Alam.

Buku ini diterbitkan dalam rangka mengingatkan kita tentang berbagai bencana yang datang silih-berganti menimpa ummat Islam di Indonesia. Dari setiap bencana itu sesungguhnya terdapat serangkaian fakta yang berbicara kepada kita, tidak hanya tentang 'software' dan 'hardware' yang tidak lagi 'compatible' dan sudah harus dibuang, juga tentang para 'operator' yang tidak laik jalan, baik karena mutu intelektualnya yang rendah, maupun moralnya yang telah rusak.

Ini semua adalah peringatan bagi mereka yang lalai dan membeo, serta ujian bagi para penganut agama, tetapi dalam hidupnya memilih menjadi Pak Turut atau pun syetan bisu.

6 April 2000 M
1 Muharram 1421 H

P e n e r b i t

PENGANTAR CETAKAN KE-3

GERAKAN reformasi, tidak saja berhasil memaksa Soeharto mundur dan lengser dari singgasana kekuasaan yang telah didu-dukinya selama tujuh periode (1968- 21 Mei 1998). Tetapi juga, berhasil mengungkap-kan misteri *nina bobok* politik rezim orde baru yang selama bertahun-tahun mencekam dan menipu berjuta-juta rakyat Indonesia. Selain itu, reformasi yang dipelopori mahasiswa dan rakyat, mampu membuka mata hati kita, ternyata ada yang salah dalam pengelolaan negara ini, sehingga akibatnya bangsa Indonesia ditimpa musibah dahsyat di bidang ekonomi, politik, sosial dan moral.

Sejak awal berkuasa, rezim Soeharto telah dengan cerdas melahirkan berbagai produk hukum, baik dengan cara mengadopsi hukum warisan kolonial, produk orde lama atau bahkan perpaduan dari keduanya, untuk digunakan sebagai katup penyumbat terhadap partisi-pasi politik Islam serta kaum muslimin dalam pengelolaan pemerintahan dan negara. Mulai dari Kopkamtib, Asas Tunggal, UU Perkawinan hingga pembantaian serta penangkapan aktivis muslim seperti tragedi DOM (Daerah Operasi Militer) di Aceh, Tanjung Priok, Lam-pung Berdarah, Komando Jihad, NII dan kasus-kasus lain yang dikategorikan melanggar UU anti subversi. Seluruh peristiwa itu, telah meninggalkan luka yang memedihkan dan menyengsarakan ribuan kaum muslimin.

Misteri dan kekuatan apa sesungguhnya yang membuat rezim dikta-tor Soeharto mampu bertahan sedemikian lama? "Kelanggengannya, terletak pada kemampuannya melibas segala kekuatan oposisi yang mengancam stabilitas kekuasaannya", jawaban yang diperoleh dalam buku ini. Untuk mengabadikan kediktatorannya, maka sebagaimana Fir'aun di zaman Mesir kuno, Soeharto juga menggunakan preman-preman politik sebagai sumber kekuatan perusak, yaitu Hamman dari kelompok teknokrat, Qarun mewakili konglomerat, Bal'am bin Ba'urah dari majelis ulama, dan tentara.

Akibatnya sungguh dahsyat. Selama 32 tahun rezim Soeharto ber-kuasa, hampir tak pernah sepi dari operasi militer di dalam negeri. DOM (Daerah operasi militer) yang diciptakan di Aceh, sekedar contoh, telah menimbulkan malapetaka berkepanjangan bagi kaum muslimin di daerah tersebut. Ribuan laki-laki dibunuh, ibu-ibu menjadi janda dan wanita-wanita diperkosa. Apa dosa mereka sehingga menerima perlakuan hina dan memilukan itu? Karena mereka orang-orang Islam yang dituduh anggota gerakan pengacau keamanan.

Buku ini, dengan lengkap dan rinci mengisahkan tentang *mihmah* (tragedi) yang menimpa rakyat dan umat Islam di Indonesia. Penerbitan buku yang disusun oleh "Tim Peduli Tapol" Amnesti Internasional ini, bertujuan melanjutkan misi tim penyusun sebagai wujud kepeduliannya terhadap: "Ratusan kaum muslimin yang menjadi korban penyiksaan dan penghinaan para *Jallad* (algojo), yang sebagian besar dari mereka kini sudah uzur, dan lainnya menerima perlakuan keji yang tidak adil".

Selain tujuan yang telah disebutkan di atas, penerbitan buku yang aslinya berjudul "*Mihnatul Islam fie Indonesia*", Tragedi Islam di Indonesia juga dimotivasi oleh tiga hal. **Pertama**, ingin mengungkapkan secara lebih jujur dan transparan tentang kejahatan sebuah rezim yang selama ber-tahun-tahun dipuja-puja sedemikian rupa, tetapi pada akhirnya mewaris-kan malapetaka bagi rakyat Indonesia. Seluruh *mihnah* (tragedi) kemanusiaan yang terjadi di belahan bumi lainnya, yang membuat manusia sedunia menitikkan air mata kepedihan, hal yang sama juga terjadi di negeri ini. **Kedua**, menggugah kesadaran dan semangat pembelaan kaum muslimin terhadap saudaranya yang teraniaya. Bukankah Rasulullah saw. pernah bersabda: "Tolonglah saudaramu yang dizalimi dan yang menzalimi", ujar beliau suatu ketika. "Menolong saudara yang dizalimi, kami sudah tahu. Tapi bagaimana menolong orang yang menzalimi?", tanya para sahabat. "Hendaklah kamu sekalian melarangnya berbuat zalim", jawab beliau tegas. **Ketiga**, seluruh rentetan tragedi yang menimpa bangsa Indonesia, dan menyebabkan negeri ini termasuk dalam daftar pelanggaran HAM paling parah di dunia, terjadi setelah berlakunya asas tunggal Pancasila bagi organisasi-organisasi politik dan kemasyarakatan, dan dipertahankannya undang-undang subversi sebagai alat pembungkam suara-suara yang. Oleh karena itu, desakan untuk mencabut kedua hal tersebut dari masyarakat yang cinta keadilan, menghargai kemanusiaan dan demokrasi, harus ditingkatkan.

Apakah buku ini telah merekam segala bentuk diskriminasi rezim Soeharto terhadap umat Islam? Buku ini memang tidak mengungkapkan seluruh fakta diskriminasi rezim Soeharto terhadap kaum muslimin. Peristiwa Lampung berdarah belum terekam. Bukit tengkorak dan ribuan kasus pemerkosaan di Aceh, juga belum ditampilkan. Hal itu bisa dimengerti, sebab buku ini diterbitkan sebagai sebuah laporan pelanggaran HAM oleh Amnesty internasional untuk pertamakalinya tahun 1989, ketika kasus Lampung baru disidangkan dan tragedi Aceh belum dimulai. Walau demikian, fakta-fakta yang terungkap dalam buku ini bisa menjadi *starting point*, titik awal untuk mengungkapkan bentuk-bentuk diskriminasi politik lainnya.

Dengan tujuan yang seperti itu, adalah bijaksana jika pemerintah orde reformasi di bawah pimpinan presiden ke tiga RI, Prof. Dr. Ing Burhanuddin Jusuf Habibie, berkenan mengangkat isi buku ini sebagai bahan pertimbangan bagi pembebasan Napol muslim yang kini masih meringkuk di penjara, demi keadilan, demi meningkatkan harkat kemanusiaan dan demi menghilangkan kesan diskriminasi. Seperti dengan jelas terungkap dalam buku ini, para napol muslim ditahan bukan lantaran perbuatan yang benar-benar mereka lakukan, melainkan rekayasa politik rezim Soeharto untuk membungkam suara kaum muslimin di negeri ini. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang dituduh merencanakan makar kepada pemerintah yang sah, tapi malah dihukum sebagai pelaku makar.

Akhirnya, setiap orang dapat mengambil pelajaran dari tragedi kemanusiaan yang diungkap dalam buku ini. Tentang penyebab serta akibat yang ditimbulkan dari berbagai kasus yang ada di dalamnya. Bahwa kezaliman penguasa, apapun alasannya pada akhirnya pasti menimbulkan bencana, dan rakyat selalu menjadi korbannya. Maka camkanlah sabda Rasulullah saw ini: "*Siapa saja membikin puas penguasa dengan cara yang dimurkai Allah, maka ia mengeluarkan diri dari agama Allah*". (Hr. Al-Hakim).

Dan Allah Ta'ala bertanya dengan firman-Nya: "*Belumkah tiba masanya bagi orang-orang beriman untuk tunduk hatinya mengingat Allah dan kebenaran yang telah turun (kepada mereka). Janganlah mereka seperti orang-orang yang telah diturunkan kepada mereka kitab sebelum mereka. Kemudian telah lama masa yang mereka tempuh, lalu hati mereka menjadi kesat. Dan kebanyakan mereka orang-orang fasik*". (Qs. Al-Hadid, 57:16)

Dengan pertolongan Allah, semoga penerbitan buku ini dapat men-capai tujuannya. Dan pemerintah orde reformasi, mudah-mudahan tidak mengulangi kesalahan rezim pendahulunya, sehingga tahun-tahun sub-versi di Indonesia segera menjadi masa lalu, dan jangan lagi menjadi tradisi politik pemerintah yang datang kemudian. Ini adalah harapan serta aspirasi rakyat Indonesia. Mengabaikannya berarti buta tuli terhadap suara rakyat, dan masa bodoh terhadap keadilan serta kemanusiaan.

Yogyakarta, 20 Agustus 1998 M
27 Jumadil Awal 1499 H

Editor

PENGANTAR CETAKAN KE-4

MASA kejayaan Haji Muhammad Soeharto, mantan presiden RI yang bergelar bapak pembangunan itu, berakhir mengenaskan. Segala hal yang, selama 32 tahun masa kekuasaannya “diterima” sebagai suatu petunjuk kebenaran, kini mulai dipertanyakan. Bahkan Surat Perintah Sebelas Maret 1966 (Superse-mar) yang memberi legitimasi bagi kekuasaan pemerintah orde baru, hingga warisan politik rezim Soeharto, mulai diragukan keabsahannya. Tanpa kekuasaan dan tanpa tentara di sampingnya, mantan diktator itu benar-benar tidak berdaya, hatta untuk membela diri di depan tuntutan rakyat yang menghendaki supaya dia diadili sebagai “DEWA KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme)” dan harta kekayaannya disita untuk negara, guna mengatasi derita rakyat akibat krisis politik dan ekonomi yang diwariskannya.

Betapa malangnya nasib Soeharto. Martabat dan harga dirinya sedang dipertaruhkan. Sementara semakin hari borok rezim orde baru makin terbuka saja. Rakyat Indonesia kini, bagaikan orang baru siuman dari pingsan yang panjang, akibat terbius propaganda politik penguasa yang ternyata menyengsarakan. Selama rezim orde baru berkuasa, siapa saja yang berbicara sedikit vokal bisa berarti menyakiti diri sendiri. Sebab mengancam, menindas, memenjarakan, menculik merupakan bagian dari etika politik orde baru untuk mencapai tujuannya. Oleh karena itu orang lebih suka bicara bisik-bisik, berpura-pura menjadi kaum loyalitas atau malah tidak peduli sama sekali.

Namun kini, rakyat Indonesia berangsur sembuh dari trauma hantu politik orde baru. Maka beramai-ramailah orang berbicara, menghambur kata sekeras-kerasnya terkadang bercampur dusta. Semua menuding Soeharto, sebagai biang kerok dari musibah sosial dan moral yang melanda negeri ini. Tanpa rasa takut, dengan mudah orang berbicara apapun tentang Soeharto, keluarga dan kroni-kroninya; sebab orang tidak lagi khawatir kalau-kalau ucapan itu bakal menyebabkan mereka ditangkap atau dipenjara dengan beragam tuduhan yang direkayasa. Segala informasi mengenai Soeharto, keluarga dan konco-konconya pun tersebar luas dan merata, jauh lebih merata dibandingkan program pembangunan yang pernah melambungkan namanya sebagai bapak pembangunan. Mulai dari informasi “ringan” soal konflik antara perempuan yang dihormati Ari Sigit Soeharto dengan bibinya Siti Hardiyanti Rukmana, hingga soal-soal yang “berat-berat” seperti dugaan kudeta dibalik Supersemar 1966. Bahkan kemungkinan keterlibatan Soeharto dalam G 30 S/PKI maupun soal pengusutan harta kekayaan yang, hingga buku ini dicetak keempat kalinya, belum juga menunjukkan upaya sungguh-sungguh dari tim kejaksan Agung pimpinan Andi M. Ghalib.

Hujatan dan hinaan yang dialamatkan kepada mantan presiden Soeharto beserta keluarganya, adalah akibat logis dari perbuatannya sendiri. Dengan kekuasaan otoriter yang ada padanya, Soeharto berhasil memuaskan anak cucunya dengan kemewahan berlimpah ruah, tapi sayang sekali, sebagai orang tua dia gagal membekali anak cucunya dengan ilmu dan iman yang akan menyelamatkannya di dunia dan akhirat. Setelah kekuasaan tidak lagi berada dalam genggamannya, mantan presiden itu dinista oleh bangsanya sendiri. Keluarga, anak-anak dan cucunya mulai digugat harta kekayaannya, darimana dan dengan cara apa ia mendapatkannya. Satu demi satu mereka dijadikan tersangka tindak pidana KKN. Dulu mereka dimuliakan karena harta, akhirnya dihina karena harta pula. Soeharto mungkin belum pernah belajar agama, sehingga tidak mendapatkan petunjuk dari peringatan Allah:

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatir akan keselamatan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mengucapkan perkataan yang baik”. (Q.S. An-Nisa, 4:9).

Seiring dengan kejatuhan Soeharto, kesadaran politik rakyat juga meningkat pesat, didukung informasi dari media cetak maupun elektronik. Surat kabar, majalah, dan siaran berita di TV menjadi komoditi yang laris. Begitu pula buku-buku politik yang di masa rezim Soeharto berkuasa, nyaris mustahil untuk diterbitkan apalagi sampai dicetak ulang berkali-kali, kini dapat beredar luas tanpa takut dituduh subversi; termasuk pula buku yang sekarang berada di hadapan pembaca ini.

Dimanapun di dunia ini, sejarah para diktator tidak saja berakhir nista, tapi juga selalu membawa petaka. Begitulah Al-Qur’an memberitakan:

“Fir’aun dan para pembesarnya bersikap angkuh di muka bumi tanpa alasan. Dan mereka mengira tidak akan dikembalikan kepada Kami. Maka Kami siksa Fir’aun dan tentaranya. Kami melemparkannya ke dalam laut. Perhatikanlah bagaimana akibat

orang-orang yang zalim. Dan Kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang membawa ke neraka. Di hari kiamat mereka tidak ditolong. Dan Kami kutuki mereka di dunia. Dan di hari kiamat, mereka termasuk orang-orang yang dibenci". (Qs. Al-Qashash, 28 : 39-42)

Nasib sejumlah diktator Asia misalnya, dapat menjadi bukti kebenaran ayat di atas. Pada tahun 1966, Soekarno terjungkal dari kekua saannya, kemudian dicaci maki, karena gagal membenahi keterpurukan sosial-ekonomi yang diciptakan sendiri. Sebagaimana Soeharto, Soekarno juga telah bertindak zalim pada masa-masa akhir kekuasaannya, dan menindas lawan-lawan politiknya dengan kejam.

Pada tahun 1979 raja Iran, Syah Reza Pahlevi diusir dari negaranya, terlunta-lunta di negeri orang, kemudian mati di negeri orang sebagai buronan politik. Lebih tragis lagi nasib presiden Mesir, Anwar Sadat. Tahun 1981 dia terbunuh, tubuhnya diberondong peluru maut oleh ajudannya sendiri, di hadapan ribuan pasang mata yang menyaksikan parade militer saat ulang tahun angkatan bersenjata di negeri Fir'aun itu. Pada tahun 1991, PM. Banglades, Mohammad Ershad bahkan dije-bloskan ke dalam penjara setelah melalui sidang pengadilan ia dinyatakan bersalah telah mengkorup harta negara dengan jalan tidak halal dan divonis 10 tahun kurungan penjara. Setelah lengser dari singgasana kepresiden, apakah Soeharto juga akan mengalami nasib yang sama dengan teman-teman diktatornya itu? Langkah-langkah reformasi belum akan berakhir, catatan sejarah kehidupan umat manusia belum titik, tentang apa yang akan terjadi nanti.

Tetapi yang sudah pasti, kenyataan ini menjadi bukti otentik adanya *warning* dari Allah Azza wa Jalla:

"Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang diberikan kepa-danya, Kami bukakan segala pintu kesenangan, sehingga apabila mereka bergembira ria (dengan segala nikmat) yang diberikan kepadanya, Kami siksa mereka tiba-tiba lantas hilang lenyaplah harapan mereka (dan mere-ka tidak berlutik lagi). maka dihancur-binasakanlah orang-orang yang zalim itu. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin". (Qs.Al-An'am,6:44-45)

Banyak orang salah mengira, bahwa siksa Allah hanya ada di akhirat. Padahal berapa banyak orang yang kita saksikan, tiba-tiba saja jatuh terhempas ke jurang kehancuran. Dan sebagian besar disebabkan akibat pelanggaran terhadap ajaran agama.

Bila mereka telah meremehkan agama, maka akan dibukakan pintu-pintu kemewahan, kekuasaan dan sebagainya. Pada saat mereka berada pada puncak kemewahan dan kekuasaan, sekonyong-konyong Allah hancurkan mereka. Dan orang yang sedang berada di atas tiba-tiba ter-hempas jatuh, maka ia akan merasakan sakit yang luar biasa. Manakala seseorang memegang kekuasaan, lalu berbuat zalim, meraup harta rakyat dan menghamburkannya di atas kesengsaraan orang banyak; adalah sangat adil bila mereka ditimpa siksa yang dasyat.

Bedah Buku: Bukti Antusiasme Pembaca

Sejak cetakan pertama beredar, 16 juli 1998 lalu, buku "Fakta Diskri-minasi Rezim Soeharto terhadap Ummat Islam" ini mendapat sambutan hangat dari para pembaca. Terbukti belum genap dua bulan, buku ini telah mengalami cetak ulang tiga kali. Selain itu, antusiasme pembaca juga dapat dilihat dengan berulang kali diadakannya diskusi dan bedah buku oleh kalangan mahasiswa, pemuda masjid, bahkan pakar-pakar politik dan hukum.

Untuk pertamakalinya, pada 27 Juli 1998 bedah buku diselenggarakan oleh Front Sabilillah bekerjasama dengan majalah UMMAT, di masjid Istiqlal Jakarta. Tampil sebagai nara sumber adalah : Prof. Dr. Deliar Noor, KH. Ali Yafie, Dr. Bambang Sulistyono dan editor buku, Irfan S. Awwas. Sedangkan di Yogya, bedah buku digelar oleh Ikatan Remaja Muhamma-diyah (IRM). Kemudian, 19 September 1998, buku ini diperbincangkan hangat di masjid Salman, kampus ITB Bandung. Selain dari editor, tampil menyampaikan orasi, adalah Abdul Qadir Jaelani, saksi sejarah dan mantan napol kasus Tanjung Priok. Kemudian Mursalin Dahlan, aktivis yang sejak muda telah keluar masuk penjara rezim orba. Selanjutnya adalah KH. Rusyad Nurdin, mantan ketua partai Masyumi Jawa Barat, dan sekarang menjadi ketua Dewan Pertimbangan Partai Bulan Bintang.

Selain yang telah disebutkan di atas, bedah buku akan diadakan secara beturut-turut di Universitas Airlangga Surabaya, 21 Oktober 1998, diseleng-garakan oleh Fakultas Hukum bekerjasama dengan Komite Penanggula-ngan Krisis (Kompak) Surabaya. Selanjutnya, 31 Oktober bedah buku akan diselenggarakan oleh Forum Komunikasi Mahasiswa Ma'had Al-Bina' Surakarta bekerjasama dengan Jama'ah Nurul Huda, Unit

Kegiatan mahasiswa Islam Universitas Sebelas Maret Surakarta. Pembicaranya antara lain: Abdul Qadir Jaelani, Drs. Adabi Darban, SU dan Mutammi-mul Ula, SH.

Dari tiga kali bedah buku yang sudah diselenggarakan, ada beberapa kritik yang masuk. Ada yang mengkritik bakwa buku ini tidak ilmiah, karena tidak menyebutkan sumber lain sebagai rujukan, dan data-datanya kurang akurat. Editor tidak menolak penilaian tersebut, sebab buku yang dalam edisi bahasa Arab berjudul, "Mihnatul Islam fi Indonesia" ini, disusun oleh Tim Peduli Tapol Amnesty International sebagai sebuah laporan investigasi mereka di Indonesia pada tahun 1989. Walaupun demikian, buku ini boleh dibilang satu-satunya laporan tertulis tentang narapidana politik Islam di Indonesia. Dan yang menggembirakan, adanya bedah buku ini ternyata, di samping kritik banyak juga informasi maupun data-data sejarah yang terungkap dari para peserta sehingga semakin memperkaya isi buku ini. Beberapa kesalahan yang dilakukan Tim Penyusun, akibat kurangnya data dan sulitnya memperoleh informasi, memang sulit dihindari. Melalui bedah buku ini, alhamdulillah kesalahan-kesalahan kecil dapat diperbaiki, baik oleh para ahli maupun para pelaku sejarah yang sekaligus menjadi korban kezaliman rezim militer.

Misalnya, kesalahan pada halaman 132, mengenai lembaga pendidikan LB3K. Yang benar adalah LP3K (Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Pesantren Kilat). Informasi penting dan berharga, sebagai upaya pelurusan sejarah datang dari peserta dialog, Dr. Bambang Sulistomo.

Mengomentari pernyataan pada Bab I "Militer dan Organisasi Islam di Indonesia", halaman 4 tentang Darul Islam pimpinan SM. Kartosuwirjo, yang menjadi isu sentral dari semua persidangan kasus subversi pada dekade 80-an di Indonesia. Masalah ini hanya dibicarakan selintas saja dalam buku ini. Dr. Bambang Sulistomo, putra pahlawan kemerdekaan Bung Tomo, salah seorang peserta bedah buku di masjid Istiqlal Jakarta, merasa perlu menyampaikan kesaksiannya. Tuduhan pemberontak terhadap SM. Kartosuwiryo dengan Darul Islamnya, dinilai bertentangan dengan fakta sejarah yang sebenarnya. Dia mengatakan: "Menurut kesaksian almarhum ayah saya, yang dituliskan dalam sebuah buku kecil berjudul HIMBAUAN, dikatakan bahwa pasukan Hizbullah dan Sabi-lillah, menolak perintah hijrah ke Yogyakarta sebagai pelaksanaan isi perjanjian Renville; dan memilih berjuang dengan gagah berani mengusir penjajah dari wilayah Jawa Barat. Keberadaan mereka disana, adalah atas persetujuan Jenderal Soedirman dan wakil presiden Mohammad Hatta. Pada saat clash Belanda kedua, pasukan TNI kembali ke Jawa Barat dan merasa lebih berhak menguasai wilayah yang telah berhasil direbut dengan berkuah darah dari tangan penjajah oleh pasukan Hizbullah dan Sabilillah di bawah komando SM. Kartosuwiryo. Karena tidak dicapai kesepakatan, maka terjadilah pertempuran antara pasukan Islam dan tentara republik tersebut". Se jauh mana kebenaran dari kesaksian ayah saya ini, perlu penelitian para sejarawan. "Bagaimana menurut pendapat bapak Deliar Noor?", tanya Bambang Sulistomo mengakhiri komentarnya. Sebagai ahli sejarah yang cukup disegani, Prof. Dr. Deliar Noor kemudian menjawab: "Kesaksian almarhum ayah saudara itu, persis seperti kesaksian Haji Agus Salim yang disampaikan di Cornell University Amerika Serikat, tahun 1953. Memang perlu penelitian ulang terhadap sejarah yang ditulis sekarang", demikian Deliar Noor.

Dalam bedah buku di masjid Salman Bandung, 19 September 1998, Abdul Qadir Jaelani yang pernah menjadi saksi sejarah di dua masa kekuasaan otoriter, yakni orde lama dan orde baru mengaku, semula ia dan kawan-kawan seperjuangan menjadi tombak orde baru untuk meruntuhkan orde lama. Namun akhirnya, dengan orde baru pun bersimpang di tengah jalan. Selanjutnya, ia menjadi oposan, bukan hanya dalam soal RUU perkawinan, sidang dewan gereja maupun aliran kepercayaan dalam GBHN, serta asas tunggal Pancasila sehingga harus "menikmati" penjara orde baru.

Kedua rezim ini, menurut salah seorang ketua DPP Partai Bulan Bintang ini, secara esensial tidak berbeda, dalam arti keduanya otoriter. Orde lama dinilainya nasionalis-markis, sedang orde baru sekularis mutlak dan keduanya sangat anti Islam. Gambaran sejarah detail dituangkannya dalam pembelaannya di depan pengadilan pertama tahun 1978 dengan judul: **Pemuda Islam Menggugat**, setebal 280 halaman. Lalu pembelaan tahun 1984 di depan PN Jakarta pusat dengan judul, "Musuh-musuh Islam melakukan Offensive terhadap Ummat Islam" setebal 500 halaman dengan referensi 120 buku.

Mengapa rezim Soeharto begitu anti terhadap Islam? Ia coba menganalisisnya dengan mengatakan, selama dua rezim penguasa, pemikiran politik di Indonesia didominasi oleh nasionalis-palangis-sekularis. Penguasa orde baru, bahkan memiliki *think tank*, yakni CSIS. Tahun 1992 CSIS menyusun sebuah buku untuk kalangan intern berjudul "Master Plan Pembangunan Bangsa" setebal 861 halaman. Di dalam buku itu

digariskan bahwa ancaman yang paling esensial dalam pembangunan orde baru adalah dari kaum muslimin fundamentalis. Itulah yang kemudian dicanangkan dalam berbagai kesempatan. Dokumen berklasifikasi "sangat rahasia" yang ditemukannya dari Kopkamtib, mabes ABRI, kejaksaan agung sejak 1967 sampai 1978, mengungkapkan antara lain: Setiap menjelang hari-hari besar Islam, selalu dikirimkan telegram dari tiga instansi tersebut ke seluruh aparat keamanan hingga tingkat rendah, agar semua kegiatan tersebut dimonitor dan hal-hal yang kira-kira berkenaan dengan ancaman terhadap penguasa, harus dibatalkan.

Itulah sebabnya, selama rentang waktu tersebut, ceramah agama tidak pernah tidak mendapat gangguan. "Saya sendiri hampir tiap bulan ditangkap atau diculik" ungkapnya. "Tidak seperti Pius Lustrilang, hanya diculik dua bulan lalu dilepaskan, tapi kami disiksa di luar batas kemanusiaan. Anehnya hal-hal seperti itu kini diabaikan begitu saja. Jauh berbeda dengan kasus penculikan aktivis pro demokrasi belakangan ini, kasusnya dapat menyebabkan seorang jenderal (Prabowo,ed.) diberhentikan dari ABRI." katanya.

"Kasus Tanjung Priok itu luar biasa", tambahnya. Lebih dari 450 orang dibantai dengan berondongan senapan M-16, lalu mayatnya di lemparkan ke truk-truk militer. Satu truk berisi lebih dari 40 jenazah, sebagaimana jenazah itu kemudian di kremasi di Cilincing, Jakarta Utara. Anehnya, kasus luar biasa itu sekarang justru ingin dilupakan. Dengan alasan ummat Islam bukan pendendam, lalu muncul orang-orang yang mengusulkan perlu diadakan rekonsiliasi nasional. Ummat Islam bukan pendendam, itu benar. Tapi ummat Islam penganut hukum qishas, yakni balasan yang seimbang. "penyiksa harus disiksa", "pembunuh harus dibunuh". Dan kami akan menuntut itu sampai pembunuh-pembunuh berdarah dingin yang dipimpin LB. Murdani dan Try Sutrisno, mati berdiri di republik ini!" tegasnya.

Sebagai pembicaraan berikutnya, Mursalin Dahlan menuturkan pengalamannya. Upaya rezim Soeharto mengeliminir peran ummat Islam tidak hanya dengan menghancurkan kekuatan politik, ekonomi dan kebu-dayaan Islam. Tetapi juga secara sistematis menghancurkan aqidah ummat Islam. Upaya itu ditempuhnya dengan memaksakan masuknya aliran kepercayaan ke dalam GBHN tahun 1978, setelah mereka gagal memaksakan UU perkawinan yang bertentangan dengan syariat Islam pada tahun 1973. Disusul kemudian dengan memaksakan penetapan asas tunggal Pancasila bagi organisasi sosial politik.

Pemaksaan asas tunggal inilah yang kemudian memicu kemarahan ummat Islam yang memegang teguh aqidahnya. Berbagai jama'ah ummat Islam melakukan perlawanan dengan caranya masing-masing, sehingga bentrok antara ummat Islam dengan rezim Soeharto tak terhindarkan. Maka pecahlah berbagai tragedi, mulai dari tragedi Tanjung Priok, diikuti dengan Lampung, Aceh, Haur Koneng, dan tempat-tempat lainnya sebagaimana diungkap dalam buku ini. Banyak orang tidak percaya, Soeharto akan hancur secara hina dina. Pada detik-detik Soeharto akan runtuh pun, seorang pengamat politik asing masih menyatakan Soeharto masih cukup kuat. Penilaian tersebut memang sangat wajar, sebab boleh dibilang Soeharto memiliki segala-galanya, dukungan militer, uang, Golkar dan dukungan para penjiat. Tapi apa yang dimiliki Soeharto tidak ada artinya sama sekali, berhadapan dengan kekuasaan Allah SWT. Atas berbagai tindak kezaliman yang diperagakan, Soeharto pasti akan menemui kehancuran, sama seperti yang dialami oleh Soekarno, ternyata benar adanya. Bahkan dalam ukuran tertentu keruntuhan Soeharto lebih tragis dan hina dibanding kejatuhan Soekarno.

Menyinggung peranan asas tunggal Pancasila dalam merusak tatanan politik dan sumber dari segala sumber malapetaka di bawah rezim Soeharto, dengan mengutip ucapan Syafruddin Prawiranegara pada halaman 96 buku ini, Mursalin Dahlan mengatakan. "Kalau orang-orang Kristen tidak dibenarkan membentuk organisasi atas dasar kekristenan, baik Protestan maupun Katholik, dan kaum muslimin tidak boleh mendirikan organisasinya berdasarkan Islam, dan begitu pula warga negara lainnya yang beragama lain, maka sesungguhnya Indonesia menjadi sebuah negara nasionalis-fasis, sehingga keburukan dan kejahatannya tidak berbeda dengan negara-negara komunis".

"Indonesia di bawah rezim Soekarno adalah nasionalis-komunis, sedang di masa rezim Soeharto, Indonesia adalah nasionalis-fasis. Dan Indonesia di abad 21, Insya Allah dipimpin oleh kaum nasionalis-Islam tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, KH Rusyad Nurdin mengemukakan "orang kalau sudah berkuasa tidak mau kekuasaannya itu ditentang." Mengutip sebuah hadits, ia menuturkan. Di masa Rasulullah SAW. dulu ada seorang wanita yang hendak makan,

namun seekor kucing mendahului menyantap lauk pauknya. Hati nurani wanita tersebut sebetulnya menyalahkan dirinya sendiri, tetapi karena merasa seolah-olah tidak dihargai oleh seekor kucing lantaran integritasnya dilanggar, akhirnya ia menangkap kucing tersebut dan mengurungnya, lalu menyiksanya dengan tidak memberinya makan minum. Mendengar kejadian tersebut Rasulullah SWA langsung bersabda: "Hiya fin-naar" (Dia penghuni neraka)". Lalu saya pikir, bagaimana penguasa yang membunuh orang-orang yang dianggap menentang kekuasaannya, termasuk orang-orang yang tidak berbuat apa-apa. Beginilah kejamnya seseorang kalau sudah merasa enak hidup di dunia dan dia menguasai segala sesuatu, maka mereka tidak akan mau ditentang," tutur KH Rusyad Nurdin. Namun demikian lanjutnya, umat Islam tidak boleh tinggal diam, yang buruk, kejam dan bathil harus ditentang.

Para pembicaraan sepakat, meskipun tidak luput dari kekurangan, buku ini benar-benar menyentuh rasa kemanusiaan, oleh karena begitu banyak orang yang berkorban demi kebenaran dan begitu banyak orang yang dikorbankan demi kekuasaan. Maka buku ini juga bermaksud mengingatkan seluruh eksponen reformasi, agar kezaliman Soeharto tidak terulang lagi di negeri ini. Untuk itu, tidak ada jalan lain, kita harus terus berjuang sampai reformasi total tercapai di bawah perlindungan dan keridha'an Ilahy.

Sikap Pemerintahan B.J. Habibie

Menteri Kehakiman, Prof. Dr. Muladi, SH pernah berjanji akan membebaskan seluruh Tapol dan Napol, minimal sepuluh orang tiap minggu. Akan tetapi, sampai sekarang, lima bulan pemerintah reformasi penguasaan berkuasa, baru sekitar 50 orang saja yang dibebaskan, dan tak seorangpun dari napol Islam.

Semakin banyak kelompok pro reformasi yang menuntut pembebasan mereka, seperti Komite Solidaritas Muslim untuk Tapol dan Napol, Sontak, Kontra, Front Sabilillah dan lain-lain, pemerintah tetap saja acuh tak acuh. Terhadap Napol Islam misalnya, pemerintah B.J. Habibie masih melanjutkan diskriminasi dan sikap represif orde pemerintahan sebelumnya. Orang-orang Islam yang ditahan seperti diungkap dalam buku ini, dianggap kasus mereka bukan politik, melainkan kriminal, teroris atau GPK (Gerakan Pengacau Keamanan). Itulah sebabnya, kriteria pembebasan Napol yang ditetapkan pemerintah mengacu pada anggapan di atas. Bahwa mereka yang dibebaskan, adalah yang tidak terlibat kriminal, tidak menentang pemerintah dan tidak menentang Pancasila.

Rekayasa politik yang digelar Soeharto guna menghabisi para penentangannya demikian transparan. Begitu pun, persidangan subversi yang digelar di pengadilan-pengadilan negeri telah menjadi lembaga konstitusional untuk menghukum lawan-lawan politiknya. Semua itu diungkap secara gamblang dalam buku ini. Apakah ini belum cukup sebagai alasan untuk meringankan derita para Napol yang kini masih meringkuk di penjara. Ataukah pemerintah orde reformasi berkeinginan meneruskan permusuhan yang diwariskan rezim sebelumnya? Pertanyaan ini tetap relevan, jika mengacu kepada kebijakan pemerintah sekarang. Barangkali benar, bahwa pemerintah Indonesia, baik orde lama, orde baru maupun orde reformasi - sebagaimana disinyalir banyak orang - belum mampu melepaskan diri dari belenggu dan tekanan zionis internasional.

Kelompok-kelompok Yahudi dan Nasrani, dengan segala cara berhasil menekan rezim Soeharto, melalui lobi politik, militer dan uang, sehingga pada gilirannya, tragedi menyedihkan menimpa umat Islam tanpa bisa memberikan pembalasan, walau dengan lisan sekalipun. Berbeda dengan kasus yang menimpa segelintir orang-orang non Islam. Seperti penculikan aktivis, kasus Pius Lustrilang Cs, menjadi isu sejagad; sementara ribuan nyawa kaum muslimin direnggut secara kejam, tak ada yang menggubris.

Isu perkosaan massal yang menimpa etnis Cina, konon mereka bera-gama Nasrani, disorot secara amat berlebihan dan arogan. Tetapi siapa peduli dengan nasib wanita yang menjadi pembantu rumah tangga orang-orang Cina yang mengalami penyiksaan dan sekaligus perkosaan? Siapa peduli dengan nasib ribuan wanita muslimah yang diperkosa dan dibunuh secara biadab di Aceh?

Mengapa pemerintah tidak membebaskan napol Islam, sementara napol yang berpola pikir sekuler dan sosialis dibebaskan dengan mudah? Inilah di antara bukti, yang banyak disinyalir, bahwa pemerintah orde reformasi masih mendapat tekanan dari agen zionis domestik, dan itu artinya reformasi di bidang politik belum memperoleh porsi secara proporsional. Apakah pemerintah juga berkeyakinan, bahwa membebaskan Napol Islam akan menghidupkan kembali gerakan Islam fundamentalis? Jika

jawabannya “ya” itu bukti yang lain lagi, bahwa pemerin-tah orde reformasi memang masih berada di bawah tekanan agen-agen zionis di negeri ini.

Mengakhiri pengantar keempat buku ini, sepatutnyalah kita mengi-ngatkan, bahwa kaum muslimin di negeri ini hendaknya menyadari eksis-tensinya yang terinjak, dan potensinya yang terabaikan. Mengapa begitu banyak kaum muslimin, - penganut Islam terbesar sedunia - tetapi mereka tidak memperoleh kemerdekaan dalam menjalankan dan mengamalkan syariat agama yang diyakini kebenarannya? Bahkan tanpa disadari, um-mat Islam diadu domba oleh musuh-musuhnya, sehingga mereka ber-lomba-lomba - bukan fastabiquil khairat - tetapi sibuk mendirikan partai. Mereka sibuk berbicara tentang masalah internal, berebut massa kaum muslimin, atau berkoalisi untuk memenangkan Pemilu 1999 mendatang. Apa artinya semua ini? Belumkah tiba saatnya bagi ummat Muhammad saw. untuk menyadari, bahwa masa depan mereka di negeri ini tengah menjadi agenda utama kekuatan lain yang memusuhinya. Bagaimana memarjinalkan peranan maupun pengaruh mereka dalam membangun Indonesia baru yang steril dari celupan Islam.

Akhirnya, “Berpeganglah kamu semuanya kepada tali Allah, jangan-lah kamu berpecah belah”, demikian A-Qur’an, surat Ali Imran, 103 me-nasehatkan. Sekiranya kaum muslimin benar-benar berpegang pada hukum dan aturan Allah, niscaya mereka tidak akan berpecah, sekalipun mungkin masih berada pada wadah yang berbeda. Jika kaum muslimin bersatu padu menegakkan keadilan dan demokrasi, menyerukan amar bil ma’ruf wa nahyi anil mungkar, niscaya takkan ada suatu kaum pun di Nusantara ini yang akan meremehkan eksistensi mereka. Dengan demikian mereka akan dapat menciptakan perdamaian, meningkatkan kesejahteraan serta menumbuhkan kehidupan yang harmonis antar penganut ummat beragama sesuai ideal Islam, sebagai rahmatan lil alamin. *Wallahu a’lam bish-shawab.*

12 Oktober 1998 M
21 Ra j a b 1419 H

E d i t o r

CETUSAN KALBU MENGUNGKAP FAKTA

INILAH jeritan hati seorang Narapidana politik Muslim, korban kezaliman rezim Soeharto, semasa Beny Moerdani menjadi Pangab dan Try Sutrisno sebagai Kasad. Ditulis pada 1986 di L.P. Permisan Nusakambangan, setelah Sang Napol divonis 13 tahun penjara karena dituduh bercita-cita mendirikan Negara Islam, dan mempublikasikan pikiran-pikiran “subversi” tersebut melalui Tabloid Ar-Risalah yang dipimpinnya.

*Pernahkan anda rasakan
bagaimana tersenyum di tengah derita?
Kusaksikan sendiri siksa di atas siksa
ditimpakan atas diri mujahid-mujahid muda, pembela risalah-Nya
Ketika kayu pemukul dan pentungan besi
Dihamtamkan pada tubuh-tubuh lunglai
Ketika kuku jemari dicabuti, kumis dan jenggot dibakar
dan tubuh dililit kawat bermuatan listrik
lalu kata-kata kotor menghina, terlontar dari mulut beracun para durjana
Sembari menyemburkan pertanyaan-pertanyaan menjebak,
di sekitar dakwah dan ide mendirikan negara Islam
Guna harapan sepotong kata sesal dari lisan tak berdaya
Hanya takbir dan do’a pengawal tubuh berselimut luka
Seulas senyum pun tersungging
mengiringi kemenangan iman menghadapi siksa
Fakta dan pengalaman di balik penjara,
menjadi bukti kebenaran berita al-Qur’an
“Bila mereka dapat menangkapmu*

Mereka akan menyakitimu dengan tangannya
Dan mencacimu dengan mulutnya"
Tapi manusiawikah menyerang ketakberdayaan dengan
keganasan binatang?

September 1984: Peristiwa Tanjung Periok terjadi
Manusia ditembak bagai binatang buruan
Awal 1989: Tragedi Lampung Berdarah
Laki-laki dibunuh dituduh pembangkang
Bayi, anak-anak dan ibu mereka jadi sasaran kemarahan
Dipanggang hidup-hidup, di dalam rumah yang sengaja dibakar
Limapuluh orang ibu-ibu, 80 orang anak-anak pria dan wanita
Akhirnya jadi korban pembantaian yang biadab
Menyusul pembunuhan muslim Aceh 1990
Jasad manusia bergelimpangan di jalanan

Di negeri ini malapetaka laksana gelombang
datang susul menyusul menimpa ummat Islam
Rezim orde Baru berdiri di atas tengkorak generasi muslim
kaki tangan mereka berlumur darah orang tak berdosa
Membunuh mereka demo stabilitas Nasional?
Ataukah tumbal bagi langgengnya kekuasaan?
Di tengah situasi dimana kezaliman diperagakan jumatwa
Adakah mata titikkan airnya tangisi ummat ini
Masih adakah telinga mendengarkan ratap mereka
Agaknya peduli pun orang khawatir
Menjadi syetan bisu pilihan yang aman
Tapi para durjana punya jawabnya yang bikin luka hati kian menganga
"Peristiwa itu ibarat virus kecil

Yang berusaha guncangkan tubuh yang sesat
Tak usah dipermasalahkan lagi, mereka yang mati hanya kecil saja
Ummat Islam berjuta-juta jumlahnya, harus dapat membedakan
Mana ajaran yang benar dan mana ajaran berkedok agama"
Bagai dajjal si buta sebelah, menghasut ummat tanpa rasa salah

Manakala para durjana perlihatkan jati dirinya
Lewat keganasan dan logika tentara
Iman dan akal fikiran faham soalnya
Tetapi jika mereka yang mengaku beriman dan tokoh agama
Ikut melecehkan perjuangan mujahid dakwah
Dan menganggap enteng pengorbanan mereka,
lalu melontarkan kutukan keji, menjadi agen kezaliman lewat fatwa
"Pemerintah telah bertindak benar, membasmi pengacau negara "
Kemudian menjadi alasan bertindak bagi Fir'aun
Duhai, dimanakah persaudaraan iman dan harga diri mukmin
Bukankah, berjuang menegakkan syari'at Allah
Kewajiban ummat Islam seluruhnya
Bukankah tumpahkan darah tanpa haq adalah dosa?
Menyetujui kejahatan demikian, apakah juga bukan dosa?
OHO...agakny syetan telah belokkan hati nan jernih
Ketahuilah, Fir'aun terkenal lantaran zalim
Bal'am dilaknat sebab khianat pada agama
Lalu dengan apakah Anda dikenal dan diperkenalkan?
Terhadap petakan dan rintihan yang diderita saudara seagama
Anda malah mengelak tanggung jawab
Padahal hancurnya nasib ummat adalah taruhannya
Na'udzubillahi min dzalik

KUTULIS ungkapan ini di kala pikiranku menjelajahi dunia luar, sementara hatiku menjerit
mengingat nasib manusia yang disingkirkan kerana pikirannya, dan dipenjara lantaran imannya.

Wahai Anda yang diuji di jalan ini : Janganlah minta diringankan beban perjuangan. Tapi
mohonlah kepada Allah, agar ditambah kekuatan untuk mengatasi segala rintangan. Wahai Rabb
yang menolong orang-orang yang disusahkan. Yang meluluskan permohonan orang-orang yang
disengsarakan. Lenyapkanlah kesusahan kami, kedukaan serta kesempitan hati kami. Karena
sesungguhnya Engkau melihat apa yang menimpa kami dan sahabat-sahabat kami. Amin Ya
Rabbal Alamin !

DAFTAR ISI

Pengantar Penerbit	vii
Pengantar Cetakan Ke-3.....	xi
Pengantar Cetakan Ke-4	xv
Pendahuluan	1
Bab Satu.....	7
Militer Dan Organisasi Islam Di Indonesia	
Bab Dua	31
Persidangan Kasus Tanjung Periok	
Bab Tiga.....	55
Tokoh diBalik Peristiwa Pembantaian Tanjung Periok	
Bab Eempat	65
Tindakan Represif dan Sistem Peradilan	
Bab Lima.....	79
Persidangan Kasus Muballigh	
Bab Eenam.....	99
Persidangan Kasus Peledakan Bom	
Bab Tujuh.....	123
Persidangan Usrah di Jawa Tengah	
Bab Delapan	163
Dom Aceh Aceh 1989-1998:	
Upaya Pemusnahan Peradaban Muslim Paling Biadab Sepanjang Sejarah Indonesia	
Bab Sembilan	185
Nestapa Kaum Muslimin	
TNI Penjagal Kemanusiaan	
Bab Sepuluh	285
Rekayasa Militer Pihak Intelijen dalam Tragedi Lampung Berdarah	
Bab Sebelas	337
Tokoh Peristiwa dan Para Korban Musibah Politik Lampung Berdarah, 1989	
Bab Dua Belas.....	401
Jendral di Balik Pembantaian Ummat Islam Ambon-Maluku	
Bab Tiga Belas	409
Fitnah Politik Gus Dur Melecehkan Ummat Islam Maluku	
Penutup	419
Katalog-katalog Buku Terbitan Wihdah Press	422

PENDAHULUAN

SEJAK Januari 1985, pengadilan-pengadilan di Indonesia menggelar persidangan puluhan perkara politik Islam. Selama 30 bulan tanpa henti perkara ini digelar guna mengungkapkan kasus *dessident* muslim terhadap rezim Soeharto, dengan menuduhnya sebagai teroris dan fundamentalis. Bahkan selama bertahun-tahun masyarakat dicekoki perasaan takut terhadap siapa saja yang dipandang sebagai musuh pemerintah atau gerakan yang mengarah kepada pembentukan "Daulah Islamiyah" di Indonesia.

Persidangan-persidangan yang digelar secara revolusioner menjadi bumerang, karena membuat kaum muslimin berubah sikap pada pemerintah. Rezim militer Soeharto termasuk rezim yang paling lama berkuasa di dunia. Di bawah rezim diktator ini, Indonesia dikuasai oleh pemerintahan dzalim yang sudah mendarah daging. Oposisi dalam bentuk apapun tidak diperkenankan, dan terus menerus melakukan intimidasi dan tekanan yang sangat hebat terhadap kemerdekaan individu, penindasan terhadap kebebasan, hak berbicara serta melakukan diskusi terbuka.

Adalah mengherankan, dalam kondisi tertekan justru muncul aktivis-aktivis keagamaan di semua lapisan masyarakat Indonesia, mereka melakukan diskusi-diskusi politik dan kebudayaan. Aktivitas ini diprakarsai oleh generasi muda muslim terpelajar. Sebagian dari mereka ada yang study ke luar negeri: Timur Tengah dan Eropa. Banyak di antara mereka yang terpengaruh oleh perkembangan-perkembangan baru yang terjadi di dunia Islam. Semangat kebangkitan ini dimotivasi oleh para muballigh serta politikus-politikus muslim senior.

Organisasi-organisasi Islam resmi tidak ingin berkonfrontasi dengan gerakan yang mendukung demokrasi, juga dengan orang-orang yang mendesak kaum muslimin untuk menciptakan gerakan kebudayaan dan politik alternatif. Di tengah merajalelanya despotisme, banyak masjid berubah menjadi pusat-pusat halaqah, penerbitan buletin dan seminar; di samping sebagai tempat shalat berjamaah serta aktivitas-aktivitas ke-Islaman lainnya. Selain itu bermunculan pula organisasi-organisasi baru di lingkungan perumahan-perumahan.

Dalam kondisi represif yang sengaja diciptakan pemerintah, adalah tidak mungkin melakukan kegiatan-kegiatan dengan cara lain untuk menggalakkan demokrasi dan keadilan.

Mulailah negara mengambil langkah-langkah keras, dengan menge-luarkan undang-undang yang mewajibkan asas tunggal Pancasila. Dewasa ini gerakan Islam dianggap sebagai bahaya laten atau ancaman potensial terhadap rezim militer, sehingga yang menjadi sasaran tindakan represif pemerintah adalah aktivis-aktivis muslim. Rezim Soeharto ber-sandar kepada keputusan hukum tahun 1965, saat terjadinya gelombang pembantaian massal. Dalam badai kemarahan ini, ratusan ribu orang yang dicurigai sebagai komunis dibunuh. Dan puluhan ribu lainnya dijebloskan ke dalam penjara dengan hukuman di atas 10 tahun, tanpa melalui proses pengadilan.

Setelah berlalu sepuluh tahun, pada pertengahan dasawarsa 1970-an muncullah perlawanan dari mahasiswa yang menuntut diadakannya perubahan politik dan iklim yang lebih demokratis. Para mahasiswa menghadapi rezim yang menguasai militer. Pada saat yang sama Indonesia melancarkan perang terhadap kaum pemberontak di Irian Barat, daerah yang sejak tahun 1963 telah menjadi bagian dari Indonesia. Disamping itu, Indonesia juga menghadapi perang perlawanan rakyat Timor Timur yang baru berintegrasi dengan Indonesia tahun 1975. Menghadapi pemberontakan bersenjata di kedua wilayah tersebut, militer Indonesia tidak mau bersikap lunak apalagi berkasih sayang dengan mereka yang menentang pemerintah. Peperangan ini pada akhirnya meninggalkan akibat yang parah berupa kematian, penyiksaan, penahanan dan pengawasan ketat. Dan orang-orang yang menentang pemerintah orde baru di dalam maupun diluar negeri bertambah banyak.

Salah satu faktor yang menyebabkan rezim Soeharto mampu bertahan dalam waktu demikian lama, karena kehebatannya melibas lawan politik satu demi satu. Setiap kelompok masyarakat dipaksa untuk meng-hancurkan gerakan oposisi yang ada di dalam tubuh kelompoknya. Dengan lenyapnya gerakan oposisi yang terorganisasi dengan baik di dalam negeri, maka kekuatan yang menjadi sandaran para oposan tiada lain adalah dukungan serta bantuan dari luar negeri.

Tapol (Tahanan Politik) yang terdapat diberbagai penjara diseluruh wilayah Indonesia, yang terdiri dari politikus-politikus PKI dan kaum kiri, sebagian besar telah dibebaskan pada akhir dasawarsa tujuh puluhan. Dan masih tersisa sekitar 80 orang tapol, sedangkan 20 diantaranya dijatuhi hukuman mati. Sementara puluhan ribu orang yang dibebaskan itu, mengalami kematian perdata, dengan kehilangan hak-hak sipil serta politiknya.

Dewasa ini penghuni penjara-penjara di Indonesia telah berubah, diganti oleh generasi baru yang terdiri dari tahanan politik muslim, mereka adalah politikus yang menyuarakan aspirasi Islam. Mayoritas dari mereka ini, dahulunya mendukung militer menumpas PKI pada tahun 1965.

Juru bicara rezim Soeharto tidak jemu-jemu mengingatkan orang, bahwa terdapat dua kelompok ekstrim yang senantiasa mengancam stabilitas nasional. *Pertama*, kelompok ekstrim kiri, yaitu sisa-sisa PKI setelah pemberontakan tahun '65 beserta organisasinya. Dan organisasi ini seluruhnya terlarang sejak rezim militer memegang kekuasaan. *Kedua*, kelompok ekstrim kanan, adalah golongan Islam fundamentalis.

Rezim Soeharto menerapkan strategi khusus untuk menghancurkan kedua kelompok ekstrim tersebut secara serentak. Ketika mengeksekusi mati empat orang napol PKI pada tahun 1985, pada tahun yang sama, seorang napol muslim juga dieksekusi mati. Pada tahun 1986, ketika mengeksekusi mati 9 orang napol PKI, sebelumnya ada satu orang napol muslim yang dieksekusi mati lebih dahulu.

Undang-undang subversi dan kekuatan inkonstitusional yang dipergunakan dalam persidangan kasus-kasus tahanan PKI pada tahun 1965, sepuluh tahun kemudian, dengan cara dan undang-undang yang sama, itulah yang dipergunakan dewasa ini menghadapi tapol/napol muslim.

Selain Amnesti internasional, sangat sedikit perhatian dicurahkan oleh pihak luar Indonesia untuk memahami dan melakukan analisis terhadap proses persidangan yang telah selesai pelaksanaannya pada awal tahun 1985 ini.

Buku ini mencoba mengungkap secara gamblang apa yang selama ini lepas dari perhatian banyak orang. Keputusan-keputusan pengadilan yang berlangsung hingga akhir 1987, seluruhnya dibebaskan dalam buku ini. Jumlah tapol muslim tercatat sebanyak 157 orang (lihat lampiran IV), sedangkan orang-orang Islam yang dipenjarakan tanpa proses peradilan jumlahnya jauh lebih besar lagi. Persidangan terhadap kasus mereka ini terus berlanjut hingga pemilu April 1987, dan tahun-tahun berikutnya.

Tidaklah mustahil, keadaan semacam ini akan terus berlanjut beberapa tahun lagi. Dan akan terus berlangsung sampai pergantian pemerintah bulan Maret 1988 ketika Soeharto terpilih kembali menjadi presiden untuk kelima kalinya, suatu jabatan yang telah dipegangnya sejak tahun 1968 hingga sekarang tanpa ada persaingan sedikitpun.

Disini kita dapat saksikan, bahwa persidangan-persidangan subversi akan terus digunakan demi tujuan-tujuan politis, dengan memberikan kesan mendalam kepada masyarakat Indonesia, sesungguhnya negara ini selalu menghadapi ancaman stabilitas nasional. Maka dalam peristiwa-peristiwa politik penting, seperti pemilu dan perayaan hari-hari besar nasional, dimunculkan peristiwa-peristiwa yang sifatnya mencekam masyarakat. Dengan alasan yang demikian itulah, orang-orang Islam dijadikan tumbal untuk waktu yang lama. Akan tetapi buku ini tentu tidak mungkin memuat selengkapnya data-data yang berhubungan dengan kasus yang dibicarakan.

Bab pertama buku ini secara ringkas menyetengahkan sejarah pertanggung-jawaban antara gerakan Islam dan kelompok militer di Indonesia. Dipaparkan secara sepintas berbagai macam organisasi Islam, baik politik maupun sosial yang telah berdiri diwaktu lalu, dan dijelaskan pula mengapa para aktivis muslim mencari wadah-wadah baru sebagai alternatif.

Bab dua menceritakan tragedi Tanjung Priok dan tokoh-tokoh menonjol yang sengaja dikorbankan.

Bab tiga berusaha untuk melacak sejauh mana keabsahan keterangan resmi pemerintah mengenai korban kasus Tanjung Priok. Dan pada bab 4, diketengahkan berbagai kisah tragis kasus tersebut, penerapan undang-undang secara semena-mena, perlakuan buruk terhadap terdakwa dalam persidangan disaat berlangsungnya peradilan, serta siasat-siasat licik yang dilakukan pemerintah dalam mengendalikan jalannya persidangan demi tujuan-tujuan politis.

Tiga bab berikutnya memuat pembicaraan tentang kasus peradilan terhadap beberapa muballigh dan mereka yang dituduh melakukan peledakan bom atau dituduh melakukan makar.

Pada bab terakhir dibicarakan tentang pengadilan terhadap beberapa orang penduduk desa (aktivis muslim di desa). Kegiatan para aktivis di desa merupakan fenomena baru di Indonesia. Gerakan ini disebut gerakan Usrah. Sayang sekali, hanya sedikit yang diketahui tentang gerakan ini, karena hanya diketahui dari keterangan-keterangan yang terungkap di pengadilan.

Media massa Indonesia menjadi sumber utama untuk melakukan analisis terhadap jalannya persidangan, walaupun hal semacam ini bukanlah suatu metode yang baik. Namun kami tidak mempunyai alternatif lain. Sebab tidak ada keterangan independen yang ditulis oleh orang-orang yang bersimpati terhadap para terdakwa, seperti yang dahulu pernah terjadi dalam kasus pengadilan mahasiswa pada pertengahan dasawarsa 1970-an, ketika keterangan lisan secara apa adanya dapat disiarkan.

Selebaran-selebaran ini tersiar secara luas baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Akan tetapi dalam kasus Usrah ini pengamat independen tidak diperkenankan menghadiri persidangan kasus mereka, walaupun sebagai wakil dari lembaga Amnesti Internasional ataupun himpunan pengacara internasional.

Orang maklum, bahwa media Indonesia yang memberitakan jalannya persidangan kasus politik, menghadapi kontrol ketat dari pemerintah sekalipun persidangan tersebut dilakukan secara terbuka dan untuk umum.

Pengadilan memang memberikan keterangan untuk mengkonter pendapat-pendapat yang berbeda dengan pemerintah mengenai masalah-masalah politik dan sosial, tetapi keterangan tersebut bersifat *off the record*. Pada kenyataannya banyak persidangan kasus politik dihadiri oleh sejumlah simpatisan yang menjadi pendukung terdakwa, tetapi media massa tidak berani memberitakan hal tersebut karena khawatir SIUP atau izin terbitnya dicabut. Namun dalam beberapa kasus persidangan yang mengundang suasana emosional, beberapa media massa ada juga yang agak berani menyiarkannya.

Pembungkaman terhadap mass media, intensitasnya bervariasi dari waktu ke waktu. Terkadang ada juga persidangan yang dapat diikuti prosesnya lebih banyak dibanding lainnya. Tapi perlakuan paling tidak mengenakan yang diterima media massa, ketika mereka dilarang

menyi-arkan berita-berita di luar fakta yang diberikan pemerintah. Padahal mass media ingin menelusuri seberapa besar kesulitan yang dihadapi terdakwa maupun penasehat hukumnya.

Media massa setempat merupakan sarana yang sangat terbatas bagi kami untuk dapat mengikuti jalannya berbagai persidangan yang berlangsung di Jakarta dan kota-kota besar lainnya. Sebab para terdakwa maupun penasehat hukumnya tidak diberi kesempatan yang cukup menyampaikan keterangan-keterangan yang bersifat sanggahan atau peno-lakan, dibandingkan dengan tuduhan-tuduhan jaksa yang secara rinci disiarkan oleh media massa.

Buku ini dapat tampil di hadapan pembaca, semata-mata berkat kegi-gihan dan kerja keras tim peduli tapol yang bekerja sejak tahun 1985. Kami mempersembahkan buku ini kepada ratusan kaum muslimin yang menjadi korban penyiksaan dan penghinaan di tangan para *Jallad* (algojo). Sungguh, sebagian besar dari mereka sekarang ini sudah uzur, dan lainnya menerima perlakuan keji yang tidak adil.

**Tim Peduli Tapol
AMNESTI INTERNASIONAL**

Bab 01 MILITER DAN ORGANISASI ISLAM DI INDONESIA

MILITER Indonesia, sejak awal mula secara diam-diam menyimpan rasa kurang senang terhadap organisasi-organisasi Islam. Ketidak-senangan itu muncul semenjak tahun-tahun pertama berdirinya Republik Indonesia, dan mencapai puncaknya hingga ke tingkat permusuhan setelah pemerintahan militer resmi memegang tampuk kekuasaan tahun 1965. Sebagaimana terlihat dalam perkembangan yang mencapai puncaknya pada tahun 80-an, bahwa kemiliteran itu dibentuk untuk menopang kekuatan negara, dan selalu siap untuk menjalankan perannya sebagai kekuatan negara menghadapi rongrongan ideologi apapun, termasuk ideologi-ideologi agama yang secara resmi diakui, yaitu Islam, Kristen, Budha dan Hindu. Kondisi semacam ini terus berlangsung, sehingga jurang pemisah di antara militer dan organisasi-organisasi (gerakan) politik Islam semakin dalam.

Sejak awal dibentuknya kekuatan militer Indonesia, hanya penduduk pulau Jawa sajalah yang berperan mengendalikan dan mengontrol tentara, khususnya dalam pembinaan karakter maupun kultur (*tsaqafah*) nya. Suku Jawa selamanya menduduki posisi-posisi penting dan strategis sejak lahirnya gerakan kebangsaan di Indonesia, sehingga mereka berhasil menguasai setiap bagian dari kehidupan bangsa, dan merambah ke suku-suku lain di luar Jawa yang pada umumnya lebih kuat berpegang kepada ajaran Islam dibandingkan dengan mereka yang ada di pulau Jawa. Perkembangan politik selanjutnya menunjukkan, bahwa apa yang terjadi diantara kelompok militer dan organisasi-organisasi Islam telah merambah masuk hingga ke persoalan-persoalan asasi di dalam tubuh masyarakat Jawa yang memiliki dua pola kultur berbeda: Yaitu, *pertama* golongan santri, mereka adalah muslim yang taat pada agama. Dan *kedua*, golongan abangan, adalah mereka yang secara formal mengaku muslim tetapi dalam praktiknya tetap setia berpegang teguh kepada filsafat dan kebudayaan Jawa sebelum Islam.

Kira-kira satu bulan sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1945 telah terjadi perdebatan sengit antara dua kubu, kelompok santri dan abangan yang tergabung di dalam "*Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai*", yaitu sebuah badan yang dibentuk oleh tentara pendudukan Jepang, guna mencari dasar bagi kemerdekaan Indonesia serta mendiskusikan UUD Republik di masa datang. Pada akhirnya dicapailah suatu kesepakatan yang memuat kerangka undang-undang negara Indonesia sekaligus lima dasar Pancasila yang salah satunya berisi kepercayaan kepada Allah SWT.

Para wakil-wakil muslim di dalam badan ini berhasil mengokohkan prinsip tadi yang memungkinkan untuk memberikan warna ke-Islaman dan menonjolkan kepribadian Islam dengan menambahkan kalimat: "Dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluknya". Kesepakatan ini kemudian diterima sebagai preambule (pembukaan) undang-undang dasar yang dikenal dengan Piagam Jakarta. Akan tetapi ketika UUD ini diumumkan tanggal 18 Agustus 1945, sehari sesudah proklamasi kemerdekaan, kalimat tersebut dihapuskan melalui tangan pemimpin sekuler Soekarno, yang kemudian diangkat menjadi presiden RI yang pertama. Dengan kejadian ini, maka kemenangan yang semula berada di tangan kaum muslimin berubah menjadi serangan dan penistaan. Dihapusnya tujuh kalimat, yang terdapat di dalam Piagam Jakarta (*The Jakarta Charter*) pada akhirnya menimbulkan permusuhan berkelanjutan selama 20 tahun pertama berdirinya Republik Indonesia.

Bab 1.01 PERTENTANGAN MILITER DAN ORGANISASI ISLAM

Dalam rentang waktu antara 1945-1949, merupakan masa-masa penuh gejolak dengan terjadinya dua kali peperangan, yang dilancarkan oleh pemerintah kolonial Belanda guna mengembalikan kekuasaannya dan menghancurkan Republik Indonesia yang baru lahir. Pada masa-masa ini kita

menyaksikan berbagai konfrontasi terbuka antara kelompok-kelompok bersenjata Indonesia dan kesatuan-kesatuan pejuang bersenjata Islam. Pembentukan tentara nasional pada tahun 1945, cikal bakalnya diambil dari pasukan yang dilatih oleh Jepang. Dan di antara anggotanya adalah seorang yang kini menjadi kepala negara Indonesia, yaitu Soeharto. Tentara ini dibentuk pada masa pendudukan Jepang, dari tahun 1942-1945 yang disebut dengan PETA (Pembela Tanah Air), yaitu kesatuan-kesatuan Jepang yang dilatih untuk membela ibu pertiwi.

Namun PETA bukanlah satu-satunya tentara yang berjuang membela negara. Di luar kelompok tentara tersebut, terdapat banyak kesatuan milisi diantaranya milisi Hizbullah, kelompok yang dengan gagah berani melawan penjajah Belanda hingga mereka berhasil merebut kekuasaan dan memindahkannya ke tangan putra-putra Indonesia tahun 1949.

Usaha Jepang untuk membentuk milisi-milisi Islam sejak awal telah gagal, kecuali PETA, yaitu kesatuan Jepang yang diberi latihan kemiliteran seperti tersebut di atas. Para anggota PETA sebagian besar berasal dari kaum abangan, yaitu mereka yang secara formal mengaku muslim tetapi realitas sehari-harinya dikuasai oleh budaya Jawa sebelum Islam. Adapun milisi Hizbullah, sekalipun dibentuk juga oleh Jepang, namun baru bisa tumbuh berkembang setelah Jepang dikalahkan tentara sekutu.

Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, pasukan Hizbullah menjadi kesatuan-kesatuan tentara yang dominan, khususnya di wilayah-wilayah yang kuat Islamnya, seperti daerah Jawa Tengah. Tentara Indonesia berkeinginan keras untuk menyatukan seluruh kelompok-kelompok milisi ke dalam lingkungan TNI, dan bertekad menumpas habis pihak manapun yang menolak perintahnya. Akan tetapi, melumpuhkan kekuatan Hizbullah bukanlah hal yang mudah; akibatnya bentrokan sengit tidak bisa dihindari, dan bentrokan paling buruk dan tragis adalah yang terjadi di daerah Jawa Barat.

Pada tahun 1947 seluruh kesatuan militer yang berada di Jawa Barat dan Jawa Tengah ditarik mundur, sebagai realisasi atas persetujuan yang telah disepakati oleh tentara Indonesia dan pihak Belanda pada tahun itu juga. Namun pasukan Hizbullah tetap pada pendiriannya, dan menolak untuk meninggalkan wilayah yang telah dikuasainya itu serta bertekad melakukan perang gerilla.

Bukan itu saja, pasukan republik yang tidak menarik diri itu, bahkan berubah nama menjadi Darul Islam (DI) dan menyebut sayap militernya sebagai Tentara Islam Indonesia (TII).

Pada awal tahun 1949, sesudah ibukota Republik Indonesia, Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda, pasukan Republik kembali ke Jawa Barat dalam keadaan kocar kacir, sementara itu mereka menghadapi perlawanan keras dari TII di bawah komando Sekarmaji Marjan Kartosuwiryo. Darul Islam menolak tunduk terhadap usaha-usaha tentara untuk mengembalikan kekuasaan republik atas daerah Jawa Barat (yang pernah ditinggalkannya). Sebaliknya mereka memproklamasikan berdirinya sebuah negara merdeka yang menikmati hak-hak otonomi secara rasional.

Dan pada awal tahun 1960-an, ketika tentara Indonesia berhasil menumpas gerakan Darul Islam, sejak saat itu nama SM. Kartosuwiryo beserta orang-orang yang bergabung dalam gerakan melawan republik, di dalam sejarah kemudian disebut sebagai kelompok pengkhianat dan pemberontak negara. Dan sampai sekarang gerakan Darul Islam tetap dicap sebagai perusak negara dan penyeleweng ideologi negara. Akibat begitu banyaknya bentrokan-bentrokan yang terjadi dengan kaum muslimin diberbagai daerah Republik Indonesia sehingga menyebabkan peperangan yang panjang. Peristiwa ini sangat membekas di dalam hati perwira-perwira tinggi, dan menumbuhkan rasa permusuhan yang mendalam terhadap para pejuang muslim, sehingga muncul kepercayaan, bahwa mereka harus memperlakukan para pejuang muslim secara otoriter.

1.02 ORPOL ISLAM DAN PERJUANGAN MELAWAN PENJAJAH

Eksistensi ideologi Darul Islam kurang mendapat sambutan di masyarakat Jawa, baik di Jawa Tengah maupun di Jawa Timur. Hal itu dikarenakan, jauh sebelum Darul Islam muncul, masyarakat Jawa telah memiliki kebudayaan dan kepercayaan tersendiri yang telah berakar umbi. Oleh karena itu kepribadian Islam yang tumbuh di daerah-daerah lain di wilayah Indonesia terlihat berbeda dengan masyarakat di Jawa, dimana kepribadian Islamnya tampak sangat lemah.

Pada awal abad ke-20, di Indonesia telah muncul banyak organisasi Islam. Dan yang paling terkenal diantaranya adalah Syarikat Islam (SI) dan Nahdhatul Ulama (NU). Sebagai organisasi politik Islam modern pertama di Indonesia, Syarikat Islam yang berdiri tahun 1912 berdasarkan pada prinsip-prinsip perlawanan terhadap penjajah, dengan cepat mendapatkan pendukung. Organisasi ini mencapai masa kejayaannya pada awal tahun 1920-an. Pada th 1926 - 1927 meletus revolusi melawan Belanda di Jawa Barat dan Sumatera Barat. Revolusi yang didalangi oleh kelompok Islam kiri ini mengalami kegagalan. Oleh karena itu seluruh tokoh dan pemimpin mereka, baik dari kalangan Islam maupun komunis dibuang oleh Belanda ke tanah Merah yang terletak di Papua Barat (Irian Jaya sekarang, pent.).

1-03 ORGANISASI SOSIAL KEAGAMAAN

Di Indonesia, ada dua organisasi Islam yang sama sekali berbeda coraknya dengan Syarikat Islam, yaitu Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama.

1. MUHAMMADIYAH. Organisasi Muhammadiyah didirikan tahun 1912. Salah seorang pendirinya adalah santri keraton - tokoh agama keraton piodal di Jawa, yang melakukan ritual keagamaan di keraton-keraton tradisional di Yogyakarta dan Solo. Setelah Islam datang, para piodal Jawa ini tetap memelihara tokoh semacam itu untuk melaksanakan ritual agama di keraton mereka.

Tokoh-tokoh pendiri Muhammadiyah, seluruhnya bergelar haji, maksudnya mereka yang telah pergi ke Mekah melaksanakan rukun Islam ke lima. Tokoh-tokoh ini berasal dari keluarga kaya diantara keluarga-keluarga Jawa. Yang demikian itu tampak menonjol hatta dalam rekrutmen anggota organisasi pun banyak ditujukan pada kalangan pedagang kaya di Yogya dan daerah sekitarnya.

Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah orang pertama yang mendirikan organisasi Muhammadiyah. Sebelumnya, Ahmad Dahlan bukanlah seorang yang memiliki keahlian dalam bidang pengajaran dan manaje-men organisasi, namun kedua hal ini (pendidikan dan keorganisasian) pada gilirannya malah menjadi ciri organisasi tersebut.

Prinsip dasar organisasi ini jelas, yakni menjalankan perintah Al-Qur'an, melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Maksudnya, mengajak orang berbuat baik dan menjauhkan dari perbuatan dosa. Tujuan utamanya adalah untuk meredam dua faham yang kontroversial yang terjadi diantara dua kubu (santri dan abangan) yang sama-sama tumbuh di dalam masyarakat Jawa. Mereka beranggapan bahwa pengajaran Islam secara tradisional, terutama di tingkat pedesaan sudah sangat kolot sekali, sehingga menyebabkan ketidakmampuan menghadapi tantangan-tantangan modern. Tetapi juga mereka tidak senang melihat kultur Jawa terlalu banyak mencelup pendidikan dan prilaku-prilaku ke-Islaman yang mengajak orang untuk kembali kepada Qur'an secara murni.

Oleh karena mereka adalah tokoh-tokoh Jawa yang utama, maka mereka beranggapan bahwa pemerintah Belanda dan sistem pendidikan yang pernah berjalan, yang oleh masyarakat dianggap hanya mengabdikan kepada kepentingan pemerintah penjajah, merupakan penghinaan kepada mereka. Hal semacam itu merintangikan pertumbuhan golongan pedagang dan menghalangi hak mereka untuk memperoleh kemajuan. Untuk memecahkan problema ini perlu diadakan pendidikan yang lebih baik, tetapi harus berjiwa Islam.

Sekalipun mereka mengakui bahwa sistem pendidikan sekuler Barat dapat memperluas pengetahuan dan kemampuan ilmiah yang penting, namun rasa kemanusiaan dan perasaannya tidak dapat tumbuh seperti diinginkan. Maka menurut pendapat mereka hal semacam ini tidak akan bisa diatasi kecuali bila dilakukan di bawah naungan sistem yang berjiwakan Islam.

2. NAHDHATUL ULAMA. Organisasi NU didirikan th 1926, pendirinya adalah KH. Hasyim Asy'ari. Istilah Kiai dipergunakan sebagai sebutan bagi seorang guru muslim. Organisasi ini didirikan sebagai reaksi terhadap pertumbuhan pesat organisasi Muhammadiyah. Dapat kami katakan, bahwa NU secara prinsip berhadapan dengan pola-pola modern yang dijalankan Muhammadiyah. Sekolah-sekolah Muhammadiyah dengan cepat tersebar diberbagai tempat sehingga dapat dianggap sebagai suatu ancaman bagi sekolah-sekolah tradisional maupun sekolah Islam pedesaan serta pusat-pusat pendidikan yang menjadi basis pesantren yang dikelola ulama-ulama tradisional.

Kedua organisasi ini, pola kegiatan pendidikan dan kemasyarakatan-nya selalu bersaing. Untuk menjadi kekuatan yang berpengaruh dalam kehidupan sosial dan keagamaan di Jawa, NU punya pengikut besar dan mengakar di desa-desa, baik di Jawa Timur maupun Jawa Tengah. Pesantren yang menjadi basis NU membentuk perkampungan-perkampungan kecil di bawah pengawasan Kiai dan para santri, yang memiliki hubungan emosional yang kuat dengan keta'atan serta komitmen kepada pesantrennya. Mereka ini mudah Anda kenal melalui pakaian khas yang mereka kenakan.

Akan halnya Muhammadiyah, pengikutnya sebagian besar adalah penduduk kota dari kalangan pengusaha menengah, pegawai sipil dan tenaga profesional. Anak-anak mereka mengenakan pakaian ala barat dan memanggil guru-guru mereka dengan panggilan ustadz, sebutan bahasa Arab untuk guru. Pengikut kedua organisasi ini semakin bertambah besar. Ulama-ulama NU mengurus banyak pesantren, sedangkan pengikut Muhammadiyah mendirikan jaringan sekolah mulai dari tingkat TK, Akademi hingga Perguruan Tinggi. Juga mendirikan tempat-tempat penampungan anak yatim dan jompo serta Rumah Sakit. NU lebih banyak berkiprah dalam masalah-masalah tradisional sedangkan pengikut Muhammadiyah lebih banyak melakukan gerakan pembaruan. Perbedaan antara kedua organisasi ini sudah nampak sejak awal berdirinya. Dan perkembangan keadaan belakangan ini menjadikan perbedaan-perbedaan diantara kedua organisasi, menyusup pula di kalangan sebagian perwira militer. Pada awal tahun-tahun berdirinya Muhammadiyah, organisasi ini sangat terpengaruh oleh gagasan reformasi sosial secara total. Barangkali hal ini akibat dari pengaruh misionaris yang membuat menonjol badan-badan pendidikan Kristen. Para anggota Muhammadiyah berpendapat, bahwa sistem pendidikan misionaris dapat menjadi perantara untuk membangun kemampuan khusus kalangan terpelajar, guru, dan kaum pemikir. Jumlah anggota Muhammadiyah sampai sekarang (tahun 1989) kurang lebih berjumlah dua puluh juta orang dengan membawahi tidak kurang dari 2000 sekolah,

16 Universitas, 21 Akademi, 9 rumah sakit umum (PKU), ratusan tempat penampungan anak yatim, puluhan ribu masjid. Adapun 'Aisyah, adalah bagian perempuan Muhammadiyah, terdiri dari para putri dan ibu-ibu yang tergabung di dalam organisasi pendidikannya.

Sistem pendidikan di dalam organisasi Muhammadiyah telah men-capai tingkatan yang kokoh dan mapan sehingga dapat menyaingi sistem pendidikan sekolah negeri. Dalam kenyataannya tidak terdapat perbedaan apapun mengenai sistem pengajaran dan pendidikan antara kedua lembaga tersebut (Muhammadiyah dan Pemerintah). Tetapi Muhammadiyah memiliki sistem birokrasi sendiri. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya memelihara sekolah-sekolah, Universitas dan rumah sakit-rumah sakit, termasuk juga memelihara ide pembaharuan yang menjadi ciri khasnya sejak semula. Sebab pada tahun-tahun terakhir ini muncul anggapan dari para cendekiawan muslim, bahwa sistem yang ditempuh oleh pemerintah dalam pengajaran yang mereka terapkan di sekolah, ternyata merugikan upaya memelihara kepribadian Islam.

Dalam bidang politik Muhammadiyah tetap menjaga prinsip mengambil jarak dan tidak ikut di dalam aktivitas politik, kecuali yang terjadi pada tahun-tahun 1950-an, ketika menjadi anggota dari partai politik Masyumi. Muhammadiyah telah menetapkan langkah-langkah tertentu guna menjauhkan usaha-usaha dibidang pendidikan dan sosialnya dari segala macam kegiatan politik. Tujuannya adalah, sebagai upaya menjauhkan diri dari sikap konfrontasi dengan kekuasaan negara. Organisasi ini selamanya menikmati hubungan yang harmonis dengan pemerintah, walaupun terjadi pergantian pemerintahan, sejak zaman Belanda kemudian Jepang, lalu Soekarno dan akhirnya pemerintahan militer dewasa ini yaitu rezim Soeharto. Dengan bersikap semacam ini, Muhammadiyah memperoleh banyak keuntungan, seperti subsidi bagi sekolah-sekolah Muhammadiyah.

Adapun sekolah-sekolah NU yang berkonsentrasi pada bidang pendidikan agama, yang dewasa ini sudah jarang dilakukan orang, sebagian besar sudah menjadi sekolah pemerintah atau hampir menjadi bagian dari sistem pengajaran di sekolah-sekolah negeri. Umumnya pesantren-pesantren ini berbasis di lingkungan masyarakat agraris, kantor-kantor modern dan organisasi-organisasi sosial. Para Kiai pada umumnya merasa bangga dapat melakukan usaha pembinaan manusia seutuhnya, berbeda dari sekolah-sekolah negeri yang hanya bertujuan mencetak pegawai negeri. Sementara kelompok abangan berpandangan bahwa pesantren tidak lebih dari suatu tatanan yang sudah ketinggalan zaman, dan tidak sesuai dengan realitas kehidupan modern.

Lain lagi pandangan dari para Kiai, mereka menilai guru-guru di sekolah Muhammadiyah sebagai orang-orang yang berwawasan sempit, sebab mereka tidak memiliki kepedulian sedikitpun terhadap kepentingan kehidupan di pedesaan. Masalah industri lokal atau pengaruh konsumerisme barat di pedesaan-pedesaan yang sederhana tidaklah dapat diselesaikan hanya dengan mengajak kembali kepada Qur'an dan Hadits. Demikian pula dengan para guru-gurunya yang terikat dengan modernisme. Oleh karena itu, upaya mengajak melakukan pembenahan berfikir yang seringkali didengungkan, tidak lebih dari sekedar propaganda.

Seperti telah kami katakan bahwa Muhammadiyah tidak hendak menyimpang dari metode pendidikan sosialnya, dan tidak pula terlibat dalam aktivitas politik, kecuali hanya beberapa tahun. Berbeda dengan NU yang memproklamirkan diri sebagai partai politik pada tahun 1953, dan berkecimpung dalam kegiatan kepartaian hingga tahun 1984. NU melakukan peran utama bersama pemerintah yang berkuasa, ikut berperan juga dalam pemerintahan Soekarno di bawah demokrasi terpimpinnya, sebagai unsur agama dalam Nasakom yang mencakup partai-partai Nasionalis, Agama dan Komunis. Pada tahun-tahun terakhir ini, NU mengalami sedikit kesulitan dengan pemerintahan militer Soeharto. Tujuan pokok dari NU adalah tetap *survive*, termasuk juga keberlangsungan pesantren-pesantrennya, dan seluruh anggota NU memperoleh perlindungan keamanan. Pada tahun 1974, untuk alasan-alasan yang akan kami sebutkan kemudian, menjadi jelaslah bahwa hidup matinya NU hanya bisa dipertahankan dengan menjadikan dirinya semata-mata sebagai lembaga pendidikan dan sosial, serta secara total menarik diri dari aktivitas partai politik (kembali ke khittah 1926. pent.)

Sekalipun kedua organisasi ini menggunakan cara-cara berbeda sejak berdirinya, namun perbedaan tersebut pada tahun-tahun terakhir ini kian menipis. Kini NU tampil sebagai kelompok konservatif, sedangkan Muhammadiyah tampil sebagai reformis di Indonesia. Kedua organisasi ini sekarang merupakan organisasi Islam yang berpengaruh besar di- Indonesia.

1-04 PARTAI POLITIK ISLAM

Pemilu 1955 diikuti oleh empat partai Islam. Pemilu ini merupakan satu-satunya pemilu yang berlangsung secara bebas dan demokratis dalam sejarah Indonesia. Sekalipun kaum muslimin merupakan 90% penduduk Indonesia, tetapi parpol Islam yang ikut serta dalam pemilu hanya menda-patkan kurang dari separuh suara yang masuk.

Golongan Islam abangan tidak mendukung parpol Islam, sebaliknya mereka mendukung partai nasionalis Indonesia (PNI) dan partai komunis Indonesia (PKI).

Mayoritas kaum muslimin memilih Masyumi dan NU. Masyumi mendapatkan 57 kursi dari 260 kursi di parlemen, sedangkan NU memperoleh 45 kursi saja. Suara NU itu diperoleh dari basis-basis NU di Jatim dan Jateng. Adapun Masyumi merata disebagian besar wilayah

Indonesia. Masyumi juga mendapat dukungan dari Muhammadiyah di Jateng dan Jabar serta pendukung lainnya yang bertebaran di propinsi lain.

Masyumi selalu menjadi anggota paling menonjol dalam kabinet pemerintahan pertama yang dibentuk sejak 1948 dan seterusnya. Kemu-dian memperoleh kursi Perdana Menteri berulang kali. Sekalipun kekuatannya semakin bertambah setelah pemilu 1955, tetapi pada periode selanjutnya mengalami kemerosotan. Partai ini terlibat di dalam gerakan daerah melawan pusat yang disponsori oleh Darul Islam. Perlawanan ini ditumpas oleh pemerintah pusat dan militer hingga keakar-akarnya. Masyumi juga beroposisi terhadap presiden Soekarno yang berkolaborasi dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Dengan bersikap oposan seperti itu, Masyumi akhirnya ikut serta dalam gerakan-gerakan revolusioner di Sumatera (PRRI) dan Sulawesi Selatan (Per-mesta). Tokoh-tokoh Masyumi yang menonjol bergabung dengan pemerintahan revolusioner di Sumatera Barat pada awal 1958. Pembelotan inilah yang dijadikan alasan oleh Jendral Abdul Haris Nasution untuk menumpas seluruh cabang Masyumi di daerah-daerah basis pemberontak pada tahun yang sama. Dua tahun kemudian, tahun 1960, Soekarno melarang aktivitas partai ini untuk selamanya.

Soekarno dan Nasution memaksakan didirikannya suatu pemerintahan koalisi dan secara diktatorial mengharuskan kembali kepada UUD 45, serta menyatukan tiga parpol, yaitu PNI, PKI dan NU dalam koalisi pemerintahan. Masyumi menjauhkan diri dalam koalisi tersebut dan tetap menjadi oposisi tunggal dalam menentang pemerintah yang beralih kepada demokrasi terpimpin.

1-05 NU DI BAWAH DEMOKRASI TERPIMPIN DAN PEMERINTAHAN BARU (NASAKOM)

Berbeda dengan pemimpin Masyumi yang berani bersikap oposan, pemimpin NU yang aktif di dalam politik nasional semasa demokrasi terpimpin berharap dapat bekerjasama dengan Soekarno dan militer. Idham Khalid, pemimpin NU dan tokoh yang paling menonjol di dalam partai ini memainkan peranan kunci di dalam bidang politik selama lebih dari 30 tahun, mulai sejak masa rezim Soekarno dan rezim diktator Soeharto. Pada tahun 1983, NU mengalami penyusutan peran politik, dan Idham Khalid ikut mengalami surut.

NU banyak sekali mendapatkan keuntungan dari kerjasamanya dengan pemerintah demokrasi terpimpin. Ia menguasai posisi Departemen Agama hingga keakar-akarnya. Juga mendapatkan *lisensi* istimewa untuk usaha pemberangkatan jama'ah haji, baik melalui laut maupun udara yang merupakan usaha sangat menguntungkan. Tetapi para Kiai menjauhkan diri dari trik-trik politik walaupun Kiai-lah yang menjadi basis NU; mereka membatasi diri sebagai pemimpin agama untuk melindungi kegiatan keagamaan setempat dari campur tangan kekuatan-kekuatan politik dan militer pusat. Sekalipun demikian, NU merupakan bagian dari koalisi Nasakom (Nasionalisme, Agama dan Komunisme) bersama-sama dengan PKI di Jakarta. Guna menyelamatkan kepentingan-kepentingan sosialnya, membuat NU selalu berkonfrontasi dengan golongan kiri di daerah-daerah pedesaan, karena tokoh-tokoh NU yang berada di desa-desa merupakan tuan-tuan tanah yang sangat menentang *landreform* yang dipelopori Soekarno. Barisan tani Indonesia (BTI) yang menjadi *onderbow* PKI menjadi tulang punggung dari gerakan pelaksanaan *land reform* yang kemudian menyebabkan timbulnya kon-frontasi antara NU dan golongan kiri. Organisasi Anshar tampil ke depan dengan menggunakan kekerasan menghadapi BTI dan gembongnya. Hal ini terjadi akibat dari undang-undang *landreform*. Peristiwa ini terjadi jauh sebelum Soeharto memegang kekuasaan. Kemudian muncullah peristiwa Oktober 1965. Soeharto menyalahkan PKI karena usahanya untuk melakukan revolusi, dan selanjutnya melakukan pembersihan serta penghancuran terhadap golongan kiri. Anggota-anggota Anshar berada pada barisan terdepan bersama dengan Angkatan Bersenjata membunuh orang-orang yang dicurigai sebagai PKI dan keluarga-keluarga mereka. Sedangkan peranan NU di dalam aksi pembantaian ini yang diperkirakan menelan 100.000 korban mengambil posisi sebagai pengkritik terhadap kejadian-kejadian yang berlangsung disaat itu. Hal ini terjadi setelah Soeharto memegang tampuk kekuasaan di tahun 1965. NU memperkirakan akan memperoleh banyak keuntungan dari dukungan yang diberikan terhadap pemerintahan militer, tetapi ternyata hal itu tidak menjadi kenyataan. Setelah militer berkuasa penuh, orang-orang militer banyak ditempatkan di dalam posisi-posisi yang tadinya diduduki oleh NU di dalam berbagai jabatan yang secara tradisional dipegang mereka. Namun NU tetap diperkenankan meneruskan kegiatannya seperti halnya partai-partai lain sesudah komunis dibubarkan dan secara berangsur-angsur NU pun mulai kehilangan eksistensi politiknya di pentas nasional.

Sekalipun demikian, pada pemilu tahun 1971 NU tetap memperoleh dukungan yang pernah diperolehnya pada pemilu 1955. Peranan partai-partai di dalam DPR, pemerintahan daerah dan pusat tenggelam di bawah kaum militer dan partainya yaitu Golkar atau pejabat-pejabat pemerintahan yang berbendera Golkar.

1-06 PARTAI MASYUMI

Besar kemungkinannya bahwa konfrontasi Masyumi dan rezim Soekarno membuat sekutu-sekutunya keheranan. Akan tetapi masalahnya tidak lagi demikian, sebab NU telah lama bergandeng tangan dengan Soekarno dan telah diterima pula oleh Soeharto melebihi penerimaannya terhadap Masyumi, sebuah partai yang telah menjadi penentang Soekarno. Oleh karena itu, pemimpin Masyumi pada akhir dasawarsa 1960-an berusaha untuk membangun partai baru, tetapi dihalangi oleh Soeharto dengan segala macam cara. Soeharto malah menganjurkan untuk membentuk partai lain dengan nama Parmusi (Partai Muslimin Indonesia). Parmusi akhirnya diakui oleh pemerintah, dengan syarat anggota-anggotanya tidak boleh aktif dalam jabatan-jabatan politik. Dengan cara inilah pemerintah berhasil mengganti Masyumi yang baru saja hendak dilahirkan, dengan partai lain yang akhirnya terpuruk.

Sebelum diadakan Pemilu, kalangan militer melakukan penelitian khusus (*Litsus*) terhadap para calon anggota parlemen, dan menolak mereka yang diragukan loyalitasnya pada pemerintah. Mayoritas calon dari Parmusi dianggap sebagai orang-orang yang masih memiliki ikatan emosional dengan Masyumi, oleh karenanya partai ini mengalami *litsus* paling ketat dari pihak inteljen. Dan hampir 75% dari calon yang diajukan ditolak.

Akan tetapi sebaliknya, hanya sedikit calon-calon dari NU yang ditolak, dan barangkali yang paling sedikit ditolak dibandingkan calon dari partai militer (Golkar), dan akhirnya dengan mudah Parmusi dapat dikalahkan dalam pemilu 1971. Para intelijen militer banyak yang menyusu ke kantor pusat Parmusi, dan akhirnya menyebabkan hancurnya organisasi-organisasi politik Islam yang masih tersisa.

Pada tahun 1973 Soeharto memaksa partai-partai Islam bergabung (*fusi*) menjadi satu di bawah bendera Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Di luar dugaan pemerintah, partai yang berfusi ini menjadi wadah bagi umat Islam, yang ternyata pengaruhnya jauh melebihi keempat partai anggotanya semula. Dan tahun 1977, PPP meraih kursi lebih banyak dibanding keempat partai sebelumnya pada 1971. Target partai Islam pada umumnya sudah jelas, namun sayang upaya-upaya politiknya sama sekali tidak mendukung perannya di DPR, apalagi di dalam menangani administrasi pemerintahan. Pada dasawarsa 1970-an NU yang merupakan organisasi pendukung PPP dengan jumlah pendukung terbesar di dalam tubuh PPP memperoleh lebih dari 60% kursi di DPR.

Partai Islam PPP menunjukkan kekuatannya ketika menentang UU perkawinan yang didukung pemerintah pada tahun 1973. Rencana undang-undang ini bermaksud mengatur masalah perkawinan sesuai dengan hukum sekuler yang oleh partai ini dianggap sebagai langkah pemerintah untuk menjauhkan Islam dari kehidupan sehari-hari umat-nya. Dalam persoalan ini seluruh partai Islam bersatu menghadapi pemerintah, hal ini merupakan awal perbenturan antara kaum muslimin dan golongan militer semenjak Soeharto naik ketampuk kekuasaan. Hal yang sangat menonjol dan jauh lebih penting ialah bahwa pemerintahan militer selalu memanfaatkan DPR untuk menelurkan undang-undang dengan prinsip musyawarah mufakat, sehingga tidak mungkin bagi partai-partai lain untuk melakukan penentangan terhadap setiap RUU yang diajukan. Sebagai akibatnya, kaum muslimin, terutama organisasi-organisasi pemu-danya mengalihkan penentangan mereka dari eksekutif kepada badan legislatif sebagai pembuat undang-undang, sehingga mereka kemudian menduduki gedung DPR selama beberapa jam. Agar tidak terjadi krisis berkepanjangan, akhirnya RUU perkawinan mengalami perubahan prinsipal. Sikap mengalah pemerintah ini membuat masyarakat Islam mempunyai pandangan sedikit berubah terhadap pemerintahan militer. Walau demikian, terjadi pula keributan-keributan lain semasa gerakan perlawanan para mahasiswa antara tahun 1974-1978 dimana kaum muslimin memainkan peran aktif di dalamnya.

Perlawanan terhadap pemerintah bukanlah merupakan agenda yang secara keseluruhan diterima oleh kaum muslimin. Ada pimpinan PPP yang memperlihatkan sikap berbeda, misalnya yang dilakukan oleh Idham Khalid, Ketua Umum NU. Mereka bekerjasama erat dengan penguasa militer, yang telah membantu mereka untuk mengalahkan Parmusi. Dan mereka berhasil duduk di pusat pimpinan PPP, walaupun dukungan mereka lemah. Namun negara memberikan kepada mereka berbagai fasilitas materi sehingga mereka memperoleh keleluasaan yang dapat "membeli" dukungan Kiai lokal. Persoalannya kemudian menjadi lebih semrawut ketika militer, melalui Golkar berhasil melakukan trik-trik tertentu merayu para ulama masuk ke dalam Golkar. Akhirnya Golkar dapat membentuk sebuah organisasi Islam bernama GUPPI (Gabungan Usaha Pengembangan, Pendidikan Islam). Dalam usahanya untuk memperoleh dukungan kaum muslimin, Golkar pada pemilu 1971 lebih banyak menampilkan warna santri daripada abangan. Dalam pemilu ini banyak Kiai yang terpilih, sebagai imbalannya Golkar mengirimkan banyak pegawai negeri ke Mekah untuk memperoleh gelar haji dengan biaya pemerintah. Bantuan-bantuan keuangan banyak diberikan ke masjid dan pesantren guna melakukan renovasi dan menaikkan pamor anggota-anggota Golkar dari kalangan Islam. Para perwira militer setempat turut pula menyumbang sejumlah uang untuk mendirikan masjid baru guna menciptakan hubungan baik dengan kaum muslimin. Pemerintah Indonesia juga mengambil peran positif di dalam konferensi negara-negara Islam (OKI), guna memberikan gambaran kepada dunia luar mengenai posisi kaum muslimin di dalam negeri, bahwa kaum muslimin, tentunya tidak hanya sebatas Muhammadiyah dan NU saja.

1-07 INTERVENSI PEMERINTAH TERHADAP PPP

Akibat kemajuan yang diperoleh PPP dalam Pemilu 1977, pemerintah merasa yakin bahwa rekayasanya untuk menggagalkan organisasi-organisasi Islam dan menguasai partai tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu, pemerintah mengambil keputusan untuk merubah format PPP agar menjadi alat yang loyal. Pemerintah memperkenankan tetap berdirinya partai-partai kecil, kecuali PKI agar sistem diktatornya dapat terlihat sebagai sesuatu yang demokratis dengan adanya banyak partai. Terutama sekali partai-partai ini dibiarkan untuk mengambil peran pinggiran dan selalu memberi dukungan penuh kepada pemerintah. Setelah pemilu 1977, secara umum strateginya mengarah kepada campur tangan (intervensi) ke dalam urusan internal partai. Misalnya, dengan cara memasukkan pegawai-pegawai negeri ke dalam partai-partai itu, dan duduk sebagai pimpinan teras, walau dengan jalan memberi suap dan mengintimidasi orang-orang dengan berbagai cara ilegal. Hal ini dimaksudkan untuk meyakinkan bahwa orang-orang yang berani menentang pemerintah pasti akan tersingkir.

Tipu daya ini dengan mudah dapat diamati setelah terjadinya fusi partai-partai secara paksa. Pada saat yang bersamaan dengan digabung-kannya partai-partai Islam ke dalam PPP, maka pemerintah juga meminta kepada partai-partai nasionalis dan Kristen untuk melakukan fusi dengan membentuk PDI (Partai Demokrasi Indonesia). Partai-partai ini dengan cepat menerimanya atas saran pemerintah yang pandai melakukan tipu daya ini. Adapun PPP masalahnya berlainan, karena kepribadiannya berbeda. Sejak awal terlihat bahwa banyak kesulitan yang dihadapi untuk menerima rencana pemerintah ini, dan pemerintah tidak mungkin melakukan tekanan penuh terhadap partai ini kecuali setelah tahun 1984. Pada akhir dasawarsa 1970-an ada beberapa pendapat yang bermaksud untuk melemahkan internal PPP. Akan tetapi para tokoh politik NU menentang rencana undang-undang ormas dan orpol yang diajukan kepada MPR, sebagai lembaga tertinggi untuk membuat gagasan baru yang ingin memaksakan asas baru yang disebut Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi seluruh bangsa. Para Kiai semakin gusar terhadap Soeharto yang dikultuskan sedemikian rupa, seperti diangkatnya Soeharto sebagai Bapak Pembangunan dan dicalonkannya dia untuk jabatan Presiden yang ketiga kalinya. Pertentangan ini semakin mendalam, dan puncaknya mencuat tatkala Parmusi sebagai eksponen PPP yang kemudian disebut dengan MI (Muslimin Indonesia) membuat daftar calon PPP dalam pemilu 1982. Dalam membuat daftar calon sama sekali tidak menyertakan unsur-unsur lain dari PPP. Tujuannya adalah menyingkirkan calon-calon NU yang bersikap oposan dan menutup segala pintu yang memungkinkan masuknya orang-orang NU ke dalam parlemen. Dan usaha-usaha yang dilakukan NU untuk membatalkan keputusan ini tidak membawa hasil sedikitpun.

Pengusuran semacam ini membuat anggota-anggota NU yang kritis mengajukan gagasan untuk meninggalkan partai dan kehidupan politik serta menarik diri dari PPP dan kembali kepada khittah 1926. KH. Abdurrahman Wahid memimpin kelompok yang mendukung pengunduran diri NU dari PPP. Dia adalah cucu pendiri organisasi ini, dan salah seorang alumni pesantren. Akan tetapi para politikus partai di Jakarta di bawah pimpinan Idham Chalid menentang gagasan pengunduran diri. Sebagai puncak pertentangan ini, pemerintah kemudian mengeluarkan RUU yang mewajibkan setiap orpol dan ormas menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal seluruh bangsa. RUU ini baru berhasil menjadi undang-undang pada tahun 1985 sehingga memunculkan perselisihan baru antara kaum muslimin dan pemerintah.

Setelah beberapa bulan NU mengadakan konferensi, maka pada akhir 1983 dengan teras terang Abdurrahman Wahid menyerukan supaya kembali kepada khittah 1926. Namun pengunduran diri NU dari arena politik, tidak berhasil menyelesaikan persoalan partai dalam melakukan kerjasama dengan pemerintah. Sebaliknya kelompok Abdurrahman Wahid berusaha untuk mendekati Soeharto agar mengizinkan diberlang-sungkannya muktamar nasional, dimana Abdurrahman Wahid berposisi terhadap kepemimpinan Idham Chalid. Soeharto merasakan adanya keuntungan, dalam melakukan kolaborasi dengan para Kiai lokal yang mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan, daripada bergantung kepada tokoh politik Jakarta yang berada di sekeliling Idham Chalid. Para tokoh ini hanya mewakili kepentingan dirinya sendiri, dan beberapa orang lainnya yang hanya melakukan kritikan kepada pemerintah.

Delegasi kedua NU pimpinan Gus Dur, tidak merasa berkeberatan untuk menerima Pancasila sebagai asas partai. Hal ini dilakukan oleh NU jauh sebelum pemerintah mewajibkannya, dan jauh sebelum NU bergabung ke dalam PPP telah dapat mengadakan kontak langsung dengan pejabat pemerintah. Abdurrahman Wahid biasa mondar-mandir ke istana negara untuk menghadap presiden Soeharto dan secara teratur datang menemui petinggi-petinggi militer khususnya Panglima ABRI, Jendral Beny Murdani. NU yang telah menjauhkan diri dari politik, berubah menjadi alat politik yang loyal pada pemerintah, sehingga mereka kemudian mengabdikan kepada kepentingan politik pemerintah.

Akan halnya PPP minus NU merupakan kekuatan yang tidak berarti, apalagi kemudian terkoyak-koyak menjadi kelompok-kelompok yang saling bersaing. Dengan bersediannya menerima asas tunggal, mereka kemudian mengikuti pemilu tetapi dalam kondisi lemah seperti yang dialami PDI. Tak seorangpun menilai bahwa PPP mencerminkan semangat politik Islam. NU meminta anggotanya menggembosi PPP menjelang diadakannya pemilu, sehingga mengakibatkan tak seorangpun memberikan suaranya. Dengan demikian NU merasa yakin bahwa tidak ada lagi partai politik di Indonesia yang mewakili kepentingan umat Islam. Ketika

PPP tidak lagi menampakkan simbol-simbol ke-Islaman, maka dia sudah dianggap bukan merupakan partai Islam lagi. Golkar sebagai partai militer dengan penuh kegigihan berusaha untuk menjadi corong Islam di Indonesia. Kami katakan dengan sebenarnya, bahwa umat Islam yang bergabung di Golkar jauh lebih banyak dibandingkan yang ada di partai-partai lain.

Ketika wakil ketua Golkar, Drg. Abdul Ghafur, menguasai koran Pelita, korannya PPP, maka kenyataan ini menjadi lebih jelas. Dengan demikian kini telah menjadi kenyataan bahwa benar-benar kaum muslimin sudah tidak terwakili dalam percaturan politik pada umumnya.

1-08 HANCURNYA PEREKONOMIAN UMAT ISLAM

Pada saat kaum muslimin merasa dirinya unggul, ternyata mereka mengalami kegagalan besar dalam bidang perdagangan dan perindustrian. Harta kekayaan mereka hancur sejak republik ini diproklamlirkan, dan baru dapat dibangun kembali sekitar 20 tahun terakhir ini. Ini semua disebabkan oleh faktor sejarah. Penyebab kehancuran ekonomi ini mempunyai akar sejarah yang panjang, yaitu persaingan mereka dengan Cina.

Sejak abad 19 kaum muslimin bergerak dibidang perdagangan kecil-kecilan, dan memproduksi barang-barang sederhana serta melakukan pemberian kredit pada para petani. Namun usaha mereka ini menghadapi persaingan berat dari pengusaha-pengusaha Cina yang lebih kuat dan lebih mampu.

Organisasi politik yang pertama kali didirikan oleh umat Islam adalah Sarikat Dagang Islam (SDI) pada tahun 1909, kemudian berubah menjadi Syarikat Islam pada tahun 1912. Salah satu tujuan organisasi ini adalah menghadapi persaingan dengan Cina. Pada tahun-tahun pertama berdiri Republik Indonesia, program pemerintah berkisar pada upaya pemerintah memperkuat posisi pribumi menghadapi Cina. Tetapi keadaan ekonomi secara umum, utamanya kenaikan-kenaikan harga menyebabkan tidak berhasilnya upaya pertumbuhan ekonomi. Politik yang paling populer yaitu politik Benteng (1950-1958), yang bertujuan memberikan kemudahan-kemudahan kepada importir pribumi mendapatkan berbagai fasilitas, selama badan-badan usaha pribumi tersebut tidak terdapat saham Cina didalamnya. Namun dengan cepat program ini diselewengkan. Partai-partai politik yang mempunyai pengaruh besar di tubuh pemerintah mengeluarkan *lisensi* kepada kolega-kolega dekatnya lalu menjual *lisensi* itu pada orang lain. Pada saat politik Benteng ini dihapuskan tahun 1958 tidak satupun industri dan perusahaan-perusahaan pribumi yang lebih baik keadaannya dari semula. Di bawah demokrasi terpimpin yang menjadikan negara sebagai kendali ekonomi ternyata tidak mampu membangkitkan semangat mereka untuk menjadi tuan di negerinya sendiri di bidang perekonomian.

Dengan lahirnya Orba, para politikus yang menentang sistem ekonomi di bawah pemerintahan demokrasi terpimpin, yang umumnya mereka adalah orang-orang Masyumi, menginginkan perubahan dari ekonomi yang dikendalikan oleh negara kearah ekonomi bebas. Hal ini hanya terjadi dalam hal-hal tertentu dan pada saat bersamaan, Indonesia membuka pintu selebar-lebarnya bagi penanaman modal asing, di samping mempergunakan bantuan-bantuan asing untuk mengimpor barang-barang konsumtif. Banyak jenderal dan tentara yang memegang posisi di dalam pemerintahan, berkolusi dengan tokoh-tokoh pengusaha Cina. Kolusi ini berlangsung pada masa berlakunya pemerintahan demokrasi terpimpin. Mereka melakukan semua ini untuk memperoleh sumber-sumber pendapatan negara disamping untuk kepentingan pribadi.

Perusahaan-perusahaan pribumi mengalami pukulan hebat, sehingga tidak sanggup lagi bersaing dengan barang-barang konsumtif import yang begitu tinggi. Lebih-lebih kurangnya fasilitas dan akses ke bank-bank pemerintah. Gerakan oposisi yang ditampilkan kelompok mahasiswa dan kaum terpelajar pada tahun 1973 dan 1974 adalah pencerminan dari kegagalan yang sejak semula diharap-harap oleh tokoh-tokoh nasionalis. Salah seorang tokoh Masyumi, Syafruddin Prawiranegara, mantan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Central adalah salah seorang tokoh yang menonjol dalam memberikan kritik terhadap kebijakan ekonomi pemerintah pada awal dasawarsa 1970-an, tetapi pemerintah Soeharto menjawab kritikan tersebut dengan mengadakan revolusi politik yang kemudian menghasilkan gerakan oposisi pada tahun 1974, yang bertujuan melindungi kepentingan tokoh-tokoh aktivis nasionalis. Kemudian terbukti di belakang hari, bahwa orang-orang yang menuai hasil dari gerakan ini hanyalah mereka yang dekat dengan militer dan tokoh-tokohnya.

Di bawah orde baru terdapat sejumlah kecil keluarga yang memperoleh peluang besar di dalam mengemudikan rencana bisnisnya, seperti memiliki saham-saham pada beberapa perusahaan penanaman modal, baik di dalam maupun di luar negeri. Disisi lain mereka melakukan kolusi dengan tokoh-tokoh pengusaha Cina dalam pengembangan perekonomian-an. Contoh yang paling jelas merajalelanya kapitalisme di zaman orde baru, adalah keluarga Soeharto sendiri. Kenyataan ini sama sekali tidak mendekatkan jurang pemisah antara kelas menengah kaum muslimin dan golongan buruh kecil yang merasa dirinya jauh dari kegemerlapan ekonomi. Yang dapat menikmati kemajuan ekonomi hanyalah kalangan keluarga pembesar Indonesia dan konglomerat Cina. Ekonomi di zaman orde baru perkembangannya tidak terlepas dari akar sejarah lama, segolongan kaum militer mengambil harta kekayaan dari tauke-tauke besar seperti Liem Swi liong dan Bob Hasan, dua orang sahabat dekat Soeharto, dengan cara tidak langsung berhubungan dengan Soeharto dan anggota keluarga lainnya.

1-09 GELOMBANG BARU GERAKAN ISLAM

Sebagaimana yang terjadi di negara-negara lain, di Indonesia pun Islam mengalami kebangkitan di banyak kota. Di desa-desa muncul masjid-masjid dengan suburnya, sebagian besar pengunjunnya adalah kalangan muda, baik dari keluarga kaya maupun keluarga miskin. Hal semacam ini tidak sulit untuk ditafsirkan sebagai kebangkitan Islam. Kenyataan ini sangat berlawanan dengan terjadinya perubahan-perubahan sosial yang cepat di Indonesia sejak dasawarsa 70-an, ketika minyak merupakan sumber pendapatan yang melimpah tetapi dinikmati oleh segolongan kecil warga masyarakat. Pola kehidupan barat tersebar di kalangan penduduk-penduduk pedesaan yang kaya raya, dan menghadirkan peradaban asing yang kontroversial. Namun nilai-nilai spiritual masih mampu mengalahkan nilai-nilai materialis. Pada saat yang sama sebagian pemuda Islam menuntut ilmu ke berbagai tempat di Timur Tengah, diantaranya Cairo, Damaskus dan Bagdad. Mereka kemudian pulang ke negerinya dengan membawa pandangan baru tentang posisi Islam di dunia ini.

Dari sisi kekuasaan, gerakan-gerakan ini mengandung cikal bakal revolusi, yang berarti ancaman serius terhadap stabilitas kekuasaan negara. Setelah bertahun-tahun penguasa dapat menghancurkan golongan kiri, kemudian Soeharto naik ke puncak kekuasaan, kini para penguasa itu bersiap-siap untuk mengarahkan bidikannya kepada kelompok, yang mereka namakan ekstrimis muslim serta ekstrimis-ekstrimis lainnya.

Gelombang baru gerakan Islam menyebar ke berbagai bidang aktivitas keagamaan, sosial dan politik. Muncullah studi-studi Qur'an, dan gerakan *back to mosque* (kembali ke masjid). Di setiap masjid muncul kelompok-kelompok "ekstrimis" yang menyuarakan pandangan-pandangan politiknya. Banyak dari kebijakan-kebijakan pemerintah menjadi sasaran kritik mereka. Di sini muncul perhatian yang besar terhadap usaha perjuangan kaum muslimin dalam menentang penjajahan pemerintahan republik, termasuk di dalamnya adalah jama'ah Darul Islam, yang mulai mengumandangkan seruannya untuk mendirikan Negara Islam.

Sejak dasawarsa 1970-an, muncul demonstrasi-demonstrasi umat Islam menentang undang-undang perkawinan, dan asas tunggal Panca-sila yang dipaksakan kepada rakyat. Seluruh gerakan ini dipimpin oleh generasi muda Islam.

1-10 HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)

Salah satu organisasi kecil tetapi sudah lama memiliki peran positif dalam situasi baru yang sedang bergolak, adalah HMI. Organisasi ini secara prinsip mempunyai hubungan dengan Masyumi, tetapi pada dasawarsa 1950-an, HMI melepaskan diri secara resmi dari Masyumi, sekalipun tetap memiliki hubungan erat secara emosional. Di bawah pemerintahan Soekarno, HMI mulai menunjukkan tradisi baru dengan bersikap oposan pada pemerintah. HMI merupakan organisasi mahasiswa paling kuat di negeri ini. Dari organisasi inilah muncul banyak tokoh-tokoh Islam dan tokoh-tokoh cendekiawan Indonesia dewasa ini. Pada tahun-tahun terakhir demokrasi terpimpin, organisasi ini menghadapi serangan terus menerus dari kelompok kiri, yang dengan segala daya berusaha menyulut perselisihan antara HMI dan Masyumi, tetapi tidak berhasil. Setelah Soeharto berkuasa tahun 1965, organisasi ini merupakan pelopor pembentukan *front* kesatuan aksi mahasiswa yang memperoleh dukungan di kota-kota besar untuk membantu militer dalam melawan komunis. HMI tidak beraliansi ke partai politik manapun, juga tidak menjadi bagian dari Partai Persatuan Pembangunan. Mereka tetap memelihara independensinya, tetapi menjalin kerjasama dengan pemerintah.

Pada pertengahan dasawarsa 1970-an, HMI menunjukkan kemahirannya yang hebat dalam menghadapi NKK (Normalisasi Kehidupan Kampus). Tokoh-tokoh cendekiawan muslim yang menonjol dahulunya adalah aktivis dari organisasi ini atau pemimpinnya. Organisasi ini banyak berhasil dalam melakukan kerjasama dengan pemerintah, misalnya Abdul Ghafur menjadi menteri pemuda dan Olah Raga, demikian pula Akbar Tanjung yang menjadi wakil ketua Golkar.

Di antara organisasi Islam yang ada, maka HMI adalah satu-satunya organisasi yang dengan keras menentang pemaksaan asas tunggal diberlakukan pada organisasinya. Setelah muktamar nasional tahun 1983, seringkali HMI melontarkan penolakan secara total terhadap tuntutan pelaksanaan asas tunggal bagi organisasinya, sekalipun berkali-kali mendapat ancaman dari Abdul Ghafur, mantan ketua HMI Cabang Jakarta. Namun tekanan dan ancaman ini akhirnya berhasil menaklukkan sebagian besar cabang-cabang HMI di daerah dan membuat cabang-cabang sisanya tunduk di bawah tekanan. Berdasarkan kenyataan ini, maka dibuatlah pengurus-pengurus cabang baru sebagai tandingan bagi pengurus lama, sehingga penerimaan asas tunggal lebih bersifat rekayasa daripada ketulusan. Oleh karena itulah banyak rekayasa, intervensi dan pemaksaan dilakukan terhadap pengurus-pengurus cabang, sehingga tatkala mereka mengadakan muktamar tahun 1986, HMI bersedia menerima asas tunggal. Beberapa saat sebelum muktamar ini dilakukan, Jend. Beny Murdani mengumumkan, bahwa organisasi apa saja yang menolak Pancasila harus memikul resiko dan pergi meninggalkan Indonesia.

Meskipun demikian, beberapa cabang yang ada di berbagai perguruan tinggi di kota-kota besar memisahkan diri dari organisasi pusat, dan tidak mau menerima hasil kongres bahkan

mendirikan organisasi tandingan yang disebut MPO (Majelis Penyelamat Organisasi) dan mengaku mempunyai pendukung sebanyak 23.000 anggota.

1-11 GERAKAN AKTIVIS MASJID DAN KELOMPOK PENGAJIAN

Masjid merupakan basis utama gerakan Islam baru serta berbagai kelompok keagamaan yang dikenal dengan nama pengajian. Istilah ini diberikan kepada kelompok pengajian yang berbagai macam itu, dimana kegiatannya terutama membaca Al-Qur'an, mengadakan pengajian dengan kelompok-kelompok kecil di rumah, masjid maupun tempat umum. Banyak penceramah keliling yang dikenal dengan nama muballi-gh. Mereka ini berperan untuk menarik jumlah pengunjung yang besar ke dalam pengajian-pengajian yang diadakan di masjid atau tempat lain. Kegiatan semacam ini tersebar di berbagai pelosok negeri. Sebagian besar muballigh ini berasal dari kelompok yang dihormati, yang tidak berbicara masalah-masalah yang bernuansa politis dan sosial yang riel, yang diang-gap dapat membuat pendengar emosi. Nasionalisme para muballigh ini bertambah besar ketika menyaksikan aktivitas parpol menurun. Dan masjid berbeda dengan gereja, karena gereja merupakan bagian dari sistem gereja nasional/wilayah (paroki). Sedangkan masjid merupakan institusi independen. Oleh karena itu kegiatan masjid bersifat lokal, dan tidak memerlukan koordinasi dengan hirarkhi tertinggi baik lokal ataupun nasional. Dewasa ini masjid-masjid banyak dikuasai oleh harakah-harakan pemuda, menggantikan posisi pengurus atau ta'mir yang birokratis dalam melaksanakan aktivitas masjid. Koordinasi pemuda ini biasanya diberi nama Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid (BKPRM). Masjid-masjid yang dikelola oleh para pemuda-remaja ini seba-gian besar terdapat di Jakarta dan sekitarnya, sehingga mereka ini dikenal dengan sebutan hizamul ahdhar (Selendang hijau). Warna Hijau diasosiasikan sebagai simbol Islam. Masjid inilah yang merupakan tempat me-nyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah.

Gerakan baru ini tidak mengenyampingkan usaha mempersiapkan metoda-metoda pendidikan keagamaan yang disampaikan melalui masjid dan masyarakat. Gerakan ini juga melakukan diskusi-diskusi politik, penerbitan buletin dan buku-buku kecil yang kritis. Melalui masjid-masjid kampus, juga muncul pusat-pusat gerakan mahasiswa.

1-12 UPAYA PENGEBIRIAN GERAKAN BARU

Pemerintah mulai melakukan sejumlah tindakan, yang bertujuan memati-kan gerakan baru ini. Soeharto dan konco-konconya menempuh cara-cara yang dahulu pernah digunakan oleh penjajah Belanda terhadap Islam. Penjajah Belanda dahulu berpendapat, Islam perlu diberi kebebasan melakukan ibadah, bahkan diberi vasilitas, selama umat Islam hanya menjalankan ritualitas keagamaan saja. Akan tetapi, jika sekarang kaum muslimin mulai menyusun langkah-langkah politik, maka harus ditindak tegas.

Sebelum pemilu 1977, PPP mempunyai optimisme besar dalam diri-nya. Karena itu beberapa jenderal bersekongkol untuk melakukan makar, diantaranya dengan melakukan dua rencana, yang pertama, menampil-kan Golkar sebagai front Islam. Untuk itu mereka menyogok beberapa orang ulama untuk bergabung ke dalam Golkar. Tugas ini dibebankan kepada Amir Murtono, seorang tokoh yang menonjol di Golkar. Langkah kedua, menugaskan seorang tokoh baru intelijen militer bernama Ali Murtopo untuk memancing aktivis muslim melakukan tindakan kriminal dan menimbulkan kerusuhan.

Kedua manuver politik tersebut terus berjalan hingga hari ini, sekalipun PPP sudah tidak memiliki kemampuan apa-apa, tetapi yang menjadi sasaran utama operasi ini adalah kelompok-kelompok kecil inde-penden yang mulai bermunculan.

Operasi pertama Ali Murtopo adalah merekrut mantan aktivis gerakan Darul Islam. Setelah dibebaskan dari penjara pada awal dasa-warsa 1960-an, dan sebulan sebelum berlangsungnya Pemilu bulan Juli 1967, segala tindakan mereka senantiasa dalam pengawasan militer. Panglima Kopkamtib, Laksamana Soedomo mengumumkan, bahwa ada sekitar anggota kelompok Komando Jihad telah ditangkap di Asahan (Sumatera Utara), Riau, Lampung (Sumatera Selatan), Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Mereka yang tertangkap ini adalah para pendukung Darul Islam. Beberapa tahun setelah diadili, sebagian dari mereka mengungkapkan dengan penuh penyesalan bahwa mereka dahulu telah diperalat oleh BAKIN (Badan Koordinasi Intelijen) mela-kukan operasi-operasi khusus. Akan tetapi Ali Murtopo membantah adanya tim semacam itu di tubuh BAKIN. Tujuan utama dimunculkan-nya isu KOMJI (Komando Jihad) sebenarnya untuk memberikan kesan kepada masyarakat, bahwa gerakan teroris itu memang ada; dengan demikian umat Islam merasa tercekam, dihantui rasa ketakutan. Operasi yang dilakukan oleh badan intelijen semacam ini merupakan alat politik rezim Soeharto. Pengumuman tentang berbagai komplotan teroris yang diissukan itu berlangsung dalam kondisi tertentu, yaitu bila menghadapi peristiwa-peristiwa politik penting, misalnya menjelang pemilu, atau pemilihan presiden, pengajuan RUU kepada DPR karena pada moment seperti ini suhu politik semakin memanas. Kelompok-kelompok yang dituduh melakukan kegiatan teror terbukti di kemudian hari, umumnya adalah orang-orang yang direkrut melalui rekayasa dan tipu daya. Dan

penyelesaian perkaranya di persidangan, hanya didasarkan pada BAP (Berita Acara Pidana) yang dibuat oleh penyidik.

Terdapat rangkaian panjang dari “operasi teroris” yang tidak pernah sekalipun terungkap kepermukaan, tetapi orang-orangnya tetap diseret ke pengadilan, kemudian menjerumuskan aktivis gerakan muslim. Pernah disiarkan secara terperinci tentang gerakan teror yang direkayasa bebe-rapa hari sebelum berlangsungnya SU MPR 1978, ketika pemerintah pertama kali mengambil langkah untuk memaksakan Pancasila diterima sebagai asas tunggal bagi kehidupan berbangsa. Pada awal dasawarsa 1980-an ada dua kelompok Islam yang disebut sebagai ekstrim dan dituduh hendak melakukan kegiatan teroris. *Pertama*, adalah kelompok Warman yang dituduh telah melakukan banyak pembunuhan. Tapi ternyata tidak terdapat bukti sedikitpun yang membenarkan tuduhan itu. Sebab Warman telah terbunuh oleh ABRI ketika tempat persembunyiannya diserbu pada tahun 1981. *Kedua*, kelompok Imran bin Muhammad Zein, yang dituduh melakukan serangan terhadap salah satu markas polisi di Cisendo Jawa Barat dan menewaskan tiga orang petugas. Kemudian kelompok ini membajak pesawat pada bulan Maret 1981. Penyelidikan atas kasus ini tidak pernah tuntas karena para pembajaknya mati tembak di tempat. Lima orang ditembak ketika pasukan menyebu pesawat dan orang keenam ditembak saat berada dalam tahanan.

Di persidangan terungkap bahwa kelompok Imran hanya diperalat oleh badan intelijen untuk mendeskreditkan kaum muslimin. Akan tetapi masalah ini belum pernah dibuktikan secara valid. Berbagai tuduhan yang dilontarkan kepada Warman dan Imran mencapai puncaknya bersamaan dengan pemilu 1982.

Pada tanggal 4 Maret 1983, sebelum Soeharto terpilih kembali sebagai presiden, para tokoh Islam di Jawa Timur menjadi sasaran penculikan yang dibeking militer. Hal ini berjalan selama berbulan-bulan sehingga menewaskan ratusan orang. Penyelidikan terhadap kasus-kasus penculikan ini ternyata tidak menghasilkan apa-apa. Sebab para tokoh Islam di wilayah ini merasa ketakutan untuk mengungkapkan apa yang mereka ketahui tentang diri para korban dan para penjahat yang melakukan penculikan.

Para muballigh Islam ini selalu menjadi sasaran intimidasi, mereka sering mendapatkan peringatan agar menyerahkan teks khotbah sebelum disampaikan kepada umat. Ada sementara muballigh yang di *black list* dan nama-nama mereka dikirimkan kepada takmir masjid agar tidak menggunakan muballigh tersebut. Pada suatu ketika militer memaksa salah seorang muballigh yang ketika itu namanya demikian populer tetapi selalu menyampaikan kritik terbuka kepada rezim penguasa, namun dia menolak lalu diculik oleh beberapa orang perwira dan dipukuli hingga babak belur. Para penasehat hukum yang bermaksud melakukan pembe-laan menemui para perwira yang melakukan penculikan, dan juga menemui Laksamana Soedomo, tetapi akhirnya para penasehat hukum ini disuruh supaya mengundurkan diri dari kasus tersebut.

Muballigh yang dimaksud dalam kasus di atas bernama AM. Fatwa, anggota pendiri Petisi 50, yang didirikan bersama para politikus muslim dan nasionalis, pada awal tahun 1980.

Gerakan Islam terus bermunculan, sekalipun tekanan dari pemerintah untuk memaksa mereka menerima asas tunggal, datang bagai gelombang dahsyat. Ketika undang-undang ini diumumkan, sejumlah muballigh membuat lembaga baru yang disebut dengan Korp Muballigh Indonesia (KMI). Pimpinannya terdiri dari tokoh-tokoh Islam terkenal, seperti mantan pimpinan Masyumi dan mantan wakil PM, Syafruddin Prawira-negara dan AM. Fatwa. Pemaksaan asas tunggal ini semakin membuat marah kaum muslimin. Penentangan yang keras terhadap undang-undang ini mendorong rezim penguasa untuk melakukan tindakan-tindakan kejam terhadap para aktivis muslim. Seorang komandan Koramil di wilayah Dokland daerah Tanjung Priok Jakarta Utara, sengaja mempro-vokasi kaum muslimin agar melakukan unjuk rasa menuntut pembebasan empat orang takmir masjid yang ditahan, tetapi oleh pihak militer dijawab dengan brondongan senjata berat secara keji tanpa peringatan lebih dahulu sehingga mengakibatkan ratusan orang terbunuh dan luka-luka.

Para penandatangan Petisi 50 menuntut tanggung jawab pemerintah atas terjadinya peristiwa tersebut. Mereka mengeluarkan buku putih yang menyerukan agar diadakan penyelidikan terhadap peristiwa pembantaian tersebut. Pada saat bersamaan terjadi serangkaian pengeboman dan pembakaran di beberapa kota. Ratusan orang kemudian ditangkap dengan tuduhan menyebarkan buku putih yang illegal. Mengenai pembantaian tersebut dan orang-orang yang dituduh melakukan peledakan bom, sebagian besar dari mereka adalah para muballigh. Mereka dijatuhi hukuman berat karena menyampaikan khotbah yang ekstrim. Dan semakin banyak dilakukan persidangan-persidangan terhadap sejumlah orang dengan berbagai tuduhan, sebagian dari mereka adalah orang-orang yang memang taat beragama yang dituduh melakukan komplotan untuk menggulingkan Soeharto.

Persidangan kasus Tanjung Priok dimulai bulan Januari 1985, dan terus berlangsung selama dua tahun bersamaan dengan pemilu yang jatuh pada bulan April 1987 serta pemilihan kembali Soeharto sebagai presiden pada tahun 1988. Dan barangkali persidangan ini akan terus dilanjutkan selama dua tahun lagi.

Bab 02 Persidangan Kasus Tanjung Priok

Soeharto, Presiden RI 1966-1998 :

“Peristiwa Tanjung Priok adalah hasil hasutan sejumlah pemimpin di sana. Melaksanakan keyakinan dan syari’at agama tentu saja boleh. Tetapi kenyataannya ia mengacau dan menghasut rakyat untuk memberontak, menuntut dikeluarkannya orang yang di tahan. Terhadap yang melanggar hukum, ya, tentunya harus diambil tindakan”. (Buku Soeharto: Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya, 1989)

TANJUNG PRIOK, sebuah daerah di Jakarta tempat kapal-kapal berlabuh, termasuk salah satu daerah miskin dan kumuh. Daerah ini menjadi tempat orang-orang desa dan pulau-pulau yang berdekatan guna mencari penghidupan, supaya mereka dapat hidup di kota Jakarta. Tempat ini penuh sesak oleh penduduk. Berdasarkan sensus kependudukan, Tanjung Priok merupakan daerah paling padat, di mana setiap meter persegi dihuni oleh sembilan orang. Apakah sensus ini benar atau salah, yang pasti daerah ini dipadati oleh penduduk yang aktivitasnya non stop dua puluh empat jam. Warung-warung dan bar-bar buka setiap malam.

Dalam salah satu persidangan kasus Tanjung Priok, salah seorang pembela menerangkan bahwa daerah ini dikitari jalan-jalan sempit serta ratusan gubuk-gubuk yang saling berhimpitan. Dan mayoritas penduduknya tinggal di bangunan-bangunan sederhana yang terbuat dari bahan-bahan bekas pakai.

Koja, sebuah lokasi di mana peristiwa Tanjung Priok terjadi, merupakan daerah hunian kaum buruh galangan kapal, buruh-buruh pabrik, bangunan dan buruh-buruh harian yang dikenal dengan “pekerja serabutan”. Kerja perbaikan kapal merupakan kerja pokok di tempat ini. Tanjung Priok sangat terpengaruh oleh gejolak ekonomi dan mudah sekali tersulut berbagai isu. Penduduknya yang sangat padat, perputaran barang-barang keluar masuk yang dikirim ke tempat-tempat lain di pulau Jawa demikian banyak. Selain itu, tempat yang sangat miskin ini berdampingan pula dengan rumah-rumah mewah yang dijaga oleh anjing-anjing galak. Padahal daerah ini dihuni oleh berbagai golongan penduduk yang berbeda-beda budayanya, seperti Banten, Jawa Barat, Madura, Bugis, Sulawesi. Dan semua daerah yang telah disebutkan, sangat dipengaruhi oleh kultur Islam.

Di daerah semacam Tanjung Priok, masjid merupakan barometer kehidupan, tempat berkumpulnya orang-orang tua dan anak-anak serta tempat melepas lelah dari kepenatan kerja di jalan-jalan dan lorong-lorong. Segala keruwetan masalah menjadi pusat pembicaraan dan omongan diantara para jama’ah masjid.

Pada pertengahan 1984, beredar isu tentang RUU organisasi sosial yang mengharuskan penerimaan asas tunggal. Hal ini menimbulkan implikasi yang luas. Di antara pengunjung masjid di daerah ini, terdapat seorang muballigh terkenal, menyampaikan ceramah pada para jama’ahnya dengan menjadikan masalah tersebut sebagai topik pembahasan, sebab rancangan undang-undang tersebut telah lama menjadi masalah yang kontroversial.

Pada suatu hari, 7 September 1984, seorang Babinsa datang ke mushalla kecil bernama “*Mushalla As-Sa’adah*” dan memerintahkan untuk mencabut pamflet yang berisikan tulisan mengenai problem yang dihadapi kaum muslimin, dan disertai pengumuman tentang jadwal pengajian yang akan datang. Tidak heran jika kemudian orang-orang yang hadir disitu menjadi marah melihat tingkah laku Babinsa itu. Pada hari berikutnya Babinsa tadi kembali lagi bersama seorang prajurit untuk mengecek, apakah perintahnya telah dilaksanakan atau belum. Setelah kedatangan kedua ini muncullah isu yang menyatakan bahwa, militer telah menginjak-injak kehormatan tempat suci, karena masuk ke mushalla tanpa melepas sepatu, dan menyirami pamflet-pamflet di mushalla dengan air comberan.

Pada tanggal 10 September 1984, Syarifuddin Rambe dan Sofyan Sulaeman, dua orang takmir masjid “*Baitul Makmur*” yang berdampingan dengan mushalla As-Sa’adah, berusaha menenangkan suasana dan mengajak kedua tentara itu masuk ke sekretariat Takmir masjid guna membicarakan masalah yang sedang hangat. Ketika mereka berbicara di dalam kantor, massa di luar telah berkumpul. Kedua pengurus Takmir masjid ini menyarankan kepada kedua prajurit tadi supaya persoa-lannya disudahi dan dianggap selesai saja, tetapi mereka menolak saran tersebut. Para jama’ah yang berada di luar mulai kehilangan kesabaran, lalu tiba-tiba saja salah seorang dari kerumunan massa menarik sepeda motor salah seorang prajurit yang ternyata seorang marinir, kemudian dibakar. Maka pada hari itu juga, Syarifuddin Rambe dan Sofyan Sulaeman beserta dua orang lainnya ditangkap aparat keamanan. Turut ditangkap juga Ahmad

Sahi, pimpinan mushalla As-Sa'adah dan seorang lain lagi yang ketika itu berada di tempat kejadian. Selanjutnya, Muham-mad Nur, salah seorang yang ikut membakar motor ditangkap juga. Akibat penahanan ke empat orang tersebut kemarahan massa menjadi kian tak terbandung, yang kemudian memunculkan tuntutan agar membebaskan mereka-mereka yang ditangkap itu.

Pada hari berikutnya, para tetangga mushalla yang masih menyimpan kemarahan datang kepada salah seorang tokoh daerah itu, bernama Amir Biki, karena tokoh ini dikenal memiliki hubungan baik dengan beberapa perwira di Jakarta. Maksudnya, supaya dia ikut turun tangan membantu membebaskan para tahanan. Sudah seringkali, Amir Biki turun tangan menyelesaikan persoalan yang timbul dengan pihak militer. Akan tetapi kali ini usahanya ternyata tidak berhasil.

Pada tanggal 12 September 1984, beberapa orang muballigh menyampaikan ceramahnya di tempat terbuka, mengulas berbagai persoalan politik dan sosial, diantaranya adalah kasus yang baru saja terjadi. Di hadapan massa, Amir Biki berbicara dengan keras yang isinya menyampaikan ultimatum agar membebaskan para tahanan paling lambat pk. 23.00 WIB malam itu. Jika tidak, mereka akan mengerahkan massa mengadakan demonstrasi.

Di saat ceramah telah usai, berkumpullah sekitar 1500 orang demonstran bergerak menuju kantor Polsek dan Koramil setempat. Sebelum massa tiba di tempat yang dituju, sekonyong-konyong mereka telah dikepung dari dua arah oleh pasukan bersenjata berat. Massa demonstran berhadapan *face to face* dengan tentara yang sudah siaga tempur. Pada saat sebagian pasukan mulai memblokir jalan protokol, mendadak para demonstran sudah dikepung dari segala penjuru. Lalu terdengar suara tembakan, kemudian diikuti oleh pasukan yang langsung mengarahkan moncong bedilnya kepada kerumunan massa demonstran. Dari segenap penjuru berdentuman suara bedil, tiba-tiba ratusan orang demonstran tersungkur berlumuran darah. Di saat sebagian korban berusaha bangkit dan lari menyelamatkan diri, pada saat yang sama mereka diberondong lagi atau dicabik-cabik dengan bazoka, sehingga dalam beberapa detik saja jalanan dipenuhi jasad manusia yang telah mati dan bersimbah darah. Sedangkan beberapa korban luka yang tidak begitu parah berusaha lari dan berlindung ke tempat-tempat di sekitarnya.

Sementara tentara-tentara mengusung korban yang telah mati dan luka-luka ke dalam truk-truk militer, tembakan terus berlangsung tanpa henti. Semua korban dibawa ke RS militer di tengah kota Jakarta. Sedangkan RS lain diultimatum untuk tidak menerima pasien korban penembakan Tanjung Priok. Setelah seluruh korban diangkut, datanglah mobil-mobil pemadam kebakaran untuk membersihkan jalan dari genangan darah korban. Satu jam setelah pembantaian besar-besaran ini terjadi, Pangab Jenderal Beny Murdani datang menginspeksi tempat kejadian, dan untuk selanjutnya, sebagaimana diberitakan oleh berbagai sumber, daerah tersebut dijadikan daerah operasi militer.

Peristiwa Tanjung Priok sangat mengerikan. Hampir setiap keluarga kehilangan salah seorang anggota keluarganya pada aksi pembantaian ini. Korban pembantaian diperkirakan ratusan orang, sehingga dalam waktu singkat kasus ini menjadi sangat terkenal dan disebut-sebut dalam penerbitan resmi. Sebagian dari massa demonstran yang selamat dari aksi pembantaian mengerikan itu, memperkirakan jumlah korban yang meninggal sekitar 600 orang. Tetapi pihak pemerintah menyembunyikan fakta yang sebenarnya dan mengatakan bahwa "menurut penelitian, adanya korban pembantaian sebanyak itu sesuatu yang mustahil". Para korban pembantaian ini dikubur di pemakaman umum tanpa sepengetahuan keluarga mereka.

Bab 02-01 Pemerintah Menyembunyikan Fakta

Sehari setelah pembantaian manusia muslim ini, Pangab Jenderal Beny Murdani dan Pangdam Jaya Try Sutrisno mengumumkan, bahwa korban yang terbunuh hanya 9 orang dan yang luka-luka berjumlah 35 orang. Sedangkan tentara dari berbagai macam kesatuan yang menjaga markas polisi ketika peristiwa terjadi tidak lebih dari 15 orang saja. Mereka dipaksa melepaskan tembakan karena tidak ada alternatif lain, dan sudah sesuai prosedur. Kejadian ini adalah akibat dari agitasi selebaran-selebaran dan pamflet yang tendensius, yang membakar emosi keagamaan massa.

Menurut versi Beny Murdani, kronologi peristiwa Tanjung Priok adalah sebagai berikut: "Mula-mula petugas keamanan berusaha menenangkan emosi massa dengan cara-cara yang persuasif, tetapi dibalas dengan teriakan "Tidak setuju". Teriakan-teriakan massa ini semakin menjadi-jadi, sambil mereka maju mendekati petugas keamanan dan memepet mereka. Ketika mereka merasa terancam barulah petugas keamanan melepaskan tembakan peringatan ke udara. Oleh karena massa tidak juga mengindahkan peringatan tersebut, barulah tembakan diarahkan ke kaki, sehingga sulit dihindari jatuhnya korban. Massa ternyata tidak mau bubar sehingga didatangkan pasukan tambahan. Setengah jam kemudian massa mengamuk menyerang petugas untuk kedua kalinya. Menyaksikan situasi genting, petugas terpaksa melepaskan tembakan untuk mencegah massa merebut senjata, melakukan penyerangan dan pengeroyokan terhadap petugas".

Masyarakat di daerah ini sejak semula tidak mempercayai keterangan Beny Murdani, karena banyak diantaranya yang mengalami penderitaan dan orang tahu, bahwa persoalan ini sangat kontroversial. Banyak selebaran dan pamflet yang beredar di masyarakat tetapi tidak ada yang berani menuliskan identitasnya pada pamflet tersebut. Selebaran-selebaran ini diperbanyak lagi di

kota-kota lain sehingga ada yang sampai ke luar negeri, tapi anehnya tidak satupun koran-koran dalam negeri yang memuatnya. Sudah barang tentu, ada juga berita-berita sederhana yang diekspos berdasarkan keterangan resmi yang diberikan Beny Murdani.

Mereka yang menjadi korban kasus ini diisolasi oleh tentara, dan hanya seorang saja yang jenazahnya dikembalikan kepada keluarganya, yaitu jenazah Amir Biki, korban pertama pembantaian. Jenazah Amir Biki dikembalikan kepada keluarganya untuk dimakamkan lantaran bantuan dari Wagub DKI Jakarta, Mayjend. Edi Nalapraya, teman dekat Amir Biki dan orang yang tadinya dimintai tolong untuk membebaskan para tahanan. Amir Biki dan Nalapraya telah berhubungan sejawat sejak tahun 1965, ketika Amir Biki membantu militer menghadapi PKI. Sedangkan Nalapraya adalah mantan intelejen di bawah pimpinan Beny Murdani. Ketika ia memperoleh pangkat jenderal, dia ditunjuk menjabat wagub DKI Jaya yang wilayah kekuasaannya meliputi daerah Tanjung Priok. Pengangkatan ini tidak umum bagi seorang jenderal, tetapi karena Nalapraya orang yang berdarah Betawi, dan punya pengetahuan mendalam tentang kehidupan masyarakat Tanjung Priok, maka dia dianggap orang yang tepat menduduki jabatan wakil gubernur. Dia juga mantan wakil Pangdam Jaya. Selebaran-selebaran dari Jakarta menyebutkan bahwa sebelum meletusnya kasus Tanjung Priok, Nalapraya sebenarnya sudah menginformasikan kepada Amir Biki, bahwa pemerintah menda-pat tekanan kuat untuk meninjau kembali RUU orsospol yang kontro-versial itu, dan mungkin sekali tekanan ini membawa hasil.

Seingat kami, masih ada tiga korban lagi yang dikuburkan dengan sepengetahuan keluarga mereka, tapi siapa nama mereka itu masih misteri. Sedangkan korban-korban lainnya dikuburkan oleh pihak militer tanpa sepengetahuan keluarga mereka. Adapun korban yang luka-luka yang dibawa ke RS militer diobati secara tidak semestinya. Ada sebagian korban yang selama berbulan-bulan opname di RS militer ini tanpa mendapat perawatan sama sekali; bahkan peluru yang masih bersarang ditubuhnya pun tidak dikeluarkan, sehingga selama mereka tinggal di RS dapat dikatakan sebagai pasien yang disandera. Hal ini berlangsung berbulan-bulan lamanya sebelum keluarga mereka mengetahui tempat penampungannya.

Segera setelah berita malapetaka ini tersebar di Jakarta, pada tanggal 17 September, lima hari setelah kejadian, 22 orang anggota petisi 50 menerbitkan Lembaran Putih yang berisi tantangan terhadap keterangan Beny Murdani, dengan memuat data-data yang lebih akurat yang disampaikan oleh para saksi mata. Petisi 50 menuntut supaya segera diadakan penyelidikan oleh tim independen atas kejadian ini. Sekalipun lembaran putih ini tersiar dengan cepat, namun koran-koran Indonesia tidak satu pun yang mengeksposnya. Bahkan tidak satupun yang berani memuat keterangan para saksi yang menyampaikan kesaksiannya dalam persi-dangan kasus ini.

Sebagaimana disebutkan dalam pamflet, bahwa orang yang berbicara di dalam pengajian yang kemudian menimbulkan demonstrasi itu ada empat orang. *Pertama*, Amir Biki yang disebut sebagai pimpinan demons-tran dan orang yang pertama kali melepaskan tembakan. *Kedua*, Salim Qadar ditangkap pada 2 Oktober 1984, untuk selanjutnya diajukan ke pengadilan. Setahun kemudian, Nopember 1985, dia dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Sedangkan dua orang terdakwa lainnya (Syarifin Maloko dan Mohammad Nasir), bersembunyi lebih dari 1,5 tahun. Pada 11 April 1985 kantor berita AFP menyiarkan bahwa kedua orang ini telah tertangkap, dan beberapa koran memberitakan keduanya akan segera diajukan ke pengadilan. Tetapi pemerintah tidak menjelaskan, apakah keduanya akan dikenai tahanan atau tidak. Pengadilan telah menolak berbagai macam permohonan untuk melakukan pembelaan bagi terdakwa, sementara kedua orang itu diminta untuk memberikan kesaksiannya. Posisi kedua orang ini menjadi sangat misterius, khususnya menyangkut persidangan kasus Jenderal Darsono, di mana Darsono menyarankan agar kedua orang ini dimintai keterangan mengenai peran mereka dalam kasus Tanjung Priok. Pada tanggal 16 Juni 1986, beberapa bulan setelah berakhirnya persidangan kasus di atas, barulah Syarifin Maloko ditahan disuatu tempat di Jawa Barat. Dia ditangkap oleh salah seorang perwira yang mengenalinya ketika berceramah di sebuah masjid. Dari kejadian ini orang dapat memahami, bahwa sebenarnya dia tidak bersembunyi dan tidak pula melakukan suatu tindakan sehingga patut ditahan. Sebuah majalah mingguan Indonesia menyebutkan, bahwa semasa menjadi pelarian, Syarifin Maloko muncul diberbagai kesempatan memberi ceramah di daerah Merak Jawa barat.

Bab 02-02 Suasana Pengadilan Kasus Subersi

Untuk mengadili terdakwa Kasus Tanjung Priok, telah berlangsung beberapa kali persidangan. *Pertama*, menyidangkan 4 orang yang ditangkap pada tanggal 10 September. *Kedua*, persidangan terhadap 28 orang yang dituduh ikut dalam demonstrasi. Mereka ini menjadi korban penembakan. Delapan orang lagi diadili dalam tiga kali persidangan terpisah. Mereka dituduh sebagai orang-orang yang bertanggung jawab melakukan pengrusakan sewaktu terjadinya demonstrasi. Selain persida-ngan tersebut, di Jakarta juga berlangsung peradilan diberbagai tempat terhadap orang yang dituduh melakukan provokasi dan menyebarkan selebaran-selebaran yang berisikan kasus Tanjung Priok, mengkonter keterangan Beny Murdani yang sangat bertentangan dengan fakta sebenarnya.

PERSIDANGAN 4 ORANG TERDAKWA

Persidangan pertama dilakukan terhadap 4 orang terdakwa yang ditahan pada tanggal 10 September, yaitu :

1. Nama : Syarifuddin Rambe.
Umur : 38 tahun,
Pekerjaan : Tukang reparasi jam
Jabatan : Ketua majelis ta'lim.
Keterangan : Aktif di lingkungannya dan mengisi waktu senggangnya dengan kerja sosial.
2. Nama : Sofyan Sulaeman.
Umur : 35 tahun.
Pekerjaan : Karyawan pabrik.
Jabatan : Anggota majelis ta'lim.
3. Nama : Ahmad Sahi
Umur : 35 tahun
Pekerjaan : Manajer ekspedisi barang dagangan
Jabatan : Ketua takmir mushalla As-Sa'adah.
4. Nama : Mohammad Nur
Umur : 25 tahun
Pekerjaan : Lulusan SLTA dan pengangguran.

Orang-orang ini diadili dengan maksud untuk menguatkan tuduhan-tuduhan yang dilontarkan Beny Murdani, bahwa sebenarnya tokoh-tokoh masyarakat setempatlah yang mula-mula menimbulkan kekacauan sehingga terjadinya demonstrasi pada tanggal 12 September. Selain itu, juga dimaksudkan sebagai bantahan, bahwa apa yang tertulis pada selebaran atau pamflet yang menuduh Babinsa setempat masuk ke tempat suci tanpa melepas sepatu dan menyiramnya dengan air comberan, tidak seluruhnya benar. Issu ini disebar dengan sengaja untuk membakar emosi dan membangkitkan kemarahan massa. Dan Rambe serta Sulaeman dituduh menyerang petugas keamanan.

Persidangan-persidangan ini sebenarnya dimaksudkan sebagai upaya mengungkapkan penyebab terjadinya kasus Priok, tapi ternyata dalil-dalil yang digunakan jaksa penuntut umum untuk menyeret para terdakwa ke pengadilan, isinya kacau dan tidak berhubungan satu sama lainnya. Lebih buruk lagi, sikap penasehat hukum yang sama sekali tidak menggunakan haknya dalam membela klien, terutama dalam mengejar keterangan para saksi, apakah sesuai fakta atau tidak. Persidangan empat orang terdakwa ini selesai hanya dalam dua kali sidang saja. Rambe dan Sulaeman divonis dalam waktu bersamaan. Sedangkan dua orang lainnya divonis sendiri-sendiri. Ketiga persidangan ini berlangsung dalam waktu yang sama. Pada hari itu juga masing-masing terdakwa mengajukan banding di ruangan yang sama dan dihadapan majelis hakim yang sama pula. Masing-masing terdakwa kemudian dijadikan saksi untuk kasus temannya yang lain, padahal dalam kasus mereka yang khusus ini mereka bisa menolak untuk memberi jawaban atas segala pertanyaan yang dapat memberatkan diri mereka tentang tuduhan-tuduhan yang tidak ada hubungannya dengan kasus mereka. Dalam memberikan kesaksian pada kasus temannya mereka tidak disumpah sebagaimana mestinya sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan majelis pengadilan kepadanya.

Adapun saksi-saksi rekayasa yang dihadirkan di persidangan semuanya adalah anggota militer, baik yang masih aktif atau pun pensiunan. Dua saksi utama adalah dua orang anggota militer yang menodai kesucian tempat ibadah. Meskipun tuduhan pokoknya, adalah para tertuduh telah menyebarkan selebaran gelap, namun ternyata bahwa keterangan anggota militer dengan jelas mengakui, bahwa pamflet yang menempel di mushalla memang disiram dengan air comberan. Saksi militer ini beralasan: "Karena pamflet-pamflet itu ditulis dengan pilox yang tidak bisa dihapus, dan tidak ada peralatan ditempat itu untuk dipakai menghapusnya, maka tidak ada cara lain kecuali menyiramnya dengan air comberan".

Hermanu, seorang yang pertama kali mengetahui adanya pamflet, adalah petugas Babinsa yang telah dua kali berkunjung ke mushalla. Dia mengaku, "tidak mencopot sepatu dalam kunjungan kedua kalinya ke mushalla. Sebab, katanya, dia hanya masuk di halaman saja". Ringkasnya semua rekayasa ini, gagal untuk dijadikan sebagai alasan menyanggah kebenaran isu-isu yang beredar tentang Tanjung Priok. Selain itu, ada tertuduh yang dinyatakan bersalah karena kejahatannya menyebarkan isu-isu yang kebenarannya kurang dapat dipertanggungjawabkan, bahkan ada isu yang sama sekali tidak benar.

Bab 02-03 Penolakan terhadap Saksi Pembela

Persekongkolan dan kolusi antara hakim dan jaksa penuntut umum sangat nyata dalam persidangan kasus Tanjung Priok ini. Mereka telah bersepakat untuk menolak keterangan para

saksi yang diajukan pena-sehat hukum terdakwa. Dalam persidangan kasus Rambe dan Sulaeman, misalnya, para pembela bermaksud menghadirkan saksi mata yang ikut hadir di mushalla ketika Hermanu dan sejumlah tentara datang ketempat tersebut untuk kedua kalinya. Ketika nama-nama saksi mulai dipanggil, jaksa malah berdiri dan berteriak lantang: "Mereka ini buronan yang sengaja disembunyikan pembela".

Jaksa penuntut umum dengan gigih menggunakan segala upaya untuk mementahkan serta mendeskreditkan keterangan para saksi, tapi para pembela tetap memaksa mereka untuk mendengarkan. Saksi per-tama bernama Shaleh. Orangnyanya telah lanjut usia, berumur 65 tahun, pekerjaan tukang batu. Sebelum saksi ini diajukan ke persidangan, para pembela meminta jaminan keamanan bagi keselamatan saksi. Tapi Hakim yang menyidangkan hanya bersedia memberikan jaminan keselamatan selama berada di ruang sidang saja. Sedangkan di luar ruang pengadilan, hakim menolak untuk bertanggungjawab.

Kendati menyadari bahaya yang mengancam keselamatannya, na-mun Pak Shaleh tetap maju pada persidangan berikutnya untuk menyam-paikan kesaksiannya. Setelah diangkat sumpahnya, dia memberikan kesaksian tentang kejadian yang disaksikan sendiri secara langsung. Pak Shaleh sebenarnya akan dimintai konfirmasi untuk mengenali setiap orang dari tentara yang terlibat dalam peristiwa itu. Tetapi yang terjadi dalam persidangan justru sebaliknya, hakim yang menyidangkan malah bertanya kepada para tentara bukan pada Pak Shaleh yang hadir disitu. "Apakah saudara-saudara kenal dengan saksi ini?", tanya hakim pada para tentara itu. Ketika mereka menjawab, "Tidak kenal", maka hakim dengan cepat memutuskan untuk menolak kesaksian Pak Shaleh dan menyatakan bahwa kesaksiannya tidak diperlukan dan tidak layak dipercaya. Setelah itu saksi diusir dari ruang sidang. Para pembela menga-jukan protes keras, sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya di dalam persidangan semacam itu. Dalam perjalanan pulang ke rumahnya, di tengah jalan Pak Shaleh dihadang oleh dua orang tak dikenal, kemudian membawanya ke markas polisi untuk diinterogasi. Pembela kembali mem-protes keras intimidasi semacam itu. Di persidangan para pembela mengatakan,"Akibat dari tindakan intimidasi semacam itu, para saksi yang semula bersedia menyampaikan kesaksian, akhirnya berubah pikiran". Perlakuan terhadap saksi Pak Shaleh, pada kenyataannya membuat pembela mustahil dapat menghadirkan saksi lain untuk kepentingan terdakwa.

Kemudian pembela mengajukan tuntutan kepada pengadilan supaya mendengarkan kesaksian para saksi di tempat berlangsungnya kejadian, supaya dapat menyelidiki perkaranya dengan lebih obyektif. Pada awal-nya permintaan ini disetujui oleh hakim, tapi kemudian dicabut kembali.

Menurut berbagai sumber, pencabutan izin persidangan dilokasi kejadian adalah akibat intervensi langsung dari Beny Murdani. Hakim pengadilan kemudian mengumumkan bahwa persidangan khusus di tempat kejadian tidak bisa dilakukan. Alasannya,"Polisi setempat menyatakan, situasi tempat tidak aman". Pembela menyerang keputusan hakim dengan sengit, dan mengatakan: "Kesaksian-kesaksian ini akan memberikan kejelasan bahwa sesungguhnya para saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut adalah mustahil mereka menyaksikan kejadian-kejadian itu dari tempat keberadaan mereka".

Namun Jaksa penuntut umum berpendapat, bahwa Rambe dan Sulaeman telah menggunakan kekuatan dalam menghadapi Hermanu dan anggota militer lainnya untuk memaksa mereka meninggalkan kan-tornya guna mencari selebaran. Akan tetapi kedua orang itu menyanggah-nya."Apa yang kami lakukan hanyalah usaha penengahan karena beranggapan, bilamana oknum tentara mau minta maaf maka masalah-nya akan selesai", ujar mereka. Akhirnya Jaksa penuntut tidak mampu lagi mengemukakan alasan bahwa keduanya benar-benar menggunakan kekerasan terhadap oknum tentara itu. Ketika hakim bertanya kepada Hermanu, mengapa tidak mau minta maaf: "Sikap yang benar bagi seorang militer, yaitu tidak meminta maaf", jawab Hermanu.

Ketika jaksa penuntut membatalkan tuduhan menyebarkan isu-isu bohong kepada Rambe dan Sulaeman, pada saat itu sebenarnya persi-dangan sudah hampir usai. Namun demikian, kedua orang terdakwa beserta seorang teman pengurus masjid dikenai tuduhan lain, sehingga Rambe dan Sulaeman masing-masing dijatuhi hukuman 2,5 tahun penjara. Sedangkan yang seorang lagi bernama Sahi (takmir masjid) dijatuhi hukuman 22 bulan.

Muhammad Nur dikenai tuduhan merusak sepeda motor milik seorang anggota tentara dan melakukan perlawanan terhadap petugas saat ditangkap, agar dia dapat membantu temannya meloloskan diri dari penangkapan. Padahal di dalam persidangan terbukti bahwa yang melakukan perusakan sepeda motor adalah massa. Sedangkan Nur hanya semata-mata mendorong kendaraan itu dengan tangan. Walau-pun begitu, dia tetap dituduh telah melawan petugas, dan diganjar dengan hukuman 8 bulan penjara.

Bab 02-04 Persidangan 28 Orang Korban Pembantaian

Menjelang selesainya persidangan 4 orang terdakwa seperti telah diurai-kan di atas, pengadilan mulai menyidangkan 28 orang pemuda lainnya. Sebagian besar terdakwa adalah korban pembantaian Tanjung Priok. Ketika terdakwa menyampaikan keterangan tentang pristiwa yang telah dialaminya, sebagian besar dari mereka memperlihatkan dengan jelas, bekas-bekas

penganiayaan sewaktu berada dalam perawatan di RS militer. Persidangan ini berlangsung beberapa bulan setelah peristiwa Tanjung Priok.

Sebagian terdakwa benar-benar tersiksa oleh derita akibat penganiayaan petugas, sehingga untuk datang ke persidangan saja mereka harus dipapah. Para pengunjung sebagian besar merasa iba terhadap korban yang malang itu, sehingga membuat jalannya persidangan seringkali terganggu karena tiba-tiba terdengar teriakan histeris pengunjung. Nam-pak dengan jelas, bahwa ke 28 orang terdakwa hanya dijadikan sample di antara sejumlah besar korban pembantaian.

AM. Fatwa, seorang muballigh dan anggota petisi 50 yang telah disidangkan kasusnya pada akhir tahun 1985, di depan sidang penga-dilan bercerita: "Saat berada dalam tahan militer di Cimanggis, ditempat tersebut terdapat kurang lebih 200 orang tahanan berkaitan dengan kasus Tanjung Priok. Sebagian besar dari mereka adalah anak-anak muda yang menjadi korban tindakan berutal saat demonstrasi terjadi. Ia menceritakan bahwa keadaan para tahanan tersebut sangat menyedihkan karena diper-lakukan dengan buruk dan minimnya perawatan atas kondisi kesehatan mereka.

Selanjutnya Fatwa bercerita: "Para tahanan remaja ini tangannya penuh balutan karena luka parah akibat tembakan. Penjaga tahanan tidak membolehkan anak-anak ini mengganti pembalut luka mereka. Pembalut diganti dua hari kemudian setelah luka-luka berubah jadi borok. Tahanan yang mengalami derita semacam ini bernama Lili Ardiansah, dan tahanan lain bernama Maskun yang menderita 39 luka di tubuhnya akibat pemukulan sadis. Luka-luka ini membusuk dan bernanah hingga satu bulan. Karena nasib baik saja, luka tersebut sembuh dengan sendirinya tanpa pengobatan. Tetapi meninggalkan bekas di tubuh mereka untuk selamanya. Tahanan lain bernama Syarifuddin, mengalami kelumpuhan separuh badan akibat tekanan darah tinggi, dan dibiarkan menderita demikian selama dua hari. Sekalipun dokter telah dihubungi melalui telpon pada saat korban jatuh sakit, tetapi dokter baru datang dua hari kemudian".

Persidangan 28 orang di atas berlangsung selama lebih dari tiga bulan. Semua tertuduh dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman antara dua hingga tiga tahun. Tuduhan pokok yang didakwakan kepada mereka, yaitu ikut serta melakukan perlawanan terhadap ABRI dengan kekerasan. Mereka dikatakan membawa senjata berupa pisau, pentungan besi, clurit dan jerigen berisi bensin, untuk melakukan pembakaran. Mereka tidak memperdulikan peringatan bahkan melakukan serangan terhadap petu-gas keamanan dengan pentungan dan lemparan batu. Mereka dituduh ikut dalam kegiatan politik untuk melawan pemerintah dan melakukan demonstrasi politik melawan undang-undang anti subversi.

Jaksa penuntut umum kemudian mengajukan saksi-saksi, semuanya terdiri dari oknum tentara dan polisi. Sebagian dari saksi bahkan seorang komandan militer yang melepaskan tembakan terhadap para demons-tran. Kesaksian mereka sedikitpun tidak ada yang keluar dari keterangan yang sudah diumumkan oleh Pangab Beny Murdani berkenaan dengan kasus pembantaian ini. Bahkan seorang saksi perwira menambahkan, "Ada demonstran yang berusaha merampas senjatanya". Dua orang saksi lagi ditanya tentang berapa jumlah korban dalam kasus tersebut, jawabnya "Tidak tahu". Anehnya, tidak seorangpun dari saksi tentara itu yang mengenali terdakwa, sekalipun para terdakwa ini adalah orang-orang yang mereka hadapi dalam demonstrasi itu. Akan tetapi, salah seorang saksi mengakui bahwa delapan orang dari para tertuduh itu pernah dilihatnya berada di RS militer setelah mereka ditangkap.

Sekalipun tuduhan yang dikenakan kepada para terdakwa adalah, "menyerang petugas keamanan" tapi tidak seorangpun saksi tentara yang hadir di persidangan menunjukkan, bahwa di antara mereka mema-ng ada yang menjadi korban terkena sasaran senjata demonstran. Ada kisah misteri yang diceritakan dari Jaksa penuntut, "Seorang perwira tertusuk benda tajam, tapi yang bersangkutan tidak bisa hadir di persi-dangan karena menderita luka parah". Dapat dibayangkan bagaimana perasaan para tertuduh ketika mendengar pernyataan demikian. Mereka membandingkan dengan derita diri sendiri yang tidak mendapatkan perawatan dan mengalami luka bernanah, tetap dihadapkan ke persida-ngan, sedangkan perwira bersangkutan hanya memberikan kesaksian tertulis, dan diterima, walaupun tim pembela menolaknya dengan menga-takan, bahwa hal semacam itu sesuatu yang tidak mungkin.

Jaksa menunjukkan beberapa senjata tajam, sebagai barang bukti yang digunakan pada saat demonstrasi; padahal dia tidak dapat mem-buktikan secara meyakinkan, bahwa senjata-senjata itu diambil dari salah seorang terdakwa. Sebaliknya, salah seorang terdakwa menyangkal secara telak barang-barang bukti yang ditunjukkan, kecuali hanya satu barang bukti yang diakuinya, yaitu selambar selendang hijau -warna yang melambangkan ikatan dengan Islam. Terdakwa bersangkutan men-jawab, selendang hijau yang ditunjukkan di depan persidangan sama sekali tidak pernah dipergunakan dalam demonstrasi, karena selendang yang ditunjukkan itu lebih besar daripada yang ia miliki.

Bab 02-05 Vonis Pengadilan

Berikut ini akan dipaparkan beberapa keputusan yang dimuat oleh sementara koran yang terbit disaat itu, menyangkut ke 28 terdakwa di atas.

Terdakwa yang divonis paling berat adalah Hendra Safri, 22 tahun, seorang mahasiswa AKUBANK. Hendra sama sekali tidak mengalami cedera karena memang dia tidak berada di tempat demonstrasi. Hal ini berbeda dengan terdakwa lainnya. Karena Hendra ditangkap di Suma-tera, bukan di Jakarta, pada tanggal 20 September. Ia menyatakan pada pengadilan pada tanggal 12 September, tengah bermain kartu dengan teman-temannya, berjarak 2 km dari lokasi terjadinya demonstrasi.

Beberapa teman Hendera membenarkan keterangan yang diberikan di muka persidangan itu, tetapi hakim sama sekali tidak memperdulikan kesaksian mereka. Dia dijatuhi hukuman paling lama, 3 tahun, sebab ia menceritakan kasus pembantaian Tanjung Priok dalam sebuah ceramahnya, beberapa hari kemudian sehingga hal ini menjadi bahan tuduhan pokok dalam kasusnya. Selain itu ia adalah teman dekat Amir Biki. Jaksa menuntut dia hukuman 5 tahun, sementara yang bersangkutan menolak semua tuduhan yang dikenakan kepadanya.

Tiga orang tertuduh lainnya masing-masing dikenai hukuman 27 bulan, yaitu:

1. Nama : Muslih bin Marzuki.
Umur : 25 tahun
Pekerjaan : Buruh.
Siksaan : Diseret dan diinjak-injak dadanya oleh tentara.
Keterangan : Ia mencabut semua pengakuan yang dibuat dihadapan penyidik. Terdakwa berkata: "Sekiranya penun-tut tahu bagaimana pengakuan itu diberikan di depan penyidik, yang disertai penyiksaan di luar batas kemanusiaan, niscaya dengan pasti penuntut setuju atas pencabutan pengakuan kami".
2. Nama : Marwoto.
Umur : 24 tahun
Pekerjaan : Buruh
Siksaan : Menderita luka-luka di kepalanya akibat terkena popor bedil.
Keterangan : "Saya memang menghadiri pertemuan, tapi tidak ikut demonstrasi. Saat itu ia tengah pulang ke ru-mah. Namun massa memaksanya ikut demonstrasi sehingga ia meninggalkan sepedanya. Ketika men-dengar letusan senjata yang muncul dari markas polisi, ia tiarap dan menyusupkan kepalanya ke sebuah lubang. Di pengadilan ia menceritakan bahwa tentara menerobos barisan orang banyak tanpa mengindahkan kerumunan orang yang berje-jer sepanjang jalan. Ia tidak berani meninggalkan tempatnya sampai ia ditangkap oleh polisi lalu dibawa ke kantor Koramil dan di sana dipukuli. Ia mencabut kembali pengakuannya di depan penyidi-k, dan ujanya: "Semua yang saya katakan di depan penyidik adalah diluar kesadaran. Militer tidak mengijinkan saya untuk membaca kembali keterangan yang diperoleh dari saya sebelum saya menandatangani".
3. Nama : Thahir bin Sarwi.
Umur : 20 th.
Pekerjaan : Buruh
Siksaan : Terkena letusan peluru pada paha kiri dan telinga kanannya.
Keterangan : Dia datang dari Tegal ke Jakarta bertepatan dengan peristiwa pembantaian Tanjung Priok. Dia sama sekali tidak bermaksud ikut demo. Dia benar-benar pendatang baru di daerah ini, tapi dia terseret massa untuk datang ke pertemuan. Dia juga menarik kembali semua keterangannya di depan penyidik.

Tiga orang terdakwa lainnya, masing-masing dijatuhi hukuman 21 bulan, yaitu:

1. Nama : Dudung bin Supian
Umur : 25 tahun
Pekerjaan : Pedagang air keliling
Siksaan : Luka-luka pada lengan kanannya.
Keterangan : Dia pergi ke pengajian karena memang senang mengikuti pengajian. Ia mendengar salah seorang penceramah berkata:"Asas Tunggal menyebabkan kebingungan umat Islam". Ketika pengajian bubar dia pulang ke rumah salah seorang temannya, tetapi massa yang ada di sampingnya berteriak "Allahu Akbar", lalu dia bergabung. Dia mendengar letusan senjata dan kemudian dia terkena peluru nyasar. Orang-orang menolong dia untuk lari dari tempat kejadian dan dibawa ke rumah sakit dan opname selama 2 bulan. Sekeluar dari RS dia ditangkap. Hakim bertanya kepadanya,"Apa yang kamu bawa ketika pengajian, disaat mana ia mendengar tembakan?". Jawabnya,"Rp 5000 Pak Hakim, tetapi uang itu hilang".
2. Nama : Amir bin Bunari.

- Umur : 19 tahun.
Pekerjaan : Pengangguran.
Keterangan : Dia mencabut pengakuannya di depan penyidik. “Dia turut hadir di pengajian dan hanya mendengar suara dari speaker. Dia bergabung dengan massa yang pergi ke kantor Koramil. Di tengah jalan dia mendengar rentetan suara bedil dan menyaksikan banyak orang mengelepar di tanah. Dia berusaha lari, tapi ternyata kena tembakan. Kemudian dia dilarikan oleh beberapa orang ke RS setempat. Dari sini dipindahkan ke RS militer untuk ditahan.
3. Nama : Armin bin Mawi
Umur : 20 tahun.
Keterangan : Dia mendengar suara pengajian dari kejauhan, kemudian ikut demonstrasi untuk membebaskan 4 orang yang ditahan. Dia berada di barisan terakhir dari massa yang berdemonstrasi, jadi tidak melihat apa-apa pada saat pertama kali dilepaskannya tem-bakan. Dia tidak tahu siapa yang menembak dan ke arah mana. Tetapi dengan tiba-tiba dia pingsan ketika perutnya ditembus peluru.

Bab 02-06 Tiga Orang Terdakwa Dijatuhi 18 Bulan Penjara

1. Nama : Wasjad bin Sukarma.
Umur : 32 tahun.
Siksaan : Kepalanya terkena peluru pada saat ia pulang ke rumah dari kerja.
Keterangan : Waktu dia baru pulang dari tempat kerja, ia tak bisa langsung pulang ke rumah, karena di tengah jalan berjubel massa. Sejenak ia mendengarkan omongan-omongan orang, kemudian menunggu kendaraan umum untuk pulang ke rumah. Saat melihat massa berjalan tiba-tiba dia mendengar suara tembakan, dan tahu-tahu kepalanya sudah berdarah. Ia roboh bersimbah darah. Dua orang membantunya mera-ngkak naik dari got, lalu dibawa dengan mobil ke RS. Selang beberapa hari kemudian, dia dicituk tentara dari RS untuk diinterogasi. Kemudian dima-sukkan ke sel Rumah tahanan (Rutan) militer Cimanggis.
2. Nama : Nasrun bin Sulaemanah.
Umur : 17 tahun.
Pekerjaan : Buruh
Siksaan : Tertembak di pantat.
Keterangan : Dia tidak ikut pengajian, tetapi tinggal di rumah main ping-pong. Selang beberapa lama, dia pergi ke mushalla yang berdekatan dengan rumahnya, lalu tidur disana. Dia terbangun saat mendengar orang-orang meneriakkan Allahu Akbar, lalu berdiri untuk menyaksikan apa yang tengah terjadi. Saat mendengar suara tembakan dia lari ke rumahnya. Sampai di rumah dia baru tahu pantatnya tertem-bak. Sedangkan sebuah pelor lagi bersarang di dalam perutnya. Lalu dibawa ke RS oleh ayahnya dan kemudian di tempat ini dia ditahan selama 3 bulan.
3. Nama : Suherman bin Surnata
Umur : 25 tahun
Pekerjaan : Mahasiswa.
Siksaan : Tertembak pada lengan kirinya.
Keterangan : Dia ikut menghadiri pengajian dan bersama-sama para demonstiran pergi ke kantor Koramil hendak mengunjungi 4 orang tahanan. Tetapi ternyata dia terkena tembakan ketika dia tiarap, kemudian dibawa ke RS setempat. Ditempat inilah dia dicituk oleh militer dan dipindahkan ke RS militer. Tatkala hakim bertanya untuk memperoleh penegasan pengakuan yang pertama-kali diberikan pada penyidik, jawabnya” Tidak tahu apa yang ditulis oleh penyidik dan dia diminta untuk menanda-tangani BAP tanpa boleh membacanya lebih dahulu”.

Bab 02-07 Tujuh Terdakwa Dihukum 10 Bulan

1. Nama : Damsirwan bin Nurdin.
Umur : 21 tahun
Keterangan : Tidak ikut pengajian dan tidak pula ikut demonstrasi. Saat itu dia keluar mencari dua orang sahabatnya. Tiba-tiba dia berada di tengah massa lalu mendengar rentetan tembakan, tetapi dia tetap berusaha men-cari temannya. Dia bertemu dengan seorang tak dikenal berjalan di sampingnya tiba-tiba dia tertem-bak dan roboh. Disepanjang jalan bergeletakan mayat-mayat. Dia

didatangi seorang polisi dan me-nendang kepalanya dengan sepatu, dia dilarikan ke RS setempat dengan ambulance dan disinilah dia ketemu dengan teman yang dicarinya, yang juga luka-luka tertembak. Salah seorang temannya, pahunya terpaksa diamputasi untuk mengeluarkan peluru di dalamnya

2. Nama : Ita Sumirta bin Amin
Umur : 17 tahun
Pekerjaan : Mahasiswa
Siksaan : Tertembak di pahunya.
Keterangan : Menyanggah seluruh pengakuan yang pernah di-berikan di depan penyidik. Katanya, "Saya laku-kan semua itu karena dipaksa". Saya memang menghadiri pengajian kemudian ikut dalam demonstrasi. Saat tembakan dilepaskan dia beru-saha lari tetapi ternyata kena juga. Teman-temannya membawanya ke RS Islam setempat dan dari sini dia dicituk dan dibawa ke RS militer.
3. Nama : Sardi bin Wage.
Umur : 18 tahun.
Pekerjaan : Buruh
Siksaan : Dadanya dipukuli beberapa orang tentara dan diper-lakukan dengan amat sadis.
Keterangan : Dia menghadiri pengajian dan ikut demonstrasi untuk menuntut pembebasan 4 orang yang ditahan. Ia menerangkan bagaimana perlakuan tentara yang telah memblokade semua jalan masuk di lokasi kejadian. Mereka melepaskan tembakan dia tiarap. Saat itu dia berharap memperoleh tempat sembunyi di parit. Namun pasukan polisi menyeret dan kemu-dian menahannya. Dia tidak ingat apa-apa tentang yang disampaikan di hadapan penyidik yang mengintrogasinya. Sebab dia disuruh menanda-ngani tanpa boleh membacanya.
4. Nama : Budi Santoso bin Suparto.
Umur : 18 tahun.
Pekerjaan : Penganggur.
Siksaan : Tertembak di punggung tembus ke dada.
Keterangan : Katanya,"Saya menghadiri pengajian dan demons-trasi". Dia tiarap ketika mulai terdengar tembakan. Saat berdiri dan mau lari, tiba-tiba dia tertembak lalu dibawa orang ke RS setempat, dari sini dipindahkan ke RS militer.
5. Nama : April bin Mansur.
Umur : 16 tahun.
Pekerjaan : Pedagang keliling.
Siksaan : Dadanya diinjak-injak.
Keterangan : Dia tidak mendengar isi pengajian, karena pengeras suaranya gaduh. Tapi dia mendengar ajakan untuk membebaskan 4 orang tahanan. Semua keterangan dalam BAP dibantahnya karena dia menanda-tangani tanpa boleh membacanya lebih dahulu.
6. Nama : Sudarso bin Raise.
Umur : 16 tahun.
Pekerjaan : Pelajar.
Siksaan : Tertembak di lengan kanannya.
Keterangan : Dia menghadiri pengajian dan demonstrasi. Di pengadilan dia berkata bahwa peluru yang menem-bus lengannya masih bersarang di dalam. Dia men-ceritakan bagaimana dia berusaha menolong dua korban pembantaian yang luka parah, yang ternyata temannya sendiri. Hal itu ia lakukan setelah temba-kan berhenti. Kedua temannya dibawa ke RS menggunakan gerobak sampah.
7. Nama : Umar bin Sundu.
Umur : 18 tahun
Keterangan : Tidak ikut pengajian dan demonstrasi. Dia menya-nggah semua keterangan dalam BAP. Saat terjadi demonstrasi dia tengah dalam perjalanan pulang dan sedang berdiri di dekat lokasi untuk menanti bus. Tiba-tiba saja terdengar letusan senjata dan seorang yang berdiri di depannya roboh bersimbah darah. Segera ia ke masjid terdekat untuk mengam-bil keranda mayat, guna menolong korban bersama dengan beberapa orang lainnya. Baru saja memin-dahkan korban ke tempat yang agak aman, tiba-tiba datang tentara menyuruh untuk melemparkan korban. Saat itu dia tidak

ditangkap, lalu dia pergi ke masjid untuk tiduran sebentar. Kemudian dia pulang namun di tengah jalan ia ditangkap.

Bab 02-08 Sebelas Terdakwa Duhukum 1 Tahun

1. Nama : Ferdinan M. Silalahi, satu-satunya orang Kristen yang menjadi terdakwa.
Keterangan : Dia menghadiri pengajian bersama teman-temannya guna memperoleh pengetahuan lebih banyak tentang ajaran Islam. Ia menyatakan masuk Islam ketika berada di penjara. Dia ikut berdemonstrasi tapi lari saat mendengar rentetan bedil. Dia tidak terluka sedikitpun. Pada waktu menanti kendaraan umum untuk pulang ke rumah tiba-tiba dia ditangkap.
2. Nama : Yusran bin Zaenuri.
Umur : 19 tahun.
Pekerjaan : Mahasiswa.
Siksaan : Salah seorang terdakwa yang termasuk paling parah lukanya. Dipukuli punggung, dada dan lengan kanannya. Di dalam tubuhnya masih bersarang sebuah peluru hingga saat dia dihadapkan ke persidangan. Kantor-kantor berita asing mengutip kesaksiannya agak terperinci.
Keterangan : Ia berkata: "Para demonstran sebenarnya sudah berhenti sewaktu mendapat perintah berhenti dari polisi. Fakta ini bertentangan sama sekali dengan keterangan Beny Murdani". Katanya lagi, "Dia berada di barisan terdepan dalam demonstrasi dan menyaksikan seluruh peristiwanya dengan jelas". Dia ceritakan secara detail adanya truk-truk militer dengan tergesa-gesa mengangkut mayat-mayat dan orang-orang yang luka ke RS. Kemudian dia dilemparkan dan jatuh di atas timbunan mayat yang ada di atas truk. Ia tinggal di RS beberapa bulan tanpa diketahui keberadaannya oleh keluarganya. Keluarganya menyangka dia sudah meninggal, dan sudah diadakan kenduri/selamatan. Setelah memberi kesaksian di pengadilan dia dibawa ke RS, setelah dibebaskan dari penjara menjadi saksi kasus Darsono. (Baca lampiran 1)
3. Nama : Misdi bin Sufian.
Umur : 16 tahun.
Pekerjaan : Pelajar SLTP.
Keterangan : Salah seorang korban yang diinjak-injak tentara. Keterangan lebih detail sama sekali tidak termuat di koran-koran, hanya dikatakan bahwa dia menyanggah semua keterangannya dalam BAP.
4. Nama : Amir Mahmud bin Dulkasan.
Umur : 17 tahun.
Pekerjaan : Pelajar.
Siksaan : Daun telinga kirinya sobek terkena peluru.
Keterangan : Kami tidak mendapatkan data-data lebih rinci tentang pledoinya di persidangan.
5. Nama : Ismail bin Abdul Hamid.
Umur : 16 tahun.
Pekerjaan : Pelajar.
Siksaan : Tertembak di punggung. Mengalami luka sangat parah di sekujur tubuh.
Keterangan : Ikut demonstrasi karena ingin membebaskan empat tahanan. Saat diangkut ke mobil militer, ia dipukuli habis-habisan oleh tentara, sehingga tiga tulang rusuknya patah. Paru-paru dan saluran pernafasannya mengalami penyumbatan lantaran luka-lukanya.
6. Nama : Syafrizal bin Sufiyan.
Umur : 18 tahun.
Siksaan : Luka tembakan di bahu dan pipi kanan.
Keterangan : Kami tidak mempunyai data-data cukup tentang keterangannya di pengadilan selain hanya sanggahannya terhadap semua keterangan di BAP.
7. Nama : Maksudi bin Irsad.
Umur : 22 tahun
Pekerjaan : Pedagang asongan.
Siksaan : Menderita luka-luka sangat parah. Tertembak di pantat tembus hingga selangkangan.
Keterangan : Dia termasuk orang yang menghadiri pengajian tapi berada di luar. Sambil duduk di kursi, menelon-jorkan kakinya dan menyentuh kursi lain. Ketika disidang, peluru masih bersarang di tempatnya. Penasehat hukum meminta agar persidangan dipercepat dan peluru dikeluarkan dari tubuhnya. Tetapi

permohonan ini ditolak. Ia selalu mengeluh, sebab hanya diberi pengobatan yang sangat tidak mema-dai, sedang kondisi tubuhnya dengan cepat merosot. Para wartawan yang mengikuti proses persidangan-nya menyaksikan bahwa anak ini setiap kali disida-ng tampak sangat ketakutan. Para pengunjung mengeluh tentang bau busuk yang keluar dari tubuh terdakwa setiap kali dia hadir di persidangan. Sebab lukanya sudah bernanah. Sehari-harinya dia bekerja sebagai pedagang pisang keliling dekat dengan tempat pengajian. Lalu ikut dalam demonstrasi seke-dar ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ketika mendengar para demonstiran bertakbir dia merasa ngeri dan ingin kabur, tapi keduluan tertembak. Lalu dia tersungkur dan pingsan. Di hadapan majelis hakim dia tidak mampu menjawab satu pun perta-nyaan yang diajukan kepadanya karena kondisi tubuhnya yang sudah tidak berdaya, sehingga pem-bela maupun jaksa tidak pernah mengajukan perta-nyaan kepadanya.

8. Nama : Cecep Basuki bin Wagi.
 Umur : 16 tahun.
 Pekerjaan : Pedagang asongan.
 Siksaan : Dipukul dengan popor bedil sehingga dada dan kepalanya retak.
 Keterangan : Sore itu dia hendak pergi ke bioskop untuk nonton tapi tak jadi, lalu dia makan-makan di warung. Selesai makan ada demonstrasi lalu ikut bergabung. Waktu meletus tembakan dia tiarap, tiba-tiba datang tentara memukulinya. Dia ditangkap setelah dirawat di RS selama 10 hari.

9. Nama : Asep Safruddin bin Suhendri.
 Umur : 19 tahun
 Siksaan : Tertembak di kepala.
 Keterangan : Dia keluar untuk kepentingan orang tuanya dan tidak ikut menghadiri pengajian maupun demons-trasi. Ketika terdengar tembakan dia berlindung ke dalam gardu yang berdekatan. Tiba-tiba muncul panser tentara lalu kepalanya dipopor sehingga jatuh pingsan.

10. Nama : Iuscon bin Ilyas.
 Umur : 18 tahun
 Pekerjaan : Pelajar.
 Siksaan : Tertembak di dadanya. Saat menoleh, dagunya ter-tembak lagi.
 Keterangan : Di depan sidang ditunjukkan dua lobang di dada-nya. Peluru pertama bisa dikeluarkan ,tapi peluru kedua masih mengeram di dalam. Ujarnya, "Dia ikut dalam pengajian dan demonstrasi. Kemudian dia berada di tengah-tengah massa yang hendak pergi ke kantor polisi tetapi tentara memblokir jalan dan meminta para demonstiran bubar. Para demons-tran mau pergi tetapi komandan tentara melepaskan tembakan, dia menjadi korban pertama penemba-kan. Dia menyanggah bahwa ada diantara para demonstiran membawa senjata.

11. Nama : Wahyudi bin Shaleh.
 Umur : 21 tahun.
 Siksaan : Tertembak pada tempurung lututnya.
 Keterangan : Di persidangan terdakwa memperlihatkan tempu-rung lututnya yang koyak. Dia ikut demonstiran dan berjalan di belakang orang yang menggunakan ikat kepala hijau. Ia menyaksikan para demonstiran sudah mulai bubar ketika diperintah militer untuk membubarkan diri. Orang-orang ada yang duduk ketika polisi melepaskan tembakan tanpa alasan sehingga kerumunan orang dengan segera berlarian. Banyak orang tiarap dan dia sendiri tertembak saat berusaha bangkit dan lari. Ketika tentara mendekati orang-orang yang tiarap ia meminta bantuan seo-rang tentara, tapi menolak dan malah memukulinya. Ia berada di RS militer dua bulan, kemudian keluar dan ditangkap.

Bab 02-09 Kasus Selebaran Gelap

Keterangan resmi pemerintah mengenai kasus Tanjung Priok, sangat diragukan keabsahannya. Banyak orang yang menyanggahnya baik lisan maupun melalui penerbitan selebaran-selebaran untuk memaparkan fakta-fakta sebenarnya. Dari keterangan di persidangan dan beberapa berita koran yang memuat hal ini mengindikasikan bahwasanya selebaran gelap ini telah beredar di hampir seluruh penjuru tanah air. Selebaran ini ada yang terdiri hanya selebar, dan ada pula yang berlembar-lembar, berisikan keterangan saksi mata. Sebagian dari selebaran-selebaran ini sengaja disebarluaskan oleh para intel. Sesuai dengan hukum di Indonesia, bukanlah hal gampang memperoleh izin penerbitan, dengan alasan itu maka selebaran dianggap sebagai penerbitan

illegal. Oleh karena itulah persidangan-persidangan kasus ini dikenal dengan peradilan selebaran gelap. Berikut ini contoh-contoh kasus persidangan dimaksud.

1. Kusnoto bin Kasan, 32 th. Orang pertama yang dituduh membagi-bagikan selebaran gelap, dan dijatuhi hukuman 2 tahun penjara dan denda. Kesalahannya: Menerbitkan dan membagi-bagikan selebaran kepada halayak. Dia ditangkap sepuluh hari setelah peristiwa Tanjung Priok. Di mantelnya ditemukan selebaran gelap yang isinya membantah keterangan Beny Murdani. Di pengadilan, penasehat hukum menyatakan protes sebab dia ditangkap pihak Koramil yang berarti hal ini melawan hukum. Dia menyampaikan keluhan karena selama penyelidikan terus menerus disiksa.

2. Rusdianto Selamat, 22 th, mahasiswa sebuah PT di Yogyakarta. Dihukum 10 bulan, dipersalahkan karena membantu melakukan penga-cauan, dengan ikut membagi-bagikan selebaran dan mencetaknya. Dia telah memberikan selebaran kepada lima orang temannya. Sedangkan teman yang memberikan selebaran kepadanya hanya disebut inisialnya saja, dan dijatuhi hukuman sepuluh bulan juga.

3. Agus Sutaryo Kosib dan Ramli Zulkarnaen Lubis. Mereka men-dapatkan selebaran, membantu pencetakannya dan penyebarannya di kalangan jama'ah masjid. Masing-masing tertuduh diganjar 8 bulan penjara.

4. Syamsu haji Rauf dan Hizbullah Sidik Deadon, mahasiswa Univ. Sultan Harun. Keduanya dijatuhi hukuman, namun koran-koran nasional sedikit sekali yang memberitakan persidangannya. Keduanya dinyatakan bersalah karena menyebarkan selebaran gelap yang berjudul "Keterangan Singkat Kasus Tanjung Priok Berdarah". Sesuai dengan pernyataan jaksa penuntut, bahwa kedua orang ini membacakan isi selebaran-selebaran tersebut pada sekelompok mahasiswa. Karena itu keduanya dijatuhi hukuman oleh pengadilan negeri Ternate dengan hukuman berat. Yang pertama dihukum 10 tahun, dan yang kedua 15 tahun penjara.

Masih ada para pengedar selebaran gelap lainnya, dan juga dijatuhi hukuman penjara, tapi kami tidak memiliki data-data cukup berkenaan dengan hal tersebut .

Bab 03 Tokoh Dibalik Peristiwa Pembantaian Tanjung Priok

PARA PENGAMAT Indonesia khususnya berpendapat, bahwa intel-intel militerlah yang menskenario dan merekayasa kasus pembantaian Tanjung Priok. Mereka mem-berikan isyarat adanya awal operasi yang dengan sengaja bertujuan untuk mengkategorikan kegi-atan-kegiatan ke-Islaman sebagai tindak kejahatan, dan para pelakunya dijadikan sasaran korban. Sebenarnya peristiwa ini sudah dipersiapkan sedemikian rupa untuk suatu ketika dapat diajukan ke pengadilan guna mela-wan berbagai kelompok yang mempunyai tujuan berbe-da, sebagaimana akan kami uraikan berikut ini.

Siapapun yang hendak mengamati kehidupan poli-tik di Indonesia sejak dasawarsa 60-an akan tahu bahwa operasi semacam ini dianggap sebagai contoh dari ope-rasi-operasi khusus yang dilakukan intelijen. Ciri dari-pada operasi ini adalah, sulitnya diketahui secara jelas keterlibatan intelijen militer di dalamnya. Selain itu tidak mungkin memperdebatkan secara terbuka hal semacam ini dalam suasana Indonesia yang represif.

Lima belas tahun pertama dari pemerintahan Soe-harto, orang yang mengendalikan operasi-operasi intel-jen adalah Jendral Ali Murtopo. Dia memiliki badan intel-jen khusus dan melakukan operasi politik khusus yang disebut dengan opsus. Opsus ini didirikan pada awal dasawarsa 60-an dimasa pemerintahan Soekarno, dan kemudian menjadi kaki tangan Soeharto sejak dia men-jadi panglima Kostrad (Komando Strategi Angkatan Darat). Operasi penting yang dilakukan opsus sebelum Soeharto naik ke tampuk kekuasaan ialah melakukan pembicaraan-pembicaraan rahasia dengan pemerintah Malaysia. Oleh karena itu telah muncul keraguan dalam front politik yang dijalankan oleh Soekarno dan pemerintahannya. Pada tahun 1969 mereka melakukan operasi rekayasa yang disebut dengan "Hak menentukan Nasib Sendiri". Operasi ini dianggap legal yang dilakukan Indonesia terhadap Irian Barat. Kemudian berlanjut dalam operasi pemilu tahun 1971 dan 1977 sehingga Golkar memperoleh kemenangan luar biasa. Kapten Beny Murdani pada waktu itu merupakan salah seorang pembantu inteljen Ali Murtopo (opsus). Beny Murdani berpangkat Kapten tahun 1963 kemudian menjadi jendral berbintang 4 dan Pangab Indonesia. Beny Murdani melakukan operasi inteljen di bawah bendera opsus menjalankan tugasnya pertama-kali bermarkas di Bangkok, agar dapat melakukan pembicaraan-pembicara-an rahasia dengan Malaysia secara baik yang terjadi pada th 1964.

KOMANDO JIHAD: Ketika tentara selamat dari ancaman Komu-nis secara gemilang, kemudian dari gerakan kiri pada akhir dasawarsa 60-an, maka badan inteljen militer ini menjadikan umat Islam sebagai sasaran utamanya. Operasi pentingnya pertama kali dilakukan menjelang pemilu 1977, ketika PPP masih merupakan kelompok oposan terhadap pemerintah dan memberikan kesan bahwa Islam merupakan kekuatan teroris karena adanya tuduhan bahwa sejumlah aktivis merupakan anggota-anggota Komando Jihad. Kami ingin menyatakan disini bahwa Komando Jihad ini adalah rekayasa Ali Murtopo untuk mengacaukan kaum muslimin. Seorang wartawan Australia memperoleh informasi dari berbagai sumber yang menyatakan: "Pimpinan Komando Jihad tidak lain adalah tokoh-tokoh gerakan Darul Islam pada dasawarsa 50-an yang tertangkap, kemudian mereka dibebaskan, lalu diajak bekerjasama oleh Ali Murtopo,

setelah mereka ini dijebloskan ke dalam tahanan”. Salah seorang tokoh mereka ini adalah Haji Ismail Pranoto. Pada tahun 1978 dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan tuduhan mendirikan Komando Jihad di berbagai tempat di wilayah Jawa Timur.

Para tertuduh di dalam kasus ini semua menyangkal. Mereka menyangkal, bahwa mereka melakukan operasi-operasi melawan komunis bekerjasama dengan militer. Mereka meminta kepada Jendral Ali Murtopo untuk memberikan kesaksian di pengadilan tapi ternyata pengadilan menolak permohonan ini. Abdurrahman Wahid, pimpinan NU mengakui bahwa Komando Jihad ini adalah rekayasa dari badan inteljen militer. Ketika dia ditanya, ”Apakah organisasi ini masih ada di Indonesia?”. Jawabnya, ”Sekarang sudah tidak ada. Adapun gerakan itu dimasa lalu, tanyakanlah hal itu kepada Kopkamtib, tetapi (Jihad itu sendiri) sejalan dengan ajaran Islam”. Komando Jihad adalah gerakan yang direkayasa oleh orang-orang yang menginginkan hancurnya gerakan Islam.

PEMBAJAKAN WOYLA: Operasi penting yang kedua melawan kaum muslimin terjadi pada awal tahun 1982, beberapa waktu sebelum dilaksanakannya Pemilu. Sekelompok orang-orang Islam dituduh mem-bajak pesawat Garuda yang melakukan penerbangan dalam negeri. Gerakan ini dituduh menyerbu kantor polisi Cicendo, Jawa Barat.

Dalam persidangan, Imran Bin Muhammad Zein, pemimpin gerakan ini, bermaksud untuk memeriksa peranan Najamuddin komandan sayap tentaranya yang dicurigai sebagai anggota inteljen militer. Para anggota gerakan ini yakin bahwa Najamuddin lah yang memanas-manasi mereka untuk menyerbu kantor polisi dan melakukan pembajakan pesawat. Najamuddin ini kemudian dibunuh oleh anggota dari gerakan ini. Ketika mereka mengeluh tentang berbagai sepele terjangnya. Dalam persidangan, Jaksa penuntut selalu mementahkan segala bentuk usaha untuk mengorek identitas orang ini. Tidak ada orang yang dijatuhi hukuman berkeenaan dengan kasus pembunuhan Najamuddin. Sebab persidangan semacam ini hanya akan menimbulkan kesulitan lebih besar pada pemerintah. Pengadilan yang menangani kasus Imran menolak untuk melakukan penyelidikan tentang terjadinya pembunuhan terhadap 6 orang pembajak pesawat dan tidak membenarkan para penumpang maupun awak pesawat untuk memberikan kesaksiannya. Abdurrahman Shaleh, SH pembela Imran dalam persidangan mengatakan, ”Apakah benar tertuduh ini teroris?. Tidakkah orang semacam dia dipandang sebagai pemuda muslim yang terjatuh di dalam rekayasa?”

Bab 03-01 Persidangan Kasus Letjen HR Dharsono

Berita-berita kasus Tanjung Priok dilakukan oleh sejumlah besar orang. Masyarakat bertanya-tanya, mengapa militer tidak menggunakan kekuatan seminimal mungkin dalam menghadapi demonstrasi? Mengapa mereka tidak menggunakan gas air mata untuk membubarkan kumpulan massa yang marah? Mengapa tentara tidak menyampaikan peringatan sebelum melepaskan tembakan? Ketika tentara melepaskan tembakan, mengapa langsung diarahkan pada para demonstran, bukan mengarahkan ke atas atau tembakan ke bawah? Jika benar pengakuan militer, bahwa sebagian demonstran membawa senjata pisau dan pentungan (hal yang tak dapat dibuktikan di dalam persidangan) masih banyak cara-cara lain yang tepat untuk menghentikan para demonstran dan menguasai tempat-tempat gejolak.

Sebagaimana masyarakat bertanya-tanya, mengapa petugas keamanan setempat tidak diterjunkan untuk meleraikan perselisihan yang dengan tiba-tiba berubah menjadi krisis membara? Seorang mantan Jendral, Suhardiman mengatakan: ”Seharusnya jauh sebelumnya militer melakukan tindakan antisipasi untuk mencegah letupan. Karena membiarkan hal semacam itu berarti mentolerir aktivitas gerakan tersebut untuk terus berjalan, sehingga bisa membangkitkan kemarahan dan merusak keamanan nasional”.

Dalam persidangan kasus mantan jend. HR. Dharsono secara maksimal ia berusaha untuk menengahkan peran militer di dalam peristiwa yang mengakibatkan pembantaian pada malam Rabu, 12 September 1984. Ketika pertama kali terjadi peristiwa pada awal Oktober 65 dan kemudian menjadikan Soeharto berkuasa, Dharsono adalah panglima militer di Jabar, devisi Siliwangi. Ia mendampingi Soeharto di dalam usaha menjatuhkan Pres. Soekarno. Pada bulan-bulan terakhir tahun 65 ia bersama beberapa jend. lain yang anti komunis, seperti Kamal Idris dan Sarwo Edhi menghancurkan gerakan kiri di basis-basisnya yang kuat di seluruh penjuru pulau Jawa. Kemudian muncul perselisihan di kalangan pendukung orba dan Soeharto mengenai masalah pembangunan sistem politik pemerintahan. Dharsono menjadi sasaran kemarahan Soeharto karena dia berseberangan dengan politik Soeharto. Pada awal 69 Dharsono dipecat dari jabatan militernya kemudian diangkat sebagai duta besar di Bangkok dan Phnom Penh. Pada tahun 76 dia diangkat sebagai sekjen. ASEAN. Tetapi pada tahun 78, pada saat dewan mahasiswa menggugat politik Soeharto Dharsono menyatakan dukungannya secara terbuka. Hal ini menyebabkan dirinya di copot dari kedudukan sekjen ASEAN dan dengan cepat dia bergabung dengan mantan perwira yang bersikap kritis terhadap kebijakan rezim militer Soeharto. Terdapat sejumlah kecil perwira, termasuk Dharsono, dahulunya menyatakan sikap anti Demokrasi ketika mereka sedang menjabat. Tetapi sekarang para mantan perwira ini mengumandangkan demokrasi dan mengkritik kebijakan Soeharto yang zalim dalam menjalankan pemerintahan.

Meskipun Dharsono dahulunya tidak termasuk penandatangan Petisi 50, namun dia bergerak di lingkungan oposan. Ia biasa menghadiri pertemuan-pertemuan mereka secara teratur di rumah Ali Sadikin, mantan Panglima marinir dan Gubernur DKI. Dharsono turut menandatangani Lembaran Putih yang diterbitkan setelah terjadinya pembantaian Tanjung Priok. Ia juga menghadiri pertemuan yang diadakan pada tanggal 18 September di sebuah mushalla yang berdampingan dengan rumah AM. Fatwa, yang juga ikut menandatangani lembaran putih tersebut. Pertemuan ini sudah dirancang beberapa minggu sebelumnya. Tetapi karena muncul kasus Priok, maka akhirnya masalah ini menjadi pokok diskusi. Dharsono ditangkap pada tanggal 8 November 1984 dan diajukan persidangan pada tanggal 19 Agustus 1985. Dia diadili berdasarkan undang-undang subversi karena menandatangani lembaran putih. Dia dituduh menghasut peserta rapat yang diadakan 18 September untuk melakukan pengeboman yang kemudian terjadi beberapa minggu kemudian.

Bab 03-02 Serangan Tim Pembela

HR. Dharsono dan tim pembelanya bertekad untuk langsung melakukan serangan dan menggunakan ruangan pengadilan sebagai alat penekan guna mengungkap kejadian sebenarnya kasus Tanjung Priok; sejalan dengan tuntutan pokok yang telah dinyatakan di dalam lembaran putih agar dilakukan penyelidikan tentang kasus tersebut. Tim pembela hukum Dharsono ditangani oleh lima orang anggota LBH: Adnan Buyung Nasution, pengacara paling terkenal di Indonesia. 2. Mulya Lubis, ketua LBH. 3. Harjono Tjitrosubeno, ketua IKADIN. 4. Amartiw Shaleh, 5. Luhut MP. Pangaribuan. Tim ini merupakan kumpulan pengacara top. Para pengacara menghadirkan dua orang korban pembantaian Tanjung Priok sebagai saksi kunci dalam pembelaannya. Mereka minta kepada dua orang saksi ini untuk bercerita di hadapan persidangan tentang apa yang terjadi. Kedua saksi ini masih dalam keadaan luka parah. Orang pertama bernama Yusron bin Zaenuri, ia telah divonis dengan hukuman 1 tahun. Sebab ia termasuk dalam 28 orang korban Tanjung Priok yang telah disidangkannya tahun yang lalu. Dia terkena tembakan tiga kali. Sekali dia ditembak oleh tentara ketika dia roboh dalam keadaan tertelungkup dan lukanya terus mengeluarkan darah serta dibiarkan begitu saja oleh tentara menanti ajal tiba. Kemudian menceritakan perlakuan tentara kepadanya saat mereka melemparkannya ke atas truk militer yang sudah berisi tumpukan jasad korban (ada yang hidup dan ada yang mati) untuk dibawa ke RS militer (Lihat Lampiran I).

Saksi kedua bernama Edi Nurhadi, yang menyatakan bahwa saat itu ia sedang makan di warung pada waktu demonstrasi terjadi. Tiba-tiba pahanya tertembak karena itu dia terpaksa membalut lukanya (Baca Lampiran II). Kedua saksi ini secara detail menceritakan kebrutalan petugas keamanan. Keduanya dengan meyakinkan memberikan keterangan di depan persidangan bahwa petugas keamanan memberondong sasarannya dengan darah dingin tanpa perasaan sedikitpun.

Jaksa Penuntut umum menjawab kesaksian ini dan memanggil Kapten Sriyanto, komandan operasi dan juga komandan koramil setempat, dialah komandan yang bertanggung jawab di lingkungan militer dan memberikan perintah kepada anak buahnya untuk melepaskan tembakan. Ia menjawab: "Ketika itu anak buahnya berada dalam anca-man para demonstran bersenjata, dia menolak untuk menghentikan demonstrasinya. Media massa menulis bahwa pembela jawaban saksi Sriyanto menimbulkan suasana tegang dalam persidangan, sehingga para pembela terdakwa menekan yang bersangkutan untuk menjelaskan alasannya mengapa dia tidak mengundang polisi saja, padahal kantor polisi sangat dekat dengan lokasi kejadian. Mengapa dia tidak menggunakan gas air mata atau menggunakan cara lain untuk membubarkan demonstrasi. Saksi menjawab "Tidak ada waktu untuk memikirkan sesuatu seperti itu. Tidak ada hal yang menarik dalam keterangan saksi ini. Sebab, kata demi kata yang dia ucapkan semuanya persis dengan keterangan Beny Murdani, tetapi sesuatu yang berkesan dan sangat menarik tim pembela ialah penolakan Sriyanto untuk menjawab pertanyaan khusus sekitar kejadian-kejadian demonstrasi pada hari itu. Ujarnya," Hal-hal semacam itu seyogyanya ditanyakan kepada kapten Mukiran, perwira intel. Tegasnya jaksa penuntut meminta kepadanya untuk memberikan kesaksian masalah demonstrasi saja. dia tidak dapat menjelaskan apa-apa tentang peristiwa yang terjadi sebelum jam 23.00 ketika dia menerima telpon dari Amir Biki agar 4 orang tahanan dibebaskan.

Tim pembela sekali lagi mendesak majelis hakim supaya menghardirkan perwira militer lainnya untuk memberikan kesaksian. Tim pembela ingin menanyakan pada Kapten Mukiran, perwira intel yang disebut oleh Sriyanto dan Kapolres Jakarta Utara Kol. Ismet. Majelis hakim setuju untuk mendengar kesaksian Kol. Ismet tapi majelis hakim memutuskan tidak memanggil Kapten Mukiran, namun ada perwira intel lain yang kemudian dipanggil untuk memberikan kesaksian, yaitu Kol. Butarbutar.

Munculnya Butarbutar di persidangan menimbulkan perdebatan panas antara pembela dan saksi. Dharsono dengan keras menyerang bahwa tentara itu dipersiapkan untuk berperang bukan untuk bertindak terhadap demonstran di jalan-jalan. Ketika Adnan Buyung Nasution bertanya: "Mengapa dia tidak memanggil polisi?". Jawabnya, "Tidak ada waktu untuk dapat menggunakan saranan-sarana yang dapat dipakai pada saat-saat seperti itu. Karena itu kami, tim

pembela tidak merasa heran bilamana kesaksian Butarbutar tidak dapat mengungkap dengan jelas kejadian Tanjung Priok itu. Tidak munculnya Ismet, kapolres Jakut tidaklah banyak menimbulkan beda pendapat bahwa hal tersebut dimaksudkan untuk menghalang-halangi mengungkap rahasia langkah-langkah yang diambil oleh pihak keamanan dalam menghadapi para demonstran. Kol. Ismet 3 kali tidak pernah mau mendatangi persidangan. Panggilan pertama, dia tidak datang karena minta izin. Pada persidangan kedua dia tidak datang, katanya sakit. Pada persidangan ke 3, 4 November. Dia tidak datang karena bertugas ke Bandung. Oleh karena itulah tim pembela dengan segala upayanya untuk mengetahui alamatnya. Beberapa temannya mengatakan, bahwa dia sedang mengikuti tugas belajar di Bandung. Ternyata kemudian diketahui bahwa nama Ismet ini tidak tercantum dalam peserta pendidikan. Karena itulah Buyung Nasution berkesimpulan bahwa Ismet dengan sengaja melarikan diri dari memberikan kesaksian di depan persidangan. Adapun Dharsono berkata kepada majelis hakim, "Tidak hadirnya saksi ini dengan berbagaimacam alasannya secara logika membuktikan bahwa kasus-kasus Tanjung Priok akibat kekuatan luar yang melakukan provokasi.

Dalam jumpa pers dengan surat kabar Belanda Buyung Nasution mengungkapkan bahwa, "Tim pembela mempunyai alasan-alasan untuk berkeyakinan bahwa Ismet, Kapolres Jakarta Utara telah menyampaikan saran kepada militer di Tanjung Priok bahwa memang perlu mencegah terjadinya demonstrasi dalam bentuk apapun. Ia mengingatkan militer bahwa kondisi di daerah ini benar-benar panas. Buyung mengungkapkan bahwa sebelum diadakan sidang pengadilan 4 Desember, ketua pengadilan bernama Sudiyono membisikkan kepadanya untuk tidak terus menerus menuntut diadikannya saksi Ismet. Sebab hal itu dapat menimbulkan kesulitan tersendiri bagi persidangan ini. Buyung Nasution kemudian diberitahu oleh Sudiyono bahwa Ismet telah dipindahkan ke Sumatera Utara dan menyatakan tidak sanggup untuk menghadirkan yang bersangkutan di persidangan.

Bukan hanya ketidakhadiran Ismet saja yang menimbulkan keraguan bahkan Dharsono sudah mencium adanya kegagalan pihak aparat keamanan untuk menangkap dua orang yang mengadakan pertemuan di Tanjung Priok tanggal 12 September. Baik Syarifin Maloko mau-pun Muhammad Nasir dan Amir Biki yang telah terbunuh adalah orang-orang yang membantu membangkitkan emosi pengunjung pengadilan. Aparat keamanan telah menangkap muballigh lain tetapi mengapa tidak menangkap Syarifin Maloko dan Nasir? Mengapa orang-orang ini tidak hadir walaupun hanya untuk kesaksiannya di persidangan? Dharsono juga mempertanyakan kasus yang menimpa Hamzah Hariyana yang hadir dalam persidangan 18 September padahal dia termasuk pence-ramah yang paling menonjol. Orang inilah yang meminta kepada Dharsono agar membantu kelompok mereka memperoleh bom guna melakukan aksi-aksi teroris.

Bab 03-03 Penangkapan Syarifin Maloko

Syarifin Maloko ditangkap 6 bulan setelah Dharsono mengajukan tantangannya kepada pengadilan. Sebelumnya, semua persidangan kasus Priok tidak pernah berhasil mengungkapkan masalah ini, yaitu tim pembela tidak pernah berhasil untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada orang ini. Ketika Syarifin Maloko dinyatakan akan diadili, dia meminta bantuan kepada LBH untuk membela dirinya, tetapi LBH menolak dengan alasan para pengacaranya sedang sibuk sehingga tidak dapat membantu memberikan pembelaan dalam kasus-kasus baru pada saat itu. tetapi Adnan Buyung Nasution lebih terus terang alasannya dalam menolak permintaan tersebut .

Adnan Buyung Nasution dikenal sebagai Direktur lembaga ini dan koordinator tim pembela dalam kasus-kasus subversi. Para pembela meragukan apakah Maloko benar-benar berjuang untuk ideologi. LBH mengatakan bahwa kami membela setiap orang tanpa memperdulikan ideologi politiknya, tidak peduli apakah orang itu pejuang politik Islam atau pengikut ideologi komunis. Kami selalu siap membela dengan penuh keberanian. Tapi kalau ada orang yang tak dikenal bagaimana prinsipnya dalam perjuangan, lebih baik bagi kami untuk tidak melakukan pembelaan sia-sia.

Sejumlah anggota tim menemui Maloko setelah dia ditahan, tetapi Buyung Nasution tidak puas dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Maloko, seperti yang tertulis dalam surat yang dikirimkannya kepada surat-surat kabar. Ujarnya, "Kami tidak ragu-ragu tentang masalah Syarifin Maloko, namun persidangan kasus Tanjung Priok sudah lewat. Begitu pula persidangan kasus Dharsono, Am. Fatwa dll. Pada waktu itu adakah Maloko bersedia mengajukan pembelaan karena prinsip-prinsip ideologinya untuk membela masyarakat Islam atau setidaknya mau melakukan kontak dengan tim pembela, dimana Adnan Buyung Nasution termasuk di dalamnya, yang pada waktu itu sangat memerlukan kesaksian Maloko. Dia menyadari hal itu dengan baik, tapi mengapa dia tidak mau berbuat?

Sebuah organisasi muballigh juga bermaksud untuk menyanggah pengakuan Maloko bahwa dia termasuk salah seorang anggotanya. Wakil sekretaris dari organisasi ini berkirim surat pada media massa menolak dengan keras adanya anggapan bahwa Maloko adalah salah seorang dari anggotanya.

Tersiar isu bahwa Maloko bekerja untuk kepentingan intelijen militer. Isu-isu ini sangat kencang beredar sehingga hal ini menjadi masalah yang sangat dominan dalam persidangan.

Maloko meminta dihadirkan-nya tiga orang saksi untuk menyampaikan kesaksian. Orang-orang ini semuanya dari korp muballigh. Ketiga orang ini telah dipenjarakan. AM. Fatwa dan Abdul Qadir Djaelani tengah menjalani masa hukumannya. Sedangkan orang ketiga bernama Hasan Kiat, yang tengah disidangkan kasusnya dengan tuduhan turut menyampaikan ceramah di Tanjung Priok pada tahun 1985. Majelis hakim ternyata tidak mengabulkan permintaan agar Fatwa dan Djaelani menyampaikan kesaksian, karena mereka ini hanya ahli agama, bukan ahli di dalam masalah subversi. tetapi majelis hakim mengizinkan Hasan Kiat menjadi saksi. Di dalam persidangan dia menyangkal adanya anggapan bahwa Maloko adalah mata-mata pemerintah. Padahal sebelumnya ia mengakui hal tersebut sebelum terjadinya kasus Tanjung Priok. Dia meragukan Hasan Kiat dan dua orang tersebut tadi mempunyai hubungan yang bertujuan untuk memata-matai para penceramah Tanjung Priok. Ketika Maloko berbicara dengan Kiat di dalam penjara, dia meyakinkan kepadanya bahwa dirinya sebagai intel itu hanyalah semata-mata isu.

Bab 03-04 Persidangan Kelompok Penentang Pemerintah

Jenderal Beny Murdani sangat marah ketika koran-koran nasional dan internasional mengungkapkan bahwa persidangan kasus Dharsono tidak boleh diberitakan. Sekalipun Murdani dengan segala macam upaya meng-halangi pengusutan fakta-fakta, namun muncul banyak sekali statmen-statmen yang meragukan atas ketidak terlibatannya di dalam kasus-kasus ini. Persidangan-persidangan ini merasakan adanya hal-hal yang emosio-nal di dalam kasus Tanjung Priok. Persidangan ini telah berubah menjadi demonstarsi melawan pemerintah. Para hakim yang menangani persidangan di waktu itu dianggap sebagai orang yang bertanggung jawab atas munculnya keadaan tersebut. Oleh karena itu ada orang yang dijadikan sebagai kambing hitam, yaitu ketua pengadilan setempat bernama Sudiyono. Ia dipindahkan ke Sumatera Utara begitu selesai penanganan Maloko. selanjutnya yang dijadikan kambing hitam adalah Adnan Buyung Nasution yang dituduh sebagai orang yang melakukan penghinaan terhadap pengadilan (*Contempt of Court*) sebab dia menolak membacakan pembelaannya di persidangan. (Baca bab 4)

Pihak lain yang dikambing hitamkan adalah mass media, yang oleh Beny Murdani dituduh sebagai tidak bertanggung jawab dan tidak dewasa di dalam menyaring berita-berita menyangkut hal-hal yang terjadi di persidangan. Beny mengancam dengan keras mass media, jika tidak mampu membenahi dirinya sendiri.

Berkat kegigihan tim pembela, akhirnya semua peristiwa yang muncul di ruang persidangan menghasilkan usaha dilakukannya penyelidikan menyeluruh terhadap kasus-kasus Tanjung Priok. Hal ini merupakan tuntutan yang dimuat di dalam lembaran putih, namun masih sangat banyak pertanyaan-pertanyaan tim pembela berkenaan dengan korban peristiwa ini yang belum pernah terjawab hingga sekarang .

Bab 04 TINDAKAN REPRESIF DAN SISTEM PERADILAN

SEBELUM mengkaji kasus-kasus yang muncul sesudah tragedi Tanjung Priok, ada baik-nya kita melihat sejenak undang-undang yang dituduhkan kepada para tersangka, yaitu undang-undang anti subversi, PNPS 11/1963. Persidangan-persidangan kasus politik dilaksanakannya di bawah tekanan penguasa yang tujuan utama-nya untuk melanggengkan kekuasaan atau melindungi rezim militer.

Perangkat utama untuk melakukan tindakan represif adalah Kopkamtib. Lembaga ini dibuat oleh Soeharto pada tanggal 10 Oktober 1965, sebagai sebuah badan yang dapat dipergunakan untuk melaksanakan kekuasaan khusus yang ditugaskan Soekarno terhadap diri-nya, 2 Oktober 1965, guna memulihkan ketertiban dan keamanan. Sebagai seorang Pangkostrad, Soeharto meminta kekuasaan semacam ini dan berhasil memperoleh-nya pada tanggal 2 Oktober itu. Kekuasaan ini diper-lukan dalam rangka menyalpkan gerakan kiri yang bercokol di tubuh PKI, yang telah melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap sejumlah jendral dengan menggunakan tangan-tangan perwira menengah, agar PKI dapat dituduh melakukan tindakan makar terhadap pemerintahan Soekarno.

Kopkamtib didirikan untuk melibas kaum komunis dan golongan kiri. Pada awal didirikannya lembaga ini, katanya hanya untuk sementara waktu, tetapi setelah Soeharto berhasil menjatuhkan Soekarno dan mengang-kat dirinya sendiri sebagai presiden, dia mengeluarkan berbagai aturan dengan memperalat lembaga ini pada tahun 1969. Pada tahun 1973 lembaga ini diperkuat oleh ketetapan MPR dimana Tap-tapnya menjadi sumber hukum atas semua kebijakan pemerintah. Kopkamtib sejak itu semakin meluas kekuasaannya, menyumbat setiap bentuk aksi perlawanan seperti yang tersebut di dalam salah satu statmen resmi yang dikeluarkan tahun 1978. Statmen tersebut berisi: “meskipun pejabat Kop-kamtib selalu mengadakan perubahan sesuai tuntutan zaman, tetapi fungsi pokoknya tidak berubah, yaitu pemeliharaan keamanan dan kesta-bilan untuk

menghadapi berbagai kemungkinan revolusi PKI atau golongan-golongan ekstrim dari kelompok mana saja. Demikian pula dukungan pemerintah dan aparatnya, baik di pusat maupun daerah adalah untuk mengamankan pengamalan Pancasila dan UUD 1945.”

Demikianlah tujuan dari rezim militer, karena kekuasaan khusus yang diperoleh oleh militer untuk menghancurkan golongan kiri, ternyata meluas, mencakup penghancuran terhadap setiap bentuk gerakan oposisi politik.

Kopkamtib sebagai perangkat keamanan tertinggi negara, adalah suatu lembaga yang melakukan operasi pemulihan keamanan dan ketertiban, pada hakekatnya merupakan kekuasaan militer. Di setiap daerah yang menjadi komandan Kopkamtib pastilah panglima setempat, yang juga menjabat sebagai panglima militer. Kekuasaannya mencakup penangkapan, penahanan dan interogasi serta mempunyai kekuasaan otoriter untuk menggiring orang ke meja hijau dengan tuduhan melakukan kegiatan melawan pemerintah. Pada awal masa pemerintahan Soeharto, dia sendirilah yang menjadi panglima Kopkamtib. Tetapi setelah dilakukan re-organisasi di tubuh ABRI tahun 1969, maka dipandang perlu jabatan ini dipegang oleh Panglima Angkatan Bersenjata. Maka sejak tahun 1983 Beny Murdani menjabat sebagai Pangab dan sekaligus bertanggung jawab mengenai masalah Kopkamtib.

Bab 04-01 Undang Undang Anti Subversi

Hukum pidana warisan kolonial Belanda masih berlaku dalam hukum Indonesia, yang berisikan beberapa materi hukum untuk menjatuhkan hukuman terhadap tindak pidana politik, seperti pemberontakan, menghasut orang untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah, atau setiap bentuk tindak permusuhan dan penghinaan terhadap pemerintah. Tidak sulit untuk menemukan bukti adanya undang-undang yang berlaku di masa republik sekarang ini, juga berlaku di zaman kolonial Belanda di bawah pimpinan Gubernur Jendral. Demikianlah posisi Presiden Republik, seperti halnya posisi seorang Gubernur Jendral. Sedangkan nama Republik Indonesia, tidak lebih dari sekedar nama lain dari pemerintah Hindia Belanda di Hindia Timur.

Pada zaman demokrasi terpimpin, Soekarno dan militer menyadari perlunya suatu undang-undang lengkap mengenai anti subversi. Undang-undang yang bersifat elastis, sehingga dengan mudah negara bisa menjaring musuh-musuhnya dengan tindak pidana politik, baik perbuatan itu sudah dilakukan ataupun belum. Begitu juga ditandatanganinya undang-undang yang berisi hukuman keras, hingga pada tingkat hukuman mati terhadap orang-orang yang dituduh melakukan tindak pidana politik. Salah satu keistimewaan Undang-undang baru ini adalah menca-kup hukum acara yang dapat membatalkan isi ketentuan hukum acara pidana lainnya.

Undang-undang anti subversi yang secara kejam diterapkan terhadap oposan muslim, diundangkan oleh Soekarno tahun 1963 melalui keputusan Presiden No. 21. Undang-undang tersebut dibuat dengan cara demikian, karena RUU yang diajukan Soekarno kepada DPR ditolak oleh semua partai yang terwakili di parlemen. Sebab undang-undang ini sangat berbahaya. RUU ini diajukan lagi ke parlemen beberapa saat setelah diusulkannya hukum adat ke parlemen, Mei 1963. Negara dalam keadaan darurat (SOB) diberlakukan sebagai alat untuk melakukan tindakan represif terhadap semua penentang demokrasi terpimpin setelah militer mendominasi pemerintahan pada tahun 1965, maka semua undang-undang yang mendukung kekuatan kiri dan Soekarno dirubah. Untuk itu ratusan peradilan digelar guna mengadili tokoh-tokoh PKI dan orang-orang yang dianggap oleh pemerintah bertanggung jawab atas peristiwa awal Oktober 1965. Hukuman yang dijatuhkan sangat berat. Banyak orang yang dikenai hukuman mati. Pada bulan-bulan pertama orde baru, pimpinan militer menggelar kekuatan dengan mengangganya sebagai inkonstitusional. Demikian pula cara-cara Soekarno mengeluarkan berbagai macam ketetapan dinilai inkonstitusional. Pada-hal sebenarnya undang-undang semacam ini sepenuhnya dibuat untuk mendukung militer. Bahkan Soeharto dengan pasukannya menggunakan hukum tersebut untuk membunuh setiap orang yang dicurigai sebagai komunis. Hal itu terjadi setelah munculnya peristiwa pembantaian tahun 1965, dimana sebanyak satu juta orang terbunuh, padahal Soeharto mengumumkan bahwa sejak sekarang dan seterusnya, Indonesia akan dijadikan sebagai negara hukum.

Banyak orang berharap, setelah Soekarno jatuh dan PKI dihancurkan dapat dilakukan reformasi hukum secara total, mulai dari hukum-hukum warisan orde Soekarno, tapi tidak terwujud. Masih banyak undang-undang yang bersifat represif termasuk hukum-hukum yang dikeluarkan pada zaman Soekarno untuk membersihkan setiap penentangannya. Pada tahun 1969 undang-undang ini meningkat statusnya setelah disetujui oleh DPR. Dengan keras undang-undang ini dikritik oleh pengacara Adnan Buyung Nasution. Ujarnya, "Jika DPR dimasa orde lama menolak RUU ini, maka merupakan hal yang sama sekali tidak bisa difahami bahwa DPR di zaman orde baru menyetujui undang-undang tersebut". Isi dan materi dapat memberikan kesan hukum yang keliru, padahal hanya namanya saja yang berbeda tetapi isi dan semangatnya tidak berbeda dari undang-undang Subversi (versi Soekarno).

Undang-undang anti subversi menganggap bahwa kegiatan apapun yang dapat menodai atau menyimpang dari idiologi Pancasila, atau menghancurkannya, atau melawan kekuasaan negara atau kekuasaan pemerintah yang sah atau alat negara atau menghasut atau menyebabkan perpecahan, atau kekacauan, atau keresahan masyarakat. Maka sesungguhnya kata-kata yang

dipergunakan dalam undang-undang itu mene-gaskan bahwa setiap kegiatan yang dicurigai, dapat dikategorikan sebagai perbuatan subversi. Seseorang bisa dituduh melakukan perbuatan subversi sekalipun dia sendiri tidak berniat untuk itu, atau dia orang yang belum bisa dimintai tanggung jawab secara hukum atas apa yang ia lakukan. Orang-orang Islam yang ditangkap sejak tahun 1985 adalah didasarkan pada kewenangan Kopkamtib untuk melakukan hal tersebut dan peradilannya dilakukan berdasarkan undang-undang anti subversi. Dalam banyak peradilan yang digelar, para pembela menyatakan bahwa penggunaan undang-undang tersebut tidak sah. Sebagian berpendapat bahwa undang-undang tahun 1973 telah membatalkan undang-undang produk Soekarno tahun 1963 itu. Undang-undang 1973 ini dinilai sebagai dasar hukum yang sah menurut asas legalitas. Segolongan lain berpendapat bahwa dalih yang digunakan Soekarno mengeluarkan undang-undang semacam itu, bersifat politis dan karena itu tidak berlaku lagi di zaman orde baru.

Tim pembela HM. Sanusi mengatakan, bahwa para hakim yang memimpin persidangan seharusnya memiliki hak untuk memeriksa sejauh mana kebenaran undang-undang yang dipergunakannya di dalam kasus yang dituduhkan. Mereka punya hak untuk menyatakan pendapat bahwa undang-undang ini tidak sah kemudian menolak melangsungkan persidangan. Sebagian tertuduh merasakan penderitaan karena mereka dijatuhi hukuman berdasarkan undang-undang produk rezim demokrasi terpimpin, padahal rezim ini seringkali mereka kecam. Tapi ternyata banyak hakim yang menolak kecaman semacam ini, padahal penolakan-nya itu tidak ke luar dari hati nuraninya sendiri. Sekalipun demikian pengadilan yang menyidangkan kasus Dharsono sepakat, bahwa undang-undang anti subversi dianggap bahagian dari undang-undang 1945 yang telah diakui masyarakat. Tapi mereka menambahkan bahwa pembicaraan tentang undang-undang subversi ini sebaiknya disampaikan kepada DPR dan bukan kepada hakim.

Bab 04-02 Hukum Acara Pidana dan Kasus Kasus Subversi

Undang-undang subversi yang menjadi sandaran Kopkamtib sejak tahun 1965, merupakan peraturan illegal dan tidak adil diterapkan terhadap para tapol Indonesia dan dalam beberapa daerah pemerintah melakukan intervensi. Sebagai contoh, ternyata kejaksaan dan bukannya militer- merupakan pihak yang menyampaikan dakwaan terhadap seseorang yang dituduh melakukan tindakan subversi. Persidangan-persidangan kasus semacam ini dilakukan di pengadilan-pengadilan sipil dan bukan di pengadilan militer, tetapi lembaga yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah militer. Sejak yang bersangkutan ditahan, tapol menjadi garapan Kopkamtib melalui komandan militer, karena mereka merupakan petugas Kopkamtib. Sekalipun akhirnya, cepat atau lambat terdakwa diajukan ke kejaksaan, namun mereka tidak mampu membe-rikan jaminan yang seharusnya diperoleh oleh pihak terdakwa.

Jaminan-jaminan ini hanya tinggal tertulis di atas kertas. Para pembela tapol yang melakukan pembelaan di pengadilan, berusaha semaksimal kemampuan untuk meminta kepada pengadilan agar klien mereka dapat menikmati hak-haknya sesuai dengan jaminan yang tercantum di dalam hukum acara pidana yang dikeluarkan pada akhir 1981.

Undang-undang baru ini dinilai sebagai suatu perkembangan positif menggantikan undang-undang lama dan secara umum diterima baik oleh lembaga-lembaga hukum di Indonesia. Dalam hukum acara pidana baru ini secara rinci dijelaskan hak-hak orang yang ditahan, hak untuk berhubungan dengan keluarga dan menerima kunjungan mereka, hak untuk mendapatkan bantuan hukum sejak awal ditangkap dan hak untuk didampingi pembela ketika diinterogasi. Terdakwa juga punya hak untuk memperoleh pembelaan dalam setiap proses persidangan, berhubungan dengan pembela untuk menyiapkan pembelaan. Undang-undang acara yang baru ini secara tegas membatasi masa penahanan dan memberikan hak kepada yang bersangkutan untuk menolak penahanan dan hanya polisi saja yang berhak melakukan penangkapan dan penyidikan. Namun di dalam hukum acara ini tidak ada ketentuan mengenai sanksi-sanksi terhadap militer yang melanggar ketentuan-ketentuan tersebut, apalagi kekuasaan ini diserahkan kepada pendapat militer yang menangani masalahnya. Oleh karena itu jaminan atas hak-hak terdakwa hanya sekedar *live service* (tertulis tapi tidak dilaksanakan).

Sekalipun para tapol diperlakukan dengan hukum acara pidana baru, tetapi KUHP baru ini mengandung kelemahan lain yang berat. Contohnya, pasal 284, yaitu menyangkut kasus-kasus yang tercakup dalam undang-undang tertentu, termasuk undang-undang anti subversi tidak mencakup kasus-kasus yang memperoleh masa penyesuaian penerapan undang-undang selama 2 tahun. Lima tahun kemudian para pengacara setelah mempelajari KUHP ini dari segi HAM menyatakan, bahwa ketentuan khusus dalam undang-undang seperti tersebut dalam pasal 284 menjadi ketentuan yang berlaku untuk selamanya.

Para pengacara yang berusaha untuk membela tapol setiap kali dihadapkan pada berbagai macam rintangan, walaupun mereka telah memenuhi apa yang jadi tuntutan KUHP, namun kenyataannya penang-kapan dan penahanan, interogasi dan pengajuan ke pengadilan ditangani oleh Kopkamtib.

Para penyidik militer memperlakukan korban-korbannya dengan sadis dan penuh intimidasi. Mereka disel sendirian, tidak boleh dikunjungi oleh keluarga ataupun pembelanya. Pembela yang ditunjuk untuk mem-bela AM. Fatwa, misalnya pernah menyampaikan keterangan, bagaimana

mereka berusaha selama berminggu-minggu mencari tempat penahanan Fatwa. Selanjutnya Fatwa sendiri menjelaskan apa yang menimpa dirinya selama minggu-minggu yang menakutkan itu. Dia ditangkap pada tanggal 19 September 1984 oleh Satgas intel. Pada saat penyidikan disalah satu kantor polisi, disitu dia menerima “pesan-pesan”. Ketika para pembe-lanya berusaha untuk bisa hadir pada saat penyidikan mereka dan memdampingi mereka memberikan pembelaannya secara gigih. Lalu Fatwa dipindahkan ke tahanan militer yang terkenal sadis, di Jl. Guntur Jakarta, di sana dia diinterogasi militer. Kemudian oleh militer dia dipopor dengan senjata. Ketika tentara melewati sel itu, Tony Ardi juga sedang dimasukkan ke dalam sel tersebut, sambil disiram dengan air dingin. Setengah jam kemudian Fatwa dipindahkan ke sel lain yang menebarkan bau pesing yang amat sangat. Pada sore hari, ketika sudah tidak mampu menahan kencingnya, terpaksa membuang air kecil di lantai. Dan pada waktu hendak menunaikan shalat, dia mencari tempat yang bersih, tapi tidak menemukannya. Pada malam harinya, dia dibangunkan dengan kasar dari tidurnya dan dipindahkan ke sel di ruang depan, disini dia dijambak oleh beberapa orang tentara lalu digunduli. Ketika hendak membaca Qur’an, agar supaya tidak tercekam rasa sakit dan rasa hina, algojo-algojo itu melarang dia membaca. Beberapa jam kemudian dia diseret kembali ke selnya dengan mata tertutup dan tangannya diikat ke belakang, lalu dinaikkan ke atas Jeep dan dibawa ke tahanan militer pusat di Cimanggis. Di tengah jalan dia diancam akan di tembak. Di Cimanggis dia dikumpulkan bersama 200 orang tahanan Tanjung Priok. Mayoritas dari para tahanan ini menderita luka-luka, baik luka saat pembantaian Tanjung Priok atau pun luka tatkala sedang diinterogasi.

Fatwa mengakui nasibnya agak beruntung, sebab dia dengan cepat dipindah dari tahanan militer di jalan Guntur. Tempat-tempat tahanan politik yang dianggap sangat mengerikan dibandingkan tempat-tempat tahanan lain, maka yang terdapat di jalan Guntur tingkat kesadisannya paling terkenal. Begitu tahanan sampai ditempat, langsung dipermak habis-habisan.

Pada tahap ini petugas intel yang melakukan penyidikan berusaha untuk mengajukan beberapa macam pertanyaan kepada tahanan, dan untuk meperoleh pengakuan yang menyangkut orang lain, mereka mem-pergunakan berbagai metode pemeriksaan, termasuk menggulung atau mempermak. Para penyidik militer menggunakan cara-cara yang amat kasar, seperti penyetruman listrik. Untuk menghina tahanan muslim, mereka gunakan cara-cara tertentu, seperti menggunduli kepala dan melarang sholat. Cara-cara penyiksaan yang biasa mereka gunakan terha-dap tahanan di waktu dalam proses penyidikan, misalnya meletakkan kaki meja di atas ibu jari kaki korban, kemudian diduduki beberapa orang militer, dan kadang-kadang diinjak-injak. Umumnya penyidik belum mendapatkan pengakuan lengkap, sekalipun korbannya sudah menga-lami siksaan luar biasa. Seorang muballigh, Profesor Utsmani al-Hamidi tidak merasa heran ketika dalam salah satu persidangan kasusnya, meli-hat seorang jaksa penuntut yang kesulitan menanyai salah seorang saksi, lalu sang jaksa berkata: “Saya menyarankan sebaiknya saksi ini dikirim kembali ke sel tahanan militer, supaya para penyidik militer di sana membekali yang bersangkutan sebelum ia memberikan kesaksiannya. “

Cara-cara yang digunakan oleh militer seperti yang telah disebutkan tadi, terungkap dengan jelas dalam kasus Husnul Arifin, terdakwa yang hukum dalam kasus pengebomam BCA, 4 Oktober 1984. Dalam penga-kuannya, ia menyatakan dirinya diberi pinjaman oleh HM. Sanusi. Menu-rut sangkaan mereka (rezim), Sanusi telah membiayai pengeboman. Masalah inilah yang merupakan hal pokok yang menjadikan Sanusi, salah seorang korban utama dalam peradilan orang-orang Islam. Ketika Husnul Arifin menjadi saksi yang dihadirkan oleh jaksa, ia mencabut semua pengakuannya di depan persidangan. Hal ini terjadi pada saat kasus persidangan Rahmat Basuki. Dia semula enggan membeberkan di depan persidangan, di mana dan dalam kondisi apa sehingga pengakuan-pengakuan itu harus dicabut. Akan tetapi tim pembela dengan gigih berusaha mengorek keterangan saksi, sehingga dia berani berterus terang di depan persidangan. Dia menceritakan, bahwa dirinya ditangkap pada tanggal 7 Oktober 1984, oleh beberapa orang yang berpakaian preman, tanpa membawa surat perintah penangkapan. Setelah ditangkap matanya ditutup, lalu dia dibawa ke suatu tempat rahasia. Di tempat itu dia dipukuli dengan benda semacam tongkat yang keras. Mereka menginterogasi dan menyuruhnya memberikan keterangan yang diperlu-kan, kemudian menandatangani. Di kemudian hari ketika dia diinterogasi oleh polisi, dia tidak dapat lagi mengingat wajah orang-orang yang dahulu pernah menginterogasinya. Oleh karena itu, ketika menyampaikan keterangan kepada polisi, dia banyak membuat ketera-ngan yang direkayasa. Begitu pula halnya dengan orang-orang lain yang dituduh melakukan pengeboman, dan akan kami terangkan secara rinci di belakang. Kesehatan Husnul Arifin sangat memperhatikan, hal itu dikemukakan oleh orang-orang yang bertemu dengan para tahanan di dalam penjara. Mereka sangat takut, sebab mereka dituduh sebagai orang-orang yang dibiayai oleh Sanusi.

Salah seorang terdakwa bernama Muhammad Jabir bin Abu Bakar, menemui ajalnya di sel tahanan akibat tidak tahan menerima siksaan; karena penyidik berusaha mendapatkan pengakuannya untuk melibat-kan HM. Sanusi. Pembunuhan yang mengerikan ini, terungkap di dalam pernyataan yang ditulis oleh keponakannya dan disampaikan kepada sidang peradilan yang kedua pada persidangan kasus Sanusi (baca lampiran ketiga).

Bab 04-03 Penyidikan Sebelum Persidangan dan Kesaksian di Persidangan

Bukti-bukti yang diajukan jaksa penuntut dalam persidangan-persidangan kasus subversi, sepenuhnya berdasarkan hasil penyidikan sebelum dilakukan persidangan, dalam situasi serta kondisi seperti yang kami ceriterakan di atas. Di hadapan persidangan, banyak saksi maupun terdakwa yang mencabut pengakuannya seperti yang kami jelaskan di atas. Dua puluh delapan orang terdakwa di dalam kasus subversif (baca Bab II) telah mencabut keterangannya sebelum diadakan pembuktian. Pencabutan pengakuan oleh terdakwa seringkali terjadi, seperti dalam persidangan kasus pengeboman dan kasus Usroh di Jawa Tengah (Baca Bab IV). Sekalipun demikian, tidak seorang hakim pun mau mempedulikan pencabutan pengakuan semacam ini, dan tidak pula melarang jaksa untuk melakukan kezaliman-kezaliman, sehingga tidak memberatkan tuduhan-tuduhannya kepada terdakwa. Peradilan terus saja berjalan, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa.

Seorang saksi bernama Darussalam, menyampaikan kesaksiannya dalam salah satu persidangan kasus Usroh. Hakim yang mengadilinya mengatakan, bahwa dia dapat dituduh sebagai orang yang melecehkan sumpah. Saksi tetap mengatakan, bahwa apa yang terdapat dalam BAP adalah bohong dan dimanipulir atas namanya. Tetapi hakim ketua memperingatkan dengan keras, dan meminta kepada jaksa penuntut agar yang bersangkutan dikenai tuduhan melecehkan sumpah.

Pengacara dari LBH, Abdul Hakim Garuda Nusantara mengatakan: “Tidak mudah bagi kita untuk membuktikan perlakuan buruk (terhadap terdakwa) karena polisi selamanya menyangkal hal itu, sekalipun sudah banyak tuduhan diarahkan kepada mereka. Selain itu para hakim sama sekali tidak membantu pencarian fakta terhadap tuduhan-tuduhan yang dituduhkan tersebut. Hal ini berkaitan dengan tidak adanya kebebasan yang dimiliki oleh hakim.”

Jaksa penuntut sering kali menolak menghadirkan saksi-saksi tertentu, sehingga dengan demikian pembela tidak dapat menanyai mereka. Walaupun pembela memprotes hal ini, namun pengadilan tetap membe-narkan para jaksa menyampaikan kesaksian tertulis sebagai ganti dari menghadirkan saksi-saksi tersebut, seperti telah kami terangkan pada Bab III. Walaupun oknum-oknum militer dan polisi tidak mau hadir dalam persidangan-persidangan kasus Dharsono, karena takut dicecar perta-nyaan oleh tim pembela guna mengungkap kejadian sebenarnya tentang kasus Tanjung Priok, untuk memperoleh bukti-bukti tambahan dari kasus tersebut.

Hal yang sudah sangat biasa terjadi dalam persidangan-persidangan kasus umat Islam, bahwa para terdakwa bersama-sama dijatuhi huku-man secara serentak atas kasus yang dituduhkan kepadanya, dan terkadang salah seorang di antara mereka dijadikan saksi pada persida-ngan temannya. Hal semacam ini sangat menyakiti hati pihak terdakwa di persidangan, sebab terdakwa tidak diambil sumpahnya sebelum dia ditanyai, padahal dia mempunyai hak untuk tidak menjawab pertanyaan apapun yang diajukan kepadanya. Akan tetapi, kami melihat bahwa tertuduh yang bersangkutan tampil sebagai seorang saksi dalam persidangan-persidangan lain, lalu diambil sumpah dan diminta untuk menjawab setiap pertanyaan.

Sekalipun pembela tidak mempunyai hak memanggil para saksi dari kalangan terdakwa, namun kebanyakan saksi-saksi yang dipanggil oleh para pembela masih berada di dalam tahanan. Hal semacam ini menja-dikan penguasa sebagai pemegang kata kunci, untuk menyetujui atau tidak pemanggilan saksi oleh pembela. Hal semacam ini sangat mengu-rangi kesempatan pembela untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap para saksi yang akan didengar kesaksiannya berkenaan dengan kasus yang didakwakan. Dalam kasus peradilan Irfan Suryahardy (baca Bab V), misalnya, pembela bermaksud memanggil Ahmad Zonet Sumarlan sebagai saksi, tetapi yang bersangkutan pada saat itu menjadi tahanan Kejaksaan. Jaksa penuntut menganjurkan agar yang bersangkutan tidak mau menjadi saksi. Dan ketika hakim menunda perkaranya pada persidangan berikutnya, Irfan berkata, “Tidak ada alasan untuk menunda, karena kami tidak hendak menunggu sesuatu yang tidak akan dilaksanakan. Saya tidak yakin, pengadilan ini dapat menghadirkan yang bersangkutan sebagai saksi. Banyak alasan jaksa untuk tidak mau bergeser dari sikap seperti ini; sebagaimana halnya ketika Zonet Sumarlan mengi-nginkan saya untuk dihadirkan sebagai saksi dalam persidangannya.” Irfan berkata lagi, “Saya tidak membutuhkan kesaksian, tetapi fakta bahwa tak seorangpun yang meminta hal ini dari saya.”

Ketika pembela hendak mengajukan saksi-saksi, yang masih bebas (belum ditahan), penguasa mengancam dan mengintimidasi mereka. Sebagai contoh, seorang saksi bernama Shaleh, menjadi sangat ketakutan sedemikian rupa sehingga saksi-saksi lainnya menolak untuk menjadi saksi (baca Kasus Syarifuddin Rambe dan Sofyan Sulaiman pada Bab II).

Majelis Hakim menggunakan kekuasaannya terhadap perkara-per-kara yang belum disidangkan, untuk menetapkan jumlah saksi yang boleh dihadirkan oleh pembela. Masalah ini menjadi diskusi panas, ketika berlangsung persidangan AM. Fatwa, karena Hakim menolak mentah-mentah untuk mendengarkan keterangan saksi bernama Ali Sadikin, mantan Gubernur DKI yang menjadi teman lama terdakwa, sekalipun ia pernah menjadi saksi pada kasus Dharsono. Sebab kesaksian Ali Sadikin ketika itu, diberitakan secara luas oleh media massa sehingga menye-babkan rezim menekan hakim untuk tidak mengabulkan hadirnya Ali Sadikin menjadi saksi pada kesempatan lain. Pembela Fatwa mendapat perlakuan tidak adil di depan persidangan lantaran keputusan semacam ini. Karena itu, tiem pembela menekan pengadilan untuk mencabut keputusannya sebelum terlihat terjadinya kezaliman yang lebih parah.

Bab 04-04 Tim Pembela di Intimidasi

Sekalipun segala tata tertib sudah dicantumkan, tetapi pengadilan sering memberikan peluang terhadap orang-orang yang mendapatkan tekanan untuk mengungkapkan pandangan-pandangannya secara terbuka di dalam persidangan. Pembela-pembela yang mahir sering memperlihatkan sikap penentangannya terhadap tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan hukum, kepada hakim dan meminta jaminan keselamatan bagi anggota-anggotanya. Sekalipun persidangan selamanya dimenangkan oleh pihak penuntut, namun ternyata hal semacam ini tidak bisa menghi-langkan luka politik yang tidak disadari oleh pengadilan. Persidangan-persidangan terbuka, terkadang mengungkapkan fakta-fakta yang muncul di dalam dipersidangan seperti dapat dibaca orang di media massa. Dalam persidangan-persidangan yang penting seperti yang terjadi di Jakarta, khususnya persidangan kasus Dharsono, AM. Fatwa dan sejumlah muballigh, media massa dilarang sama sekali untuk mempublikasikan-nya. Kritik terhadap hal ini ditimpakan kepada para hakim yang nota bene mereka itu berada di bawah cengkeraman militer.

Pada tahun 1982, ketika AM. Fatwa mengajukan gugatan terhadap tiga orang anggota militer dan Panglima Kopkamtib, Laksamana Soedomo, para pengacara yang menangani kasus ini mendapat perlakuan kasar, sehingga mereka mencabut kembali gugatannya, karena mengalamikan perlakuan demikian. Gugatan yang diajukan AM. Fatwa terhadap Soedomo dan lain-lainnya, ialah intimidasi yang dialaminya pada tahun 1980, ketika dia diculik oleh beberapa anggota militer dan dipermak habis-habisan. Sebagai akibatnya, dia diopname di RS selama beberapa minggu. Lebih dari itu, anggota tim pembelanya banyak menerima ancaman dan gangguan-gangguan terhadap harta milik mereka serta intimidasi terus menerus agar mengurungkan gugatannya. Tekanan dan intimidasi demikian hebatnya sehingga para pengacara AM. Fatwa mengundurkan diri sebagai pembela, kemudian Fatwa bersama-sama dengan anggota petisi 50 meneruskan gugatannya. Tetapi pengadilan menolaknya.

Tatkala persidangan terhadap kasus Islam dimulai pada tahun 1985, beberapa Lembaga Bantuan Hukum membentuk tim pembela menangani kasus tersebut. Hakim maupun Jaksa mengkritik para pembela, karena mereka menggunakan kata-kata politik di dalam setiap judul naskah pembelaannya. Sedangkan pihak terdakwa mendapat tekanan keras untuk mencari pembela lain. Misalnya, adalah Yunus bin Melta Halim, salah seorang terdakwa dalam kasus pengeboman BCA. Dia telah memin-ta dibela oleh suatu tim penasihat hukum, tapi kemudian ia berubah pikiran. Para pembela tidak mengetahui bahwa yang bersangkutan mencabut pemberian kuasa hukum kepada mereka, sampai menjelang beberapa saat sebelum sidang pertama diadakan. Kepada para pembela ini dikatakan, bahwa mereka telah diganti. Sewaktu Yunus ditanya tentang sebab-sebabnya, ia menjawab, "Hal itu dia lakukan demi keselamatan dirinya".

Betapa banyaknya terdakwa yang menghadapi kesulitan untuk memilih pembela yang akan melakukan pembelaan terhadap diri mereka, misalnya terdakwa bernama TB. Muhammad Jiddan (baca bab VII) dilarang untuk memilih pembela dari LBH di Jakarta. Karena pengadilan mengatakan: "Para pembela pada LBH tersebut tidak memenuhi syarat untuk menjadi penasihat hukum". Akhirnya dia dibela oleh LBH yang ditunjuk pemerintah, termasuk di dalamnya LKBH UII.

Upaya-upaya untuk menghancurkan profesi pengacara, telah berlangsung terhadap Buyung Nasution, pengacara yang membela kasus Dharsono. Persidangan ini menyelidiki kebenaran kejadian pembantaian Tanjung Priok. Ketika Hakim Ketua membacakan amar putusan pada akhir persidangan, Adnan Buyung bangkit dari duduknya, memprotes kata-kata yang digunakan oleh hakim, bahwa pengacara bertingkah laku tidak etis di dalam persidangan. Ia berulang kali mengajukan keluhannya, bahwa Kapolsek Tanjung Priok tidak muncul di persidangan sebagai saksi. Intrupsi Adnan Buyung ini, menimbulkan kekacauan dalam persidangan. Saat itulah seorang tentara masuk ke ruangan sidang untuk menenangkan suasana, tetapi Buyung Nasution berteriak menyuruhnya keluar seraya berkata, "Urusan persidangan adalah urusan hakim, bukan urusan tentara". Padahal sementara orang beranggapan, tindakan tentara tadi untuk menjamin keamanan sidang. Setelah itu Buyung Nasution dituduh melakukan *Contempt of Court*. Tuduhan semacam itu tidak sulit dicarikan alasannya, sebab kata-kata yang dilontarkan Nasution, dirasakan oleh majelis hakim sangat menusuk. Para hakim dengan keras menyerang Buyung karena dia telah berkesimpulan, bahwa persidangan ini menyebabkan situasi memburuk, karena kasus Tanjung Priok sebenarnya telah direkayasa. Hakim berpendapat, kesimpulan demikian sama sekali tidak berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Dan kesimpulan semacam ini sangat berbahaya. Sebab kesimpulan tersebut dapat menimbulkan opini umum, bahwa pemerintahan sudah bobrok, padahal penilaian seperti itu tidak benar dan tidak etis.

Kira-kira sebulan sebelum pengadilan Jakarta mengeluarkan putusan untuk menskors Adnan Buyung Nasution, karena dituduh menghina pengadilan atau melakukan *Contempt of Court*, muncul kemelut karena keputusan tersebut dianggap menyalahi prinsip praduga tak bersalah. Selain itu tidak jelas, lembaga mana yang berwenang untuk mengajukan tuduhan demikian, dan pejabat pemerintah mana yang mempunyai hak mencoret nama Buyung dari daftar pengacara manakala pemecatan itu nantinya mempunyai kekuatan hukum.

Nampak jelas bahwa pihak pengadilan berbeda faham dalam kasus ini, baik tentang dasar hukumnya atau seberapa jauh urgensinya menggebut Adnan Buyung Nasution. Waktu itu

Buyung berkata: "Pencatatan saya yang bersifat sementara hanyalah masalah waktu saja. Sebenarnya ini adalah persoalan politik, sebab rezim tidak menginginkan saya menjalani profesi pengacara".

Perbedaan pendapat menjadi kian sengit sehingga Ali Said, SH campur tangan menyelesaikan kasus pelik yang dihadapi pengadilan. Ali Said berkata: "Persoalan Buyung biarkanlah diselesaikan oleh organisasi himpunan pengacara. Karena organisasi inilah yang bisa menertibkan anggotanya dan dapat mengambil tindakan terhadap Buyung Nasution". Ternyata organisasi himpunan pengacara (IKADIN) mengambil tindakan terhadap Buyung. Ia mendapat peringatan keras karena melakukan perbuatan *Contempt of Court*. Namun Buyung mengomentari keputusan tersebut dengan sengit, "Para pemangku hukum di Indonesia jelas tidak senang dia berusaha untuk membela nama baiknya".

Langkah melawan hak Buyung Nasution untuk menjalankan tugas profesinya merupakan bagian dari operasi panjang rezim menekan pihak pengadilan terhadap profesi kepengacaraan. Operasi ini mulai berjalan sejak 1982, ketika para ketua pengadilan Tinggi mengadakan rakernas (rapat kerja nasional) mengeluarkan ketetapan untuk melakukan pengawasan terhadap para pengacara secara maksimal. Dan yang pertama kali menerapkan keputusan ini adalah Pengadilan Tinggi Jawa Timur dengan mengeluarkan peraturan pada tahun 1985, yang berisikan perintah kepada para pengacara untuk mencatatkan diri di pengadilan, supaya mereka dapat menjalankan profesinya dengan baik. Pengadilan juga memberikan wewenang penuh kepada dirinya sendiri untuk mencoret nama-nama pengacara yang menurut penilaian mereka tidak berperilaku baik di persidangan.

Dalam banyak kesempatan Ali Said, SH. ketua Mahkamah Agung sering menyinggung, bahwa hal tersebut hanyalah masalah waktu saja, memang Jawa Timur lah yang melaksanakan lebih dahulu sebelum hal tersebut diberlakukan secara nasional.

Bab 04-05 Kebebasan Pengadilan

Masalah prinsip bagi setiap orang yang dikenai tahanan dan diadili karena kasus-kasus politik, adalah tentang lembaga pengadilan yang menjadi kepanjangan tangan kekuasaan eksekutif. Dengan demikian, setiap tuduhan yang dilontarkan oleh pihak pengadilan terhadap terdakwa masalah politik, sebenarnya rekayasa ansich. Sebab pemisahan kekuasaan antara eksekutif dan yudikatif telah hancur sejak zaman demokrasi terpimpin. Ayat 19 UU No. 19 yang terbit tahun 1964 memberikan hak kepada pre-siden untuk melakukan campur tangan dalam setiap proses persidangan bilamana hal tersebut dianggap sangat perlu guna melindungi keamanan nasional dan kelangsungan revolusi. Ketika tahun 1965 muncul suara-suara protes untuk menghapuskan UU ini, ternyata Soeharto menolak dan mengatakan: "Pihak eksekutif tidak akan campur tangan dalam sepak terjang pengadilan, karena kebebasan pengadilan tidak akan menimbulkan ancaman (terhadap eksekutif)".

Pada tahun 1970, ditetapkanlah sebuah undang-undang mengenai pengadilan (UU No. 14 Th. 1970) Pada waktu itu dijelaskan, bahwa pengadilan telah memperoleh kembali kekuasaannya. Pada ayat 4, ditegaskan dalam penjelasannya sebagai berikut: "Tidak boleh ada tekanan dan tidak dibenarkan adanya upaya apapun dari pihak luar yang dapat mempengaruhi jalannya persidangan sehingga membuat hakim tidak bebas dalam membuat keputusan hukum".

Walaupun demikian, tidak pernah ada peraturan apapun yang menjabarkan pernyataan yang bersifat umum tersebut ke dalam tindakan nyata. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya, suasana pengadilan yang tidak bebas, semakin kuat karena adanya *ta'awun* (kolaborasi) antara pejabat pemerintah, bahkan berlanjut dengan jaksa, polisi dan militer.

Beberapa tahun belakangan ini muncul lembaga tidak resmi bernama MAHKEHJAHPOL (Mahkamah Agung, Kehakiman, Kejaksaan dan polisi) yang terdiri dari: Ali Said sebagai ketua MA, Ismail Shaleh sebagai menkeh, Hari Suharto sebagai jaksa agung dan Kapolri. Banyak ahli-hukum yang mengkritik lembaga ini, karena merupakan persekutuan yang kuat menghadapi setiap orang yang mendambakan keadilan di pengadilan-pengadilan Indonesia.

Para pembela yang menangani kasus HM. Sanusi dengan sengit menentang kegiatan lembaga yang merusak dan rahasia ini. Keputusan-keputusan lembaga ini dianggap sebagai contoh pengebirian keadilan di Indonesia.

Mahkehjapol ini merupakan lembaga nasional, sedangkan di tiap-tiap daerah dibentuk badan yang diberi nama "*three in one*", yang terdiri dari ketua pengadilan negeri, kepala kejaksaan negeri dan kapolres. mereka berkumpul secara rutin dan biasanya mengikut sertakan kepala daerah dan komandan militer setempat dalam rapat-rapatnya. Rapat-rapatnya berjalan secara rahasia dan biasanya rapat semacam itu dilakukan apabila ada persidangan kasus-kasus politik penting.

Apapun keadaannya, para hakim biasanya mengadakan koordinasi dengan birokrasi sebaik-baiknya, karena mereka adalah merupakan pega-wai sipil. Mereka mengekor saja apa yang menjadi kemauan eksekutif. setiap hakim berada di bawah kekuasaan Ketua mahkamah agung yang biasanya seorang jenderal militer. Anggota-anggota mahkamah Agung biasanya adalah oditur militer, sedangkan secara administratif hakim-hakim ini berada di bawah departmen kehakiman. Menterinya umumnya seorang jenderal. Dialah yang menentukan kenaikan pangkat dan penem-

patan tugas mereka. Sebagai pegawai negeri mereka menjadi anggota Korpri. Keanggotaannya bersifat paksaan. Ketua Korpri adalah Menteri dalam negeri, seorang jenderal militer juga. Jumlah anggota korpri ini harus mendukung ideologi negara dan politik pemerintah. Para hakim yang merupakan pegawai negeri dan sebagai anggota korpri dia diminta untuk menerima saja apa yang harus dilakukan. Hal inilah yang seringkali membuat para pembela enggan menangani kasus-kasus subversi.

Bab 05 Persidangan Kasus Muballigh

“Sekarang saja, tahun 1985 kritik terbuka para muballigh sudah dianggap sebagai kegiatan subversi. Pelakunya diancam hukuman mati. Hal semacam ini sangat menge-rikan”. Oetsmany El-Hamidy, Nov. 1985

BEGITU usai persidangan kasus Tanjung Pri-ok, dan menjelang berakhirnya persidangan kasus pengeboman BCA, maka dimulailah persidangan terhadap para muballigh. (Baca bab VI)

Kini, tibalah giliran tokoh-tokoh yang dianggap oleh pemerintah sebagai pembakar emosi massa, dan otak munculnya peristiwa-peristiwa kerusuhan. Para muballigh ini, dikesankan, sebagai sosok yang memiliki kemampuan orasi dan penyebab gara-gara munculnya tindakan keberingasan. Ceramah-ceramah yang dilontarkannya, telah menimbulkan akibat negatif serta tindakan-tindakan destruktif di tengah-tengah masyarakat. Menurut hukum di Indonesia, ucapan-ucapan memiliki konsekuensi hukum yang sama dengan tindakan.

Pada awalnya, orde baru bisa meyakinkan masyarakat bahwa ada segolongan muballigh yang menjadi biang keladi di belakang setiap kerusuhan di negeri ini. Mereka berusaha membakar emosi massa, kemudian melakukan tindakan melawan pemerintah. Pada saat yang sama, persidangan-persidangan yang diadakan untuk menghukum orang-orang yang dihormati oleh masyarakat secara luas, tetapi di samping itu mengintimidasi orang-orang yang bermaksud mengikuti jejak mereka. Target persidangan ini, ialah menghukum tokoh-tokoh yang mendukung kegiatan pendidikan dan dakwah Islam, demi menunjang pelaksanaan kehidupan yang dengan sunnah Rasul di dalam setiap aspek kehidupan.

Persidangan kasus muballigh merupakan fenomena baru dalam kehidupan politik di Indonesia, karena memang benar bahwa kaum muslimin tidak dalam suasana yang baik dan harmonis dengan penguasa yang mengendalikan Indonesia, sejak masa kolonial Belanda. Namun sebelum ini penindasan terhadap para muballigh tidak pernah terjadi secara meluas, lantaran mereka melakukan kegiatan dakwah atau menyampaikan ceramah agama.

Berikut ini adalah tuduhan yang sangat mendetail terhadap Mawardi Noor. Sesungguhnya terdakwa, baik sebagai individu ataupun sebagai anggota Korp Muballigh Indonesia, dituduh “secara berturut-turut di dalam berbagai kegiatan yang dapat dinilai sebagai perbuatan terpisah satu dengan lainnya, namun secara keseluruhannya menimbulkan berbagai macam tindak pidana yang dapat dikenai oleh undang-undang yang sama. Tujuan dari semua perbuatan itu adalah untuk menimbulkan keraguan terhadap ideologi negara, atau rencana pemerintah yang telah teratur.

Demikian pula ejekan dan pelecehan terhadap pemerintah yang sah serta aparatnya, menyebarkan rasa permusuhan, perpecahan, kekacauan dan kebingungan di tengah masyarakat atau seluruh masyarakat dalam arti yang luas. Semua kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa, dan yang dikampanyekannya, tidak lain maksudnya, agar pemerintah bersama masyarakat bersedia berpegang kepada ajaran Qur’an dan hadits. Kegiatan ini ia lakukan dalam bentuk ceramah, atau kegiatan lain berupa penerbitan atau ceramah keagamaan yang satu dengan lainnya saling berkaitan, sehingga saling mendukung dan dilakukan berulang kali”.

Persidangan-persidangan kasus ini dengan jelas berbeda sekali modelnya dari dua persidangan sebelumnya. Mayoritas terdakwa adalah muballigh-muballigh berpengalaman dan memiliki kemampuan mengkonter jaksa maupun hakim. Mereka mampu menarik simpati pengunjuk yang berada di luar ruang persidangan. Para muballigh ini dipukuli, disiksa dan dihinakan selama beberapa bulan dalam tahanan dan intro-gasi, karena itu beberapa orang saja yang berani menghadapi hakim secara gentleman. Para saksi dari pihak penuntut umum, mayoritas adalah anggota militer berpangkat rendah, atau pegawai sipil yang telah berbulan-bulan bertugas melakukan kegiatan mata-mata terhadap muballigh tersebut, seperti mencatat setiap ceramahnya disegenap pelosok tanah air. (Baca Lamp. IV) Bukti-bukti yang dikemukakan oleh jaksa, ialah berupa beberapa kaset ceramah yang direkam secara rahasia atau sepotong-sepotong dari ceramah-ceramah yang diberikan di dalam pengajian umum. Rekaman sepotong-sepotong yang digunakan oleh para jaksa penuntut, adalah hasil rekaman sejak tahun 1982 sehingga menyebabkan tim pembela bertanya-tanya”. Mengapa baru hari ini para tertuduh disidangkan, mengapa mereka tidak ditangkap sejak dulu?

Bab 05-01 Penangkapan Para Terdakwa

Pada tanggal 13 September 1984, sehari setelah pembantaian Tanjung Priok, ada 4 orang muballigh dicituk dari rumahnya dan kemudian ditahan. Mereka adalah: Abdul Qadir Djaelani, Tony Ardi, A. Rani Yunsih, dan Mawardi Noor.

Hari berikutnya, seorang berusia lanjut bernama Utsmani El-Hamidi pun ditangkap. Pada tanggal 19 September, AM. Fatwa juga ditangkap. Dan selanjutnya, ada beberapa orang lain yang ditangkap. Pada tanggal 2 Oktober, Salim Qadar di tangkap. Tanggal 21 Oktober Yayan Hendrayana ditangkap, dan 28 Oktober Drs. Ratonو ditangkap. Sembilan orang ini adalah aktivis dalam organisasi yang sama. Lima orang di antara-nya sebagai pimpinan Korp Muballigh Indonesia. Tiga orang lagi sebagai dosen pada PTDI (Perguruan Tinggi Dakwah Islam), sedangkan Utsmani El-Hamidi adalah rektornya, dan Yayan dan A. Qadir termasuk pengurus yayasan.

Sebagian besar dari mereka ini adalah penandatanganan deklarasi yang berjudul: "Pernyataan umat Islam Jakarta", ditulis oleh Abdul Qadir Djaelani di Tanjung Priok, 12 September 1984, yang isinya: "Berseru kepada pemerintah untuk tidak memaksakan kepada organisasi politik dan sosial menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal organisasi. Dalam persidangan A. Qadir Djaelani mengatakan bahwa sebenarnya dia ber-maksud menyampaikan deklarasi itu kepada DPR dan mengadakan demonstrasi di luar gedung DPR. Ketujuh orang penandatanganan ini telah dijatuhi hukuman. Mereka dihukum dalam persidangan yang secara berturut-turut diadakan untuk mengadili mereka, yaitu: Utsmani El-Hamidi, Yayan Hendrayana, Abdul Qadir Djaelani, Ratonو, Salim Qadar, Mawardi Noor dan Tony Ardi. Dua orang lagi menjadi buron setelah demonstrasi Tanjung Priok, yaitu Syarifin Maloko dan Nasir. Syarifin Maloko kemudian ditangkap dan pada saat itu juga dijatuhi hukuman. Sedangkan M. Nasir sampai sekarang tidak ada beritanya.

Amir Biki termasuk salah seorang penandatanganan deklarasi di atas, telah terbunuh oleh militer saat pembantaian Tanjung Priok. Sedangkan tiga orang lagi masih berada di dalam tahanan, walaupun tidak ada pernyataan yang menyatakan mereka disidangkan kasusnya. Orang-orang tersebut ialah Rasyad Muslim, MS. Suhari dan Amir Muhammad. Suhari pernah menulis buku berjudul "Membangun Tatanan Masyarakat Islam Indonesia" yang telah dilarang pendarannya.

Bab 05-02 Korp Muballigh Indonesia (KMI) & Asas Tunggal Pancasila

Sekalipun kami tidak banyak tahu tentang Korp Muballigh dan persyaratan keanggotaannya, tetapi sikapnya yang ideologis telah sering dipapar-kan di dalam berbagai penerbitan. Organisasi ini hanya berumur beberapa tahun. Didirikan untuk mengkoordinir kegiatan para muballigh yang jumlahnya semakin bertambah dari kelompok yang kritis terhadap kebijakan pemerintah. Organisasi ini berfungsi mengajak masyarakat kembali kepada agama dan berpegang teguh kepada garis Qur'an dan Sunnah Nabi. Mereka ini, sebagaimana diketengahkan dalam pernyataan organisasi Amnesty internasional bukanlah merupakan tokoh-tokoh agama dan tidak pula terikat pada masjid tertentu.

Anggotanya terdiri dari laki-laki dan perempuan. Sebagian besar waktunya dihabiskan kerja di kantor atau berdagang, mengajar ngaji, tetapi merupakan orang-orang yang taqwa. Dan mereka ini dikenal sebagai orang-orang yang pandai bicara. Setiapkali diundang bicara mereka selalu siap. Biasanya terjadi dalam seminar-seminar atau diskusi-diskusi ke Islam yang dapat dilakukan di mana saja dan dalam kesempatan apa saja. Ceramah yang disampaikan oleh para muballigh biasanya memakan waktu beberapa jam. Yang biasa dibicarakan di dalam ceramah-mahnya ialah persoalan akhlaq, politik dan komentar atas berbagai persoalan kemasyarakatan. Ceramah biasanya disampaikan secara serius tapi santai dan bebas. Umumnya pengajian ini dihadiri ribuan orang, terutama sekali di kampung-kampung miskin. Ukuran sukses tidaknya seorang muballigh, dilihat dari jumlah besarnya pengunjung. Oleh karena itu acaranya disebar luaskan atau didatangkan muballigh terkenal seperti tokoh-tokoh yang ditangkap tersebut. Para muballigh biasanya menerima undangan dari tempat-tempat yang jauh. Demikianlah peranan yang dimainkan oleh muballigh di dalam menyatukan kelompok-kelompok Islam yang banyak terdapat di dalam masyarakat Islam, apalagi di dalam Islam tidak dikenal adanya sistem kependetaan.

Syafruddin Prawiranegara adalah ketua umum KMI, public figur yang memperoleh penghormatan tinggi di masyarakat. Ia memainkan peran politik beberapa tahun lamanya setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ia seorang anggota partai Masyumi, juga pernah menduduki jabatan beberapa kali dalam kabinet, setelah proklamasi kemerdekaan. Pernah menjadi Perdana Menteri dalam pemerintahan PDRI (Pemerintahan Darurat Republik Indonesia) yang didirikan di Sumatera Barat, 1948, yaitu ketika Soekarno sebagai orang terakhir pemerintah republik ditangkap Belanda, sesudah Belanda menduduki ibu kota RI. Setelah penyerahan kedaulatan ke tangan RI, Syafruddin Prawiranegara menjabat sebagai Menteri keuangan di dalam beberapa kabinet, lalu menjadi gubernur Bank Central selama beberapa tahun. tetapi karena sikap kritisnya terhadap politik Soekarno semakin tajam, pada tahun 1958 ia bergabung dengan pemerintah

pembangkok di Sumatera Barat dan menjabat sebagai perdana menterinya. Setelah menyerahkan diri pada tahun 1961, ia kemudian dijebloskan ke penjara selama beberapa tahun sampai Soeharto naik memegang kekuasaan. Ternyata dalam waktu singkat saja terungkaplah bahwa Soeharto tidak menyukai Masyumi, sama halnya dengan Soekarno. Karena itu Syafruddin kembali lagi sebagai pengkritik pemerintah dan termasuk salah seorang tokoh Masyumi yang menandatangani petisi 50 tahun 1980. Beliau mempunyai pendirian yang berseberangan dengan pemerintah dalam masalah pengelolaan ekonomi dan menjadi pendukung bagi demokrasi lebih besar untuk rakyat, baik pada masa pemerintahan Soekarno maupun Soeharto. Sikap semacam ini menjadikan beliau termasuk dalam golongan penganjur kebebasan berpendapat di Indonesia dan salah seorang mediator yang memper-temukan antara para muballigh dan kelompok-kelompok oposan pemerintah yang sangat lugas suaranya dalam melontarkan kritikan. Pada permulaan disahkannya asas tunggal oleh MPR pada bulan Maret 1983 sebagai satu-satunya ideologi yang diakui negara, Syafruddin Prawira-negara menulis surat kepada Soeharto untuk menjelaskan pendirian kaum muslimin terhadap masalah tersebut. Ia menulis: "Kalau orang-orang Kristen tidak dibenarkan membentuk organisasi atas dasar Kekristenan, baik Protestan ataupun Katholik, dan kaum muslimin tidak boleh mendirikan organisasinya berdasarkan Islam dan begitu pula warga negara Indonesia lainnya yang beragama lain, maka sesungguhnya Indonesia menjadi sebuah negara nasionalis-fasis, sehingga keburukan dan kejahatannya tidak berbeda dengan negara-negara komunis".

Beliau juga mengingatkan, bilamana kita menginginkan persatuan nasional dan tidak merusak harmonisasi hubungan kemasyarakatan seperti yang menjadi keinginan dan tekad asas tunggal, maka kelak hasil yang dapat dipetik bakal berlainan dengan yang kita inginkan.

Setelah kasus Tanjung Priok dan penangkapan sejumlah besar anggota-anggota KMI, Syafruddin Prawiranegara selaku ketua KMI menerbitkan bulletin untuk para muballigh pada bulan April 1985. Beliau menyatakan, "Diskusi mengenai beberapa masalah penting, terutama sekali masalah asas tunggal adalah merupakan hak setiap warga negara yang dijamin oleh hukum dan konstitusi. Para muballigh menilai atau meyakini bahwa telah terjadi kezaliman, dan mengingatkan orang-orang yang melakukan kezaliman itu. Bahwa kewajiban para muballigh adalah memberikan nasehat dan menuntun masyarakat ke jalan yang terbaik agar dapat memecahkan permasalahan dengan sebaik-baiknya. Untuk menentang kezaliman, yang melaksanakan undang-undang berdasarkan kekuasaan bukanlah kewajiban KMI semata. Tetapi ini tidak berarti mengajak untuk melawan hukum yang berlaku. Problem kaum muslimin Indonesia yang hidup di bawah naungan konstitusi ciptaan manusia dan sekaligus di bawah konstitusi Ilahiyah sekaligus adalah merupakan hal yang patut didiskusikan bersama. Kami, kaum muslimin, menerima Pancasila sepenuh hati sebagai dasar resmi negara, tetapi kami sebagai kaum muslimin mustahil menerima Pancasila sebagai dasar hidup kami. Rezim militer sekalipun berusaha menghindari memasukkan tokoh yang menonjol dan terkenal, ke dalam penjara, namun ternyata selalu merintangi dan menekan mereka, karena penjelasan-penjelasan yang berbeda dengan rezim. Pada bulan Juni 1985, Syafruddin di tangkap dan di interogasi berkenaan dengan ceramah yang disampaikan pada akhir bulan Ramadhan. Interogasi itu dilakukan atas perintah Kodam Jaya Tri Sutrisno, yang merupakan kelompok perwira tinggi, dahulunya mendapatkan didikan Islam dengan baik dan dianggap sebagai orang yang dapat diterima dilingkungan umat Islam. Pada bulan Juni 1986 dia diangkat sebagai Panglima Angkatan Bersenjata (Pangab). Nasehat yang membuat Tri Sutrisno sangat marah, yakni tulisan dengan judul "Bebas-kan Diri Kita Dari Rasa Ketakutan". Dalam pasannya ini, Syafruddin mengkritik cara-cara intimidasi terhadap masyarakat Islam setelah peristiwa Tanjung Priok. Demi keadilan dan peradaban, kaum muslimin seharusnya menyiapkan diri menghadapi musuh-musuh peradaban.

Adalah keliru, jika kita beranggapan bahwa KMI dengan seluruh anggotanya terlibat di dalam pembentukan opini massa tentang masalah-masalah fundamental yang dihadapi umat Islam Indonesia, padahal dalam persidangan kasus para muballigh terbukti adanya sejumlah pendapat yang berbeda. Mawardi Noor, wakil ketua KMI di dalam persidangannya menyatakan: "Saya ulangi penolakan saya terhadap gagasan asas tunggal. Hal ini tidak berarti bahwa saya menolak Pancasila, tetapi justru sebaliknya. Penolakan saya hanyalah semata-mata untuk menjaga kebersihan dan keaslian Pancasila. Sejak semula Pancasila dimaksudkan sebagai payung yang menaungi semua aliran dan ideologi serta keyakinan yang berkembang dan mengakar di dalam setiap warga negara bangsa ini. Karenanya tidak patut ada asas tunggal yang nantinya menggusur aliran-aliran lain, terutama sekali aqidah keagamaan".

Sedangkan Abdul Qadir Djaelani, hanya menunjukkan penghinaannya kepada Pancasila yang dikatakannya sebagai filsafat ciptaan manusia yang mengalami penafsiran yang berubah-ubah. Pancasila menurut rezim Soeharto, adalah suatu filsafat negara yang kokoh dan agung, karena telah muncul sejak zaman nenek moyang dahulu. Padahal nenek moyang dahulu sebenarnya adalah orang-orang bodoh dan primitif.

Sedangkan pendapat AM. Fatwa, hampir sejalan dengan pendapat Mawardi Noor. Dia mengatakan: "Pancasila tidak lebih dari sebuah statemen yang memberikan tempat bagi semua pandangan, keyakinan dan pendapat sesuai dengan keadaan sebenarnya di dalam negara. Fatwa tidak mendukung tuntutan untuk mendirikan negara Islam seperti yang dituduhkan oleh pengadilan. Tetapi dia mendukung pendapat, bahwa Islam tidak bisa dipisahkan antara urusan agama, politik dan negara.

Bab 05-03 Persidangan

PADA tanggal 20 Juli 1985, mulailah menyidangkan kasus dua orang muballigh di pengadilan Jakarta Utara. Masing-masing tertuduh disidang di ruangan tersendiri, tetapi saksi-saksinya sama. Kedua terdakwa ini adalah Salim Qadar dan Hendrayana. Salim menjadi saksi untuk terdakwa Hendra, dan sebaliknya Hendra dijadikan saksi bagi terdakwa Salim. Keduanya dijadikan saksi oleh jaksa penuntut umum untuk kasus masing-masing.

Kedua terdakwa ini kesaksiannya menyangkut semua muballigh yang dihadapkan ke persidangan dalam kasus pembantaian Tanjung Priok. Karena itu secara rinci kami paparkan di bawah ini.

1. Nama : H. Salim Qadar
Umur : 51 tahun.
Jabatan : Ketua III KMI
Alamat : Banten Jawa Barat
Keterangan : Dia seorang tokoh masyarakat Banten dan merupakan kelompok besar di Tanjung Priok. Dia dituduh memprovokasi massa melalui ceramah-ceramahnya agar ikut demonstrasi pada 12 September 1984 malam. Sebagaimana halnya dengan muballigh lain, selalu diincar oleh intel selama beberapa bulan. Jaksa penuntut umum mengutip sebagian dari ceramah-nya yang disampaikan pada tahun 1984 terutama bagian-bagian yang berkenaan dengan kritiknya terhadap asas tunggal dan program Keluarga Berencana (KB). Jaksa beranggapan bahwa ceramah semacam ini membangkitkan kemarahan masyarakat dan membahayakan ideologi negara, menyebarkan rasa kebencian dan perpecahan serta melawan pemerintah. Jaksa juga menuduh terdakwa mengkritik secara tajam beberapa orang menteri dan anggota DPR karena politik dan kegiatan mereka yang merusak. Saksi yang dihadapkan bagi tertuduh Salim terdiri dari 5 orang militer dan 6 buah kaset ceramah.

Salim menolak semua tuduhan dan menyatakan bahwa kritik-kritik-nya terhadap asas tunggal adalah merupakan hak warga negara dalam menentang setiap peraturan dan politik pemerintah. Di depan pengadilan ia menceritakan perannya pada dasawarsa 1960-an sebagai pemimpin front Pancasila di Tanjung Priok, sebuah organisasi yang mendukung militer dan membantu melawan komunis sesudah peristiwa kudeta tahun 1965. Dia menegaskan bahwa dirinya tidak menentang Pancasila, tetapi yang dia tentang adalah pemaksaan Pancasila sebagai asas tunggal.

2. Nama : Hendrayana
Umur : 36 tahun
Asal : Majalaya
Jabatan : Sekretaris umum KMI cabang Jakarta utara, dan asisten dosen PTDI, mata kuliah dakwah Islam.
Keterangan : Dia termasuk penandatangan petisi umat Islam Jakarta. Dia ikut memberikan ceramah dalam pe-ngajian di Tanjung Priok, 12 September 1984. Tuduhan yang dikenakan kepadanya sama dengan tuduhan terhadap Salim Qadar. Jaksa penuntut menonjolkan masalah ceramah yang ia sampaikan pada Juli 1984 berjudul "Pancasila Sebagai Asas Tunggal Hanya Akan Menjerumuskan Orang Ke Keramat Tunggak". Dia juga dituduh melakukan tindak pidana karena mengkritik Laksamana Soedomo yang menjadi menteri tenaga kerja. Soedomo telah mengirim TKW ke Arab Saudi sebagai tenaga kerja murah. Dia mengkritik Ali Murtopo sebagai Aspri Presiden Soeharto. Tidak ada orang yang menyangkal bahwa dia telah menggunakan kata-kata kasar terhadap pemerintah sekalipun mereka terus menerus menyatakan dirinya sama sekali bersih dari tuduhan melakukan subversi. Jika mereka dianggap melakukan kejahatan maka kejahatan yang mereka lakukan itu tidak lain hanyalah berupa kata-kata yang dengan terus terang mereka ungkapkan bahwa mereka berbeda dengan pemerintah yang mereka sampaikan dalam beberapa kesempatan. Jaksa penuntut menuduh Yayan telah mempergunakan pernyataan-pernyataan yang dapat menimbulkan kesalah-fahaman besar di dalam masyarakat. Seperti yang dikutip oleh mass media mengenai jalannya persidangan ini, bahwa kedua terdakwa kondisi kesehatannya sangat buruk akibat perlakuan tidak manusiawi dan perawatan kesehatan yang kurang. Salim yang menderita kencing manis ternyata hakim tidak mengizinkan penundaan persidangan kasusnya. Hanya Yayan ketika dia muntah-muntah di ruang sidang, hakim mengizinkan penundaan sidang atas permintaan pembela.

Kedua terdakwa dituntut hukuman seumur hidup oleh jaksa. Tetapi hakim memutuskan hukuman bagi masing-masing selama 22 tahun. Setelah persidangan kedua orang ini, Fatwa dan Abdul Qadir Djaelani diajukan ke pengadilan. Keduanya tidak asing lagi bagi polisi, tentara dan pengadilan.

1. Nama : Abdul Qadir Djaelani
Umur : 46 tahun
Keterangan : Pertamakali diadili tahun 1973, divonis 2,5 tahun, karena keterlibatannya dalam demonstrasi menentang RUU Perkawinan. Kemudian dia ditangkap lagi sebelum pemilu 1977 karena terlibat dalam penyerangan tempat *massage* (tempat pijat) di Jakarta.

Walaupun ke dua hal tersebut belum dilakukannya tetapi Djaelani ternyata dijatuhi hukuman sekali lagi selama 2 tahun penjara. Djaelani pernah menjabat sebagai ketua pemuda GPII (Gerakan Pemuda Islam Indonesia). Pada tahun 1984, sebelum dia ditangkap, dia adalah pengurus KMI dan dikenai tuduhan berkaitan dengan ceramah-ceramah yang diberikannya. Dia juga didakwa terlibat secara langsung dalam penge-boman BCA dan tempat-tempat lain. (Baca bab VI). Masyarakat luas yang menghadiri persidangannya membuktikan dia sebagai seorang muballigh yang dicintai dan terpuja di dalam masyarakat. Pengunjung yang menghadiri persidangannya jumlahnya sangat banyak. Sekalipun dilakukan pemeriksaan ketat bagi pengunjung yang masuk ke ruang sidang. Dalam pemeriksaan ini diteliti KTP dan tubuhnya. Di luar sidang ratusan pengunjung yang berdiri untuk mendengarkan jalannya persidangan lewat pengeras suara. Keterangan-keterangan yang disampaikan terdakwa seringkali mendapatkan aplaus dari para pengunjung.

Dalam pledoinya yang berjudul: "U U Kadaluarsa yang Tetap Berlaku Sesudah 40 TH Indonesia Merdeka". Djaelani menerangkan adanya perlakuan buruk yang dialami para tapol. Dia menjelaskan adanya tindakan penghinaan dan pemaksaan untuk mengorek pengakuan terdakwa. Mereka menggunduli kepala dan mencukuri kumis, mempermak sampai pingsan, melarang membaca dan menulis dan melarang melakukan shalat Jum'at.

Sebagian besar dari bukti-bukti yang diutarakan oleh jaksa tentang tindak pidana Abdul Qadir Djaelani berupa rekaman ceramah yang telah dimanipulasi oleh intel-intel militer. Pada saat dua orang anggota militer setempat membacakan ceramah-ceramah Djaelani yang berisikan kritik terhadap RUU Keormasan, para pengunjung di luar sidang bersorak-sorak dan memukulkan sandal atau sepatu berama-ramai ke tanah.

Tentang tuduhan terhadap dirinya sebagai orang yang terlibat penge-boman Jakarta ternyata diajukan seorang saksi saja bernama Amir Wijaya, orang yang dianggap bertanggung jawab terhadap dana yang diterimanya dari Sanusi (Baca bab VI). Wijaya menganggap bahwa Djaelani telah meminta sejumlah dana dari dirinya dan juga beberapa buah bom dua bulan sebelum terjadinya peristiwa pengeboman pada bulan Oktober 1984. Djaelani menyangkal semua ini. Dia dapat membuktikan alibinya bahwa pada saat itu dia berada di Bandung, padahal menurut pengakuan Wijaya dia bertemu dengan Djaelani pada saat itu di Jakarta. Kemudian jaksa menghadirkan seorang saksi yang memberatkan Djaelani tentang peranannya dalam pengeboman. Beberapa pengakuan dari saksi ini di dalam BAP dicabut kembali, sebab menurutnya pengakuan itu diberikan karena tekanan.

Jaksa menuntut Djaelani dengan hukuman seumur hidup, tapi hakim memvonis hukuman 18 tahun penjara.

2. Nama : AM. Fatwa
Umur : 46 tahun
Asal : Bone, Sulawesi
Keterangan : Sejak umur 20 tahun sudah menjadi aktivis. Dia pernah ditangkap pada zaman rezim demokrasi ter-pimpin. Pada akhir dasawarsa 1960-an pernah menjadi rohaniawan di Angkatan Laut. Pada dasawarsa 1960-an terpilih sebagai ketua pembinaan rohani di DKI Jakarta, dimasa Ali Sadikin menjabat Gubernur DKI.

Saat ini Fatwa bekerja sebagai sekretaris MUI Jakarta dan ketua lembaga Tahfizul Qur'an di Jakarta di samping Koordinator muballigh se Jakarta.

Pada awal masa berdirinya orde baru setelah tahun 1965 Fatwa mendukung pemerintahan orde baru Soeharto, tetapi kemudian berbalik menjadi pengkritik rezim militer ini.

Pada tahun 1978 dia ditahan selama 9 bulan tanpa diadili. Karena dia dengan terang menentang dipersamakannya aliran kebatinan dengan agama tauhid. Ia mengatakan, "Aliran kepercayaan tidak termasuk dalam lima agama resmi: Islam, Kristen sebagai agama langit, Budha dan Hindu sebagai agama yang diakui negara. Setelah bebas dari tahanan, tak lama kemudian dipecat dari kepegawaian. Dia kemudian ditahan selama 2 minggu karena ceramahnya yang berisi kritik terhadap kebijakan pemerintah. Lalu menjadi pembantu pribadi Ali Sadikin ketika yang bersangkutan digusur dari jabatannya sebagai Gubernur, 1977.

Bulan Agustus 1979 Fatwa ditangkap untuk ke dua kalinya dan dipermak. Rezim militer memperlakukannya dengan kasar, fisik maupun mental. Ketika ia bergabung dalam

penandatanganan petisi 50 pada Maret 1980 dia menjadi sekretaris badan pekerja hariannya yang mengadakan pertemuan-pertemuan secara teratur di rumah Ali Sadikin. Sekalipun Fatwa tidak dilarang menjadi muballigh, komandan-komandan militer selalu mengingatkan pada para pengurus takmir masjid, untuk tidak memanggil Fatwa sebagai khatib atau penceramah. Berbagai usaha Fatwa gagal, seperti halnya nasib para penandatanganan petisi 50 lainnya, dia kehilangan kesempatan memperoleh kredit Bank. Pengajian-pengajian yang disampaikannya di dalam berbagai pertemuan seringkali diganggu. Pengeras suaranya dimatikan, rumah dan keluarganya diserbu orang serta hubungan telponnya diputus.

Pada tahun 1980 dia ditangkap 2 kali, disiksa oleh intel-intel DKI secara sadis. Dibelakang hari dia mengajukan gugatan ke pejabat yang bertanggung jawab, termasuk didalamnya Laksamana Soedomo yang menjabat sebagai panglima Kopkamtib, karena dialah yang dianggap pimpinan dari orang-orang yang harus dimintai tanggung jawab. Guga-tannya ini hilang begitu saja setelah para pembelanya menarik diri dengan alasan adanya tekanan dan intimidasi. Pada 19 September 1984 Fatwa ditangkap lagi setelah ia mengikuti pertemuan di mushalla yang berdekatan dengan rumahnya. Dalam pertemuan ini dibahas kasus Tanjung Priok. Saat ditangkap dia tidak kedapatan memiliki lembaran putih yang berisikan kritik kasus pembantaian Tanjung Priok. Pada saat ditangkap jaksa memberitahu bahwa ditangkap karena ceramah-ceramahnya yang disampaikannya dua tahun belakangan ini. Tuduhan yang dihadapkan kepadanya menyangkut tindak pidana kriminal, bukan tindak pidana subversi. Dua minggu setelah penahanannya, sampai dengan dia mene-rima ancaman penahanan diketahui bahwa penyebabnya ialah pener-bitan lembaran putih.

Setelah peristiwa pengeboman di Jakarta, dan peristiwa 4 Oktober 1984, jaksa penuntut umum dalam introgasinya berusaha untuk mema-sukkan Fatwa ke dalam dakwaan teroris. Di dalam persidangan, Fatwa mengatakan, ketika dia dipindahkan ke Rutan Salemba, Tasrif Tuasikal menemui dirinya untuk pertamakali. Dialah orang yang mengaku dibiayai untuk melakukan penyerangan dalam peristiwa peledakan bom di Jakarta.(Baca bab V).

Tuasikal tiba-tiba datang kepada saya dengan tujuan agar saya memaafkannya, padahal saya tidak tahu apa kesalahan yang dilakukan pada saya. Dia benar-benar merasa sangat tertekan karena dia menyam-paikan pengakuan-pengakuan yang menyudutkan saya. Untuk meyakinkan hal ini mereka menunjukkan gambar-gambar, ada yang mengatakan bahwa Tuasikal menerima dari saya uang 2000 dolar untuk membeli bom. Saya benar-benar marah mendengar kebohongan semacam ini, tapi dia meminta agar saya mau memaklumi kondisinya. Ia menunjukkan bekas-bekas luka didadanya karena disiksa siang malam, dan tangan serta kakinya membengkak.

Tuduhan yang dikenakan pada Fatwa adalah pertemuan yang dila-kukannya di Mushalla dekat rumahnya. Pertemuan inilah yang mengakibatkan malapetaka sehingga memunculkan tuduhan-tuduhan yang juga dikenakan pada umat Islam dalam masa-masa persidangan Fatwa. Jaksa beranggapan bahwa dalam pertemuan ini telah dibicarakan rencana melakukan serangan dengan bom sebagai tindak balasan terhadap kasus pembantaian Tanjung Priok. Dia juga dituduh ikut menandatangani lembaran putih dan melakukan teror mental terhadap pejabat-pejabat pemerintah.

Persidangan AM. Fatwa terus menerus dikunjungi orang. Fatwa menggunakan ruang sidang untuk menyerang kebijakan-kebijakan pemerintah yang zalim. Hal ini membuat takut hakim yang selalu mengulang-ulang tuduhan terhadap dirinya dan tim pembelanya, sengaja mengulur-ulur waktu memperpanjang proses, sehingga masa persidangan habis bersama dengan habisnya masa penahanan. Sebenarnya terjadinya penundaan waktu dikarenakan introgasi yang dilakukan sebelum pengadilan dibuka, karena introgasi ini telah memakan waktu 8 bulan.

Pada tahap-tahap akhir, majelis hakim berusaha dengan segala upaya mempercepat proses pradilan atas diri Fatwa. Fatwa menulis pledoi setebal 1118 halaman. Hal ini merupakan sesuatu yang luar biasa., padahal dia tidak memperoleh fasilitas apapun untuk dapat menyusun pledoi semacam itu. Ia menulis di dalam sel tahanan tanpa bantuan orang lain. Hakim memintanya membaca pledoi tanpa istirahat hingga menjelang tengah malam. Dia melakukan penyerangan secara tajam terhadap rezim yang represif dan militer yang mendominasi kehidupan sosial politik. Ujarnya, "Kelompok Petisi 50 telah menulis sebuah pernyataan untuk memberikan reaksi atas hilangnya demokrasi di Indonesia". Fatwa membaca pledoinya selama dua hari dan beberapa jam tanpa berhenti. Tetapi tekanan fisik yang dialami olehnya memang berat. Pada hari ketiga ia pingsan di ruang pengadilan dan dilarikan ke RS. Tiga hari kemudian dia dibawa lagi ke ruang persidangan untuk memba-cakan pledoinya dengan duduk di atas kursi roda. Tetapi disini dia pingsan lagi. Kali ini dia tidak lagi dilarikan ke RS, tetapi dimasukkan ke dalam sel penjara. Dua hari kemudian, dihadirkan lagi kepersidangan. Kali ini tim pembela yang membacakan kelanjutan pledoinya. Namun Fatwa kembali lagi pingsan. Petugas-petugas yang terdapat di ruang persidangan, kali ini mengejeknya. Akhirnya Fatwa divonis 18 tahun penjara.

Pada bulan September 1985, dimulailah persidangan untuk tiga terdakwa lain, yaitu:

1. Nama : Tony Ardi
Umur : 31 Tahun
Pekerjaan : Muballigh, Anggota KMI
Jabatan : Ketua HMI Cab. Jakarta

Keterangan : Seorang muballigh muda yang digemari mahasiswa di Jakarta. seringkali diundang ceramah ke Yogya-karta untuk berbicara di masjid Kampus.

Pada tahun 1983 dijatuhi hukuman 9 bulan, karena dia mengkritik pemerintah yang melarang pelajar putri dan mahasiswi menggunakan jilbab di sekolah-sekolah pemerintah. Dia ditangkap pada bulan Oktober 1984, karena telah memberikan ceramah yang berapi-api selama beberapa bulan sebelum bulan September tahun yang sama. Khotbahnya diter-bitkan tahun 1983. Pada awal persidangan kasusnya dia menyampaikan keluhan tentang buruknya perlakuan dan merosotnya kesehatannya da-lam tahanan. Pada bulan kedua persidangannya tim pembela dan teman-temannya yang hadir di dalam persidangan berteriak-teriak ketika dia tidak mau menjawab pertanyaan dalam persidangan. Bahkan dia menga-takan,"bahwa dirinya memang bersalah dan minta maaf kepada majelis hakim". Sekalipun demikian persidangan tetap dilanjutkan. Jaksa penun-tut mengajukan tuntutan hukuman penjara 7 tahun. Pengadilan menga-nggap dia sudah keterlalu-an dan divonis 9 tahun. Ketika vonis dibacakan, dia menyatakan tidak akan naik banding, tetapi akan meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat. Kami tidak memperoleh informasi yang menjelaskan mengapa akhirnya Tony Ardi berubah pikiran dan mengaku bersalah. Padahal di dalam persidangan dia mengeluh adanya tekanan fisik dan mental yang dialaminya selama dalam tahanan.

2. Nama : Mawardi Noor
Umur : 60 tahun
Jabatan : Pengacacara, Wakil Ketua KMI, pernah menjadi anggota parlemen dari partai Masyumi.
Keterangan : Ketika ditangkap dia masih menjabat sebagai pengurus Rabithah Alam Islami yang berkantor pusat di Makkah. Tuduhan pokok yang dikenakan kepadanya seperti berikut ini.

Ia dituduh menolak program-program pemerintah dan mengkritik Pendidikan Moral Pancasila. Ia mengatakan kemiskinan di Indonesia adalah akibat kezaliman yang dilakukan oleh penguasa. Media massa tidak menyebutkan bagaimana perlakuan yang diterima oleh Mawardi Noor selama dalam tahanan, seperti yang dinyatakan oleh AM. Fatwa di dalam pledoinya, bahwa pernah ketika dia dalam tahanan militer Cimanggis, penjaga melepaskan ular berbisa ke dalam tahanannya. Petugas tertawa-tawa mendengar jeritan ketakutannya.

Terdakwa yang pengacara ini menyampaikan keluhan dengan mengatakan, bahwa sulit bagi dia untuk mendapatkan pengacara yang dapat diajak bertukar pikiran. Dia menyangkal semua tuduhan. Ketika jaksa mengutip potongan-potongan ceramahnya yang bersifar provokatif sebagai bukti, dia menolak dengan keras. Ujarnya, "Mengapa tidak ditangkap waktu itu, dan mengapa harus menunggu munculnya tragedi Tanjung Priok? Dalam eksepsinya, terdakwa menyatakan bahwa penda-pat-pendapat yang ia lontarkan sudah merupakan pendapat umum di masyarakat Indonesia. Selanjutnya ia berkata:"Bilamana pengadilan mengadili para muballigh karena ceramah-ceramahnya sebagaimana terjadi sekarang ini maka saya sangat khawatir, dalam waktu dekat, kita akan menyaksikan ribuan bahkan jutaan orang Islam yang ditangkap. Hal ini akan merupakan tragedi yang menghancurkan umat dan negara. Dan kita akan memperoleh azab dan laknat Allah. Saya sama sekali tidak percaya bahwa di dunia ini ada sebuah negara yang mempidanakan para penceramah dan pengkhotbah seperti yang dilakukan disini".

Mengenai tuduhan bahwa dirinya membuat ketidakstabilan akibat ceramah-ceramahnya, maka Mawardi Noor menyatakan dia telah menyampaikan dakwah Islam sejak 45 tahun lalu, dan belum pernah menimbulkan kekacauan dalam bentuk apapun atau mengganggu keamanan akibat ceramah-ceramahnya. Mawardi Noor kemudian divo-nis 14 tahun, yang berarti dia akan tinggal di penjara sampai mati.

3. Nama : A. Rani Yunsih
Umur : 41 tahun
Jabatan : Ketua Fron Pelajar Kalimantan Barat, sebuah organisasi yang mendukung Suharto dan juga mendukung pembubaran PKI pada tahun 1965.
Keterangan : Ia dijatuhi hukuman oleh pengadilan Jakarta Timur karena dituduh menghasut massa, melakukan kekerasan dalam demonstrasi Tanjung Priok dan menyampaikan kritik-kritik pada pemerintah dalam ceramahnya pada tahun 1984. Tuduhan Jaksa terhadap dirinya, bukti-buktinya lemah karena terbukti dia tidak melakukan penghasutan. Misal-nya, dua orang saksi yang diajukan oleh jaksa, kedua orang ini bekerja sebagai petugas Hotel Indonesia. Mereka mengatakan tidak ingat isi ceramah yang disampaikan terdakwa di hotelnya. Media massa menyebutkan bahwa kedua orang saksi ini rasialis. Salah seorang saksi mengatakan, dia tidur ketika ceramah dimulai. Salah seorang dari mereka ditu-duh oleh jaksa terlibat dalam peristiwa Tanjung Priok (Baca bab II). Kedua saksi ini bernama Syarifuddin Rambe dan Sofyan Sulaeman. Ia menyangkal dengan keras adanya kaitan antara ceramah terdakwa dengan keberingasan yang terjadi di Tanjung Priok.

Rani Yunsih menolak semua tuduhan-tuduhan jaksa yang mengata-kan gambar dan kaset-kaset ceramah yang dibawa oleh intel militer tidak dapat diterima sebagai bukti, karena barang tersebut tidak diambil dari rumahnya. Hakim menerima penolakannya. Yunsih yang dituntut 17 tahun penjara, kemudian datang ke tempat duduk jaksa dengan marah. Media massa menggambarkan persidangan kasusnya sebagai dagelan. Pengadilan menyatakan terdakwa sebagai orang yang telah berbuat salah bukan karena menghasut, tetapi semata-mata karena paket yang ditetapkan pemerintah. Akhirnya dia divonis 7 tahun penjara. Sekalipun banyak orang menganggap vonis ini sedang-sedang saja bila diban-dingkan dengan tuntutan jaksa dan terdakwa lain, tetapi terdakwa dan tim pembelanya mengatakan, akan mengajukan permohonan naik banding.

4. Nama : Ahmad Ratono
Umur : 30 tahun
Pekerjaan : Mantan Angkatan Laut, dan mahasiswa PTDI.
Keterangan : Kami tidak dapat mengatakan dia sebagai seorang muballigh, sebab dia baru saja masuk Islam. Dia di-tuduh karena ketika itu dia berada di Tanjung Priok, membawa pengeras suara pada saat terjadinya demonstrasi 12 September. Dia menyampaikan pe-ngumuman akan mengadakan pengajian dan me-ngharapkan masyarakat menghadirinya. Dengan kata lain, dia dianggap menyampaikan hasutan seperti yang disebutkan di dalam tuduhan jaksa. Ia menghadiri pengajian yang tidak direncanakan sebelumnya. Sekalipun dia menandatangani petisi kelompok muslim Jakarta, namun keikutsertaannya itu hanya ikut-ikutan. A. Qadir Djaelani menjadi saksi bahwa Ratono menandatangani petisi tersebut tanpa membacanya lebih dahulu secara teliti. Sekalipun begitu dia dihukum 8 tahun penjara.

5. Nama : Professor Oetsmany Al-Hamidy
Umur : 72 tahun
Keterangan : Muballigh terakhir yang disidangkan kasusnya di pengadilan. Dia menderita rematik, sehingga selalu absen dari persidangan karena gangguan kesehatan yang parah. Dia juga mengeluh sakit jantung. Dia menghadiri beberapa kali persidangan sambil duduk di atas kursi roda dan tidak sanggup berdiri tanpa dipapah, tetapi tidak pernah kehilangan semangat perlawanan. Dia tidak bisa menyembunyikan sikap penghinaannya terhadap hakim dan jaksa yang berumur lebih muda dari dirinya. Oetsmany belajar di Mesir dan di Arab Saudi. Dia pernah menjadi tentara setelah zaman proklamasi, dan mencapai pangkat perwira menengah dalam korp polisi militer. Dia berhenti dari militer, 1953 dan men-curahkan kegiatannya dalam dakwah. Walaupun perkara yang dituduhkan kepadanya dapat dijarah dengan undang-undang anti subversi tetapi dia tidak dikenai tuduhan subversi, hanya dituduh me-nolak Pancasila dan mengkritik pemerintah karena persoalan asas tunggal. Dia juga termasuk penanda-tangan petisi kelompok umat Islam Jakarta dan rektor PTDI.

Dia menolak didampingi tim pembela dan berkata:”Selama yang dikenakan kepadanya adalah undang-undang anti subversi maka tidak perlu adanya pembelaan. Semoga Allah menjadi pembelaku”. Sekalipun demikian, pengadilan tetap menunjuk pembela untuk dirinya sebab terdakwa menghadapi dakwaan yang bisa dikenai hukuman mati. Akhirnya dia setuju atas penunjukan tim pembela.

Dia berkata:”Saya dihukum karena tuduhan subversi. Saya diadili karena masalah subversi. Saya tidak dituduh melakukan komplotan atau revolusi atau mengangkat senjata melawan pemerintah yang resmi. Saya diadili semata-mata karena berbeda pendapat dengan pemerintah. Dewasa ini mengajak orang ke jalan Allah dianggap subversi. Ancaman-nya, hukuman mati”.

Mengomentari undang-undang anti subversi, beliau mengingatkan majelis hakim mengenai situasi politik yang melahirkan UU tersebut. ”UU ini bagus untuk menghukum orang Islam, dengan UU yang dibuat oleh orang komunis”, katanya.

Terdakwa menggunakan setiap kesempatan untuk mencerca para saksi yang memberikan kesaksian yang memberatkannya. Dalam suatu kesempatan ketika ada saksi yang tidak mau menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, ia mengintrupsi sidang dengan mengatakan: ”Dengan sedikit siksaan mungkin saksi ini mau memberikan keterangan yang sebenarnya”. Salah seorang saksi yang diajukan jaksa bernama Ratono yang ternyata mencabut semua keterangan berkenaan dengan Oetsmany. Ujarnya, ”Kesaksian itu saya berikan di bawah tekanan”.

Ketika Oetsmany tidak lagi sanggup menghadiri salah satu persi-dangan karena gangguan kesehatan yang parah, hakim menolak ketera-ngan tertulis dari beliau untuk dipakai sebagai bahan di persidangan. Alasannya, karena dia memberikan keterangan tertulis tanpa sumpah. Anehnya, mengapa hakim mau menerima keterangan-keterangan saksi secara tertulis yang diajukan oleh jaksa penuntut sebelumnya, yang oleh tim pembela diprotes. Keterangan tertulis para saksi sebagai ganti kehadirannya secara langsung.

Selesai persidangan sembilan muballigh ini dilanjutkan dengan yang lain-lain, yaitu

1. Nama : Abdul Latif bin Amir
 Umur : 43 tahun
 Keterangan : Dipenjarakan karena ceramah-ceramahnya yang mengecam pemerintah yang disampaikannya pada tahun 1985. Tahun 1986 dijatuhi hukuman 7 tahun penjara.
2. Nama : Drs. Hasan Kiat
 Umur : 36 tahun
 Keterangan : Ditangkap setelah memberikan pengajian Rama-dhan tahun 1985 dan dikenai tuduhan subversi, karena secara terang-terangan menentang asas tunggal. Dijatuhi hukuman 7 tahun penjara.

Bab 05-04 Model Kasus Tanjung Priok Menjalar di Jawa Tengah

Setelah berakhirnya sidang-sidang kasus para muballigh di awal tahun 1986, perhatian kemudian beralih ke Jawa Tengah. Di kota pelajar Yogya-karta ini, dijatuhkan vonis hukuman penjara 1 tahun terhadap sedikitnya tiga orang terdakwa yang dipersalahkan mengedarkan bulletin yang menyorot kasus Tanjung Priok.

Akan tetapi kasus yang paling banyak menyedot perhatian di daerah ini, menyangkut dua orang terdakwa kasus subversi yang tengah membawa majalah Islam, berisi kritik terhadap militer dalam menangani kasus Tanjung Priok serta politik pemerintah, termasuk di dalamnya Asas Tunggal. Dua orang terdakwa itu adalah:

1. Nama : Ahmad Zonet Sumarlan
 Umur : 24 tahun
 Jabatan : Mahasiswa Teknik Tekstil UII
 Keterangan : Dituduh menyebarkan tiga eksemplar bulletin Al-IKHWAN
2. Nama : Irfan Suryahardi
 Umur : 25 tahun
 Keterangan : Dituduh oleh jaksa sebagai wakil pimpinan Ko-mando Jihad di Yogyakarta, dan anggota BKPMI (Badan Komunikasi Pemuda Masjid Indonesia) Yogyakarta, redaktur bulletin AL-IKHWAN dan AR-RISALAH, dua bulletin dakwah yang dilarang pemerintah.

Al-Ikhwani dilarang terbit pada 29 Mei 1985, namun hal ini baru diumumkan pada bulan Juli. Bulletin ini diterbitkan oleh BKPMI. Bulletin al-Ikhwani dibaca oleh kalangan luas dan oplahnya mencapai lebih dari 10.000 eksemplar yang didistribusikan secara luas di masyarakat.

Kasus Ahmad Zonet, relatif lebih terbuka jika dibandingkan dengan kasus Irfan. Akan tetapi sikap mereka yang menolak untuk didampingi tim pembela, mempunyai pengaruh luas di masyarakat. Kedua orang ini membuat penerapan hukum acara pidana menjadi cacat. Ahmad Zonet divonis hukuman 6 tahun penjara dan diminta menjadi saksi kasus Irfan, tetapi tidak terlaksana. Ada yang berpendapat, bahwa hal itu gagal disebabkan Irfan sendiri menolak kesaksian yang bersangkutan, karena tidak ada relevansinya. (Baca bab IV).

Persidangan kasus Irfan ini lebih banyak kekacauannya, sebab tuduhan yang dikenakan kepadanya berkaitan dengan gerakan Islam di Iran. Untuk meyakinkan hal ini, jaksa dalam tuduhannya mengatakan, bahwa yang bersangkutan ketika ditangkap membawa paspor dengan nama samaran. Dan membawa bulletin yang ditulisnya sendiri dengan judul "Ajaran Ayatullah Khomaini". Jaksa juga menuduh bahwa yang bersangkutan punya hubungan politik dengan gerakan yang bermaksud mendirikan Negara Islam di Indonesia. Jaksa penuntut juga menyebutkan nama Ir. Syahirul Alim, MSc. seorang yang terkenal di masyarakat, sebagai saksi di dalam beberapa kasus dan juga disebut-sebut namanya sebagai Imam Darul Islam.

Daftar saksi-saksi untuk dihadirkan dalam kasus persidangan Irfan, banyak dari dosen-dosen UGM. Ada beberapa orang yang duduk sebagai staf ahli dalam dua bulletin yang dipimpinnya. Tetapi hanya dua orang yang hadir sebagai saksi (Prof. DR. M. Amin Rais dan DR. Kuntowijoyo. pent.). Kedua saksi ini menyangkal punya hubungan dalam bentuk apa-pun dengan terdakwa, dan menyatakan bahwa keduanya telah mengundurkan diri dari kedudukannya sebagai staf ahli. Kemudian dimunculkanlah dua saksi lain, yaitu Ir. Syahirul Alim, MSc. dan Mursalin Dahlan. Kesaksian dua orang ini seringkali dipergunakan di dalam kasus-kasus lain, tetapi ternyata keduanya tidak hadir secara langsung dalam memberi kesaksian, hanya secara tertulis saja.

Meskipun tidak jelas kemana arahnya perkara-perkara ini, tapi ternyata persidangan kasus Irfan ini berpengaruh pada persidangan-persidangan lain berikutnya, yang mengkait-kaitkan adanya hubungan antara Jawa Tengah dan kegiatan subversi di tempat-tempat lain. Ada yang mengira, bahwa Irfan mengkonter gerakan anti Soeharto dan ada pula yang mencurigai, ada orang yang "dipasang" pemerintah di sekretariat redaksi bulletin Ar-Risalah yang dipimpin Irfan, walaupun hal ini tidak disebut-sebut dalam persidangan atau pun di media massa.

Komplotan yang dituduhkan ini menjadi malapetaka pada persidangan-persidangan lain di Jakarta, dimana HM. Sanusi dalam persidangan yang kedua kalinya dituduh demikian. Dia

divonis hukuman penjara 20 tahun. Dalam persidangan kasus Irfan, mulailah digunakan kata-kata Usrah untuk pertamakalinya seperti yang akan diterangkan pada bab VII. Kegiatan Usrah ini menjadi sasaran sidang pengadilan secara berturut-turut, mulai bulan Juli 1986, berkisar kegiatan-kegiatan dakwah Islam di Jawa Tengah. Para aktivis gerakan Usrah dituduh telah terpengaruh oleh tulisan-tulisan yang dimuat dalam bulletin Ar-Risalah dan Al-Ikhwan. Semua tuduhan ini disangkal oleh Irfan. Saksi dari pihak pembela, termasuk Ahmad Zonet dimintakan untuk hadir, tapi pengadilan tidak mengizinkan. Dan tidak seorangpun saksi dari pembela yang hadir, sekalipun keterangannya sangat dibutuhkan. Irfan Suryahardi akhirnya dinyatakan bersalah oleh pengadilan, dan dijatuhi hukuman 13 tahun penjara, potong masa tahanan .

Bab 06 PERSIDANGAN KASUS PELEDAKAN BOM

TIGA MINGGU setelah tragedi Tanjung Priok, 4 Oktober 1984, meletus beberapa bom di Jakarta, di Bank BCA Cabang Gajah Mada, dan cabang Jenderal Sudirman. Bank ini dimiliki orang-orang Cina. Kemu-dian meletus pula beberapa bom di pusat perbelanjaan Metro Cileduk, yang merupakan pusat perdagangan Cina di Jakarta. Pada tanggal 24 Desember, meledak pula bom di Gereja Katholik dan lembaga pendidikan Protestan di Malang Jawa Timur. Tanggal 21 Januari 1985, meledak bom di Borobudur, sebuah candi yang sangat terkenal di dunia, yang didirikan pada abad ke-10 di Jawa Tengah. Tanggal 19 Maret, ada 9 orang korban peledakan bom yang meledak sebelum waktu-nya di dalam bus malam tujuan Bali.

Antara Oktober 1984-Juli 1985 sering terjadi pembakaran dan pengeboman di berbagai daerah di Indonesia, yang paling parah terjadi di Jakarta. Pabrik Indomie terbakar pada 17 Oktober, dan beberapa hari berikutnya, 22 Oktober gedung Sarinah Jaya di bakar. Seminggu kemudian, 29 Oktober kebakaran terjadi di gudang penyimpanan milik angkatan laut di Cilandak, yang mengakibatkan hancurnya bangunan. Pada hari yang sama hancur pula rumah makan, gedung pertunjukan dan beberapa ruko di pasar Lantip, dan sasaran berikutnya adalah Kartika Plaza yang diamuk api dengan hebatnya, 11 November, dua hari setelah terbakarnya gedung Sarinah Jaya yang terdiri dari beberapa tingkat. Pada tanggal 12 Februari 1985 gudang militer di Jakarta utara terbakar. Setelah beberapa bulan keadaan tenang, gedung Metro yang berlantai 9 terbakar. Hal ini terjadi pada tanggal 10 Juli 1985. Pada tanggal 21 Juli gedung RRI ludes terbakar.

Beberapa kota lain, menyaksikan pula peristiwa-peristiwa semacam itu. Di Yogyakarta pernah di pasang bom di stasiun Tugu, 23 Oktober 1984 tetapi tidak meledak. Pada awal November, salah satu tempat perbelanjaan modern di Jl. Malioboro di bakar dan pada hari yang sama, di dekat gedung bioskop Mataram dipasang bom ketika pertunjukan sedang berlangsung saat diputar film peristiwa berdarah tahun 1965 dan bagaimana Soeharto merebut kekuasaannya dari Soekarno. Di Surakarta salah satu daerah penting di Jawa Tengah, 31 Januari 1985 terjadi pembakaran keraton Kasunanan.

Pihak keamanan, bekerja keras melakukan penyelidikan atas kasus-kasus tersebut. Banyak orang yang dicurigai melakukan tindak pidana ini, diajukan ke pengadilan. Sekalipun pihak keamanan telah membawa terdakwa ke pengadilan, tetapi tempat-tempat yang terbakar itu sendiri tidak pernah menjadi obyek penyelidikan. Bahkan pemerintah mengang-gap remeh dan mengkambing hitamkan konsleting listrik.

Perasaan takut terhadap kelompok Islam bersenjata, merupakan isu yang tersebar luas dalam sejarah Indonesia modern. Sesudah pengadilan kasus Tanjung Priok, muncul serentetan persidangan yang mengungkit persoalan teroris Islam yang berusaha mendapatkan dukungan negara-negara Islam dalam revolusi Indonesia yang terjadi pada dasawarsa 1950-an sampai sekarang. Persidangan kasus peledakan bom, dilakukan dengan tujuan membuktikan adanya komplotan yang mengancam kea-manan negara yang dilakukan oleh kelompok-kelompok Islam sempa-lan. Pengamatan terhadap jalannya persidangan ini membuktikan bahwa peristiwa-peristiwa tersebut telah direkayasa, sebagai dalih untuk dapat menangkap orang-orang yang melakukan kritik terhadap negara. Keja-dian-kejadian ini tidaklah dapat ditafsirkan sebagai perbuatan kaum fundamentalis Islam, tapi justru membuktikan adanya operasi rahasia pihak intelijen dengan jalan memunculkan aksi-aksi beruntun, kelompok-kelompok yang melakukan makar dan menciptakan perasaan takut serta saling curiga diantara aktivis gerakan Islam.

Ditonjolkannya HM. Sanusi sebagai tertuduh utama dalam kasus peledakan bom dan kasus-kasus lain yang menyangkut dirinya dalam usaha makar terhadap presiden RI, Soeharto,

mengisyaratkan bahwa pemerintah sengaja menjadikan Sanusi sebagai tumbal, karena dia dianggap sebagai koordinator antara kaum teroris, peledakan bom dan kelompok-kelompok makar lainnya. Begitu pula para anggota Petisi 50 yang terkenal, di mana Sanusi menjadi anggotanya. Upaya-upaya pemerintah untuk menjatuhkan Sanusi begitu jelas dalam persidangan pertama kasusnya, dan ketika tertuduh lain serta saksi-saksi pihak jaksa penuntut mencabut pengakuan mereka dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Para saksi itu menyatakan, bahwa mereka dipaksa membuat pengakuan palsu ketika mereka dipermak habis-habisan dan disiksa di luar batas kemanusiaan.

Beberapa kasus peledakan bom mengungkap secara jelas ciri sebenarnya dari rezim Soeharto. Empat orang tertuduh dalam persidangan pertama di Malang, penguasa menyebut mereka sebagai orang-orang fanatik. Kemudian dikatakan bahwa keempat orang tertuduh yang terpelajar itu bergabung dalam gerakan Komando Jihad. Persidangan-persidangan ini berlangsung di seluruh Jawa, sehingga mengesankan adanya jaringan yang sudah dipersiapkan untuk menelan korban siapa saja.

Jaksa penuntut umum mendasarkan tuntutan-tuntutannya pada pengakuan bersalah tertuduh. Hanya karena seseorang sudah mengaku bersalah, tanpa mengakui kejahatan-kejahatannya, maka kesalahan-kesalahan itu sudah bisa melibatkan teman-temannya. Cara semacam itu menimbulkan matarantai antara peristiwa, pelaku-pelaku dan kelompoknya. Misalnya, seorang tertuduh kasus peledakan bom yang mengaku bahwa dirinya bertindak demikian karena terpengaruh oleh ceramah seorang muballigh, maka muballigh yang bersangkutan sudah bisa dikenai tuduhan sebagai penghasut atau teroris. Selanjutnya jaksa secara implisit membuat kesimpulan adanya gerakan revolusi untuk mendirikan negara Islam, seperti yang telah berdiri pada dasawarsa 1950-an, dan sampai sekarang sangat mempengaruhi stabilitas nasional.

Menghubungkan antara peristiwa, nama yang berulang-kali disebut, interogasi-introgasi dan penyidangan beberapa terdakwa sampai dua kali, semuanya ini dimaksudkan untuk memberikan kesan adanya teroris, padahal hak-hak terdakwa telah dipasung dalam persidangan yang meniadakan perkaranya. Peristiwa-peristiwa dan orang-orang yang dilibatkan, menimbulkan kebingungan sehingga penelitian yang dilakukan secara tenang terhadap perkara-perkara ini hanya menghasilkan kesimpulan nol-nol besar. Artinya, semua itu berdasarkan data-data yang ada, adalah rekayasa. Bahkan para pengacara sendiri bingung menghadapi problem ini. Salah seorang anggota LBH pernah menyimpulkan bahwa berulangkali kejadian seperti ini, maka mencari kebenaran disini, laksana mencari jejak burung terbang.

Di bawah ini akan kami paparkan kenyataan yang berlangsung dalam persidangan beberapa tokoh, dari berbagai organisasi sekitar kasus peledakan bom. Jika orang mau membaca laporan-laporan yang dimuat surat kabar tentang jalannya peristiwa demi peristiwa tersebut, maka dengan mudah dapat diketahui bahwa orang-orang tersebut mempunyai hubungan dengan badan-badan intelijen militer. Peranan intelijen militer terlihat jelas di dalam kasus persidangan serupa itu pada tahun 1982, ketika sekelompok aktivis muslim dijatuhi hukuman. Kelompok ini adalah gerakan yang dipimpin Imran bin Zain, yang mempunyai hubungan dalam peristiwa pembajakan pesawat Garuda seperti yang dapat kita baca dalam Bab III. Masalah ini dijadikan catatan dalam pembelaan persidangan kasus HR. Dharsono.

Bab 06-01 Peledakan Bom di BCA dan Persidangan HM Sanusi

Dua orang tertuduh utama dalam persidangan di Jakarta, berkisar masalah peledakan bom di dua cabang BCA yang dikuasai Cina. Kedua terdakwa itu adalah:

1. Nama : Ir. HM. Sanusi
Umur : 66 tahun
Keterangan : Seorang pekerja keras dan aktivis organisasi Muhammadiyah. Namanya populer di zaman orde lama. Pada tahun 1966, diangkat sebagai menteri perindustrian dalam kabinet Soeharto. Ia menjabat sampai tahun 1968, ketika Soeharto, mungkin tidak lagi mempercayainya, setelah peristiwa "kasus mobil". Dia pernah duduk sebagai anggota DPR 1971-1977 mewakili Parmusi, partai Islam yang didirikan setelah tahun 1965. Partai ini bertujuan melaksanakan program Masyumi, sebuah partai Islam yang telah dilarang kegiatannya di masa demokrasi terpimpin.

Soeharto ternyata tetap melarang Masyumi hidup kembali, dan memaksakan berdirinya partai baru dengan maksud untuk menjauhkan tokoh-tokoh Masyumi dari kehidupan politik. Pada tahun 1970, Sanusi bergabung dengan Jhon Naro dan Agus Sudono, melakukan "kudeta" di dalam tubuh Parmusi guna mengarahkan partai ke garis yang dapat diterima oleh pemerintah. Namun orang-orang yang "mengkhianati" kudeta, berbalik menjadi orang-orang yang loyal pada orde baru. Jhon Naro menjadi ketua umum Parmusi, dan selanjutnya menjadi ketua umum PPP. Sedangkan Agus Sudono menjadi ketua KADIN.

HM. Sanusi kemudian mengambil sikap konfrontasi dengan pemerintah orde baru. Tahun 1980, bersama-sama dengan tokoh-tokoh politik terkenal dan beberapa mantan perwira menandatangani Petisi 50 yang berkali-kali melakukan kritik terhadap Soeharto. Dia juga

termasuk salah seorang penandatanganan Lembaran Putih yang diterbitkan setelah terjadinya tragedi Tanjung Priok, yang akhirnya menyebabkan diadilinya sejumlah besar orang Islam.

Sanusi ditangkap 10 Oktober 1984, dan disidangkan pada awal Januari. Persidangannya berlangsung kira-kira 4 bulan, berakhir Mei 1985 dengan mendiskreditkannya, dan bahkan menghukumnya dengan kurungan penjara selama 19 tahun. Tuduhan yang sangat memberatkan dirinya ialah, dia menyerahkan uang Rp 500.000,- (US \$ 600) pada para pelaku pengeboman Bank BCA, guna membeli bahan peledak.

Masih ada tuduhan lain yang ditimpakan kepada HM. Sanusi, yaitu memerintahkan pengeboman di berbagai tempat. Di hadapan majelis hakim, Sanusi menyangkal tuduhan tersebut, tetapi ketika hal itu dikaitkan dengan pemberian uang pada Husnul Arifin, yang juga tertuduh dalam kasus peledakan bom, dia tidak dapat menyangkalnya. Husnul Arifin disidangkan dalam kasus penyebaran lembaran putih yang belum dicetak, yang memaparkan tentang tragedi berdarah di Tanjung Priok.

Tertuduh tunggal di dalam peristiwa peledakan bom dan yang benar-benar mengetahui masalahnya adalah Rahmat Basuki. HM. Sanusi menyatakan, bahwa dirinya bertemu dengan kedua orang ini (Husnul Arifin dan Amir Wijaya) hanya sebentar, dalam kedudukannya sebagai anggota Petisi 50, dan ia menyangkal dengan keras segala bentuk hubungan berkaitan dengan kasus lembaran putih maupun peledakan bom di Jakarta. Selain itu kedua terdakwa dalam kasus peledakan bom tidak pernah diminta kesaksiannya untuk kasus yang lain.

Bab 06-02 Pelaku Pengeboman di Persidangan

Pada saat persidangan HM. Sanusi masih berlangsung, ada 6 orang lain yang dituduh turut terlibat langsung dalam peristiwa pengeboman di BCA. Mereka disidang dalam waktu bersamaan. Dan semua persidangan ini berkaitan dengan kasus Sanusi.

Sejauh yang dapat kami fahami dari berita-berita surat kabar tentang persidangan mereka, ternyata tidak ada maksud politis dari orang-orang tersebut, selain sekedar ingin menarik perhatian. Semuanya mengakui turut terlibat dengan cara tertentu atau lainnya dalam pengeboman cabang-cabang BCA, 4 Oktober 1984. Mereka mengakui bahwa atas kemauan sendiri dan bermaksud untuk menarik perhatian agar masya-rakat mau sadar, bahwa tokoh-tokoh Cina telah menguasai keuangan dan ekonomi negara, dan hal semacam ini sangat berbahaya.

BCA adalah bagian dari imperium usaha Liem Sioe Liong, sahabat karib Soeharto dan seorang nonpri yang paling kaya di Indonesia. Memiliki tujuan demikian memberi kesan, bahwa para pelaku pengeboman mem-punyai target politis yang seyogyanya dimengerti oleh WNI. Persidangan terhadap mereka ini, sesuai dengan undang-undang anti subversi, jaksa penuntut menyatakan bahwa “serangan terhadap sahabat Soeharto, sama dengan serangan terhadap kepala negara itu sendiri”.

Para Terdakwa itu adalah:

1. Nama : Jayadi
Umur : 30 tahun
Pekerjaan : Karyawan
Keterangan : Ditangkap 4 Oktober 1984. Sidang dimulai Februari Mei 1985. Vonis, penjara 15 tahun. Karena perannya dalam peledakan bom di BCA Cab. Sudirman, dia dijadikan saksi dalam persidangan-persidangan yang lain.
2. Nama : Milta Halim
Umur : 32 tahun
Pekerjaan : Karyawan
Keterangan : Ditangkap 1 Oktober 1984. Perkaranya disidang mulai Januari - Mei 1985, karena meledakkan bom di Metro Plaza. Ketika ditanya hakim yang mengadi-linya, dia menjawab “kasus ini adalah rekayasa dari sejumlah tokoh-tokoh pemerintah”. Namun pernya-taannya ini sedikitpun tidak dimuat mass media. Dia divonis kurungan penjara 18 tahun.
3. Nama : Khairul S. Nur Jalal
Umur : 21 tahun
Pekerjaan : Mahasiswa Akademi Teknik Industri
Keterangan : Ditangkap 7 Oktober 1984. Disidangkan perkaranya dari bulan April sampai Mei 85, karena meledakkan bom BCA Cab. Gajah Mada dan merobohkan monumen Pancasila. Hukuman, penjara 10 tahun.
4. Nama : Husnul Arifin
Umur : 47 tahun
Pekerjaan : Karyawan
Keterangan : Ditangkap 7 Oktober 1984. Disidangkan perkaranya dari Januari - Mei 85, karena meledakkan BCA Cab. Gajahmada, menyimpan bahan-bahan

peledak dan menyetujui diterbitkannya buku berisi kasus pembantaian Tanjung Priok atas permintaan Sanusi. Dia juga menjadi saksi dalam kasus Sanusi dan Rahmat Basuki. Divonis penjara 15 tahun.

5. Nama : Rahmat Basuki
Umur : 42 tahun
Pekerjaan : Karyawan
Keterangan : Ditangkap 7 Oktober 1984. Disidangkan perkaranya dari Januari - Mei 1985, dia disebut sebagai dalang pengeboman. Diapun ditanya tentang adanya pertemuan tanggal 18 Oktober, ketika terjadinya pembantaian di Tanjung Priok. Ia menghadiri pertemuan, 18 September, bersama dengan anggota Petisi 50. Hal ini memberikan peluang kepada jaksa penuntut umum untuk mengkait-kaitkan antara kelompok Petisi 50 dengan kelompok sektarian yang terkenal dengan kelompok kasus Tanjung priok. Basuki telah lama mempunyai hubungan bisnis dengan Sanusi dan dia telah biasa menerima ban-tuan keuangan dari Sanusi dalam kegiatan bisnisnya. Dia juga punya hubungan dengan Tasrif Tuasikal dalam kasus pengeboman BCA. Persahabatannya berlangsung sejak 1978 setelah kedua orang ini menjalin persahabatannya setelah mereka dan Djaelani mengecam beberapa orang anggota MPR. Basuki juga menjadi saksi dalam persidangan HR. Dharsono dan AM. Fatwa. Dia divonis penjara 17 tahun.
6. Nama : Edy Ramli
Umur : 42 tahun
Pekerjaan : Karyawan PLN
Keterangan : Ditangkap tanggal 13 Desember 1984. Disidangkan perkaranya dari Januari sampai Mei 1985 karena meledakkan bom di BCA Cabang Gajah mada dan merusak monumen Pancasila. Divonis penjara 16 tahun.

Bab 06-03 Keributan dalam Persidangan HM Sanusi

Pada tanggal 25 Februari, Tasrif Tuasikal yang persidangan kasusnya belum pernah dimulai, memberikan kesaksian dalam kasus Sanusi. Dengan tiba-tiba dia mencabut keterangan penting dalam BAP, yaitu tuduhan bahwa dia telah diberi uang oleh Sanusi. Tasrif mengatakan di depan persidangan, bahwa keterangan dalam BAP diberikan karena jaksa menekannya. Dalam persidangan itu juga, Khairil Syah mencabut kesaksiannya yang lalu dan menyangkal bahwa dirinya mengetahui sumber-sumber dana untuk pembelian bahan peledak.

Pada hari berikutnya Rahmat Basuki memberikan kesaksian dalam kasus Sanusi. Ia menyangkal telah diberi uang oleh terdakwa. Di depan persidangan ia mengatakan, bahwa dirinya dipaksa untuk mendeskreditkan terdakwa. Dia tidak ingin berbuat seperti Husnul Arifin yang dikatakannya sebagai orang kerdil. Memperhatikan masalah, dengan segera dapat diketahui bahwa Husnul Arifin telah mengalami penyiksaan berat. Penderitaan akibat penyiksaan ini membuat tahanan-tahanan lain merasa diteror, sehingga mereka mau menandatangani BAP yang menguatkan tuduhan jaksa terhadap terdakwa. Begitu juga Milta Halim yang memberikan kesaksian di depan persidangan kasus Sanusi, telah menyangkal bahwa dia mengetahui Sanusi punya hubungan dengan peristiwa-peristiwa pengeboman. Ujarnya, "Rahmat Basuki telah menceritakan banyak hal yang sebenarnya dia tidak tahu kebenarannya. Semua ceritanya itu hanya bersumber dari keterangan-keterangan Edi Ramli".

Dalam persidangan Rahmat Basuki, 9 Maret Tuasikal kembali mencabut kesaksiannya. Ujarnya, "Amir Wijaya itulah yang memberikan bahan peledak kepada mereka. Untuk pertamakalinya dia menyebut nama Wijaya ketika memberikan kesaksian dalam persidangan kasus Jayadi. Tuasikal berkata, "Amir Biki adalah pimpinan massa demonstran dan termasuk orang yang terbunuh dalam peristiwa Tanjung Priok". Amir Biki inilah yang menceritakan kepadanya bahwa Wijayalah yang bisa memberikan senjata-senjata kepada mereka. Dalam persidangan banyak terjadi pencabutan keterangan saksi. Seperti Husnul Arifin, mencabut keterangannya berkenaan dengan adanya pertemuan yang dikatakannya telah dilakukannya dengan Sanusi, Basuki, dan Tuasikal. Arifin menceritakan di depan persidangan bagaimana sejumlah orang yang tak dikenal identitasnya melakukan interogasi terhadap dirinya setelah ia ditangkap dan dipukuli dengan pentungan. Khairil Syah kembali menyangkal semua keterangannya. Ia pun menyangkal bahwa dirinya tahu tentang dana-dana untuk pembelian bahan peledak. Dari sinilah mulai muncul keributan dalam persidangan kasus Sanusi.

Sekiranya hal semacam itu dimaksudkan untuk menjaring ikan besar dengan memberi umpan sedikit, maka taktik semacam itu telah berantakan. Oleh karena itu dalam persidangan Sanusi, 16 Maret jaksa penuntut umum mengajukan saksi baru bernama Amir Wijaya. Kehadiran orang ini menimbulkan keheranan, karena sebenarnya nama dia tidak tercantum di dalam daftar nama-nama saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut sebelumnya.

Olah karena itulah tim pembela meragukan tanggal dan tempat penahanan Wijaya. Tim pembela terdakwa menyelidiki bukti-bukti atas keterangan jaksa penuntut umum, bahwasanya

Amir Wijaya ditahan di Rutan Salemba. Namun ternyata mereka tidak menemukan nama tersebut di dalam daftar orang-orang tahanan di sana. Dan jaksa juga tidak memberikan keterangan apapun mengenai hasil introgasinya terhadap yang bersangkutan sebelum persidangan. Data-data semacam ini biasanya merupakan hal yang logis dilakukan terhadap setiap ter-dakwa dan saksi. Wijaya mengaku, bahwa Sanusi telah memberikan uang kepadanya untuk membeli bahan peledak. Dengan marah Sanusi menyangkal hal tersebut. Dia menyangkal juga semua keterangan saksi di persidangan. Ujarnya, "Dia sedikitpun tidak pernah mendengar keterlibatan Wijaya dalam peledakan bom. Walaupun peristiwa itu telah lewat tiga bulan, kedua orang ini pernah bertemu sebentar. Ia menyangkal pengakuan Wijaya yang mengatakan telah bertemu di rumahnya, 8 Oktober sore.

Tim pembela menunjukkan tiket pesawat terbang yang membuktikan, bahwa Sanusi baru tiba di tanah air pada hari itu menjelang Maghrib, karena dia selama 10 hari berada di Jepang. Sanusi mengatakan kepada sidang, bahwa Rahmat Basuki telah meminta maaf kepadanya melalui surat, karena dia telah mendeskreditkan terdakwa secara zalim.

Meskipun ada pencabutan semua keterangan saksi, dan ada keraguan terhadap kemunculan Wijaya sebagai bukti tunggal dalam kasus Sanusi, ternyata Sanusi tetap dipojokkan oleh majelis hakim, dan bahkan divonis dengan hukuman penjara yang lama, sehingga bagi orang yang seumur Sanusi berarti hukuman seumur hidup.

Para hakim mengabaikan semua pencabutan pengakuan, mereka tidak mau menyelidiki keluhan-keluhan para saksi bahwa mereka meng-hadapi tekanan ketika berlangsung penyidikan. Dalam persidangan kasus Sanusi ini terbukti bahwa pengakuan yang didapat oleh penyidik dengan cara kekerasan di ruang-ruang introgasi, jauh lebih berharga daripada keterangan yang diberikan oleh saksi secara jujur di depan persidangan sesudah mereka diangkat sumpah.

1. Nama : Tasrif Tuasikal
Umur : 50 tahun
Pekerjaan : Guru dan ketua GPII Jakarta
Keterangan : Dia ditahan, 30 November 1984. Perkaranya disi-dangkan dari bulan April - Agustus 1985 dengan tuduhan selaku koordinator operasi peledakan bom di Jakarta. Seperti terhadap Basuki, jaksa meng-kaitkan kasus pengeboman dengan peristiwa pem-bantaian Tanjung Priok. Tuasikal telah didiskreditkan dengan adanya hal-hal sebelumnya, sebab dia telah mendiskreditkan dirinya sendiri tatkala memberikan kesaksian-kesaksian dalam persidangan-persidangan yang lain. Tuasikal menceritakan di depan persidangan, bahwa dirinya telah menda-patkan tekanan agar mendiskreditkan Sanusi, tapi ia tidak menjelaskan, atau mungkin surat kabar yang tidak memberitakannya, bahwa dia juga ditekan untuk mendiskreditkan Fatwa dalam peristiwa peledakan pengeboman. Fatwa mengatakan dalam persidangan kasus Tuasikal, yang bersangkutan telah minta maaf kepadanya karena keterangannya itu, sambil menunjukkan luka-luka di dadanya. Hal ini menguatkan anggapan orang, bahwa pihak militer berkeinginan untuk mengaitkan kasus peledakan bom dengan salah seorang penandatangan lembaran putih. Tuasikal divonis hukuman penjara seumur hidup, kemudian oleh pengadilan tinggi dirubah menjadi hukuman penjara 17 tahun.

8. Nama : Amir Wijaya
Umur : 32 tahun
Pekerjaan : Direktur perusahaan, dan mahasiswa sebuah Perguruan Tinggi, begitulah kata jaksa.
Keterangan : Ditahan pada tanggal 26 Desember 1984, persi-dangannya memakan waktu antara Mei-Agustus 1985, dengan tuduhan memberikan bahan-bahan peledak yang dipakai di dalam kasus-kasus penge-boman. Amir menaruh perhatian khusus tentang hubungannya dengan Abdul Qadir Djaelani, yang telah divonis penjara pada tahun yang sama dengan Sanusi. Peran Amir Wijaya sebagai seorang agen intelijen militer sangat kentara. Vonis pengadilan terhadap terdakwa dengan hukuman 14 tahun penjara, ditafsirkan orang sebagai usaha kamuflase pengadilan untuk menutupi perannya sebagai agen intelejen.

9. Nama : Robi Burmana Pantau
Umur : 38 tahun
Pekerjaan : Sopir pribadi Amir Wijaya
Keterangan : Ditangkap, 6 Februari 1985. Disidangkan perkara-nya dari September-Desember 1985, karena mem-bantu Wijaya untuk membuat bom. Orang ini tersangkut di dalam kasus ini semata-mata karena dia bekerja di tempat Amir Wijaya. Dalam introgasi dia mengaku memperoleh bom dari tiga orang di desa Parung Jawa Barat. Tiga orang itu adalah Mariadi alias Pidul, Insib, dan Ismet. Sekalipun Insib dan Ismet baru dikenal ketika kedua orang ini memberikan kesaksian dalam persidangan kasus Wijaya, mereka itulah

yang menarik sumbu dinamit. Akan tetapi dua orang ini tidak dikenai tuduhan apapun. Hal semacam ini hanya bisa ditafsirkan, bahwa kasus ini benar-benar misterius. Demikian pula seluruh proses persidangannya.

10. Nama : Umar Katsiri
Umur : 29 tahun
Pekerjaan : Mahasiswa Electro
Keterangan : Tanggal penangkapannya tidak diketahui. Disidang-kan pada bulan November-Desember 1985, dengan tuduhan membantu Amir Wijaya membuat remote untuk meledakkan bom dari jarak jauh. Pengadilan kasusnya sulit difahami. Sebab semua keterangan yang diberikan di hadapan penyidik dicabutnya kembali, tetapi dia mengakui semua tuduhan yang dikenakan atasnya. Salah seorang saksi bernama Ikin Sadikin, mengakui bahwa Amir Wijaya memin-ta bantuannya. Dia merupakan orang terakhir yang dihadirkan di dalam persidangan. Tim pembela dengan keras memprotes bahwa segala perbuatan yang dituduhkan kepada Umar, sebenarnya tidak lebih ringan dengan yang dituduhkan kepada Ikin Sadikin. Ketiga orang ini adalah orang-orang yang disebut namanya dalam persidangan Pantaw, tapi ternyata Katsiri dan Pantaw dihukum, sedang yang lain-lain tidak.

Persidangan kasus pengeboman BCA, yang dibuktikan melalui keterangan-keterangan saksi dan 10 orang saksi yang terlibat, ternyata masing-masing saling memojokkan temannya sendiri. Rahmat Basuki dan Tuasikal tidak hanya memojokkan orang-orang yang telah mengaku, tetapi juga memojokkan yang lainnya, seperti Fatwa, Amir Biki yang sudah mati dan Abdul Qadir Djaelani. Orang yang menjadi sasaran paling utama dari persidangan-persidangan ini adalah Sanusi.

Tim pembela sangat menentang penerapan UU anti subversi terhadap para terdakwa. Jaksa penuntut dalam persidangan Husnul Arifin mengatakan: "Subversi tidak hanya diperlukan dalam politik saja, tetapi tingkah laku politik pun dapat juga dikenai tuduhan subversi". Pernyataan ini sangat berbahaya, karena negara memberikan keleluasaan terhadap dirinya sendiri untuk menggunakan atau tidak menggunakan UU yang bengis ini.

Persidangan-persidangan kasus peledakan bom di Jakarta dipergu-nakan untuk membuktikan adanya hubungan antara demonstrasi Tanjung Priok dengan peledakan bom pada tanggal 4 Oktober. Namun para saksi yang dihadirkan oleh tim pembela ternyata tidak bisa menemukan bukti ini. Misalnya, saksi Husnul Arifin memiliki bahan peledak di rumahnya, 10 September, dua hari sebelum terjadinya demonstrasi Tanjung Priok. Amir wijaya dalam memberikan kesaksian pada persidangan Tuasikal bulan juli 1984, mengaku bahwa Abdul Qadir Djaelani meminta dirinya untuk mencarikan bahan peledak. Hal ini terjadi jauh sebelum peristiwa Tanjung Priok, dan bahkan pengakuannya tentang adanya pertemuan, 18 September yang dilakukan sebagai reaksi atas peristiwa Tanjung Priok, tidak dapat membungkam kritik. Di dalam persidangan terbukti bahwa undangan untuk rapat telah disebarkan jauh sebelumnya, untuk memperingati hari meninggalnya mantan wakil presiden Adam Malik. Issu-issu yang banyak berkembang di dalam persidangan lebih merupakan kebohongan ketimbang kebenaran. Misalnya, terdakwa yang mencabut keterangannya pada hari ini, besok-nya para saksi menguatkan keterangan yang dicabutnya itu, yang seakan-akan tidak pernah terjadi apa-apa. Ketika kami membaca hal ini dalam media massa Indonesia, pembaca dibuat terheran-heran, bagaimana para redaktur bisa menyembunyikan rasa keraguannya menghadapi hal semacam ini. Tetapi jika mereka tidak berbuat demikian, mereka akan menghadapi banyak kesulitan. Namun ada beberapa mas media yang memberanikan diri untuk membicarakan proses persidangan yang menggelikan ini. Dan secara implisit mengesankan, adanya orang ber-darah dingin menskenario persidangan ini.

Persidangan-persidangan kasus pengeboman membuktikan, bahwa peristiwa semacam ini muncul sebagai reaksi atas tragedi berdarah di Tanjung Priok. Namun rezim penguasa tidak mampu untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan darimana munculnya gagasan peledakan bom, sekalipun sebagian besar terdakwa tidak menutup-nutupi niat sebenarnya. Sejak Amir Wijaya berkolusi dengan jaksa untuk memainkan peran tertentu, walau sebenarnya dia adalah anggota intel militer yang turut melakukan pengeboman. Peran sedemikian ini tidak boleh diabaikan. Para terdakwa, kecuali HM. Sanusi, bukanlah orang-orang politik dan tidak pula mampu untuk memahami tujuan-tujuan rezim memperalat orang-orang yang dituduh sebagai teroris, karena kuatnya penindasan di seluruh negeri dan seluruh anggota masyarakat, khususnya masyarakat Islam; disebabkan adanya situasi yang kian memanas di Indonesia.

Bab 06-04 Persidangan Kasus Pesantren Kilat

Ketika persidangan kasus Amir Wijaya berlangsung di Jakarta, dimulai pula gelombang persidangan di Malang, Jawa Timur yang berlangsung sejak akhir juli-Oktober 1985. Berita-berita surat kabar sebelum persida-ngan dilakukan masih simpang siur. Tidak diketahui siapa yang akan disidangkan, dan apa tujuannya terhadap yang bersangkutan. Beberapa surat kabar

menulis, bahwa tertuduh berjumlah lima orang, sebagian lagi mengatakan 7 orang. Tertuduh yang pertama kali akan diajukan, menurut omongan orang, adalah Mohammad Akhwan. Padahal menu-rut berita salah satu surat kabar yang terbit, 18 September, orang ini telah selesai disidang. Baru kemudian menjadi jelas, bahwa kasusnya baru disidangkan, April 1986 dengan empat orang terdakwa, yaitu:

1. Nama : Faesal Basri.
Umur : 21 tahun.
2. Nama : Marjoko.
Umur : 26 tahun.
Keterangan : Ditangkap 24 Desember 1984. Kedua orang ini dituduh mengebom gereja Katholik, Santo Budaya dan gereja Protestan St. Isabella di Malang. Keduanya juga dituduh menyebarkan bulletin gelap.
3. Nama : Andi Sukisno.
Umur : 21 tahun.
Keterangan : Ditangkap 29 Januari 1985.
4. Nama : Sugeng Budiono.
Umur : 20 tahun.
Keterangan : Ditangkap, 22 Januari 1985. Kedua orang ini dinya-takan bersalah karena keterlibatannya dalam penge-boman Candi Borobudur.

Ahmad Muladawilah, seorang yang kesaksiannya di depan penga-dilan sangat mendiskreditkan para terdakwa. Akan tetapi setelah dia sendiri disidangkan kasusnya, dia dikenakan dakwaan yang sama. Pada-hal tidak ada bukti-bukti materiel yang bisa dikenakan terhadap keempat orang tersebut sebagai pelaku pengeboman. Akan tetapi, ketika di dalam persidangan-persidangan yang digelar, mereka tampil berapi-api dalam menyampaikan pembelaannya, maka terbukalah jalan untuk mengenakan tuduhan-tuduhan baru terhadap orang-orang yang terlibat di dalam jaringan operasi Komando Jihad dengan cara-cara yang sangat sederhana. Gerakan ini mempunyai nama sandi: L.B.3K menggunakan alfabet Inggris. Jaksa penuntut umum tidak mengira, bahwa gerakan L.B.3K adalah gerakan illegal. Namun sebaliknya, jaksa mengatakan bahwa taktik gerakan ini adalah hendak mengkoordinasikan orang-orang L.B.3K dalam kegiatan komando strategi dan target-terget teror. Jaksa menuduh bahwa Lembaga ini menyiapkan anggota-anggotanya dengan latihan militer, terampil menggunakan senjata sebagai persiapan mendi-rikan negara Islam di Indonesia. Daftar tuduhan terhadap empat orang ini, berisikan catatan semua cabang Komando Jihad di Jawa, terutama Jawa Timur dan Jawa Barat. Jaksa menuduh, bahwa Marjoko adalah pemimpin lembaga ini. Tim pembela dari LBPHKAI yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendampingi keempat orang tersebut, sebenarnya berada di bawah pengaruh rezim. Masing-masing terdakwa divonis dengan hukuman penjara 8 tahun. Persidangan mereka dilakukan dalam waktu yang sama, tapi ruangnya terpisah. Jaksa penuntut tidak puas dengan hukuman terhadap terdakwa, dan mengajukan banding, sehing-ga Marjoko kemudian dijatuhi 9 tahun; sedangkan Andi Sukisno dijatuhi hukuman 10 tahun. Adapun dua terdakwa lainnya vonisnya tetap.

Persidangan-persidangan kasus ini berusaha untuk membuktikan adanya kaitan antara empat terdakwa dengan dua terdakwa lainnya, yang perkaranya disidangkan di pengadilan negeri Surabaya dengan tuduhan yang sama tentang kasus Komando Jihad. Dua orang itu adalah:

1. Nama : Sampoang Abdul Malik.
Umur : 54 tahun.
Pekerjaan : Muballigh dan ketua lembaga pendidikan Islam di Surabaya.
Keterangan : Dituduh melakukan tindak pidana subversi dan dihukum 20 tahun penjara.
2. Nama : Anderi Harto.
Umur : 25 tahun.
Pekerjaan : Mahasiswa Univ. Muhammadiyah dan mahasiswa LB.3K.
Keterangan : Didakwa mengedarkan bulletin gelap dan dijatuhi hukuman penjara 12 tahun.

Dua saksi utama yang menguntungkan jaksa penuntut umum, adalah Mohammad David Frans dan Mohammad Akhwan. Keterangan kedua orang ini sangat memojokkan posisi empat terdakwa di Malang. Keduanya menganggap ada hubungan antara LB.3K, dengan semakin meningkatnya kegiatan subversi dan peledakan bom di Jakarta. Keduanya mengingatkan adanya pertemuan yang telah berlangsung di Jakarta yang dihadiri oleh aktivis gerakan Pesantren Kilat dan HM. Sanusi. Pertemuan ini membicarakan taktik dan tipu daya Soeharto. Hal ini merupakan petunjuk awal adanya komplotan besar yang menjadikan semua ter-dakwa lain, tersangkut ke dalamnya. Dengan demikian, LB.3K berubah menjadi sangat populer karena disebut-sebut dalam setiap persidangan di Malang dan Surabaya. Berita-berita surat kabar tentang persidangan kasus Malang sangat sedikit. Ada beberapa surat kabar yang memuat kesaksian tertulis Mursalin Dahlan, sebagai pendiri pesantren kilat serta Syahirul Alim sebagai cendekiawan muslim serta dosen. Kedua orang ini berada dalam tahanan di Jakarta. Kesaksian tertulisnya ini disampaikan dalam

persidangan kasus Marjoko. Jaksa penuntut umum menyatakan minta maaf dengan sangat, karena ketidak hadirannya kedua saksi secara langsung. Ketika kesaksian kedua orang itu dibacakan, Marjoko menyangkal dan mengatakan bahwa kasusnya tidak ada hubungannya dengan kedua orang itu, namun mengaku bahwa mereka teman baiknya dan juga teman baik Mohammad Akhwan. Hakim kemudian menjawab, “karena Akhwan dan Marjoko bersahabat baik berarti kesaksiannya itu bisa diterima”.

Masih ada orang kelima, yaitu Ir. Bahwal Wiyoto, dia seharusnya diadili di Malang tapi tidak pernah terlihat batang hidungnya. Namun dikemudian hari dia diketahui opname di RS karena mengalami retak tulang setelah dia ditangkap. Dia tidak mengatakan, penyebab terjadinya keretakan tulang.

Sebagaimana persidangan-persidangan di Jakarta, dimana para terdakwa mencabut pengakuannya, maka di Malang pun terjadi hal serupa. Di dalam persidangan, Marjoko mengatakan, “Penyidik mengancam, jika dia tidak mengikuti kemauan penyidik, ibunya akan disiksa”. Pencabutan keterangan di pengadilan sama sekali tidak berpengaruh terhadap jalannya persidangan, dan mereka tetap menjalankan skenario yang sudah dibuat. Persidangan kasus Pesantren Kilat semata-mata untuk membuktikan bahwa pesantren-pesantren tersebut punya kaitan dengan peledakan bom.

Bab 06-05 Persidangan Kasus Bom Malang

Telah muncul ide untuk melakukan komplotan besar-besaran dan sangat banyak rincian yang dimasukkan. Oleh karena itu dimulailah dua kelompok persidangan pada bulan Januari dan April 1986 dengan mengajukan 7 orang sebagai terdakwa dalam kasus peledakan bom di Malang, serangan candi Borobudur dan meledaknya bom di bus malam jurusan Bali.

Lebih dari peristiwa-peristiwa yang lain, pengeboman candi Boro-budur mendapatkan pemberitaan besar di surat kabar. Candi Borobudur yang didirikan jauh sebelum kedatangan Islam sangat berpengaruh di tengah masyarakat. Candi ini berada di wilayah selatan, tepatnya Magelang Jawa Tengah. Pengeboman ini dipandang sebagai serangan langsung terhadap pusat kebudayaan (Jawa) Indonesia. Meskipun beberapa orang pakar menafsirkan hal ini sebagai tindakan balas dendam kaum fundamentalis muslim, setelah terjadinya tragedi Tanjung Priok, namun sebenarnya terdapat indikasi adanya tangan-tangan tersembunyi di balik peristiwa itu. Sebab ternyata ada beberapa bom yang tidak meledak, dan bom-bom ini diperoleh dari gudang perbekalan militer di Bandung.

Di Jawa Barat pada bulan Mei 1985, Theo Suandi Subroto, Pangdam Jawa Barat mengumumkan penangkapan tiga orang yang mempunyai hubungan dengan kasus peledakan bom. Ketiga orang ini adalah mantan anggota ABRI. Juga ada beberapa orang lain yang ditangkap, semuanya itu adalah orang-orang yang ahli persenjataan. Walaupun ketiga mantan ABRI itu dijatuhi hukuman yang berkisar antara 7-9 tahun, karena telah mencuri persenjataan ABRI, namun vonis ini sama sekali tidak menunjukkan adanya kaitan dengan peristiwa pengeboman. Sedangkan yang lainnya dibebaskan.

Langkah penyelidikan yang dilakukan oleh Pangdam dihentikan demi kepentingan yang lebih besar, apalagi telah muncul anggapan bahwa ABRI berada di balik operasi ini sehingga masalahnya menjadi kisah menarik (Kisshatul gharibah). Kisah ini menyatakan bahwa ada komplotan syi'ah internasional (dimana kaum muslimin Indonesia adalah orang sunni), maka Pangdam mengumpulkan ulama di daerahnya dan mengingatkan mereka akan adanya ekstrimis syi'ah berusaha untuk menanamkan pengaruh di wilayah ini. Pada akhirnya, mereka menghubungkan nama Husein Ali Al-Habsyi dengan peristiwa-peristiwa peledakan bom di Malang. Akhirnya dimulailah gelombang pertama persidangan kasus ini, mulai bulan Januari - Maret 1986, dengan terdakwa:

1. Nama : Ahmad Muladawilah
Umur : 22 tahun
Pekerjaan : Pedagang Toko kelontong
Keterangan : Ditangkap, 19 April 1985 dengan tuduhan meledak-kan gereja Katholik di Malang, dan candi Borobudur. Dia divonis hukuman penjara 2 tahun.
2. Nama : Abdul Qadir Ali Al-Habsyi
Umur : 25 tahun
Pekerjaan : Pengangguran
Keterangan : Ditangkap, 16 Maret 1985, saat melarikan diri dari bus malam. Dituduh terlibat pengeboman candi Borobudur dan bus Pemuda Ekspres. Divonis hukuman penjara 20 tahun.
3. Nama : Abdul Qadir Baraja'
Umur : 41 tahun
Pekerjaan : Pedagang kain

Keterangan : Ditangkap, 5 Mei 1985. Dituduh menyediakan pera-latan bom. Divonis penjara 13 tahun. Tetapi setelah jaksa naik banding, hukumannya malah diperberat menjadi 15 tahun.

Persidangan Abdul Qadir Baraja' memperoleh perhatian besar dari mass media saat itu. Dalam persidangan, keterangan-keterangan para saksi saling bertentangan, terutama menyangkut peran Abdul Qadir Baraja' dalam menyediakan bom-bom dari Teluk Betung. Mohammad Akhwan mengaku bahwa dia diberi dana oleh Baraja' untuk membeli bahan peledak. Ujarnya, "Uang itu telah saya bayarkan kepada orang bernama Basrin Sinan". Tapi Basrin sendiri, di dalam persidangan, mengatakan bahwa ia menerima uang secara langsung dari Mohammad Akhwan. Keterangan yang diberikan di depan penyidik, yang sesuai dengan keterangan Akhwan, di dalam persidangan dicabut lagi. Baraja' mengomentari, "Membeli bahan peledak dari Teluk Betung tidak ada masalah. Karena para nelayan di sana biasa menggunakan bahan peledak untuk menangkap ikan". Walaupun Baraja' memberikan alasan-alasan dan bantahan jaksa terhadap hal itu tidak kuat, tapi terdakwa tetap dinyatakan bersalah.

Mengenai jaringan syi'ah yang dituduhkan kepada para terdakwa, sebenarnya berpangkal pada dua orang muballigh. Namun tidak seorang-pun diantara keduanya yang muncul di persidangan. Ada yang mengatakannya, mereka hanya tokoh fiktif. Orang pertama bernama Ibrahim al-Jawwad, diduga telah melarikan diri ke Iran, karena dia telah belajar di sana sejak 1982-1984. Sedangkan orang kedua bernama Husein Ali Al-Habsyi, kakak kandung Abdul Qadir Ali Al-Habsyi, yang buta sejak lahir. Dia berperan sebagai kurir antar terdakwa dalam kasus di Malang. Kesaksian Mohammad Akhwan mengesankan adanya hubungan antara tokoh Malang ini dengan para pengikutnya di pesantren Islam (YAPI) Bangil. Dia ikut menghadiri pertemuan yang, katanya diadakan di Probolinggo Jawa Timur, dengan dihadiri oleh orang-orang tersebut untuk membicarakan tragedi Tanjung Priok dan peledakan bom di Jakarta

Kesaksian ini sangat berpengaruh dalam mengkoordinir gerakan syi'ah yang dituduhkan ada jalinan dengan pesantren YAPI Bangil. Ketika kedua tokoh kunci gerakan syi'ah tidak hadir dalam persidangan, maka tidak seorangpun dapat menyanggah adanya anggapan, seperti yang dinyatakan oleh Abdul Qadir Baraja', bahwa, "Husein yang dikatakan buta itu, sesungguhnya tidak benar-benar buta".

Ada rangkaian persidangan pada bulan April-Mei 1986. Dalam persidangan ini, Mohammad Akhwan dan tiga orang lainnya dijatuhi hukuman. Persidangan Mohammad Akhwan sama sekali tidak diberitakan dalam surat kabar, sedangkan yang lain diberitakan sedikit.

4. Nama : Basiran Sinan
Umur : 38 tahun
Pekerjaan : Nelayan
Keterangan : Tanggal penangkapannya tidak diketahui. Dituduh mengirimkan bahan-bahan peledak pada Akhwan dan Ibrahim, Desember 1984 dan Maret 1985. Di-jatuhi hukuman 8 tahun. Menjadi saksi dalam persidangan Abdul Qadir Baraja'.
5. Nama : Shadik Musawa
Umur : 28 tahun
Keterangan : Tanggal penangkapannya tidak diketahui. Dituduh mengirimkan delegasi untuk melakukan pengena-lan medan di Bali sebagai persiapan untuk melakukan peledakan bom yang akan dilaksanakan oleh orang-orang yang telah membawa bahan-bahan peledak dalam bus malam pemudi Expres ke Bali. Dia juga dituduh sebagai kurir di dalam kelompok Husein Al-Habsyi. Dia menjadi saksi dalam persidangan Baraja' dan dituduh memperkenalkan Baraja' kepada Husein Al-Habsyi. Divonis hukuman 8 tahun penjara.
6. Nama : Abdul Qadir Idris Al-Haddad
Umur : 25 tahun
Keterangan : Tanggal penangkapannya tidak diketahui. Dituduh sebagai anggota kurir dalam kelompok Husein Al-Habsyi. Dia juga dituduh menemani Musawa dalam perjalanan ke Bali untuk melakukan pengamatan lapangan. Anehnya nama Al-Haddad belum pernah disebut-sebut dalam persidangan yang lalu. Bahkan setelah persidangan Musawa berjalan separuh, barulah dia ditampilkan sebagai saksi mengenai perjalanannya ke Bali. Dia menyebutkan bahwa Abdul Qadir Al-Habsyi teman dekatnya.

Persidangan-persidangan ini dengan jelas menunjukkan bahwa keterkaitan antara para tertuduh dengan gerakan syi'ah tidak jelas. Hanya kepandaian jaksa penuntut untuk memanipulasi data-data, akhirnya dikatakan ada hubungan satu dengan yang lain. Sedangkan mengenai pensuplai bahan-bahan peledak sebenarnya adalah tipu daya. Di sini terlihat, bahwa Abdul Qadir Baraja' yang telah dijatuhi hukuman sebelumnya (yang telah divonis perkaranya) karena dianggap terlibat kasus teror Warman, tahun 1978 dan juga dianggap sebagai seorang teroris. Orang inilah, barangkali yang logis sebagai pensuplai bahan-bahan peledak dibandingkan dengan isu yang mengatakan pihak militer sebagai pensuplainya. Persidangan ini telah mengorbankan

orang-orang kecil. Barangkali kita mempertanyakan apa sebabnya. Salah satu motivinya adalah ingin membuat masyarakat tidak percaya kepada pesantren YAPI, dan mengkaitkan orang-orang tertentu punya hubungan dengan syi'ah di Iran.

Bab 06-06 Persidangan Kasus Akhwan dan HM Sanusi

Persidangan kasus Muhammad Akhwan berlangsung paling akhir dari persidangan-persidangan kasus pengeboman di Malang. Padahal sebenarnya dialah orang pertama sebagai terdakwa yang harus diajukan dalam persidangan-persidangan kasus pengeboman Malang yang mulai berlangsung pertengahan tahun 85.

1. Nama : Muhammad Akhwan
Umur : 38 tahun
Keterangan : Ditangkap pada 30 Desember 1984. Disidangkan perkaranya pada bulan April dan Mei 1986. Didakwa berkomplot melakukan tindakan subversi dengan bergabung dalam operasi pengeboman di berbagai tempat dan ikut gerakan Komando Jihad. Persidangan kasusnya dijadualkan bersamaan dengan persidangan kasus Sanusi yang kedua, yang telah berlangsung seminggu sebelumnya di Jakarta.

Persidangan-persidangan di Malang, apakah dimaksudkan untuk menjaring Sanusi ataukah tidak, dugaan yang semacam ini sulit untuk membuktikannya. Tetapi kesaksian Akhwan dan David Frans serta jadwal persidangan yang sama dengan persidangan Sanusi, mengindikasikan adanya strategi tertentu. Hal itu karena ada indikator-indikator pengajuan beberapa saksi yang sama dalam persidangan kedua orang itu. Persidangan-persidangan yang dilakukan di berbagai tempat di Jawa dan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan Akhwan melibatkan beberapa orang dari pesantren YAPI, seperti Lutfi Ali dari Probolinggo, Faishal Basri dari Malang. Orang terakhir ini telah divonis 8 tahun penjara, sedang persidangan terhadap Lutfi Ali berlangsung pada 14 Mei 1986. Sayangnya kami tidak memiliki keterangan tentang proses persidangan ini. Biasanya kesaksian-kesaksian tertulis dipergunakan dalam menyidang orang semacam ini untuk melindungi para saksi dari cecaran pertanyaan tim pembela.

Akhwan menyangkal keras bahwa Sanusi, dalam satu pertemuan di Yogyakarta, berbicara tentang rencana pembunuhan Presiden Soeharto, tetapi Sanusi dalam pertemuan itu berkata, bahwa Soeharto bukan muslim yang baik. Akhwan menerangkan bahwa Sanusi dan Mursalin Dahlan telah masuk dalam gerakan revolusi. Akhwan mempunyai hubungan dengan beberapa kelompok yang bermacam-macam. Syahirul Alim yang diangkat sebagai pimpinan sayap militer Islam dalam pertemuan di Tawangmangu, Jawa Tengah, mengemukakan sejumlah analisis. Dalam pertemuan itu hadir beberapa kelompok lain yang katanya siap mati demi menegakkan negara Islam. Dalam pertemuan ini dinyatakan ada-nya pertalian dengan Sanusi, karena salah seorang anggota Petisi 50 membantu Mursalin menunjuk Akhwan untuk menjabat sebagai pimpinan YAPI di Malang.

Pertanyaan yang sangat mengganjal dalam rekayasa Akhwan ini, ialah sejauh mana hal itu sejalan dengan langkah-langkah jaksa penuntut umum, terutama berkaitan dengan kesaksian Akhwan yang sangat merugikan dalam persidangan-persidangan kasus Surabaya yang lalu. Sosok lain yang masih misterius adalah seorang bernama David Frans, saksi pertama yang dihadirkan pada persidangan Akhwan. Tidak jelas, apakah Frans sekarang ini masih ada di dalam tahanan ataukah ia sudah dijatuhi hukuman. Di akhir persidangan kasus Akhwan, ia dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup.

Ir. HM. Sanusi. Ia sebenarnya telah divonis hukuman penjara 19 tahun. Tetapi sekarang dia dikenai dakwaan berkomplot dalam usaha mem-bunuh Soeharto. Komplotan ini dibicarakan dalam pertemuan Yogya-karta, tahun 1982 bertempat di kantor Bulletin Ar-Risalah yang terlarang, dimana pimpinan redaksinya, Irfan Suryahardi, telah dijatuhi hukuman penjara 13 tahun pada bulan Februari 1986 (baca BAB V). Sanusi dituduh hadir di dalam pertemuan tersebut bersama dengan 29 orang. Tanpa mempermasalahkan adanya komplotan untuk membunuh presiden, sesungguhnya beberapa orang saksi dalam persidangan kasus Sanusi, antara lain seorang bakul sayur dari Jakarta bernama Nur Iman, mengaku diberi dana oleh Sanusi sebesar 14 juta rupiah untuk membeli bahan-bahan peledak guna meledakkan mobil presiden di salah satu jalan Jakarta pada tahun 1982. Tetapi dalam kenyataannya, apa yang disebut usaha pembunuhan itu sama sekali tidak ada. Kemudian Marwan Ahwari, tampil menjadi saksi. Dia berasal dari Solo mengaku, bahwa Sanusi merencanakan pembunuhan Soeharto ketika Soeharto mengadakan acara pembukaan candi Borobudur yang telah selesai direnovasi, pada bulan Februari 1983. Upaya inipun tidak terwujud. Ada yang mengatakan bahwa Sanusi telah menyiapkan dana 500 ribu rupiah untuk melakukan pembunuhan terhadap presiden, dan 500 ribu rupiah lagi sebagai biaya mencetak undangan pertemuan yang akan diselenggarakan di masjid Istiqlal Jakarta setelah Soeharto terbunuh. Kesaksian-kesaksian ini, oleh Sanusi dikatakan sebagai cerita fiktif.

Dalam persidangan kedua kasus Sanusi ini, untuk pertama kalinya muncul Syahirul Alim dan Mursalin Dahlan memberikan kesaksian langsung, padahal sebelumnya mereka hanya

memberikan kesaksian tertulis saja. Kedua orang saksi ini telah dilepaskan dari penjara dan menjalani tahanan rumah. Hal ini terjadi sebelum memberikan kesaksian di persidangan. Mursalin Dahlan menegaskan bahwa sebenarnya Sanusi tidak menolak Pancasila, tetapi ia beranggapan Pancasila tidak akan menjadi baik selama belum dapat mewujudkan harapan-harapan kaum muslimin. Saksi ini juga menyangkal bahwa dirinya mengetahui ada komplotan untuk membunuh presiden.

Dari tanya jawab yang berlangsung di persidangan, muncullah bukti bahwa tidak terdapat korelasi yang jelas antara kasus yang satu dengan lainnya. Namun Syahirul Alim menegaskan bahwa Mursalin Dahlan mengetahui secara detil tentang adanya komplotan itu, bahkan ia tahu nama-nama yang bertugas memasang bom di jalan-jalan di Jakarta. Ia pun bercerita adanya perbedaan mengenai bagaimana operasi itu akan dilakukan dan di mana. Jaksa penuntut umum dalam persidangan ini menganggap perlu melindungi kedua saksi dari cecaran pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tim pembela. Syahirul Alim juga menyatakan di dalam persidangan bahwa ia turut serta merencanakan berdirinya negara Islam. Ia menyatakan Sanusi sama sekali tidak ada hubungan dengan masalah ini. Sedangkan Mursalin Dahlan menyatakan Sanusi adalah pendiri pesantren kilat, untuk melatih kelompok-kelompok Islam.

Dengan geram Sanusi menyangkal keterangan saksi tadi, dan menganggap keduanya sebagai “kutu busuk” di arena perpolitikan. Akan tetapi, sejauh mana kebenaran dari pernyataan-pernyataan yang dikemukakan kedua saksi di atas, hal itu tetap menjadi misteri.

Kemudian tampilah dua orang saksi yang meringankan Sanusi, yaitu:

1. Kris Siski Tumoa, seorang Katholik, salah seorang penandatangan Petisi 50. Ia menyangkal keras segala macam tuduhan keterlibatan Sanusi menggulingkan pemerintah atau mendirikan negara Islam. Ia bertanya, bagaimana mungkin orang yang mempunyai rencana semacam itu duduk bersama kami dalam kelompok petisi 50?

2. Tasrif Tuasikal, terdakwa yang perkaranya disidangkan di Jakarta. Ia sekali lagi menegaskan bahwa Sanusi tidak mempunyai peran sama sekali dalam operasi peledakan bom.

Tim pembela memohon agar Ali Sadikin ditampilkan sebagai saksi, karena ia merupakan tokoh yang menonjol di dalam kelompok Petisi 50. Pembela juga meminta diadikannya Mohammad Akhwan. Namun majelis hakim menolak dan menyatakan: “Ali Sadikin sangat riskan”. Dan mengapa Akhwan tidak dijadikan saksi, tidak disebutkan alasannya. Tetapi kami menduga, karena dalam persidangan ia pernah mengatakan, Sanusi tidak pernah berbicara sedikitpun mengenai komplotan untuk membunuh Soeharto. Tim pembela menunjukkan kelemahan-kelemahan dalil jaksa penuntut umum, yang mengaitkan peristiwa pembantaian Tanjung Priok dengan peristiwa lain di Jakarta dan Malang. Maka sekarang tinggallah dakwaan akan adanya kaitan antara Sanusi dengan peristiwa pengeboman dan pesantren kilat. Sebab dikaitkannya Sanusi dengan hal-hal tersebut hanya didasarkan keterangan Akhwan dan David Frans, padahal Frans ini menjadi anggota dari kelompok-kelompok politik yang saling berseberangan. Sanusi berkali-kali menegaskan: “Kami tidak punya hubungan apapun dengan kelompok-kelompok sempalan, dan kami tidak berkomplot untuk menggulingkan pemerintah”.

Kesaksian tertulis dengan angkat sumpah, yang menjadi senjata pamungkas jaksa penuntut umum, diserahkan oleh Sanusi dalam persidangan bertalian dengan kasus kematian Mohammad Jabir di dalam tahanan; sesuai dengan kesaksian yang disodorkan oleh keponakannya. Jabir ditahan tanpa sebab yang jelas, kemudian disiksa habis-habisan karena menolak memberi kesaksian yang mendiskreditkan Sanusi. Keponakan Jabir bercerita, bahwa jasad Jabir penuh luka-luka dan lebam kebiru-biruan ketika mereka (ahli waris) menerima penyerahan jasad itu untuk dikebumikan. Petugas mengancam mereka agar tidak membuka dan mengambil foto jasad korban. Keberanian memberikan kesaksian semacam ini, dari siapapun dianggap sebagai suatu tindakan heroik. Mohammad Jabir, korban pembunuhan sadis, adalah saksi yang di ajukan oleh jaksa penuntut umum. Pada hari yang telah ditetapkan untuk hadir di persidangan, majelis hakim mengumumkan bahwa Jabir tidak dapat diadikannya karena telah meninggal dunia pada bulan Januari lalu. Akan tetapi jaksa penuntut umum memiliki kesaksian tertulis dari almarhum yang menyatakan, bahwa Sanusi menyerahkan dana kepadanya sejumlah Rp 400.000 melalui seorang karyawan bernama Solonis Z dan Marwan Ahwari untuk membeli bahan-bahan peledak dan meneliti situasi Borobudur.

Di dalam surat-surat kabar tidak ada berita mengenai penyangkalan saksi yang terjadi dalam persidangan kasus Sanusi, di mana saksi yang bersangkutan telah meninggal dalam tahanan karena perlakuan keji, padahal di dalam tahanan ada penjaga keamanan.

Sebagaimana diberitakan di dalam surat-surat kabar yang memuat berita ringkas tentang permohonan untuk membebaskan Sanusi dari segala macam tuduhan, tim pembela menegaskan bahwa tidak ada seorang saksi pun yang mengatakan Sanusi telah berbicara mengenai rencana komplotan membunuh Soeharto. Ada kontroversi di dalam keterangan para saksi, karena ada yang mengaku telah mendengar Sanusi mengatakannya hal semacam itu, tetapi yang lain tidak. Di sisi lain tim pembela menilai bahwa dijatuhkannya hukuman seumur hidup kepada Sanusi semata-mata didasarkan pada BAP yang dilakukan oleh penyidik, dan bukan didasarkan pada keterangan-keterangan di dalam persidangan. Karena itulah akhirnya, Sanusi divonis hukuman

penjara 20 tahun sejalan dengan vonis 19 tahun yang sebelumnya dikenakan kepadanya. Surat-surat kabar mengomentari hal ini dengan menyatakan hanya ada selisih satu tahun saja.

Ketika banyak pertanyaan kita yang tidak terjawab, dan diliputi kabut kegelapan, ternyata ada satu hal yang sudah menjadi jelas, bahwa di Indonesia dewasa ini kata-kata teroris hampir sama artinya dengan kata-kata fundamentalis. Bilamana ada sejumlah aktivis yang ditangkap dan di jatuhi hukuman berat, tidak lain hanyalah sasaran antara dari rencana besar rezim yang berkuasa. Pembersihan terhadap orang-orang ini, sebenarnya ibarat memotong gunung es. Korban utamanya seperti Sanusi, politikus terkenal, divonis hukuman seumur hidup, bukan karena ia dapat dibuktikan secara hukum telah mendanai operasi pengeboman atau berkomplot membunuh presiden. Tetapi semata-mata karena ia berfikiran bebas dan mengungkapkan pandangan-pandangannya dalam menghadapi segala dakwaan. Sanusi telah terjebak dalam jaringan musuh. Karena dia telah memberi bantuan keuangan kepada Rahmat Basuki untuk menjaga kelestarian hubungan baik sejalan dengan kebiasaan masyarakat di Indonesia. Ikatan-ikatan yang semula tidak merugikan berubah menjadi komplotan yang menakutkan. Komplotan semacam ini terkadang melibatkan orang yang masing-masing mempunyai maksud sendiri, bukan lagi pada tujuan bersama. Bahkan terkadang mereka tidak mengetahui apa-apa dan turut serta melakukan perbuatan yang dituduhkan q

NGGOTA kelompok Usrah Jawa Tengah, yang pertama kali disidang adalah Tubagus Muhammad Jiddan, 22 tahun, seorang petani dari desa Banaran, Kabupaten Kulon Progo, Wilayah Barat Yogyakarta. Berbeda dengan persidangan-persidangan kasus gerakan Islam sebelumnya, persidangan Jiddan ini tidak ada sangkutpautnya dengan kasus Tanjung Priok. Dia didakwa telah memberikan ceramah berapi-api dan mengikuti training Komando Jihad di Muntilan serta berusaha untuk melaksanakan kegiatan tersebut di kampungnya. Dia didakwa bertujuan mendirikan negara Islam dan melenyapkan Pancasila. Jiddan menyangkal dakwaan semacam itu. Dia menyatakan hanya sekedar mengikuti kegiatan keagamaan secara rutin. Pada bulan Februari 1986 dia dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 6 tahun penjara.

Beberapa bulan berikutnya tidak lagi terdengar kabar tentang gerakan Usrah, sehingga masyarakat beranggapan kasus Jiddan ini bersifat khusus. Tetapi pada bulan Juni, mulailah tahanan-tahanan gerakan Usrah muncul dalam berbagai persidangan pengadilan sehingga mengindikasikan bahwa persoalannya panjang, seperti halnya dengan kasus-kasus persidangan lainnya yang dilakukan terhadap orang Islam. Tiba-tiba saja penguasa Jawa Tengah mengumumkan penangkapan terhadap puluhan orang yang menjadi pendukung kelompok Usrah yang ternyata jaringannya tersebar di kalangan masyarakat Jawa Tengah. Dengan demikian sekarang muncul komplotan gerakan Islam sempalan.

Bab 07 GERAKAN USRAH DI JAWA TENGAH

Kata Usrah berarti keluarga. Dari persidangan di pengadilan dan beberapa dokumen gerakan ini diketahui, bahwa pusat gerakan Usrah ini bermarkas di Jawa Tengah bagian selatan, dan beberapa daerah di pantai Utara Jawa. Masyarakat Islam di Jawa dibagi ke dalam kelompok santri dan Abangan. Kelompok santri ini lebih banyak tinggal di Jawa bagian Utara daripada bagian selatan.

Beberapa hari sebelum tahun 1965, daerah selatan Jawa Tengah merupakan basis PKI terkuat di Indonesia. Mayoritas penduduknya mendukung PKI, tetapi di beberapa bagian lain, Islam lebih banyak pengikutnya.

Basis-basis PKI inilah yang menjadi sasaran pertama pembantaian tahun 1965 dan 1966 yang kemudian mengantarkan Soeharto memegang tampuk kekuasaan. Berbeda dengan Jawa Timur, pihak militer dengan bantuan pemuda-pemuda Islam melakukan pembunuhan terhadap pendukung-pendukung PKI di desa, dan di daerah-daerah kantong gerakan Usrah seperti Klaten, Boyolali, Brebes, dan Surakarta. Pembantaian-pembantaian sadis di daerah-daerah ini meninggalkan bekas traumatis pada masyarakat, sehingga rasa permusuhan antara abangan dan santri tidak akan dapat diobati, untuk beberapa generasi yang akan datang.

Para penguasa militer menganggap daerah miskin di Jawa tengah sebagai daerah yang rawan gangguan. Daerah ini merupakan lahan subur bagi perkembangan PKI disebabkan kemiskinan rakyat. Penguasa militer juga mencurigai gerakan kiri yang berkedok Islam di daerah-daerah ini.

Gerakan Usrah sepanjang yang kami ketahui, sama sekali berbeda dengan gerakan-gerakan Islam lainnya di Indonesia. Gerakan ini dijiwai semangat reformasi dan mengajak kembali kepada nilai-nilai dasar Islam. Sekalipun gerakan ini sifatnya reformatif, namun berbeda dengan gerakan Muhammadiyah yang sama-sama lahir di wilayah ini.

Gerakan Usrah diilhami oleh ajaran Hassan Al-Banna, seorang pemikir muslim Mesir serta pembangun gerakan Ikhwanul Muslimin. Gerakan ini terdiri dari kelompok-kelompok kecil yang mengadakan pengajian mingguan untuk membina semangat anggotanya menjalani hidup sesuai tuntunan Al-Qur'an. Kelompok-kelompok tersebut merupakan bagian dari gerakan lebih besar

yaitu gerakan Ikhwanul Muslimin. Gerakan ini sangat besar perhatiannya mempersiapkan anggota-anggotanya melalui pengajian dan pembinaan organisasi.

Tidak di ketahui secara pasti sejak kapan kelompok-kelompok ini melakukan kegiatannya dan seberapa luas penyebarannya serta berapa jumlah pengikutnya. Jenderal Harsudiono Hartas pernah mengumumkan bahwa gerakan usroh ini berawal dari Solo lalu berkembang keenam masjid yang bertebaran di kota Semarang. Gerakan ini mempunyai pengikut sekitar sepuluh ribu orang. Karena itu tokoh-tokoh Islam khawatir kalau pihak militer nantinya secara membabi-butu menganggap semua masjid sebagai tempat berlindung yang aman bagi aktivis-aktivis Usrah.

Anggota setiap kelompok gerakan Usrah jumlahnya terbatas, antara tujuh hingga lima belas orang. Dengan sistem ini maka terbentuklah ikatan individual yang kuat, sehingga para anggotanya dapat saling membantu kawannya di saat-saat sulit. Kelompok Usrah ini juga mengumpulkan infaq untuk membantu para anggotanya, membiayai keperluan kawin, pemeliharaan anak yatim dan lain-lain. Para anggota Usrah tidak hanya di tuntut keahlian di bidang agama, tapi juga harus meluangkan waktu untuk membahas persoalan-persoalan yang timbul di lingkungannya masing-masing. Gerakan ini mendorong para anggotanya untuk menjalani kehidupan sesuai ajaran Islam yang benar, meninggalkan minuman keras, perjudian, rokok, dan membiasakan hidup berjama'ah serta kegiatan-kegiatan keagamaan. Para anggotanya juga di ajak menjauhkan diri dari organisasi-organisasi non Islam serta menolak setiap bentuk ideologi yang bertentangan dengan Islam.

Walaupun mereka tidak pernah membicarakan masalah-masalah politik praktis, tetapi tidaklah sulit untuk diduga, bahwa mereka menolak asas tunggal yang diwajibkan pemerintah. Sikap gerakan ini terhadap asas tunggal yang terjabarkan di dalam pancasila tidaklah secara frontal, tetapi berupaya menciptakan kondisi politik, dan sosial berdasarkan semangat Islam.

Para anggota gerakan Usrah menganggap rendah mereka yang bekerja dalam birokrasi pemerintah. Sikap semacam ini dianggap sebagai alasan terhadap rezim yang sangat otoriter dan suka kepada simbol-simbol. Bagi rezim, ancaman Usrah itu dirasakan karena sifat gerakannya yang berakar pada pembinaan keluarga dan pola pengembangan organisasinya.

Tidak adanya perhatian gerakan Usrah terhadap masalah-masalah politik nasional sejalan dengan ketidakpeduliannya kepada negara dan semua peraturannya. Adanya tuduhan bahwa gerakan ini secara rahasia mendukung perjuangan mendirikan negara Islam nampaknya berlawanan dengan keyakinan keagamaan gerakan ini. Sebab tujuan pokok gerakan Usrah adalah menyebarkan da'wah di kalangan kaum muslimin yang telah meninggalkan tuntunan agamanya, agar kembali kepada Islam serta mengajak kaum muslimin bertaqwa. Hal yang menarik dari gerakan ini adalah karena ia ternyata tersebar di daerah-daerah abangan dimana orang-orangnya kuat berpegang pada aliran kebatinan, tetapi secara formal mengaku Islam.

Bab 07-01 Persidangan kasus Usrah

Gelombang pertama persidangan kasus Usrah dilakukan di beberapa pengadilan di Jawa Tengah, pada akhir Juni 1986. Hal itu dilakukan bersamaan dengan persidangan kedua kasus Sanusi, karena dituduh terlibat dalam pengeboman dan upaya pembunuhan presiden Soeharto. Harsudiono Hartas, pangdam Diponegoro saat itu menyamakan gerakan Usrah dengan PKI. Tujuan gerakan ini adalah melakukan perpecahan dan menjelek-jelekkkan pemerintah. Usrah merupakan gerakan ekstrim dan menempuh cara yang sama dengan PKI. Harsudiono Hartas mengatak, "Pemimpin gerakan Usrah bawah tanah telah dapat ditangkap. Ternyata orang ini adalah mantan anggota PKI dan menurut penyelidikan polisi orang ini adalah pimpinan PKI. Namanya sering disebut-sebut dalam pengadilan kasus Usrah. Muncul pertama kali sebagai saksi yang dimunculkan pembela dalam persidangan kasus saudara tirinya. Harsudiono mengindikasikan adanya korelasi antara fundamentalis muslim dengan sisa-sisa PKI. Ia mengingatkan bahwa sulit sekali membedakan antara tokoh PKI dan gerakan pembebasan, dan antara orang-orang yang golongan Pancasila dan golongan fundamentalis. Dalam realitas, batasan komunis dan gerakan pembebasan akan bergabung untuk memproklamirkan berdirinya fundamentalis baru.

Dalam keterangan yang dipublikasikan pada awal Oktober 1986 pada saat orde baru merayakan kemenangannya atas PKI pada bulan Oktober 1965, kepala kejaksaan tinggi Jawa Tengah, Sudarno mengumumkan bahwa pihak keamanan telah berhasil membongkar kantong gerakan Usrah di daerah Brebes, Surakarta dan Klaten. Sebagian besar anggota gerakan ini telah ditahan. Mereka itu ada yang berasal dari anggota Darul Islam, dan sebagian besar telah ditahan. Diantara mereka ada yang berasal dari anggota DI atau mantan tentara dari divisi Diponegoro dan orang-orang yang terpengaruh pada ajaran komunis yang dahulu ikut dalam pasukan pendukung gerakan Dewan revolusi setelah terjadinya G3PKI di akhir-akhir 1965. Banyak perajurit Diponegoro yang disersi dan mereka telah ditangkap. Tetapi yang lain berhasil melarikan diri dan bersembunyi. Pernyataan Sudarno ini sulit diterima. Sebab anggota gerakan Darul Islam atau anggota bataliyon divisi Diponegoro yang dimaksud, barangkali mereka sekarang ini berumur lebih dari 40 tahun atau memasuki umur 50-an lebih. Padahal sekarang ini sebagian besar orang yang didakwa terlibat di dalam gerakan Usrah baru berumur 30-an atau bahkan lebih muda.

Ibarat hendak mendidik masyarakat, maka pengadilan terhadap gerakan Usrah nampaknya sasaran pokoknya adalah masyarakat Jawa Tengah sendiri. Sebab koran-koran nasional tidak banyak memberi perhatian terhadap kasus ini, berbeda dengan koran-koran lokal yang menaruh perhatian besar terhadap masalah ini.

Sampai sekarang sesuai dengan pernyataan juru bicara militer, bahwa ada 29 terdakwa yang telah diajukan ke pengadilan. Sesuai dengan daftar nama-nama tapol diantara mereka itu 18 orang terdakwa telah divonis kasusnya sebelum akhir Januari 1987. Para terdakwa dalam kasus Usrah ini dijatuhi hukuman antara 5-11 tahun. Sebagian besar terdakwanya adalah orang-orang desa yang hampir-hampir tidak pernah memperoleh pendidikan formal. Mereka terdiri dari para petani, pedagang, tukang dan guru-guru agama, bahkan di beberapa daerah di antara terdakwa itu masih berstatus sebagai pelajar dan mahasiswa.

Semua tuduhan hanya berkisar pada satu masalah, yaitu perbuatan-perbuatan yang dianggap melanggar UU anti subversi dan pasal lain yang dikenakan kepada terdakwa adalah pasal 55 KUHP. Mereka dikenai pasal ini karena dituduh mendorong orang lain melakukan tindak kejahatan. Sedangkan tuduhan pokoknya ialah para terdakwa mendukung gerakan untuk mendirikan negara Islam dan menggulingkan pemerintahan yang sah. Sebagaimana persidangan-persidangan kasus subversi umumnya, maka penyidikan dalam kasus ini para jaksa mendasarkan tuduhnya berdasarkan pengakuan para terdakwa yang BAPnya dibuat oleh petugas penyidik sebelum yang bersangkutan diajukan ke pengadilan. Sebagian besar dari terdakwa ini mencabut keterangannya di depan persidangan. Ketika para terdakwa mencabut yang telah tertulis di BAP mereka semua mengatakan bahwa ada keterangan yang benar tetapi ada pula yang tidak benar. Mereka menyatakan bahwa keterangan itu mereka berikan karena berada di bawah ancaman, bahwa gerakan Usrah ini adalah gerakan yang ingin mendirikan negara Islam atau jama'ah Islam. Para terdakwa menyampaikan keluhan di depan persidangan, bahwa para penyidik perkara mereka terus menerus melakukan penyiksaan fisik. Namun majelis hakim tidak pernah menggubris keluhan-keluhan ini, bahkan kadang-kadang hakim justru memerintahkan agar saksi yang mencabut keterangannya di BAP dikenai tuduhan sumpah palsu.

Memperhatikan secara keseluruhan atas persidangan-persidangan dan yang masih terus berlangsung pada saat kami mempersiapkan penyusunan buku ini, kami menampilkan beberapa persidangan yang dilakukan oleh: Beberapa pengadilan sebagai contoh, bukan dengan maksud mendiskreditkan. Kemudian kami menyampaikan pendapat sekitar jalannya persidangan yang terjadi di beberapa tempat di Jawa Tengah. Dari sana jelaslah, bahwa para terdakwa dijatuhi hukuman bukan akibat keterlibatannya dalam kasus yang didakwakan sesuai dengan kadar perbuatannya, tetapi mereka itu dijatuhi hukuman berat dengan tujuan, melakukan teror mental terhadap yang lain.

1. Nama : Wiyono Ilyas Mohammad Shadiq
Umur : 33 tahun
Pekerjaan : Pedagang emas
Asal : Surakarta
Keterangan : Ditangkap, 17 Februari 1986. Proses persidangannya dilakukan di PN Surakarta, mulai 7 Juli- Awal Oktober 1986. Divonis hukuman penjara 11 tahun. Selama dalam persidangan terdakwa mengalami teror mental berat. Seringkali dia mengalami stress. Dalam catatan persidangan, dinyatakan dia sering menangis lama sekali. Contohnya, ketika dia mendengar dibacakan vonis dan jaksa penuntut umum menuntut hukuman 11 tahun serta hakim memvonis perkaranya, Wiyono menangis sambil telungkup. Dia dituduh melakukan penghasutan dan menentang rezim sejak tahun 1978. Dia berusaha untuk mengganti pemerintah yang sah dengan pemerintahan Islam. Dia hendak menggantikan Pancasila dengan Qur'an dan Hadits. Sebagai sarananya, pertama kali ialah membentuk gerakan jama'ah Islam, sebuah organisasi yang mereka anggap dapat dipergunakan sebagai jalan menerapkan syariat Islam di Indonesia dengan kekerasan. Sesuai dengan dakwaan yang telah dibacakan, jama'ah Islam ini dikatakan melakukan pengacauan pada awal dasawarsa 1980-an disaat tokoh mereka tertangkap karena dicurigai terlibat di dalam gerakan Teror Warman. Dikatakan bahwa Wiyono, 1982 menghadiri sebuah rapat bersama dengan beberapa orang, yang sekarang ini sedang disidang karena kegiatan mereka dalam Usrah. Jaksa menilai bahwa rapat tersebut illegal. Dalam rapat ini disepakati untuk membangun kembali jama'ah Islam dan membentuk jaringan baru yang disebut Usrah. Para peserta rapat berjanji untuk membentuk Usrah di daerah masing-masing dan Wiyono menjadi pimpinan Usrah di Solo serta ketua umum seluruh daerah Surakarta. Dia juga dituduh menjabat sebagai pimpinan dalam gerakan Usrah untuk daerah Sukoharjo, dan imamnya sendiri adalah Abu Bakar Ba'asyir.

Di dalam setiap persidangan para terdakwa menyebut Abu Bakar ba'asyir sebagai pendiri dan imam gerakan Usrah. Dia pula yang dahulunya menjabat sebagai imam jama'ah Islam dan

kelompok study Islam. Disebutkan berkali-kali bahwa jama'ah Islam inilah yang menjadi cikal bakal gerakan Usrah. Abu Bakar Ba'asyir mengambil bae'at dari para pendukungnya untuk menyusun organisasi-organisasi di daerah. Dalam beberapa persidangan, Wiyono menjelaskan teks bae'ah, yaitu suatu pernyataan yang menggambarkan pentingnya kesediaan seseorang untuk bergabung ke dalamnya.

Sebagaimana disebut di dalam surat-surat kabar, bahwa Abu Bakar sendiri telah ditahan pada awal dasawarsa 1980-an dan disidangkan tahun 1982 bersama-sama dengan Abdullah Sungkar, ketua Yayasan pondok Al-Mu'min. Kedua orang ini dianggap melakukan tindak pidana subversi dan masing-masing dijatuhi hukuman 19 tahun, setelah banding mendapat keringanan hukuman menjadi 15 tahun penjara. Ketika dalam tahanan rumah, guna menanti hasil putusan banding dari mahkamah agung, mereka pergi ke luar negeri secara diam-diam. Perginya Abu Bakar Ba'asyir dan Abdullah Sungkar menimbulkan kesulitan, karena hal itu menyebabkan tim pembela korban kasus Usrah mengalami kesulitan berat.

Wiyono, dituduh menyebarkan rasa permusuhan dan kebencian di tengah masyarakat melalui ceramah-ceramahnya, dan mengajak kaum muslimin tidak memberi hormat kepada bendera merah-putih, menolak KB dan pancasila, karena dinilai sebagai ideologi *man-made* (ciptaan manusia). Tuduhan lain yang dikenakan kepada Wiyono adalah memiliki dan menyebarkan bulletin Ar-Risalah yang dipimpin oleh Irfan Suryahardi, yang kemudian divonis hukuman penjara 13 tahun beberapa bulan kemudian.

Wiyono, tidak menyangkal keberadaannya sebagai anggota gerakan Usrah. Sebaliknya dia menyatakan bahwa ajaran-ajaran gerakan ini bagus dan benar. Namun dia dengan keras menyangkal tuduhan usaha untuk mendirikan negara Islam. Tetapi majelis hakim kemudian menukas, "Bahwa Wiyono telah mengakui hal itu di depan penyidik pertama". Dia kemudian menjawab, "bahwa pengakuan itu diberikan di bawah paksaan". Ketika diinterogasi di Korem, ia dicambuk sedangkan saat itu dirinya sedang sakit. Setiap kali dia tidak mengiyakan apa yang dikehendaki penyidik militer, dia dipukuli. Tapi ternyata keluhan-keluhan semacam itu ditolak oleh hakim. Dia juga menyangkal bahwa gerakan Usrah adalah pelanjut dari Darul Islam ataupun jama'ah Islam. Gerakan Usrah juga bukan organisasi pembunuh ataupun penyebar huru-hara, juga tidak punya misi untuk mendirikan negara Islam. Gerakan ini bukan bermaksud untuk melakukan perlawanan bersenjata, sebab tidak memiliki sebuah senjatanya. Para anggotanya bersumpah untuk tidak melakukan kejahatan dan kerusuhan. Sesuai dengan pernyataan tim pembela, bahwa ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Abu Bakar Ba'asyir mengutamakan masalah akhlaq atau moral dan bukan untuk meresahkan masyarakat.

Bab 07-02 Persidangan Usrah di Sukoharjo

Terdakwa bernama:

1. Lukman Suratman, 31 tahun, penjahit
2. Wahyono Syafi'i, 34 tahun, guru agama.

Diajukan ke pengadilan dengan saksi beberapa orang desa, ternyata mereka tidak bisa berbahasa Indonesia sama sekali, padahal menjadi bahasa resmi nasional. Sebagian menyangkal keras pernah mendengar kata Usrah. Lukman Suratman beruntung karena saudara tirinya Thahari Suraji tidak dijadikan saksi atas kasusnya. Dalam persidangan, Thahari bersi-keras tidak mau diangkat sumpah dan tidak pula berbae'at kepada siapapun. Tidak jelas, tentang Thahari ini sebab dia tidak diketahui apakah dijatuhi hukuman atau tidak, padahal Lukman dan Wahyono masing-masing dijatuhi hukuman 6 tahun penjara.

HS. Sukandar, saksi ahli dari Depok diminta oleh pengadilan untuk menyampaikan pendapat, tetapi dia menyatakan tidak mempunyai waktu untuk mempelajari dokumen-dokumen yang harus dikomentari. Pengadilan dalam beberapa kali persidangan berusaha untuk mendapat-kan saksi ahli, tujuannya ialah agar memperoleh bukti mengenai hal ihwal gerakan Usrah, bahwa gerakan ini sama sekali tidak memiliki dasar dari aqidah Islam maupun pola kehidupan Jawa. Sekali Sukandar muncul dalam persidangan, ia mengatakan bahwa gerakan Usrah ini sejalan dengan pola hidup Jawa, karena pola hidup kekeluargaan. Pada dasarnya berintikan Bapak, ibu, anak, cucu, baik sekandung ataupun tidak. Ada beberapa ulama yang sependapat dengan pandangan ini.

Bab 07-03 Persidangan Usrah di Boyolali

Terdakwa, dua orang bersaudara:

1. Nurfalih, 38 tahun, petani
2. Mualif, 36 tahun, guru agama

Divonis serentak, tapi diadili di ruang sidang yang berbeda di pengadilan Boyolali. Keduanya di dampingi tim pembela yang berbeda pula, tetapi daftar nama-nama saksi semuanya sama. Bahkan kedua orang ini saling menjadi saksi atas kasus masing-masing pada hari yang sama. Hal semacam ini memberikan kesan, bahwa dalam penerapan hukum acaranya membingungkan. Yang satu pada suatu saat berbicara sebagai terdakwa, kemudian pada saat lain dia harus

berbicara di depan pengadilan sebagai saksi saudaranya. Nurfalalah mengajukan keluhan, sebab semua keterangan yang diberikannya dalam BAP dilakukan di bawah tekanan. Dan introgasi dilakukan di markas Korem. Padahal sebenarnya tidak dibenarkan lembaga ini melakukan penyidikan.

Saksi-saksi dalam persidangan Nurfalalah ada 50 orang desa, mereka mengatakan sama sekali tidak mengetahui tujuan Usrah walaupun mereka telah berbae'at. Tidak pernah jelas diketahui apakah para saksi ini ditahan atau tidak. Nurfalalah dan saudaranya masing-masing divonis hukuman penjara 7 tahun.

Bab 07-04 Persidangan Usrah di Klaten

Terdakwa kasus Usrah, paling banyak di daerah Klaten. Ada sejumlah 9 orang yang diajukan ke pengadilan. Tiga orang diantaranya terdiri dari guru agama.

1. Slamet Riyanto, 35 tahun. Disebut-sebut sebagai pimpinan daerah klaten, dijatuhi hukuman penjara 8 tahun.

2. Darussalam, 29 tahun, pimpinan Usrah Klaten barat, dijatuhi hukuman penjara 9 tahun.

3. Sirajuddin Abbas, 35 tahun, dijatuhi hukuman penjara 6 tahun.

Persidangan Darussalam dan Sirajuddin, memperoleh banyak per-hatian. Sirajuddin dituduh mengedarkan buku-buku perjuangan komu-nis, bulletin Ar-Risalah. Terdakwa tidak menyangkal tuduhan itu, tetapi tentang tuduhan berkomplot mendirikan negara Islam ditolak dan mencabut semua keterangan yang tertulis dalam BAP. Saudara perem-puannya, mahasiswi UII menyatakan dalam kesaksiannya bahwa pendirian-pendirian (keagamaan) saudaranya itu sejalan dengan pelajaran yang diterimanya di Perguruan Tinggi.

Tertuduh lain di Klaten adalah:

1. Marsidi, 32 tahun, penjahit. Divonis hukuman penjara 5 tahun.

2. Sarjoko, divonis hukuman penjara 7 tahun.

3. Rusdi, 36 tahun, petani, divonis hukuman penjara 8 tahun.

Sesuai dengan berita-berita di surat kabar, persidangan kasus Rusdi ini dijaga ketat oleh pihak keamanan.

Seorang terdakwa yang mengakui semua dakwaan yang dituduhkan kepadanya, ialah Mohammad Bakir, 43 tahun, guru agama. Dialah ter-dakwa yang paling tua dalam gerakan Usrah. Dia tampil sebagai saksi pada sebagian besar persidangan kasus ini di Klaten. Kesaksiannya mem-beratkan semua temannya. Bakir mempunyai jabatan koordinator gera-kan Usrah di Klaten. Dia mempunyai hubungan baik dengan Abu bakar Ba'asyir, dan pernah mengalami kehidupan penjara bersama. Dia tidak pernah membela Usrah dari kecaman orang lain. Dia membenarkan tuduhan Jaksa yang menyatakan bahwa Usrah berkeinginan mendirikan negara Islam di Indonesia. Sekalipun dia telah mendukung rezim, tapi dia tetap divonis hukuman penjara 9 tahun.

Bab 07-05 Persidangan Usrah di Karang Anyar

Terdakwa bernama:

1. Sujiman alias Yulianto, 28 tahun, saudara tiri Sujono, didakwa telah mendirikan cabang gerakan Usrah. Dia orang yang dicintai di daerahnya, terbukti dengan berjubelnya pengunjung di ruang sidang setiap digelar persidangan. Tim pembela mengatakan, masalah ini adalah persoalan agama semata-mata dan tidak ada kaitannya dengan politik. Karena itu tidak boleh dikenakan tuduhan berdasarkan UU anti subversi. Pada persidangan terakhir tim pembela mengajukan beberapa perta-nyaan tentang keabsahan jalannya persidangan dan saksi-saksi yang dimanipulasi, serta alasan-alasan tidak benar yang digunakan oleh hakim. Dan adanya tuduhan yang masih meragukan bahwa gerakan Usrah ini melakukan komplotan menjatuhkan pemerintah. Terdakwa dijatuhi hukuman penjara 10 tahun, tetapi sesudah naik banding dikurangi menjadi 9 tahun.

Bab 07-06 Persidangan Usrah di Yogyakarta

Persidangan kasus Usrah dilakukan di pengadilan negeri Yogyakarta. Kota ini merupakan pusat kebudayaan Jawa. Pemerintah meragukan bahwa kota ini menjadi markas munculnya gerakan kebangkitan Islam. Orang pertama yang diajukan ke persidangan, seorang mahasiswa UGM bernama M. Shabarin Syakur, 28 tahun. Selanjutnya Margono Syafi'i, 42 tahun, penjahit. Kedua orang ini telah ditahan sejak Desember 1985. Artinya jauh sebelum penangkapan terhadap para anggota gerakan Usrah, tetapi baru disidangkan kasusnya pada akhir tahun 1986.

Margono dijatuhi hukuman penjara 3 tahun. Vonis ini dikeluarkan pada bulan Januari 1987. Pengadilan menyatakan bahwa tertuduh tidak terbukti terlibat di dalam gerakan Usrah. Tetapi dia dinyatakan bersalah mengedarkan sekurang-kurangnya 75 eksempler bulletin Al-Ikhwani yang terlarang. Terdakwa tidak menyangkal tuduhan ini.

Shabarin Syakur dituduh telah menjadikan masjid sebagai markas kegiatan pengajian pemuda, dan memanfaatkan mimbar untuk menye-rang pemerintah yang sah. Dalam

pembelaannya yang penuh perasaan, terdakwa menyangkal tuduhan-tuduhan bahwa dirinya terlibat komplotan menggulingkan pemerintah Indonesia. Dia dijatuhi hukuman penjara 8 tahun.

Bab 07-07 Persidangan Usrah di Bantul

Terdakwa tunggal yang diajukan ke pengadilan negeri Bantul, terletak di selatan Yogyakarta, bernama Suyud bin Rahmat, 25 tahun. Didakwa memberikan ceramah-ceramah dan menghadiri acara-acara pengajian Usrah. Di daerah ini masih banyak orang lain yang melakukan kegiatan yang sama. Mereka ini telah terdaftar nama-namanya dan akan segera diadili.

Bab 07-08 Persidangan Usrah di Brebes

Dalam persidangan ini diajukan 6 terdakwa, dimulai 22 Desember 1986. Rombongan terdakwa dibagi dalam dua kelompok. Tetapi tim pembelanya berlainan. Mereka didakwa telah mendirikan gerakan Usrah di Brebes yang dimulai pada bulan Juni 1986.

Para terdakwa namanya ditandai dengan inisial tertentu. Di antara terdakwa ada seorang mahasiswa yang duduk pada tk. IV di Perguruan Tinggi Yogyakarta. Di antara terdakwa ini ada pedagang dari desa Siasem, pedagang dari desa Babatan dan lain-lain. Mereka dituduh telah merekrut pelajar-pelajar sekolah Tsanawiyah menjadi anggota gerakan Usrah. Surat kabar-surat kabar menerangkan bahwa para pelajar ini akan segera di-adili. Persidangan yang digelar di pengadilan Brebes mendapat perhatian sangat besar. Banyak massa yang berada di dalam maupun di luar persidangan. Perhatian orang bertambah besar karena kantor Departemen Pendidikan menerbitkan selebaran yang dikirimkan kepada seluruh sekolah di sana yang isinya menyatakan, bahwa para murid dan guru yang ingin menghadiri persidangan harus mendapat izin lebih dahulu.

Bab 07-09 WHAT NEXT

Selagi persidangan-persidangan kasus usrah berlangsung, Pemilu tahun 1987 akan digelar pada tanggal 23 April 1987. Soeharto yang telah terpilih sebagai presiden untuk kelima kalinya tanpa saingan sedikitpun, kiranya akan terlaksana pada tahun 1988. Sulit kiranya kita memperkirakan apakah persidangan-persidangan kasus Usrah ini merupakan gelombang terakhir di dalam upaya rezim militer melibas gerakan Islam? Kita juga sulit menyimpulkan bahwa gerakan Usrah ini hanya muncul di Jawa Tengah saja, atautkah gerakan ini juga punya pengaruh di Jawa Timur; karena di wilayah ini juga diadakan beberapa persidangan. Pihak keamanan di Jawa Tengah dengan keras mengultimaturnya, bahwa bukan tidak mungkin para terdakwa yang ada di wilayah utara akan terus melakukan kegiatan Usrahnya di sana.

Pertanyaan yang masih menggajal, ialah apakah tindakan keras yang dilakukan dalam bentuk penangkapan-penangkapan umum, penyiksaan terdakwa di waktu menghadapi interogasi dan vonis hukuman penjara yang berat akan berhasil untuk melibas kelompok-kelompok harakah Islam? Agaknya, orde baru harus mengerahkan segenap kemampuannya untuk itu, agar berhasil mencapai tujuannya dan menggelar persidangan terus menerus selama dua tahun, di mana hal ini mengisyaratkan bahwa Soeharto benar-benar dalam kesulitan besar, dan tidak mampu lagi mengungkapkannya q

LAMPIRAN I

Kesaksian Yusron bin Zainuri dalam Persidangan Dharsono

- 1. Nama saya : Yusron bin Zainuri.
- Umur : 19 tahun.
- Pekerjaan : Siswa madrasah. Tinggal di Koja Jakarta Utara.
- Keterangan : Pada sore hari, 12 September 1984, saya pergi untuk mendatangi acara pernikahan teman. Dalam perjalanan ke rumah aku melihat banyak orang berkumpul di jalan Serdang Raya, mendengarkan pengajian. Karena saya juga senang dengan acara ini, akhirnya ikut mendengarkan melalui salah

satu pengeras suara, tetapi sudah nasib saya pengeras suara itu tidak berada di depan panggung tapi di bawah dan sudah mengalami kerusakan.

Jelas sekali bahwa yang berdiri sebagai pembicara adalah Amir Biki, dan aku mendengar dia berkata: “Ada empat orang ditahan di KODIM. Jika pada jam sebelas malam ini tidak juga hadir di tengah kita. Kita disuruh datang bersama-sama ke kantor KODIM dan meminta dengan paksa pembebasan mereka.”

Dan karena pengeras suara selalu mati sementara yang hadir mendengarkan nasyid agama, saya menjadi kurang jelas apa yang dibicarakan oleh Amir Biki selanjutnya. Tetapi lambat-lambat saya mendengar: “barang siapa yang menyimpang dari Undang-undang tidak kita anggap sebagai saudara.” Dan karena saya ingat belum shalat saya langsung pulang ke rumah yang kebetulan tidak jauh dari tempat itu.

Setelah selesai shalat saya merasa sudah tidak ingin tahu apa yang akan terjadi. Mengetahui massa pergi ke kantor KODIM meminta kembali empat orang yang ditahan, langsung aku ke luar rumah dan bergabung bersama mereka. Ketika kami baru akan mendekati kantor polisi yang berlokasi di jalan Yos Sudarso, kira-kira masih tiga kilometer dari tempat KODIM, mereka (kami) saling berhadap-hadapan dengan barisan tentara.

Kemudian para tentara yang bersenjata senapan otomatis menghadang jalan dan meminta kami untuk berbaris dengan barisan antrian untuk mencegah mereka serentak maju ke depan. Kemudian kami duduk-duduk di jalan mengumandangkan puji-pujian kepada Allah. Lalu tiba-tiba ada salah satu dari kami yang memainkan jurus-jurus bela dirinya sehingga banyak menarik perhatian. Kemudian ada empat orang yang maju dan menuju seorang tentara yang sepertinya penanggung jawab bagi kekuatan pasukan itu, tapi aku tidak mendengar pembicaraan mereka mengingat tempatnya yang jauh dariku. Sementara manusia di sekelilingku masih mendengarkan lagu-lagu agama. Dan tiba-tiba seorang komandan dengan lantang memberi aba-aba seraya berteriak: “Pulanglah kalian” Kemudian kekuatan pasukan keamanan itu bergerak ke belakang sambil menembakkan peluru kepada manusia di depannya. Saya menoleh ke sekeliling tapi aku tersungkur ke bumi, tak tahunya aku telah tertembus peluru di sebelah kiri dadaku dan yang lain di punggungku, kemudian di perutku dan peluru lain di lenganku. Dan dalam waktu itu terjadi dua kali hujan peluru. Pertama, saat manusia sedang berhenti dan setelah berselang setengah jam datang lagi hujan peluru di arahkan kepada manusia. Dan mereka yang selamat dari hujan pertama langsung lari menyelamatkan diri, akan tetapi terkurung dengan hujan yang kedua.

Dan di saat aku tergeletak di bumi aku baru merasa sakit di bagian tubuhku yang terluka, tapi aku belum pingsan. Aku masih mendengar dengungan truk-truk yang datang tiba-tiba dan aku masih melihat bagian depannya. Aku sempat berfikir bagaimana truk-truk itu bisa lewat sedang jalanan penuh dengan manusia. Sebagian manusia ada yang tengkurap dan sebagian lainnya terluka seperti aku. Ketika aku masih berfikir tentang hal itu tiba-tiba aku mendengar seseorang berteriak, “Orang ini masih hidup. Bersiaplah.” Kemudian terdengar suara tembakan, sehingga suara itu memecakkan telingaku hingga menjadikanku merasa ada tekanan keras. Meskipun demikian aku masih sadar, walau sebenarnya aku mengharap pingsan saja.

Aku tidak tahu berapa lama aku tergeletak di atas tanah di tengah jalan. Ketika tiba-tiba aku merasa tangan-tangan kasar memegang tangan dan kakiku kemudian mengangkat dan melemparkanku ke atas truk. Dan nasib baikku, aku terjatuh di atas tumpukan tubuh manusia. Aku mencoba meraba apa yang ada di bawahku ternyata ada dua shaf tumpukan jasad yang sudah dingin dan tidak bergerak. Kemudian aku merasa-kan ada tubuh yang menindihku hingga aku bertanya pada diri sendiri, “Apakah tumpukan tubuh-tubuh ini sampai lima tingkat?” Ketika aku masih dalam bertanya-tanya tiba-tiba truk itu bergerak dengan muatan penuh tubuh-tubuh yang sudah dingin dan kering.

Dan setelah sampai pada suatu tempat ternyata adalah sebuah rumah sakit. Kemudian mereka bekerja memisahkan antara yang masih hidup dengan yang sudah mati. Dan sampai saat itu aku belum kehilangan kesadaran. Dan dari tempatku aku bisa melihat ada tiga truk yang datang dari arah Tanjung Priok penuh dengan jasad-jasad juga.

Kemudian aku diobati di rumah sakit dalam beberapa bulan. Selama aku di rumah sakit itu tak satupun dari keluargaku yang menjenguk. Apakah mereka sudah kehilangan jejakku? Sebuah pertanyaan yang tak terjawabkan membuat hatiku makin tersiksa. Akhirnya aku tahu bahwa mereka melarang keluargaku untuk menjengukku. Dan dalam rumah sakit yang sama di tingkat tiga di sana ada 76 orang korban peristiwa Tanjung Priok, 12 September 1984.

Setelah luka-lukaku hampir sembuh aku dipindahkan ke rumah tahanan di Cimanggis, bersama para korban yang lain. Kemudian aku disidang di pengadilan dengan tuduhan melawan pasukan keamanan, dan mereka menganggapku telah melakukan tindak kesalahan dan menghukumku satu tahun penjara.

LAMPIRAN II

Kesaksian Edi dalam Persidangan Dharsono

Nama Saya : Edi.

Pekerjaan : Pedagang kaki lima. Saya mempunyai warung di luar gedung bioskop Permai di jalan Yos Sudarso, di daerah Tanjung Priok. Setiap jam 9 pagi aku mengambil pakaian yang akan aku jual di Blok M atau tempat-tempat yang lain. Dan pada sore hari aku membuka warung yang dekat dengan tempat kejadian Tanjung Priok. Saya menyimpan barang dagangan di rumah yang berjarak satu kilometer, oleh sebab itu aku hanya menggunakan gerobak dorong untuk membawa dan mengangkut barang-barang itu.

Pada sore hari, 12 September 1984, aku sedang menjual daganganku dan tak biasanya barang-barangku lumayan laris karena banyak orang yang hadir dalam pertemuan itu. Dan ketika aku akan menutup warung tiba-tiba terdengar suara tembakan dan dengan cepat aku kumpulkan keperluanku dan meletakkannya di dalam tas kemudian memasukkannya ke gerobak dorong.

Ketika dalam perjalanan pulang, aku melihat banyak orang berjejal memenuhi jalanan. Di sana ada seseorang yang sedang membantu temannya untuk berjalan sedang tubuhnya berdarah. Tiba-tiba aku merasa bergidik dan mempercepat langkah agar segera sampai di rumah. Dan ketika sampai di rumah saudara perempuan sepupuku memintaku untuk tidak keluar lagi dari situ. Aku tetap berada di dalam rumah bersama saudara laki-lakiku. Apalagi aku memang sedang mengantuk. Dan sekitar jam dua dini hari aku merasa agak lapar, karena aku memang belum makan apapun sejak sore tadi. Maka aku membangunkan saudaraku untuk mengantarku ke warung yang berjarak kira-kira 200 meter dari rumahku. Setelah selesai makan saudaraku pulang duluan sementara aku diam di warung sambil menghisap rokok.

Dan di saat aku sedang asyik merokok tiba-tiba datang dua orang anggota keamanan, dan ketika melihatku mereka berhenti dan bertanya:

“Anda dari Batak?”

Aku menjawab, “Hiya Saya dari Padang.”

Lalu salah seorang dari mereka memanggilku. Aku bertanya kepadanya, “Apakah aku berbuat salah?”

Mereka lantas balik bertanya, “Apa yang engkau kerjakan di sini?”

“Aku telah makan malam di sini dan mungkin Anda dapat bertanya kepada ibu pemilik warung itu.” Tapi salah seorang malah membentakku,

“Jangan banyak bicara! Ayo ikut kami! Jika engkau menolak, lihat ini”, sambil memperlihatkan (sangkur?) yang terdapat di depan senapannya. Aku gemetar saat itu dan tanpa pikir panjang aku mengikuti mereka kemudian aku terjatuh di tanah, entah karena mereka mendorong-ku atau aku memang tersandung, dan saat itulah salah satu dari keduanya menembak kaki kananku ketika aku masih tengkurap mencium tanah. Dan tanpa merasa berdosa mereka meninggalkanku tergeletak di pinggir jalan.

Lalu aku menjerit memanggil ibu penjual di warung tadi supaya memanggil saudaraku, tapi dia malah takut dari situ saudaraku tidak datang. Tiba-tiba ada seseorang lewat di sampingku lalu aku meminta kepadanya untuk mengantarkanku ke rumah, kemudian dia memenuhi bahkan dia menginap di rumahku karena merasa takut keluar lagi. Di pagi harinya saudaraku menemui pamanku untuk mengabarkan apa yang terjadi denganku. Dan di sepanjang malam aku merasakan sakit yang tak ketulungan.

Ketika keluargaku sampai di rumahku, dengan serta-merta mereka membawaku ke rumah sakit akan tetapi sampai saat itu tak ada kenda-raan umum yang lewat. Kemudian mereka membawaku dengan gerobak dorongku sendiri. Dan meskipun rasa sakit yang sangat aku tidak pingsan dan meskipun aku kehilangan banyak darah. Tiba-tiba aku merasakan kedinginan yang menjalar ke sekujur tubuhku. Sesampainya di rumah sakit terdekat, pihak rumah sakit tidak menerimaku bahkan mereka bilang dan menyuruhku untuk pergi ke rumah sakit tentara yang berada di jalan Subroto.

Ketika kami sampai di jalan raya, datanglah sebuah taksi dan langsung kami hadang untuk mengantarku ke rumah sakit tentara, tapi lagi-lagi aku ditolak dengan alasan di sana sudah banyak orang sakit yang melebihi kapasitas. Kemudian aku pergi ke rumah sakit yang lain sekiranya langsung diberikan infus darah. Setelah berselang dua jam tiba-tiba datang tiga orang bersenjata dan membawaku pergi jauh sedang di halaman rumah sakit keluargaku hanya memandangi. Lalu mereka bertanya:

“Akan dibawa ke mana saudaraku Edi? Ini tuan padahal dia sungguh sakit parah?”

Lalu salah seorang dari mereka menjawab, “Siapa kalian?”

“Kami keluarganya.”

Lalu mereka membawa kami semua ke dalam mobil tertutup, bukan ambulans. Dari situ ke mana arah perjalanan itu.

Tiba-tiba kami sampai di halaman sebuah kantor. Kemudian mereka menyuruh keluargaku untuk turun dan mereka meninggalkanku sendiri-an di dalam mobil tertutup itu selama setengah jam. Kemudian mereka membawaku ke sebuah rumah sakit yaitu Gatot Subroto, rumah sakit tentara. Kemudian pihak rumah sakit melakukan operasi terhadap lukaku lebih dari sekali. Tetapi dokter memberiku informasi bahwa kakiku akan lumpuh mulai dari atas lutut kira-kira beberapa senti mengingat banyaknya bakteri yang ada.

Lalu aku tetap di sana selama tiga bulan dan keluargaku tidak ada yang datang dan aku merasa sedih serta hampir putus asa setelah aku mendengar bahwa mereka memang melarang keluargaku untuk menje-nguk.

Sepanjang waktu aku di rumah sakit aku melihat banyak tentara bersenjata berjaga-jaga, padahal sebenarnya tidak diperbolehkan kepada-ku untuk melihat ke luar. Namun pada suatu waktu aku membuka jendela untuk pergantian udaranya yang lebih bersih, aku melihat sebagian perawat rumah sakit sedang bermain bola volley dan salah seorang tentara melihatku membuka jendela, sambil berkacak pinggang dia membentakku,

“Kamu diberi makan di sini dengan makanan yang enak. Tugasmu hanya tidur saja. Sedang engkau masih mau mencuri pandang ke luar?”

Ketika lukaku hampir sembuh dan aku sudah bisa berjalan, mereka membawaku ke markas polisi di jalan Guntur dan ditahan di sana untuk diinterogasi selama 10 hari. Kemudian aku dipindahkan ke rumah tahanan Cimanggis untuk ditahan di sana selama sehari. Aku terkejut karena di sana sudah banyak tahanan sepertiku.

Kemudian aku dibawa ke KODIM bersama 32 orang tahanan. Kemudian mereka memintaku untuk mengisi formulir tentang keadaanku pribadi lalu mereka memberiku uang Rp 500. Sebelum mereka melepasku, sang komandan berkata kepadaku, “Jangan engkau beritahukan siapa-pun tentang apa yang terjadi denganmu!” KESAKSIAN MEDIA MASSA Persidangan Kasus HR. Dharsono

LAMPIRAN III

Dalam Persidangan Sanusi Yang Kedua

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Andi Muhammad Taqwa
Umur : 23 tahun.
Pekerjaan : Mahasiswa.
Alamat : No.10 (Kampung) Jawa Ujung Pandang.
Keterangan : Aku memberikan kesaksian di sini setelah aku bersumpah sesuai dengan ajaran agamaku, Islam, yang bercerita tentang peristiwa yang terjadi saat kunjunganku yang terakhir ke pamanku, Muham-mad Jabir bin Abu Bakar, yang pernah ditahan di Jakarta. Kunjunganku yang terakhir pada tanggal 24 Januari 1986.

Pada saat itu kami diberi kesempatan untuk berbincang-bincang dan bercengkerama mengenai suatu hal yang pernah kami alami bersama, hatta saat-saat kami makan bersama. Kemudian dia menceritakan kesuli-tan-kesulitan yang ditemuinya saat dia diinterogasi di masa penahanannya ketika dia dibawa oleh polisi ke kota Jakarta. Sementara dia sama sekali tidak mengerti tentang sebab penangkapannya. Baru dia mengerti setelah diinterogasi oleh aparat keamanan, itupun setelah dia banyak menemui berbagai siksaan dan penderitaan. Dia berkata kepadaku, “Mereka (aparat keamanan) memaksaku untuk mengakui bahwa Sanusi adalah otak perencana pembunuhan presiden Soeharto dan penghancuran candi Borobudur.” Hal itu dikaitkan dengan tuduhan yang didakwakan kepa-danya ingin mendirikan negara Islam Indonesia bergabung dengan kelompok Petisi 50. Meskipun sebenarnya dia sama sekali tidak mengerti sosok Sanusi. Bahkan bertemu mukapun dia belum pernah. Begitu juga dia belum mengerti dan bertemu dengan kelompok Petisi 50.

Juga dia pernah berkata, pada suatu waktu seorang petugas keama-nan mengancamku dengan berkata, “Kalau kamu tidak siap sebagai korban tebusan Sanusi, kami akan menjadikanmu sebagai korban dan akan menyembelihmu.” Dan pada suatu hari ketika aku sedang bezuk ke penjaranya, saya mendengar seorang polisi berkata dengan berteriak-teriak kepada para tahanan termasuk pamanku (sedang mereka kebetulan sedang dibezuk oleh keluarganya), polisi itu berkata,

“Jika kalian mau menjadi tebusan sebagaimana Nabi kalian Ismail, kami akan segera melaksanakannya.” Dan dengan serta-merta salah seorang dari mereka membantah, “Jangan Anda kaitkan persoalan ini dengan pengorbanan Nabi Ismail kepada bapaknya Ibrahim. Sebab kami bukan seorang Nabi dan kami tidak tahu siapa yang akan menjadi korban.” Dan seperti yang dikatakan oleh pamanku juga seperti yang aku pernah jumpai, bahwa dalam rumah tahanan itu ada beberapa orang yang senasib dengan pamanku, mereka adalah: Ir. Syahirul Alim, Ir. Ajang Sutrisna, Dr. Nur Imam, Dr. Abdusy Syukur, Iwan, Marwan Asyuri dan anaknya, Herlyadi, Sujatmono, Mursalin Dahlan, Dan Bari

Mereka ini mengakui bahwa Sanusi adalah otak perencana bagi usaha pembunuhan terhadap presiden Soeharto. Juga mereka mengakui tuduhan-tuduhan yang lain yang didakwakan kepada Sanusi. Sebagai-mana dan sesuai keinginan para petugas interogasi. Akan tetapi pamanku tidak seperti mereka. Meskipun apa yang terjadi dia tetap menolak untuk mengakui sesuatu yang belum diketahui yang sengaja dibuat oleh para aparat keamanan.

Ketika pada suatu hari keluargaku diberi kesempatan untuk menje-nguk pamanku. Saat itulah tidak aku sia-siakan untuk bertanya kepa-danya tentang berbagai permasalahan, mulai

keadaannya sekarang, kea-da-an penjara, hatta tentang faktor penyebab dia ditangkap dan ditahan, juga teman-temannya itu.

Dengan mendesah nafas panjang dia menjawab, “Sungguh yang terjadi di luar sangkaan kami. Mereka menginterogasi kami tentang permasalahan yang berbelit-belit, bahkan lebih berat dan yang terjadi di kuburan (seperti yang pernah kami dengar).” Sampai di situ berlinangan air matanya. Kemudian dia bercerita lagi, “Bahkan di antara kami saling memandang dan bisa melihat bekas penyiksaan yang membekas di tubuh kami yang tidak mungkin akan hilang selamalamanya. Kalau dulu pernah kami dengar bahwa nanti dua malaikat Munkar dan Nakir akan menanyai ahli kubur lebih dahulu, kemudian keduanya memukul jika mereka tidak bisa menjawab. Tapi di sini (ruang interogasi) yang terjadi adalah sebaliknya, mereka memukul kami sebelum menginterogasi kami, dan saat itu pula mereka memaksa kami untuk mengakui sesuatu yang belum pernah kami dengar sama sekali.”

Dan dengan sebab itulah, pamanku dengan berani dan secara terang-terangan menolak untuk mengakui sesuatu yang mereka inginkan se-mantara dia memang belum pernah mengetahui, kendatipun apa yang akan terjadi dan meskipun mereka (dia) diancam akan dijadikan korban sendiri.

Pamanku juga pernah mengatakan, “Bahwa Sanusi dalam panda-nganku adalah seseorang yang aku hormati sebab dia adalah seorang alim yang taat menjalankan ajaran Islam.

Tetapi mereka memaksaku untuk mengakui dan berbuat sesuatu yang menurut syari’at Islam adalah fitnah dan tuduhan bohong (qadzf), padahal Al Qur’an telah jelas mengatakan *wal fitnatu asyaddu minal qatli* (dan perbuatan fitnah itu lebih besar dosanya daripada pembunuhan), padahal pembunuhan menurut syari’at Islam termasuk dosa besar.

Bahkan pamanku pernah berkata bahwa dia lebih baik memilih menjadi korban daripada mengakui sesuatu yang tidak pernah dia ketahui sebelumnya yang merupakan tuduhan terhadap Sanusi. Karena dia takut akan azab Allah yang sangat dahsyat yang tidak mungkin dia kuat menanggungnya.

Maka, wahai para hakim yang terhormat, sesungguhnya apa yang dikatakan oleh pamanku, ketika aku mengunjunginya pada tanggal 24 Januari 1986 adalah benar. Sebab ketika aku pulang dari penjara itu dan baru saja berselang 24 jam, yaitu tanggal 25 Januari 1986 M aku mendapat berita tentang kematian pamanku. Sementara apa yang kami saksikan di tubuh (jenazah)nya yang sampai kepada kami jam 02.00 dini hari selalu dijaga polisi.

Setelah keluarga kami membukanya, sungguh menyedihkan hati kami sebab jasad pamanku dalam keadaan sangat memprihatinkan dan berbeda 180 derajat dari yang telah kami saksikan sehari sebelum kematiannya.

Sungguh telah kami saksikan jasad paman kami penuh dengan bekas-bekas siksaan di mana kami temukan memar-memar hitam di tengkuknya, juga di bagian bawah punggungnya serta di bagian bawah sebelah kanan dadanya. Demikian juga dengan seluruh jari-jemarinya dan kuku-kukunya, berwarna biru, sedang di betisnya ada bekas siletan dengan benda tajam

Dan ketika keluarga kami mau mengambil gambarnya, dengan serta-merta dilarang dan dicegah oleh aparat keamanan yang mengantar jenazahnya bahkan menyuruh kami untuk segera menguburkannya saat itu juga. Dan itulah yang kami kerjakan saat itu.

Wahai para hakim yang terhormat. Kami sangat bersyukur jika kalian mau mencari penjelasan tentang kebenaran kesaksian kami dan mungkin kalian bisa menyuruh (aparat itu) untuk mengeluarkan jasad pamanku, serta melakukan otopsi atas jenazah itu sesuai dengan undang-undang.

Inilah kesaksianku secara tertulis, yang aku tulis dengan akal yang sehat dan badan yang segar dan setelah aku bersumpah sesuai dengan sumpah ajaran agama yang aku akui, Islam, dan aku tanda tangani dengan kepercayaan penuh supaya dapat membantu tuan dalam menye-lesaikan perkara dengan adil dan sesuai kenyataan, yaitu menyelesaikan perkara Sanusi di Pengadilan Jakarta, yang mana bahwa Sanusi adalah menjadi korban tuduhan belaka.

LAMPIRAN IV

Lembaran Putih

Tentang Peristiwa Tanjung Priok, 12 September 1984

1. Muqaddimah

Peristiwa-peristiwa yang terjadi di Tanjung Priok, berawal pada 8 September 1984 dan mencapai puncaknya pada malam Rabu, 12 September 1984. Harus kita akui sebagai suatu tragedi pembantaian. Akan tetapi tragedi yang lebih seram adalah keterangan yang dikeluarkan oleh penguasa secara sepihak .

Dengan mengoreksi (membaca secara kritis) statemen yang mereka keluarkan secara sepihak itu, kita dapat membayangkan betapa jauh dari tragedi yang sesungguhnya terjadi, khususnya

sistem politik dan kondisi sosial yang menyebabkan munculnya peristiwa Tanjung Priok pada tanggal 12 September 1984.

2. Statemen lain

Oleh karena statemen pihak penguasa telah tersebar luas melalui media massa, maka sepatutnya kita mengetahui bagaimana pendapat umum tentang kejadian tersebut. Kronologi peristiwanya adalah sebagai berikut

Sabtu, 8 September 1984

Dua orang petugas Koramil masuk ke mushalla As-Sa'adah tanpa melepas sepatu, kemudian menyiram pamflet di dinding mushalla dengan air comberan. Dan menyiram pengumuman undangan pengajian dari pemuda Islam untuk menghadiri ceramah agama di Sendang Raya RW4.

Ahad, 9 September 1984

Peristiwa mushalla pada tanggal 8 September menjadi bahan perbincangan yang luas, akan tetapi pihak penguasa acuh tak acuh menanggapi sikap masyarakat setempat.

Senin, 10 September 1984

Sebagian besar jama'ah mushalla as Sa'adah menghadang salah seorang (menemui) petugas Koramil, yaitu orang yang telah mengotori mushalla, lalu terjadi percekcoakan. Secara kebetulan ada dua orang yang keluar dari masjid Baitul Ma'mur lewat di tempat itu, lalu ikut menengahi. Mereka mengusulkan ketua RW menjadi penengah. Petugas Koramil mau menerima. Disaat usaha penengahan ini berlangsung beberapa oknum tidak bertanggungjawab membakar sepeda motor milik petugas Koramil

Berdasarkan pemberitahuan Koramil, maka komandan Kodim setempat dan beberapa anggota keamanan pergi ke tempat kejadian kemudian menangkap beberapa orang. Yang ditangkap 4 orang jama'ah termasuk takmir mushalla As-Sa'adah

Selasa, 11 September 1984

Amir Biki menelpon penguasa, meminta pembebasan 4 orang tahanan yang menurut pendapatnya mereka tidak melakukan perbuatan apapun sehingga layak ditahan. Tidaklah mengherankan Amir Biki melakukan hal semacam itu, sebab dialah ketua bidang penelitian dan komunikasi angkatan 66. Dia memperoleh kepercayaan luas dalam menyelesaikan masalah militer yang timbul dengan usaha keras. Tetapi usahanya kali ini untuk menuntut keadilan sama sekali tidak berhasil.

Rabu, 12 September 1984

Dalam suasana konfrontasi dilangsungkan pengajian yang telah direncanakan sebelumnya. Amir Biki tidak terdaftar sebagai pembicara karena dia tidak biasa tampil di panggung. Tetapi di akhir peristiwa akhir kemarin, dia dipaksa oleh massa supaya dia naik panggung supaya dia menyampaikan pesan-pesan. Setelah didesak-desak, Amir Biki setuju dengan memberikan pernyataan: "Kali ini adalah pertama dan terakhir untuk naik panggung guna menyampaikan pesan". Saat itu waktunya sudah sangat terbatas untuk membebaskan empat orang tahanan, di mana jam telah menunjukkan pukul 23.00. Amir Biki pergi ke kantor Kodim. Dia diikuti oleh sejumlah massa dengan membawa bendera kebangsaan dan bendera hijau yang bertuliskan kalimat Lailaha illallah. Sebelum berangkat Amir Biki menganjurkan untuk berbaris dengan teratur dan tidak melakukan kekacauan. Ketika massa mendekati kantor polsek, tiba-tiba massa diserbu bukan oleh polisi anti huru hara, tapi oleh panser-panser dan tentara yang bersenjata lengkap. Mereka turun dari beberapa truk militer. Mereka tidak menggunakan gas air mata untuk membubarkan massa tapi menggunakan senjata otomatis yang dilepas-kan seketika. Banyak korban yang roboh, termasuk Amir Biki sendiri. Dalam situasi kacau seperti itu, massa melarikan diri mencari perlindungan. Sebagian ada yang berlindung di dalam gereja, pada saat itu para penjaga menyaksikan kejadian dan juga gereja-gereja yang tidak menjadi sasaran militer.

Kamis, 13 September 1984

Keterangan resmi yang pertama kali dikeluarkan oleh Jendral Beny Murdani, selaku Pangab, bahwa korban yang mati 9 orang lebih, sedangkan yang luka-luka secara pasti tidak diketahui jumlahnya, kecuali Amir Biki, dimana jenazahnya boleh diambil keluarganya di RS.

Tidak mungkin menguburkan Amir Biki di pemakaman umum, oleh sebab itu dia telah dikuburkan di pemakaman masjid Al-A'raf Tanjung Priok. Seorang muballigh dan jama'ah masjid mengatakan, Insya Allah Amir Biki mati syahid karena menentang penguasa dzalim demi agama Allah.

3. Tanggapan Terhadap Statemen di Atas

Masyarakat Islam merasakan adanya penghinaan serius karena pelanggaran terhadap kesucian tempat ibadah. Tak ada upaya sedikitpun dari pihak penguasa untuk menyelesaikan masalah sensitif ini. Bahkan banyak orang yang ditangkapi, padahal mereka tidak bersalah sedikit-pun. Mereka itu ditahan, dan orang tahu bahwa tidak mungkin meng-halang-halangi tindakan penguasa itu. Mengapa persoalannya tidak diselesaikan dengan cara-cara yang sesuai dengan ketentuan hukum pidana. Massa menghadapi petugas keamanan yang bersenjata otomatis dan didukung dengan panser. Keterangan yang dikeluarkan oleh Pangab sama sekali tidak menjelaskan secara rinci mengenai kejadian yang sebenarnya.

4. Sebab dan Akibat

Apa yang telah kami utarakan di atas itulah yang menjadi sebab munculnya tragedi 12 September 1984. Tapi semuanya itu adalah akibat dari situasi tertekan yang sudah lama terpendam, ibarat api dalam sekam. Beberapa tokoh, seperti almarhum Mohamad Hatta, wakil presiden (1945-1948), almarhum Adam Malik, wakil presiden (1978-1983), dan banyak lagi tokoh-tokoh sipil maupun militer yang sekarang masih hidup memperingatkan penguasa sejak lama bahwa terdapat berbagai problem yang bisa menyebabkan gejolak masyarakat. Kesemuanya ini disebabkan tidak adanya penyaluran yang positif, baik dibidang politik maupun sosial. Hilangnya pintu-pintu penyaluran yang positif, baik dibidang politik maupun sosial. Lenyapnya pintu penyaluran berpangkal pada satu sebab penyelewengan pemerintah dari semangat dan isi UUD 1945. Yang mencapai puncaknya pada lima pokok masalah yang bertalian dengan sistem kehidupan politik.

Lima pokok kebijakan ini kemudian lahir menjadi sebuah undang-undang pada tahun 1985 dan menjadikan Pancasila menjadi asas tunggal bagi semua orsospol. Secara umum kami dapat menyimpulkan bahwa para penguasa telah menyimpang dari sila-sila berikut: mereka-mereka (para aparat pemerintah) telah menyimpang dari lima butir Pancasila, yaitu:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sementara rakyat tidak mempunyai kekuasaan untuk merubah semua urusan dengan cara demokratis, meski dengan demokrasi. Oleh sebab itu, tragedi pembantaian 12 September 1984 bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri, akan tetapi akibat dari peraturan dan undang-undang yang ada sekarang.

5. Usul dan Saran

Demi keadilan bagi semua pihak, termasuk pemerintah sendiri, maka kami mengusulkan dibentuknya tim independen untuk mengumpulkan setiap data yang berkaitan dengan peristiwa Tanjung Priok 12 September 1984. Dan hasilnya yang diperoleh oleh tim ini disebabkan secara luas, sehingga kita semua bisa memperoleh pelajaran dari peristiwa ini.

Jakarta, 17 September 1984

Nama-nama Penandatanganan:

Aziz Shaleh	Anwar Haryono
Dodi Suryadiraja	Wahdiyat Sukardi
Ali Sadikin	Hamzah Haryanto
Rajab Ranggazali	Burhanuddin Harahap
Hartono Dharsono	N.B. Siregar
Slamet Beratanata	Abdurrahman S.
Stiyono Sukirno	Shafwan AN.
AM. Fatwa	Bakri Tinlin
Mohammad Sanusi	Hugeng Iman Santoso
Darsaf Rahman Muis	
Syafuruddin Prawiranegara	Amin Ali

LAMPIRAN V

Pengumuman-pengumuman Khusus dari KOPKAMTIB kepada para Muballigh

KOPKAMTIB (27 Juli 1985) Sangat Rahasia dan Segera

Dari : Pimpinan Kopkamtib

Kepada : Kepala Polisi dan semua Petugas pelaksana Kopkamtib

- I. Sesuai dengan surat Pimpinan Kopkamtib Nomor: tanggal :
- II. Pengajian-pengajian tidak lagi memerlukan izin, tapi cukup memberitahukan pada pihak berwenang. Dan perlu diingat bahwa pengajian dan kuliah subuh tidak boleh digunakan untuk tujuan-tujuan berikut:
 - A. Mengecam dan menjelek-jelekkkan pemerintah
 - B. Mengecam dan menjelek-jelekkkan pejabat pemerintah menghujat dan menjelek-jelekkkan para pegawai dan aparat pemerintah
 - C. Membicarakan masalah-masalah politik
 - D. Menghasut
 - E. Mengecam atau menjelek-jelekkkan agama lain
 - F. Mempersoalkan Pancasila atau Undang-undang Dasar 1945 atau ketetapan MPR.
- III. Jika terjadi pelanggaran atas hal-hal diatas maka saudara-saudara berhak mengambil tindakan cepat:
 - A. Memperingatkan penceramah, juga panitia atau masjid tempat pengajian
 - B. Melarang penceramah atau badan atau masjid tempat berlang-sungnya ceramah mengulangi hal semacam itu
 - C. Jika mereka bersikeras mengulangi kegiatannya maka hendaklah mengambil tindakan kepada mereka sesuai hukum yang berlaku.
- IV. Bekerjasama dengan instansi lain sebelum mengambil tindakan apapun.
- V. Selebaran ini dianggap sebagai pengumuman.
- VI. Selesai q

NAMA-NAMA NAPOL MUSLIM YANG DISIDANG (DES '84 - JAN '87).

No.	Daftar Nama	Umur	Tempat	Hukuman	Tgl/Bln/Thn	Tindak Pidana
1.	Abd. Qadir al Abbas	25	Malang	20 tahun	22 Maret 1986	Peledakan bom
2.	Abd. Qadir Baraja (1)	41	idem	15 tahun	Juni 1986	idem
3.	Abd. Qadir bin Idris al Haddad	26	idem	8 tahun	7 Mei 1986	idem
4.	Abdul Latif Beez	18	Jakarta Utara	18 Bulan	Maret 1985	Peristiwa Pra-Priok
5.	Abd.Latif bin Amir	43	Jaksel	7 tahun	4 Juni 1986	Mengadakan ceramah
6.	Abd. Mufid Faidan Hariana (2)	40	Medan	5 tahun	1985	idem
7.	Abdullah Umar (3)	35	Sleman	mati	5 Juni 1985	Komando (Firqoh) Jihad
8.	Abd. Syakur	45	Jember	12 tahun	1985	idem
9.	Abd. Roni Yunus	41	Jakarta Timur	7 tahun	30 Januari 1986	Mengadakan ceramah
10.	Ahmad Mujahid	-	Probolinggo	10 tahun	1985	Komando (Firqoh) Jihad
11.	Ahmad Muladawila	25	Malang	20 tahun	24 Maret 1986	Peledakan bom
12.	Ahmad Sahibin Sanin	35	Jakarta Utara	22 bulan	Februari 1985	Satu dari empat yang ditahan di Tanjung priok
13.	Ahmad Thawil	-	Bandung	9 tahun	Oktober 1985	Pencurian bahan peledak
14.	Ahmad Joned Sumarlan	23	Yogyakarta	6 tahun	1 Februari 1986	Penyebaran selebaran
15.	Muhammad Ikhwan	38	Malang	mati	7 Mei 1986	Manhaj Ta'lim Islam
16.	Ade Jaelani	-	Jakarta Barat	16 tahun	Mei 1985	NII
17.	Adam Muhammad	51	Bandung	7 tahun	2 Desem 1885	Pencurian bahan peledak
18.	Afrul bin Masbur	18	Jakarta Utara	15 bulan	11 April 1985	Satu dari 28 terdakwa kasus Tanjung Priok
19.	Agus Sutaryo	20	Jakarta Pusat	18 bulan	25 Mei 1985	Selebaran gelap
20.	Ali Masrum	24	Surabaya	12 tahun	7 Agus 1985	NII
21.	Muhammad Ali Shadiqin Edi	15	Jakarta Utara	20 bulan	18 Maret 1985	Satu dari 5 terdakwa kasus Tanjung Priok
22.	Amir bin Bunadi	20	idem	idem	11 April 1985	Satu dari 28 terdakwa kasus Tanjung Priok
23.	Amir Muhammad bin Abdul H	17	idem	12 bulan	idem	idem
24.	Amir Wijaya	31	Jakarta Barat	14 tahun	12 Agus 1985	Peledakan bom
25.	Endang Sudar Jati (4)	3	Bandung	9 tahun	23 Mei 1985	DI/TII
26.	Andi Sukiyono (5)	20	Malang	15 tahun	4 Januari 1986	Manhaj Ta'lim Islami
27.	Andri Harto	25	Surabaya	12 tahun	Oktober 1985	Manhaj Ta'lim Islami
28.	Ansurdin	-	Cirebon	-	1985	Selebaran gelap
29.	Anwar	23	Jember	4 tahun	1985	Firqoh Jihad
30.	Arman bin Mawi	20	Jakarta Utara	21 bulan	11 April 1985	Tanjung Priok
31.	Asidin	-	Jember	12 tahun	1985	Firqoh Jihad
32.	Asip Syafruddin bin Muhammad Suhandri	21	Jakarta Utara	12 bulan	11 April 1985	Tanjung Priok
33.	Muhammad Atum (6)	48	Surabaya	12 tahun	21 April 1986	Kelompok Imron
34.	Audi Su'udi	-	Bandung	-	Juli 1985	Selebaran gelap
35.	Bi Iyah (7)	63	Jombang	15 tahun	-	Pemberontakan
36.	Muhammad Bakir	43	Klaten	9 tahun	20 Oktor 1986	Usroh
37.	Bambang Sispooyo	36	Sleman	mati	1 Juni 1985	Firqoh Jihad
38.	Bashirun Sinin	38	Malang	8 tahun	7 Mei 1986	Peledakan bom
39.	Bundi Santoso al Hajim	30	Surakarta	8 tahun	30 Oktor 1986	Usroh
40.	Budi Santoso bin Kabul	18	Jakarta Utara	15 bulan	11 April 1985	Tanjung Priok
41.	Cecep Basuki bin Waji	16	idem	12 bulan	idem	idem
42.	Dijeh	34	Surabaya	14 bulan	Desem 1985	
43.	Damsiran bin Nuruddin	25	Jakarta Utara	15 bulan	11 April 1985	Tanjung Priok
44.	Daarus Salam	29	Klaten	7 tahun	8 Septem 1986	Usroh
45.	Hartono Kudarsono	60	Jakarta Pusat	7 tahun	12 Mei 1986	Lembaran Putih
46.	Abd. Qadir Jaelani	47	idem	18 tahun	24 Desem1985	da'i Firqoh Jihad
47.	Jayabudi Raharja	42	Bandung	9 tahun	Juni 1985	DI/TII
48.	M. Jayadi bin Murjadi	80	Jakarta Barat	15 tahun	Mei 1985	Peledakan bom
49.	Dadang bin Subiyani	21	Jakarta Utara	20 bulan	11 April 1985	Tanjung Priok
50.	Abdi Ramli	42	Jakarta Barat	16 tahun	11 Mei 1985	Peledakan bom
51.	Imam Suherman	-	Bogor	-	1985	Selebaran gelap
52.	Irlangga	28	Jakarta Pusat	6 tahun	27 Juli 1985	Subversi
53.	Faishal Fasyiri	21	Malang	8 tahun	30 Okto 1985	Manhaj Ta'lim

54. Andi Mapetahan Fatwa	46	Jakarta Pusat	18 tahun	29 Desem1985	Ceramah			
55. Ferdinald Silalahi	17	Jakarta Utara	12 bulan	11 April 1985	Tanjung Priok			
56. Fuad	24	Surabaya	8 tahun	5 Okto 1985	Kelompok Imron			
57. Hasan Keyat	36	Jakarta Utara	9 tahun	26 Nove 1986	Ceramah			
58. Hasbullah Siddiq Didun	-	Teritip	15 tahun	Oktober 1985	Selebaran gelap			
59. Hasan Arifin	47	Jakarta Barat	15 tahun	8 Mei 1985	Peledakan bom			
60. Hendri bin Safiri	22	Jakarta Utara	3 tahun	11 April 1985	Tanjung Priok			
61. Irfan Suryahardi	23	Sleman	13 tahun	13 Febru 1986	Selebaran			
62. Irnandi Jamur	22	Jakarta Utara	18 bulan	Maret 1985	Pra kasus Tanjung. Priok			
63. Irta Sumatra bin Amin	17	Jakarta Utara	15 tahun	11 April 1985	Tanjung Priok			
64. Ismail bin Abdul Hamid	20	idem	12 bulan	idem	idem			
65. Itang Hidayat	39	Bandung	11 tahun	Juni 1985	DI			
66. Yuskun bin Iyas	19	Jakarta Utara	12 bulan	11 Mei 1985	Tanjung Priok			
67. Karto	46	Jember	15 tahun	1985	Firqoh Jihad			
68. Khairulsyah bin Nurjalan	21	Jakarta Barat	10 tahun	1 Mei 1985	Peledakan bom			
69. Kusnoto bin Kasa	22	Jakarta	2 tahun	Maret 1985	Selebaran gelap			
70. Latif	-	Probolinggo	8 tahun	1985	Firqoh Jihad			
71. Luqman Suratman	30	Sukoharjo	6 tahun	27 Agus 1986	Usroh			
72. Majudi bin Irsyad	22	Jakarta Utara	12 bulan	11 April 1985	Tanjung Priok			
73. Makmur Anshory	33	Malang	4 tahun	Septem 1985	Selebaran gelap			
74. Maksun	-	Probolinggo	8 tahun	1985	Firqoh Jihad			
75. Maman Ithen	18	Jakarta Utara	20 bulan	18 Maret 1985	Tanjung Priok			
76. Mardi bin Wing	18	Jakarta Utara	15 bulan	11 April 1985	Tanjung Priok			
77. Marsuni bin Syafi'i	47	Yogyakarta	3 tahun	30 Januari 1985	Majalah al Ikhwan			
78. Marsidi	32	Klaten	5 tahun	30 Okto 1986	Usroh			
79. Marolo Arman	17	Jakarta Utara	20 bulan	18 Maret 1985	Tanjung Priok			
80. Marwoto	24	idem	27 bulan	11 April 1985	idem			
81. Masudi	-	Probolinggo	9 tahun	1985	Firqoh Jihad			
82. Mawardi Noor	67	Jakarta Timur	14 tahun	15 Meii 1985	Ceramah			
83. Milta Halim	32	Jakarta Barat	14 tahun	1 Mei 1985	Peledakan bom			
84. Masdi bin Siman	16	Jakarta Utara	12 bulan	11 April 1985	Kasus Tanjung Priok			
85. Muliit	36	Boyolali	7 tahun	22 Septem 1986	Usroh			
86. Maman Mulyana	27	Bandung	7 tahun	Oktober 1985	Pencurian bahan peledak			
87. Muntib	36	Pati	15 bulan	November 1985	Ceramah			
88. Marjoko	26	Malang	8 tahun	31 Okto 1985	Manhaj Ta'lim Islami			
89. Muslisy	27	-	8 tahun	Mei 1985	Firqoh Jihad			
90. Musli' bin Marzuki	25	Jakarta Utara	27 bulan	11 April 1985	Kasus Tanjung Priok			
91. Nashirun bin Sulaiman	18	idem	18 bulan	idem	idem			
92. Nur Falah	38	Boyolali	7 tahun	22 Septem 1986	Usroh			
93. Mirur bin Amat	22	Jakarta Utara	18 bulan	Februari 1985	Kasus Tanjung Priok			
94. Ardujani	-	Jawa Timur	5 tahun	Mei 1985	Firqoh Jihad			
95. Parto	56	Jember	13 tahun	1985	Firqoh Jihad			
96. Parto Ali	-	Probolinggo	11 tahun	1985	Firqoh Jihad			
97. Parto Solor	34	Klaten	8 tahun	23 Okto 1986	Usroh			
98. Rasimat Basuki Surya Pranoto	42	Jakarta Barat	17 tahun	9 Mei 1985	Peledakan bom			
99. Rasimat bin Arwadin	17	Jakarta Utara	20 bulan	18 Maret 1985	Kasus Tanjung Priok			
100. Rasiman Aswari	-	Jember	10 tahun	Mei 1985	Firqoh Jihad			
101. Ahmad Ratono	30	Jakarta Utara	8 tahun	13 Maret 1986	Ceramah			
102. Romli Dzulqornain Luwis	22	Jakarta Pusat	8 bulan	23 Maret 1985	Selebaran Gelap			
103. H. Muhammad Ridwan	-	Solo	-	-	Subversi			
104. Rifqi Prawoto	57	Cilacap	10 tahun	1986	-			
105. Pantawa	37	Jakarta Barat	10 tahun	23 Desem 1985	Peledakan bom			
106. Rusdi	36	Klaten	8 tahun	30 Okto 1986	Usroh			
107. Rusdiyanto Islamat	22	Yogyakarta	10 bulan	April 1985	Selebaran Gelap			
108. Shadiq Musawa	38	Malang	8 tahun	7 Mei 1986	Peledakan bom			
109. Samar Ili Ti	75	Jember	14 tahun	1985	Firqoh Jihad			
110. Saiful	36	idem	4 tahun	idem	idem			
111. Salim Qodirun bin Sulaiman	50	Jakarta Utara	20 tahun	November 1985	Ceramah			
112. H. M. Sanusi (Sidang I)	63	Jakarta Barat	19 tahun	15/15/1985 (?)	Peledakan bom			
113. H. M. Sanusi (Sidang II)	64	Jakarta Pusat	20 tahun	4 Septem 1986	Usaha Pembunuhan Presiden			
114. Sarjoko	-	Klaten	7 tahun	Oktober 1986	Usroh			
115. Simun	60	Jember	13 tahun	1985	Firqoh Jihad			
116. Syuriz	-	Jakarta Timur	17	-	idem			
117. Simung Abdul Malik	45	Surabaya	20 tahun	Oktober 1985	Manhaj Ta'lim			
118. M. Sirajuddin Abbas	34	Klaten	6 tahun	8 Septem 1986	Usroh			
119. Slamet Ryanto	35	idem	8 tahun	6 Septem 1986	Kasus Tanjung Priok			
120. Muhammad Sholihin	14	Jakarta Utara	20 bulan	18 Maret 1985	Kasus Tanjung Priok			
121. Subadak	-	Bojonegoro	-	-	Firqoh Jihad			
122. Shabarin Syakur	27	Yogyakarta	8 tahun	21-1-87	Usrah			
123. Sudarso	19	Jak-Ut	14 tahun	11 -4- 85	Tanjung Priok			
124. M. Sudiyatno	32	Sleman	SH	Sep. '85	Komando Jihad			
125. Sugeng Budiyo	20	Malang	9 tahun	4-1-86	Pesantren Kilat			
126. Sujiman Yulianto	29	Karanganyar	10	20 - 9 - 86	Usrah			
127. Suherman bin Surmana	16	Jakut	-	18 bulan	11 - 4 - 85	Tanjung Priok		
128. Sulaeman	46	Surabaya	9 tahun	Nov '85	NII			
129. Sumarhadi	-	Bojonegoro	-	-	1985	-		
130. Sunarso	56	Jember	-	14 tahun	1985	Komando Jihad		
131. Suban	-	Probolinggo	-	14 tahun	1985	Komando jihad		
132. M. Suryono	33	Probolinggo	-	14 tahun	1985	Komando jihad		
133. Syuhada	-	Probolinggo	-	14 tahun	1985	Komando Jihad		
134. Syafar bin Sofyan	18	Jakut	-	12 bulan	11-4-85	Tanjung Priok		
135. Sofyan Sulaeman	33	Jakut	-	30 tahun	Feb. 85	Tanjung Priok		
136. Syaefuddin	27	Yogyakarta	-	10 bulan	April '85	Bulletin Gelap		
137. Sabari bin Haji Rauf	-	Termate	-	10 tahun	Okt. 85	Bulletin Gelap		
138. Syafaruddin Rambe	38	Jakut	-	30 bulan	Feb. 85	Tanjung Priok		
139. Syaefuddin Tanjung	-	Medan	7,5 bulan	Juni 85	Ceramah			
140. TB.	-	Yogyakarta	-	12 bulan	1985	Bulletin Gelap		
141. Thahir bin Sarwi	18	Jakut	-	27 bulan	11-4-85	Tanjung Priok		
142.	-	Tasrif Tuasikal	-	-	50 Jakarta Pusat	17 tahun	1986	BCA
143. TB. M. Jiddan	22	Yogya	6 tahun	27-1-1986	Usrah			
144. Tony Ardi	31	Jakut	9 tahun	9-01-1986	Ceramah			
145. Bu As	28	Lumajang	18 bulan	Nov. 1985	Pesantren Kilat			
146. Umar bin Sundu	18	Jakut	15 bulan	11-4-1985	Tanjung Priok			
147. Umar Katsiri	29	Jabar	1 tahun	3-12-1985	Bom BCA			
148. Anton Salim	-	Probolinggo	14 tahun	1985	Komando Jihad			
149. Utsman	25	Yogyakarta	12 bulan	1985	-			
150. Oetsmany Al-Hamidi	72	Jakbar	8 tahun	1986	Ceramah			
151. Wahyono Syafi'i	34	Sukoharjo	6 tahun	1986	Usrah			
152. Wahyudi bin Shalih	22	Jakut	12 bulan	1985	Tanjung Priok			
153. Wasijan Sukarna	32	Jakut	18 bulan	1985	Tanjung Priok			
154. Wiyono Shadiq	33	Surakarta	11 tahun	1986	Usrah			
155. Yayan Hendrayana	35	Jakut	20 tahun	1985	Ceramah			
156. Yusran bin Zaenuri	20	Jakut	12 bulan	1985	Tanjung Priok			
157. Zaeni Hariadi	27	Jabar	18 bulan	1985	Bulletin Gelap			

Bab 08 DOM ACEH 1989-1998: Upaya Pemusnahan Peradaban Muslim Paling Biadab Sepanjang Sejarah Indonesia

PEMBANTAIAN di Aceh semasa rezim Soeharto jauh lebih biadab dan kejam dibanding kejahatan Abu Lahab dan Abu Jahal di zaman jahiliyah, karena mereka juga membantai wanita dan anak-anak yang tak bersalah. Militer yang didatangkan ke Aceh pada rezim Soeharto ini, lebih kejam bila dibandingkan dengan Abu Lahab dan Abu Jahal pada zaman jahiliyah. Pada zaman jahiliyah yang dipelopori Abu Jahal dan Abu Lahab pada waktu itu memburu Rasulullah untuk dibunuh. Pada suatu malam, Abu Jahal dan Abu Lahab datang mencari Rasul di rumahnya. Ternyata Rasulullah tidak ada, yang dilihat hanya Sayidina Ali yang sedang tidur di tempat pembaringan. Kedua pelopor jahiliyah itu, ternyata sedikitpun tidak mengusik Sayidina Ali dan keluarganya. Setelah mengetahui Rasulullah tidak berada di rumah itu mereka lalu pergi mencarinya ke tempat lain. Sementara Sayidina Ali sendiri bersama keluarga diketahui sebagai pejuang pembela Rasulullah. Peristiwa tersebut menggambarkan, bahwa Abu Jahal dan Abu Lahab tidak membunuh dan mengusik orang lain yang bukan divonis mati oleh kelompok kafir Quraisy.

Kualitas kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Aceh sebagai hal yang luar biasa. Kejahatan ini juga terencana, terorganisir, dan sistematis. Di antara data yang diserahkan pegiat LSM kepada Komnas HAM antara lain, ada korban yang diculik, dianiaya, disetrum, dan kemudian ditembak di depan umum. Ada pula yang diperkosa di depan anak atau di depan suaminya. Beberapa bagian bentuk kejahatan itu, ada kemiripan dengan modus operandi penculikan aktivis prodemokrasi yang melibatkan Kopassus di Jakarta. Peristiwa pembantaian, penyiksaan, perkosaan yang dirasakan rakyat Aceh atas perbuatan militer selama DOM, sangat pedih dirasakan. Karena hal itu dilakukan oleh bangsa sendiri dan bukan bangsa lain yang pernah menjajah Indonesia seperti Belanda dan Jepang. Sebagian peristiwa penyiksaan tragis dilakukan aparat militer, misalnya ada wanita yang diperkosa secara bergiliran kemudian dicambuk dengan kabel, ada pula yang diperkosa di depan anaknya, telinga disayat dan ditetesi jeruk nipis, kepala dipukul dengan balok lalu dikuliti di depan anaknya, kepala digantung dan dipukuli dengan kayu, leher digorok dan kepalanya ditenteng, dan suami dipaksa keluar dari rumah sementara istrinya ditelanjangi lalu diperkosa sambil berdiri. Selain itu, ada pula yang ditelanjangi dan diarak sambil disiksa di tengah keramaian pasar dan terakhir ditembak di depan massa. Wanita disetrum pada payu dara dan kemaluannya, giginya dicabut dengan tang, ditembak dalam sumur, pria yang dibakar kemaluannya lalu disiksa dengan kabel dan gagang cangkul, disalib dan ditembak, diseret pakai tali lalu didor, dipaksa bersenggama sesama tahanan, tidak boleh menutup aurat saat shalat, ada juga yang ditembak di atas pentas lalu diperton-tonkan, dikubur separoh badan lalu ditembak. Yang ironisnya ada juga wanita yang diperkosa secara bergiliran dan dimasukkan botol sprite ke dalam vaginanya, rumah dibakar, harta dijajah. Itulah antara lain berbagai cara penyiksaan dilakukan militer terhadap rakyat Aceh, sehingga para korban kini masih mengalami trauma berat.

Di tengah operasi yang berlangsung, terjadi serpihan-serpihan peristiwa yang sangat sulit diterima oleh siapa saja yang masih mempunyai hati nurani. Penyiksaan dan penjarahan terhadap “milik” perempuan yang berharga, mulai dari pelecehan seksual sampai pembunuhan justru dilakukan oleh aparat yang seharusnya melindungi dan membela rakyatnya.

Tetapi, yang namanya bau busuk tidak pernah bisa ditutupi selamanya. Setidaknya LSM, LBH, dan aktifis mahasiswa sudah mengawali mengungkapkan fakta tersebut, bahkan langsung membawa korban ke Komnas HAM. Usaha pendampingan terhadap korban sudah dilakukan. Namun sampai saat ini sebagian besar korban belum tertangani. Sejak turunnya TPF DPR RI ke Aceh, sejumlah kasus perkosaan dan pembunuhan terhadap perempuan juga dimulai terungkap dan menghiasi hala-man muka surat kabar.

Kasus-kasus dari berbagai bentuk tindak kekerasan yang dialami perempuan yang terjadi dari ratusan kekerasan yang terjadi seputar diberlakukannya Daerah Operasi Militer selama ini tidak pernah terungkap. Ada beberapa alasan yang menyebabkan informasi ini tidak diketahui oleh masyarakat luas dan dunia internasional, seperti:

1. Korban pemerkosaan terutama Aceh, sering dianggap aib dan memalukan. Akibatnya korban atau keluarga selalu berusaha untuk menutupi kejadian tersebut.
2. Adanya ancaman dari pelaku untuk “tidak mengungkap” kejadian tersebut pada orang lain, kerena pelakunya aparat yang sedang bertugas di daerah tersebut, membuat korban/keluarga selalu berada dalam kondisi diintimidasi.

3. Penderitaan dan trauma yang dialami korban sangat mendalam, sehingga sangat sulit bagi korban untuk menceritakan pengalaman buruknya, apalagi kepada orang yang tidak terlalu dikenalnya.
4. Adanya ancaman dari pihak-pihak tertentu terhadap orang ataupun LSM yang mendampingi korban.

Di bawah ini akan diberikan beberapa contoh pola kekerasan yang terjadi terhadap perempuan di Aceh, selama berlakunya Operasi Militer.¹

Dari pemaparan fakta di atas dapat dilihat betapa kejamnya perlakuan kekerasan oleh aparat terhadap kaum perempuan. Beberapa diantaranya korban meninggal dunia, beberapa yang lain berada dalam kondisi fisik dan psikologi yang sangat berat. Sampai saat ini jumlah korban yang mengalami perkosaan, pelecehan seksual dan pembunuhan belum sepenuhnya terdata lengkap. Data di atas, hanya contoh kasus dari berbagai bentuk kekerasan yang dialami perempuan akibat pemberlakuan Daerah Operasi Militer baik secara langsung dan tidak langsung.

Ada data lapangan yang menunjukkan beberapa wanita Aceh dihamili aparat keamanan selama DOM, bahkan ada yang sudah punya anak. Wanita-wanita malang ini mencemaskan kalau pasukan ditarik, yang menyebabkan anak mereka tak (lagi) punya ayah. Dalam proses-proses begini, selalu ada pemerkosaan dan ada anak yang dilahirkan oleh proses yang semacam itu, atau adanya bentuk-bentuk penistaan kemanusiaan.

Di luar data hampir 2.000 orang yang dinyatakan hilang sejak 1989, khusus di tahun 1998 ini sedikitnya ada 34 orang hilang di Aceh. Mereka rata-rata dibawa ke Pos Sattis Kopassus. Karena baru diculik. Kelihatannya masih berpeluang “diselamatkan”. Kalau penculiknya jelas dan mereka dibawa ke mana, otomatis tinggal dilepaskan saja dari tempat penyekapannya. Tempat-tempat penyekapan di seluruh Aceh merupakan bukti tentang adanya operasi militer di Aceh.

Masyarakat Aceh menjadi masyarakat yang dibuat ketakutan sekian tahun. Secara otomatis, pemulangan mereka yang masih dimungkinkan dari tempat-tempat yang begitu, menjadi bagian dari rehabilitasi situasi ketakutan masyarakat. Yang prinsipil saat ini tidak saja ABRI, tapi juga pemerintah daerah (Pemda) punya kewajiban untuk mengembalikan situasi ini. Merehabilitasi kondisi ketakutan-ketakutan masyarakat. Termasuk di beberapa daerah lain bahwa ini tidak saja termasuk penghilangan orang, tapi juga diikuti dengan penghilangan harta, penjarahan, bahkan pembakaran rumah. Rehabilitasi itu mencakup juga ganti rugi barang-barang yang dirampas aparat dari masyarakat, tanah, kendaraan, perhiasan, uang, dan sebagainya, serta menjadi bagian dari proses rehabilitasi yang bertahap dan harus dilakukan.

Rehabilitasi terhadap fisik korban secara langsung, misalnya ada yang cacat, terluka, dan sebagainya. Harus ada upaya pemerintah untuk melakukannya. Pemerintah harus mengumumkan secara terbuka siapa-siapa saja yang menjadi korban kekerasan ini untuk mendaftar di rumah sakit-rumahsakit untuk diberi pengobatan gratis, untuk menunjukkan itikad pemerintah memperbaiki kondisi atau merehabilitasinya. Hal yang demikian akan membawa dampak psikologis juga terhadap proses pemulangan di masyarakat.

Kasus orang hilang di Aceh sama dengan kasus penculikan aktivis prodemokrasi di Jakarta. Digunakan cara-cara pelaku penculikan selama ini banyak dilakukan pemerintahan Soeharto. Umpamanya, korbannya di-*pressure*, ditekan, dan dianiaya, setelah itu dibunuh dan mayatnya dibuang dengan keadaan fisik yang rusak, serta wajah yang sukar diidentifikasi lagi, agar masyarakat atau keluarganya tidak dapat mengenalinya lagi.

Mungkin setelah di luar ada yang dihabisi, tapi itu yang seharusnya tak boleh terjadi. Maka, yang terbaik adalah pelepasan secara formal. Dimulai, misalnya, ABRI membuat daftar tentang orang dan keadaan mereka yang berada di tempat-tempat penyekapan itu. Kemudian, mengundang keluarga-keluarga mereka dan tempat (lembaga-lembaga) di mana mereka selama ini mengadu, untuk menyerahkan mereka yang diculik. Termasuk menjelaskan secara jujur kalau di antara mereka ada yang sudah meninggal kepada keluarganya masing-masing. Dan ABRI menyatakan bertanggung jawab terhadap orang-orang yang sudah meninggal tersebut. Pelepasan dengan pola pembebasan aktivis di Jakarta malah menambah masalah pelanggaran hak asasi. Jangan sampai penyelesaian masalah ini malah membuka ruang bagi pelanggaran HAM lainnya. Bentuk-bentuk kekuasaan, *pressure*, dan lain-lain, haruslah dihindari.

Yang sekarang jadi persoalan, peta persoalan akibat dari semua proses yang terjadi di Aceh sejak 1989 itu belum terekam dengan baik. Baik oleh ABRI sendiri, maupun oleh masyarakat. Saya kira, saat ini kalau memang pemerintah beritikad baik memperbaiki kondisi di Aceh, secara otomatis mereka memiliki kewajiban membangun ruang rasa aman masyarakat agar persoalan ini lebih menjadi mudah untuk lebih terbuka. Sebab, jika masyarakat masih ketakutan untuk memberikan informasi, sepanjang situasi ketakutan masyarakat masih belum mampu dikubur, maka kita masih akan menghadapi hambatan-hambatan proses pertanggung-jawaban. Dengan begitu, pencabutan DOM masih terlalu formil untuk dinilai sebagai suatu keputusan politik yang berarti, sebelum situasi itu diikuti dengan perbaikan kondisi masyarakat Aceh.

Pernyataan-pernyataan yang berbau mengancam, mestinya itu tak dilakukan lagi, karena hal itu bagian dari proses menghambat perbaikan kondisi di Aceh. Dari hasil investigasi LSM dan laporan keluarga korban, ternyata banyak anggota masyarakat yang dimobilisir ABRI ikut

operasi, sekaligus sebagai tameng saat ABRI berhadapan dengan GPK. Ketika mereka terbunuh, tak pernah dipertanggungjawabkan.

Satu hal yang mendasar yang terjadi di Aceh, bahwa yang terjadi di sini adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Berbagai pelanggaran HAM selama berlangsungnya operasi militer di Aceh seperti yang belakangan ini terungkap benar adanya, maka itu tergolong kejahatan luar biasa dan menjurus pada pemusnahan peradaban etnis Aceh.² Dia tidak termasuk hukum perang, karena di Aceh tidak ada perang. Kejahatan terhadap kemanusiaan secara otomatis harus dipertanggungjawabkan oleh pemerintah yang mengambil keputusan untuk kemudian menimbulkan ruang bagi orang untuk melakukan berbagai kejahatan bagi kemanusiaan. Maupun terhadap individual yang kemudian menimbulkan persoalan-persoalan mendasar lainnya. Lagi pula, gara-gara DOM ini, bukan saja militer yang melakukan itu, tapi juga banyak orang yang memanfaatkan situasi DOM itu untuk, misalnya, memperoleh akses ekonomi dan sebagainya. Dan ini semua harus dipertanggungjawabkan. Tapi, tetap bukan hukum perang.

Tapi, bukan berarti mereka yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan itu tidak bisa dikenakan sanksi, yang di dunia internasional, apa yang disebut dengan istilah *persona non-grata* atas suatu tindakan yang dianggap melanggar kemanusiaan. Ini seperti yang dilakukan terhadap Sintong Panjaitan. Beliau *persona non-grata* di beberapa negara Eropa. Kalau dia ke sana akan ditangkap. Yang penting, asal ada laporan dan pengaduan dari masyarakat.

Tapi, yang juga penting, karena hal ini merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan, sebetulnya warga Aceh, baik secara individual, maupun melalui organisasi, bisa melapor resmi langsung atau melalui faks atau surat, perorangan pun boleh, kepada Komisi HAM PBB. Bila itu disam-paikan, komisi tersebut niscaya akan melakukan penelitian terhadap bentuk-bentuk kekerasan di Aceh.

Sejauh ini, secara umum dikenal pembantaian para jenderal dalam peristiwa G30S/PKI sebagai sesuatu yang sadis. Dibanding apa yang terjadi di Aceh, sadisme yang terjadi di Aceh adalah kejahatan paling tradisional, yang masih berlangsung di negara yang relatif berkehidupan modern ini. Ini kejahatan paling kasar dan tradisional, cuma beberapa negara yang masih melakukannya. Di Asia ini, yang terakhir mempraktek-kannya itu Burma. Marcos saja di Filipina tak melakukannya. Kemudian, pernah ada di beberapa negara Afrika dan beberapa negara Amerika Latin yang relatif tertinggal. Dan Indonesia termasuk negara yang terting-gal dalam menjauhi tindak kejahatan tradisional itu. Padahal, agama (Islam) mengajarkan bahwa membunuh satu orang itu sama dengan membunuh seluruh isi bumi dan langit. Itu artinya, kejahatan kemanusiaan itu nilainya sangat tinggi.

Dengan pernyataan pencabutan DOM di Aceh oleh Pangab di Lhok-seumawe, para janda yang suaminya diduga diculik aparat keamanan di daerah itu berharap agar suami mereka bisa dikembalikan. Kalau ia sudah dibunuh, hendaknya bisa diketahui di mana kuburnya dan meminta pemerintah mengusut para pelakunya, ujar beberapa janda asal Lhoksukon³ melalui LBH Iskandar Muda dan LSM YAPDA Lhokseumawe. Seperti diakui seorang ibu rumah tangga Kasmawati (30) warga Desa Matang Reudeup, Kecamatan Lhoksukon Aceh Utara, ia berharap suaminya Amiruddin (30) bisa menyaksikan HUT-RI ke-53 bersama anaknya. Saya tidak mampu jawab pertanyaan anak yang ditinggalkan. Mereka tiap hari menanyakan ke mana ayah pergi. Selama ini ia mengaku hatinya tersiksa dan terpaksa menangis. Ibu rumah tangga yang sekarang tinggal bersama anaknya di gubuk reot tiga kilo meter bagian timur Kota Lhoksukon, didampingi Direktur LSM-YAPDA Sugito Tassan Lhokseumawe mengatakan, pertama suaminya di jemput petugas ke rumah. Tapi, kala petugas datang, kata Kasmawati, korban tidak di rumah, lantas petugas berinitial IRF, menitip pesan pada kepala lorong jika ia sudah pulang segera datang ke pos penculik. Begitu suaminya Amiruddin pulang dari kerjanya sebagai petani, kata Kasmawati, korban mendapat kabar dari kepala lorong M Yusuf bahwa ada pesan dari petugas Kopassus. Setelah dapat kabar itu, korban mendayung sepeda langsung datang ke pos Matang Ubi Lhoksukon menjumpai oknum itu. Namun, beberapa jam kemudian korban pulang ke rumah menitip sepeda, kala itu ia didampingi seorang petugas berpakaian preman dan kepada isterinya korban memberitahukan ia dibawa Kopassus ke Pos Alue Bilie, Kecamatan Baktia Pantonlabu. Sejak korban dibawa ke Pos Alue Bili 30 Maret 1997, kata Kasmawati, sampai sekarang belum pernah pulang ke rumah. Tiga hari setelah ia dibawa ke Pos Kopassus Alue Bili, Kasmawati datang sekaligus membawa pakaian dengan harapan bisa ketemu dengan Amiruddin. Seorang petugas berinitial IRF yang dijumpai di pos tersebut tidak tahu ke mana korban dibawa, tapi IRF mengaku pernah memesan Amiruddin ke pos lewat kepala lorong, tapi tidak datang ke pos, mungkin ditangkap orang lain, kata Kasmawati meniru ucapan oknum IRF didampingi Direktur YAPDA Lhokseumawe. Ia yakin yang mengambil itu aparat keamanan. Karena, korban sendiri ketika minta pamit memberitahukan dan dikuatkan keterangan kepala lorong, kata Kasmawati. Bahkan, wanita hitam manis itu punya firasat bahwa suaminya masih hidup, tapi ia berada dalam tahanan petugas dan selama korban dijemput, ia pernah bermimpi tiga kali seolah-olah korban pulang ke rumah bersenda gurau dengan anak-anaknya. Selama suaminya ditahan penculik, kata Kasmawati, pihaknya bersama anak bersandar hidup pada orang tuanya. Bahkan, biaya sekolah dua di antara empat anaknya ditanggung ayahnya yang sudah uzur itu, tak mungkin anak itu bisa melanjutkan sekolah ke SMP nanti, kata Kasmawati menunjukkan wajah sedih. Selain Kasmawati, juga beberapa janda lainnya di desa Matang Reudeup Lhoksukon, yakni Ny Rukiyah

(35). Istri M Yusuf Husen itu mengisahkan bahwa suaminya dijemput petugas tahun 1991 lalu, sampai sekarang belum diketahui nasibnya.

Pemda Aceh berjanji akan terus membina dan menyantuni para keluarga korban orang hilang dan tindak kekerasan akibat operasi militer yang berlangsung di daerah ini sejak 1991.⁴ Hal itu dikemukakan gubernur sesuai membuka Masa Sidang ke-2 1998/1999 DPRD Tk I Aceh di Banda Aceh. Pemda mengakui, masih banyak para janda dan anak yatim dari keluarga korban yang perlu mendapat perhatian, baik moril maupun meteril, sehingga para janda dan anak yatim tidak merasa tertekan batinnya. Meski jumlah janda dan yatim belum diketahui persis, namun Pemda Aceh akan terus berupaya membantu para keluarga korban akibat operasi militer di daerah ini, terutama para janda dan anak-anak mereka yang telah menjadi yatim. Data sementara yang berhasil dihimpun Forum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Aceh menyebutkan, jumlah janda akibat operasi militer di daerah ini mencapai sekitar 1.480 orang, sedangkan anak yatim sekitar 6.000 orang.

Penderitaan panjang yang dialami telah meninggalkan luka-luka yang kasat mata karena merupakan luka fisik, atau luka-luka dalam jiwa yang sulit untuk dipandang, apalagi diraba. Trauma psikis yang dialami para korban DOM, baik laki-laki atau perempuan, tua atau muda, bahkan anak-anak, terjadi karena berbagai peristiwa yang secara langsung maupun tidak langsung dialami, dilihat, didengar, atau bahkan dirasakan. Seorang srikandi Aceh, sarjana psikologi, Nurjannah Bachtiar Nitura, mengungkapkan bahwa trauma psikis yang dialami oleh mereka yang langsung mengalaminya tentunya lebih berat. Namun, tidak menutup kemungkinan trauma psikis tersebut juga dapat terimbas pada mereka yang secara tidak langsung mengalaminya. Hanya Nurjannahlah yang menyumbangkan ilmu psikologinya untuk Aceh bagi rehabilitasi mental-psikis rakyat yang sudah sangat menderita ini. Sebagai contoh, Sum yang menjadi korban perkosaan oknum aparat tentu akan mengalami trauma psikis yang berat. Namun, gadis-gadis yang tinggal di sekitar Sum juga dapat terimbas kecemasan karena jiwanya, harga dirinya sebagai wanita, eksistensinya, dan sebagainya terancam. Situasi yang serba mencekam, menakutkan, fitnah, ekspose kekerasan, dan ketidakadilan, menghadirkan sebuah situasi ketidakpastian dalam kehidupan seseorang. Hal ini akan mempengaruhi kondisi psikis seseorang sehingga ia merasa serba tidak pasti dan terancam keselamatannya. Yang jelas dalam situasi demikian, peluang timbulnya kekacauan mental (*mental disorder*) semakin tinggi.⁵ Bentuknya antara lain:

1. *Neurosa histerik* ditandai dengan hilangnya fungsi mental atau fisik tanpa dikehendaki. Manifestasi gangguan ini dapat berupa reaksi konversi yang merupakan konversi kecemasan dalam bentuk gangguan fungsional syaraf, misal: lumpuh, tuli, buta dan lain-lain setelah mengalami pengalaman traumatis. Namun, dapat juga berupa reaksi disosiasi di mana beberapa fungsi kepribadian terpisah satu dengan yang lain. Sebagai contoh pecah kepribadian, berusaha melupakan traumanya hingga terjadi amnesia.
2. *Neurosa phobia* ditandai dengan ketakutan yang hebat terhadap sesuatu yang pernah menghadirkan pengalaman traumatis pada dirinya. Misalnya seorang gadis yang diperkosa menjadi takut dengan laki-laki atau seseorang yang menyerupai laki-laki (misal gadis tomboy).
3. *Neurosa depresif* merupakan suatu gangguan perasaan dengan ciri-ciri harga diri rendah, murung, kurang bersemangat, menyalahkan diri sendiri, apatis. Bahkan, pada kondisi tertentu ada keinginan untuk bunuh diri.
4. *Paranoid* dicirikan dengan adanya kecurigaan yang tinggi dan rasa bermusuhan yang hebat.
5. Beberapa gangguan seksual, misalnya *vaginismus* (ketegangan otot vagina sehingga perempuan tak dapat berkoitus secara normal dengan suaminya), *frigid* (dingin), dan lain-lain akibat diperkosa atau disakiti pada kemaluannya (disetrum).
6. Gangguan psikis lainnya, baik jenis *neurosa* (mengenai sebagian kepribadian, temporer, tidak melukai diri sendiri atau orang lain, peluang kesembuhan masih tinggi) atau bahkan psikosa (mengenai seluruh kepribadian, terus-menerus dan penyakitnya progresif, dapat membahayakan diri sendiri atau orang lain, sering hilang orientasi terhadap lingkungan dan kesembuhan permanen jarang sekali) yang pada kesempatan ini tak mungkin disebutkan satu per satu.⁶

Di antara 10 Dati II di Aceh, Pidie diperkirakan memiliki jumlah janda tertinggi. Hasil sensus penduduk terakhir (1990), jumlah janda di Pidie mencapai angka 23.366 orang, yakni 5,5 % dari jumlah penduduknya waktu itu. Dan, dalam tahun 1991 yang sedang marak operasi militer untuk memberantas gerombolan pengacau itu pula, tingkat pertumbuhan penduduk Pidie anjlok drastis, dari rata-rata 1,4 % per tahun menjadi 0,4 %.⁷ Sayangnya, Kantor Statistik Kabupaten Pidie tak mendata jumlah janda ini secara rutin tiap tahun. Angka jumlah cerai mati dan cerai hidup ini hanya didata pada setiap sensus penduduk secara nasional sepuluh tahun sekali. Sensus terakhir tahun 1990. Angka 23.366 janda di Pidie yang didata sampai akhir 1990 itu, meliputi 19.498 janda cerai mati, dan 3.868 janda cerai hidup. Jumlah janda cerai mati tersebut bukan semuanya janda korban operasi militer, termasuk jumlah janda akibat kematian biasa, atau penyebab lain. Tapi, akibat operasi militer yang mulai gencar pada 1990 memang telah mendongkrak jumlah janda di Pidie. Juga pada operasi 1991, janda cerai mati meningkat hingga totalnya melampaui jumlah 24.000 janda. Data akurat menyangkut janda korban operasi militer sendiri hingga kini belum terdata. Yang menarik, pertumbuhan penduduk di Pidie pada tahun 1990 dan 1991 hanya

0,4 %. Padahal, masa itu, di tingkat nasional pertumbuhan penduduk Indonesia rata-rata 2 % per tahun. Rendahnya angka pertumbuhan penduduk di Pidie pada dua tahun itu memang bukan merupakan keberhasilan KB. Melainkan, besar kemungkinan karena angka kematian lebih besar dibandingkan jumlah kelahiran, disamping faktor budaya merantau di kalangan masyarakat Pidie, baik ke luar negeri maupun luar daerah. Angka kematian di Pidie baru didata mulai 1996.⁸ Pertumbuhan yang hanya 0,4 % per tahun hanya ditemukan pada 1990 dan 1991. Sedangkan pada tahun-tahun selanjutnya pertumbuhan rata-rata 1,4 persen. Jumlah penduduk Pidie selama delapan tahun terakhir berturut-turut 421.377 jiwa (1990), 423.217 (1991), 433.011 (1992), 440.700 (1993), 446.654 (1994), 454.924 (1995), 457.547 (1996), dan 460.391 (1997).

Akibat banyaknya jumlah janda di Pidie, maka tak heran perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan terlihat cukup mencolok. Pada 1990 terdapat 216.477 perempuan serta 204.900 laki-laki, dan pada 1991 217.608 perempuan serta 205.549 laki-laki. Sampai dua tahun terakhir pun tak jauh beda. Pada 1996 terdapat 238.012 penduduk perempuan serta 219.533 laki-laki, dan pada 1997 239.547 perempuan serta 220.844 laki-laki. Jumlah janda di Pidie merata di semua kecamatan. Peringkat enam teratas ditempati berturut-turut Kecamatan Mutiara, Glumpang Tiga, Bandar Baru, Meuredu, Bandar Dua, dan Kecamatan Pidie. Padahal, enam kecamatan ini tidak semua masuk enam teratas dari segi jumlah penduduk.

Atas tingkah-laku segelintir prajurit ABRI selama beroperasi di Aceh, perempuan Aceh belum bisa memaafkan semua peristiwa pedih itu. Permintaan maaf harus diiringi dengan menyantuni para janda, anak-anak yatim, merehab dan membangun rumah-rumah yang dirusak dan dibakar serta menghukum aparat-aparat yang bertindak di luar kepatutan. Permintaan maaf itu, juga tidak cukup dilakukan Panglima ABRI, tapi Pemerintah Daerah Aceh dan tokoh-tokoh yang menghadirkan "DOM" di Aceh juga harus meminta maaf. Rakyat Aceh sejak zaman perjuangan telah memberi sumbangan yang luar biasa kepada bangsa dan negara yang tercinta ini termasuk nyawa para syuhada yang memperjuangkan kemerdekaan dari tangan penjajah. Bila semua kita merenungkan sumbangan rakyat Aceh itu, sama sekali tidak patut kalau orang Aceh dibantai disiksa seperti yang terjadi pada era operasi militer digelar. Peristiwa pembantaian, penyiksaan, dan perkosaan semakin pedih dirasakan karena hal itu dilakukan bangsa sendiri. Inilah peristiwa pedih yang pelakunya harus dihukum. Meskipun pencabutan DOM sudah dilakukan, perempuan Aceh masih harus terus berjuang karena realisasi dari pernyataan itu belum dilakukan.

Kaum perempuan di Aceh ingin menikmati peringatan hari kemerdekaan dalam suasana penuh kekhusyukan tanpa ada pemaksaan-pemaksaan dari siapa pun. Perempuan-perempuan Aceh biasanya merayakan hari kemerdekaan pada 17 Agustus dengan menggendong anak dan membawa nasi bungkus turun dari desa ke kota-kota kecamatan, tapi belakangan ini suasana memperingati hari kemerdekaan dilakukan secara terpaksa karena adanya tekanan. Terakhir ini, banyak perempuan Aceh menggendong anak bukan merayakan kemerdekaan, tapi mencari di mana suami dan ayah anak-anak mereka. Banyak sekali, istri kehilangan suami dan anak-anak kehilangan ayahnya.

Forum Perempuan Aceh pada kesempatan itu menguraikan sebagian kecil rincian peristiwa pilu yang dialami kaum wanita di daerah yang diberlakukan operasi militer, yaitu Pidie, Aceh Utara, dan Aceh Timur. Dalam sambutan tertulis yang dibacakan salah seorang pengurusnya, Forum Perempuan Aceh mengajak semua unsur bangsa ini untuk melihat apa yang terjadi pada perempuan di Aceh terakhir ini. Ketika Aceh dijadikan Daerah Operasi Militer, atau apa pun istilahnya yang dipakai pemerintah, berbagai tindak kekerasan terjadi. Penjarahan harta rakyat, penculikan, penganiayaan, pembakaran rumah tempat tinggal bahkan pembunuhan. Di tengah operasi, terjadi serpihan-serpihan peristiwa yang sangat sulit diterima siapa saja yang masih mempunyai hati nurani. Penyiksaan dan penjarahan terhadap "milik" perempuan yang sangat berharga, mulai dari pelecehan seksual sampai ke pembunuhan justru dilakukan aparat yang seharusnya melindungi dan membela rakyatnya. Tetapi, yang namanya bau busuk tidak pernah bisa ditutupi selamanya. Paling tidak, mereka yang berada dalam forum LSM, LBH, dan aktivis mahasiswa sudah mengungkapkannya, bahkan ada korban yang langsung dibawa ke Komnas HAM.

Apa yang tak biasa dilakukan Soeharto ketika menjabat Presiden RI tujuh periode, kini dilakukan Presiden BJ Habibie. Kepala Negara yang menggantikan Soeharto itu menyampaikan penyesalan sedalam-dalamnya atas pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di beberapa daerah pada masa lalu, yang dilakukan oknum petugas dalam operasi menghadapi gerakan separatis.

Seluruh masyarakat merasa prihatin dengan terjadinya pelanggaran terhadap harkat dan martabat warga negara dan kemanusiaan tersebut. Pimpinan ABRI harus melakukan penyelidikan seksama atas kejadian itu dan mengajak semua pihak, khususnya pemuka agama dan pimpinan masyarakat, mendukung, serta memberikan kesempatan seluas-luasnya pada ABRI dalam meneliti peristiwa tersebut sekaligus menyelesaikannya secara hukum. Pemerintah, termasuk pimpinan ABRI, bertekad bahwa kejadian itu tidak terulang dan menjadikan prinsip HAM sebagai tolok ukur dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. HAM adalah komitmen bangsa untuk menghormati harkat dan martabat manusia, terlepas dari agama, ras, etnik, warna kulit, jenis kelamin atau status sosialnya.

Wakil Ketua DPR/MPR Ismail Hasan Metareum yang juga putra asli Aceh menyambut baik permohonan maaf Presiden Habibie atas terjadinya pelanggaran HAM di berbagai daerah,

termasuk di Aceh. Tapi, permohonan maaf itu tidak berarti menggugurkan upaya pengusutan atas pelanggaran HAM yang terjadi.⁹ Terhadap permohonan maaf Habibie itu, Ismail Metareum mengomentari, “Itu bagus, paling tidak perasaan para keluarga korban bisa terobati,” kata sarjana hukum yang akrab dipanggil Buya itu di Jakarta. Presiden Habibie dalam pidato kenegaraan di DPR/MPR antara lain menyampaikan penyesalan yang sedalam-dalamnya atas terjadinya pelanggaran HAM di beberapa daerah pada masa lalu, yang dilakukan oknum aparat dalam operasi menghancurkan gerakan separatis. Metareum menyatakan, pelanggaran HAM yang dilakukan oknum aparat di Aceh, sehubungan dengan dinyatakan Aceh sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) sejak 1989-1998, telah menimbulkan banyak korban.

Pelanggaran HAM yang telah terjadi perlu terus diusut dan dituntaskan. Kemudian, terhadap keluarga korban, misalnya anak-anak yatim atau janda-janda korban pelanggaran HAM tersebut juga perlu dilindungi dan dijamin kesejahteraan hidupnya. Rakyat Aceh sangat membutuhkan rasa keadilan, keamanan, kesejahteraan, serta tidak merasa terancam lagi dengan kehadiran aparat keamanan di daerah itu. Perlu pendekatan psikologis kepada rakyat Aceh agar mereka merasa aman hidupnya, tidak lagi dihantui oleh berbagai rasa cemas dan ketakutan. Permintaan maaf pemerintah sudah termasuk dalam kasus orang-orang yang hilang di Aceh, meskipun tidak secara gamblang disebutkan. Kasus Aceh ini kan faktanya lebih besar dari kasus-kasus orang hilang selama Orba. Yang diinginkan kelanjutannya adalah langkah konkret melakukan pengadilan terhadap oknum-oknum yang bersalah.

Menurutnya, FKP tidak saja menginventarisir orang-orang yang hilang, tapi juga menginventarisir oknum-oknum yang melakukannya. Hasil inventarisir FKP terhadap oknum-oknum yang melakukan baru sementara, jadi belum final. Dengan data-data yang kami kumpul, kami ingin melihat orang-orang itu diadili,” kata Suriansyah tanpa menyebut oknum dari kesatuan mana. Suriansyah berpendapat, selain pemerintah wajib memberikan santunan kepada keluarga korban eksekusi dari DOM, seharusnya dibentuk yayasan yang khusus menangani korban-korban Aceh. Pemerintah harus membentuk yayasan itu, sehingga penyaluran dananya melalui yayasan tersebut. Mengenai apakah Hubda FKP Aceh akan menyampaikan ini kepada DPP Golkar untuk membantu, menurutnya, itu bukan masalah Golkar saja, karena kasus Aceh sudah menjadi masalah bangsa. “Jadi, semua pihak harus memikirkan, karena korban Aceh yang paling banyak. Otomatis negara harus bertanggung jawab. Negaralah yang harus bertanggung jawab terhadap keluarga-keluarga korban. Pemerintah tidak cukup hanya dengan minta maaf. Secara politis, pernyataan Presiden Habibie sudah benar mengungkapkan hal itu di hadapan Dewan. Seharusnya lebih detail lagi dengan menindak lanjuti suatu program pengusutan, misalnya, kasus orang-orang hilang di Aceh, pemerintah harus buktikan, jangan mau pemerintah difitnah. Kendati hal itu dilakukan pemerintah yang lalu, tapi pemerintah harus diminta pertanggungjawaban, kalau pemerintah mau menegakkan HAM secara total.

Pernyataan permohonan maaf secara terbuka dari Presiden BJ Habibie atas berbagai pelanggaran HAM selama ini merupakan sesuatu yang baik. Jika ada pernyataan terbuka seperti itu, meski dinilai merupakan hal yang wajar, namun dalam era reformasi seperti ini jelas menunjukkan sesuatu yang baik. Mengapa pernyataan permintaan maaf itu dinilainya wajar, karena sebelumnya Panglima ABRI Wiranto—ketika mengumumkan pencabutan soal Daerah Operasi Militer (DOM)—secara terbuka juga menyatakan permintaan maaf mengenai hal itu. “Tapi, kalau kemudian ada penegasan lagi dari Presiden, jelas itu merupakan sesuatu yang baik,” kata kandidat doktor yang kini sedang melakukan penelitian tentang hubungan Islam dan ABRI itu. Ia mengatakan, bisa jadi permintaan maaf yang disampaikan secara terbuka itu merupakan suatu wujud mengenai banyaknya tuntutan tokoh kritis tentang perlunya permintaan maaf dari pemerintah atas berbagai pelanggaran HAM di masa lalu. Tak kalah sengitnya adalah tuntutan dari pegiat LSM di Aceh. Sementara itu, dua pengamat politik, Dr Indria Samego dari Puslitbang Politik dan Kewilayahan LIPI, dan Dr Joshep Kristiadi dari CSIS, berpendapat senada bahwa pidato Presiden Habibie itu memerlukan pembuktian dalam bentuk implementasi kebijakan politiknya sehingga benar-benar dipercaya rakyat. Menurut Direktur Politik CSIS Joseph Kristiadi, dalam tataran verbal harus diakui pidato kenegaraan Presiden memang selalu berusaha mengarah pada hal yang ideal dan baik. “Namun, satu hal yang kini ditunggu rakyat adalah apakah ada kesesuaian antara apa yang disampaikan itu bisa menjadi kenyataan,” katanya. Namun, doktor Ilmu Politik lulusan UGM Yogyakarta itu, tidak percaya bahwa hal ideal yang baik dari isi pidato Presiden itu tiba-tiba langsung bisa menjadi sebuah mukjizat. “Tentu tidak mungkin bahwa tataran verbal yang ideal itu, tiba-tiba kemudian menjadi kenyataan semua. Tapi, di era reformasi ini itulah yang ditunggu semua rakyat,” ujarnya.

Ditetapkannya Aceh sebagai daerah operasi militer (DOM) adalah suatu keputusan politik. Karenanya, pencabutan status DOM harus diikuti dengan pertanggungjawaban politik, hukum, dan sosial-ekonomi dari pemerintah. Untuk semua itu, maka Presidenlah yang paling bertanggung jawab.¹⁰ Yang paling bertanggung jawab terhadap kejahatan kemanusiaan di Aceh selain Pangab adalah Presiden, baik sebagai Kepala Negara maupun sebagai Panglima Tinggi (Pangti) ABRI. Sebab, sebagai sebuah keputusan politik, itu ada di tingkat Presiden. Kalau kemudian secara teknis muncul persoalan-persoalan—pelanggaran HAM dan hukum, serta perkosaan—di lapangan, bisa saja diusut oknum lainnya. Tapi, pertanggungjawaban paling makro adalah keputusan memberlakukan sebagai daerah operasi.

Pertanggungjawaban politik yang dimaksudkan adalah pemerintah harus mengakui bahwa operasi militer di Aceh itu salah, kemudian mengeluarkan daftar orang-orang yang menjadi korban operasi, serta mengumumkan langkah-langkah apa yang diambil pemerintah dengan kesalahannya itu. Nyatanya, sampai hari ini pemerintah belum melakukan pertanggungjawaban politik, pertanggungjawaban hukum, apalagi pertanggungjawaban sosial. Pertanggungjawaban hukum meliputi siapa yang paling bersalah dan siapa yang bertanggungjawab secara hukum. Sedangkan pertanggungjawaban sosial menyangkut rehabilitasi ekonomi bagi janda-janda dan anak yatim korban operasi militer. Pemerintah belum melakukan pertanggungjawaban seperti itu. Pencabutan DOM baru *start* awal dan harus ditindaklanjuti. Bila tidak, maka ini tidak ada makna. Jadi, pencabutan itu hanya di tingkat formal, tapi di tingkat riil kondisi masyarakat Aceh tidak ada perubahan secara substansial. Apa yang terjadi di Aceh merupakan tragedi kemanusiaan yang telah merusakkan sendi-sendi budaya manusia. Dalam bahasa lain, kasus Aceh adalah perusakan peradaban. Golkar juga ikut memainkan peranan dalam tragedi di Aceh. Kemenangan Golkar di Aceh tidak terlepas dari keterlibatan aparat militer. Ghazali memang tidak menampik keberhasilan pembangunan di Aceh selama ini. “Namun, apakah demi pembangunan lantas rakyat dizalimi, ditindas? Inilah yang kita tentang,” tegas mantan “Abang Jakarta” yang duduk di Komisi I DPR RI ini. Pembicara lainnya HM Kaoy Syah menceritakan secara singkat munculnya aksi sekelompok orang yang kemudian dicap GPK. “Memang dulunya saya mendengar ada pos-pos polisi yang diserbu, ada perampasan senjata dan lain-lain. Namun, apakah kemudian harus menurunkan aparat sedemikian besar?” tanya mantan Wakil Ketua DPRD I Aceh ini.

Kuburan para korban pembantaian aparat keamanan semasih berlangsungnya operasi militer di Aceh, mulai diungkapkan warga dua desa di Aceh Timur. Diperkirakan, pada dua lokasi itu ditanam secara massal 50 korban pembantaian, yakni di Desa Blang Gleum Arakundo, Kecamatan Sulok, dan di Desa Alue Ie Mirah, Kecamatan Simpang Ulim.¹¹ TPF ketika turun ke lokasi di Desa Blang Gleum, persis di Dusun Meureubo kawasan kompleks PT Irwim, menangkap kesan bahwa kawasan itu sangat angker. Penduduk setempat saja tak berani mendekat ke sana. Namun, hampir semua warga di situ tahu kalau di kompleks itu pernah ditanam setidaknya 45 jasad korban keganasan oknum aparat antara tahun 1991-1993. “Umumnya korban memang bukan penduduk setempat,” kata Ilyas, penduduk Desa Alue Meuh, di lokasi tersebut. Bahkan, dalam kunjungan TPF ke lokasi PT Irwim, berhasil ditemukan sehelai celana panjang warna abu-abu dan satu set rahang gigi palsu yang berisikan 14 biji gigi. Satu di antaranya gigi perak. Gigi plus celana panjang tersebut diperkirakan milik korban pembantaian oknum aparat keamanan yang kala operasi militer berlangsung tempat itu digunakan sebagai camp pembantaian dan penyiksaan para korban. Beberapa penduduk kawasan itu mengatakan, selagi aparat keamanan masih berkantor di PT Irwim, hampir tiap malam terdengar suara ledakan senjata api. “Malah, banyak warga melihat para tahanan dibawa ke lokasi itu dengan mata tertutup,” ujar M Kasem (45) penduduk Arakundo, Kecamatan Julok Rayeuk. Warga memperkirakan selain ditanam di kompleks perusahaan itu, banyak juga yang dibuang ke tempat lain namun masih dalam kawasan itu. “Beberapa penduduk juga pernah menemukan mayat di pinggir jalan,” ujar Muhammad Amin, penduduk Desa Tanjung Tok Blang. Sementara, Teungku Mustafa alias Teungku Nek, penduduk Desa Blang Gleum mengatakan, pihaknya pernah memandikan dan menanam seorang korban pembantaian. Orang itu tak dikenal dan ditemukan tewas dengan beberapa luka tembak, wajahnya sulit dikenal, tapi diperkirakan warga Desa Simpang Paloh, Kecamatan Peureulak. Jenazah korban dikuburkan masyarakat di kebun milik Halimah Bansu Dusun Meureubo 50 meter dengan kompleks PT Irwim. Kuburan tersebut masih ditandai dengan pohon Muku. Ketika menemukan celana panjang dan satu set gigi palsu di lokasi yang sama, beberapa penduduk yakin, kalau gigi dan celana itu milik korban yang terbunuh dalam operasi militer. Mengingat, lokasi itu tidak pernah didatangi penduduk. “Kami tak pernah datang ke sini, kecuali karena Anda ajak,” ucap M. Nur dan Hasni yang ikut bersama TPF ke lokasi yang angker itu. Lokasi kuburan massal itu memang jauh dengan rumah penduduk, sehingga warga tak berani ke sana, apalagi sekarang kawasan itu ditumbuhi hutan lebat.

Untuk itu Komnas HAM harus bersungguh-sungguh mengungkapnya, bahkan bila perlu dengan mempertaruhkan kredibilitas serta independensi lembaga tersebut. Di tempat ini, tim berdialog dengan aktivis LSM. Kemudian, tim yang dipimpin Lopa itu merancang jadwal serta sasaran kunjungan berikutnya yang mereka rahasiakan setelah meninggalkan Banda Aceh menuju Sigli. Sebelumnya, Tim Lopa juga mengunjungi Forum Peduli HAM yang selama ini juga aktif menghimpun data orang hilang/korban tindak kekerasan. Dari hampir 800 kasus yang terdata di kantor tersebut, Lopa lebih tertarik pada kasus perkosaan, mengingat beberapa korbannya masih mungkin ditemui oleh Tim Komnas HAM. Ibrahim (25), salah seorang korban penembakan oknum militer pada Juli 1990 di Desa Teurucot, Kecamatan Geumpang, Pidie, yang kebetulan sedang berada di Banda Aceh. Tanpa kesalahan yang jelas, ia bersama empat warga lainnya—termasuk ayahnya—yang siang itu berada di sebuah kedai dipaksa ke luar dan disuruh berbaris oleh petugas. Lalu, dari jarak kurang dari 10 meter, mereka dihujani peluru. Dua warga tewas di tempat, sedangkan Ibrahim bersama ayahnya, serta seorang lainnya luput dari maut. Namun, di paha Ibrahim sempat bersarang peluru yang kemudian dioperasi di RSUD Dokter Zainal Abidin, Banda Aceh. Bekas luka tembak di paha kirinya itu ia perlihatkan kepada Tim Lopa dan difoto dengan cermat oleh Koesparmono Irsan. Melihat luka tembak yang tak kecil itu Pak Koes

geleng-geleng kepala. Apalagi, setelah mendengar cerita Ibrahim bahwa tak lama setelah kejadian itu ayahnya meninggal karena sakit-sakitan.

Data sementara yang sudah terhimpun sebagai eksekusi DOM di Aceh sepanjang 1989-1998. Yakni 871 orang tewas di TKP karena tindak kekerasan, 387 orang hilang kemudian ditemukan mati, 550 orang hilang, 368 korban penganiayaan, 120 korban dibakar rumahnya, serta 102 korban perkosaan. Kalau diteliti intensif angkanya bisa mencapai dua atau tiga kali lipat. Begitupun, karena data sementara itu saja sudah cukup besar, Komnas HAM hanya memilih beberapa sampel untuk dicek ulang di lapangan. Untuk menghubungi dan menemui semua korban dan saksi mata, adalah hampir tak mungkin, mengingat jumlahnya demikian banyak, tersebar di tiga kabupaten (Pidie, Aceh Utara, dan Aceh Timur) sedangkan Komnas HAM hanya tiga hari di Aceh. Itulah sebabnya, mereka hanya memilih sampel kasus. Di antaranya mereka sepakati untuk bertemu dengan hanya tujuh janda, 10 anak yatim dari 10 orangtua yang berbeda, dua korban perkosaan, dua korban yang rumahnya dibakar/dijarah, dan dua kuburan massal yang akan dibongkar oleh Tim Komnas HAM. Untuk pembongkaran kuburan massal, dokter forensik dari Medan didatangkan ke Sigli, dan hadir serta membuat berita acara mengenai pembongkaran dan apa-apa yang ditemukan di dalam kuburan tersebut.

Tapi, untuk mempertautkan apakah benar pembantaian di Aceh itu berkait langsung dengan apa yang dilakukan Kopassus di Jakarta di bawah komando Prabowo Subianto, Lopa masih belum berani menyimpulkan. “Ya, masih kita pelajari,” ujarnya diplomatis. Menurut Lopa, langkah klarifikasi yang dilakukannya bersama anggota tim sangat penting untuk mengungkap apa yang benar terjadi dan yang tidak terjadi selama operasi militer di Aceh. Mata dunia dan harapan masyarakat internasional saat ini memang tertumpu pada Komnas HAM untuk mengungkap Kasus Aceh ini sebenar-benarnya dan supaya tak perlu menyangsikan itikad dan independensi tim yang dipimpinnya itu. Setelah ada data, harus dianalisa, mengapa itu terjadi, lalu dilaporkan kepada pemerintah, bahwa ini yang terjadi di Aceh. Yang terjadi di Aceh adalah pelanggaran HAM yang sudah menjurus kepada pemusnahan peradaban. Cuma, ia keberatan ketika didesak untuk menggolongkan pembantaian di Aceh ini sebagai tragedi Bosnia kedua, semacam pembersihan etnis. “Tak usah bilang seperti Bosnia dululah. Soalnya saya belum pernah ke Bosnia dan tak tahu persis bagaimana kejadian di sana. Saya itu tak mau omong kalau tak lihat. Makanya, harus saya lihat dulu, baru saya omong. Tunggu sajalah hasil investigasi kami. Tapi, yang jelas di Aceh, kalau apa yang sudah terungkap itu benar semua, ya kasus Aceh ini luar biasa. Luar biasa.” Apa yang dikatakan Lopa itu juga diamini Koesparmono Irsan. “*Iya, ini luar biasa, luar biasa,*” ujarnya yakin. Lalu, apa yang bisa dijanjikan Komnas HAM dengan kedatangannya ke Aceh kali ini? “Kita akan merekomendasikan kepada pemerintah untuk memulihkan kembali kondisi di Aceh seperti semula, sebelum terjadi operasi militer,” jawab Lopa.

DOM, The Killing Field Aceh

DOM dengan Operasi Jaring Merah di daerah Aceh telah diberlakukan sejak tahun 1989 lalu, yang pada mulanya diperuntukkan mengakhiri situasi dari tindakan suatu gerakan, yang disebut pemerintah sebagai GAM (Gerakan Aceh Merdeka), yang selanjutnya disebut Gerakan Pengacau Keamanan (GPK) ini¹² telah begitu kejam sehingga melebihi dari apa yang pernah dikenal dalam sejarah Asia tenggara sebagai *the killing field* (ladang pembantaian) di Kamboja. Namun sejak operasi tersebut diberlakukan, ternyata telah terjadi bukan hanya pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang begitu nyata, seperti tindak kekerasan/penyiksaan yang langsung maupun tidak langsung dirasakan sendiri oleh masyarakat, namun juga suatu pembantaian peradaban religius yang sudah berabad-abad dibangun oleh masyarakat Aceh. Ironisnya masyarakat yang tidak mempunyai hubungan apa pun dengan GAM atau GPK telah pula menjadi korban. GAM adalah rekayasa politik Orde Baru untuk menghabiskan umat Islam di Indonesia. Bagi masyarakat Aceh, Operasi Jaring Merah/DOM menjadi momok yang sangat menakutkan dan traumatik, sebab aparat ABRI cenderung bertindak semena-mena terhadap rakyat yang dicurigai mempunyai hubungan dengan GPK atau GAM, akan tetapi selalu direkayasa bahwasannya rakyat yang tidak terlibat tindak kriminalitas apalagi melanggar hukum lainnya, pun dianggap sebagai anggota gerakan tersebut.

Akibatnya, tindak kekerasan/penyiksaan atau penangkapan tanpa prosedur atau penculikan atau pelecehan seks dan pemerkosaan, atau penghilangan nyawa manusia maupun praktek-praktek pelanggaran hukum dan HAM lainnya berlangsung hampir setiap saat. Beberapa contoh dari tindakan kekerasan dalam bentuk penyiksaan melebihi penyiksaan terhadap binatang yang dihadapi oleh rakyat Aceh dapat dilihat dengan penderitaan seorang anak yatim piatu bernama M Yusuf (12 tahun), penduduk Desa Blang Talon, Kecamatan Kuta Makmur, Aceh Utara, yang pada saat berumur 6 tahun ayahnya, Mustafa, telah disiksa oleh tiga petugas berpakaian loreng hitam, di mana kepala sang ayah dikoyak sadis dan dikuliti secara paksa,

selanjutnya begitu saja dicam-pakkan ke dalam kendaraan Kijang. Begitu juga halnya yang dialami seorang ibu muda bernama Nyak Maneh¹³ Abdullah (35), selain diper-kosa, mendapat siksaan dengan cara payudara dan kemaluannya disetrum, serta ditahan beberapa hari di pos Pinti I Tiro. Hal sama dialami Muhammad Jalil, penduduk Desa Maneh, Kecamatan Geumpang Pidie, yang telah ditembak petugas dan kepalanya ditebas hingga terpisah dengan badannya, sebagaimana diuraikan oleh istrinya, Saodah Saleh (41). Tindakan kekerasan/penyiksaan juga dialami seorang Kepala Desa Rengkam, Aceh Utara, yaitu Aman Ismail, yang pernah ditangkap dan digebuki di pekarangan suatu sekolah dasar, hingga mengalami muntah darah.

Contoh-contoh di atas hanya sekelumit penderitaan rakyat Aceh yang mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan tidak manusiawi selama berlangsungnya Operasi Jaring Merah, dan kemungkinan banyak lagi hal-hal yang pasti dialami oleh rakyat Aceh itu sendiri. Apa yang dialami oleh Muslim Bosnia di Eropa ternyata juga terjadi di Indonesia. Kalau di Bosnia dilakukan oleh Serdadu Biadab (Serbia), maka serdadu biadab dari bangsa sendiri melakukan aksi yang sama di Aceh. Dari hasil investi-gasi di lapangan maupun keterangan dari beberapa anggota masyarakat, terdapat beberapa tempat yang disinyalir sebagai kuburan massal. Di tempat itu diperkirakan dikuburkan mayat-mayat warga Aceh akibat tindak kekerasan/penyiksaan selama ini. Menurut penuturan Teungku Ayub, seorang warga Seureuke, Kecamatan Jambo Aye, Aceh Utara, dia melihat ratusan jenazah bergelimpangan di dalam satu lubang yang kemudian dikenal sebagai Bukit Tengkorak, terletak di Seurueke, Kecama-tan Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara (lebih kurang 60 km dari Lhokseu-mawe). Keterangan Teungku Ayub ini diperkuat dengan keterangan salah seorang warga Desa Menye VII Kecamatan Matang Kulit, bernama Adnan Kelana, yang menemui banyak mayat di sekitar Bukit Tengkorak tersebut. Di sini terdapat mayat yang masih berdaging maupun yang tinggal tulang-belulang saja. Penemuan mayat-mayat tersebut oleh Adnan Kelana karena upayanya mencari mayat orangtuanya, Bem prang, dan tujuh warga lainnya, yang telah dianiaya sebelumnya.

Selain Bukit Tengkorak, ada satu bukit lagi sebagai tempat yang disinyalir dijadikan kuburan massal, yaitu Bukit Seuntang (5 km dari jalan raya Medan-Lhokseumawe). Menurut salah seorang penduduk, di lokasi ini ada tiga lubang yang belum ditutup dan dua lubang lainnya sudah tertutup. Adanya lubang berisi mayat yang terdapat di daerah Alue, Aceh Timur, sebelumnya juga pernah diberitakan oleh *Reuters* pada sekitar tahun 1990, namun berita tersebut tidak pernah ditanggapi pemerintah.

Selain di kedua bukit tersebut, diperkirakan terdapat kuburan-kuburan massal di tempat lainnya, seperti di Jalan Mobil Oil Industri (MOI) Kecamatan Suka Makmur (27 km dari Lhoukseumawe), perkebunan PTP V Hutan Seureuke, dan hutan Krueng Campli Pidie (30 km dari Lhoukseumawe). Juga di perkebunan Alue Nireh (44 km dari Langsa) dan Sungai Tamiang, Aceh Timur (25 km dari Langsa), serta jurang di Jalan Tangse Beurenun (20 km dari Sigli). Terdapatnya kuburan massal di daerah Aceh sebagaimana hasil temuan tim pencari fakta maupun dari hasil keterangan masyarakat, seharusnya ditindaklanjuti dengan melakukan pembongkaran kuburan-kuburan tersebut, sehingga diperoleh kejelasan dan kepastian atas diri mayat-mayat yang ada di dalamnya. Artinya, apakah mayat-mayat tersebut termasuk korban kekerasan/penyiksaan akibat diberlakukannya Operasi Jaring Merah/DOM atau bukan.¹⁴

Dengan banyaknya orang hilang di Aceh, perlu dibentuk Tim Pencari Fakta yang independen untuk menyelidikinya. Artinya, apakah hilangnya orang-orang tersebut karena masih dalam tahanan,

dan kalau ditahan di mana rumah tahanannya, atau kalau sudah menjadi mayat di mana tempat kuburannya, atau kalau berada di tempat lain di mana tempatnya. Dalam era reformasi sekarang, hendaknya tidak terjadi tindak diskriminasi menyangkut upaya pembebasan para tapol/napol yang telah dilakukan, mengingat Aceh merupakan kawasan DOM yang sarat dengan pelanggaran HAM. Berdasarkan daftar yang diperoleh, ada sebagian napol Aceh yang masih menjalani hukuman atas tuduhan subversi. Para napol Aceh tersebar di beberapa lembaga pemasyarakatan, yang ada di Banda Aceh, Langsa, Sigli, Bireuen, Takengon, Lhoukseumawe, serta Tanjung Gusta-Medan. Hendaknya pemerintah melalui Menteri Kehakiman segera membebaskan para napol tersebut, sebagaimana yang telah dilakukan terhadap para napol yang ada di Jakarta. Menjadikan suatu daerah menjadi DOM memang belum pasti menyelesaikan masalah. Hal ini dapat diperhatikan dengan DOM-nya Irian Jaya, Timor Timur, maupun Aceh.

Apalagi mengingat daerah Aceh lain dengan kedua daerah tersebut, karena Aceh begitu kuat kultur keagamaan dan adat istiadatnya. Seharus-nya untuk menyelesaikan permasalahan Aceh harus terlebih dahulu memanfaatkan jasa para ulama, tokoh adat dan pemerintah setempat. Apa pun alasannya, akibat diberlakukannya Operasi Jaring Merah dan dijadikannya DOM di Aceh telah menimbulkan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia. Dan menurut pernyataan Komnas HAM, pelanggaran HAM di daerah Aceh lebih tinggi dibanding di Irian Jaya maupun di Timor Timur. Konsekuensinya dari semua itu, pemerintah melalui Panglima ABRI mengusut tuntas keberadaan aparat ABRI, yang diduga melakukan tindak kekerasan/penyiksaan terhadap rakyat, serta memba-wanya ke hadapan Mahkamah Militer. Artinya, tidak cukup hanya meminta maaf saja. Selain itu, demi kepastian hukum, kuburan- kuburan massal harus segera dibongkar kembali.

Menyangkut diberlakukannya Operasi Jaring Merah di daerah Aceh, pelanggaran HAM di Aceh harus diusut tuntas terutama para pelaku dan aktor intelektualnya. Dengan pengusutan secara transparan dan tuntas pelanggaran hukum dan HAM di daerah Aceh, hal ini tidak akan

menimbulkan spekulasi yang dapat merugikan pihak ABRI dan/ atau tidak akan ada upaya balas dendam dari generasi yang akan datang. Dunia internasional pun akan lebih percaya terhadap negara kita ini, sebagai negara yang selalu memperhatikan penegakan hukum dan HAM.

Tidak ada kata yang tepat untuk melukiskan penderitaan rakyat di Aceh kecuali kata: biadab. Suatu kebiadaban yang pernah dilakukan oleh Pol Pot di *killling field* Kamboja yang kualitasnya hampir sama dengan yang dilakukan oleh rezim fasis di bawah manajemen Soeharto. Kalau di Kamboja dikenal dengan istilah *the killing field*, maka di Aceh realitas ladang pembantaian itu adalah “Bukit Tengkorak” yang jumlahnya sekitar 35 tempat, suatu jumlah yang melebihi jumlah ladang pembantaian di Kamboja q

Bab 09 NESTAPA KAUM MUSLIMIN TNI PENJAGAL KEMANUSIAAN

KENDATI pasukan militer non-organik sudah ditarik dari Aceh, seperti yang diinstruksikan Pangab Jendral Wiranto tanggal 7 Agustus 1998, tidak serta-merta dapat menghilangkan luka dan duka yang pernah mereka torehkan selama beroperasi di sini. Penderitaan fisik, mental dan intelektual banyak dialami masyarakat Aceh. Hal yang sulit dilakukan adalah memulihkan kondisi traumatis masyarakat Aceh yang telah menciptakan neurosa psikologis bagi sebagian besar masyarakat Aceh.

Dari beberapa kasus kekerasan yang terjadi selama diberlakukannya Aceh sebagai Daerah Operasi Militer (DOM), sedikitnya ada 30 model penyiksaan yang sudah terdata. Di antaranya, ada korban yang digorok hingga putus, lalu kepalanya dibawa aparat keamanan dengan dipertontonkan di desa asalnya. Selain itu, ada yang ditembak di sumur, diganduli batu ke tubuh lalu dibuang ke sungai, penyetruman alat vital korban pada saat interogasi, botol yang dimasukkan ke kemaluan wanita, torehan luka yang ditetesi jeruk nipis dan sebagainya.

Selain itu, banyak muncul kasus orang hilang mau-pun yang mati tak wajar, yang bisa dikategorikan ke dalam tiga kelompok. *Pertama*, besar kemungkinan terlibat GPK yang sesungguhnya GAM itu ciptaan elit politik di jajaran militer yang gemar merekayasa keadaan. *Kedua*, hanya simpatisan (kasihan pada korban) ataupun benci pada penculik yang bertindak semena-mena. *Ketiga*, adalah korban fitnah. Tapi pada semua kasus itu terjadi pelanggaran HAM. Baik dari proses penangkapan, penyiksaan, maupun hukuman tembak yang tak melalui proses pengadilan. Dan, masyarakat sekarang sudah mengerti. Karena kesadaran hukum terus meningkat.

Dari kasus-kasus yang tercatat di DPRD Pidie, sekitar 20 persen korban penganiayaan berat masih hidup dan siap memberi kesaksian. Mereka umumnya sangat mengenali para penyiksanya. Di bawah ini akan dipaparkan beberapa kasus kekerasan yang terjadi.¹

Bab 09-01 Modus Operandi Solidaritas Sesama Napol di LP

Dari 680 kasus orang hilang dan tindak kekerasan plus pemerkosaan yang berhasil dihimpun Forum Peduli Hak Asasi Manusia (FP-HAM), setelah diklarifikasi terdapat sedikitnya 30 kasus yang berkualifikasi supersadistis. Sebagaimana aksi kebiadaban tentara sekuler manapun di dunia ini—seperti yang dilakukan tentara Nazi pada Perang Dunia II, tentara Serbia terhadap etnis Bosnia dan Albania—di mana korban sipil biasanya ditelanjangi dan diperkosa secara bergiliran di antara tentara-tentara yang gagah lainnya hingga pada model penyiksaan dan penindasan di mana laki-laki sipil dilarang untuk bersikap religius dalam menghadapi kematiannya. Pelecehan agama cukup banyak terjadi dalam peristiwa DOM Aceh ini. Kisah Bosnia berulang lagi atau terjadi bersamaan dengan apa yang dialami di Aceh. Umat Islam di Indonesia bahkan yang di Aceh sendiri, ironisnya, lebih peduli dengan nasib yang dialami Muslim Bosnia ketimbang yang dialami oleh umat Islam di Aceh, wilayah sendiri.² Hal ini karena ketakutan mereka pada rezim Soeharto yang melebihi teroris telah menyebabkan rasa takut yang luar biasa di kalangan umat Islam Indonesia. Seharusnya mereka bersikap seimbang atas yang dialami di Aceh dan di Bosnia atau di tempat pembantaian umat manusia manapun di dunia ini. Lihatlah bagaimana cara-cara mereka menyiksa umat Islam di Aceh berikut ini.

1. Korban Disembelih dan Rumahnya Dibakar

Kejadian sadis menimpa korban, M. Jalil, 40 tahun. Warga Desa Maneh, Kecamatan Geumpang, Pidie yang oleh aparat diduga terlibat GPK ini disudahi di Alue Bayuen, Aceh Timur, sekitar 250 km dari desanya, di suatu hari di tahun 1990.

Menurut pengakuan istri korban, Saodah Aleh (41) ibu dari lima orang anak, suaminya itu sedang mendulang emas di Alue Bayuen ketika dibantai petugas. Lalu kepalanya dibawa pulang oleh aparat ke kampung asalnya, Desa Maneh, Pidie. Sedangkan tubuh korban ditinggalkan di TKP. Kedatangan aparat ke rumahnya, dengan membawa kepala suami-nya—yang disaksikan oleh banyak penduduk Desa Maneh—ternyata belum membuat derita Saodah berakhir. Sebab, setelah kepala suaminya diserahkan, giliran rumahnya pula yang dibakar. Saodah dan keluarganya juga dianiaya.

2. Rumah dibakar dan Hartanya dimusnahkan

Teuku Nurdin, 70 tahun, benar-benar mengalami nasib sial yang berkelanjutan. Warga Ulee Reubek Barat, Seunuddon, Aceh Utara ini pada 27 Juli 1990 didatangi lima anggota GPK di rumahnya untuk minta makan sekaligus istirahat. Kalau tak diperkenankan, ia diancam akan dibunuh di bawah todongan senapan. Tak lama kemudian, terdengar bunyi senjata dari pihak ABRI yang mengetahui kedatangan GPK ke rumah Teuku Nurdin. Maka, terjadilah kontak senjata antara pihak ABRI dengan GPK. Tuan rumah, seperti dikisahkan Hasan (30), anak korban, lari meninggalkan ajang pertempuran itu. Dari saksi mata (tetangga) mereka kemudian tahu bahwa rumah tersebut dibakar, dibantu oleh sejumlah masyarakat yang dipaksa oleh aparat. Sedangkan GPK sempat melarikan diri. Sebelum dibakar, barang-barang milik Nurdin, senilai Rp 3 juta diambil aparat. Esoknya, semua masyarakat setempat dikumpulkan untuk ditanyai, siapa pemilik rumah yang dibakar tersebut. Ternyata pemiliknya adalah Nurdin, yang kemudian Nurdin melarikan diri ke Blang Geulumpang (rumah familinya). Setelah 20 hari baru ia kembali. Saat itu Danramil setempat berjanji akan mengganti rugi rumah yang dibakar itu. Tapi, sampai sekarang janji tersebut belum diwujudkan.

3. Diikat dan Diseret Ramai-ramai, lalu Ditembak

Lain lagi kejadian yang menimpa Syech Asnawi Yahya (32), sarjana FKIP Jabal Ghafur, Sigli. Sebagai *keuchik* (kepala kampung/desa) di Blang Kulam, Kecamatan Batee, ia tak mau warganya disiksa oleh aparat atau diculik dengan dalih ikut operasi. Tapi, karena sering adu argumen dengan aparat mengenai masalah itu, ayah dua anak itu pun diambil petugas pada suatu hari di tahun 1991. Lalu dibawa ke jembatan Delima, Pidie. Lehernya dipasang tali, lalu beberapa warga disuruh menarik tali tersebut. Dalam situasi begitu, petugas menembakkan peluru ke tubuhnya. Syech Asnawi Yahya pun tewas di tempat. Mayat Syech Asnawi Yahya itu baru boleh diambil keesokannya oleh ibunya.

4. Ditenggelamkan ke Sungai Hingga Mati

Sulaiman Ali (40), tidak menduga dirinya akan mati dengan cara yang mengenaskan. Warga Ulee Rubek Seunuddon, Aceh Utara, ini disiksa di Mata Anoe, yang tak jauh dari desanya pada suatu hari di tahun 1990. Menurut adik kandung korban, Teungku Nurdin Ali, abang-nya itu diambil petugas selagi bekerja di tambak udang. Setelah itu ia diboyong ke Kantor Koramil setempat, kemudian diangkut ke Lhoksu-kon. Di kedua tempat ini ia disiksa dengan popor senapan mesin. Namun, karena masih bernyawa akhirnya di tubuhnya diganduli batu sebagai pemberat, lalu ditenggelamkan di Sungai Sampoiniet, Aceh Utara. Dua hari kemudian, tubuhnya timbul ke permukaan dan dibawa masyarakat ke Masjid Raya Sampoiniet untuk dimandikan dan dikafankan. Lalu ia dikubur di pekarangan rumah Keuchik Kedai Sampoiniet.

5. Ditaruh Pemberat Besi dan Ditenggelamkan ke Sungai

Abdurahman Ahmad (52), mengalami tindak kekerasan sepulangnya dari kebun membelah kayu di tahun 1990. Kala itu, warga Leubok Pengpeng, Kecamatan Peureulak, Aceh Timur ini kepergok ABRI yang sedang menyisir pinggiran hutan. Tanpa ditanya apa-apa, Abdurahman langsung dibawa. Enam hari kemudian, lapor Ibrahim Ali (28), anak korban, jasad ayahnya ditemukan mengapung di Sungai Pereulak. Yang sangat menyedihkan, Abdurahman Ahmad diikat hidup-hidup pada besi yang berukuran sepanjang badannya, beratnya sekitar 17 kilogram. Setelah diganduli besi, kemudian dilempar ke sungai. Film *Amistad* karya Steven Spielberg kalah sadisnya dibanding kejadian yang dialami Abdur-rahman Ahmad ini.

6. Ajimat Dicabut dan Disiksa

Ishak Raja Bayan (55) mengalami siksaan pada bulan Maret 1990 di desanya, Matang Anoh, Seunoddon, Aceh Utara. Pagi hari yang naas itu ia bermaksud ke tambak untuk mengambil gajinya yang akan dibagi-kan pagi itu. Sewaktu pulang ia dihadang oleh dua anggota Yonif 125 dan dibawa ke Koramil Seunoddon. Ia kemudian disiksa dan ditembak. Tapi, ternyata ia kebal. Lalu ajimatnya berupa cincin dicabut paksa. Setelah itu ia disiksa sampai memar dan lunglai. Ia kemudian disuruh pulang tanpa tahu apa sebab ia dikasari begitu.

7. Disiksa Sembilan Malam, Dibiarkan dalam Keadaan Lapar.

ABDUL GANI Berdan (26), warga Jiem-jiem, Bandar Baru, Pidie. Jebolan SD yang punya tiga anak ini mengalami siksaan pada tanggal 11 Oktober 1992 di Pos Sattis setempat. Ketika itu, ia bersama tujuh penduduk lainnya, dijemput sore hari (15.00 WIB) oleh tiga oknum berseragam

loreng. Di pos Sattis itu mereka disiksa selama sembilan hari sembilan malam. Selama tiga hari korban tidak diberi makan. Perutnya perih luar bisa. Setelah itu, seperti dilaporkan Siti Aminah (29), istri korban, Abdul Gani Berdan berhasil pulang dengan keadaan yang sangat memprihatinkan. Saat pergi ia masih tegap, pulanginya pakai tongkat. Itulah yang dimaksud Aminah sebagai keadaan yang memprihatinkan itu.

8. Diborgol, Disiksa dan Dirampas Hartanya.

Seperti yang diadukan seorang pensiunan PNS M. Yahya (59) penduduk Meunasah Manyang Muara Dua, mengadukan dirinya pernah diculik 12 Juni 1990. Para penculik mahir itu memborgol tangannya, kemudian menyiksanya dengan bermacam cara dan jurus pukulan maut yang sangat mengerikan dan nyaris menemui ajal. Tidak hanya itu, malah hartanya seperti emas perhiasan isterinya dan sepeda motor BL 7461 KB bersama buku hak miliknya dikuras kelompok penculik.³ Karena itu, M. Yahya meminta pemerintah dapat menindak tegas pelakunya, sementara identitas para pelaku masih dicatat dan masih hidup.

9. Disiksa Di depan Mata Anak dan Istrinya.

Pengaduan orang hilang di Aceh Utara terus bertambah. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Iskandar Muda Lhokseumawe kembali menerima tambahan laporan empat kasus orang hilang. Dengan demikian, telah 44 kasus yang diadukan ke LBH dan DPRD setempat. Ketua Yayasan LBH Iskandar Muda, Mohammad Yacob Hamzah, menyebutkan korban orang hilang yang telah dilaporkan kepada pihaknya, kebanyakan petani miskin dan minim pendidikannya yang terjadi antara tahun 1989 hingga 1992. Pada umumnya, mereka dijemput di rumah, di pos siskamling, dan ada di warung kopi. Mengutip beberapa aduan dari isteri dan anak korban yang diterima selama ini, kata Yacob, sangat mengerikan. Karena, ada korban kala dijemput di rumah, lalu disiksa di depan mata anak dan isterinya. Bahkan, ada korban yang kemudian rumahnya dibakar.⁴

Selama ini, derai air mata isteri dan anak korban keberingasan penculik tiap hari mengalir di LBH Iskandar Muda. Mereka umumnya penduduk yang tinggal di desa terpencil, misalnya di Kuta Makmur, Samalanga, Lhoksukon, Muara Dua, Jeunieb, dan Matang Kuli. Seperti pengaduan yang diterima Yayasan LBH Iskandar Muda pada 18 Juli 1998, tiga janda bersama anaknya mengadukan kehilangan suaminya yang dijemput orang misterius dan sampai sekarang belum kembali. Seba-gaimana dikisahkan Salbiah (43) penduduk Alue Glem Kecamatan Blang Mangat, suaminya Jamaluddin (54) dijemput tahun 1991, kala itu korban sedang menunggu makan malam bersama keluarga. Peristiwa serupa dialami janda Syamsiah (40) Desa Blang Baroh Kecamatan Kuta Makmur, suaminya M Nasir (45) dijemput orang misterius 13 Desember 1990. Kala penculik menjemputnya, korban sedang bermanja-manja dengan anak-nya yang paling bungsu.

Pengadu lainnya yang ikut kehilangan keluarganya adalah Rasyidah (40) Desa Krueng Seunong Kecamatan Kuta Makmur dan Abdurrahman (22) penduduk Blang Abeuk Kuta Makmur. Kata janda Rasyidah, suami-nya Zainuddin Hs (34) dijemput tahun 1990, korban diambil di Pos Sis-kamling, sementara A. Rahman mengadukan, bahwa abangnya M Yusuf H (48) diculik 28 Juni 1990 di rumahnya dan sampai sekarang para korban belum diketahui nasibnya. Karena itu, para keluarga korban berharap agar pemerintah dapat menyelidiki ke mana suami dan ayah pengadu dibawa orang misterius.

10. Disiksa Hingga Lumpuh

Safruddin Daud (32) sekarang cacat fisik seumur hidup akibat dipukul oknum penculik. Pada 2 Januari 1991 ditangkap penculik, ia dibawa ke SD Krg Meusagop bersama puluhan warga lainnya, mereka dipukul babak belur dan mengakibatkan Safruddin patah tulang punggung. Sampai sekarang korban terpaksa tidur di rumah menahan derita, jangankan mencari nafkah, berak saja harus ditampung isterinya. Sebagai upaya kelangsungan hidup ayah anak itu, isteri tercintanya Aisyah (27) terpaksa bekerja keras. Seperti menanam padi dan bekerja upahan lainnya dari penduduk demi anak dan suaminya yang sudah cacat se-umur hidup. Menurut Safruddin Daud, sejak ia mendapat penyiksaan dari penculik yang tidak diketahui identitasnya itu, keluarganya telah mencoba mengobati ke berbagai rumah sakit, termasuk ke dukun patah. Namun, upaya yang ditempuh itu tidak pernah berhasil, sementara harta-nya sudah ludes dijual untuk biaya pengobatan dan karena semua sudah habis, ia sekarang pasrah menunggu ajal datang menjemputnya.

Pengaduan hampir sama juga diterima oleh LSM YAPDA Lhokseu-mawe, seperti diakui Direktur Eksekutif Div Community Organizer Zulfi-kar MS dan Sugito Tassan. Katanya, lembaganya terus didatangi keluarga korban yang mengadukan nasibnya, mereka datang umumnya pendu-duk desa pedalaman dan petani miskin.

11. Ditembak, kemudian Kuburnya Dibongkar

Walau Zainuddin (27) sudah jadi mayat, namun ia masih mengalami penderitaan. Peristiwa yang dialami Zainuddin tersebut terjadi pada bulan Agustus tahun 1991. Warga Ulee Reubek, Seunuddon, Aceh Utara ini berangkat dari Bireuen menuju Pantonlabu (Aceh Utara) pukul 01.00 dinihari. Para peronda malam menangkapnya setiba di Pos Cempedak, Jambo Aye. Karena tak

merasa bersalah, ia melawan dan sempat dipukuli. Lalu, para peronda menggelandangnya ke *Meunasah* Cempedak. Sebagian yang lainnya memanggil polisi. Kemudian polisi datang, tapi korban melawan. Karena tampak garang, para peronda lalu memanggil anggota Kopassus di Alue Bili. Saat itu korban lari ke kebun. Anggota Kopassus langsung menembaknya secara membabi buta. Korban jatuh terkapar dengan tubuh yang bersimbah darah. Mayatnya dilemparkan ke parit di dekat balai pasar Ulee Ruebek Timur, sekira pukul 03.00 dinihari. Kemudian, masyarakat mengambil dan mengebumikan mayat tersebut. Esoknya, pukul 11.00 WIB kesatuan ABRI dari Korem Lhokseumawe datang ke TKP ingin mengambil foto korban. Tapi, karena telanjur dikubur warga, diperintahkan untuk dibongkar kembali. Setelah memfotonya, mereka pulang, dan warga mengubur Zainuddin kembali.

12. Ditembak dalam Sumur

Korban kebiadaban aparat yang didor di dalam sumur itu adalah Muhammad Juned (28), warga Rawa Itiek, Pantonlabu, Aceh Utara. Suami Rabiah ini, menurut istrinya kepada FP HAM, diambil aparat keamanan pada suatu hari di tahun 1990 di Desa Matang Ruebek. Dalam kejadian itu, Juned yang tak tahu apa salahnya, dikejar oleh aparat. Kakinya tersandung, lalu jatuh terperosok ke perigi (sumur). Di perigi itulah korban didor. Air sumur yang jernih sontak berubah memerah oleh kucuran darahnya. Masih dalam keadaan bergerak, Juned diboyong aparat naik mobil ke Lhokseumawe. Sejak itu sampai sekarang korban tidak diketahui bagaimana nasibnya. Oleh FP HAM, musibah yang menimpa Muhammad Juned ini digolongkan sebagai korban orang hilang, meski keluarganya menduga Juned sudah almarhum. Cuma saja kuburnya tak diketahui di mana.

13. Ditembak di Depan Umum

Imuem Sulaiman (40), mengalami hal yang tak kalah sadisnya. Warga Lueng Dua, Simpang Ulim, Aceh Timur ini mengalami nahas di tahun 1990. Saat itu, seperti dikisahkan adiknya, M. Daud (kini 40 tahun) yang melapor ke Peduli HAM, abangnya yang meninggalkan enam anak itu diambil petugas sewaktu kenduri di rumah *keuchik* setempat. Lalu dibawa ke Pos Lueng Puet, diinterogasi diikuti pukulan bertubi-tubi. Setelah itu, korban dibawa ke lapangan sepak bola. Di sini ia dipukul dan dipertontonkan kepada warga. Lalu, ia ditembak disaksikan ratusan warga sebanyak dua kali. Tembakan pertama pada kepalanya, dan tembakan kedua di bahu kirinya. Setelah roboh, petugas berlalu. Dan, jenazah korban dimandikan dan disembahyangkan secara Islam, lalu dikebumikan hari itu juga.

14. Penculikan Akibat Fitnah

Laporan “orang hilang” hingga 13 Juli 1998, mencapai 137 kasus. Sebagian kasus diduga kuat akibat fitnah antar masyarakat, fitnah politik atau salah informasi, bahkan ada aparat yang sengaja menyalah-gunakan wewenang dengan memanfaatkan status DOM. Tak terkecuali fitnah terhadap lawan politik, terutama menjelang Pemilu tahun lalu.⁵ Itulah sebabnya mengapa kasus-kasus pelanggaran HAM itu perlu diusut, supaya diketahui benar kesalahan korban. Nurdin Amin dari PPP ini mengakui, sejumlah “orang PPP” yang dikenal “bersih lingkungan” pun bisa diangkut akibat fitnah politik tersebut. Tapi, dari kasus yang dilaporkan masyarakat, memang bukan hanya simpatisan PPP yang jadi korban, tetapi ternyata ada juga “orang Golkar” ataupun politikus PDI. Tapi pada semua kasus itu terjadi pelanggaran HAM. Baik dari proses penangkapan, penyiksaan, maupun hukuman tembak yang tak melalui proses pengadilan. Hal ini yang sangat disesalkan.

Sebagai contoh korban fitnah bisa disimak dari cerita Puteh Idris (45), warga Sarah Panyang, Bandar Baru. Menurutny, M Abas Saleh, suami-nya, diculik April 1998 lalu, akibat tuduhan yang “salah alamat”. Si penculik menuduh suaminya menyimpan senjata atas laporan seorang “kaki tangan” penculik bernama M Yusuf (35), penduduk Desa Cubo, Bandar Baru. Semua tempat di rumah mereka yang berukuran 9 x 7 meter persegi itu digali, senjata dimaksud tak ditemukan. Ia yakin suaminya tak bersalah. Tapi, suaminya dibawa juga, dan sampai sekarang belum dikembalikan.

Sejumlah masyarakat yang melapor juga kerap menunjuk contoh kasus-kasus sejenis (terkait UU subversi) yang pernah disidangkan di pengadilan. Mengapa para korban sebelumnya tidak disidangkan saja, biar ketahuan apa kesalahannya? Juga, ada masyarakat yang telah membaca berita tentang dibebaskan atau “diampuni”nya sejumlah Napol/Tapol GPK di Banda Aceh atas instruksi “pemerintah reformasi”. “Mengapa anak saya tidak dilepas-lepas? Mohon perhatian pemerintah,” harap Usman Gade (80) dari Desa Seunong, Meuredu. Menurut Usman, dari pelacakan dia dan keluarganya, salah seorang anaknya yang diculik tanggal 5 Januari 1991 bernama *Keuchiek* Umar Usman (50) saat ini masih berada dalam tahanan di Medan. Sejak diculik, kata Usman, adiknya Umar yang bernama Samwi Usman (28) yang juga ikut diteror mulai ketakutan. Samwi yang tadinya simpatisan lalu lari ke hutan bergabung dengan GPK. Tak tahan, Samwi lalu resmi menyerahkan diri. Oleh Kades setempat, Samwi dibawa ke Koramil. Tanpa diduga, petugas langsung menembaknya hingga mati.

15. Dijadikan Perisai saat Bertempur Lawan GPK

Teungku Rahman Ali (70), warga Cot Baroh, Glumpang Tiga, Pidie, pada 1996 dibawa ke Pos Sattis Bilie Aron (*Rumoh Geudong*), ditembak (lalu diobati). Kemudian, disiksa lagi dan dibawa ikut operasi untuk ditempatkan di barisan depan (sebagai tameng tentara) saat menghadapi serangan atau menyerang GPK. Cara berperang seperti sangat melanggar Konvensi HAM Dunia dan konvensi tentang etika perang.

16. Tangan Dibedah, Ditetesi Air Cuka

Kisah miris lainnya menimpa Rosli (25), warga Bola Mas Tanah Jambo Aye, Aceh Utara. Menurut ayah korban, Samidan Ali, yang melapor ke Peduli HAM, anaknya itu pada suatu hari di bulan Agustus 1991 sedang menuju pulang dari Unit VI tempat dia bertani ke rumah mereka di Unit III. Dalam perjalanan itu dia ditangkap petugas keamanan. Selama tiga bulan tidak pulang-pulang ke rumah istrinya. Setelah mencari ke sana--kemari, memasuki bulan keempat, pelapor mencari anaknya itu ke Pos Bola Mas Unit III. Di tempat itu, ia temukan Rosli sedang bekerja paksa sebagai tukang masak. Setelah didesak Samidan, akhirnya anaknya itu dikembalikan. Tapi, menurut pengakuan Rosli kemudian, begitu ia ditangkap kedua matanya ditutup dengan kedua belah tangan diikat. Kepada petugas dia mengaku akan pulang ke rumah, menemui istri dan mertuanya untuk mengabarkan bahwa lahan sawah mereka yang dia garap selama ini sudah siap tanam. Tapi, penjelasannya itu tak digubris petugas yang justru menudingnya menanam senjata di suatu tempat. Karena tak bisa menunjukkan tempat senjata itu, ia dipukuli dan diten-dang. Sampai pada gilirannya, "Telapak tangan saya dibelah, lalu diperaskan air jeruk ke celah luka itu. Perihnya tak terbayangkan," ujar Rosli sebagaimana ditirukan ayahnya. Setelah siksaan itu ia lewati, Rosli tak diperkenankan pulang ke rumah, melainkan dikaryakan sebagai tukang masak di pos keamanan.

17. Mati Digantung

Penganiayaan yang dialami M Adam Puteh (55), penduduk *Meunasah* Cot Tunong, Simpang Tiga, yang diungkapkan kepada DPRD Pidie juga cukup menyayat hati. Pada tahun 1991, ia pernah digantung kepala ke bawah, kemudian dipukul dengan kayu, lalu ditendang dengan sepatu tentara.⁴ "Saya sudah ditahan, tapi tidak bisa melawan," kata M Adam yang juga hadir pada pertemuan dengan TPF DPR RI di Sigli. Selain itu, menurut pengakuan M Adam, ke dalam mulutnya juga pernah dimasukkan moncong senjata. Sampai menusuk ke tenggorokan dan berdarah. Seumur-umur ia mengaku tak pernah merasakan siksaan sedemikian parah itu. Menurutnya, penyebab ia ditangkap oleh oknum aparat itu hanya karena ia telah memotong buluh/bambu leumpang. "Mereka menyangka saya akan membuat leumpang untuk makan GPK. Karena di tempat itu memang tidak ada yang berani datang," kata M Adam. Padahal, katanya, rumpun buluh itu sudah dibelinya dari Keuchiek Saman dan akan dipotong untuk dijual ke pasar. Capek ia menjelaskan, oknum itu tidak percaya dan terus menyiksanya untuk mencari "pengakuan" seperti yang dituduhkan mereka. Aiyub Ismail (39), warga Simpang Aron, Glumpang Tiga, mengungkapkan, meski sudah dianiaya agar mati, namun ajal belum menjemputnya. Dikisahkan, pada tahun 1991, malam hari datang tiga oknum tentara dan langsung membawanya ke Pos Jiem-jiem dengan berjalan kaki. Sepanjang jalan ia sudah disepak dan dipukuli. Tiba di Pos, penganiayaan semakin dahsyat. Kedua tangannya pernah diikat dengan pemberat (batu) lalu dilempar ke sungai supaya tenggelam dan mati. "Mungkin ajal saya belum sampai. Setelah beberapa lama batu itu terlepas, dan *Alhamdulillah* saya timbul lagi," kenang Aiyub. Ia diangkat, dan masih terus disiksa sampai tengah malam. Esok harinya, Aiyub dilepas dengan pesan: Apa yang telah dialaminya tidak boleh diceritakan pada orang lain. Belum pulih benar kesehatannya, tiga bulan kemudian, ia diambil lagi. Kali ini Aiyub ditahan sampai tiga bulan (di Kota Bakti dan *Rumoh Geudong*), juga tak lepas dari siksaan.

18. Penyiksaan Massal

Jumlah pelaporan kasus "orang hilang" maupun tindak kekerasan di Pidie sampai 30 Juli 1998, mencapai 629 kasus. Angka ini merupakan gabungan antara laporan yang dicatat di DPRD Pidie (524 kasus) dan yang dicatat oleh para relawan dari FP-HAM (105 kasus). Kasus-kasus penyiksaan — baik yang disiksa, diperkosa, maupun ditembak/dibunuh (tapi tidak mati) — semakin terungkap dan mendominasi laporan. Korban-korban penyiksaan kian berani memberi kesaksiannya. Bahkan di satu desa, Blang Iboih, Langgien, Bandar Baru, Pidie, sedikitnya 30 warga (separuh jumlah penduduk desa itu) telah diangkut serentak oleh oknum dan dibawa ke Pos Sattis terdekat pada 1991. Di situ, mereka diperiksa sekaligus dianiaya guna mencari tahu keterkaitan mereka dengan GPK. "Berbagai jenis siksaan telah mereka alami," kata Zulkifli. Saking beratnya pukulan, salah seorang diantara ke-30 korban itu yang bernama Husen (32) diperkirakan telah meninggal dunia akibat penyiksaan. Karena ketika dibawa, jumlah mereka semua 30 orang. Pulangnya tinggal 29. Namun, mereka tidak tahu di mana kuburan Husen. Ke-30 warga Blang Iboih yang menjadi korban itu adalah A Gadeng (43), Husen Ubit (39), Zulkifli (35), Yusuf (40), Zakaria (40), A Gani (35), Usman (40), Johan (41), Ismail (32), Ismail (27), M Yacob (41), M Yunus (43), Husen (meninggal), Husen Mahmud (48), Ismail (50), M Yakob (40), M Yusuf (42), Zakaria Abdullah (34), M Thaleb (38), M Yusuf Abdullah (30), M Jafar (31),

Fatimah (52), Ainsyah (50), Maryam (47), Fatimah Ali (38), Ti Hawa (32), Sa'yak (38), Nurhayati (43), Hamidah (50), dan Muhammad Cut (39).

19. Kepala Dikuliti di Depan Anak

M. Yusuf (12), bocah Desa Buloh Blangara, Lhokseumawe, yang masih mengenakan pakaian sekolah SD ini menceritakan penculikan dan penganiayaan terhadap ayahnya, M. Jakfar, di rumah mereka, Desa Buloh Blangara, Kecamatan Kuta Makmur, Aceh Utara, tahun 1992. “Ayah saya diambil oleh tentara. Ayah dipukul, disepak, dan dihantam dengan bedil di kepala sampai kulit kepalanya koyak. Dia ditarik ke belakang, kemudian dilempar ke mobil. Kala itu usia saya baru enam tahun. Awalnya, malam itu saya bersama kedua orangtua sedang makan di rumah. Pintu depan diketuk dan setelah dibuka oleh ayah, langsung empat orang bersenjata (tentara) meninju dan menendangnya. Juga memukul ayah dengan popor senjata di kepala korban berkali-kali hingga kulit kepalanya sobek. Belum puas, dengan ganas penculik ayah mendekat dan menyobek kulit kepalanya. Ayah waktu itu terjatuh, dan kemudian penculik itu menginjak-injaknya. Dalam keadaan tak berdaya begitu, ayah masih dipukul, hingga kemudian diseret dan dilempar ke dalam mobil (tidak tahu jenis mobil itu). Saya dan Emak hanya menangis dan ketakutan sekali. Ayah saya dibantai sekelompok tentara. Saat itu, ayah hanya bisa berkata “bantu...” Dan saya hanya mampu meraung-raung. Sedangkan nasi yang masih tersisa dalam piring tidak sanggup lagi mereka kunyah. Malam itu saya tidak tidur dan menangis memikirkan ayah yang sudah dibawa dalam mobil. Saya ketakutan dan menangis. Ayah dilempar begitu saja seperti bangkai. Namun, ketika dibawa, ayah masih tampak bergerak dan mencoba menoleh ke belakang, namun kepala ayah dipukul lagi oleh penculik. Saya sangat kehilangan dan selalu menangis bila mengingat peristiwa itu. Sebab, ayah sangat akrab dengan saya selaku putra tunggalnya. Ayah juga secara rutin jika pulang ke rumah selalu membawa kue untuk saya. Sekarang ayah saya sudah tak ada. Ibu saya, Antikah, juga tak ada. Ia meninggal setelah sakit-sakitan dan trauma. Saya tak punya tempat tinggal seperti dulu. Untung ada yang mengangkat saya sebagai anak asuh.”

20. Sudah Jadi Korban, Keluarganya pun Ditipu

Nasib menyedihkan dialami seorang ibu bernama Khatijah (50). Menurut Kamariah (25), anaknya, pada 24 April 1998, pagi hari, rumah mereka di Desa Cot Baro, Glumpang Minyeuk, didatangi beberapa penculik. Mereka mengatakan bahwa di rumah Khatijah disimpan senjata. Dua kamar di dalam rumah digali, tapi tak ditemukan. Anehnya, malah mereka membawa Khatijah, dan sampai sekarang belum kembali. Meskipun keluarga Khatijah tahu bahwa Khatijah sudah tidak pulang beberapa lama, beberapa anggota keluarga korban berusaha untuk mencari korban yang hilang dengan cara-cara apapun juga. Mereka bahkan ikut jadi korban penipuan.

Kejadian serupa juga menimpa keluarga A Gani Abubakar (29), seorang pengusaha kopi bubuk kemasan di Bereunun yang diculik tahun 1991. Menurut Saudah (35), kakaknya, kedua orangtua mereka pernah memberi uang Rp 500.000 kepada Yusuf Macek yang menawarkan akan mengurus pembebasan A Gani. Uang itu, kata Yusuf, akan dibelikan perhiasan untuk istri si penculik. Tapi sampai sekarang A Gani tak kunjung pulang, dan uang itu pun tak kembali lagi. Pencarian Syamsiah Abdullah (60), warga *Meunasah* Mee Puedeuk Baroh, Tripa, mencari anaknya Ruslan Basyah (36) sampai ke Pantonlabu, Aceh Utara. Ceritanya, sejak anaknya diculik, 1 Desember 1991, Syamsiah enam kali bolak-balik ke sebuah kantor di Kota Bakti. Tetap tak bertemu. Kali terakhir, ia dikabarkan bahwa anaknya telah dibawa ke Desa Matang Guru, Panton Labu. Hari itu juga Syamsiah berangkat. Tiba di sana, dini hari, sang ibu diberitahu bahwa Ruslan—yang dikenali lewat KTP di saku celana—telah meninggal dunia dan dikebumikan di desa itu.

21. Suami Dibuang, Istri Disetrum

Di suatu hari tahun 1996 Idris (30), tamatan SMP, dipermak di Murong Cot, Kecamatan Sakti, Pidie, pukul 07.00 WIB. Sebagai warga yang pendiam, Idris tergolong nekat. Ia diketahui menanam senjata di dekat rumahnya atas suruhan orang lain dengan imbalan uang. Karena ketahuan petugas, Idris ditangkap dan digelandang ke Lamlo. Delapan bulan ditahan, kemudian ia dibuang di Cot Panglima di Takengon dengan tangan dan kaki terikat. Matanya ditutup. Tapi, menurut pengaduan istrinya, Rosmiati (28), Idris kemudian berhasil ke luar dari Cot Panglima dan mencapai rumah pada bulan Ramadhan tahun 1996. Setelah itu, menghilang lagi setelah pernah pulang pergi ke rumah sebanyak tiga kali. Belakangan, karena suaminya tak tertangkap, giliran si istri dibawa ke rumah Gedong Aron. Di situ Rosmiati ditelanjangi dan dikontak (maksudnya disetrum) sampai mengeluarkan kotoran. Yang menelanjanginya adalah Kopassus yang ia kenal.

22. Semua Gigi Dirontokkan

Teungku M. Yusuf Alibasyah, warga Blang Bunot, Bandar Baru, pada tanggal 5 Januari 1993 diambil paksa oleh dua orang petugas di Pos Sattis Jiem-jiem. Lalu dianiaya dengan cara mukanya dipukul berkali-kali sampai giginya rontok semua. Karena sulit mengunyah lantaran tak lagi bergigi, makanan umumnya dia telan langsung. Kini, (Juli 1998), ia sakit-sakitan.

23. Cacat Karena Dipukul dengan Balok

M Saleh Pakeh (32), warga Desa Lengkok, Sakti, pada tahun 1990 disiksa di Pos Sattis Tangse, kemudian di Pos Sattis Kota Bakti, Pidie. Ditahan 24 hari, disetrum, dan dipukul dengan balok sampai berdarah- darah. Ia bahkan pernah diobati Palang Merah Indonesia (PMI), namun kini mengalami cacat dan penuh bekas luka di badan.

24. Tulang Rusuk Dipatahkan

Ismail Usman (45), Cot Baroh, Glumpang Tiga, pada tahun 1992 di Pos Sattis Jiem-jiem dan Pos Sattis Kota Bakti, Pidie, dipukul dengan popor senjata, balok kayu, dan benda keras lainnya hingga kini mengalami tulang rusuk patah. Dadanya sesak dan pahanya sakit.

25. Digantung, Kepala ke Bawah

Umar Ibrahim (60), Cot Baroh, Glumpang Tiga, Pidie. Dikerjai di Pos Sattis Jiem-jiem, Pidie, pada Juni 1994. Ia digantung dengan kepala ke bawah, lalu direndam dalam air dan tinja, serta dihujani pukulan. Masih untung, ia masih bertahan hidup mesti mengaku sangat trauma dan merasa secara fisik sudah rusak di dalam.

26. Dipaksa Bersenggama dengan Tahanan Wanita

Penistaan seks juga dialami pemuda M. Taeb Hasan (20) baru-baru ini, pada suatu hari di tahun 1998. Warga Blang Sukon, Bandar Baru, Pidie ini datang mengadu langsung ke Tim Investigasi FP HAM, 27 Juli lalu. Ia diambil paksa dari kediamannya, lalu dibawa ke Pos Sattis Ulee Gle. Di sini ia diperiksa dan diinterogasi dengan berbagai pertanyaan yang bernada memposisikannya sebagai aktivis GPK. Karena mengaku tak tahu dan tak terlibat, Taeb dipukul dan ditelanjangi. Setelah itu ia dipaksa berbuat mesum dengan tiga wanita yang ditahan di pos tersebut. Dari sejumlah wanita janda yang juga dipaksa bertelanjang di tempat itu, Taeb akhirnya hanya mampu melayani dua orang. Karena tak memenuhi “target” yang diinginkan penculiknya, Taeb akhirnya disiksa. Begitupun, kepada FP HAM Taeb mengaku memang pernah melihat sekelompok orang yang tak dikenalnya melintas di kebun coklat yang ia tunggu. “Tapi, apakah mereka itu yang dikatakan GPK saya tak tahu, dan saya pun tak pernah berhubungan dengan mereka,” ujarnya.

27. Karena Persoalan Pribadi

Contoh kesewenang-wenangan lainnya adalah kasus penganiayaan berat yang dilakukan Pratu II, anggota Bataliun 131 Payakumbuh, Sumatera Barat, terhadap Ramli Abubakar (28), warga Desa Kambuk Nicah, Kunyet, Padang Tiji. Syukri Abdullah (30), abang korban, mengaku heran meski tak bertugas di Pidie, Pratu II ternyata bisa semena-mena menganiaya adiknya. Kejadian berlangsung 5 Maret 1995 saat Ramli sedang nonton teve di warung Bukhari, Desa Seunadu, Padang Tiji. Tiba-tiba masuk Pratu II yang baru datang dari Payakumbuh. Il yang ternyata teman korban semasa remaja itu menyimpan dendam pada Ramli. Menurut sejumlah saksi mata, Il waktu itu mengambil sebuah pompa sepeda dan langsung memukuli kepala korban hingga retak dan mengeluarkan banyak darah.⁶ Sebelum pulang ke Payakumbuh, menurut Syukri, Pratu II sempat mengancam akan “menghabisi” keluarga mereka kalau dia datang lagi nanti. Karena itu, pihaknya telah berulang kali melaporkan kasus itu ke Koramil Padang Tiji, Kodim 0102 Pidie, Sub Den-POM, dan instansi terkait lainnya. Namun oknum ABRI yang diduga bersalah itu sejauh ini tak kunjung diproses, hanya lantaran alasan DOM. “Padahal, kasus ini jelas-jelas karena persoalan pribadi,” sebut Syukri. Ia hanya berharap DPRD Pidie bersedia “mengangkat” kasus itu, sehingga pelaku penganiaya adiknya dapat ditindak. “Adik saya sudah sakit saraf. Uang kami sudah jutaan rupiah habis untuk pengobatannya,” papar Syukri.

28. Sudah kehilangan Suami, Malah Difitnah Secara Sistematis dengan Surat

Sejumlah janda (tepatnya istri, karena belum dipastikan suaminya meninggal) yang telah melaporkan kehilangan suaminya di DPRD Pidie beberapa waktu lalu, serentak menerima “surat dari suaminya” yang seolah dikirim dari Batam, Riau.⁷ Mereka yang menerima “surat dari Batam” itu semuanya warga Kecamatan Mutiara, Pidie. Masing-masing Aminah Ali, warga Desa Sentosa, dari suaminya Syarwan T Ahmad. Nyak Ubit (dari suaminya Ayub Ali), Dariati Saleh (dari suaminya Jafar Abdullah), dan Khatijah Cut (dari suaminya Kaoy Ahmad), ketiganya penduduk desa paloh Tinggi.

Menurut pengakuan para wanita itu, masing-masing mereka mene-rima surat secara terpisah. Begitu menerima surat, hati mereka sempat berdebar-debar. Tapi, setelah surat dibuka, kentara sekali bahwa surat itu direkayasa. Mereka bisa memastikan ini dari tanda tangan suami masing-masing dengan mencocokkannya pada tanda tangan asli di surat/akte maupun KTP suami. Satu sama lain wanita itu kemudian bertemu di rumah Dariati yang sementara dinobatkan sebagai “pimpinan” dari kelompok janda-janda di Kecamatan Mutiara. Mereka lalu menghubungi yang lainnya. Ternyata, baru empat “surat dari Batam” yang diterima mereka. “Ini surat palsu. Tanda tangannya palsu. Saya tahu betul itu bukan tanda tangan suami saya. Disangkanya kami bodoh, mau ditipu- tipu begitu,” kata Dariati di Sigli. Ketiga temannya mengiyakan dengan penuh emosi

campur sedih. Keempat surat itu isinya senada (namun tak persis sama) itu memang kentara sekali janggal dan seakan sengaja direkayasa. Surat itu dikirim melalui pos. Namun, cap kantor posnya bukan berasal dari Batam. Berstempel pos tanggal 8 Juli 1998.

Sementara kesaksian diberikan para janda saat penculikan suami mereka—oleh aparat negara. Membandingkan hurufnya, keempat surat itu kemungkinan diketik dari mesin tik yang sama. Yang lebih janggal, tanda-tangan Syarwan TA, Ayub Ali, Kaoy Ahmad, maupun Jafar Abdullah yang tertera di surat ternyata sangat berlainan dengan aslinya. Melihat tanda tangan itu, Nyak Ubit malah sempat berfirasat bahwa suaminya telah dibunuh. Karena, menurutnya, kalau memang masih hidup—misal dalam tahanan—pasti si penculik akan memaksa suaminya, Ayub Ali, untuk menanda-tangani “surat dari Batam” tersebut. “Tapi, tekanan itu jelas bukan tekanan suami saya. Biarlah, kalau sudah mati saya akan pasrah. Tapi, pemerintah bisa menunjukkan dimana kuburannya,” pinta ibu dari lima anak yang masih kecil-kecil ini, sedih. Berikut surat “dari Syarwan T Ahmad” untuk Aminah (dikutip persis aslinya):

Peurumoh ulon njang ulon gaseh beuna na sabee dalam lindong Allah. Assalamualaikum Wr. Wb. Dengon suratnyoe lon bi thee bak gata lon na dalam lindong poe teuh Allah. Meunan cit gata bandum dji noe. lon dji noe na di Batam gata bek susah lon akan lon jaga droe. beu neu teu peu lon teungoh dji mita oleh kafee jawa sehingga dji noe lon jakpeu siblah droe keu deeh u batam karna di deh aman. meunyo na di jak kafee nyan u rumoh ta peugah hana ta tuhoo bek ta meu teu eeh sapee. droe neuh ban mandum njang na dji gampong bek susah doa droe neuh mandum keu ulon. Lon akan lon lanjut perjuangan nyoe sampoe selesai. oh no keuh mantong dji lee, leu beh ngon kureng lon lakee mueah.

Wassalamualaikum Wr. Wb. Amin.

(tanda tangan palsu).

Syarwan T. Ahmad.

Tiga surat lainnya bernada sama. Hanya penempatan kalimatnya yang berbeda-beda. Umumnya terdapat kata-kata yang menyiratkan hasutan, memecah-belah persatuan. Semacam “lon akan lanjut perjuangan nyoe” atau “kafee Jawa” dan sejenisnya. Yang menonjol, pada semua surat tercantum pesan “bek peugah sapeu”. Sehingga, siapa pun yang memba-canya dapat meraba-raba siapa pengirimnya. Kalimat “lon akan lanjutkan perjuangan nyoe” pada surat yang dikirim Ayub Ali juga dinilai aneh oleh istrinya. Menurut Nyak Ubit, suaminya itu tak pernah terlibat GPK. Hanya selama hidup, suaminya terkenal kritis di desa. Penyimpangan uang desa sering diprotes Ayub. “Mungkin ada yang tidak senang, lalu memfitnah suami saya GPK,” ungkapnya. Begitupun, meski kritis, toh mereka takut juga akan “ancaman Pemilu” lalu. “Karena takut, kami satu kampung semua coblos Golkar,” tambah Nyak Ubit.

Seorang istri/janda lainnya juga menerima sepucuk “surat dari Batam” yang seolah dikirim dari suaminya yang telah dilaporkan hilang. Surat itu diterima oleh Faridah Amin (25), penduduk *Dayah* Tanoh, Muti-ara, Pidie, dari “suaminya” Syarifuddin Asih.⁸ Sampai tanggal 20 Juli 1998, sudah lima “surat dari Batam” yang diterima oleh para istri korban “orang hilang” di Pidie. Sebagaimana empat surat yang datang sebelum-nya, surat Faridah itu juga dilaporkan ke DPRD Pidie. Faridah menerima surat tersebut 18 Juli 1998 melalui pos. Cap kantor posnya bukan berasal dari Batam. Berstempel pos tanggal 8 Juli 1998. Tanda tangan Syarifuddin dalam surat tersebut juga dinilai palsu, karena berlainan dengan aslinya. Isinya juga senada dengan empat surat sebelumnya. Antara lain, “Syarifuddin” minta supaya Faridah tenang di kampung menunggu ia pulang dari Batam. Dia sedang menyelamatkan diri. Kalau ada yang mencarinya, jangan ceritakan apa-apa.

Surat rekayasa itu ditulis—juga memakai mesin tik—dalam bahasa Aceh dengan tata bahasa yang kacau-balau. Surat yang sama sebelumnya diterima Aminah Ali warga Desa Sentosa dari suaminya Syarwan TA, Nyak Ubit dari suaminya Aiyub Ali, Dariati Saleh dari suaminya Jafar Abdullah, dan Khatijah Cut dari suaminya Kaoy Ahmad.

Mereka pun telah melaporkan perihal “surat dari Batam” itu ke Sub Den POM setempat serta ke DPRD Pidie. Sayangnya, di DPRD Pidie, anggota dewan dari Komisi A yang selama ini bertugas mencatat kasus “orang hilang” hari itu tak satu pun mereka temui. Menurut seorang pegawai, sebagian anggota dewan sedang rapat dengan Dandim di Makodim 0102 Pidie, dan sebagian lainnya ikut Rakorbang.

29. Status Wajib Laporan yang Tak Jelas

Dari banyak laporan masyarakat, status “wajib lapor” itu ternyata cukup merepotkan. Lebih-lebih selama krisis ekonomi. Meski kesalahan belum jelas, namun mereka terpaksa meninggalkan kerja, mengeluarkan ongkos untuk labi-labi, juga ongkos RBT, hanya untuk menghadap ke Pos Sattis yang ditunjuk. Harapan dihapuskannya “wajib lapor” juga dikemukakan Sulaiman Gade (56) dan anaknya M Rafi Sulaiman (36) warga Pantan Raya, Tripa. Cut Ali Rani (52) dan Ibrahim Asyik (63), keduanya warga *Dayah* Teumanah, Tripa. Bahkan juga sudah diikutkan penataran P-4 segala, tetap wajib lapor seminggu sekali sampai sekarang.

Tentang penataran P-4, baik Cut Ali maupun Ibrahim menyindir. Bahwa seharusnya oknum-oknum aparat itu dulu ditatar P-4, kalau perlu ditatar bagaimana menjadi manusia. Para penyiksa ternyata tidak semua aparat. Beberapa nama penyiksa di *rumoh geudong* ternyata warga setempat yang dijadikan TPO (tenaga pembantu operasi) sekaligus tukang pukul. Menurut kesaksian Ibrahim Thaeab (41), tukang jahit, warga Ulee Tutui, Mutiara, sedikitnya empat TPO (berinisial Is alias R, Sai, dan Ad) dan enam aparat Pos Sattis Bilie Aron (Har, To, Nas, Sas, Fai, dan Pra) telah menyiksanya secara sadis sejak tanggal 18 Maret 1998 hingga 30 Mei 1998. Selama dua bulan 12 hari itu, ia pernah dipukuli dengan rotan, ekor ikan pari (nampak berbekas nyata di dadanya), atau dipukuli balok kayu. Lain waktu, Ibrahim ditelanjangi, disetrum (pada kemaluan, hidung, dan beberapa tempat), diikat seperti salib. Giginya bahkan pernah dicabut dengan tang. Pernah beberapa hari Ibrahim tak dikasih makan. Akibat penyiksaan di *rumoh geudong*, ia kini menderita lumpuh pada kaki sebelah kiri. Ibrahim berharap adanya perhatian pemerintah terhadap korban-korban seperti dirinya.

30. Ayah Dibunuh di Sebuah Rumah di Desa Lain

Keadilan bagi Herawati Hamid (21) baru sebatas mimpi. Untuk mencari tahu siapa pembunuh ayahnya, Hamid Itam (50), ternyata tak cukup mengandalkan Kepolisian maupun Polisi Militer. Ia bersama pamannya, Usman Itam (40), adik kandung Hamid, selama dua tahun ini sudah pontang-panting mengusut sendiri.⁹ Tak sedikit tantangannya. Bahkan Usman sendiri pernah didatangi sejumlah oknum Kopasus ke rumahnya di Desa Tampiang Baroh, Indrajaaya, beberapa waktu lalu. Kedua oknum itu minta ia menghadap atasan mereka di Pos Sattis Kota Bakti. Usman menolak. Ia pun diajak ke seorang paranormal untuk men-cari tahu siapa pembunuh Hamid Itam sebenarnya. Tapi tetap dia tidak mau. Kalau memang dia juga harus mati. Biar mati di rumah saja.

Didampingi pengacaranya, Iskandar Ishak SH (direktur LBH Seura-moe Makkah, Sigli), menceritakan hasil pengusutan mereka. Sebagian keterangan diperoleh dari saksi-saksi, sebagian juga dari sumber di kalangan polisi penyidik. "Ayah saya bukan dibunuh di Gunung Gurutee, tapi di Pidie. Di sebuah rumah di Kelurahan Blang Asan. Ada saksi yang mendengar tembakan itu," tutur Herawati, mahasiswi Akademi Manaje-men Informatika dan Komputer (AMIK) Jabal Ghafur, Pidie. Diceritakan, pada hari terakhir di Sigli, 13 September 1996, almarhum Hamid Itam yang seorang pegawai Setwilda Pidie pamit dari rumahnya sekitar pukul 17.00 WIB menuju Kota Sigli. Tapi ia tak kunjung pulang lagi.

Baru esoknya, tersiar kabar mayat Hamid Itam ditemukan mati tertembak di Gunung Gurutee, Aceh Barat. "Sejak meninggal ayah, kami cuma sekali—pada hari keempat kematian—dipanggil polisi untuk dimin-ta keterangan. Setelah itu tak ada kabar lagi. Bagaimana hasil penyelidikan-kannya, sudah dimana kasusnya tak pernah diberitahukan lagi," tutur Herawati. Muncul ide dari Usman untuk mengusut sendiri. Ia mengingat kembali cerita-cerita abangnya tentang sejumlah orang yang "memusuhi" Hamid. "Sebelum meninggal, Bang Hamid pernah cerita bahwa ia bertengkar di dengan Pak BR (disingkat) di Kantor Bupati. Menurut abang, Pak BR yang dikenal dekat dengan bupati sempat mengancam-nya," ungkap Usman, penjahit di Kios Saumi, Caleu. Usman menilai pertengkaran itu serius. Mengingat selama ini almarhum tidak pernah ribut dengan orang lain, dan jarang bercerita kalau ada persoalan. Pengusutan dimulai dari ke sebuah warung kopi Nescafe di depan Hotel Paris, Sigli. Menurut saksi, abangnya sorenya sedang minum kopi dengan beberapa teman. Tiba-tiba datang sejumlah orang—termasuk pengusaha AK (juga dikenal dekat dengan Bupati dan BR), serta oknum aparat— dan langsung membawa Hamid dengan sebuah mobil taft milik seorang pengusaha, famili bupati. Hamid dibawa ke sebuah rumah di Blang Asan. Menurut Usman, saksi kunci yakni seorang pesuruh di rumah itu melihat dan mendengar jelas suara tembakan pada malam harinya, yang mem-buat Hamid meninggal seketika. "Saat ini saksi itu masih ada. Dia dibawa oleh Pak Suwahyu (waktu itu Kapolda Aceh) ke Surabaya," ungkap Usman. Penembak abangnya diduga seorang "pembunuh bayaran" dari kalangan oknum ABRI berinisial FP. Meski telah berusaha dilacak, Usman mengaku sulit mencari data dimana FP berada saat ini.

Yang jelas tidak lagi di Pidie. Mayat Hamid Itam kemudian diangkut dan dibuang ke Gunung Gurutee, Aceh Barat (menurut Usman, tindakan ini diduga untuk mengaburkan TKP). Tuhan berpihak kepada mereka. Mayat yang dilempar itu tak sampai jatuh ke jurang Gurutee melainkan tersangkut di akar pohon. Konon karena para penculik/pembunuh itu dalam keadaan terburu-buru, dan kebetulan ada kendaraan lewat. Usman mengakui tidak tahu pasti keterlibatan Bupati Djakfar Is dalam kasus ini. "Itu hanya keyakinan hati saya, setelah dikait-kaitkan dengan siapa-siapa yang ikut terlibat serta persoalan yang dipertengkarkan oleh Hamid dengan BR. "Saya semakin curiga kepada Pak Bupati ketika membaca sebuah berita tentang kematian anak kecil akibat termakan obat cacing PMTAS tahun lalu. Bupati waktu itu minta kasus tersebut diusut tuntas. Tapi mengapa bupati tak pernah menyuruh usut tuntas kasus kami. Bukankah Bang Hamid adalah pegawainya di Kantor Bupati?" papar Usman Hamid. Diakui, Djakfar Is dan rombongan dari kantor bupati pernah datang ke rumah duka pada hari kedua, dan menyerahkan "uang duka" sebanyak Rp 500.000. Padahal, bukan uang yang penting. Yang sangat diharapkan keluarga korban adalah terung-kapnya kasus tersebut, sehingga pelaku pembunuhan Hamid Itam agar segera diproses—tidak lagi "dipending"—dan mendapat hukuman setimpal.

Kini, harapan itu mereka titipkan kepada Komnas HAM, disamping pengacaranya di Sigli. Kronologis kejadian pembunuhan versi pengu-sutan keluarga korban itu telah mereka (ditanda-tangani Usman dan Herawati) kirim ke Komnas HAM di Jakarta, dengan tembusan kepada 25 pihak/lembaga. Diantaranya kepada Mendagri, Kejaksaan Agung, Menhankam/Pangab, Kapolri, Pangdam I/BB, Gubernur Aceh, Kapolda, Danrem 011/LW, Danrem 012/TU, dan yang terkait lainnya.

31. Pembantaian Besar-besaran Seperti Membunuh Hama

Dari jumlah sementara laporan “orang hilang”, tindak kekerasan, dan sejenisnya yang dilaporkan masyarakat di Pidie, Aceh Utara, dan Aceh Timur hingga 27 Juli 1998 yang mencapai puluhan ribu seperti jumlah hama saja layaknya. Terdapat fakta yang cukup menggugah. Kasus “mati tak wajar” di daerah ini mayoritas terjadi tahun 1990-1991. Selama dua tahun itu telah terjadi pembantaian besar-besaran di daerah “Serambi Mekah” ini.¹⁰ Di Pidie dari jumlah 375 kasus, sedikitnya 102 jiwa ditemukan telah menjadi mayat. Dan, dari jumlah 102 ini, sekitar 80 persen diantaranya adalah kasus yang terjadi tahun 1990-1991. Untuk kasus “orang hilang” yang di DPRD Pidie mencapai 131 kasus, 60 persen diculik antara 1990-1991. Pelaku pembunuhan—maupun kasus-kasus “orang hilang” dan tindak kekerasan lainnya di Pidie diperkirakan lebih 95 persen kasus, diduga—dan menurut keterangan saksi dan keluarga— pelaku penembakan dilakukan oleh oknum ABRI.

Sebaliknya di Aceh Utara, seperti pengakuan Ketua DPRD Aceh Utara Mas Tarmansyah, sehari sebelumnya, bahwa 60 persen kasus “orang hilang” dan tindak kekerasan yang terdata di DPRD Aceh Utara diakuinya dilakukan oknum ABRI, dan 40 persen didalangi GPK. Di antara kasus-kasus kematian di Pidie, sejumlah pelapor mengaku cukup mengenali pelaku penculik atau setidak tempat tugas penculik.

32. Nyaris Menyerupai Siksa Kubur oleh Malaikat Berbaju Loreng¹¹

M Saleh Pakeh (32), warga Desa Lengkok, Sakti, pada tahun 1990 disiksa di PS Tangse dan PS Kota Bakti. Ditahan 24 hari, disetrum, dipukul dengan balok sampai berdarah, dan pernah diobati PMI. Kini mengalami cacat dan penuh bekas luka di badan.

33. Disekap Terpencar, Korban Penculikan 1998 Ternyata Masih Hidup

Sebagian korban penculikan pada tahun 1998 ternyata dikabarkan masih hidup, dan kini disekap dalam tahanan yang tersebar di beberapa tempat secara tersembunyi. Karenanya, petugas dari Detasemen Polisi Militer (POM) diminta segera melacak dan menyelamatkan korban. Di antara beberapa laporan masyarakat maupun hasil pelacakan anggota Komite untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) Pidie, diduga—beberapa terlihat nyata—sebagian korban penculikan itu masih hidup. Belum “dihabisi” semua seperti disinyalir banyak pihak.¹² T. Syamsul Ali dan Awaluddin dari Kontras Pidie yang mengaku selama ini ikut “memata-matai” beberapa Pos Sattis sekaligus menjaring informasi dari warga sekitar, mengatakan ada dua korban penculikan 1998 disekap di kawasan Padangtiji. Beberapa sudah dipindahkan ke Rancung, Lhokseumawe. Karenanya, mereka sangat berharap petugas dari POM dapat melacak sekaligus menyelamatkan para korban itu. Informasi apalagi yang dibutuhkan petugas? Apa perlu masyarakat disuruh menggerebek ramai-ramai—yang justru merupakan tindakan melanggar hukum. Salah seorang korban dipergoki masih hidup di Pos Sattis Tringgadeng. Tahanan itu nampaknya sakit-sakitan, mungkin sudah lumpuh. Warga yang tak bersedia ditulis namanya ini mengaku sering bertandang ke Pos itu karena “terlanjur” berteman dengan anggota Kopassus setempat.

Sejumlah warga di sekitar *Rumoh Geudong*, Teupin Raya, menginformasikan bahwa ketika Tim Pencari Fakta (TPF) DPR RI berkunjung ke *Rumoh Geudong*, sebagian tahanan sudah lebih dulu diungsikan ke beberapa tempat. Ada yang ditampung sementara di rumah penduduk di Glumpang Tiga maupun yang dipindahkan ke Pos Sattis lain di Pidie. Begitu TPF berangkat, tahanan pun dimasukkan lagi ke rumah besar yang dikenal sebagai “camp” penyiksaan itu. Lainnya tetap ditempatkan di Pos Sattis yang tersebar di Pidie. Namun, dalam keterangannya kepada TPF DPR RI, Danpos Sattis Bilie Aron Lettu Sutarman mengatakan sejak ia bertugas di *Rumoh Geudong*, 14 Mei 1998, tak satu orang pun ditahan di situ. Pengakuan ini ternyata tak mendapat dukungan dari sejumlah korban penyiksaan di *Rumoh Geudong*. Kepada DPRD Pidie, mereka melaporkan bahwa sebagian mereka ada yang dibebaskan pada sepan-jang Juni 1998.

Menurut T. Syamsul dan Awaluddin, aksi mereka melacak tempat penyekapan korban penculikan di beberapa tempat selama ini tak jarang dibantu informasi dari keluarga korban. Dalam sepekan terakhir, para keluarga korban—terutama kasus penculikan 1998—tampak cukup bersemangat melacak jejak korban “orang hilang” itu. Bahkan kepada Dubes Australia Jonh McCarty dan rombongan yang berkunjung ke Glumpang Tiga, pun sempat dimintai bantuan mencari korban. “Tolonglah, Pak. Dimana anak saya? Katanya di Rancung, Pak. Tolong disuruh kembalikan anak saya,” pinta Rosmawati, warga Blang Malu, Mutiara, menghibah-iba. Ibu dari Zufikar Fathul Ali yang diculik 26 Maret 1998 itu tak peduli meski dikatakan bahwa kedatangan Pak Dubes bermisi sosial ekonomi.

34. *Rumoh Geudong* (Rumah Aceh) Dibakar

Laporan “orang hilang” maupun pelanggaran HAM lainnya, termasuk rumah yang sengaja dibakar oknum yang tercatat di DPRD Pidie sampai tanggal 20 Juli 1998 mencapai 261 kasus. Hari itu saja jumlah pelapor sampai 50 orang. Yang menarik, di antara rombongan pelapor terdapat keluarga dari Hamid Itam (45), pegawai Setwilda Pidie, korban penculikan dan penembakan—diduga oleh oknum aparat—pada 1996 lalu. Kasus ini pernah diusut, tapi kemudian “dipending” oleh Polda Aceh. “Kami berharap, DPRD mau memperjuangkan supaya kasus ini diangkat lagi dan ditindak-lanjuti,” pinta adik kandung Hamid, Usman Itam (40) kepada anggota Komisi A DPRD Pidie. Usman lalu menceritakan kronologis penangkapan dan penganiayaan sampai abangnya meninggal di sebuah rumah di Kota Sigli, baru mayatnya “dibuang” ke Gunung Geurutee, Aceh Barat. Dari laporan tambahan yang kini mencapai jumlah 261, baik kasus “orang hilang”, “mati tak wajar”, penganiayaan, dan lain-lain semuanya bertambah. Sedikitnya 31 rumah—mayoritas jenis *rumoh* Aceh—di daerah itu telah dengan sengaja dibakar oleh oknum aparat.¹³ Alasan pembakaran umumnya karena penghuni rumah tidak bisa menunjukkan dimana orang yang dicari petugas. Tapi, anehnya, dalam beberapa kasus, rumah dibakar justru setelah “orang yang dicari” sudah ditemukan lalu dibawa. Akibatnya, istri maupun para anak yatim yang ditinggal, tidak hanya kehilangan suami/ayah tetapi sekaligus kehilangan tempat tinggal. Para janda umumnya terpaksa menumpang di rumah keluarga atau kerabat di desa tersebut. Atau pulang ke rumah orangtua/mertua. “Kami minta pemerintah mengganti rumah kami yang dibakar,” pinta Puteh Di (60), warga Cot Kuyet, Padang Tiji. Menurut-nya, setelah suaminya ditembak dan meninggal pada 1991, sang penembak lalu membakar rumahnya serta rumah anaknya (berdampingan). Tak cukup puas, para oknum itu juga kembali mengambil Basri (35), anaknya itu, pada November 1992 dan sampai sekarang belum dikembalikan. Sejak itulah, kata Puteh, ia tidak hanya harus menanggung makan anak-anak dan cucunya, tapi juga membuat “gubuk” darurat untuk tempat tinggal dua keluarga itu di desa setempat. Mengingat banyaknya permohonan mengganti rumah inilah, DPRD Pidie mengharapkan Pemda Pidie segera memikirkan upaya pengadaan rumah bagi masyarakat yang kini berstatus “tunawisma” itu. “Pemda harus bertanggung-jawab,” kata Teungku Yunus Cut, sekretaris Komisi A DPRD Pidie. Salah satu saran yang diusulkan DPRD, sebaiknya kayu-kayu curian hasil tangkapan Dinas Kehutanan setempat nantinya tidak lagi dilelang. Melainkan dapat dimanfaatkan untuk membangun rumah sederhana bagi para “tunawisma” itu. Apalagi mengingat sebagian besar mereka umumnya janda dan anak yatim yang logikanya sulit membangun rumah sendiri. Karenanya, Dishut Pidie diharapkan lebih berperan, sehingga pengawasan hutan dapat diperketat disamping pengadaan rumah korban operasi militer itu pun dapat segera terwujud. Korban pembakaran rumah yang umumnya terjadi antara tahun 1990-1998 diantaranya rumah Nurmala Sulaiman (35) di Beureueh, Teungku Alibasyah Amin (30) di Desa Sinbe, Abdurrahman M Ali di Gumpueng, ketiganya di Kecamatan Mutiara. Di Kecamatan Tringgadeng Panteraja meliputi rumah M Rafi Sulaiman (36) di Panton Raya, Salamah (80) di Panton Raya, Cut Ali Rani (52) di *Dayah* Teumanah, Ibrahim Asyik (63) di *Dayah* Teumanah, M Abbas Rasyid (67) di Tamphoi Panton, Usman Hamzah (50) di Tamphoi, dan Khatijah di *Dayah* Teumanah. Di Kembang Tanjong, terdiri dari rumah Rasyidah/Abdul Yunus di Pasi Lhok, Syahbuddin/Nurmala di Pasi Lhok, Ummi Kalsum di Lancang, Ilyas Ahmad/Maimunah di Lancang, dan rumah Maryani Umar. Di Glumpang Tiga, rumah Safiah (46) di Cot Tunong, Madinah Abdullah (60) di Amud Masjid, Rosdini (38) di Desa Kupula, dan beberapa lainnya. Rumah Puteh Di (60) di Cot Kuyet, dan Basri (35) di Cot Kuyet, keduanya di Padang Tiji juga menjadi korban pembakaran oleh petugas yang disaksikan warga setempat. Di Kecamatan Delima, rumah dibakar baru dilaporkan milik Burhanuddin Usman (40) di Ciri Blang Mee.

35. Sudah Menjadi Korban pun Masih Diteror

Menurut catatan, salah seorang korban perkosaan, Nyak Maneh Abdullah (35) beberapa hari lalu juga sempat mendapat teror dari seorang *cuak* yang diduga atas suruhan para oknum Kopassus. Waktu itu, rumah Nyak Maneh di Desa Rinti, Mutiara, sempat didatangi sejumlah oknum dengan mobil. Hanya satu orang—TPO alias *cuak* di *Rumoh Geudong* bernama Is alias R—yang turun menjumpai Nyak Maneh. Para oknum aparat menunggu di mobil. Nyak Maneh ditanya, siapa yang menyuruh lapor-lapor ke DPRD. Jawabnya, ia sendiri yang lapor, karena banyak orang kampung sudah lapor dan ia tidak takut lagi sekarang. R menanyakan beberapa pertanyaan lagi dengan nada mengancam. Belakangan diketahuinya, ternyata Kepala Desa (Kades) Rinti setempat juga sudah lebih dulu diinterogasi oleh beberapa oknum aparat yang cukup dikenal oleh Pak Keuchiek. Nyak Maneh memang tidak diapa-apakan, tapi ia merasa takut juga, dan beberapa malam ia tidak tidur di rumah.

Pasi Intel Kodim 0102 Pidie Letda Inf Suyanto menegaskan apabila memang ada pelapor yang diteror atau sekadar ditanyai demikian, dipersilakan melapor ke Kodim 0102 Pidie. Suyanto tetap menjamin keamanan setiap pelapor dan tak perlu takut, seperti ketika ia—mewakili Dandim—menegaskan hal itu di hadapan TPF DPR RI di Sigli. Tegus Suyanto, kalau yang meneror itu oknum aparat, sebaiknya kenali nama, dari pos mana, kalau perlu pangkatnya apa, supaya gampang dipanggil.

Sejumlah Pos Sattis (PS) di Pidie, sudah mulai kosong. PS Padangtiji, PS Bilie Aron, PS Kota Bakti, PS Jiem-jiem, dan PS Pintu I Tiro, terlihat berkemas-kemas berangkat menuju Lhokseumawe. Malah dikabarkan, penghuni PS Tringgadeng dan PS Ulee Glee sudah lebih dulu minggat. Keberangkatan anggota pasukan elite itu disambut gembira oleh masya-rakat. Begitupun, banyak warga yang menyaksikan kepergian mereka dengan tatapan sinis. Seperti yang terjadi di PS Bilie Aron. Warga sekitar *Rumoh Geudong* dari balik pagar melihat kepergian “para oknum” itu dengan sinis. Sebagian mengumpat, dan sebagian mengucapkan syukur. “Bagaimana tidak bersyukur. Kami sudah tak sanggup lagi mendengar dan menyaksikan orang-orang disiksa di *Rumoh Geudong* itu. Kalau malam, tidur kami sering terganggu karena mendengar jeritan-jeritan orang yang disiksa. Atau mendengar lagu-lagu dari tape yang diputar keras-keras waktu penyiksaan,” tutur seorang warga Desa Aron. Bahkan, setelah berangkat para oknum itu pun ternyata masih meninggalkan sebetuk penderitaan lain.

Menurut anggota keluarga pemilik *Rumoh Geudong*, oknum Kopassus itu meninggalkan hutang jutaan rupiah. Bayangkan, enam bulan rekening telepon belum dibayar. Mereka menyuruh masyarakat untuk menagih pembayarannya kepada bupati. Menurut catatan, tak sedikit Pemda Pidie mengeluarkan dana untuk biaya operasional Kopassus, termasuk reke-ning telepon, listrik, sewa rumah, kendaraan, dan sebagainya selama DOM. Sumber di Setwilda Pidie menyebutkan, tunggakan telepon di Mess Kopassus di Blang Asan yang mencapai Rp 7 juta tahun 1997 lalu pun sampai sekarang belum lunas. Ditambah lagi rekening telepon di tujuh Pos Sattis lainnya.

36. Hilang tak Berbekas Setelah Dijemput Petugas 8 Tahun Lalu

Kasus kehilangan Apa Don, penduduk Jalan Sukaramai Lhokseu-mawe, akhirnya diadakan isteri bersama dua putrinya ke DPRD Aceh Utara. Kepada anggota Komisi A, keluarganya mengungkapkan, Apa Don yang bernama asli Zulkifli itu hilang tak berbekas hampir delapan tahun sejak dijemput lima oknum petugas, di kediamannya, 3 Nopember 1990.¹⁵ Menurut isterinya, Ely Zohra (45) yang didampingi dua putrinya, Dewi dan Fifi, kepada anggota Komisi A DPRD setempat, Apa Don dijemput oknum petugas tersebut dengan menggunakan mobil Taft sekitar pukul 21.20 WIB. Para penjemput, dilaporkan, tidak bersedia menjelaskan ke mana Apa Don hendak dibawa. Karena sampai Minggu sore tak kembali, tutur Ely Zohra, ia melaporkan kasus penjemputan misterius itu ke Kodim Aceh Utara dan Korem 011/Lilawangsa. Kedua institusi militer tersebut, katanya, juga tidak dapat memberikan informasi tentang ke mana raibnya Apa Don.

Ketua DPRD Aceh Utara, H. Mas Tarmansyah, membenarkan Komisi A yang menangani pelaporan orang hilang telah menerima pengaduan dari keluarga Apa Don. Sejauh itu, ia belum bisa memastikan apakah Apa Don dijemput oknum petugas atau anggota GPK. Namun, menurut isterinya kepada anggota Komisi A, penjemput diduga oknum petugas. Baik Ely Zohra maupun kedua putrinya yang datang mengadu ke DPRD mengaku meski suami dan ayahnya telah hampir delapan tahun hilang, namun hingga saat ini mereka belum bisa melupakan peristiwa itu. Karena kehilangan kepala keluarga mereka itu tak berbekas dan sangat misterius. Sampai sekarang Dewi masih bertanya-tanya, apakah ayahnya sudah meninggal atau masih hidup.

Kepada Anggota Komisi A yang hadir, antara lain Ketua Komisi Letkol CPM Anwar AS, Sofyan Ali, Zulfan Adamy, dan Sekretaris Komisi, Agustiar, ketiga anggota keluarga Apa Don meminta kasus kehilangan suami dan ayah mereka itu dapat diusut dan diungkapkan. Sehingga mereka sekeluarga bisa hidup tenang dan tidak trauma setiap kedatangan tamu ke rumahnya. Apa Don yang bertubuh gempal dikenal luas di Kota Lhokseumawe. Selain seorang pengusaha, ia juga dikenal sebagai “orang kaki lima” karena pergaulannya yang luas.

37. Korban Ditembak, Lalu Dipotong Tangan

Forum Peduli Hak Azasi Manusia (FP-HAM) Aceh bersama para sukarelawanannya akan menelusuri desa-desa pedalaman di Aceh untuk menampung pengaduan masyarakat terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM, sekaligus melakukan investigasi secara objektif, yang berkaitan dengan operasi militer selama beberapa tahun terakhir, kata Ir. H. Abdul Gani Nurdin.¹⁶ Ketua Pelaksana Harian FP-HAM Aceh menjelaskan, kegiatan pendataan yang dilakukan 27-30 Juli 1998 di Ulee Gle (Pidie), Pantonlabu (Aceh Utara), dan Peureulak (Aceh Timur) baru merupakan langkah awal. Abdul Gani menjelaskan itu karena menilai masih banyak korban atau keluarganya—terutama dari desa-desa pedalaman—yang belum berkesempatan mengadu.

Pengaduan pelanggaran HAM yang sempat tertampung pada “pos” FP- HAM di Masjid Raya Pase, Pantonlabu, adalah 80 persen datang dari desa pedalaman. Mereka memberitahukan pada tim FP-HAM bahwa masih banyak keluarga korban belum sempat datang, karena kesulitan dana transportasi. Padahal, mereka ingin mengadukan suami dan anaknya yang hilang. Selain laporan keluarga korban, FP-HAM Aceh banyak juga menerima masukan dari tokoh ulama dan masyarakat di berbagai kecamatan menyangkut sikap oknum aparat yang bertindak di luar aturan hukum yang berlaku. Bahkan, polisi terkesan tidak berfungsi lagi.

Ketua FP-HAM Aceh Ir H Abdul Gani Nurdin mengatakan, kala timnya berada di Masjid Raya Pase, beberapa tokoh daerah itu melaporkan pula peristiwa mengerikan di Desa Lueng Sa, Kecamatan Simpang Ulim, Aceh Timur. Dua warga desa itu, yakni Sarjani Ibrahim (35) penduduk Lueng Sa dan Teungku Imum Budiman (50) penduduk Lueng Dua, dilaporkan

ditembak di lapangan bola Sinar Agung. Menurut laporan yang diterima FP-HAM lewat tokoh di Pantonlabu, bertepatan pada 17 bulan Ramadhan 1991, sekitar pukul 10.30 WIB, para penculik menang-kap kedua korban. Dengan mata tertutup kain hitam, tangan diborgol dibawa ke lapangan bola, kemudian menyuruh warga desa datang ke lapangan untuk menyaksikan tragedi itu, termasuk diantaranya Teungku Ibrahim, ayah Sarjani.¹⁷ Setelah warga berkumpul sekitar 350 orang, dua korban yang sebelumnya telah disiksa, serta diikat pada tiang gawang dan kemudian dihukum dengan tembakan tanpa proses pengadilan. Sarjani yang saat itu baru lima bulan kawin dengan Mardiana—bahkan isterinya sedang hamil tiga bulan—“dihadiahkan” dua peluru yang bersarang di bagian kepala. Sedangkan Teungku Imam Budiman, dilaporkan, hanya satu peluru juga bersarang di bagian kepala yang membuat kondisi fisik korban robek. Masyarakat dipaksa untuk melihat ketika korban ditembak. Kalau tidak, mereka kena pukul dari penculik. Sehingga semua warga jelas melihat kedua korban jatuh tersungkur serta darah segar membasahi tiang gawang.

Tindakan oknum penculik yang terlatih tersebut, menurut tokoh tadi, tidak hanya sesadis itu. Tapi, Sarjani—kipser Poraja Pantonlabu yang pernah mewakili Aceh ke Jambi tahun 1980-an—itu setelah ditembak dua peluru, kedua tangannya dipotong supaya bisa melepaskan borgol di tangannya. Kemudian oknum itu menyuruh warga menanam mayat Sarjani tanpa dimandikan. Dilaporkan, beberapa tokoh di sana merencanakan kedua jenazah korban akan dimandikan sesuai dengan ajaran Islam. Namun, penculik yang bersikap kasar itu membentak masyarakat agar tidak perlu dimandikan. “Tanam saja bangkai itu. Untuk apa dimandikan,” ungkap tokoh pelapor itu kepada tim FP-HAM mengutip ucapan sang oknum pada waktu itu.

Dengan adanya masukan tersebut, tim FP-HAM akan turun ke berbagai desa termasuk ke kawasan Lueng Sa, di mana kedua korban itu dieksekusi di lapangan bola serta disaksikan ayahnya dan masyarakat lain. Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh pihak FP-HAM, sebagian besar para korban penculikan dan pembunuhan diyakini bukanlah orang yang bersalah. Buktinya, para korban kebanyakan dijemput di rumah. Bahkan ada yang sedang makan dengan keluarganya. Berani karena benar, takut karena salah. Kalau korban orang yang bersalah tidak akan berani berkumpul dengan keluarga, apalagi duduk di warung kopi dan di pos siskamling. Apalagi korbannya ada yang berumur 50 s/d 70 tahun ikut diculik. Padahal fisik mereka sudah tidak berdaya lagi, apalagi ingin memberontak.

38. Ayah Diculik, Ibu telah Meninggal

Kehidupan Muhammad Yusuf (10), anak yatim piatu penduduk Trieng Pantang Kecamatan Lhoksukon, Aceh Utara tak ubah seperti ayam kehilangan induk.¹⁸ Bocah itu dipelihara neneknya Nuraini (50), semen-tara ayah dan ibunya sudah pergi menghadap khalik, kata Muhammad Yusuf. Pelajar kelas 3 SD Trieng Pantang itu kepada Ketua LBH Iskandar Muda Lhokseumawe, mengisahkan, bahwa kepergian ayahnya tidak dapat dibayangkan. Karena, kepergian ayahnya Mustafa (35) tidak sempat menitipkan pesan. Katanya, korban dijemput penculik di rumah kemudian dipukul babak belur di depan matanya di Desa Blang Talon Kecamatan Kuta Makmur.

Kala ayahnya diculik empat orang bersenjata lengkap, Yusuf tidak bisa berbuat banyak, kecuali menangis. Menurut bocah itu, ketika penculik membawa ayahnya, korban sambil berjalan mencoba melihat ke belakang, namun dilarang oleh penculik. Bahkan ayahnya dipukul dengan senjata serta ditendang. Kendati pukulan berbagai jurus menghinggap di tubuh ayahnya, namun ayahnya memaksa diri memandang ke arah keluarganya yang sedang berdiri menangis. Itu merupakan tatapan terakhir antara Yusuf dengan ayahnya. Setelah ayahnya diambil para penculik, Yusuf bersama ibunya, Antikah kembali ke Desa Trieng Pantang, karena di Buloh merasa tidak aman pada tahun 1990/91. Sekitar empat tahun setelah itu ibunya menyusul bapaknya, setelah menderita penyakit demam panas, setelah itu Yusuf dipelihara oleh nenek.

Sementara Direktur LBH Iskandar Muda Mohammad Yacob Hamzah SH mengatakan, pengaduan bocah tersebut merupakan pengaduan ke-320 kasus yang diterima LBH-nya. Menurut Yacob, dalam aduan keluarga korban menceritakan berbagai kisah sedih, ada yang ditembak di depan matanya, setelah itu rumah dibakar dan isterinya diganggu dan hartanya dirampas. Sebagian keluarga korban sempat ditahan di kantor resmi aparat keamanan, kemudian baru menghilang entah kema-na. Malah ada keluarga korban ketika menanyakan ke *camp* penahanan, penculik langsung mengatakan, suami mereka sudah dibunuh.

Seperti diceritakan isteri Abdurrani, janda miskin penduduk Kecamatan Matang Kuli, bahwa pada 19 Februari 1992 suaminya Abdul Rani (58) dijemput penculik. Korban ditembak yang ikut disaksikan anak dan isteri dan rumah dibakar serta sepeda motor diambil penculik dan tidak dikembalikan.

39. Dikencingi dan Disiksa

Teungku Nasir (tokoh masyarakat yang juga Komisaris PPP di Bulo Blangara, Kecamatan Kutamakmur Seorang Da'i) secara kronologis mela-porkan, ia bersama Is diundang ke kantor Koramil setempat dengan hanya memakai kain sarung. Lalu dibawa ke kantor Korem 011/LW. Di korem itulah ia ditanyai dimana Robert (tokoh GPK). Teungku Nasir juga ditanya di mana pimpinan rapat GPK. Nasir mengingat-ingat tidak pernah memimpin rapat. Waktu itu ia sedang melatih anak-anak *musabaqah* selama 10 hari, dan tidak pernah keluar. Saat itulah Nasir tidak dibenarkan shalat dan dipukuli dengan bruti hingga paha Nasir patah (sambil menunjukkan pahunya).

Orang-orang yang menyiksa Teungku Nasir itu, katanya, masih ada. Ia mengenal, mereka hadir dalam acara ini.

Teungku Nasir dipukul dengan bruti hingga jatuh, dan tidak bisa bangun. Karena tidak bisa bergerak lagi, ia diinjak-injak. Saking sakitnya keluar berak. Setelah itu ia ditarik ke dalam kamar, dan ia minta mandi. Namun mereka mengencingi kepalanya. Setiap diinterogasi, ia ditandu. Sekian lama Nasir disiksa, kemudian dikembalikan ke kampung melalui Muspika. Selama 6 bulan wajib lapor ke kantor Koramil Kutamakmur, dan setiap minggu gotong royong di kantor Koramil dan sering dipukuli oleh anggota di sana. Sejak itulah ia berobat ke Bireuen dan tinggal di *Dayah* Abu Tumin Blang Bladeh selama 6 tahun. Melalui Abu Tumin saya tidak lagi diancam. Dikatakan ia dilepas, karena sudah ditemukan Nasir lain yang mereka cari. Ketika bertemu Dandim dan Nasir waktu itu menjadi khatib Jumat di Buloh Blangara, beliau menasehati anggap itulah cobaan dari Allah.

Yusuf Ismail Pase SH (mewakili, ketua KONTRAS Cabang Aceh) mempertanyakan niat anggota TPF yang selama di Aceh Utara lebih banyak bertemu dengan pejabat, dibandingkan turun ke lapangan. Acara pertemuan di DPRD itu sangat protokoler dan terkesan direkayasa, nilai Yusuf Ismail Pase. Ismail menunjukkan contoh penderitaan rakyat Aceh akibat DOM. Sambil menangis, ia menunjukkan seorang anak yatim piatu M Yusuf (12) anak Mustafa yang dianiaya tentara di depan matanya. Bayangkan, bagaimana kalau itu anak atau keluarga Bapak. Bagaimana pukulan mental akibat kekejian aparat keamanan itu.

Menurut Yusuf, operasi militer telah memberikan pukulan berat bagi rakyat, ketakutan sepanjang hidup mereka. Mereka sangat takut pada ABRI. Jangankan itu, asal baju loreng tampak, rakyat sudah ketakutan, meskipun itu Pemuda Pancasila. Siapa lagi yang akan diambil. Apa ada perselisihan dengan Pak Kecik, toko pulan, warung kopi, atau pengusaha diskotek, karaoke? Itulah gambaran trauma yang dialami rakyat. Bukan orang saja yang dibunuh karena diduga tahu GPK, tapi juga harta mereka. Buktinya adalah SNTK kendaraan. Kalau orangnya GPK, apakah rumah dan kendaraannya juga GPK.

Rakyat ketakutan atas intimidasi yang dilakukan aparat ABRI. Rakyat Aceh sendiri merasakan, dalam perjuangan reformasi ini saja mereka diintai, diancam dan tidak merasa aman. Untuk itu tidak tepat lagi, DOM ada di Aceh. Aceh ini sangat setia, tidak ada niat bagi rakyat untuk memisahkan diri. Itu sejarah,—telah membuktikan Aceh setia, dan menjadi modal bangsa tercinta ini. Bukan Indonesia yang menarik Aceh menjadi bagian *Republik* ini, tapi Aceh menggabungkan diri kepada Indonesia.

40. Disalib

Beuransah (55) penduduk Blangbladeh, Kecamatan Jeumpa Bireuen, mengaku korban keganasan militer yang lolos dari maut. Perut Beuransah memperlihatkan bekas tembakan karena ditembak ABRI. Ia ditembak di sebuah gubuk ketika pulang dari ladangnya. Di gubuk itu, kebetulan ada 9 orang lain. Dari 10 orang itu, cuma dia yang selamat, sedang 9 orang yang lain mati kena tembak. Kemudian mereka dilemparkan ke dalam sumur. Lalu sumur itu ditimbun dengan batu dan batang-batang pisang. Karena tak mati ia mengaku dibawa pulang oleh tentara yang menembaknya untuk diobati. Setelah sembuh, dia dibawa ke sebuah markas militer yang tidak diketahui di mana, karena matanya ditutup kain. Lalu, dia diperiksa dengan penyiksaan-penyiksaan. Kedua tangan-nya diikat pada dinding seperti orang disalib.

41. Kulit Kepala Dikelupas

Dua anak manusia bernama Yusuf, tanggal 30 Juli 1998, menjadi tokoh peremuk kekerasan hati ratusan masyarakat Aceh Utara ketika secara gamblang keduanya mengungkapkan aksi penyiksaan dan penghilangan manusia secara sadis oleh oknum aparat kepada TPF-DPR RI, di Gedung DPRD setempat.¹⁹ Ungkapan duet Yusuf itu membuat semua yang hadir di ruang sidang DPRD sebagai tempat pertemuan, luruh dan menangis, tak terkecuali ketua dan anggota TPF serta Muspida Aceh Utara. Kedua Yusuf itu adalah Yusuf Ismail Pase SH dan Yusuf M Jafar, anak yatim berusia 12 tahun yang mengaku menyaksikan langsung proses penyiksaan dan penghilangan ayahnya, M Jafar, oleh aparat. Ketika Yusuf Ismail Pase, aktivis Walhi dan pengacara praktik di Lhokseu-mawe mengungkapkan tragedi penyiksaan aparat terhadap M Jafar, penduduk Trieng Pantang, Kecamatan Tanah Luas, seraya mengangkat putra korban, Yusuf, dari tempat duduknya, masyarakat yang memadati ruang sidang DPRD bagaikan dikomando larut dalam kesedihan dan menitikkan air mata.

Kesedihan semakin kompleks ketika Yusuf menceritakan episode demi episode penyiksaan ayahnya yang dia persaksikan dalam bahasa Aceh. Ayahnya diambil tentara ketika sedang makan. Ia ditinju dan ditendang. Kemudian kepalanya dipukul dengan popor senjata hingga kulit kepalanya sobek. Selanjutnya, kulit kepala itu dikelupas dengan tangan oleh seorang tentara dan ditarik ke belakang. Kepala yang sudah tak berkulit itu pun masih dipukuli. Ayahnya terjerebab, kemudian diambil dan dicampakkan ke mobil. Apakah ayahnya bangkai sehingga dibuang seperti itu. Ungkapan cerita penyiksaan tahun 1992 dari saksi hidup itu tak ayal memancing kepiluan mendalam pada diri setiap masyarakat yang hadir di gedung DPRD.

42. Diperlakukan Seperti Bangkai Kucing Kurap

Bocah bernama M. Yusuf (12), menjadi tokoh peremuk kekerasan hati ratusan masyarakat Aceh Utara ketika menceritakan kepedihan dan kepedihan hatinya saat ayahnya dipukul dan diculik oleh aparat ber-senjata.²⁰ Hingga saat ini, ia mengaku tidak tahu ke mana ayahnya dibawa. Apakah masih hidup atau sudah mati, tak jelas. Sambil mengu-sap air bening yang mengucur dari matanya yang cekung, Yusuf dengan bicara sesedukan menceritakan kesaksiannya terhadap penganiayaan ayahnya M. Jakfar di depan rumah mereka desa Buloh, Kecamatan Kuta Makmur, Aceh Utara, tahun 1990. Ayahnya diambil oleh tentara, dipukul, disepak, dan dihantam dengan bedil di kepala sampai kulit kepala koyak dan ditarik ke belakang, kemudian dilempar ke mobil. Itu baru sepotong dari cerita penderitaan Yusuf yang kini terpaksa diasuh *makcik*-nya dan menyekolahkan hingga saat ini duduk di kelas III SD. Ibunya sendiri, Atikah sejak itu sakit-sakitan akibat tidak sanggup mengenang tragedi yang sangat sadis terhadap suaminya, M. Jakfar. Sekitar empat tahun kemudian ibunya pun meninggal menyusul ayah mereka sudah pulang ke desa Trieng Pantang, Kecamatan Lhoksukon.

Cerita M. Yusuf, malam itu ia bersama kedua orang tuanya sedang makan dalam rumah mereka. Pintu depan diketok dan setelah dibuka oleh ayahnya, langsung empat orang bersenjata (tentara, menurut M Yusuf) meninju dan menendangnya, lalu memukul dengan popor senjata di kepala korban berkali-kali hingga kulit kepalanya sobek, dan seorang tentara menyobek kulit kepala korban. Ayahnya waktu itu jatuh dan diinjak lagi, kemudian dipukul lagi hingga kemudian diseret dan dilempar ke dalam mobil (tidak tahu jenis mobil itu). Yusuf dan ibunya hanya menangis dan ketakutan sekali. Ayahnya dibantai tentara. Saat itu, ayahnya hanya bisa berkata “bantu”, dan Yusuf kecil pun hanya mampu meraung-raung. Sedangkan nasi yang masih tersisa dalam piring tidak sanggup lagi mereka kunyah. Malam itu ia tidak tidur dan menangis memikirkan ayah yang sudah dibawa dalam mobil. Ayahnya dilempar begitu saja seperti bangkai. Namun ketika dibawa, ayahnya masih tampak bergerak dan mencoba menoleh ke belakang, namun kepala ayahnya dipegang penculik. Bocah Yusuf mengaku sangat kehilangan dan selalu menangis ketika mengingat peristiwa itu. Sebab ayahnya, sangat akrab dengan putra tunggal tersebut. Ayahnya juga secara rutin jika pulang ke rumah selalu membawa kue untuk Yusuf kecil, dan membawanya ke kedai pada hari tertentu. “*Jino hana le ayah lon, hanale mak, hanale tempat lon tinggai,*”²¹ tutur bocah malang itu.

Penderitaan M. Yusuf, anak tunggal korban Jakfar dan Atikah itu mungkin tidak seberapa jika saja ayahnya tidak dibantai di depan matanya sendiri. M Yusuf adalah sebuah potret tanpa bingkai tentang nasib anak-anak yang malang dari sebuah produk yang mengatas-namakan sebuah “kesetiaan dan cinta rakyat”. Namun telah menimbulkan kekejaman tanpa ampun dan kesengsaraan tanpa ujung.

43. Gara-gara Utang

Lain lagi nasib Iskandar (30) warga Desa Beuringen Kecamatan Meurah Mulia, Aceh Utara. Sebagaimana diadakan oleh isterinya ke LSM YAPDA, gara-gara belum melunasi utang Rp 800.000 kepada seseorang, dua pria tak dikenal—seorang berambut pendek, seorang lagi gondrong—pada suatu hari tahun 1997 menjemputnya di rumah dan belum kembali. Dari 354 pengaduan orang hilang dan pelanggaran HAM lainnya yang telah diterima LBH Iskandar Muda, Lhokseumawe, setidaknya tercatat 15 kasus yang dibarengi dengan pembakaran rumah korban. Diantara korban pembakaran rumah itu, ada yang diculik hingga belum dikembalikan. Ada pula yang hanya dibakar rumah dengan tuduhan sebagai tempat persembunyian GPK, tapi pemiliknya tak diculik. Kasus pembakaran rumah itu berlangsung antara tahun 1989-1991. Pelapor ke LBH Iskandar Muda yang mengadukan sebagai korban pembakaran rumah, antara lain; Abd Salam (43) desa Beuringen Kecamatan Meurah Mulia. Ketika rumahnya dibakar tanggal 24 Juli 1990 sekitar pukul 12.00, ia tidak berada di rumah. Setelah membakar rumah, aparat mencari Abd Salam. Setelah tertangkap, ia mengaku diinterogasi sambil dianiaya di kantor Koramil Jungka Gajah selama dua hari dua malam. Kemudian ia mengaku dilepas.

Korban lain yang mengadukan pembakaran rumah adalah; Asnawi-yah (28) desa Arongan Abe, Lhoksukon. Maimunah (45) desa Matang Rubek, Tanah Jamboaye. Ibrahim Din (53) desa Matang Raya, Tanah Jamboaye. Jalil Taleb (62) desa Bantayan, Tanah Jamboaye. Yusuf Abdurrahman (62) desa Keude Tambue, Samalanga. Ismail Abubakar (27) desa Matang Teungoh, Tanah Jamboaye. Teungku A Rahman Mahmudi (46) desa Tambue, Samalanga. Asniati (30) desa Cot Geulumpang Baroh, Jeunib. M Affan Ishak (49) desa Garot, Jeunib. Nursiah (60) desa Simpang Kramat, Kutamakmur. Nurmina (42) desa Cot Geulumpang Baroh, Jeunib. Khadijah Puteh (55) desa Awe Dua, Tanah Jamboaye. Salbiah (37) desa Teupin, Syamtalira Bayu. Zulbahri (40) desa Ulee Gunong, Lhoksukon.

44. Banyak Mayat Korban DOM yang Dibuang

Korban “orang buangan” di Beunot Bayu yang tewas akibat ditabrak mobil, yang tergeletak di kamar jenazah RSU Lhokseumawe sejak 17 Agustus 1998 dikuburkan secara Islam atas inisiatif pimpinan RSU karena dikuatirkan akan membusuk. Tak seorang pun masyarakat atau yang mengaku keluarga korban dan mengenali mayat itu. Syukri, Kabag Tata Usaha RSU Lhokseumawe mengatakan tidak mungkin lagi menyimpan terus mayat yang mulai membusuk itu di kamar jenazah RSU. Karena itu pimpinan RSU minta dilakukan penguburan dan semua

biayanya mencapai Rp.300.000 menjadi beban RSUD. Prosesi mayat tersebut dan penguburannya di kawasan pekuburan umum Kuta Blang dilakukan dengan bantuan masyarakat setempat atas permintaan pimpinan RSUD.

Sementara itu Ketua LBH Yayasan Iskandar Muda dan Direktur Eksekutif LPLH (Lembaga Pembelaan Lingkungan Hidup) Lhokseumawe mengatakan mereka telah menyampaikan berita adanya orang yang "dibuang" dari mobil, kepada sejumlah relawan LSM di Lho'seumawe dan juga kepada pihak kepolisian untuk membantu mencari tiga korban lagi yang kini tidak diketahui lagi keberadaannya. Kondisi fisik keempat pria "buangan" tanpa identitas dan hanya bercelana dalam saja itu amat memprihatinkan. Penduduk Desa Beunot Bayu dan warga Gedong yang sempat menyaksikan peristiwa "misterius" itu melihat keempat korban bangkit dengan terhuyung-huyung dari jalan dan kemudian berjalan tak tentu arah. Satu diantaranya ditolong warga Desa Beunot Bayu dan diberi makan dan tempat tidur, tapi ia melarikan diri karena takut dan akhirnya ditabrak mobil dan tewas.²² Seorang lagi sempat ditolong penduduk Gedong dan dilaporkan ke Polsek Samudra, namun setelah diberi makan oleh petugas Polsek, korban tersebut akhirnya diam-diam lari meninggalkan Mapolsek.

Pada tanggal 18 Agustus 1998, pihak LBH dan LPLH mengerahkan sejumlah relawan LSM untuk mencari tiga korban tersebut, belum berhasil menemukannya. Mohammad Yacob Hamzah (LBH) dan Yusuf Ismail Pase (LPLH) Lhokseumawe mengimbau Kapolda Aceh dan seluruh Kapolres di jajarannya untuk memberi bantuan mencari tiga lagi korban yang dibuang dari sebuah mobil di jalan raya antara Bayu-Geudong yang sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya. Kedua LSM tersebut menduga keras keempat orang yang dibuang itu adalah korban kejahatan penculikan atau korban "orang hilang" yang banyak dilaporkan oleh masyarakat Aceh Timur, Aceh Utara, dan Kabupaten Pidie dewasa ini. Seperti dilaporkan penduduk Desa Beunot Bayu dan warga Geudong, mereka melihat kondisi fisik korban amat lemah dan berjalan terhuyung-huyung. Selain itu mereka juga senantiasa dalam ketakutan dan acap berteriak minta ampun jangan disiksa lagi. Seorang penduduk Beunot mengatakan setelah diberi makan, korban berteriak: "Jangan setrum saya, jangan pukul kepala saya dengan pistol, sakit sekali, dan jangan siksa lagi saya".

45. Kepala Desa Disiksa, Dituduh Melindungi GPK

Lain lagi kisah M. Hasbi Yacob, korban yang saat itu sebagai Kades Bili Baro Kecamatan Matangkuli harus menjalani siksaan selama 32 hari di Posko Rancung Batuphat, milik PT Arun. Kejadian berawal 10 Juli 1990, ia bersama Sekdes M. Diah dibawa empat anggota tentara Yonif 125, hanya gara-gara menanyakan kenapa warga desanya dipukuli mereka. Saat itu sebuah mobil colt tersangkut di jalan sosial, terlihat di dalamnya oknum ABRI dan terbaca simbolnya Yonif 125. Lalu tentara itu minta bantuan melalui Kades untuk menolak mobil mereka yang saat itu terkumpul sebanyak 35 pemuda desa ikut membantu. Tapi setelah itu, tanpa sebab petugas mengancam anak-anak muda desa sambil memukuli mereka. Waktu itu Yacob mengingatkan supaya mereka jangan dipukuli, apalagi tidak bersalah. Saat itulah ia langsung diciduk dan dituduh bahwa semua warga desa itu GPK. Hari itu Hasbi (58) bersama Sekdes M. Diah disuruh buka pakaian ditelanjangi di depan warganya selama 1,5 jam. Baru kemudian mereka dinaikkan ke mobil menuju Posko Alue Lengkit. Sedangkan uang dalam saku celananya sebanyak Rp 1,2 juta hasil jualan jeruk juga diambil petugas.

Kemudian di tengah perjalanan, keduanya ditutup mata dengan baju mereka hingga diketahui sudah berada di Rancung. Di kawasan Rancung, keduanya dengan mata tertutup dan tangan diikat ke belakang dinaikkan ke dam truk. Kemudian bersama batu dan kayu yang ada di truk dituang ke dalam semak. Di semak itu pula dua anak bangsa itu dipukuli habis-habisan secara beramai-ramai. Tidak ingat lagi sakitnya mereka disiksa seperti anjing memperebutkan bangkai.

Di dalam barak penyiksaan itu, keduanya baru dibuka balut mata dan terlihat ada 13 orang tahanan lain yang juga kondisi mereka sangat menyedihkan. Setiap malam mereka dipukuli, dilempar ke dalam beling, disetrum listrik di kemaluan, dan dikasih makan dengan tulang ikan cirik diaduk dengan nasi yang banyaknya satu genggam, kalau lambat atau cepat ambil nasinya, langsung mereka disepak. M. Hasbi yang sampai saat ini alat vitalnya masih mengeluarkan darah akibat penyiksaan setrum listrik itu, tidak mampu membayangkan kesadisan petugas. Mereka kalau minta shalat, tidak dikasih, dan kalau baca *fatihah* besar-besar, baraknya dihujami batu dari atas bubung.

Hasbi yang bernomer tahanan 98 itu ia disepak bersama 13 tahanan lainnya, di antaranya Alamsyah (Kades Arongan Lhoksukon), Syahril (Kades Nibong), Ahmad Saidi (anggota Polsek Sungai Pauh Langsa), Usman (anggota Koramil Sumigo Raya A Timur), Ibrahim (warga Jirat Manyang), H. Manaf (Panton Labu), Ampon Ahmad (Jeunib), dan Ibrahim warga Penayang Lhokseumawe (masih hidup). *Keuchik* Hasbi setelah disiksa sebulan lebih, dipulangkan kembali ke Posko Alue Lenyit dan diserahkan kepada Koramil Matangkuli. Sementara jabatan Kades-nya sendiri sudah duluan dicopot oleh Camat Sadali Badai (saat ini pembantu Bupati Lhoksukon). Penyiksaan itu sangat perih karena dilakukannya bangsa sendiri.

46. Kepala Dibacok, Perut Ditembak

TPF berkunjung ke beberapa lokasi kuburan massal di Aceh Utara dan Timur, satu diantaranya kuburan pedagang cabe. Pada lokasi itu mereka dapat keterangan tentang korban

pembantaian oknum aparat keamanan, korban dikuburkan tanpa dikafani sesuai ajaran Islam, padahal, korbannya semua orang Islam. Kala TPF itu tiba di lokasi warga rame-rame menunjukkan lokasi kuburan yang berada di Bukit Seuntang, Gudang Saismic di Kecamatan Lhoksukon Aceh Utara, Bukit Gantung Kecamatan Simpang Ulim dan Komplek PT Irwin, Kecamatan Julok Aceh Timur. Misalnya di Desa Paya Deumam Simpang Ulim, sekitar 20-an warga ikut menunjukkan lokasi pada TPF. Malah, gigi korban pembantaian aparat yang ditemukan di lokasi PT Irwin Julok ikut diambil visualnya oleh TPI.²³

Warga mengungkapkan bahwa kuburan yang ada di desa tersebut merupakan kuburan Hasbi bin Usman (24) penduduk Kampung Baru, Kecamatan Peureulak Aceh Timur yang ditemukan di pinggir jalan 15 Maret 1991. Warga melihat mobil Taft mencampakkan mayat Hasbi, ketika petugas siskamling mendekat, pengemudi yang pangkas pendek mirip potongan ABRI mencoba menabrak warga, kemudian lari ke arah Langsa. Beberapa penduduk mengisahkan, bahwa korban belakangan diketahui Hasbi Usman asal Desa Kampung Baru Peureulak, menurut keluarganya korban dijemput aparat keamanan empat hari sebelumnya, kemudian ditemukan tewas mengenaskan, dibagian kepala bekas bacokan dan bagian perut bekas tembakan. Pemuda itu diketahui bekerja sebagai pedagang cabe di kawasan Peureulak yang sukses, bahkan berhasil membeli mobil dan banyak uang. Namun, ketika mayatnya ditemukan warga di Desa Paya Deumam, sementara hartanya baik mobil maupun uang tidak ditemukan warga dan diduga dibawa penculik.

Menurut Warga Paya Deumam, bukan hanya mayat Hasbi ditemukan di kawasan itu, tapi banyak mayat orang tak dikenal lain dibuang ke daerah itu, seperti di Matang Pudeng, Lhok Nibong, Madat dan beberapa lokasi lainnya dan dikuburkan warga setempat. Pada umumnya, kondisi fisik mayat banyak rusak dan bekas sayatan pisau, lubang bekas peluru dan bekas pukulan benda keras di bagian tubuh korban.

Lain lagi dilaporkan warga Aceh Utara yang santer disebutkan dengan terungkapnya “Misteri Bukit Tengkorak” di Blok-C Tanah Merah, Kecamatan Tanah Jambo Aye. Ternyata, setelah diselidiki bukan banyak lokasi lain yang sebih seram dan mengerikan, seperti di Bukit Seuntang dan Gudang Saismic yang tidak berani didatangi warga. Korban keganasan oknum aparat keamanan tahun 1990-1993 sebelum dibuang ke Bukit Tengkorak, bukit Seuntang dan Gudang Saismic di Bukit Seuntang. Para korban mendapat penyiksaan di kamp oknum petugas keamanan persis di Desa Matang Ubi Lhoksukon, kilometer 307-308 bagian timur Banda Aceh. Bahwa para korban DOM setelah menerima penyiksaan di kamp Matang Ubi, korban dibawa ke tempat lain dan dibunuh, kalau istilah ABRI waktu itu “disekolahkan ke Sukabumi atau ke Balik Papan.”

Dalam kamp tersebut, tidak hanya disiksa, tapi juga dibunuh kemudian dikuburkan dalam komplek kantor PU Pengairan itu. Bahkan, sekitar dua ratus mayat berada di lokasi perkantoran itu yang ditanam di tiga lokasi, beberapa warga yang pernah mendapat perlakuan biadab oknum ABRI bersedia menunjukkan lokasinya. Di antara sekian banyak korban, terdapat mayat pengantin baru asal Peureulak Aceh Timur, pemuda yang baru dua bulan kawin itu ditangkap serta dibunuh aparat keamanan. Sekitar seminggu setelah korban dibunuh, isterinya yang tidak diketahui namanya datang menanyakan. Lantas oknum aparat yang tidak diketahui namanya itu menyuruh masuk ke dalam untuk dipertemukan dengan suaminya. Tapi, sampai ke kamar korban diperkosa kemudian dibunuh dan ditanam di lokasi tersebut.

47. Bukit Seuntang dan Bukit Tengkorak Lainnya

Belum habis warga Aceh Utara digemparkan dengan penemuan ladang pembantaian “Bukit Tengkorak” di Blok-C Seureukee, Kecamatan Tanah Jambo Aye, kini muncul informasi baru lokasi pembantaian di Bukit Seuntang.²⁴ Kalau Bukit Tengkorak disebut-sebut mencapai 200 korban, Bukit Seuntang pun tidak kalah seramnya, mungkin lebih dari itu, ujar beberapa penduduk di sana. Suasana di lokasi Bukit Seuntang tampak biasa-biasa saja dipenuhi semak. Di dataran datar yang terlihat luas itu nampak beberapa lokasi lekukan tanah seperti bekas galian yang telah tertimbun. Di dekat sebuah bukit kecil yang belum ditumbuhi rumput nampak ada bekas galian. Di lokasi ini di duga banyak mayat ditanam.

Sebelumnya, di tempat itu pernah ada perkantoran PT Sak Nusantara (Sakna), kontraktor Jakarta yang kala itu membangun saluran irigasi teknis. Namun, sekitar tahun 1989-1993 bangunan itu dipakai sebagai kamp aparat keamanan menjalani bertugas memburu kelompok pengacau liar. Lokasi Bukit Seuntang ini meski siang hari sudah nampak suasana mengerikan, menegakkan bulu kuduk bagi orang yang melihatnya. Sebab utamanya kawasan itu tampak sepi sekali. Tak ada penduduk yang berani ke lokasi itu, kecuali jika ada keperluan yang penting harus melewatinya. Malam hari kata penduduk setempat, suasana bagaikan mati. Hutan belukar penuh sepanjang jalan menuju lokasi itu menjadi kubangan babi di tengah jalan masuk ke sana. Rumah penduduk terdekat berjarak sekitar 500 meter dari lokasi Bukit Sentang. Ada sekitar delapan warga yang sempat ditemui dan mereka tidak mau bicara akibat rasa takut. Misalnya, seorang penduduk Bukit Seuntang, berkali-kali minta maaf kalau bicara tentang Bukit Seuntang itu. Meski pun beberapa warga setempat mau mengatakan pernah melihat beberapa mayat dikuburkan di lokasi itu.

Penduduk sekitar lokasi mengaku, dulu malam hari sering mendengar letusan senjata diiringi jeritan dan raungan suara manusia. Bahkan kadang-kadang bertubi-tubi setiap malam ada letusan senjata dan jeritan manusia dari arah lokasi Bukit Seuntang itu. Orang-orang di kantor perusahaan

bangunan irigasi di lokasi itu pun hampir tiap malam mende-ngar letusan senjata di kompleks itu. Setelah letusan itu terdengar bunyi mesin traktor (becho) dihidupkan dan keesokan harinya warga melihat ada timbunan atau lobang yang ditutup dengan onggokan tanah. Keterangan beberapa penduduk menyebutkan bahwa di Desa Bukit Seuntang ada beberapa lokasi yang di diduga sebagai lokasi kuburan massal. Selain yang dekat dengan lokasi kantor PT Sakna, ada beberapa lubang lagi di Dusun Ujung Bayi kompleks kantor Mobil Oil dan juga di Bukit Ujung Salam yang diduga ada enam lobang yang berisikan belasan mayat.

Para korban sebagian besar bukan penduduk Lhoksukon, seperti pernah ditemukan mayatnya oleh masyarakat. Mereka berasal dari Idi Aceh Timur, dari Aceh Pidie, dari Bireun dan Jeunieb. Sebelum dibunuh, mereka lebih awal disiksa di kamp tersebut dan ada pula dilempar dalam lobang galian hidup-hidup dan kemudian diberondong peluru lalu ditutup dengan timbunan tanah menggunakan becho. Sekitar 10 Km dengan Lokasi Bukit Seuntang, terdapat bekas gudang penyimpanan dinamit bahan peledak yang digunakan untuk survai minyak dan gas milik Mobil Oil tahun 1990. dilokasi inipun menurut cerita penduduk setempat pernah terjadi peristiwa mengerikan seperti yang terjadi di Bukit Seuntang. di kawasan Gudang Dinamit inipun banyak lobang-lobang dan onggokan tanah yang diduga keras tempat penguburan. Kondisi jalan menuju Gudang dinamik yang terletak di Desa Leubok Dalam, masih dalam Kecamatan Lhoksukon nyaris tidak dapat dilalui karena sudah tumbuh rumput ilalang (rumput padang). Tidak satu pun terdapat rumah penduduk sekitar itu, di lokasi bekas gudang dinamit terdapat satu bangunan piket di pintu gerbang yang terlihat masih bertengger. Beberapa penduduk Desa Leubok, mengatakan di lokasi itu juga pernah tinggal aparat keamanan beberapa tahun lalu. Di sekitar lokasi itu dulu sering ditemukan mayat orang yang dibuang.

M. Harun seorang warga desa itu mengatakan dulu pernah ada mayat seorang lelaki yang dikenal penduduk bernama Syamsyuddin, penduduk Desa Blang Kulam Idi Cut Kecamatan Darul Aman, Aceh Timur. Selain itu juga masih ada beberapa mayat orang tidak dikenal ikut dikuburkan oleh masyarakat setempat. Bahkan ada satu mayat yang setelah ditanam di lokasi itu, diambil lagi oleh tentera dan POM ABRI. Jenazah laki-laki asal Kota Lhokseumawe itu, ditanam di kawasan Gudang Dinamit dan sebagian tubuh korban terjungkal ke luar lobang. Korban itu adalah seorang famili dekat sebuah keluarga aparat keamanan di Lhokseumawe yang ditemukan terbunuh di Gudang Dinamit. Pelaku pembunuhan terungkap dan oleh POM dan kemudian menyuruh meng-gali kembali kuburan itu. Penduduk sempat menyaksikan peristiwa itu.

Dari cerita penduduk lokasi-lokasi tersebut sekarang menjadi angker dan jarang ada penduduk yang berani datang ke sana kalau tidak penting betul. Akibatnya, tempat itu menjadi lokasi kosong yang mengerikan dan oleh penduduk menyebutkan ada hantu yang melolong setiap malam di lokasi itu. Pernah pula, penduduk, di kawasan itu mendengar suara-suara seperti suara orang berbicara, namun ketika dilihat tidak tampak seorang pun di jalan. Sampai dimana kebenaran temuan mayat di lokasi itu dulu, hanya penduduk setempat yang paling tahu karena mereka bisa mendengar dan menyaksikannya dari dekat ketika peristiwa terjadi.

48. Guru Diculik, Kepala Sekolah Stress

Muhammad (42) Kepala SD Negeri PIR -I Krueng Pase Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara, mengalami trauma berat setiap kali mengingat peristiwa penculikan M. Diah, guru bawahannya yang terjadi pada jam sekolah 25 Juli 1990 lalu.²⁵ Tak tahan mengingat peristiwa itu, Muhammad meminta pindah meski resikonya dia hanya menjadi guru biasa di SD lain. Mantan Kepala SD PIR I Krueng Pase yang kini menjadi guru kelas di SD Negeri Nomor 4 Samalanga ini menceritakan pengalaman sedih dan mengerikan yang menimpa koleganya itu kepada beberapa guru di Kantor Dinas P dan K Kabupaten Pidie. Sambil bercerita guru ini terus menyapu air matanya karena tak bisa menahan perasaan sedihnya. Soalnya sejak hari “pengambilan paksa” diri M Diah itu, hingga sekarang Muhammad tidak pernah mendengar tentang guru malang itu lagi.

Demikian pula isteri korban, Suryana, penduduk Desa Paya Dua Kecamatan Makmur yang baru dinikahi dan sampai sekarang belum sempat mengadakan pesta perkawinannya, tak pernah lagi melihat M Diah. Sejak kekasihnya diambil oknum aparat yang bersenjata di sekolah, Suryana memang terus mencari kemana-mana dan minta bantuan instansinya. Tapi sampai sekarang tidak ada kabar beritanya. Peristiwa tersebut, kata Muhammad, amat membekas diingatkannya. Sebab waktu M Diah “diambil” murid-murid sekolah yang masih kecil-kecil yang diting-galkan oleh M Diah, pun ketakutan dan menangis tersedu-sedu saat melihat gurunya itu dibawa beberapa oknum aparat keamanan bersen-jata lengkap. Murid-murid bertanya kepada M Diah mengapa gurunya ditangkap dan guru mereka itu adalah orang yang baik hati, tutur Muhammad. Oknum-oknum aparat bersenjata itu datang dengan tiba-tiba tanpa surat perintah atau membawa kepala desa setempat untuk menjadi saksi. Oknum aparat keamanan tersebut menanyakan kepada Muhammad yang mana M Diah dan Muhammad memanggil koleganya itu tanpa menyangka akan dibawa. Oknum aparat hanya minta lihat KTP M Diah, dan setelah itu korban dibawa pergi dan tidak pernah kembali ke sekolahnya. Menurut catatan yang ada diarsip sekolah, M Diah lahir 1963 di Desa *Meunasah* Kulam Beureughang Kecamatan Kuta Makmur dan diangkat menjadi guru PNS di SDN PIR-I Krueng Pase, 1 Oktober 1986 dengan NIP 131486059. Dikatakan yang paling menyakit-kan pengambilan guru itu terjadi saat sedang jam belajar sehingga disaksi-kan oleh murid-murid sekolah. Selain itu tidak ada selembar surat penang-kapanpun yang dikeluarkan oleh

oknum-oknum aparat keamanan tersebut. Sementara itu niat untuk melapor peristiwa penangkapan guru M Diah itu ke Dinas P dan K Kabupaten Aceh Utara pun terhalang karena setelah penangkapan M Diah, kawasan itu ditutup dan semua warga PIR I Krueng Pase tidak dibenarkan meninggalkan rumahnya. Baru empat hari kemudian mereka dibolehkan bepergian seperti biasa. Setelah melapor, saat itu Kadis P dan K, Drs Syahbuddin AR memberi pengarahan kepada sejumlah guru SD di Aceh Utara dan memberi semangat kepada Muhammad agar melaksanakan tugasnya seperti biasa di SD PIR-I Krueng Pase. Muhammad mengatakan untuk keamanan bila bepergian, saat itu hampir semua guru di daerah terpencil seperti Krueng Pase mengenakan baju dinas guru dari Pemda dan atau baju Korpri. Sebab KTP banyak yang sudah habis masa berlakunya dan untuk pergantian saat itu amat sulit karena penerbitan KTP baru pun dihentikan dengan alasan blanko KTP habis. Akibat itu baju dinas dan baju Korpri menjadi sangat penting sebagai alat bukti diri guru/PNS bila melewati pos-pos pemeriksaan aparat keamanan, maupun pos kamling di desa. Hampir semua guru SD terpencil saat itu mengenakan baju dinas setiap hari hingga warna baju bukan saja menjadi apak karena luntur, tapi juga bau keringat karena jarang dicuci, kecuali waktu sekolah libur. Meski sekarang tidak lagi mengajar di SD terpencil PIR-I Krueng Pase, Muhammad masih sering trauma dan tampak seperti bingung akibat stres jika terbayang pada peristiwa saat penangkapan M Diah. “Saya masih bisa mengingat wajah ketakutan M Diah memandangi saya ketika akan dibawa. Saya tahu dia ingin saya menolongnya, tapi saya tidak bisa berbuat apapun selain melapor peristiwa itu kepada Kadis P dan K di Lhokseumawe”, tuturnya. Muhammad mengatakan ia berharap kolega-nya itu masih hidup dan suatu saat bisa bertemu lagi. Demikian pula dengan Suryana isteri yang telah dinikahi M Diah tapi belum sempat hidup bersama.

49. Diduga Korban “Orang Hilang”

Empat lelaki hanya mengenakan celana dalam dengan kondisi jasmani dan rohani yang sakit dan tidak memiliki identitas apapun, 12 Maret 1998 pukul 21.00 WIB “dibuang” dari sebuah mobil jeep di dua lokasi ditengah jalan raya Banda Aceh - Medan antara kawasan Bayu - Geudong. Seorang diantaranya, menjelang pagi tewas ditabrak sebuah mobil saat lari menyeberang jalan beberapa jam setelah diberi makan dan tempat untuk tidur oleh penduduk.²⁶ Peristiwa “misterius” tersebut sempat disaksikan sejumlah warga Desa Bunot Bayu dan warga Gedong. Keempat pria korban “buangan” itu diduga keras adalah korban orang hilang atau penculikan yang telah mengalami penyiksaan berat. Beberapa warga sekilas melihat paling sedikit ada empat oknum dalam mobil yang mirip jeep Land Rover dan tak jelas plat nomor polisinya. Setelah menyelesaikan tugasnya membuang “muatannya” berupa empat anak manusia itu, dengan tenang meluncur kembali di jalan raya menuju ke arah timur. Menurut keterangan yang diperoleh, dua orang korban pertama dibuang di kawasan Desa Benot Bayu, dan dua orang lagi di kawasan jalan tak jauh dari Geudong Samudera. Baik dua korban yang dibuang di Bayu, maupun dua lagi yang dibuang di Gedong, bangkit dan berjalan terhuyung-huyung di jalan raya hingga menarik perhatian orang banyak yang saat itu berada di tepi jalan sekitar dua lokasi kejadian. 13 Agustus 1998, sekitar pukul 01.00 WIB pagi, beberapa pemuda Benot Bayu melihat ada orang berjalan terhuyung-huyung seperti ayam yang terkena sakit sawan, tak tentu arah berputar-putar di jalan raya yang padat lalu lintas dan berbahaya itu mendatangi orang itu bermaksud mencari tahu. Setelah ditanya ternyata orang itu adalah salah seorang dua korban yang dibuang di kawasan Benot Bayu. Dari profil tubuhnya diperkirakan korban masih muda dan berusia antara 18 sampai 25 tahun. Pemuda desa Benot kemudian meminta bantuan orang desa untuk memberi makan korban yang nampak fisiknya lemah sekali. Korban ini mendapat makanan di sebuah rumah penduduk, saat sedang makan itu beberapa pemuda termasuk ibu yang memberi makan mengajukan beberapa pertanyaan menyangkut identitas korban. Korban saat itu hanya menjawab “Matang Peusangan”. Setelah menyebut dua kata itu, korban berteriak berulang kali menyebutkan: “Jangan setrum saya, jangan pukul kepala saya pakai pistol, sakiit, jangan siksa saya lagi”, kata korban tersedu-sedu sambil memegang kedua kepalanya serta menunduk. Wajahnya saat itu kelihat pucat dan ketakutan, serta tidak berani memandang wajah orang-orang yang membantu memberinya makan di sebuah rumah warga Bunot. Setelah selesai makan, empat pemuda yang bertugas di Pos Kamling Langa Bayu memberinya tempat tidur di pos itu. Menjelang subuh, keempat pemuda yang tertidur lelap, terbangun. Tapi tak melihat lagi korban. Mereka serentak bangun untuk mencari korban yang diam-diam meninggalkan Pos Kamling saat mereka tertidur. Mereka menelusuri arah jalan timur dan ke barat karena yakin korban tersebut belum jauh dari Pos Kamling itu. Dugaan keempat pemuda itu benar. Karena tak jauh dari lokasi itu, tiba-tiba mereka mendengar suara tabrakan di jalan raya, tapi tak sempat memperhatikan mobil yang melintas dengan cepat. Ternyata yang ditabrak adalah orang yang sedang mereka cari. Peristiwa kecelakaan dan ikhwal korban itu dilaporkan kepada petugas Polsek Bayu. Korban yang saat itu diperkirakan telah tewas di TKP akibat ditabrak mobil, diangkut ke RSUD Lhokseumawe. TPF yang melihat mayat tak dikenal yang sampai 15 Agustus 1998, masih terbaring di ruang jenazah RSUD Lhokseumawe, kondisinya sangat menprihatinkan. Korban hanya mengenakan sepotong celana dalam, tinggi tubuh ditaksir 160 cm, kurus. Luka baru akibat tabrakan terlihat mengganggu dibagian kepala dengan darah yang membeku. Kedua belah siku tangan dan lutut juga terluka akibat terseret di jalan. Keanihan juga tampak pada mayat korban adalah, gigi korban sebagian telah rontok, bekas luka-luka sebelum tabrakan terlihat jelas pada tubuh korban terutama dibagian

dada, pipi, dan bagian kedua lengan yang di-duga keras, korban sebelum tewas ditabrak mobil telah “kenyang” dengan penganiayaan yang cukup berat dan sangat kejam. Seorang korban lain ditemukan penduduk Gedong terbaring tak berdaya di tepi jalan dan dilaporkan ke Polsek Gedong. Penduduk Gedong mengatakan seorang petugas Polsek bernama Sertu Pol Oloan Siagian memberi bantuan dan membawa korban itu ke Mapolsek dan diberi makan. Petugas polisi ini mengajukan beberapa pertanyaan tapi dijawab tak jelas oleh korban yang juga mempunyai dugaan korban sedang dalam kondisi stress berat. Tak lama setelah makan, korban ini juga dengan pandangan curiga dan ketakutan yang amat sangat, bangkit lari meninggalkan kantor Mapolsek Gedong. Setelah itu tak diketahui lagi keberadaannya. Dengan itu dari empat korban buangan, seorang tewas dan mayatnya terbaring di kamar jenazah RSUD Lhokseumawe, sedang tiga lagi diduga masih melanglang buana di sepanjang jalan raya tanpa tujuan. Kantor LBH Yayasan Iskan-dar Muda mendapat laporan dari penduduk Bunot tentang “pembua-ngan” keempat korban dan korban yang tewas ditabrak mobil. Yakob Hamzah langsung mengecek ke kamar jenazah RSUD Lhokseumawe dan mendapat kepastian dari seorang warga Bunot bahwa korban tewas akibat ditabrak mobil itu adalah salah seorang korban eks “buangan” mobil misterius, di Bunot yang sempat diberi makan dan tidur di Pos Kamling Langa Bunot. Pihak LBH Yayasan Iskandar Muda Lhokseu-mawe membuat analisa dari keterangan penduduk Bunot serta mencocokkannya dengan daftar laporan orang hilang serta sejumlah foto-foto korban orang hilang yang ada di arsip LBH Yayasan Iskandar Muda Lhokseumawe. Melihat kondisi korban yang tewas dan cerita penduduk tentang tiga korban lain, pihak LBH menduga keempat korban “buangan” dari mobil misterius itu adalah korban-korban penculikan atau “orang hilang” yang telah mengalami siksaan berat dan berada dalam kondisi fisik amat lemah serta gangguan akibat depresi mental yang cukup mengkhawatirkan. Buktinya salah seorang korban lari tanpa tujuan di jalan hingga ditabrak mobil. Yakob mengharapkan pihak kepolisian mencari tiga korban lainnya yang kini tidak diketahui lagi nasibnya setelah “dibuang”. Ketua LBH ini juga menyerukan demi kemanusiaan, jika itu adalah korban orang hilang atau penculikan maka cara “pembuangan” korban yang sedang mengalami sakit fisikis dan depresi mental yang berat itu seperti itu, sama dengan membunuh. Cara yang lebih manusiawi adalah menyerahkan atau membebaskan mereka dengan cara yang tidak menyakiti lagi. Mohd Yacob Hamzah menegaskan, kalau perlu LBH Yayasan Iskandar Muda siap menolong korban jika diberitahu keberadaannya dan berjanji menjaga “rahasia” lokasi tempat korban berada. “Ini demi kemanusiaan jangan menambah penderitaan terhadap korban lagi. Allah akan mengampunkan dosa bagi orang yang membantu orang-orang yang teraniaya.

50. Yang Pernah Diculik Hingga Tidak Tahu Lagi Harus Bagaimana Menceritakan Sadisnya Siksaan

Sementara itu, Teguh Sanjaya, salah seorang korban penculikan oleh aparat keamanan, sempat histeris ketika menyampaikan pengalamannya di depan TPF tersebut. “Saya pernah diculik selama dua minggu pak. Saya tidak tahu bagaimana harus menceritakan kesadisan aparat,” kata-nya terbata-bata. Karena itu, ia sangat mengharapkan agar hukum dan keadilan benar-benar dapat ditegakkan di Aceh. Ia diculik dengan tuduhan sebagai penyandang dana untuk GPK. Padahal, semua tuduhan itu tidak punya fakta. Ketika berada di luar gedung DPRD, di tengah kerumunan massa, lelaki jangkung yang mengaku mencari nafkah di kaki lima itu, secara terang-terangan menyatakan sangat benci dengan rezim Soeharto dan para pendukungnya. Bahkan, ia sempat perang mulut dengan seorang pria yang mengaku pendukung rezim Soeharto. Tuntutan untuk menghapuskan DOM juga disampaikan salah seorang pengurus KNPI Aceh Timur. Isi tuntutan itu antara lain, meminta supaya kasus-kasus orang hilang di Aceh agar diusut tuntas. Menghukum orang-orang yang bersalah sesuai perbuatannya. Diharapkan tidak ada yang kebal hukum. Pihak KNPI juga mendesak pemerintah agar segera mencabut DOM, mendengarkan jeritan hati masyarakat. Kepada TPF juga diharapkan dapat menghimpun semua data/fakta sejujurnya. Khairuddin M Dan, seorang pembicara yang mewakili para pekerja (Ketua DPC FSPSI Aceh Timur), juga mendukung pencabutan DOM di Aceh. Ia menilai, penerapan operasi militer di Aceh selama ini, telah menghambat masuknya investor dari luar Aceh ke propinsi ini. Permintaan agar DOM segera diakhiri juga disampaikan seorang mahasiswa yang berbicara mewakili kaum wanita. Malah ia menyampaikan hal itu dengan berlutut di lantai di hadapan anggota TPF DPR-RI. Tuntutan pencabutan DOM juga disuarakan Ketua HMI Cabang Langsa, Ray Iskandar, yang minta TPF agar menggarisbawahi, telah terjadinya pelanggaran HAM di daerah ini. Beberapa orang lainnya yang ikut berbicara di forum itu, menyampaikan usul yang kontroversi agar DOM tetap dipertahankan di Aceh. Mendengar hal itu, para hadirin yang duduk di bagian belakang, spontan riuh dan menyoraki tiga pembicara itu. Yang satunya dari Idi dan dua lagi dari Langsa. Akibatnya, sampai beberapa kali ketua tim terpaksa berupaya menenangkan hadirin. Pertemuan antara TPF DPR-RI dengan tokoh masyarakat, pemuda, OKP, mahasiswa, LSM dan berbagai kalangan di Aceh Timur itu, berlangsung sejak pukul 10.20 WIB sampai menjelang shalat Jumat. Sebelumnya, di tempat yang sama, berlangsung suatu pertemuan tertutup antara TPF dengan segenap unsur Muspida dan anggota DPRD setempat.

51. Diculik Ketika Sedang Melaksanakan Shalat Tarawih

Lima orang janda dari Kecamatan Peureulak dan satu dari Kecamatan Nurusalam (Idi Cut), Aceh Timur, mendatangi DPRD Tk II Aceh Timur. Para janda ini mengadukan tentang suami dan anak mereka yang hilang pada tahun 1991 lalu. Di antara yang hilang itu tercatat seorang remaja berusia 18 tahun. Jumlah orang hilang yang dilaporkan, sebanyak 14 kasus. Para janda yang didampingi para mahasiswa itu, diterima tiga anggota Komisi A DPRD setempat, masing-masing Teungku Abdul Rasyid (FPP), Adi Raja (FKP) dan Mawardi Nur (FPP). Turut hadir mendengarkan penjelasan dari keluarga orang hilang itu, dua staf Kantor Sospol, masing-masing Syaiful Azhar BA dan Fadli SH. Ketua DPRD Tk II Aceh Timur, Achmad Dadang, ketika diminta tanggapannya tentang masuknya laporan orang hilang tersebut, mengatakan, sebagai wakil rakyat, pihaknya tetap menampung segala aspirasi dan keluhan dari masyarakat. Begitu juga mengenai orang hilang ini, tidak tertutup kemungkinan akan masuk lagi pengaduan-pengaduan dari masyarakat. Karena itu, untuk sementara ini, pihaknya akan menampung dan menca-tat semua masukan tentang kasus orang hilang. “Selanjutnya, kasus tersebut akan diserahkan kepada pihak yang berwenang menanganinya,” katanya. Para wanita yang mengadukan kasus orang hilang ke dewan itu, berasal dari Kecamatan Peureulak, masing-masing, Aminah (40), Hafsa M Ali (43), Asiah Abdul Rahman (49), Khadijah Abdullah (47), Ti Hawa. Sedangkan dari Idi Cut, Nurakikah. Keenam wanita desa ini, melaporkan tentang keluarganya yang hilang pada bulan Ramadhan tahun 1991. Sebagian besar orang-orang hilang itu diambil ketika sedang melaksanakan shalat *tarawih*.²⁷ Usai mendapatkan laporan orang hilang itu, anggota Dewan Mawardi Nur dan salah seorang mahasiswa yang menjadi mediator para janda itu, mengatakan, dari pengaduan tentang orang hilang, yang diterima dewan baru 14 kasus. Empat di antara orang hilang itu, ditemukan beberapa hari kemudian, sesudah menjadi mayat. Sedangkan yang lainnya masih belum diketahui rimbanya. Ke-empat orang hilang yang ditemukan telah menjadi mayat itu, Marhaban Bardan (55) suami Aminah, warga Desa Hutan Dama Kecamatan Peureulak. Mayatnya ditemukan di Masjid Pasi Puteh, setelah dimandikan warga setempat. Armiah Ismail (38), suami Hapsah M Ali. Korban yang karyawan PT PPP Blang Simpo itu, diambil orang tak dikenal, pada 4 Maret 1991 sekitar pukul 10.00 WIB di Kedai Alur Nireh. Ditemukan mayatnya pada 6 Maret 1991 terapung di sungai Matang Arun (Sungai Peureulak). Mahmud M Hasbi (18), anak dari Khadijah Abdullah. Mayatnya ditemukan di pinggir jalan Krueng Tuan, setelah tiga hari kemudian, tepatnya pada 21 Ramadhan. Sedangkan korban lainnya, Abdullah, warga Idi Cut. Mayat suami Nurakikah ini, ditemukan di depan rumahnya sendiri, dalam kondisi yang sangat mengenaskan. “Suami saya lehernya tembus peluru,” ungkap Nurakikah sambil menyeka air matanya. Sedangkan 10 kasus orang hilang, tapi hingga kini belum ditemukan, masing-masing: M Yakob Abdulah (suami Asiah Abdul Rahman), warga Desa Babah Krueng, Peureulak; Zamzami (suami Ti Hawa), warga Desa Tualang, Peureulak; Armia Amin (35), warga Desa Buket Pala, Peureulak; Abdul Rani (45), warga Desa Buket Pala, Peureulak; Adni Rani (22), warga Desa Buket Pala, Peureulak; Kasim (22), warga Desa Buket Pala, Peureulak; Sukri (22), warga Desa Buket Pala, Peureulak; Usman (22), warga Desa Buket Pala, Peureulak; Mariah, remaja berusia 18 tahun, warga Desa Buket Pala, Peureulak; Sa'id Sulaiman (50), warga Desa Buket Pala, Peureulak; Menurut Armin Ali, Kades Buket Pala tahun 1991, kepada pihak Dewan, Armia Amin, Sa'id Sulaiman dan dirinya sendiri, sempat ditahan di Ranto Peureulak. Namun, setelah diproses ia dilepaskan kembali. Sedangkan Armia Amin dan Sa'id Sulaiman, tidak diketahui kemana dibawa.

Bab 09-02 Sekelumit Kisah Getir Umat Islam Aceh

Berikut ini adalah beberapa kisah sejati kepedihan jiwa, fisik dan masa depan yang diderita oleh orang-orang Aceh selama DOM berjaya di Aceh. Dengan kejayaan dan *kegemahripan* fasisme militer ini pulalah telah menghasilkan kesuraman wajah-wajah wanita Aceh yang tadinya cerah ceria. Dengan kedigdayaan ABRI jugalah telah mengakibatkan wajah-wajah wanita-wanita dan jejak Aceh yang tadinya bersinar cemerlang kini pupus dan layu diterjang pukulan, tamparan dan injakan serta aksi tidak senonoh yang gagah perwira dari tentara Republik, tentara yang dulunya dielu-elukan dan didukung secara hebat oleh putra dan putri Aceh. Lihatlah bentuk-bentuk kegagahan dan keperwiraan mereka dalam rangkuman kisah singkat yang sangat memilukan ini:

1. Tak Boleh Tutup Aurat Saat Shalat

Sayed Abdullah SH (42), ayah delapan anak, yang tadinya polisi, kemudian beralih jadi kontraktor itu, diambil dari rumahnya pada bulan Ramadhan 1994 oleh dua oknum pasukan elite (Kopassus) yang bertugas di sana. Tanpa *ba-bi-bu*, langsung dimasukkan ke mobil Kijang terbuka, menuju posko keamanan di Kota Bakti, Pidie. Tanpa ditanya apa-apa Abdullah, warga Blok Sawah, Sigli, ditelanjangi dan dianiaya bergantian. Setelah itu—masih dalam keadaan telanjang bulat—dibawa naik mobil ke Tangse. Di Blang Dhot ini ada pos Kopassus. Ia disuruh berdiri di sana, juga tanpa busana. Ketika masuk waktu shalat, ia minta pakaian untuk menutup aurat, tapi tak diperkenankan. Sepuluh bulan ia disiksa berat, baru kemudian dilepas. Abdullah tak terima dituduh seolah-olah terlibat GPK. Ia sendiri justru pemberantas GPK. Bahkan, pernah menda-pat penghargaan dari Pangdam Iskandar Muda Aceh sewaktu dulu ber-tugas di kepolisian ikut dalam operasi menumpas Aceh Merdeka.

2. Diciduk di Masjid, Dibantai di Lapangan

Maddin Ismail (45), juga tewas secara tragis. Warga Pante Bayeun, Simpang Ulim, Aceh Timur ini menurut istrinya, Asni (40), diciduk dari masjid setempat pada pukul 10.00 WIB di tahun 1990. Ia dijemput ke masjid karena setelah dicari ke rumah, ia tak ada. Korban dibawa oleh sekitar 15 anggota berseragam loreng dengan truk. Bersama Maddin Ismail, juga ada beberapa warga yang kala itu diboyong untuk, katanya, diperiksa. Tapi, pada siang hari, Maddin Ismail dibawa ke lapangan sepak bola, lalu ditembak persis di bawah telinganya hingga tembus ke sebelah. Mayat ayah dari enam anak ini dibawa pulang oleh warga kampung pada petang hari, lalu dikebumikan.

3. Disiksa hingga Mata Kiri tak Berfungsi

Cerita sadis lainnya adalah apa yang dialami Ibrahim Sufi, 35 tahun. Imam *meunasah* di Biara Barat Tanah Jambo Aye, Aceh Utara ini diambil petugas sesudah shalat magrib dari *meunasah* (surau) setempat di tahun 1990. Kemudian, dibawa ke kantor Koramil setempat dan disiksa dengan cara dipukul dan diterjang. “Mata kiri saya sampai sekarang rusak setelah disiksa selama dua malam dua hari. Saya difitnah terlibat GPK. Padahal, kenyataannya tidak,” ujar Pak Imam yang langsung melapor ke Forum Peduli HAM. Menurutnya, meski dilepas ia sempat dikenakan wajib lapor setiap hari, kemudian seminggu sekali.

4. Diculik Serempak lalu Dibunuh Massal

Kasus kematian Teungku Usman Raden (imam *meunasah* setempat), Teungku Abdullah Husen (wiraswata), dan Abdurrahman Sarong (PNS di Dinas PU Sigli) berlangsung bersamaan. Ketiganya warga Desa Selatan Batee. Menurut laporan istrinya masing-masing, Aminah (40), Jariah (28), dan Usmawati (40), penculik suami mereka adalah seorang aparat yang cukup mereka kenal, berisial PK. Menurut para istri itu, pengambilan ketiga suami mereka itu berlangsung dalam suatu razia KTP (dikumpul-kan banyak orang) di sebuah lapangan pada tanggal 1 Juni 1991. “Suami saya punya KTP, tapi dibawa juga. Walaupun kami tahu siapa yang menculik, tapi kami tidak tahu ke mana mereka dibawa,” ungkap Jariah. Setelah tiga hari kemudian, seorang warga memberitahukan mereka bahwa mayat Usman, Abdullah, dan Abdurrahman yang mulai membusuk ditemukan di pinggir bukit dekat waduk Lhokseumani, Batee, Pidie. Ketiga istri bersama warga lainnya segera ke sana. Di atas dada mayat diletakkan KTP masing-masing.

5. Santri Diculik, Lalu Dibantai

Dilaporkan oleh Haji A Jalil Abdullah (66), warga *Meunasah* Sukon Cubo, Bandar Baru bahwa anaknya Kamarullah (17), santri *Darul Falah*, Bandar Baru, Pidie, diculik bersama tiga temannya sesama santri ketika sedang belajar dan diskusi dengan gurunya di pesantren itu pada 1992. Tiba-tiba muncul sejumlah oknum aparat dengan sebuah mobil, tanpa *ba-bi-bu* (tanpa menjelaskan apa salah mereka), langsung mengambil keempat santri itu. Enam hari kemudian, mayat keempat santri itu ditemukan berserakan tercampak di Blang Usi, Pidie. Semua orang Aceh dianggap GPK sehingga tanpa penjelasan dan basa-basi langsung main tangkap dan main bunuh saja.

6. Da’i Disiksa 35 Hari, Kalau Berzikir, Mulut Disumbat

Meski usianya sudah uzur, namun Teungku Abdul Wahab Daud (61), guru mengaji dan penda’i/khatib di Masjid Baitul Mukmin, Lamo Saka, Peukan Baro, Pidie, cukup kuat daya ingatnya. Tutar katanya lancar. Fisiknya pun sehat, tak kalah dengan yang muda. Namun, pada tubuh tuanya itu jelas kelihatan parut-parut bekas berbagai penyiksaan, terbanyak di punggung dan bagian kaki. Itulah “kenang-kenangan” DOM, katanya. Dan, kepedihan itu tak akan pernah ia lupakan.²⁸ Abdul Wahab disiksa bukan lagi setengah mati. Tapi sudah tiga per empat (3/4) mati. Ia mengaku pernah merasakan hidup dijajah Jepang. Orang Jepang, kalau dibilang *taklok* (takluk, menyerah), mereka langsung berhenti memukul. Yang sekarang ini tidak (penyiksaan DOM yang dia rasakan, maksudnya). Walaupun kita sudah minta-minta ampun, tetap terus disiksa. Abdul Wahab masih ingat, ia menjalani penyiksaan di *Rumoh Geudong*, Glumpang Tiga, selama 35 hari, dan baru kembali 5 Juni 1998. Pelakunya tak lain oknum Kopassus di Pos Sattis Bilie Aron bersama para TPO (tenaga pembantu operasi) alias *cuak*. Sebagian penyiksaan di masa Danpos Lettu Par, dan sebagian masa Lettu Sut alias Ar (yang sempat berdialog TPF DPR RI).

Abdul Wahab diambil di penginapannya di Kantor KUD Bahagia, Lamo Saka, tanggal 30 April 1998 sekitar pukul 10.30 WIB, sepulang dari pengajian Majelis Taklim di Masjid setempat. Penculik terdiri dari Sas (wakil Danpos) dan seorang TPO, Is alias R, yang datang dengan mobil Taft Rocky. Tanpa basa-basi alias diberitahu salahnya apa, Abdul Wahab langsung dibawa ke *Rumoh Geudong*. Begitu tiba, ia diperiksa oleh oknum bernama Prapat. “Untuk apa kamu ke sini?!” tanya Pra, se-perti dikutip Abdul Wahab. “Saya tidak tahu,” jawabnya. Pra yang memegang rotan langsung menyabet pahanya. Tiba-tiba TPO yang bernama R ikut-ikutan bertanya. “Kamu yang melindungi Idris GPK itu di rumahmu kan?” Abdul Wahab menyangkal, dan mengatakan selama ini—karena kesibukannya—ia lebih sering menginap di KUD Bahagia ketimbang pulang ke rumahnya di Desa Keutapang, Peukan Baro. Kemungkinan karena jawaban

itu “tak memuaskan” para oknum, Abdul Wahab pun disiksa. Supaya para aparat yakin, ia minta disumpah atas nama Allah SWT setelah lebih dulu mengambil wudhu. Namun, anehnya, mereka tetap tak percaya. Itu sumpah palsu, kata oknum. Ia tetap dicap melindungi Idris yang telah pulang menyelamatkan diri dari maut.

7. Yang Disiksa Tak Henti-Henti Menyebut Nama Allah

Idris, warga Murong Cot, Sakti, yang dituduh GPK diculik tahun 1997. Sejak itu, keluarga Idris kerap mendapat bantuan beras atau uang dari Abdul Wahab yang ibarat bapak angkat mereka. Pada Januari 1998, menurut keterangan istrinya, Idris tiba-tiba pulang ke rumah dalam keadaan sakit dan luka. Rupanya ia bersama dua korban penyiksaan dari Pidie lainnya baru dilempar ke jurang Cot Panglima (perbatasan Aceh Tengah dan Utara). Namun hanya Idris yang tak sampai ke bawah, melainkan menyangkut di pohon. Ia lalu merangkak naik dan pulang ke rumah. Konon hanya beberapa hari di rumah, untuk kemudian pergi lagi. Pada saat pergi inilah kemungkinan ada *cuak* yang melihatnya. Maka kemudian, pada Maret 1998, diambil pulalah Rosmiati, adiknya (Rasyidah), serta ibu mertuanya (Nyak Maneh). Hasil penyiksaan ketiganya, para oknum mendapat informasi tentang Abdul Wahab yang sering membantu keluarga ini. Padahal, Abdul Wahab hanya pernah memberi uang kepada Rosmiati, istrinya Idris itu, yang sudah seperti saudara dengan mereka. Apalagi mengingat Idris tidak ada. Abdul Wahab merasa kasihan dengan anak-anak Idris. Tetapi tak ada yang percaya. Abdul Wahab kembali disiksa sejadi-jadinya. Ia ditelanjangi, disetrum kemaluan, disabet dengan rotan sampai berdarah, dan sebagai-nya. Ia tetap tabah. Tapi, ketika disetrum hidungnya, sempat berteriak. Oknum bernama Pra nyeletuk, “Habisi saja. Biar mampus dia!” Abdul Wahab juga mendengar perkataan angkuh lainnya yang keluar dari mulut mereka. “Kami yang berkuasa sekarang, tahu! Kalau kami tembak, mau lapor kemana kau!” Atau, “Asal kau tahu, sudah 16 orang saya bunuh,” kata Pra seperti yang diingat Abdul Wahab. Dalam penyiksaan sadis itu, guru ngaji ini memang kerap menyebut nama Allah SWT, atau kalimat tauhid “*Lailahailallah*”. Tapi, setiap kali Abdul Wahab mengucap-kannya, mulutnya disumbat kain atau dipukul.

Abdul Wahab kemudian dimasukkan dalam sel di atas *rumoh geudong*. Di situ, terdapat delapan bilik kecil yang disekat-sekat. Ada sekatan papan, ada pula dari bambu. Ruang penyiksaan di bagian serambi depan dan belakang. Di ruang-ruang kecil (2x2 m) itulah ditahan para korban secara berdesakan. Bersamanya waktu itu ada 58 orang ditahan. Diantaranya keluarga Idris (Rosmiati, Rasyidah, dan Nyak Maneh), Teungku Abbas Lhok Bruek (Cubo, Bandar Baru), Ibrahim Laweueng, Usman Ahmad (Dayah Tanoh, Mutiara), dan sebagian besar warga Mutiara.

Tengah malam pada hari pertama itu, ia didatangi oleh Danpos Lettu Par. Abdul Wahab disuruh duduk selonjor kaki. Par meletakkan balok kayu di atas kedua pahanya, lalu Par naik. Balok itu diinjak-injak selama dua jam, bergantian dengan oknum lain. Bayangkan sakitnya, sampai terkencing-kencing. Keesokan paginya, di hadapan tahanan lain, bapak tua ini disuruh jungkir balik di halaman *rumoh geudong*. Lalu disuruh merangkak sampai ke kubangan (penampungan air kotor). Abdul Wahab dibuat seperti anjing. Ia direndam dalam kubangan (yang kelihatannya hanya bagian hidung ke atas) dari pukul 8.00 WIB sampai 16.00 WIB.

Ketika suatu kali ia dirantai dan disalib, lalu dipukul dengan berbagai alat penyiksa, Abdul Wahab juga sempat mengucapkan doa. “Ya Allah, akhirilah kezaliman ini”. Oknum yang mendengar marah, dan mencaci. “Apa kamu bilang? Mana bisa diterima doa babi!” Para korban memang sering dipanggil dengan anjing, babi, dan sejenis itu. Anehnya, kata Abdul Wahab, dalam penyiksaan ia juga pernah ditanyai soal senjata. Ia menga-ku tidak tahu. Abdul Wahab pun dipukul keras pada perutnya. Dua hari ia mengalami kencing darah. Di *rumoh geudong*, ia juga menyak-sikan saat korban-korban lain disiksa. Seperti Teungku Abbas Lhok Bruek yang digantung kepala ke bawah, lalu dipukul sejadi-jadinya. Teungku Abbas menjerit-jerit, “*Bek geusiksa lon. Hana lon tupat senjata nyan.*” Setelah itu, seorang tahanan wanita, Nyak Maneh, disuruh memegang kemaluan Teungku Abbas yang dalam keadaan telanjang. Mulanya Nyak Maneh menolak, dan kemudian ia dipukuli. Hingga Abdul Wahab mendukung-nya, “*Pue nyang geu yue pubuet laju. Allah Maha Mengetahui.*” Melihat adegan penyiksaan dan pelecehan seks itu, Abdul Wahab sering mena-ngis. Abdul Wahab kuat kalau disiksa seberat apa pun. Tapi kalau melihat orang lain disiksa, ia tak tahan untuk tidak menangis.

Selama 35 hari di kamp penyiksaan itu, suatu kali mereka pernah didatangi Abu Usman Kuta Krueng. Di hadapan 58 tahanan, Abu Kuta berceramah. Intinya, para tahanan itu seolah-olah semuanya sudah salah jalan dan harus kembali ke jalan yang benar. Sebetulnya, apa salah mereka? Dan, pertanyaan ini tak pernah terjawab sampai ia dilepas, 5 Juni 1998, dan bahkan sampai sekarang. Sebelum dibebaskan, Abdul Wahab sempat diancam dengan kata-kata seperti: “Apa yang kamu lihat, kamu dengar, dan kamu rasakan selama di sini, jangan ceritakan pada orang lain. Kalau bilang-bilang, keselamatan kamu tidak terjamin”, yang diucapkan Danpos Sattis Bilie Aron waktu itu. Tapi, ia tidak takut lagi sekarang. Abdul Wahab mau jadi saksi dan mau disumpah, demi Allah SWT, bahwa penyiksaan itu benar-benar terjadi.

8. Digebuk, Dicampakkan ke Mobil, lalu Dikubur Massal

M. Yusuf Hasan (39), warga Paya Tukai Tanah Jambo Aye, diambil pada 11 Oktober 1990 di jalanan desanya, Lalu dicampakkan petugas ke dalam saluran air dan tidak dibenarkan bangkit. Kemudian, rombongan Kopassus yang memperlakukannya demikian meninggalkan tempat itu untuk mengambil calon korban yang lain. Tapi, karena sudah menjelang magrib, M. Yusuf Hasan—seperti dikisahkan saudara sepupunya, Kama-luddin Basyir—bermaksud pulang untuk shalat. Apa lacur, di tengah jalan ia bertemu dengan petugas yang melarangnya jangan bangkit dari saluran air tadi. Karena, dianggap melanggar kesepakatan, Yusuf Hasan digebuk tiga kali pada dadanya. Begitu jatuh, ia pun dilemparkan ke dalam mobil petugas. Lebih enam bulan ia tanpa kabar. Kemudian, sekitar Februari 1991 seseorang kenalannya melaporkan Yusuf Hasan sudah dikubur secara massal di Blok B UPT IV dalam kebun kelapa sawit Jambo Aye, Aceh Utara.

9. Diikat Seperti Kepiting, lalu Ditembak

Pemandangan yang begitu mencekam sekaligus menyedihkan itu tak pernah dilupakan Teungku M. Hasan Ishak, seorang imam *meunasah* di Desa Pantan Raya, Kecamatan Tringgadeng Panteraja (Tripa). Ia telah melihat—kemudian ikut memandikan, mengafankan, dan menguburkan—lima mayat yang tercampak di Dayah Teumanah, Tripa, yang dikenali sebagai guru-guru pesantren/mengaji dari Kecamatan Bandar Dua. Mereka diikat seperti kepiting. *Dibeurekah* (diikat menyatu) lima orang. Darah bercecer dari lubang-lubang di badan mereka, bekas tembakan.²⁹ Tapi, salah satu mayat itu nampak wajahnya tersenyum. Mereka mati syahid. Teungku Hasan Ishak menuturkan, pada pertengahan Mei 1991 di bawah rumah Imum Rahman didapati lima mayat terikat. Pada malam sebelumnya, warga di sekitar kejadian sempat mendengar suara gaduh. Serombongan oknum tentara menyeret para tahanannya ke bawah rumah Imum Rahman. Tak ada yang berani keluar rumah. Tiba-tiba terdengar beberapa kali tembakan, diiringi lenguhan korban-korban menjelang ajal yang begitu menyayat hati. Suasana semakin mencekam. Tapi, salah seorang korban belum langsung mati. Karena kemudian seseorang mengucapkan “*Allahu Akbar*” maupun “*Lailahaillallah*” beberapa kali dengan suara lemah. Rupanya ucapan itu masih didengar oleh oknum-oknum tentara yang hendak pergi. Ada suara sepatu tentara yang kembali lagi. Disusul dua tembakan tambahan. Seketika lenyaplah ucapan takbir tersebut. Masyarakat seolah dapat menebak apa yang telah terjadi. Menjelang subuh, barulah warga berani keluar rumah dan melihat siapa gerangan yang menjadi korban pembunuhan sadis itu. Awalnya masyarakat setempat tak mengenal mereka. Namun, setelah informasi itu disebar hingga ke kecamatan sekitarnya, baru diketahui ternyata kelimanya warga Kecamatan Bandar Dua, sekitar 15 Km dari desa itu. Masing-masing jenazah Teungku Muniruddin Kaoy (24) dan Teungku Armiya (26) keduanya penduduk Desa Uteun Bayu, Teungku Ibrahim dari Cot Mee, Teungku M Yusuf asal Cot Keng, dan Ismail Hasan (45) dari Alue Sane. Selanjutnya, sesuai kebiasaan, para imam *meunasah* dari beberapa desa di kemukiman itu pun dikumpulkan. Termasuk Teungku M Hasan Ishak dari Pantan Raya, desa tetangga Dayah Teumanah. Hasan Ishak ikut memandikan kelima jenazah itu. Membersihkan darah, dan mengambil peluru di badan mereka. Hanya satu peluru yang tak tercabut, yakni yang di tubuh Teungku Muniruddin Kaoy. Peluru itu tertancap di tulang rusuknya. Walaupun sudah ditarik pakai tang, tetap tak bisa dicabut. Akhirnya terpaksa dikubur bersama peluru timahnya.

Kelima jenazah sebelumnya disembahyangkan di Masjid Dayah Teumanah usai shalat Jumat. Kemudian dikuburkan satu lubang berlima di pekuburan umum setempat. Beda dengan kuburan yang lain, makam para teungku yang kini diperluas itu telah disemen sekelilingnya. Belakangan, banyak masyarakat—juga dari Bandar Dua—yang berziarah ke makam itu untuk melepas nazar dan “cari berkah” di situ. Ini terlihat dari banyaknya sobekan kain putih yang diikat pada pohon kemboja yang tumbuh di atas makam. Keluarga kelima korban baru-baru ini juga telah melaporkan kasus itu kepada DPRD setempat. Pertama sekali, Juariah (41), janda Teungku M Yusuf yang melaporkan kasus itu ke Komnas HAM dengan didampingi Forum LSM Aceh. Janda dari Cot Keng yang kini mengasuh lima anak yatim itu mengisahkan, bahwa suaminya diambil awal Maret 1991. Tanpa didampingi suami, ia melahirkan anak kelima (saat suami diculik, Juariah sedang hamil tua). Dua bulan kemudian, ia diberitahu bahwa suaminya telah dikubur bersama lima mayat lainnya di Dayah Teumanah.

Cerita Adawiyah Yusuf (60), ibu dari Teungku Muniruddin Kaoy, pun tak kalah menyedihkan. Muniruddin, guru pesantren diambil oleh tiga oknum aparat pada malam Jumat, 4 Mei 1991 dari Masjid Uteun Bayu saat sedang mengajar ngaji muridnya. Beberapa hari kemudian diperoleh informasi tentang penembakan dan penemuan lima mayat itu. Salah satunya Teungku Muniruddin. Akan halnya Nursiah Ahmad (42), janda dari Ismail Hasan, telah kehilangan dua orang tercintanya. Suaminya diambil 8 Mei 1991, ditahan di Pos Sattis Ulee Glee selama 10 hari. Kemudian mayatnya ditemukan di Dayah Teumanah. Padahal, tahun sebelumnya, 9 Oktober 1990, salah seorang anaknya, M Nasir bin Ismail (20) lebih dulu dibawa dan ditahan ke PS Ulee Glee, lalu dipindahkan ke PS Kota Bakti, dan sampai sekarang belum kembali. Nursiah tak habis pikir tentang kesalahan suaminya itu, hingga sampai dibunuh?

Teungku Armiya (alm), juga seorang guru ngaji, menurut laporan ayahnya M Musa Sabi (58), diambil oleh oknum Kopassus dari PS Ulee Glee, ditahan 20 hari, lalu ditembak dibawah rumah Imum Rahman, Dayah Teumanah. Musa Sabi merelakan anaknya dikubur satu lubang bersama empat mayat yang diikat bersama Armiya.

10. Sepeda Motor pun Diculik

Sejumlah 15 sepeda motor yang ikut “diculik” bersamaan dengan penculikan korban “orang hilang” sejauh ini juga belum dikembalikan kepada keluarga korban.³⁰ Yang juga jadi tanda tanya masyarakat, apa pula “dosa” sepeda motor itu sampai “ditahan” demikian lama. Para keluarga korban berharap, sebelum pasukan elite itu ditarik pulang, baik korban penculikan sepanjang 1998 maupun harta benda yang telah dijajah mereka sebelumnya agar dikembalikan.

Menurut pengakuan seorang istri korban “orang hilang”, Nurjannah Gade (35), warga Paloh Tinggi, Mutiara, sepeda motor Honda Astrea Grand Jumbo yang diambil oleh oknum Pos Sattis Bilie Aron, selama ini sering dilihatnya dikendarai oleh oknum aparat maupun TPO (tenaga pembantu operasi) di *Rumoh Geudong*. Janda lima anak ini pernah mencoba memintanya baru-baru ini. Rencananya akan dijual untuk modal usaha. Oknum Kopassus mau mengembalikannya, asal Nurjannah bersedia teken surat-surat yang sudah dipersiapkan. Sedangkan isi surat itu menyatakan seolah-olah suaminya, Jamaluddin (40), pegawai BKKBN Kecamatan Mutiara, telah melarikan diri entah kemana. Padahal, kata Nurjannah, suaminya jelas-jelas diculik pada malam tanggal 26 Pebruari 1998 dari Pos Kamling Desa Paloh Tinggi bersama sepeda motornya. Kejadian itu disaksikan warga desa. Jamaluddin dibawa ke *Rumoh Geudong*, dan sampai sekarang belum kembali.

Mengingat isi surat yang menyimpang itu, Nurjannah tak mau meneken. Toh ia masih lebih mencintai suami daripada “cuma” sebuah sepeda motor. Dalam kasus penjarahan sepeda motor ini, ia telah memberi kuasa kepada Iskandar Ishak SH dari LBH Seuramoe Makkah untuk menyelesaikan persoalan itu. Menurut Iskandar, Sub Den-POM Sigli pun sudah dilaporkannya beberapa waktu lalu. Iskandar sudah mendesak mereka untuk mengambil sepeda motor korban di Pos Sattis Bilie Aron. Tapi menurut petugas di situ, untuk bergerak mereka perlu minta izin Lhokseumawe (Den POM Lhokseumawe) terlebih dulu. Terkesan pena-nganan kasus tersebut sangat lamban. Padahal, bagi janda korban yang miskin, nilai sebuah honda cukup besar artinya untuk menghidupi anak-anak yatimnya.

Sedih lagi nasib Sudarmi Thaher. Keluarga miskin di Desa Rambong *Meunasah* Cot Mutiara ini memang tak punya sepeda motor. Namun, ketika suaminya, Abdul Wahab Ali, yang seorang pedagang kaki lima, diculik ketika hendak shalat dhuhur di Masjid Kota Bakti, sang suami mengendarai honda pinjaman temannya. Honda Astrea 800 pinjaman itu pun ikut diangkut ke Pos Sattis terdekat. Namun, dagangan A Wahab Ali tak diangkut. Melainkan dititip pada sebuah warung. Ketika barang ini akan diambil Sudarmi esok harinya, si pemilik warung menyuruh Sudarmi minta izin dulu ke Pos Sattis Kota Bakti. Meski dagangan boleh dibawa pulang, tapi sang suami dan honda pinjaman itu tak kunjung dikembalikan sampai sekarang. Kini, saat ibu muda ini harus memikirkan “makan apa besok” untuk kelima anaknya, Sudarmi masih harus memi-kirkan bagaimana cara mengganti Honda teman suaminya yang telah diambil oleh oknum di Pos Sattis Kota Bakti. Selain 15 sepeda motor—yang dilapor tapi diduga lebih banyak lagi—masyarakat juga banyak yang melaporkan harta-benda yang dijajah para oknum yang cukup dikenal mereka. Mulai dari emas, kerbau, dan sebagainya, sampai *chain-saw* (gergaji berantai) pemotong kayu. Sepeda motor dan harta benda ini dijajah biasanya bersamaan dengan penculikan orang.

Lucunya, pada beberapa kasus, beberapa hari setelah pengambilan sepeda motor itu, oknum tersebut datang lagi untuk mengambil surat-surat seperti BPKB dan STNK. Mereka minta semua surat-surat tersebut, dan masyarakat tak berani menahannya karena takut. Bahkan, setelah Yabuni yang seorang guru SMPN Kembang Tanjong ini diambil oleh oknum Pos Sattis Pintu I Tiro dan ditahan di *Rumoh Geudong*, para oknum Kopassus itu mendatangi juga SMPN Kembang Tanjong untuk meminta semua surat maupun SK atas nama Yabuni Idris. Untung saja kepala sekolahnya tidak memberikan. Sehingga, Rosmawati dan anak-anak masih dapat uang pensiun suami.

Sedikitnya tiga unit *chainsaw* telah ikut “diculik”, Di antaranya *chainsaw* milik Yusuf Hasan (Kades Didoh, Mutiara) yang “diangkut” bersama Yusuf tanggal 12 Maret 1997 oleh oknum dari PS Bilie Aron. Nurmala Yakob, istrinya, belakangan mendapat kabar sang suami telah dibunuh dan dilempar ke jurang Cot Panglima. “Kalau saja Kopassus mau mengembalikannya sinso (*chainsaw*) itu. Saya bisa menyewakannya, untuk makan anak-anak,” tutur Nurmala yang sehari-hari kini berkerja mengambil upah mencuci di rumah penduduk. Dua *chainsaw* lainnya adalah milik Maimunah, warga Cot Seutui, Ulim, dan milik M Adam/Rahimah, Pulo Baro, Tangse. Yang juga dipertanyakan masyarakat —bernada menyindir— untuk apa oknum Kopassus itu sampai “menculik” *chainsaw*. Kalau diambil Honda, mungkin bisa memperlancar cari mangsa atau korban. Tapi *chainsaw* itu untuk apa, kalau bukan mau curi kayu di hutan.

Kerugian harta benda ini belum termasuk rumah-rumah penduduk —terbanyak rumah Aceh—yang dibakar. Kini tercatat sekitar 70-an rumah beserta isinya telah sengaja dibakar. Umumnya karena alasan tak bertemu dengan mangsa yang dicari oknum. Lain kasus, disebabkan karena rumah itu diduga telah “melindungi” dan memberi makan para GPL.

11. Sebelum Pulang, Oknum Kopassus Masih Berkenan Menyempatkan Diri Menculik Lagi

Dua oknum Kopassus yang cukup dikenali masyarakat, tanggal 18 Agustus 1998, mencoba menculik keluarga salah seorang korban di Desa Nibong, Ujong Rimba, Kecamatan Mutiara. Penculikan yang sempat menggemparkan masyarakat itu justru terjadi pada hari keberangkatan rombongan Kopassus dari Pidie ke Lhokseumawe.³¹ Kepala Sub Detasemen Polisi Militer (POM) Sigli Lettu CPM Hartoyo yang dikonfirmasi, membenarkan penculikan itu yang menurut istilahnya sebuah “insiden” yang berhasil diatasi dengan baik.

Kejadian bermula ketika rumah M Yunus Ahmad (korban penculikan tanggal 28 Maret 1998, dan belum kembali) di Desa Nibong didatangi dua oknum dengan mengendarai mobil Toyota Kijang Biru BK 1655 LR. Kedua oknum tersebut berniat mengambil istri korban, Zaubaidah Cut (37). Kebetulan siang itu, Zaubaidah pergi ke Bireun. Penggantinya, oknum —diduga dari Pos Sattis Bilie Aron— kemudian mengambil ibunya (mertua M Yunus) bersama anak M Yunus yang berusia 15 tahun. Menurut keterangan kedua oknum tersebut, mereka diambil untuk dipertemukan dengan korban (M Yunus) yang kini masih hidup (ditahan) dan akan dikembalikan. Tapi, kemudian, mobil yang bermuatan dua oknum bersama keluarga korban itu pun kemudian parkir di simpang jalan Blang Malu (dekat SPBU Mutiara). Mereka merencanakan akan menunggu Zaubaidah. Warga sekitarnya pun menjadi gempar dan panik. Sebagian kemudian menunggu Zaubaidah di simpang lainnya untuk mencegah sang istri korban menjumpai para oknum. Begitu datang, sore hari, Zaubaidah diam-diam digiring langsung ke Sub Den-POM di Sigli.

Begitu menerima laporan tersebut, Lettu CPM Hartoyo segera menelepon Koramil Mutiara untuk “mengamankan” mobil Kijang biru itu. Menurut saksi mata, termasuk Iskandar Ishak SH dari LBH Iskandar Muda, dua anggota Koramil Mutiara dengan mengendarai sepeda motor menemui oknum Kopassus di persimpangan jalan. Sepeda motor itu terlihat menggiring mobil Kijang sampai ke Koramil Mutiara, saat menjelang maghrib. Menurut sumber di Sub Den-POM setempat, kedua oknum Kopassus itu sempat mendapat peringatan keras dari Kasub Den-POM via telepon. Intinya, kalau memang tahanan itu akan diserahkan, harusnya melalui Muspika ataupun langsung ke kepala desa. Namun, sebelum petugas Den-POM menuju ke Koramil Mutiara, kedua oknum Kopassus itu keburu menghilang dengan mobilnya.

Adanya dugaan masih tahanan, termasuk korban M Yunus itu, menurut Hartoyo, pihaknya akan berusaha melacak kembali di beberapa tempat. Hartoyo memang pernah menerima laporan masyarakat tentang dugaan ada tahanan yang masih disekap di beberapa tempat. Hartoyo mengatakan sudah mencarinya, seperti di Padangtiji, yang dilaporkan Kontras, tapi setelah ke sana, Danpos Sattis bilang tidak ada. Menurutnya, untuk menangkap oknum Kopassus yang bertindak “di luar prosedur” selama operasi tak semudah memproses oknum ABRI perorangan. Dalam operasi, mereka itu dalam suatu kesatuan. Ada penanggung-jawabnya. Kalau oknum perorangan, pasti akan diproses.

12. Diculik, Dijarah, Kepala Dipenggal

Kasus orang hilang yang masuk ke DPRD Tk II Aceh Timur, bertambah 24 kasus lagi, sehingga jumlah seluruhnya menjadi 38 kasus. Dari 38 kasus itu, hanya 11 orang yang ditemukan mayatnya. Data orang hilang ini berdasarkan laporan para janda yang kehilangan suami, anak-anak dan familinya. Tiga hari berturut-turut, sejak 20 Juli 1998, lembaga legislatif ini, didatangi para janda yang mengadukan nasib mereka. Sekitar pukul 10.00 WIB, sebanyak 14 janda dari Kecamatan Nurussalam (Idi Cut) dan tiga dari Kecamatan Peureulak, mendatangi gedung dewan untuk mengadukan suami dan anak mereka yang hilang. Hanifah dalam pengaduannya mengatakan, setelah suaminya Rusli Ishak, diculik, rumah kediaman mereka dibakar.³² “Hingga kini saya dan anak-anak terpaksa tinggal di rumah famili,” katanya dengan sedih. Sementara Barinsyah mengaku, suaminya hilang bersama sepeda motornya. Sedangkan orang hilang yang mayatnya ditemukan kembali, yaitu Muklis, warga Idi Cut. Putra dari ibu Kamariah ini ditemukan dalam keadaan kepalanya dipenggal. Warga Idi Cut lainnya Nurdin, Abdul Jalil, Abdul Yatim, Syahbuddin, Rusli Ishak serta Abdullah Karim, warga Desa Paya Meuligo, Peureulak, juga ditemukan mayatnya dalam keadaan mengenaskan. Sebelumnya, dilaporkan empat mayat orang hilang, juga ditemukan. Dengan bertambah tujuh lagi, maka menjadi 11 mayat yang ditemukan. Wakil Ketua DPRD Aceh Timur, Syamaun Budiman SH mengatakan, selain melaporkan tentang suami, anak dan adik mereka yang hilang, para janda itu juga meminta pemerintah agar dapat menanggulangi nasib mereka yang sudah menjanda bertahun-tahun. Para janda itu juga mengeluhkan masa depan anak-anak mereka. Karena, tidak ada lagi yang menanggung biaya pendidikan untuk mereka. Sementara itu, kalangan mahasiswa pro reformasi selaku mediator para pelapor orang hilang itu mengatakan, pihaknya tidak menunggu hasil proses pendataan DPRD, Karena, dikhawatirkan dewan akan lamban meresponnya. Berkaitan dengan kasus pelanggaran HAM di Aceh Timur, pihak mahasiswa akan membantu memberikan data kepada lembaga HAM yang ada. “Seperti forum peduli HAM yang berkedudukan di Banda Aceh,” kata salah seorang mahasiswa pro reformasi itu. Penambahan laporan yang masuk ke DPRD Tk II Aceh Timur tentang orang hilang yang belum ditemukan, sebagai berikut:

- Syafi'i (50), warga Desa Alur Beurawe, Kecamatan Langsa Timur, hilang, 6-6-1990
- Alamsyah Daud (40), warga Desa Alur Pinang, Kecamatan Langsa Timur, hilang, 27-12-1990

- M Yunus, (19), warga Desa Alur Pinang, Kecamatan Langsa Timur, hilang, 18-12-1990
- M Daud Ali, (45), warga Desa Paya Meuligo, Kecamatan Peureulak, hilang, 3-9-1990
- Abdullah K, warga Desa Blang Seunibong, Kecamatan Langsa Timur, hilang, 28-8-1997
- Abdul Muthalib (30), warga Desa Tualang, Kecamatan Peureulak, hilang, 27-4-1991
- Abdul Rasyid (70), warga Desa Tualang, Kecamatan Peureulak, hilang, 21-3-1991
- Razali ZA (48), warga Desa Tualang, Kecamatan Peureulak, hilang, 27-4-1991
- Ridwan, warga Desa Tringgadeng, Kecamatan Nurussalam, hilang, 14-4-1991
- Jamaluddin, warga Desa Tringgadeng, Kecamatan Nurussalam, hilang, 6-8-1991
- Abdullah, warga Desa Seunebok Simpang, Kecamatan Nurussalam, hilang, 1991
- Moh Isa, warga Desa Seunebok Simpang, Kecamatan Nurussalam, hilang, 7-7-1990
- Ibnu Hasan, warga Desa Seunebok Teungoh, Kecamatan Nurussalam, hilang, 25-6-1990
- Amat Diman, warga Desa Kampung Baru, Kecamatan Nurussalam, hilang ?-4-1991
- Moh Ali, warga Desa Seunebok Simpang, Kecamatan Nurussalam hilang 1991
- M Salim, warga Desa Blang Buket, Kecamatan Nurussalam, hilang 1990; Abdul Rahman (26), warga Desa Seunebok Teungoh, Kecamatan Nurussalam, hilang, 1991.

13. Ditembak dan Dibuang Ke Parit

Kasus orang hilang yang masuk ke DPRD Aceh Timur, telah mencapai 53 kasus, setelah lembaga legislatif setempat, menerima pengaduan sebanyak 15 kasus lagi. Di antaranya, sebanyak tujuh orang ditemukan jasadnya telah meninggal dunia. Sedangkan yang lainnya belum diketahui nasibnya. Orang hilang yang kemudian ditemukan mayatnya, Teungku M Yunus Ahmadi, warga Desa Tanjung Tualang, Kecamatan Peureulak. Kata Hanifah, suaminya itu ditembak di dekat rumahnya pada 27 Februari 1991. Usman Ilyas, warga Desa Tepin, Kecamatan Idi Rayeuk, diculik pada tahun 1991. Jenazahnya ditemukan di dalam parit di Desa Keude Geureubak.³³ Sedangkan yang lainnya juga ditemukan mayatnya, Armia Yasin (35), Warga Desa Bukit Pala, Peureulak, Syamsuddin Budiman (35) warga Desa Tanjung Tualang Peureulak, Alamsyah (45), warga Desa Paya Kaloi, Peureulak, Zailani Yusuf (45), warga Desa Babah Krueng, Peureulak, Zakaria Abdul Jalil (46), Warga Desa Lipah, Peureulak. Mereka yang dinyatakan masih hilang sebagai berikut:

- Djamaluddin Mahmud (23), mahasiswa, hilang, Maret 1991.
- Abdullah Bakarwan (43), warga Desa Matang Seulimeng, Langsa Barat, hilang, 25 Januari 1997.
- Usman Rauf (50), warga Desa Babah Krueng, Peureulak, hilang, 3 Maret 1991.
- Teungku H Achmad Dewi (43), Warga Desa Bantayan, Darul Aman, hilang 4 Maret 1991.
- Asnawi bin Usman (17), warga Desa Bantayan, Darul Aman, hilang, 4 Maret 1991.
- Zainal Abidin (32), warga Desa Paya Lipah, Peureulak, hilang, 26 April 1991.
- Ishak Yasin (35), warga Desa Utun Dama, Peureulak, hilang 23 April 1991.
- Muhammad bin Lutan (40), warga Desa Keumuning I, Darul Aman, hilang, 29-8-1990.

Semakin banyak para janda yang kehilangan suami, anak dan sanak familinya pada tahun 1990-1991 mengadu ke DPRD II Aceh Timur. Hingga 27 Juli 1998, kasus orang hilang yang masuk ke lembaga wakil rakyat setempat telah mencapai 93 kasus.³⁴ Anggota Komisi A DPRD II Aceh Timur, Mawardi Nur, mengatakan, kasus orang hilang yang masuk ke dewan sebanyak 37 kasus. Namun yang tercatat nama dan alamatnya hanya 31 kasus. Sedangkan enam kasus lagi belum terinventarisir secara akurat. Menurutnya, enam kasus lagi tidak jelas nama dan alamatnya tidak tercatat, kemungkinan akibat kelalaian petugas pencatat. Menurut pantauan, sejak para janda mengadakan prihalnya, kegiatan menginven-tarisir orang-orang hilang di lembaga legislatif itu, terkesan acak-acakan. Sistem pendataan yang dilakukan tidak menggunakan formulir yang seragam. Masing-masing pencatat menggunakan caranya sendiri. Akibatnya, ada korban yang tidak terdata nama dan alamatnya. Terbukti, dari 37 kasus yang masuk, enam di antaranya tercecer alias tidak terdata secara akurat. Hal ini sangat merugikan bagi masyarakat yang melapor-kannya. Dari 31 kasus yang tercatat nama dan alamatnya itu, 15 orang di antaranya ditemukan mayatnya. Di antaranya ada mayat yang dite-mukan dalam keadaan leher tergantung dengan tali, terapung di sungai, tergeletak di pinggir jalan, terkapar di dalam tambak udang dan parit-parit. Selain itu ada pula rumahnya yang dibakar. Orang hilang yang mayatnya ditemukan itu antara lain, Asnawi Hamzah (46) Warga Desa Bukit Agu, Kecamatan Idi Rayeuk, M Salim (45) Warga Gampong Beusa Seberang, Kecamatan Peureulak, Ilyas Mudsyah (42), Warga Gampong Beusa Seberang, Kecamatan Peureulak, Hanafiah Amin (60), warga Desa Kota Lintang, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Mat Yetdin (50) warga Desa Jengki, Kecamatan Peureulak, Johan Basyah (56) alamat tidak tercatat. M Amin bin Ibrahim (63), warga Desa Sampoimah, Kec Idi Rayeuk, M Musa (20) warga Desa Lhok Meurah, Kecamatan Nurussalam, Zainal Abidin (25) warga Desa Ponyan, Kecamatan Nurussalam, Teungku Ishak (48) warga Desa Bukit Bagok, Kecamatan Nurussalam, Jamaluddin (29) warga Desa Seunebok Tuha, Kecamatan Idi Rayeuk, Zakaria (20) warga Desa Lhok Kuyun, Kecamatan Darul Aman, M Jamin (35) Desa Simpang Punt, Kecamatan Nurussalam, Umi Kalsum (46), Desa Seunebok Buloh, Kecamatan

Darul Aman dan M Isya (40) warga Desa Pulo U, Kecamatan Nurussalam. Sebanyak 16 orang hilang yang belum diketahui nasibnya sebagai berikut:

- q M Gani Ibrahim (45), warga Desa Beusa Seberang, Peureulak, hilang pada 27 Ramadhan 1992.
- q M Isa Hasan (32), warga Desa Jengki, Peureulak, hilang, 1991.
- q Abdullah Isi (alamat tidak tercatat), hilang 1991.
- q Wahid Thalib (60) warga Gampong Mesjid, Nurussalam, hilang 16 Maret 1991.
- q M Isa (40), warga Desa Alu Luding II, Darul Aman, hilang 29 Agustus 1991.
- q T Daud Paneuk (37), warga Desa Panah Sa, Nurusslam, hilang 1991.
- q Abdullah (27), warga Desa Keumuning III, Darul Aman, hilang 1992.
- q M Yusuf (25), warga Desa Keumuning III, Darul Aman, hilang, 1991.
- q Ishak (39), warga Desa Bagok Panah I, Nurussalam, hilang, 15 Desember 1991.
- q M Jakfar (34), warga Desa Bagok, Nurussalam, hilang, 24 April 1991.
- q M Husin (50), warga Desa Bukit Rumiah, Darul Aman, hilang, 9 September 1991.
- q Zainuddin (25), warga Desa Bukit Panjau, Nurussalam, hilang, 10 Nopember 1991.
- q Ismail Hasan (45) warga Desa Seunebok Dalam, Nurussalam, hilang, 16 Nopember 1991.
- q Zailani (37) warga Desa Seunebok Dalam, Nurussalam, hilang 1996.
- q Ramli (40) warga Desa Lhee, Nurussalam, hilang, Pebuari 1991.
- q M Yusuf Ismail (30) warga Desa Sidodadi, Langsa Timur, hilang, 1991.

Kasus orang hilang, yang dilaporkan kepada pihak DPRD II Aceh Timur, sementara ini telah mencapai 117 orang, setelah tanggal 28 Juli 1998 masuk 24 kasus lagi. Sebanyak 23 kasus di antaranya dilaporkan warga Kecamatan Simpang Ulim.³⁵ Selebihnya satu kasus dari Peureulak dan satu lagi dari Idi Rayeuk. Para janda melaporkan kehilangan suami, anak dan sanak familinya. Menurut keterangan anggota Komisi A DPRD setempat, Eno Rukmana, dari 24 kasus orang hilang itu, hanya lima di antaranya ditemukan mayatnya. Sedangkan yang lainnya masih belum diketahui nasibnya. Orang hilang yang mayatnya ditemukan itu antara lain, Haji Yunus (46), Abdul Hamid (40), Syafaruddin (30), Ismail (25), Abubakar Ismail (41). Dari lima orang hilang yang ditemukan, tiga di antaranya ditembak. Seperti dilaporkan Abdul M Husin, warga Desa Leung Peut, Simpang Ulim, putranya itu diculik pada 8 Desember 1997. Ia ditembak tujuh hari kemudian, ketika pulang ke kampung, saat tiba di rumah. Sedangkan Syafaruddin, menurut pelapornya, dijemput orang tak dikenal di Malaysia, pada 27 Maret 1998 untuk dibawa ke Aceh. Tapi korban ditembak di negara tetangga itu. Korban dikuburkan di Malaysia. Sementara itu, Abubakar Ismail ditembak di tempat pada 15 September 1990. Menurut pelapornya, mayat tidak boleh diambil. Setelah 44 hari, baru mayat dikembalikan kepada keluarganya. Peristiwa yang paling memilukan lagi, seperti diuraikan Siti Hajar. Putranya Zulkifli yang masih berusia 13 tahun, diculik pada tahun 1992 di kawasan Desa Lubuk Pimping, Simpang Ulim ketika sedang pergi ke sekolah. "Hingga hari ini anak saya itu tidak pulang," kata Siti Hajar.

14. "Dikubur" Sampai Sebatas Leher

Akibat munculnya gangguan keamanan oleh GPK dan diberlakukannya "Daerah Operasi Militer" (DOM) di Aceh, banyak warga Aceh yang hilang nyawanya secara tidak wajar. Mereka ada yang menjadi korban tindakan kekerasan oknum aparat keamanan. Ada juga yang dihabisi GPK. Banyak orang hilang di Aceh yang tidak diketahui rimbanya. Di Aceh Timur saja, orang hilang yang tercatat di DPRD setempat, mencapai 202 kasus. Sedangkan yang ditemukan kembali telah menjadi mayat hanya berbilang jari. Namun, di antara korban yang "diambil", ada juga yang masih hidup. Mereka inilah sebagai saksi hidup tentang terjadinya pelanggaran HAM di daerah ini. Adalah Amril (35), warga Idi Rayeuk, bersama keluarganya, sudah berada di gedung DPRD II Aceh Timur. Ia bermaksud ingin menguraikan penderitaan pahitnya kepada tim pencari fakta (TPF) DPRD-RI di gedung dewan tersebut, akibat disiksa oknum aparat keamanan. Namun, acara temu dialog masyarakat dengan TPF di ruang sidang DPRD Aceh Timur itu, baru dimulai sekitar pukul 10.20 WIB. Sehingga, kesempatan masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya sangat terbatas. Amril sendiri tidak sempat untuk mengadukan permasalahannya kepada anggota dewan terhormat dari Jakarta itu. Namun, ia sempat menuturkan kisah nyatanya itu. Sebagai seorang nelayan kecil, ia mengatakan hidupnya pada waktu itu, sangat tenteram. Untuk menyambung hidup keluarganya, ia pergi melaut dengan perahu, khusus untuk menjaring udang. Tapi nasib berkata lain. Pada suatu malam, 2 Juli 1996, ketika hendak melaut, ia diambil oleh oknum tentara dengan tuduhan sebagai anggota GPK. Selanjutnya apa yang terjadi. Esoknya, di markas para aparat keamanan itu, ia disiksa dan dipaksa harus menga-ku sebagai anggota GPK. Berkali-kali Amril memelas agar jangan dipukul, karena ia bukan GPK. Tapi para oknum petugas itu tidak percaya, bahkan setiap ia memelas, broti mendarat ke tubuhnya. Bukan itu saja siksaan yang dialami Amril. Kuku jari tangan dan kakinya dicabut dengan tang dan dihimpit dengan batu. Setiap kuku yang tercabut disuruh isap. Menurut pengakuan ayah dari tiga orang putra yang masih kecil-kecil itu, ia juga pernah ditanam sampai sebatas leher di Bukit Cut, Keude Geurubak, Idi Rayeuk. Di bukit itu, mulut Amril dikencingi, setelah terlebih dahulu rahangnya dijepit dengan tangan agar mulut ternganga. Akibat siksaan berat itu, tubuh Amril kini terasa teruk. Urat kakinya ada yang putus akibat dihantam dengan benda keras. "Selama lima bulan saya disandera di markas itu," kata suami Syafariah tersebut. Lain halnya dengan Cut Ainul Mardhiah (57) yang

juga menuturkan kisah sedihnya. Janda yang juga berasal dari Idi Rayeuk ini, merupakan korban GPK. Suaminya, Serka Trimin Trihartono, dibunuh oleh kelompok separatis itu. Trimin pada tahun 1989 bertugas di Koramil Idi Rayeuk sebagai Babinsa Kota. Pada suatu malam, ketika ia sedang mengawasi sebuah PHR, tiba-tiba datang seorang menjemputnya memberi laporan ada keributan di Kuala Idi. Tanpa curiga, Trimin pergi ke Kuala Idi. Ia dibonceng dengan sepeda motor oleh orang yang menjemputnya itu. Namun naas bagi Trimin. Dalam perjalanan ke Kuala, di suatu tempat yang sepi, ia ditembak dari belakang sehingga tewas ketika itu juga. "Itulah yang terjadi terhadap keluarga kami," kata Cut Ainul.

15. Dibuang ke jalan

Menjelang pasukan ditarik dari Aceh, yang kabarnya dilakukan antara 19 dan 20 Agustus 1998, beberapa kejadian menarik terjadi di Aceh. Misalnya, ada empat pria yang hanya mengenakan celana dalam dengan kondisi fisik dan psikis yang buruk, serta tanpa identitas apapun, 12 Maret 1998 pukul 21.00 WIB "dibuang" dari sebuah mobil jeep di dua lokasi di tengah jalan raya Banda Aceh-Medan antara kawasan Syamtalira Bayu-Geudong, Aceh Utara. Seorang di antaranya, tewas ditabrak sebuah mobil saat lari menyeberang jalan beberapa jam setelah diberi makan dan tempat mengaso oleh penduduk. Peristiwa tersebut disaksikan sejumlah warga Desa Bunot Bayu dan warga Geudong. Warga setempat menduga, keempat pria korban "buangan" itu korban penculikan alias orang hilang yang telah mengalami penyiksaan berat dan keburu dilepas menjelang penarikan pasukan keamanan nonorganik dari Aceh. Beberapa warga sekilas melihat paling sedikit ada empat oknum dalam mobil yang mirip jeep land rover dan tak jelas plat nomor polisinya itu. Setelah menyelesaikan tugasnya membuang "muatan" berupa empat anak manusia itu, dengan tenang mobil tersebut meluncur kembali di jalan raya menuju arah timur Lhokseumawe. Menurut keterangan warga, dua korban pertama dibuang di kawasan Desa Bunot Bayu. Sedangkan dua orang lagi di kawasan jalan tak jauh dari Geudong Samudera. Baik dua korban yang dibuang di Bayu, maupun dua lagi yang dibuang di Geudong, bangkit dan berjalan terhuyung-huyung di jalan raya hingga menarik perhatian orang banyak yang saat itu berada di tepi jalan sekitar dua lokasi kejadian. 13 Agustus 1998 sekitar pukul 01.00 WIB pagi, beberapa pemuda Bunot Bayu melihat ada orang yang berjalan terhuyung-huyung, tak tentu arah, dan berputar-putar di jalan raya yang padat arus lalu-lintas itu. Maka, para pemuda mendatangi orang tersebut dengan maksud mencari tahu mengapa mereka tampak lemas dan terbingung-bingung. Setelah ditanya ternyata orang itu adalah salah seorang dari dua korban yang dibuang di kawasan Beunot Bayu. Dari profil tubuhnya diperkirakan korban masih muda dan berusia antara 18 sampai 25 tahun. Pemuda Desa Bunot kemudian meminta bantuan salah satu warga desa untuk memberi makan kepada korban yang fisiknya tampak lemah sekali itu. Selagi ia makan, beberapa pemuda --termasuk ibu yang memberinya makan-- mengajukan beberapa pertanyaan menyangkut identitas korban. Meski ditanya siapa nama dan dari mana, ia hanya menjawab singkat, "Matang Peusangan". Ini adalah nama sebuah ibukota kecamatan di Aceh Utara. Setelah menyebut dua kata itu, korban berteriak berkali-kali, "Jangan setrum saya. Jangan pukul kepala saya pakai pistol, sakiit, jangan siksa saya lagi," tangis korban tersedu-sedu dan histeris, sambil memegang kedua kepalanya seraya menunduk. Terkesan ia menghindari sesuatu, seperti layaknya orang yang coba menghindari pukulan beruntun. Wajahnya saat itu kelihatan pucat dan ketakutan, serta tak berani memandang wajah orang-orang yang memberinya makan di Desa Bunot. Seuai makan, empat pemuda yang bertugas di Poskamling Langa Bayu memberinya tempat tidur di pos itu. Menjelang subuh, keempat pemuda yang tertidur lelap, terbangun. Tapi, tak lagi melihat korban di sana. Mereka bergegas mencari korban yang diam-diam meninggalkan Poskamling saat mereka tertidur itu. Mereka menelusuri arah jalan timur dan ke barat karena yakin korban tersebut belum jauh dari Poskamling. Dugaan keempat pemuda itu benar. Tak jauh dari Poskamling, tiba-tiba mereka mendengar suara tabrakan di jalan raya, tapi tak sempat memperhatikan mobil apa yang melintas dengan cepat. Ternyata yang ditabrak adalah orang yang sedang mereka cari. Peristiwa kecelakaan dan ihwal korban itu dilaporkan kepada petugas Polsek Bayu. Korban yang saat itu diperkirakan telah tewas di TKP akibat ditabrak mobil, diangkut ke RSUD Lhokseumawe. Hingga 16 Agustus 1998 mayat tak dikenal itu masih terbaring di ruang jenazah RSUD Lhokseumawe, kondisinya memprihatinkan. Korban hanya mengenakan sepotong celana dalam, tinggi tubuh ditaksir 160 Cm, kurus ceking. Luka baru akibat tabrakan terlihat mengganggu di bagian kepalanya dengan darah yang membeku. Kedua belah siku tangan dan lututnya juga terluka. Keanihan juga tampak pada mayat korban. Sebagian giginya telah rontok. Selain itu, bekas luka-luka lama (sebelum tabrakan) terlihat jelas pada tubuh korban terutama di bagian dada, pipi, dan bagian kedua lengan yang diduga keras, korban sebelum tewas ditabrak telah "kenyang" dengan penganiayaan yang cukup berat. Kantor LBH Yayasan Iskandar-Muda mendapat laporan dari penduduk Bunot tentang "pembuangan" keempat korban tersebut. Yacob Hamzah langsung mengecek ke kamar jenazah RSUD Lhokseumawe dan mendapat kepastian dari seorang warga Bunot bahwa korban tewas akibat ditabrak mobil itu adalah salah seorang korban eks "buangan" mobil misterius di Bunot yang sempat diberi makan dan tidur di Poskamling Langa Bunot. Pihak LBH Yayasan Iskandar Muda membuat analisa dari keterangan penduduk Bunot serta mencocokkannya dengan daftar laporan orang hilang serta sejumlah foto-foto korban orang hilang yang ada di arsip LBH tersebut. Melihat kondisi korban yang tewas dan cerita penduduk tentang tiga korban lain, pihak LBH menduga keempat korban "buangan" dari mobil

miterius itu adalah korban penculikan yang telah mengalami siksaan berat dan berada dalam kondisi fisik dan psikis yang amat lemah. Ketua LBH ini juga menyerukan demi kemanusiaan, jika itu adalah korban orang hilang atau penculikan, maka cara-cara “pembuangan” korban yang sedang mengalami sakit psikis dan depresi mental yang berat seperti itu, sama dengan membunuh. “Cara yang lebih manusiawi adalah menyerahkan atau membebaskan mereka dengan cara yang tidak menyakiti lagi,” saran Yacob. Mohd Yacob Hamzah menegaskan, kalau perlu LBH yang dipimpinnya siap menolong korban jika diberitahu keberadaannya dan berjanji menjaga “rahasia” lokasi tempat korban berada. “Demi kemanusiaan, jangan menambah penderitaan korban lagi. Allah akan mengampuni dosa bagi orang yang membantu orang-orang yang teraniaya,” kata Yacob rada religius.

16. Korban Pembantaian

Sementara itu, di Desa Alue Ie Mirah Kecamatan Simpang Ulim, Aceh Timur, kuburan massal ditemukan di kawasan Bukit Gantung yang letaknya 15 Km dari Keude Lhok Nibong. Di lokasi itu ditemukan lima korban pembantaian yang diduga dilakukan oknum aparat keamanan pada tahun 1990. “Satu di antara korban ditanam oleh M Sareh dalam kebun coklatnya dan diperkirakan tulangnya masih ada,” ujar Ismail Ali (30), penduduk Alue Ie Mirah. Beberapa warga Desa Alue Ie Mirah mengatakan bahwa mereka pernah melihat para korban dibawa aparat keamanan ke Bukit Gantung, persis di Lorong Cot Puteh. Korban dibawa dengan mata tertutup dan tangan diikat, malah sambil berjalan paksa korban dipukuli. “Kami hanya melihat lima orang saja yang pernah dibawa ke sana,” kata Ismail. Menurut Ismail, warga yakin korban dibunuh di Bukit Gantung, sedangkan mayatnya di lempar ke jurang. Tapi, dari lima orang yang dibawa ke sana hanya satu kali terdengar letusan senjata, yang lainnya diduga dibunuh dengan pisau atau justru dicekik. Pendeknya, warga melihat tiap aparat membawa korban ke lokasi itu dan tidak ikut dibawa pulang saat aparat kembali. Malah penduduk menemukan sepasang sepatu yang digantung di pohon oleh aparat setelah pemiliknya dibunuh. “Semua orang tahu dan tanya saja kepada kepala desa,” kata warga. Warga Alue Ie Mirah juga mengatakan bahwa selain para tahanan dari tempat lain dibawa dan dibunuh di Bukit Gantung juga warga desa itu hilang diculik aparat keamanan dan 20 unit rumah penduduk dibakar oknum aparat. Warga desa itu yang diculik antara tahun 1990 lalu masing-masing, M Yusuf (32), Abu Bakar (50), M Aji (16), Pawang Ibrahim (50), Nurdin Ahmad (25), Abdul Majid (35), Abd Mulateb (32), Abdul Manaf (35), Abd Mutaleb Ahmad (45), Abdullah Pawang (55), dan Abdurrahmah (30). Semua korban diculik pada tahun 1990 dan hingga kini belum diketahui nasibnya.

17. Dipaksa Ikut Membantu Operasi, Lalu Dilibas

Berbagai akal licik dilakoni aparat keamanan untuk memperdaya anggota masyarakat yang dijadikan sasaran selama operasi militer berlangsung di Aceh sejak 1990 hingga 7 Agustus 1998. Modus yang menonjol dilakukan adalah mengajak calon korban dengan dalih ikut membantu operasi menumpas GPK, menjadikan mereka sebagai tameng dalam pertempuran, lalu dihabisi.³⁶ Atau paling tidak, mereka dikondisikan untuk tewas tanpa pertanggungjawaban apapun dari aparat mau-pun kesatuannya. Dari hasil klarifikasi kasus, Forum Peduli Hak Asasi Manusia (FP HAM) mencatat praktik-praktik kejahatan seperti itulah yang menimpa banyak warga sipil di pedesaan, mulai dari Kabupaten Pidie, Aceh Utara, hingga Aceh Timur. “Paling sedikit, 25 korban pembantaian dari 720 pengaduan yang diterima FP HAM tewas dengan modus operandi seperti itu,” ungkap Ketua Pelaksana Harian FP HAM, Ir Abdul Gani Nurdin didampingi Ketua Pokja Investigasi/Advokasi Mukhlis Mukhtar SH. Salah satu kasus yang mereka sebutkan adalah apa yang menimpa Geuchik Hasim Ibrahim (45), warga Bayeun, Aceh Timur. Pada suatu siang di tahun 1990, suami Mariati Salam (35), yang baru punya satu putra, ini didatangi petugas keamanan di rumahnya. Jelas-jelas petugas menyatakan kepada Hasim bahwa perannya sebagai tokoh masyarakat di desa itu amat diperlukan untuk ikut membantu operasi militer menumpas GPK. Meski khawatir akan keselamatan Hasim, tapi istri dan anaknya, Saiful (7), akhirnya merelakan juga lelaki yang mereka cintai itu pergi. Dua hari berselang, tak ada kabar apakah benar Hasim ikut operasi atau tidak. Tak pula diketahui seberapa besar perannya dalam operasi itu, kalau memang ada. Yang jelas, pada hari ketiga setelah ia dijemput petugas, seorang warga menemukan Hasim sudah jadi mayat di pinggir desa. Para petugas yang menjemputnya, jangkakan menga-ku bertanggung jawab, datang pun tidak untuk, misalnya, sekadar menyatakan duka cita ke rumah Hasim. Dengan dalih “ikut operasi” pula Bransyah, Banta Lidan, dan Bugeh (ketiganya bersaudara) dijemput di rumahnya, lalu dihabisi pada suatu malam di tahun 1994. Warga Desa Maneh, Geumpang, Pidie itu adalah anak, menantu, dan adik dari Denabah yang datang melapor ke FP HAM. Menurut Denabah, yang datang menjemput para korban itu adalah aparat keamanan berbaret merah. Pertama diambil adalah Bransyah, menyusul Banta Lidan, dan Bugeh. Ketika ditanya Denabah mengapa anak, menantu, dan adiknya itu diambil, petugas menjawab tangkas: ikut bantu operasi ABRI! Mereka pun dilepas Denabah dengan harapan bisa kembali dalam keadaan selamat. Tapi, naluri keibuan Denabah akhirnya beralasan bahwa ajakan “ikut operasi” itu hanya dalih. Terbukti, tak jauh dari rumahnya, selagi melintas di Simpang Kene (Geumpang) Bransyah ditembak. Letupan suara bedil terdengar ke rumah Denabah, dan warga pun berhamburan, kemudian menyaksikan tubuh Bransyah terbujur kaku ditembus timah panas.

Sedangkan Bugeh, dihabisi dengan cara ditembak di Cot Bate Keling, juga tak jauh dari Desa Maneh, Geumpang. Akan halnya, sang menantu, Banta Lidan, dieksekusi dengan cara lehernya digorok, sampai terpisah kepala dari badan. “Badannya dibuang ke gunung, sedangkan kepalanya dipulangkan ke kampung kami,” ungkap Denabah. Pendek-nya, dalam sehari itu Denabah dan keluarganya yang tersisa, bersama warga desa mengubur tiga mayat. Ia tak habis pikir, mengapa mereka yang semula didalihkan ikut membantu operasi militer, pulang-nya sudah jadi mayat dan hanya tinggal kepala. Ismail Mahmud (63), warga Leubok Maneh, Jambo Aye, Aceh Utara yang hanya tamatan SR, juga mengalami nahas pada suatu hari di tahun 1991. Kala itu, menurut istrinya, Keumala-wati (45), suaminya yang masih kekar itu dijemput sejumlah petugas di rumahnya pada 5 Maret 1991, selagi shalat magrib. Petugas menyatakan, dan itu didengar langsung oleh Keumalawati, suaminya akan dibawa ke Langkahan, masih di Aceh Utara, untuk ikut membantu operasi ABRI menumpas GPK. Sehari di Langkahan, Ismail dibawa aparat ke Rantau Peureulak, katanya, juga untuk membantu operasi selama seminggu. “Tapi, sudah tujuh tahun lebih, suami saya belum dipulangkan. Jangan- jangan sudah meninggal. Tapi, kalau sudah meninggal di mana kubur-nya,” Keumala menggugat. Ada pula korban yang diambil dengan dalih ikut membantu menunjukkan tapal batas desa. Itulah yang menimpa Asy’ari bin Teungku Amin (32), warga *Dayah* Baroh, Ulim, Pidie, yang diambil 30 April 1991, dan ditemukan jadi mayat pada 4 Mei 1991. Ia dibawa naik mobil dengan dalih perlu bantuan menunjukkan tapal batas jalan. Lalu dibawa ke Pos Sattis Gle Cut, dan sebulan kemudian ditemukan di Desa Geulanggang Ulim sudah jadi mayat dengan luka tembak di tubuhnya. Begitu dikisahkan Aisyah (40), kakak kandung korban. Selain didalihkan ikut operasi, ada pula korban yang dijadikan tameng operasi, sebagaimana dialami Teungku Rahman Ali (70), warga Cot Baroh, Glum-pang Tiga, Pidie. Suatu hari di tahun 1996 ia dibawa ke Pos Sattis Bilie Aron (*Rumoh Geudong*), ditembak, lalu diobati. Kemudian, disiksa lagi dan dibawa operasi untuk ditempatkan di barisan depan (sebagai tameng tentara) saat menyerang persembunyian aktivis GPK di hutan. Melihat banyak warganya yang diambil dengan dalih ikut operasi dan tak pernah dipulangkan—kalaupun ada dalam bentuk mayat—Syech Asnawi Yah-ya (32), Kades Blang Kulam, Kecamatan Batee, Pidie coba beradu argu-men dengan aparat keamanan. Sebagai pengayom, ia tak ingin warganya terus-terusan diambil tanpa kesalahan yang jelas, kecuali dialasankan ikut membantu operasi. Tapi, adu argumen itu pula yang membuat sar-jana FKIP Jabal Ghafur, Sigli, dan ayah dua anak ini dicituk petugas pada tahun 1991. Lalu dibawa ke jembatan Delima, Pidie. Dipasang tali di lehernya, kemudian disuruh tarik kepada 10 warga. Dalam situasi begitu, petugas menyemburkan peluru ke tubuhnya. Tewas di tempat. “Mayat adik saya itu baru boleh diambil esoknya oleh ibu saya,” lapor abang korban, Syech Baihaqi Yahya kepada Forum Peduli HAM.

18. Teror Berlebihan Terhadap Korban

Menurut catatan, salah seorang korban perkosaan, Nyak Maneh Abdullah (35) beberapa hari lalu juga sempat mendapat teror dari seorang *cuak* yang diduga atas suruhan para oknum Kopassus. Waktu itu, rumah Nyak Maneh di Desa Rinti, Mutiara, sempat didatangi sejumlah oknum dengan mobil. Hanya satu orang—TPO alias *cuak* di *Rumoh Geudong* bernama Is alias R—yang turun menjumpai Nyak Maneh. Para oknum aparat menunggu di mobil. “Saya ditanya, siapa yang menyuruh melapor ke DPRD,” kata Nyak Maneh. “Saya jawab, saya sendiri yang lapor. Karena banyak orang kampung sudah lapor. Saya tidak takut lagi sekarang.” R menanyakan beberapa pertanyaan lagi dengan nada mengancam. Belakangan diketahuinya, ternyata Kepala Desa (Kades) Rinti setempat juga sudah lebih dulu diinterogasi oleh beberapa oknum aparat yang cukup dikenal oleh Pak Keuchiek. “Saya memang tidak diapa-apakan. Tapi, saya merasa takut juga. Beberapa malam ini saya tidak tidur di rumah,” tambah Nyak Maneh. Pasi Intel Kodim 0102 Pidie Letda Inf Suyanto menegaskan apabila memang ada pelapor yang diteror atau sekadar ditanyai demikian, dipersilakan melapor ke Kodim 0102 Pidie. “Kita tetap menjamin keamanan setiap pelapor. Tak perlu takut,” tegasnya, seperti ketika ia—mewakili Damdim—menegaskan hal itu di hadapan TPF DPR RI di Sigli. “Kalau yang meneror itu oknum aparat, sebaiknya kenali nama, dari pos mana, kalau perlu pangkatnya apa. Supaya gampang kita kita panggil dia,” jelas Suyanto. Sejumlah Pos Sattis (PS) di Pidie, mulai kosong. PS Padangtiji, PS Bilie Aron, PS Kota Bakti, PS Jiem-Jiem, dan PS Pintu I Tiro, terlihat berkemas-kemas berangkat menuju Lhokseumawe. Malah dikabarkan, penghuni PS Tringgadeng dan PS Ulee Glee sudah lebih dulu minggat. keberangkatan anggota pasu-kan elite itu disambut gembira oleh masyarakat. Begitupun, banyak warga yang menyaksikan kepergian mereka dengan tatapan sinis. Seperti yang terjadi di PS Bilie Aron. Warga sekitar *Rumoh Geudong* dari balik pagar melihat kepergian “para oknum” itu dengan sinis. Sebagian mengumpat, dan sebagian mengucapkan syukur. “Bagaimana tidak bersyukur. Kami sudah tak sanggup lagi mendengar dan menyaksikan orang-orang disiksa di *Rumoh Geudong* itu. Kalau malam, tidur kami sering terganggu karena mendengar jeritan-jeritan orang yang disiksa. Atau mendengar lagu-lagu dari tape yang diputar keras-keras waktu penyiksaan,” tutur seorang warga Desa Aron. Bahkan, setelah berangkat para oknum itu pun ternyata masih meninggalkan sebetuk penderitaan lain. Menurut anggota keluarga pemilik *Rumoh Geudong*, oknum Kopassus itu meninggalkan hutang jutaan rupiah. Bayangkan, enam bulan rekening telepon belum dibayar. “Mereka suruh kami menagih pembayarannya sama bupati,” kata pemilik rumah. Tak sedikit Pemda Pidie mengeluarkan dana untuk biaya operasional Kopassus, termasuk rekening telepon, listrik, sewa rumah, kendaraan,

dan sebagainya selama DOM. Sumber di Setwilda Pidie menyebutkan, tunggakan telepon di Mess Kopassus di Blang Asan yang mencapai Rp 7 juta pada tahun 1997 belum lunas. Ditambah lagi rekening telepon di tujuh Pos Sattis lainnya.

19. Saat Eksekusi Subuh Nurhayati Ingin Memeluk Suaminya

Nurhayati (35), hanya berteriak histeris saat menyaksikan suaminya diberondong dengan senjata, di rumahnya, 20 September 1990. Wanita yang baru dua bulan melahirkan ini, tersentak saat mendengar suara letusan senjata di bawah rumahnya yang tinggi, *rumoh* Aceh. Beberapa menit sebelumnya, ia masih melihat suaminya, Basyaruddin, sembahyang shubuh. Setelah turun, ia mendapatkan suaminya sudah terkapar di tanah. Ia mengerang menahan sakit, dan dari pergelangan tangan kanan tampak keluar darah karena luka tembak. Tampak tiga oknum tentara dan Kades A Wahab berdiri mengelilingi korban, sembari membiarkan korban merintih-rintih kesakitan.³⁷ Setelah beberapa saat, sambil berdiri santai, kembali menembak dan mengenai pinggang korban. Nurhayati menangis, dia ingin maju memeluk suaminya yang tampak makin payah setelah peluru kedua menembus pinggangnya. Kepala desa dan ketiga petugas berseragam tampak santai saja, menonton erangan Basyaruddin yang tak berdaya. Namun niat Nurhayati itu dicegah dengan kasar, sehingga dia terjerembab ke halaman. Hal yang sama dialami oleh ibunya, Fatimah, juga dipukul berkali-kali karena menangis meraung-raung. Entah belum puas, Basyaruddin yang sudah sekarat itu, kemudian diseret ke halaman. Oknum berseragam itu kemudian memotong batang pisang yang rupanya dipakai sebagai bantal Basyaruddin. Setelah disandarkan di pohon itu, para oknum berseragam tersebut mundur beberapa meter, untuk kemudian menembak secara beruntun. "Saya tidak sanggup mena-ngis lagi. Apa dosa suami saya. Ibu juga disepak karena tak mau diam saat dibentak agar berhenti menangis," katanya saat melaporkan peristiwa tersebut ke sebuah LBH di Lhokseumawe, beberapa hari lalu. Sejak saat itu, Nurhayati telah berstatus janda satu anak yang baru berumur dua bulan. Lain lagi kisah M Hasbi Yacob, korban yang saat itu sebagai Kades Bili Baro Kecamatan Matangkuli, harus menjalani siksaan selama 32 hari di posko Rancung Batuphat, milik PT Arun, hanya gara-gara bertanya mengapa ada oknum ABRI yang memukul warganya. Kejadian berawal 10 Juli 1990, ia bersama sekdes M Diah dibawa empat anggota tentara Yonif 125, setelah menanyakan kenapa warga desanya dipukuli. Saat itu sebuah mobil colt yang dipakai oleh beberapa oknum berseragam ABRI, tersangkut di jalan sosial. Lalu tentara itu minta bantuan melalui Kades untuk membantu. Saat itu juga terkumpul sebanyak 35 pemuda desa ikut membantu. Tapi setelah itu, tanpa sebab petugas mengancam anak-anak muda desa sambil memukuli mereka. "Saya waktu itu mengingatkan supaya mereka jangan dipukuli, apalagi tidak bersalah. Saat itulah saya langsung dicituk dan dituduh semua warga desa itu GPK," kata Hasbi. Suasana lebih buruk lagi saat Hasbi (58) bersama Sekdes M Diah, ditelanjangi di depan warganya selama 1,5 jam. Diperlakukan begitu, kedua tokoh desa ini terpaksa harus menunduk menahan malu. Baru kemudian mereka dinaikkan ke mobil menuju Posko Alue Lengkit. Sedangkan uang dalam saku celananya sebanyak Rp 1,2 juta hasil jualan jeruk juga diambil petugas. Kemudian di tengah perjalanan, keduanya ditutup mata dan saat dibuka mereka sudah tiba di Rancung. "Tidak bisa diingat sakitnya. Kami disiksa seperti anjing," tutur mantan kades Bili Baro itu sambil tercenung. Di dalam barak itu, terlihat ada 13 orang tahanan lain yang kondisinya sangat menyedihkan. "Setiap malam kami dipukuli, dilempar ke dalam beling, disetrum listrik di kemaluan, dan dikasih makan dengan tulang ikan. Kalau lambat atau cepat ambil nasinya, langsung kami disepak," kata Hasbi. M Hasbi yang sampai saat ini alat vitalnya masih mengeluarkan darah akibat penyiksaan setrum listrik itu, tidak mampu membayangkan kesadisan petugas. "Kami kalau minta shalat, tidak dikasih, dan kalau baca *fatihah* kera-keras, barak kami itu dihujani batu dari atas bubung," tutur Hasbi yang mengadu ke LBH Iskandar Muda Lhokseumawe. Hasbi yang bernomor tahanan 98 itu ia disepak bersama 13 tahanan lainnya, di antaranya nama Alamsyah (Kades Arongan Lhoksukon), Syahril (kades Nibong), Ahmad Saidi (anggota Polsek Sungai Pauh Langsa), Usman (anggota Koramil Sumigo Raya A Timur), Ibrahim (warga Jrat Manyang), H Manaf (Panton Labu), Ampon Ahmad (Jeunib), dan Ibrahim warga Penayang Lhokseumawe (masih hidup). Keuchik Hasbi setelah disiksa sebulan lebih, dipulangkan kembali ke Posko Alue Lenyit dan diserahkan kepada Koramil Matangkuli. Se-mentara jabatan Kadesnya sendiri sudah duluan dicopot oleh Camat Sadali Badai (saat ini pembantu bupati Lhoksukon).

20. Dikubur 3 Hari Lalu Ditembak

Berbagai drama pembantaian semasa operasi militer berlangsung di Aceh kini satu per satu mulai diungkapkan keluarga korban atau saksi mata yang semakin berani melapor ke lembaga-lembaga yang bersedia menampung pengaduan mereka. Salah satunya adalah apa yang dilaporkan Nyak Adek (65) mengenai nasib menantunya, Nyak Umar Daud (40), warga *Dayah Cot*, Tiro, Pidie yang pernah dikubur separuh badan dan disetrum selama tiga hari berturut-turut, lalu didor.³⁸ Seperti dilaporkan Nyak Adek, peristiwa yang menimpa menantunya itu terjadi pada suatu hari di tahun 1991. Nyak Adek yakin benar bahwa penculik suami Fatimah (30) itu adalah beberapa aparat keamanan yang berbaju loreng. Tak jelas apa salah Nyak Umar, juga tak dijelaskan terlibat GPK atau tidak, tapi tiba-tiba ia didatangi petugas di tempatnya bekerja masih di desa *Dayah Cot*, Tiro. Di depan teman-teman sekerjanya, ayah empat anak ini disuruh

menggali lobang sedalam satu meter lebih di bawah todongan senjata, lalu ia dipaksa masuk ke lobang itu. Setelah itu, ia ditimbun separuh badan dan disetrum berkali-kali dengan dipaksa mengaku terlibat GPK. Siang maupun malam, selama dua hari, ia diperlakukan seperti itu, namun tak juga mengakui apa yang dituduhkan aparat kepadanya. Pada hari ketiga, sepertinya petugas mulai habis kesabaran, lalu menembak mati lelaki yang cuma tamat SD itu. Setelah jadi mayat, petugas memberitahu keluarganya agar jenazah Umar Daud dikuburkan oleh pihak keluarga. Tapi, dalam suasana berkabung itu, istri korban dan anak-anaknya masih menghadapi cobaan lain: petugas membakar rumah Nyak Umar. Seluruh isinya tak sempat diselamatkan. Kini, Nyak Adek mau tak mau harus menampung dan menghidupi istri almarhum Nyak Umar (Fatimah) yang tak lain anak kandungnya sendiri bersama empat cucu yang semuanya masih duduk di bangku SD. Sepanjang hari, seperti dikatakan Saifuddin Bantasyam SH, MA dari Pokja Investigasi/Advokasi FP HAM, forum yang belum berusia sebulan itu terus menerima pengaduan dari para korban. Di samping ada yang datang langsung, melapor melalui surat, maupun melalui penerimaan langsung pengaduan dari korban/keluarga korban di tempat asalnya seperti mereka lakukan di Ulee Gle (Pidie), Pantolabo (Aceh Utara), dan Peureulak (Aceh Timur) pada 27-29 Juli 1998. FP HAM juga menerima enam surat pengaduan dari korban yang mereka poskan ke Kotak Pos 70. Salah satunya adalah pengaduan dari Ainul Marliah (59), yang melaporkan kasus penembakan yang menimpa anak, M Taib. Peristiwa tragis itu terjadi di rumah korban sendiri, Dusun Rayeuk Pange Matangkuli, Aceh Utara pada tanggal 2 November 1990. Saat itu, datang sejumlah aparat keamanan. Tanpa bertanya dan menjelaskan apa-apa, langsung mengikat tangan pemuda Taib. Lalu dipukul dan ditendang di depan keluarganya. Kemudian ia digelandang ke luar rumah dan digiring ke jalan. Dipaksa berbaris dengan sejumlah lelaki lain di desa itu yang juga digelandang dari rumah masing-masing. Tapi, entah karena alasan apa hanya M Taib dan Ibrahim Abdullah yang ditembak. Mayatnya kemudian dikubur keluarga. "Saya harap kasus tersebut diungkap faktanya dan dipertanggungjawabkan secara hukum yang berlaku di negara Indonesia," tulis Ainul Marliah. Bahwa Ainul adalah warga Rayeuk Pange, itu diperkuat oleh surat keterangan yang dibuat oleh Camat Matangkuli, Usman Ishak BA, tertanggal 19 Maret 1997. Harapan serupa juga diungkapkan Nurdin Abdullah sebagai abang kandung Ibrahim Abdullah yang adiknya itu juga tewas didor pada hari dan tempat yang sama, setelah tangannya diikat dan dikasari. "Tegakkan hukum dan hak-hak asasi manusia di negara ini," ujarnya berpesan. Nahas juga menimpa Bustamam, warga Desa Nga Matang Ubi, Matangkuli, Aceh Utara. Menurut adik kandungnya, Abdul Manaf yang melapor ke FP HAM, abangnya itu diburu petugas keamanan di rumahnya pada 22 Juli 1993. "Rumah kami dikepung oleh beberapa anggota ABRI dan abang saya ditangkap, lalu dibawa pergi." Sebulan kemudian, ia ditembak di tempat terbuka di Desa Reungkam, Aceh Utara. Mayatnya dikembalikan dalam kondisi sebelah matanya copot. Dari saksi mata Abdul Manaf kemudian mendapat info bahwa abangnya itu dihujani 12 peluru, sehingga kondisi jasadnya luka parah.

21. Dimasukkan ke dalam Goni

Kisah tragis di akhir hayatnya juga dialami Ridwan (40), warga Dama Tutong, Peureulak, Aceh Timur, pada suatu hari di tahun 1989 silam. Menurut ayah korban, Abdurrahman Ali (78) kepada FP HAM, anaknya itu pada pukul 14.00 WIB, 5 Rabiul Awal 1989 sedang ikut musyawarah untuk peringatan maulid Nabi Muhammad SAW. Tiba-tiba ke tempat rapat itu datang sejumlah petugas keamanan yang dari tampilannya mengenakan baret merah. Semua orang yang berhimpun di situ mereka kumpulkan lalu disiksa, tanpa dijelaskan apa salahnya. Puluhan warga itu kemudian dipaksa naik ke truk dan menuju Kantor Danramil Peureulak. Setelah itu dibawa ke Tuang Cut, masih di wilayah Aceh Timur. Di tempat ini mereka masih mengalami siksaan pedih. Menurut Abdurrahman Ali, hanya sedikit dari mereka yang dibawa ke Tualang Cut itu yang pulang kembali ke desanya. Malang bagi Abdurrahman, anaknya Ridwan, tak ikut dalam rombongan yang pulang. Ia hanya mendapat sepotong cerita dari orang-orang yang pulang bahwa Ridwan, ayah tiga anak itu ditembak petugas di depan mereka. Lalu mayatnya dimasukkan ke goni, kemudian dibuang, namun tak diketahui ke mana. "Kalau ada yang bisa menginformasikan di mana kuburnya, kami sangat berterima kasih, karena ingin ziarah ke sana," ujar Abdurrahman. Menurut Jubir FP HAM, Dr Humam Hamid, temuan hasil investigasi dan pengaduan mengenai orang hilang itu, belum merupakan fakta final, melainkan masih sekadar petunjuk permulaan tentang adanya pelanggaran HAM dan hukum di Aceh. Dalam waktu dekat, tim validasi FP HAM akan turun ke berbagai desa di Pidie, Aceh Utara, dan Timur, untuk memastikan dan mengkonfirmasi kepada Kades dan camat setempat tentang orang-orang hilang dan korban tindak kekerasan itu.

22. Mereka yang Dikasari Aparat dan Dikubur Hidup-hidup

Kegiatan keamanan di Aceh yang berlebihan, represif, brutal, dan cenderung tak berperikemanusiaan telah memakan banyak korban di kalangan sipil. Bahkan, pukulan-pukulan dan tendangan yang setiap pagi dan sore serta setiap malam mereka terima, mereka "sedekahkan untuk Republik yang haus darah ini. Untuk pukulan-pukulan ini tidak ada tuntutan-tuntutan untuk diselesaikan secara hukum.

Teungku. Abdurrahman, 70 tahun, warga Geulumpang Tiga, Pidie, Aceh. “Saya dipaksa menggali kubur di bawah toongan senjata. Dengan tertatih-tatih harus mengais lubang, mempersiapkan kuburan yang belakangan saya ketahui ternyata untuk diri saya sendiri. Kuburan itu persis di samping sebuah kuburan lain yang sudah duluan ada. Saya hanya bertakbir dalam hati, menyebut-nyebut nama Allah. Sementara petugas keamanan yang berdiri di dekat saya terus mengomando, Gali terus, gali! Mereka membentak dan mengancam saya. Padahal mereka itu muda-muda, pantas saja jadi anak-anak saya. Saya diambil oleh oknum aparat sepulang dari sawah, atas sepengetahuan kepala desa. Lalu dibawa ke markas yang populer disebut Rumah Geudong di Kecamatan Geulumpang Tiga. Kebetulan, rumah bekas hulubalang itu memang dijadikan markas aparat. Di situlah saya disiksa tiga hari tiga malam. Ditelanjangi dan kemaluan saya disetrum. Kedua tangan saya diikat, seperti orang disalib. Waktu itu, ada lima pria lain yang juga ditelanjangi dan disetrum. Kemudian ada lagi dua perempuan yang juga ditelanjangi. Kasihan, perempuan-perempuan itu disetrum juga, sama seperti kami. Saya sedih sekali. Diikat dan dipukul dengan rotan sesuka hati. “Mereka bertanya kepada saya di mana senjata. Mana saya tahu. Saya tak punya senjata, tak menyimpan senjata. Kami semua tak ada senjata, tapi terus dipaksa untuk menjawab mana senjatanya. Mana saya tahu. Saya dipukul lagi, dan kemudian dimasukkan dalam bak berisi taik dan kotoran got. Orang yang memukul saya itu masih ada. Dia itu algojo. Dulu rambutnya panjang, sekarang rambut dia sudah pendek. Mungkin supaya kita tak kenal lagi. Dulu mobilnya saya lihat putih, sekarang catnya sudah hitam. Sesudah puas disiksa, kemudian saya dimasukkan dalam sel. Saya masih ditelanjangi juga. Tiga hari tiga malam begitu terus, akhirnya saya dibawa ke kuburan. Di sana saya disuruh gali lubang, katanya mau ditanam hidup-hidup karena tak mau mengaku. Saya hanya menyebut-nyebut nama Allah sambil menggali lubang. Kemudian saya disuruh masuk ke dalam lubang itu, dan disuruh telentang. Kemudian mereka menimbun saya dengan tanah. Setelah itu tanahnya diinjak-injak, terutama di bagian perut saya. Untung timbunan yang di kepala saya tidak diinjak dan tidak rapat sehingga saya masih bisa bernafas meski megap-megap begini (Abdurrahman kemudian memperagakan dirinya dalam tanah). Empat menit kemudian mereka gali lagi tanahnya. Saya diangkat sudah lemas, kemudian dibawa lagi ke *Rumoh Geudong*, tempat penyiksaan itu. Ditelanjangi lagi dan ditanya lagi mana senjata. Saya masih jawab tidak tahu karena memang tak punya senjata. Akhirnya saya dimasukkan lagi dalam sel. Esoknya saya lihat, dua dari tujuh orang yang ditahan bersama saya sudah mati. Mereka dimasukkan dalam goni pupuk, dan menjelang malam, dinaikkan dalam mobil. Entah ke mana dibawa. Akhirnya saya dilepas. Sebelum pergi, saya dibentak lagi. Katanya, apa yang kau alami dan lihat di sini, jangan diceritakan sama siapa pun. Awas kalau kau cerita. Sudah itu saya disuruh pulang dan baru sekarang berani bercerita, apalagi sudah ada tim pencari fakta DPR yang datang ke Aceh. Apa yang saya sampaikan ini benar adanya. Saya mau bersumpah pakai *al-Quran*. Saya juga bersedia ditembak, asal jasad saya tidak dihilangkan, biar anak cucu saya bisa ziarah. Soalnya, sudah percuma saya hidup. Dulu, sebelum kemaluan saya disetrum, dalam sebulan bisa dua tiga kali saya menggauli istri. Sekarang tidak bisa sekalipun lagi.

23. Menonton Eksekusi Maut

Beberapa warga Lueng Sa, Kecamatan Simpang Ulim, Aceh Timur, yang tak mau identitasnya dibebaskan bertutur sbb: Dua warga desa itu menjadi korban eksekusi, masing-masing Sarjani Ibrahim (35), penduduk Lueng Sa dan Teungku Imum Budiman (50) penduduk Lueng Dua. Keduanya ditembak di lapangan bola kaki Sinar Agung, disaksikan ratusan penduduk setempat. Bertepatan pada 17 bulan Ramadhan 1991, sekitar pukul 10.30 WIB, para penculik menangkap kedua korban untuk kemudian memborgolnya. Dengan mata tertutup kain hitam, korban diseret ke lapangan sepak bola desa setempat. Sementara penculik lainnya mengerahkan penduduk agar menyaksikan eksekusi tersebut, termasuk Teungku. Ibrahim, ayah Sarjani. Setelah ratusan warga berkumpul, dua korban yang sebelumnya telah disiksa, serta diikat pada tiang gawang, kemudian ditembak persis di bagian kepala. Sarjani yang saat itu baru lima bulan kawin dengan Mardiana bahkan istrinya sedang hamil tiga bulan meninggal tertembus dua peluru di kepalanya. Sedangkan sebuah peluru menembus kepala Teungku Imum Budiman, hingga membuat orang tua tersebut juga meninggal seketika. “Kami dipaksa melihat ketika korban ditembak. Kalau tidak, kami kena pukul dari penculik. Sehingga semua warga jelas melihat kedua korban jatuh tersungkur serta darah segar membasahi tiang gawang,” kata warga tersebut. Tindakan oknum penculik yang terlatih tersebut tidak hanya sesadis itu. Tapi, Sarjani kiper Poraja Pantolabu yang pernah mewakili Aceh ke Jambi tahun 1980-an setelah ditembak tangannya dipotong supaya bisa melepaskan borgol di tangannya. Kemudian oknum itu menyuruh warga menanam mayat Sarjani tanpa dimandikan. Beberapa tokoh di sana merencanakan kedua jenazah korban akan dimandikan sesuai dengan ajaran Islam. Namun, penculik yang bersikap kasar itu membentak masyarakat agar tidak perlu dimandikan. “Tanam saja bangkai itu. Untuk apa dimandikan,” ungkap mereka mengutip ucapan sang oknum pada waktu itu.

24. Digorok Batang Lehernya

Ibrahim, 32 tahun, penduduk Sawang, Aceh Utara. Penjual nasi ini hingga kini diisukan sudah meninggal setelah lehernya digorok, dan dibuang dalam jurang. Pria yang masih menyisakan

parut hasil gorokan benda tajam di lehernya itu tampak bergetar menahan tangis, nyaris tak bisa berkata-kata. Saya diambil oleh oknum petugas di Sawang, Aceh Utara. Lalu dibawa ke markas mereka dan dipukul sampai pingsan. Setelah itu, saya sudah tak ingat apa-apa. Saya sadar kemudian sudah berada di jurang, yang saya tahu ternyata di jurang Cot Panglima, Km 25 lintasan Bireuen-Takengon, atau 50 kilometer dari kampung tempat saya diculik. Saat saya sadar, leher saya sudah berdarah dan di badan saya hanya ada celana dalam. Ternyata saya terluka sayat. Saya manjat tebing curam itu pelan-pelan, merayap sambil memegang dahan-dahan kayu. Akhirnya saya berhasil naik dan jalan kaki beberapa kilometer. Syukur alhamdulillah, kemudian ketemu kawan, dan dinaikkan motor-nya, dibawa ke rumah sakit, yaitu Puskesmas. Karena sudah parah, dokternya bilang tak sanggup, dan ibu saya dengan ambulance ke RS di Lhokseumawe. Di sana dokternya juga bilang tak sanggup, dan akhirnya saya dibawa ke Banda Aceh. Leher saya dijahit, dan saya diopname selama 30 hari. Agar orang-orang tak curiga, saya dibilang ditabrak honda. Petugas keamanan menuduh saya membantu GPK. Padahal, saya cuma jual nasi, beli beras untuk masak. Eh, katanya, beras itu untuk bantu GPK. Mana saya tahu. Saya ditangkap saat membawa belanjaan ke warung. Saya jual nasi buka warung. Selama ini saya jarang ke luar. Dibilang saya sudah mati. Sebab katanya, kalau mereka tahu saya masih hidup, pasti dicari lagi. Saya takut....

25. Suami diculik

Sudarni, 40 tahun, Desa Rambong, Mutiara, Pidie. Suami saya dijemput bersama Pak *Keuchik* (Kades). Dibawa ke markas keamanan, dan sampai sekarang tak kembali. Kalau masih hidup, tolong kembalikan suami saya. Kalau sudah mati, tolong tunjukkan kuburnya. Sebagai janda beranak lima hidup saya amat pedih sepeninggal suaminya tercinta. Kepedihan itu terasa lebih pahit karena setelah dua bulan suami saya diculik, si bungsu meninggal. Saya sudah tak sanggup membiayai anak sekolah. Jangankan membeli susu, makan pun sudah tak cukup. Di antara kasus-kasus kematian di Pidie, sejumlah pelapor mengaku cukup mengenali pelaku penculik atau setidak tempat tugas penculik. Contoh pada kasus kematian Teungku Usman Raden (imam *meunasah* setempat), Teungku Abdullah Husen (wiraswata), dan Abdurrahman Sarong (PNS di Dinas PU Sigli), ketiganya warga Desa Selatan Batee. Menurut laporan istrinya masing-masing, Aminah (40), Jariah (28), dan Usmawati (40), penculik suami mereka adalah seorang aparat yang cukup mereka kenal, berinisial PK. Menurut para istri itu, pengambilan ketiga suami mereka itu berlangsung dalam suatu razia KTP (dikumpulkan banyak orang) di sebuah lapangan pada tanggal 1 Juni 1991. "Suami saya punya KTP, tapi dibawa juga. Walaupun kami tahu siapa yang menculik, tapi kami tidak tahu dibawa kemana mereka," ungkap Jariah. Setelah tiga hari kemudian, seorang warga memberitahukan mereka bahwa mayat Usman, Abdullah, dan Abdurrahman yang mulai membusuk ditemukan di pinggir bukit dekat Waduk Lhokseumani, Batee. Ketiga istri bersama warga lainnya segera ke sana. Di atas dada mayat diletakkan KTP masing-masing. Dalam banyak kasus, korban penculikan dihabisi di tempat lain. Mayatnya "dibuang" atau dicampakkan di luar kawasan pos penculik (mengaburkan TKP?). Seperti yang dilaporkan HA Jalil Abdullah (66), warga *Meunasah* Sukon Cubo, Bandar Baru, mengenai kejadian penculikan anaknya Kamarullah (17), santri Darul Falah, Bandar Baru. Kamarullah diculik bersama tiga temannya sesama santri ketika sedang belajar dan diskusi dengan gurunya di pesantren itu pada 1992. Tiba-tiba muncul sejumlah oknum aparat dengan sebuah mobil, tanpa ba-bi-bu (tanpa menjelaskan apa salah mereka), langsung mengambil keempat santri itu. Enam hari kemudian, mayat keempat santri itu ditemukan berserakan tercampak di Blang Usi.

26. Tubuh Disayat-sayat

Sekitar dua bulan kemudian, dari rumah sakit itu M Ben mengaku dibawa ke sebuah tempat di sekitar kilang pengolahan gas PT Arun (Rancong). Setelah ditanyai macam-macam di sana, katanya, ia dibawa lagi ke sebuah tempat di sekitar Lhoksukon. Empat malam kemudian, dikembalikan ke rumah. Baru 20 hari di rumah, M Ben bersama 14 orang keluarga dekat dan tetangganya, dijemput lagi oleh pasukan tentara lain, dibawa ke sebuah pos operasi di Sidomulyo. "Di pos itu, kami semua dituduh membantu orang-orang GPL. Karena tidak mengakui tuduhan tidak beralasan tersebut, kami pun disiksa. Telinga saya disayat-sayat dengan pisau. Lalu ditaruh air jeruk nipis. Kepala dipukul dengan balok. Bahkan, ketika saya bilang mau kencing, disuruh kencing atas kepala adik saya bernama Yakob. Tidak hanya itu, kami pun disuruh berdiri dalam hujan. Dikasih sabun, lalu disuruh begini-begini (M Ben memeragakan tangannya pada kemaluan). Lalu disuruh lagi merayap di atas pohon pihmie (putri malu). Sakit sekali rasanya," urai M Ben.

Setelah empat hari empat malam disiksa di pos operasi Sidomulyo itu, katanya, M Ben bersama saudara-saudara dan tetangganya dijemput oleh pasukan lain dari Simpang Kramat dan dipulangkan ke rumah masing-masing. "Setelah 20 hari di rumah, saya baru bisa bergerak bangun dari tempat tidur," kata M Ben. M Ben yang belakangan ini mengaku hanya bisa mempertahankan hidup dengan bekerja sebagai penggembala lima ekor sapi milik warga desanya itu, mengaku mulai berani melapor ke LBH Iskandarmuda, setelah mendengar bahwa Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto telah mencabut DOM dari Aceh. "Saya dengar itu dari orang-orang kampung yang baru pulang mengadu ke sini," katanya lugu.

Dengan tubuhnya yang telah cacat permanen, M Ben mengaku tidak bisa lagi bekerja sebagai petani, sebagaimana digelutinya sebelum tragedi memilukan itu. Untuk mencari nafkah bagi keluarganya sekarang, kata M Ben, sangat bergantung kepada kerja keras istrinya, Ti Aisyah, sebagai buruh tani. Anak tertuanya yang baru tamat SD, katanya, telah putus sekolah. Dua orang masih SD, dan yang terkecil belum bersekolah. Direktur LBH Iskandar Muda Lhokseumawe, Mohd Yacob Hamzah SH menyatakan pihaknya sekarang memfokuskan penampungan pengaduan oleh korban yang langsung mengalami pelanggaran hak azasi manusia atau pelanggaran hukum lainnya akibat dari pemberlakuan operasi militer (DOM) di Aceh selama ini.

27. Pemilik Dibunuh, Harta Dijarah, Rumah Dibakar

Daftar orang hilang, diculik, dan dibunuh orang-orang tak dikenal di Aceh Utara berdasarkan pengaduan keluarganya ke LSM Yayasan Putra Dewantara (Yapda) Lhokseumawe dan LBH Iskandar Muda telah mencapai 176 kasus. Pihak pengadu mengaku keluarga mereka hilang sekitar tahun 1989-1994 dan ada juga yang hilangnya tahun 1997. Menu-rut para pelapor, korban-korban ada yang diketahui sudah dibunuh. Sebagaimana diceritakan janda Rohani Sufi (50) penduduk Reungkam Kecamatan Matang Kuli, pada 19 Februari 1992 suaminya Abdul Rani (58) dijemput penculik. Korban ditembak di depan istri dan anaknya, kemudian rumah dibakar serta sepeda motor diambil penculik dan tidak dikembalikan.³⁹ Kisah serupa juga diceritakan janda Fauziah (35) penduduk Tempok Masjid Cunda Kecamatan Muara Dua, suaminya T Zainal Abidin (41) dijemput orang tidak dikenal ketika membeli rokok. Kemudian penculik datang ke rumah mengambil semua perabot rumah tanggan-nya dan bahan pecah belah. "Sampai sekarang tidak dikembalikan," ujar Fauziah ketika mengadu ke LBH Iskandar Muda. Selain LBH Iskandar Muda, kini muncul Yapda yang juga untuk membantu mendata identitas korban penculikan.

Direktur Eksekutif Yapda Zulfikar MS didampingi Divisi *Community Organizer* Sugito Tassan mengatakan, pihaknya telah menerima pengaduan orang hilang 25 kasus. Kecuali itu, katanya, juga LSM Yapda menerima pengaduan korban perkosaan oleh penculik. Namun, pihaknya belum mendata secara rinci kasus tersebut. Direktur Yapda yang juga bagian dari "Kontras" Aceh dan Ketua Walhi Aceh itu, mengaku para keluarga korban yang mengadu menangis di depannya sambil menunjukkan foto keluarga mereka yang hilang. Para keluarga korban meminta agar korban dicari di mana keberadaannya saat ini. "Maka kita sudah turun ke lapangan mencari data otentik," kata Zulfikar. Sementara korban orang hilang yang diadakan ke DPRD oleh keluarganya, belum berhasil didapatkan datanya. Namun beberapa anggota legislatif Aceh Utara itu mengaku sudah menerima laporan warga dengan puluhan kasus pelanggaran HAM tersebut. Direktur Yayasan LBH Iskandar Muda Mohd Yacob Hamzah SH mengaku telah menerima pengaduan 148 kasus. Malah tanggal 22 Juli 1998 sekitar pukul 17.20 WIB, kantornya di Kampung Jawa Lama didatangi orang yang mengaku dari "Palang Merah Internasional." Ketika pemuda asal Amerika Serikat mengaku bernama Alex (30) itu datang ke kantornya. Alex, kata Mohd Yacob, sempat melihat beberapa keluarga korban yang sedang mengadu. Namun, warga AS itu tidak berdialog dengan para pengadu, karena mengaku kedatangannya sekedar ingin berkenalan dan ingin mengatakan ia berada di Aceh selama ini. "Tapi tidak disebutkan di mana ia menginap dan apa tujuannya datang ke Aceh," kata Mohd Yacob. Daftar orang hilang lihat tabel. Nama-nama yang dimuat dalam tabel itu, nomor 123 sampai 147 diperoleh dari LSM Yayasan Putra Dewantara, Jalan Listrik Pasar Inpres Lhokseumawe. Sedangkan nomor 144 hingga nomor 176 bersumber dari ke Yayasan LBH Iskandar Muda Jalan Iskandar No. 143 Tel 45341 Lhokseumawe.

28. Dituduh GPK, Nyaris Temui Ajal

Gara-gara tak setuju pemotongan dana bantuan desa oleh pihak atasannya, seorang kepala desa di Aceh Utara, mengaku harus menerima perlakuan sangat sadis yang nyaris menemui ajal. "Bahkan saya dituduh GPK. Padahal, saya tak pernah berhubungan dengan kelompok itu," ungkap Hanafiah Sulaiman (65), mantan kepala Desa Meunasah Teungoh Kecamatan Jeunib⁴⁰ ketika mengadu ke LSM YAPDA Lhokseumawe. Geusyik Piah, demikian ia akrab dipanggil, kepada LSM YAPDA mengisahkan kronologis tragedi yang dialaminya. Semasa masih menjabat kepala desa tahun 1980-an, ia selalu tidak sependapat dengan atasan-nya. Katanya, sang atasan menyuruhnya menekan surat pertanggung-jawaban penggunaan dana bandes, tapi ia menolak, sebab banyak pemotongan tanpa prosedur. Karena menolak menekan surat yang dibuat menurut kehendak atasan, katanya, lantas ia dijemput oknum petugas dan ditahan. Selama dalam tahanan tentara Jahiliyah, kata Geusyik Piah, "*Masya Allah, hanya Allah saja yang menolong saya,*" ujarinya dengan *ghirah* kegeraman terhadap negara. Disebutkan ia kemudian diberhentikan secara sepihak dari jabatan kepala desa itu. Hanya agamalah satu-satunya obat yang bisa menyembuhkan luka-luka Aceh. Atau, dalam ungkapan yang rada Marxian *sikit*, hanya agama sajalah yang bisa menjadi racun penawar bagi kekejaman negara di Aceh. Negara ini harus dilawan dengan agama. Agama adalah candu satu-satunya bagi stamina perlawanan rakyat terhadap negara.

29. Tiga Malam Tidur Bersama Mayat

Kendati kejadiannya telah tujuh tahun lalu, namun apa yang pernah dialami Teungku Nurdin Galon (63) masih lengket dalam ingatannya. Apalagi tubuhnya mengalami cacat akibat

penyiksaan selama ia ditahan para penculik. “Saya tak menyangka bisa hidup, tapi kekuasaan Allah membuat saya luput dari maut,” kata lelaki jangkung yang mengaku pernah dipaksa tidur dengan mayat selama tiga malam.⁴¹ Teungku Nurdin mengaku diperlakukan secara tak manusia oleh oknum-oknum pasukan elit yang terlibat “Operasi Jaring” di Aceh Utara. Dan, siksaan serta fakta-fakta yang pernah dilihatnya, dua hari lalu telah diceritakan kepada LSM YAPDA di Lhokseumawe yang menerima laporan orang hilang dan korban-korban pelanggaran HAM selama operasi penumpas-an GPK yang kini diganti nama dengan GPL (gerombolan pengacau liar). Ia mengatakan, selain tidur bersama mayat orang tidak dikenal, Nurdin juga sempat melihat beberapa tahanan mati disiksa, kemudian janazahnya ditanam menggunakan *becho* sekitar pukul 03.00 WIB dini hari akhir tahun 1991. “Ini bukan fitnah, saya bersedia tunjukkan lokasi kuburan itu jika diperlukan,” kata Nurdin Galon (alamat lengkap ada pada LSM YAPDA Lhokseumawe). Didampingi Ketua LSM YAPDA Lhokseumawe Sugito Tassan, petani miskin asal Alue Ie Puteh Kecamatan Baktia, menceritakan bahwa dirinya ditangkap 5 Maret 1991 dengan tuduhan sebagai GPK. Kala dijemput ke rumah, kata Teungku Nurdin, mata ditutup dan dibawa ke salah satu tempat. Di sana juga banyak warga lain disandera para penculik.

Selama dalam tahanan, kata Nurdin, siang dan malam para penculik bersikap kejam dan keji terhadap para sandera, semua tahanan tidak ada yang beres fisiknya. Siang-malam penculik terlatih itu masuk kamar tahanan, dalam keadaan mabuk melakukan penyiksaan yang membuat tahanan babak belur. “Tiga setengah tahun saya berada di tempat mengerikan itu,” kata Teungku Nurdin. Kala berada di tempat itu, kata Nurdin, tubuhnya dicambuk dengan rotan. Dipukul dengan popor senjata. Dikontak listrik dan berbagai penyiksaan dilakukan siang malam. Selain di tempat itu, Teungku Nurdin juga mengaku pernah ditahan di tiga lokasi lainnya yang suasananya juga cukup mengerikan, terutama karena perlakuan sadis. Saat berada di tempat penahanan kedua, Teungku Nurdin, mengaku lebih parah lagi. Ia sempat bermalam-malam ditidurkan dengan mayat orang-orang yang tak dikenalnya. “Tiap malam saya lihat mayat dikeluarkan dari LP itu dan diangkut dengan mobil. Jenazah itu dibuang ke sungai seperti ke Sampoiniet, ditanam dalam komplek dan banyak dibawa ke kawasan Seureuke,” kata Nurdin. Nurdin didampingi Gito Tassan juga menunjukkan tubuhnya yang cacat akibat disiksa penculik, yakni giginya ompong karena dihantam dengan kayu. Ibu jari kakinya pun dipatahkan yang akibatnya hingga sekarang ia belum bisa berjalan tanpa pakai sandal. Demikian juga dadanya masih terasa sakit dan tiap batuk selalu mengeluarkan darah. Bukan hanya itu, kata Nurdin, malah para penculik juga mengambil jam tangannya merk Mido dan uang tunai Rp 400.000 serta meminta uang nasi selama ia ditahan di salah satu camp di Desa Matang Ubi Km 307 Jalan Banda- Medan, Kecamatan Lhoksukon. Nurdin masih ingat oknum yang mengambil jam dan uangnya. Setelah 3,4 tahun mendekam di camp itu, kata Teungku Nurdin, ia dibenarkan pulang ke rumahnya. Sebelum pulang, ia lebih dulu diobati, terutama luka-luka bakar di bagian tubuhnya. Ada juga syarat lainnya, yakni, para penculik menekankan bahwa apa yang terjadi selama dalam tahanan tidak diceritakan pada orang lain.

30. Korban DOM Salah Tangkap Disiksa hingga Lumpuh, Bahkan Ada yang hingga Tertawa dan Menangis Sendiri

Seorang korban salah tangkap di Desa Matang Ubi, Kecamatan Samalanga, Aceh Utara, menjadi lumpuh dan kehilangan suara setelah ke luar dari kamp penyiksaan.⁴² Sementara seorang warga Geulumpang Bungkok, Samalanga, mengalami stres berat sehingga sering menyanyi, tertawa, atau menangis sendiri hingga saat ini, juga setelah ditangani oleh aparat. Di Desa Matang Ubi, nasib buruk itu diderita oleh M Diah Usman (50). Meski hanya empat hari ditangani oleh oknum aparat, ia menderita lumpuh, dan tak mampu bersuara sejak tahun 1991. Hari-hari M. Diah sejak itu hanya terbaring lemah di tempat tidur, dan hanya mampu berbicara dalam bahasa isyarat. Nasib M. Diah, itu, dilaporkan anaknya, Rusli ke LBH Iskandar Muda. Rusli pula yang mengurus ayah-nya, sekaligus mencari makan untuk keluarga dengan cara menyeder benih udang di pinggir pantai. Korban salah tangkap ini dijemput petugas keamanan 25 April 1991 di rumahnya, Desa Kuala Cangko Kecamatan Tanah Pasir. Ia dibawa ke camp penyiksaan di Km 307 Banda Aceh Medan, persis di Desa Matang Ubi Lhoksukon. Memang, kata Rusli, ayahnya ditahan sekitar empat malam, namun penyiksaan selama dalam tahanan cukup berat. Korban distrum dengan listrik, dipukul di bagian punggung dan dada hingga benar-benar tak berdaya. Penjemputan ayah-nya itu, kata Rusli, melalui Kepala Desa setempat, dengan alasan ia terlibat GPL (GPK waktu itu).

Kala itu, Kades sudah memberitahukan bahwa M Diah itu bukan orang yang dicari. Karena, yang dicari itu Usman Bayu, juga berpenyakit “kaki gajah,” seperti yang dialami oleh M Diah. Namun, meski Kades telah memberitahukan, tapi petugas tetap membawa korban ke Matang Ubi dan disiksa siang malam bersama para tahanan lain. Korban M Diah baru dilepaskan setelah Muspika Kecamatan Samudera mengeluarkan surat Mandah No.25/33/74/03/1991. Dalam surat Mus-pika 30 April 1991 menyatakan bahwa M. Diah Usman itu adalah petani penjarang udang, ia adalah penduduk Kuala Cangko Tanah Pasir, sedangkan sebelumnya ia penduduk Tanjung Hagu Kecamatan Samudera Geudong. Artinya, dia bukan orang yang dicari itu. Dalam pengaduannya ke LBH Iskandar Muda, putra korban minta agar pelakunya ditindak. Sementara ayahnya yang sudah lumpuh itu diminta perhatian pemerintah untuk mengobatinya, baik kaki dan tangan yang lumpuh maupun suaranya bisa direpro kembali, kata Rusli berharap.

Sementara Darmawan (29), penduduk Desa Geulumpang Bungkok, Kecamatan Samalanga Aceh Utara, juga dilaporkan ke LBH Iskandar Muda oleh Adiknya Badruzzaman (26). Dalam laporannya, Badruzza-man mengatakan, korban dijemput oleh oknum ABRI tahun 1992 dan dibawa ke kamp di Samalanga, tiga hari kemudian dibawa ke Rancung Lhokseumawe. Bukan hanya petugas yang memukulnya di tahanan itu, tapi juga preman yang sedang mabuk ikut memukul korban. Setelah menjalani masa penahanan beberapa bulan, korban dibebaskan dalam kondisi fisik yang lemah karena kurang gizi dan akhirnya jadi stres. Malah sampai sekarang, kata Badruzzaman, kehidupan abangnya itu seperti dalam alam khayalan, ketawa sendiri, menyanyi, dan pergi pagi pulang malam, serta sering mengamuk dengan keluarganya.

31. Dari Perontokan Gigi sampai Diganduli Besi

Tengku M. Yusuf Alibasyah, warga Blang Bunot, Bandar Baru, pada tanggal 5 Januari 1993 diambil paksa oleh dua orang petugas di Pos Sattis Jiem-jiem.⁴³ Lalu dianiaya dengan cara mukanya dipukul berkali-kali sampai giginya rontok semua. Karena sulit mengunyah lantaran tak lagi bergigi, makanan umumnya dia telan langsung. Kini ia sakit-sakitan. Ismail Usman (45), Cot Baroh, Glumpang Tiga, pada tahun 1992 di Pos Sattis Jiem-jiem dan Pos Sattis Kota Bakti, dipukul dengan popor senjata, balok kayu, dan benda keras lainnya hingga kini mengalami tulang rusuk patah. Dadanya sesak dan pahanya sakit. Teungku Rahman Ali (70), warga Cot Baroh, Glumpang Tiga, pada 1996 dibawa ke PS Bilie Aron (*Rumoh Geudong*), ditembak (lalu diobati). Kemudian, disiksa lagi dan dibawa operasi untuk ditempatkan di barisan depan (sebagai tameng tentara). Idris (30), tamatan SMP. Ia dipermak di Murong Cot, Kecamatan Sakti, Pidie, pukul 07.00 WIB di suatu hari tahun 1996. Sebagai warga yang pendiam, Idris tergolong nekad. Ia diketahui menanam senjata di dekat rumahnya atas suruhan orang lain dengan imbalan. Karena ketahu-an petugas, Idris ditangkap dan digelandang ke Lamlo. Delapan bulan ditahan, lalu dibuang di Cot Panglima di Takengon. Diikat kaki dan tangannya. Matanya ditutup. Tapi, menurut pengaduan istrinya, Rosmiati (28), Idris kemudian berhasil mencapai rumah pada bulan Ramadhan tahun ini. Setelah itu, menghilang lagi setelah pernah pulang pergi ke rumah sebanyak tiga kali. Belakangan, karena suaminya tak tertangkap, giliran si istri dibawa ke rumah Gedong Aron. “Di situ saya ditelanjangi dan *dikuntak* (maksudnya disetrum) di kemaluan sampai mengeluarkan kotoran. Yang menelanjangi saya adalah Kopassus yang saya kenal.” Korban lainnya adalah Nyak Meulo (21), tamatan SD. Wanita yang tadinya gadis ini mengalami nahas pada tahun 1995 di Desa Pule Ie, Kecamatan Tangse, Pidie. Nahas itu menimpa dirinya ketika kedua orang tuanya pergi ke kebun dan menetap lama di pondok yang ada di kebun tersebut. Menjelang satu tahun kemudian, ketika orangtua korban pulang, mendapati anaknya sudah hamil. Nyak Meulo mengaku pada suatu hari, digagahi paksa oleh oknum aparat. Giliran M Ali Sabi (63), ayah Nyak Meulo mendatangi aparat yang berinisial Suk itu, ternyata ia sudah dipindah tugaskan ke Batam sampai sekarang. Akhirnya, tinggal-lah pahitnya pada keluarga mereka.

Bab 09-03 Kekerasan Terhadap Perempuan Aceh

Berbagai bentuk tindak kekerasan yang dialami perempuan yang terjadi dari ratusan kekerasan yang terjadi seputar diberlakukannya DOM selama ini tidak pernah tersingkap.⁴⁴ Ada beberapa alasan yang menyebabkan tindak kekerasan terhadap perempuan tidak pernah diketahui oleh masyarakat luas, seperti: korban pemerkosaan, sering dianggap aib dan memalukan oleh masyarakat. Akibatnya korban atau keluarga selalu berusaha untuk menutupi kejadian tersebut. Selain adanya ancaman dari pelaku untuk “tidak mengungkap” kejadian tersebut pada orang lain, kerena pelakunya aparat yang sedang bertugas di daerah tersebut, membuat korban/keluarga selalu berada dalam kondisi diintimidasi. Sebagai akibatnya adalah penderitaan dan trauma yang dialami korban sangat mendalam, sehingga sangat sulit bagi korban untuk menceritakan pengalaman buruknya, apalagi kepada orang yang tidak terlalu dikenalnya.

1. Wanita Aceh Diperkosa Tiga Tentara

Sekitar 1.000-an masyarakat Pidie—terbanyak janda bersama anak kecil—yang duduk berdesakan di Gedung DPRD Pidie, menyambut kedatangan TPF dari DPR RI yang hari itu berkunjung ke Pidie. Ketika Ketua Tim Hari Sabarno menanyakan apakah masyarakat di daerah itu merasa “terganggu” dengan GPK, dan apakah GPK memang masih ada? Mereka serentak menjawab lantang, “Tidak. Tidak ada!” Bahkan dari kelompok janda yang duduk di sayap kanan gedung terdengar jeritan lemah (dalam bahasa Aceh), “Kami bukan takut GPK. Tapi takut pada tentara!” “Jika nanti muncul (GPK), apa yang dilakukan?” tanya ketua tim ini. “Hukum saja! Kami hukum pancung mereka!” teriak masyarakat serentak, spontan, dan tak ada unsur rekayasa. Karena memang sesungguhnya GPK itu adalah rekayasa dari penguasa sendiri. Pertanyaan—tampaknya juga spontan—itu dilontarkan TPF setelah mendengar banyak laporan dari korban dan keluarga korban tentang kisah penculikan maupun tindak kekerasan selama operasi militer di Pidie. Dari sejumlah pelapor yang tampil, kisah tersadis dan sangat menggugah tim DPR RI adalah yang dialami CS (disingkat), 42 tahun, warga Ujong Leubat, Bandar Baru. “Saya diperkosa oleh tiga orang tentara di Pos Jiem-jiem, Pak. Setelah itu, saya pingsan. Paginya, saya disepak dan didorong ke sungai. Disuruh mandi,” ungkap CS (dalam bahasa Aceh yang diterje-

mahkan oleh wakil rakyat dari PPP dan tokoh pejuang HAM, Ghazali Abbas Adan). Yang mendengar, semua terkejut. Teganya, tiga tentara Republik memperkosa seorang wanita. Berapa lagi wanita Aceh yang diperkosa jika jumlah tentara itu mencapai angka 7000 orang? Berapa wanita Aceh diperkosa dalam sehari? Dalam Seminggu, dalam setahun? Dalam sembilan tahun masa DOM? Maka wajar jika terdengar umpatan caci-maki masyarakat lainnya. “Saya diperkosa bergiliran Pak. Tapi, hanya satu malam. Setelah tiga hari di situ, saya disuruh pulang,” kata CS, kaku, seakan menahan tangis. “Selanjutnya?” tanya anggota DPR RI. CS diam lama. “Tidak ada lagi,” katanya, singkat, lalu duduk. Ditanya kemudian, CS mengisahkan pada 1992 ia dan suaminya M. Yunus ditangkap oleh oknum dari Pos Jiem-jiem. Mereka ditempatkan di kamar terpisah. Pemeriksaan salah seorang pelaku dikenal CS bernama A— itu kemungkinan tak diketahui suaminya. Sebelum dibebaskan, CS sempat disiksa juga. Sejak pulang itu, ia mengaku tak pernah melihat lagi suami-nya. Belakangan dikabarkan orang kampung, bahwa M. Yunus ditembak dengan tangan diikat di atas pentas (dipertontonkan pada warga) di Desa Cibrek, Kembang Tanjong. Ditanya mengapa ia tak sampai menangis ketika bercerita di depan banyak orang? “Saya sudah capek menangis,” katanya. Karena, menurut CS, mereka sudah “terbiasa” mendengar kisah sadis dan penyiksaan serupa itu. Lagipula, ia khawatir kalau terlalu banyak bicara nanti bakal diambil lagi oleh oknum. Kekhawatiran perempuan Aceh yang sangat luar biasa keteguhannya dalam membela kebenaran dan berani menghadang kezaliman dengan mengatakan, “*Kalau saya diambil, siapa yang mengurus anak-anak. Hidup kami sangat susah. Siapa ya yang mau bantu orang-orang seperti kami ini?*” tutur korban perkosaan ini, ditemani dua janda sekampungnya. Menjawab ketakutan para pelapor itu, seorang srikandi Aceh, Ir. Faridah Ariani, tokoh pejuang hak-hak azasi perempuan dari Forum Peduli HAM minta TPF DPR RI agar memberi “jaminan keamanan” sehingga masyarakat yang datang hari itu, terutama para pelapor yang telah memberi kesaksian, nantinya tidak “diapa-apakan” oleh oknum tentara. “Bagaimana, apakah di sini hadir dari unsur keamanan?” tanya Hari Sabarno. Cari sana, cari sini, muncul Pasi Intel Kodim 0102 Pidie Letda Inf Suyanto yang menyatakan ia—mewakili Dandim dapat memberikan “jaminan keamanan” yang sangat diharapkan itu.

Kisah Ramlah juga cukup menggugah. Ibu tua dari Simpang Jurong, Geumpang, mengatakan pada 1992 ia diambil oleh oknum tentara dan dibawa ke Pos. Konon karena tak ditemukan suami dan anaknya. Ramlah disiksa, ditelanjangi, digigitkan orang hutan, dibakar, bahkan dipatahkan tangannya. Tangan yang kini telah cacat itu diperlihatkan kepada semua yang hadir. Setelah suaminya ditemukan, baru Ramlah bebas. Tapi yang lebih menyakitkannya, suami berikut empat anaknya laki-laki dan perempuan dibunuh oleh oknum tersebut dan dikubur secara massal di Geumpang. Lain lagi cerita Umar Abubakar dari Desa Jiem-jiem, Bandar Baru. Pada 1995, ia ditembak oleh oknum tentara dan mengenai pahanya. Untunglah oknum itu “mau berbaik hati” membawanya ke Rumah Sakit Kesrem Lhokseumawe. Tapi, kakinya harus diamputasi. Kini Umar berjalan dengan dua tongkat. “Saya tak bisa bekerja lagi. Saya makan, dikasih-kasih orang,” untkannya. Akan halnya Khatijah dari Cot Baroh, Glumpang Tiga, diambil tentara setelah pulang mengunjungi anaknya di Malaysia pada Februari 1998. Ia dipukuli, ditelanjangi, dan siksaan lainnya di *Rumoh Geudong* selama 15 hari. April 1998, diambil lagi dengan tuduhan menyimpan senjata. Rumahnya hancur diobrak-abrik, tapi senjata tak ditemukan. Khatijah pun diangkat lagi ke *Rumoh Geudong* dan kembali menjalani siksaan, lalu dipindah ke Rancung, dan dibebaskan Juni 1998. Terakhir, ia didatangi oknum penyiksanya, meminta uang Rp 500.000 agar Khatijah tak diambil lagi. “Saya kasih terus uang itu. Memang, sampai sekarang saya tak diambil lagi,” untkannya, terus terang. Sementara, Nyak Ubit dan Aminah Ali, keduanya warga Kecamatan Mutiara, mempertanyakan kemana suami mereka yang diculik tentara sekitar Maret 1998. “Suami saya diambil oleh Kupasui (Kopassus, maksudnya) hanya gara-gara di desa dia memegang dana IDT. Hanya karena IDT, Pak,” kata Nyak Ubit. Hari Sabarno sering mempertanyakan darimana para pelapor tahu bahwa pelakunya itu adalah Kopassus. Para pelapor lancar menjawab. Keluarga korban, saksi (warga desa), bahkan korban penyiksaan umumnya cukup kenal siapa pelakunya. Penyiksaan korban umumnya berlangsung di Pos Sattis terdekat, ataupun di *Rumoh Geudong*. Jumlah masyarakat yang datang melapor ke DPRD Pidie sekitar 100-an orang (pelapor baru). Namun, karena diisi pertemuan dengan TPF DPR RI hari itu, para anggota Komisi A tak sempat mencatat. Mereka diminta kembali esok harinya. Di akhir pertemuan, DPRD Pidie menyerahkan sebagian laporan sementara masyarakat kepada tim TPF DPR RI. Sebagaimana aspirasi masyarakat, para wakil rakyat di DPRD Pidie dengan tanpa ragu-ragu juga sepakat meminta pemerintah menca-but DOM di daerah itu. Sebelumnya tim juga mengadakan pertemuan dengan Muspida Pidie di Pendopo. Malam harinya, TPF berdialog dengan LSM, tokoh masyarakat, dan akademisi dari perguruan tinggi setempat. Rencananya, TPF DPR RI yang berinti Hari Sabarno (ketua), DR Mochtar Azis, Ghazali Abbas Adan, Sedaryanto, Prof DR Endang Saefullah, Lukman R, Chairuddin Harahap, dan Drs Suyanto, akan mengunjungi Desa Cot Keng, Bandar Dua, Pidie yang dijuluki “kampung janda”. Selanjutnya tim menuju Lhokseumawe. Saat ini, laporan yang tercatat di DPRD Pidie masih 440 kasus, mencakup “orang hilang”, kematian, penyiksaan, pembakaran rumah dan penjarahan harta/sepeda motor.

TPF DPR RI dalam peninjauan lapangan di Kabupaten Pidie, pada tanggal 29 Juli 1998 mengunjungi Desa Cot Keng di Bandar Dua yang beberapa tahun lalu pernah dijuluki “kampung janda”. Ketua TPF, Hari Sabarno berdialog dengan sejumlah janda Cot Keng maupun warga dari tiga kecamatan sekitarnya. Dialog yang berlangsung di *meunasah* setempat berlangsung dalam

suasana yang hingar-bingar. Di tengah isak-tangis, tanya jawab yang gencar, dan penterjemah yang sampai beberapa orang, sehingga para anggota DPR RI maupun korban pelapor sendiri sering kebingungan. Belum lagi sorotan kamera wartawan dari berbagai media cetak dan elektronik. Di antara pelapor, terdapat dua gadis tapi punya anak yang mengaku hasil perkosaan oknum tentara.⁴⁵ Keduanya adalah S (32), warga *Dayah* Teumanah dan Sum (19) warga Tampui, Kecamatan Bandar Dua. Karena tanya-jawab yang simpang siur, akhirnya kasus dari keduanya tidak terangkat secara detail. Ketika keduanya mengaku diperkosa lalu melahirkan “anak haram” itu, Hari Sabarno bahkan menyimpulkan bahwa hal itu perlu ada bukti, semisal tes darah dan sebagainya. “Kalau ada wartawan di sini, tolong kasus perkosaan ini jangan dikutip dulu. Nanti bisa salah paham. Perkosaan perlu ada bukti-bukti,” kata Hari Sabarno. Mendengar itu, S maupun Sum (menggendong anak) terpaku dan tak mampu bertutur lagi. Kesedihan ditelannya sendiri. Lalu mereka pun beringsut, pulang. TPF yang kemudian mencoba mencari kedua gadis itu, baru bertemu petang harinya di desa *Dayah* Teumanah (kediaman S). “Saya mampu menunjukkan buktinya, kalau ada yang tidak percaya,” tutur S, seorang gadis cacat, miskin, dan kini bertambah lagi status sebagai ibu dari “anak tanpa ayah”. Kisah S dan Sum ini bakal ditulis tersendiri. Tak kurang, Keuchiek Cot Keng, Salahuddin, sendiri kepada Serambi, usai dialog, mengaku ikut gugup menjawab. Karena kondisinya sangat tak mendukung keinginannya untuk mengungkap semua. Baru satu pertanyaan dijawabnya, para penanya baik dari DPR RI maupun dari penterjemah sudah menyimpulkan versi masing-masing. Contoh, ditanya berapa jumlah janda di desa ini? Salahuddin menjawab tujuh orang. Jumlah KK-nya? Sekitar 40 KK. Maka Hari Sabarno pun menyimpulkan bahwa desa itu tak patut disebut “kampung janda” mengingat persentase jandanya sangat sedikit. Padahal, menurut Salahuddin juga dibenarkan oleh tokoh-tokoh masyarakat setempat umlah tujuh janda itu adalah kondisi sekarang. Sedangkan kekosongan laki-laki hanya 9 suami di tengah 40-an istri di desa itu terjadi antara tahun 1991-1996 hingga mendapat julukan “kampung janda”. Disebutkan, jumlah penduduk desa itu saat ini tercatat 168 jiwa. Mata pencaharian mereka umumnya bertani, dan memelihara itik (bantuan LSM Yadesa Aceh). Sebagian janda juga telah dilatih ketrampilan tangan oleh Yadesa. Ada pula warga yang bermata-pencaharian mencari kayu (balok tem) di hutan. Meski *income* dari hutan lebih besar, namun pengeluaran terutama untuk upeti aparat pun juga besar. “Kita yang capek cari kayu di hutan, oknum-oknum itu yang dapat uang banyak,” keluh seorang warga Cot Keng, di depan Pak Keuchiek. Ditanya tentang adanya “upeti kayu” untuk aparat itu, Salahuddin hanya diam. Ia tak membantah, tapi tak pula mengiyakan.

2. Pelecehan Seksual Terhadap Kaum Wanita

Bulan Maret 1998, Rosmiati, bersama ibunya (Nyak Maneh) dan adik perempuannya, Rasy (21)—korban pelecehan seks—diambil oknum Kopassus dengan tuduhan telah “memberi makan GPK”. Mereka disiksa bergiliran di *Rumoh Geudong*. Rasy, gadis berjilbab ini pun ikut disiksa dan ditelanjangi. Pernah, katanya, ia ditidurkan telentang dalam keadaan telanjang bulat. Kaki dan tangan diikat agar tak bisa melawan. Pada kemaluan dan payudaranya dijepit alat penyetrum. Sepanjang malam dijepit, tanpa dilepas, dan sekali-sekali disetrum. Beberapa tahanan di situ disuruh duduk di samping kepalanya, lalu disuruh meremas buah dada gadis itu. Para tahanan tampak tak tega, namun tetap dipaksa oleh oknum. Rasy hanya bisa menangis. Seorang tahanan malah disuruh duduk di atas perutnya. “Perut saya sakit sekali,” kenangnya. Ketika ditanya apakah ia juga diperkosa? Rasy diam lama. “Tidak,” katanya singkat sambil memendamkan aib. Yang seharusnya merasa aib adalah tentara biadab itu, bukan dia. Siksaan yang dialami kakak dan ibunya jauh lebih berat. Rosmiati disetrum sampai terberak-berak. Menurut mereka, hanya 15 hari mereka kumpul bersama ibu di *Rumoh Geudong*. Sebab, kemudian, kata petugas, Nyak Maneh harus dibawa ke Rancung, Lhokseumawe. Menjelang bebas, Juni 1998, Rasy dan Rosmiati masih diperlakukan sebagai babu di rumah itu. Disuruh masak, cuci pakaian, dan sebagainya. Pelecehan seks tak henti dialami Rasy. Kadang ia dipeluk, diremas, dicium, dan sejenis itu, oleh petugas di sana. Apa yang bisa dilakukannya kecuali pasrah? Yang menarik, di *Rumoh Geudong* yang dikenal sebagai *camp* penyiksaan itu, sampai akhir Mei dan pertengahan Juni 1998 lalu masih terdapat tahanan. Baik dari laporan Rosmiati dan Rasy yang bebas Juni 1998, maupun tahanan lain seperti Zulkifli Wahab (40), warga Sarah Panyang, Bandar Baru. Zulkifli, misalnya, diambil 22 April 1998 oleh oknum bernama Pra dan R (tukang pukul) lalu dibawa ke *Rumoh Geudong*. Selama 46 hari disiksa, akibat tuduhan yang berbau fitnah.

Pada 1 Juni ia dibebaskan, dengan syarat harus menandatangani semua surat-surat yang sudah dibuat oleh oknum Kopassus. “Disuruh teken, saya teken saja. Lain mau bilang apa,” kata Zulkifli, ketus. Padahal, kepada TPF DPR RI, Danpos Sattis Bilie Aron Lettu Sutarman alias Arman, mengatakan selama ia bertugas di *Rumoh Geudong*, sejak 14 Mei 1998, tak ada tahanan di situ. “Walaupun saya tak ingat tanggalnya, tapi kami ingat, dibebaskan pada bulan Juni 1998,” jelas Rosmiati. Ada kesan, ketika Danpos Sattis Bilie Aron itu berdialog dengan TPF DPR yang dipimpin Hari Sabarno, *Rumoh Geudong* sebagai *camp* konsentrasi memang dikosongkan. Tentang adanya ruang yang disekat kecil-kecil, mirip sel, menurut Sutarman kala itu, merupakan tempat tidur anak buahnya. Padahal, secara fisik terlihat tempat sesempit dan sepegap itu (hanya ada lubang kecil untuk sirkulasi udara) bukanlah tempat yang nyaman untuk para serdadu. Di tempat itu juga, seperti disaksikan TPF DPR, terdapat rantai dan bersiliweran kabel listrik, terkesan dibersihkan mendadak, yang sebelumnya, menurut pengakuan sejumlah korban

penyiksaan, di situlah mereka disetrum dan digibal. Sejumlah warga di sekitar *Rumoh Geudong*, Teupin Raya, Pidie menginformasikan bahwa ketika TPF DPR RI berkunjung ke tempat itu 28 Juli lalu, sebagian tahanan sudah lebih dulu diungsikan ke beberapa tempat. Ada yang ditampung sementara di rumah penduduk di Glumpang Tiga maupun yang dipindahkan ke Pos Sattis lain di Pidie. Begitu TPF berangkat, tahanan pun dimasukkan lagi ke rumah besar yang dikenal sebagai kamp penyiksaan itu. Lainnya tetap ditempatkan di Pos Sattis yang tersebar di Pidie. Yang dipersoalkan sekarang, kata Rosmiati, bukan tanggal, dan bagaimana ibunya diperlakukan di situ, melainkan di mana gerangan ibu mereka? Pertanyaan serupa juga dilontarkan para keluarga korban yang diculik baru-baru ini, sepanjang 1998. Sejauh ini, DPRD Pidie telah mencatat sekitar 690 kasus orang hilang dan korban tindak kekerasan sejak Juni lalu.

Namun, seperti dikatakan Ketua Fraksi ABRI, Drs Soewanan Soewan, mereka belum mendapat sepotong kabar pun tentang di mana para penculik baru itu kini berada, dan apa sudah adakah yang kembali ke keluarganya menjelang penarikan pasukan atau tidak. Akan tetapi, Teuku Syamsul Ali dan Awaluddin dari Kontras Pidie mengaku, bahwa selama ini ia ikut “memata-matai” beberapa Pos Sattis sekaligus menjaring informasi dari warga sekitar. Dari hasil pantauannya, ia mengatakan ada dua korban penculikan 1998 disekap di kawasan Padangtiji. Beberapa sudah dipindahkan ke Rancong Camp, Lhokseu-mawe, Aceh Utara. Salah seorang korban dipergoki masih hidup di Pos Sattis Tringgadeng, namun namanya tak diketahui. “Saya melihat sendiri. Tahanan itu tampak sakit-sakitan. Mungkin sudah lumpuh,” kata seorang warga Tringgadeng Panteraja. Warga yang tak bersedia ditulis namanya ini mengaku sering bertandang ke Pos itu karena “telanjur” berteman dengan anggota Kopassus setempat. Mengingat masih ada korban penyekapan yang masih hidup, Kontras sangat berharap petugas dari Den-POM dapat melacak sekaligus menyelamatkan para korban itu. “Informasi apalagi yang dibutuhkan petugas? Apa perlu masyarakat kita suruh menggerebek ramai-ramai yang justru merupakan tindakan melanggar hukum,” kata Syahrul Nurfa SH, koordinator Kontras Pidie. Pernyataan itu diperkuat oleh Abdulrahman Yacoub SH, Ketua Dewan Penasihat Kontras Aceh. “Lepaskan korban yang masih diculik secara formal. Jangan menambah kejahatan lagi dengan membuang mereka di sembarang tempat dalam keadaan fisik dan psikis mereka yang buruk,” ujarnya kepada *D&R*.⁴⁶

3. Diperkosa dan Hamil, lalu Ditinggalkan

Derita model begini cukup banyak mencapai jumlah ribuan, salah satunya, diderita Nyak Meulo (21), tamatan SD. Wanita cantik yang tadinya gadis ini mengalami nahas pada tahun 1995 di Desa Pule Ie, Kecamatan Tangse, Pidie. Nasib naas itu menimpa dirinya ketika kedua orangtuanya pergi ke kebun dan menetap lama di pondok yang ada di kebun tersebut. Menjelang satu tahun kemudian, ketika orangtua korban pulang, mendapati anaknya sudah hamil. Nyak Meulo mengaku pada suatu hari, digagahi paksa oleh oknum aparat. Giliran ayah Nyak Meulo mendatangi aparat yang berinisial Suk itu, ternyata ia sudah dipindahtugaskan ke Batam sampai sekarang. Akhirnya, kata ayah korban, M Ali Sabi (63), tinggallah pahitnya pada keluarga mereka: anak yang ternodai dan seorang bayi tanpa ayah.

4. Gadis Korban Perkosaan Melahirkan Anak Pemerkosanya

Di antara pelapor, terdapat dua gadis—tapi punya anak—yang mengaku hasil perkosaan oknum tentara.⁴⁷ Keduanya adalah S (32), warga *Dayah* Teumanah dan Sum (19) warga Tampui, Kecamatan Ban-dar Dua. Karena tanya-jawab yang simpang siur, akhirnya kasus dari keduanya tidak terangkat secara detail. Ketika keduanya mengaku diperkosa lalu melahirkan “anak haram” itu, Hari Sabarno bahkan menyimpulkan bahwa hal itu perlu ada bukti, semisal tes darah dan sebagainya. “Kalau ada wartawan di sini, tolong kasus perkosaan ini jangan dikutip dulu. Nanti bisa salah paham. Perkosaan perlu ada bukti-bukti,” kata Hari Sabarno. Mendengar itu, S maupun Sum (menggendong anak) terpa-ku dan tak mampu bertutur lagi. Kesedihan ditelannya sendiri. Lalu mereka pun beringsut, pulang. TPF kemudian mencoba mencari kedua gadis itu, baru bertemu di desa *Dayah* Teumanah (kediaman S). “Saya mampu menunjukkan buktinya, kalau ada yang tidak percaya,” tutur S, seorang gadis cacat, miskin, dan kini bertambah lagi status sebagai ibu dari “anak tanpa ayah”.

5. Diperkosa sambil Berdiri

Itu pula yang dialami Hadijah (32), warga Seunubok Jalan, Alue Nireh, Peureulak, Aceh Timur, pada 25 Maret 1997. Sekira pukul 21.30 rumah-nya didatangi dua aparat keamanan yang mengenakan kaos hijau. Suaminya dipaksa ke luar rumah, ditelanjangi, dan terus diawasi oleh seorang petugas. Sementara, di dalam rumah, seorang aparat lainnya beraksi. Hadijah dibentak, ditelanjangi, dan diperkosa sambil berdiri. Tak cuma itu, semua perabotan rumah diobrak-abrik, dengan dalih untuk mencari senjata, kata petugas yang datang itu, disembunyikan di rumah tersebut. Tapi, hasilnya ternyata nihil. Yang mereka peroleh justru kenik-matan dari tubuh sintal Hadijah. Untung saja, suaminya yang ditelanjangi di luar rumah tak sampai mengalami nasib seperti istrinya.

6. Diperkosa, Disetrum dan Dicambuk dengan Kabel

Di antara kasus perkosaan, terungkap bahwa ada korban yang “digilir” tiga aparat keamanan, dikasari, dan dicambuk dengan kabel sampai tulang rusuknya patah. Derita tak yang terkira menimpa Fatimah (25), warga Blang Iboih, Bandar Baru, Pidie. Ibu tiga anak yang berparas lumayan ini diambil paksa oleh petugas di rumahnya pada pukul 21.00 WIB pada suatu malam di tahun 1996. Ia diboyong ke Pos Sattis Jiem-jiem, Bandar Baru, Pidie. Di tempat “durjana” inilah Fatimah, yang diculik tanpa sepengetahuan suaminya, diperkosa. Fatimah dipaksa melayani tiga orang aparat. Setelah itu ia disetrum dan dicambuk dengan kabel, sampai tulangnya ada yang patah. Setelah mereka puas, dan seluruh hasrat kebinatangannya lampias, ia pun dilepas. Fatimah pulang tertatih-tatih dengan perasaan pedih. Fatimah juga menyebutkan ada salah seorang tersangka pemerkosanya yang cukup dia kenal, berinisial Syah dari satuan elite ABRI yang bertugas di Bandar Baru. Apa yang dialami Fatimah, hanyalah contoh kasus atau petunjuk permulaan tentang adanya indikasi pemerkosaan selama operasi militer berlangsung di Aceh sejak 1991-7 Agustus 1998. Selain itu, masih terdapat banyak kasus serupa.

7. Ditelanjangi Massal

Pembugilan tubuh juga pernah dialami secara massal oleh Sakdiah (25), Nurhayati (30), Aisyah (40), Fatimah (50), Siti Hawa (45), dan Khatijah (52), semuanya warga Blang Iboih, Bandar Dua, Pidie. Pada suatu siang, di tahun 1992, datang serombongan aparat berbaju loreng ke kampung mereka. Semuanya disuruh kumpul di sekolah SD Blang Iboih, lalu dipaksa jalan kaki ke Pos Sattis Jiem-jiem yang jaraknya 1 kilometer. Sesampai di posko itu mereka diperiksa, dan tak seorang pun mengaku pernah membantu atau mengenal orang-orang GPK. Akibatnya, mereka disiksa dan ditelanjangi. Kemudian, dipaksa tidur di rumput sampai pagi. Nyamuk dan embun malam menggasak tubuh mereka yang tak tertutup selembar benang pun. Pelakunya dari pasukan elite ABRI, untkap pelapor.

8. Gadis Cacat Diperkosa oleh Tentara yang Sedang Mabuk

SH, 32 tahun, warga *Dayah* Teumanah Kecamatan Bandar Dua, Pidie. (Ia minta namanya disingkat). Saya sudah dikasih uang Rp 500.000 untuk meneken sebuah surat, supaya jangan lagi menuntut pemerkosa saya. Katanya, kalau tidak ada surat itu, dia tak bisa kawin-kawin lagi. Uang Rp 500.000 itu sudah habis membeli susu anak ini. Untuk nanti saya tidak tahu bagaimana lagi. Untuk makan dia juga. Dan, kalau nanti dia tanya ayahnya, apa yang mesti saya jawab. Kejadian tragis itu terjadi malam tanggal 17 Agustus 1996 lalu. Seperti biasa, saya berjualan di kios di ujung lorong. Tiba-tiba datang sejumlah oknum tentara dari Yonif 126 Ulee Glee. Salah seorang yang dikenal bernama Pratu HMS, dalam keadaan mabuk, langsung mengganggu saya. Melihat gelagat tak baik, saya yang cacat kaki, lalu berlari tertatih-tatih menuju rumah yang tak jauh dari tempat jualan. HMS mengejar. Pintu rumah yang akan saya kunci didorong oleh oknum itu, seraya mengancam akan menem-baknya kalau tak mau melayani dia. Celakanya, malam itu tak seorang pun di rumah. Sehingga, meski saya sudah coba melawan, namun HMS tetap lebih kuat. Saya pun diperkosa. Diduga, malam itu, sejumlah warga termasuk beberapa gadis desa setempat—mengetahui perbuatan biadab itu. Sebab, ada yang menyaksikan ketika HMS mengejar saya ke rumah. Namun, esoknya, semua tutup mulut. Mereka takut. Saya sendiri juga memilih diam. Kalau mengadu, kondisi justru bisa lebih memburuk. Justru setelah HMS ditarik tugas ke Pematang Siantar, Sumatera Utara, ada sedikit kelegaan di hatinya. Selanjutnya, saya berniat akan melupakan peristiwa itu, dan menganggapnya sebagai takdir terburuk --lebih buruk dari cacat tubuh--yang diberikan Tuhan kepada saya. Apalagi bulan-bulan depannya, saya masih mens (menstruasi) sedikit. Saya tak curiga lagi. Tapi setelah lima bulan, saya pusing dan sering muntah-muntah. Karena saya memang sakit maag. Saya periksa ke Puskesmas Tringgadeng. Tapi, oleh dokter di situ saya dibilang hamil. *Ban dengoe hamil, pangsang laju lon* (begitu mendengar hamil, langsung saya pingsan). Tak sadar diri. Berbagai cara untuk menggugurkan kandungan sudah dicobanya. Terma-suk obat-obatan yang mahal. Tapi, tetap tak berhasil. Kandungannya semakin besar. Di tengah kegalauan batin itulah, sayamelahirkan bayi perempuan tanggal 14 Mei 1997 lalu. Bayi yang kini sudah berusia 14 bulan itu berkulit putih. Menurut warga kampung, wajahnya sangat mirip dengan HMS. Tak lama habis bersalin, saya mencari alamat “ayah anak” alias pemerkosa saya di Pematang Siantar. Ditemani Sum (korban “perkosaan” yang pelakunya kebetulan juga anggota Yonif 126), kami langsung menghadap atasannya HMS. Kebetulan Danton-nya mau me-ngerti saya. Ia langsung memanggil HMS. Tapi, sudah saya duga, HMS tak mau bertanggung-jawab. Saya kan cacat. Di depan saya, dia menga-kui perbuatannya, namun tak mau bertanggung jawab. Akibatnya, HMS dipukul dan diinjak-injak oleh komandannya. Kemudian kami pulang lagi ke kampung. Belakangan ia mengetahui HMS balik lagi ke Pidie. Kali ini—kemungkinan sampai sekarang—bertugas di Tiro/Truseb. Dia tak pernah sekalipun melihat anaknya ini. Surat (perjanjian tidak menggugat tadi) dan uang itu pun diantar oleh komandannya.

9. Suami Diculik, Istri Diperkosa

Tiap hari keluarga korban mendatangi LBH untuk mengadukan nasibnya. Mereka yang datang umumnya penduduk desa pedalaman dan dari pakaiannya tergambar bahwa kehidupannya di garis kemiski-nan, bahkan ada pengadu kala pulang minta ongkos karena kehabisan uang.

Derai air mata para janda dan anak yatim selalu terjadi. Betapa tidak, keluarganya dijemput di rumah, kemudian langsung ditembak di depan matanya.

Setelah sang suami mati, istrinya diperkosa secara bergiliran di depan mayat suaminya tanpa memberi kesempatan kepada istrinya untuk mendoakan kepergian terpaksa suaminya. Bukan hanya itu tindakan para penculik, tapi setelah kehilangan suami juga rumahnya dibakar. Seperti *Geusyik Saiyiman* (55) Kades Teungoh Reuba, Muerah Mulia, Hasbi (40) Desa Masjid Meurah Mulia, Utoh Kaoy (60) Desa Alue Tho, Matang Kuli dan beberapa korban lainnya. Mereka adalah korban ditembak di depan keluarganya secara sadis, sementara penembak terlatih itu meninggalkan lokasi dengan sorak-sorak bergembira menyanyikan mars lagu-lagu kemerdekaan setelah membakar rumah orang-orang miskin. Selain tragedi berdarah tanpa proses hukum itu, juga penyiksaan sampai cacat fisik. Perlakuan terhadap wanita, seperti pemerkosaan juga tidak luput dari laporan yang diterima dan juga *oral sex* yang dipaksa lakukan oknum penculik.

10. Diambil Paksa dan Diperkosa

Kasus yang dialami As, An, Bc, ketiganya gadis berusia antara 24-25 tahun, warga Kecamatan Sawang Aceh Utara, amatlah mengenaskan. Pada suatu hari ketiganya diambil paksa dari rumah, diperkosa di suatu tempat oleh oknum aparat keamanan. Setelah diperkosa, ketiganya diba-ringkan bersusun, lalu dihujani tembakan. Wanita hamil pun tak luput dari sasaran aparat. Itu yang terjadi atas diri Dn (37), ibu rumah tangga di sebuah desa dalam Kecamatan Sawang, Aceh Utara. Meski sedang hamil lima bulan, ia tak luput dari perkosaan oknum aparat, yang kesatu-annya tak jelas, lalu ditembak. Sang suami dan warga desa mengebumi-kan jenazah korban dengan hati yang terluka.

11. Diarak Telanjang, lalu Didor

Penelanjangan massal yang berakhir dengan penembakan, dialami Aminah Ali (50), Banta Cut Amat (35), dan Muslim (25), semuanya warga Pulo Kenari, Tiro, Pidie. Pada Selasa malam, pukul 02.00 WIB, ketiganya diambil dari rumah oleh oknum Kopassus, lengkap dengan senjata. Aminah Ali dan menantunya, Cut Amat, diikat bersamaan lalu dinaikkan ke mobil aparat. Sedangkan Muslim, anak Aminah, tidak diikat. Tapi, ketiganya mengalami nasib sama: ditelanjangi dan diarak sambil dipukul-pukul ke tengah pasar yang tentunya menjadi tontonan orang banyak. Usai dianiaya, Aminah dan Cut Amat ditembak di depan massa. Kemudian, rumah mereka dibakar, termasuk rumah Nyak Kaoy (34), anak kandung Aminah Ali yang berdampingan dengan rumah ibunya. Akan halnya Muslim, awalnya memang terhindar dari eksekusi maut di depan umum. Tapi, ia dipaksa ikut operasi militer ke gunung dengan alasan mencari orang yang hilang. Tapi nyatanya, sejak dari pasar ia sudah digelandang dan ditendang. Menurut saksi mata yang melapor, Muslim dicukur rambutnya, pernah pula dibakar kulitnya pakai korek api, dan akhirnya tewas didor.

12. Digagahi di Depan Anaknya

Apa yang dialami Nyak Maneh Abdullah (35) dari Desa Rinti, Mutiara sungguh di luar perikemanusiaan. Nyak Maneh diperkosa oleh aparat di depan anaknya sendiri.⁴⁸ Menurut laporan Nyak Maneh, pada malam tanggal 4 Januari 1998, rumahnya didatangi beberapa aparat yang mencari suaminya, M Kaoy Ibrahim (40). Sang suami bersama beberapa pria di kampung itu yang merasa “dicari-cari” aparat sebelumnya memang telah minta izin (surat jalan) kepada Kades untuk berdagang di Banda Aceh. Namun, sampai sekarang rombongan itu belum kembali. Sebagai ganti suaminya, malam itu Nyak Maneh dibawa ke Pos Sattis Pintu I Tiro. Ia diperiksa dan ditanya tentang suaminya. Nyak Maneh disiksa, pahanya dipukul hingga beku darah. Kepala dihantam benda keras. “Akibat pukulan itu, sekarang Nyak Maneh, ibu tiga anak ini sudah kurang bisa mendengar lagi. Esoknya, Nyak Maneh dipulangkan.

Namun pada awal Mei 1998, ia diambil lagi oleh aparat yang bernama Ef dan Sla. Karena khawatir anaknya tak terurus, ia bersikeras membawa anak bungsunya yang masih berusia 2 tahun. Sedangkan dua anak yang lebih besar meski terus menangis terpaksa ditinggal begitu saja, tanpa ada yang menjaga. Ibu dan anak ini kemudian digiring ke Pos Pintu I Tiro. Di situ, Nyak Maneh diperiksa sembari disiksa, dan ditelanjangi. Anaknya yang melihat terus menangis. Malamnya, masih dalam keadaan telanjang, dan di depan anaknya, ia diperkosa oleh aparat yang bernama A (masih muda, lajang). Muka, terutama mulutnya, ditutup kain, supaya jangan berteriak. Hari berikutnya, ia disetrum pada kemaluan dan payudaranya. Diikat tali pada leher. Macam-macam caranya mereka menganiaya Nyak Maneh. Apa sebetulnya salahnya? Siksaan itu dialaminya selama beberapa hari, kemudian ia dilepas. Tapi, setelah itu ia berstatus “wajib lapor” ke Pos Pintu I. q

Bab 10 REKAYASA MAKAR PIHAK INTELIJEN DALAM TRAGEDI LAMPUNG BERDARAH

PERISTIWA Lampung adalah sebuah musibah politik yang terjadi begitu cepat, akibat makar yang memang sengaja dibuat pihak tentara. Peristiwa ini oleh pemerintah disebut sebagai

peristiwa “Gerakan Pengacau Kea-manan (GPK) Warsidi”, peristiwa “Komando Mujahidin Fi Sabilillah”, peristiwa “GPK Anwar” dan dengan istilah-istilah lainnya yang cenderung menyudutkan umat Islam sebagai obyek pelaku dalam peristiwa tersebut. Istilah yang mungkin agak membahagiakan adalah istilah dari kalangan LSM. Kalangan LSM menyebut peristiwa Lampung ini dengan sebutan peristiwa Talang-sari atau peristiwa Cihideung. Peristiwa Lampung terjadi pada tanggal 6 dan 7 Februari 1989 di dua tempat. Cihideung (dusun Talangsari III, Kelurahan Rajabasa Lama, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Tengah) dan di Sidorejo, Lampung Tengah.

Peristiwa yang terjadi di Cihideung Talangsari, pada tanggal 6 Februari 1989 bermula dari hubungan sosial yang kurang harmonis antara komunitas Cihideung dan aparat pemerintahan sipil di tingkat desa. Kemudian berlanjut dengan diperiksanya lima warga dari komunitas Cihideung yang selama ini terasuh di bawah jama'ah Warsidi oleh pihak Koramil Way Jepara. Kemudian pihak jama'ah Warsidi yang berjumlah antara 12 hingga 20 orang mendatangi kantor Koramil dan menuntut segera dilepaskannya jama'ah mereka. Ketegangan kemudian terjadi setelah masing-masing pihak memper-tahankan arogansinya, maka dibakarlah kantor Koramil tersebut. Sebelumnya, pihak kecamatan, kelurahan dan dusun telah mencoba berdialog dengan pihak jama'ah Warsidi yang dirasa telah meresahkan psiko-sosial warga Talangsari III. Setidaknya keresahan psiko-sosial ini dirasakan oleh pihak aparat sipil di tingkat bawah. Undangan kepada Warsidi sebagai imam dari jama'ah tersebut disambut dengan sebuah tantangan yang sangat Islami: “*Sebaik-baik ulama adalah yang tidak mendatangi umara, dan seburuk-buruk ulama adalah yang mendatangi umara*”. Maka difusi sosial pun menjadi tak terelakkan. Maka pada tanggal 5 Februari 1989, kedatangan Kapten Sutiman disambut dengan penyanderaan. Dan masyarakat melihat militer masih lamban dalam merespon kejadian tersebut. Pada tanggal 6 Januari 1989, Korem 043/Gatam mendatangi tempat tersebut dengan kekuatan 3 peleton tentara plus 2 peleton Brimob.

Setelah mencoba membuka komunikasi dengan megaphon ternyata pihak jama'ah Warsidi meresponnya dengan panah beracun yang langsung menewaskan beberapa tentara. Maka situasinya menjadi sebuah situasi perang. Senjata-senjata seperti parang, badik, golok, panah beracun, ketapel dan bom molotov menjadi alat dalam —meminjam istilah Eric J. Hobsbawm— *primitive rebel* yang telah diperankan secara sukses oleh jama'ah Warsidi. Bagaimana pun peristiwa ini haruslah dilihat sebagai sebuah perang (yang dalam istilah Islamnya *qital*) atau setidaknya sebuah pertempuran (yang dalam istilah Islam adalah *ghazwah*). Segala sesuatunya haruslah dilihat dari kacamata hukum perang. *Primitive rebel* ini dilakukan hanya untuk *to stand against* terhadap aparat pemerintah. Pihak tentara dan Brimob tidak menduga akan terjadinya peperangan.

Di tengah situasi yang represif di bawah sistem Orde Baru —dan pertumbuhan ekonomi yang cukup menggairahkan— orang lebih banyak berpikir tentang bagaimana hidup makmur, sejahtera dan bahagia. Maka pihak tentara dan Brimob pun seakan tidak siap menghadapi serangan yang cukup dahsyat ini. Pihak jama'ah Warsidi bahkan sudah memper-siapkannya jauh-jauh hari sebelumnya. Mereka sudah membangun lubang-lubang persembunyian di tanah seluas 5 hektar tersebut. Bahkan senjata-senjata pun sudah dibuat sebulan sebelumnya. Yang paling menarik dari persiapan ini adalah keterkejutan Muhdi dan Isnan yang merasa curiga dengan kedatangan tiga orang dari Jakarta (Nur Hidayat, Sudarsono dan Fauzi Isman). Kedatangan tiga orang ini adalah untuk membuat senjata panah beracun dari jari-jari sepeda motor. Muhdi dan Isnan mempertanyakan untuk apa senjata-senjata ini? Apakah kita akan berperang? Siapa musuh yang akan kita serang? Namun semua pertanyaan ini tak terjawab, dan menimbulkan kecurigaan mendalam atas semua intervensi-intervensi itu. Meskipun tak terungkapkan, rasa curiga ini demikian besar setelah melihat proses radikalisme yang dilakukan oleh orang-orang dari Jakarta terhadap diri Warsidi yang tadinya tampak begitu kalem, santun dan lembut.

Sementara peristiwa di Sidorejo terjadi pada tanggal 7 Februari 1989 pada saat Arifin Santoso, lurah Sidorejo dan Serma Sudargo memperluas ekstensi konflik di Cihideung dengan jama'ah pengajian masjid Al Barokah. Maka dikejarlah tiga orang jama'ah tersebut dan salah seorangnya mati ditembak. Maka kemudian Zamzuri sebagai imam di mushola tersebut bangkit dan menyerang kepala desa yang tengah berada di atas sepeda motornya, di tengah jalan dan langsung mengayunkan parang ke batang leher kepala desa itu. Pihak jama'ah yang lain kemudian mengejar Serma Sudargo dan membunuhnya serta mengambil senjata pistol. Peristiwa ini berlanjut dengan pembajakan angkutan desa Wasis L300 dan menewaskan seorang Pratu Budi Waluyo. Kemudian berlanjut hingga penyerangan terhadap kantor Korem 043/Garuda Hitam dan melem-parkan bom molotov.

Kedua peristiwa ini begitu sederhana. Namun untuk meneliti dan merekonstruksi peristiwa tersebut dan berusaha menganalisis pihak-pihak yang harus bertanggung jawab sangat sulit. Hal ini dikarenakan oleh keterangan yang kabur dari para pelaku saksi dan korban. Sehingga penulis dan tim peneliti merasa kesulitan dalam menuliskan peristiwa ini. Namun satu temuan yang sudah sangat meyakinkan adalah terlibatnya para intelijen dan aktivis Islam dalam merencanakan sebuah *kompres politik*. Kompres politik ini dilakukan seperti sebuah konspirasi antara pelaku, pihak intelijen dan aparat pemerintahan sipil. Masing-masing pihak ada yang sadar dan tidak sadar dengan rekayasa pemanfaatan *kompres politik* ini. Yang menarik dari kasus Lampung ini adalah terlibatnya warga sipil dalam peristiwa pembakaran di tengah-tengah berkeca-muknya perang.

Dari semua kasus-kasus yang melatarbelakangi terjadinya peristiwa Lampung, kita melihat peran intelijen yang begitu besar dalam membuat eksperimen-eksperimen politik yang membahayakan jiwa rakyat dan merepotkan aparat polisi dan militer. Dibandingkan dengan peristiwa pembantaian umat Islam Tanjung Priok, Komando Jihad, Aceh, Kedung Ombo, Sampang dan Woyla, peristiwa Lampung bukanlah sebetuk pembantaian umat Islam. Peristiwa Lampung adalah sebuah *setting* sejarah perang yang sudah terbiasa dihadapi umat Islam semenjak berdirinya Negara Islam Indonesia tahun 1949. Dan umat Islam secara kesatria tidak pernah mempermasalahkan peristiwa-peristiwa peperangan tersebut karena kedewasaan berfikir dan beraksi serta siap menerima segala resiko apapun, *Yuqta! au yaghlib* (membunuh atau terbunuh).

Namun semua peristiwa itu, ternyata tidak begitu saja terjadi, melainkan direkayasa oleh intelijen-intelijen Melayu yang berhati busuk. Semua yang dilakukan oleh jaringan intelijen Indonesia pada akhirnya menghasilkan suatu *out-put* berupa musibah-musibah politik serta kecelakaan-kecelakaan politik yang sulit dihindari, bahkan oleh organ kekuasaan sekalipun. Lebih jauh lagi, organ kekuasaan seperti militer (TNI atau ABRI di masa lalu) tak terhindarkan —nyaris menyerupai *historical inevitability*— menjadi korban dari musibah-musibah politik yang telah di-*invented* oleh jaringan intelijen nasional. Dari kasus Lampung, kita dapat melihat wajah negara Orde Baru Soeharto sebagai negara intelijen. Dalam negara intelijen, aktor-aktor intelijen adalah penguasa sebenarnya. Selain Soeharto, Pangdam Jaya Try Sutrisno dan Pangab LB. Moerdany serta Kepala BAIS, adalah pihak-pihak yang harus bertanggung-jawab atas peristiwa tersebut. Sementara para aparat di tingkat bawah, setidaknya menurut penelitian ini, adalah korban dari rekayasa intelijen dan kompres politik.

Korban peristiwa Talangsari berkisar tak dapat dipastikan, ada yang menyebut antara 27 hingga 31 korban tewas. Sementara dari pihak pemerintah menyebutkan jumlah korban 9 orang. Namun dari pihak para mantan pelaku peristiwa tersebut menyatakan jumlahnya 280 jiwa. Sementara dari pihak LSM, panitia SMALAM berjumlah 246 jiwa. Menurut majalah *Tempo*, *Editor*, *Suara Pembaruan*, *Pelita* dan *Kompas* jumlah korban 31 jiwa. Sementara itu korban dari pihak militer tersebut angka 3 orang, sedangkan menurut Nur Hidayat, pelaku kasus Lampung yang tidak berada di lokasi kejadian, pihak militer tewas sebanyak 50 orang. Berapapun jumlahnya, peristiwa Talangsari telah memberikan sebuah corengan pada wajah umat Islam dan pemerintah. Dan apapun yang terjadi setelah peristiwa tersebut, para korban telah memperlihatkan tekadnya untuk membela kebenaran yang ia yakini. Semoga pengorbanan mereka terhitung sebagai syahid dengan mendapatkan surga Allah, dan para mantan pelaku yang masih hidup agar tetap istiqamah, dengan tidak menukar kesyahidan mereka dengan harga yang sedikit yang bersifat duniawi, seperti menjadikan kasus ini sebagai komoditas politik.

Banyak pelajaran penting dari peristiwa Lampung berdarah ini. Sebuah perang yang dilewati dengan penuh kesatria di antara kedua belah pihak. “Peperangan” berikutnya yang kini sedang dijalani oleh para korban kedua belah pihak itulah yang pantas kita sesalkan. Upaya mengungkit kembali kasus Lampung dengan cara-cara teror mental dan pembunuhan karakter pribadi adalah sangat tidak berkesan. Kita berharap semua pihak berlapang dada dan saling tolong-menolong dalam “perang psikis” yang tidak perlu sekarang ini. Dalam konsep Islam untuk kasus kriminal pembunuhan saja ada mekanisme maaf-memaafkan selain pelaksanaan hukum *qishas*. Pihak tentara dan jama’ah Warsidi sama-sama telah menjadi korban, dan jangan menjadikan korban yang sudah *syahid* itu sebagai komoditas ekonomi dan politik.

Ada hal lain yang mesti dicermati, mengapa musibah Lampung Berdarah mengundang korban demikian banyak dari kalangan ummat Islam. Bahwa terjadinya peristiwa Talangsari adalah sebuah perluasan gerakan protes di Jawa. Tesis ini setidaknya didukung oleh beberapa kenyataan tentang kemiripan imitatif Lampung dan Jawa. Maka dari sini pula, sebuah kesimpulan penting harus ditarik, bahwa Lampung secara kultural adalah Jawa. Di mana-mana orang berbicara bahasa Jawa.¹ Bukan hanya orang Jawa yang eks-transmigran atau transmigran yang menghuni pelosok-pelosok hutan belukar, tapi juga mereka yang berasal dari Jawa Barat, Bali, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, bahkan juga mereka yang dilahirkan di Lampung.

Oleh karena itu dengan mengandalkan bahasa Jawa, aman sudah ke luar masuk pelosok Lampung. Tapi, kata “*aman sudah*” di pertengahan Februari 1989 yang lalu, ternyata butuh catatan kaki. Menyapa atau bertanya, bahkan dengan bahasa Jawa kromo sekalipun mengundang prasangka. Kasus Way Jepara,² dengan puncaknya tanggal 7 Februari 1989, rupanya masih membekas dalam. Kepada semua “orang asing” mereka taruh sak wasangka, apalagi terhadap orang Jawa yang baru saja datang. Sebab, seakan sudah menjadi pendapat umum di sana, pada pertengahan bulan Februari itu, “Yang berontak di Talangsari adalah orang Jawa bukan Lampung, bukan Bugis bukan Bali”. Secara sosial, peristiwa ini juga merupakan sebuah indikasi bahwa resistensi orang-orang Jawa sangat luar biasa, jauh dari apa yang selama ini dikonsepsikan bahwa Jawa lebih lunak dalam hal pemberontakan. Karena peristiwa ini, secara horizontal, situasi Lampung yang mayoritas didominasi orang-orang Jawa, menjadi sangat sepi.³

Terungkap di sana, ceritera tentang Lampung sebagai wilayah ber-masa depan yang sudah sarat beban, tentang perambah hutan yang terombang-ambing antara jadi pergi (pindah) atau tidak, tentang pemilikan tanah oleh “orang-orang Jakarta”, tentang petani singkong yang menangis berkepanjangan, tentang penderitaan bekas transmigran yang kehilangan tanah. Tetapi, selain kisah sedih, kesan menonjol menjelajah pelosok Lampung adalah jalan-jalan aspal mulus

membelah pedesaan ekstrans-migrasi. Sebaliknya jalan becek mendominasi tanah-tanah lokasi trans-migrasi baru.⁴

Maka, bukan hanya diperbaiki sarana jalan di lokasi-lokasi eks-trans-migrasi, tetapi juga terlalu terlambat direncanakan membuat jalan tembus di bagian barat dan timur Lampung. Dua jalan tembus itu mungkin bisa sekaligus mengurangi beban jalur Lintas Sumatera yang sekarang ini menjadi jalan darat satu-satunya menuju Aceh, Sumut, Jambi, Sumsel, Sumbar, Bengkulu. Begitu beratnya beban, sampai-sampai berbagai ruas jalan memperlihatkan tak layak lagi sebagai jalan lintas Sumatera. Rupanya kemudahan prasarana juga mengundang spekulasi tanah ikut masuk Lampung bahkan jauh sebelum jalah-jalan itu dibuat. Artinya yang merambah hutan bukan hanya mereka yang mencari lahan untuk berkebun, tapi juga mereka yang ingin memiliki lahan untuk investasi.⁵ Penduduk pun melihat inkonsistensi kebijakan pemerintah. Suatu saat tanah itu boleh ditempati, di saat lain harus dikosongkan. Hakikatnya tanah lokasi tak boleh diperjualbelikan, kenyataannya orang non transmigrasi bisa membeli.

Kasus pembakaran hutan kawasan Gunung Balak barangkali contoh menarik. Kawasan yang memanjang mulai dari Lampung Utara sampai Lampung Tengah ini, termasuk yang berdekatan dengan Talangsari (Way Jepara, Lampung Tengah) sejak tahun 1935 sudah dinyatakan sebagai hutan lindung. Luasnya 19.680 hektar. Ironisnya pernah sejumlah oknum Dinas Kehutanan justru “mengundang” penduduk untuk menggarap daerah yang subur itu sebagai lahan pertanian produktif dan permukiman. Mereka jelas perambah liar. Oleh Pemda Lampung yang mengadakan penertiban penduduk dalam tahun 1976 mereka diberi status perwakilan kecamatan di Gunung Balak yang mencakup 13 desa definitif. Penduduk merasa kehadiran mereka disetujui.⁶

Keengganan mereka pindah juga disebabkan inkonsistensi aparat pemerintah. Mereka melihat, yang pernah dipindahkan pada tahun 1980 kembali lagi tetapi tidak diapa-apakan. Lantas ada kesan, pengosongan kawasan dibatalkan. Sebaliknya pemerintah tak tinggal diam. Pengosongan terus dilakukan, bukan hanya ditranslokasikan ke Lampung Utara tapi juga ditransmigrasikan lewat program PIR-bun ke Riau. Sekarang masih terdapat sekitar 34 KK atau 170.000 jiwa menghuni kawasan hutan lindung, dan semua harus dikeluarkan dari sana paling lambat akhir Pelita V nanti.

Dari kasus hutan Gunung Balak kelihatan betapa semakin kompleksnya soal Lampung. Entah soal petani entah soal penguasaan tanah berlebihan oleh oknum-oknum tertentu. Peristiwa Warsidi Lampung adalah sekaligus peristiwa penting tentang politik agraria.⁷ “Kegiatan protes mereka sudah berjalan lama Kami sudah melaporkan ke pihak berwajib dua minggu sebelum kejadian,” kata Amir Puspamega yang kelihatannya tidak sabar lagi dengan kelambatan pihak aparat keamanan (tentara) dalam bertindak.⁸ Mereka tak mau bayar PBB, tak mau gotong royong, dan melarang penduduk ke luar malam. Bahkan di sebelah utara didirikan pondok-pondok baru untuk pengajian. Maunya memberi penyuluhan, tanggal 6 Februari 1989, malah aparat pemerintah dilawan dengan panah dan pedang, dengan kelanjutan operasi militer tanggal 7 Februari 1989.⁹

Analisis para ahli sedikit banyaknya telah bisa memastikan latar belakang atau “bongkah es” yang ada di bawah permukaan. Soal tanah dan korelasinya dengan munculnya gerakan protes semacam itu pun belum pasti satu-satunya sebab. Tetapi setidaknya pandangan-pandangan itu memberi gambaran kemungkinan analogis yang bisa ditarik. Ditambah kenyataan pengalaman penduduk adanya inkonsistensi aparat pemerintah, sehingga barangkali faktor tanah dan rasa ketidakpuasan memang dominan.

Tetapi apabila dikaitkan dengan ceritera penduduk di sana tentang kegiatan kelompok Anwar Warsidi dan pengikutnya di Talangsari, maka faktor kecurigaan penyalahgunaan ajaran agama (Islam) memang ikut ambil bagian selain adanya “bongkah es” yang lebih besar, yakni rekayasa intelijen dari pemerintah.¹⁰ Bahkan dengan latihan-latihan bela diri seakan-akan sebagai bagian dari kegiatan pengajian, orang mengira adanya sebuah rencana besar. Lantas kalau benar keluar masuknya pen-datang di Talangsari tak bisa dikontrol oleh aparat paling bawah (kelurahan).¹¹ Yang menarik untuk dikaji adalah soal lemahnya pengawasan di sana sehingga masuk akal kemudian, kesempatan untuk beraktivitas politik semakin terbuka.

Bab 10-01 Latar Belakang Terjadinya Peristiwa GPK Warsidi

Dinamika masyarakat desa selalu menarik untuk diamati, paling tidak dengan sandaran asumsi bahwa dinamika kehidupan mereka tidak terlepas sama sekali dari dimensi konflikual. Kecenderungan ini juga dialami oleh struktur masyarakat pedesaan yang mata pencahariannya adalah bertani. Gejolak protes petani yang oleh rakyat Jawa lazim disebut “geger”, kerusuhan atau huru-hara, adalah sangat endemis, dan sebagai gejolak sejarah mempunyai frekuensi yang cukup tinggi, maka tidak sulit untuk mengidentifikasi sifat serta hakikat gejolak protes tersebut.¹²

Merupakan bagian karakteristik umum dari sebuah gerakan tradisional bahwa gejolak yang melahirkan gerakan protes rakyat bercorak lokal, di samping itu keberlangsungannya sangat singkat, komunal serta radikal. Dalam peristiwa Talangsari itu pun bisa kita letakkan pada sebuah gerakan yang tradisional karakteristiknya,¹³ Peristiwa-peristiwa pemberontakan petani itu sesungguhnya merupakan momentum-momentum bentrokan antara kekuatan tradisional dan kekuatan inovatif yang menjadi pembawaan penetrasi politik kolonial. Dampak komunikasi,

birokrasi, edukasi, komersialisasi, kesemuanya menimbulkan perubahan ekonomis, sosial dan politik sehingga orde sosial berdasarkan tradisi terganggu. Maka, warga masyarakat pedesaan mengalami pergeseran situasi dan ekologis.¹⁴

Persepsi rakyat di pedesaan sebagai benteng tradisi tidak lepas dari kerangka sosial tradisional. Semua perubahan yang datang dalam kehidupan mereka dipandang sebagai moral buruk, dan pembawanya, baik penguasa kolonial maupun kaki tangannya, dijadikan sasaran gerakan. Terkait dengan persoalan ini, gerakan keagamaan yang dibangun Warsidi mengarah ke sana, Warsidi dan kelompoknya telah menganggap bahwa program “pembangunan” yang dicanangkan pemerintahan Orde Baru, telah membuat mereka tersingkir dari kehidupan tradisionalis-agamis.

Melihat perkembangan kondisi ke-indonesiaan selama dipegang Orde Baru, khazanah keislaman terasa luntur oleh adanya derap laju pembangunan. Tak heran bila beberapa kalangan umat Islam ingin mencipta-kon kondisi yang dianggap ideal bagi keberlangsungan mereka. Kekua-saan yang terpusat pada birokrasi dan militer telah membawa negeri ini menjadi sebuah negara otoriter. Apalagi melihat pandangan sempit sehingga kurangnya keseimbangan sosial yang dilakukan oleh para birokrat sipil dan militer, jama’ah Warsidi beranggapan bahwa kebanyakan pada diri penguasa telah terjangkit penyakit *hubbu as-siyadah* (cinta kekuasaan) yang melahirkan kejahatan-kejahatan penguasa rezim Orde baru.¹⁵ Penguasa yang seharusnya melayani kepentingan rakyat, saat itu berubah menjadi serigala yang justru memangsa rakyatnya. Rakyat di mata para penguasa biasanya seperti budak pemuas nafsunya. Banyak kasus-kasus yang terjadi di Indonesia dapat membuktikan hal itu. Namun kasus Talangsari tidak dapat dijadikan cermin untuk melihat kekejaman penguasa, meskipun mereka secara *stereo type* menyebut kasus tersebut sebagai “GPK Warsidi”. Peristiwa Warsidi merupakan pelajaran mahal serta pengalaman pahit bagi para penggerak kelompok Warsidi serta para petugas aparat negara yang beragama Islam. Dan kejadian tersebut telah menjadi tinta hitam pula bagi umat Islam secara keseluruhan. Apa yang sesungguhnya terjadi di daerah Talangsari itu? Apakah benar pula bahwa aparat penguasa telah melakukan pembantaian terhadap mereka? Dalam bab ini kita harus terlebih dahulu melihat kronologis peristiwa tersebut secara obyektif dan menghadirkannya untuk diketahui oleh semua kalangan.

Bila dicermati secara seksama bahwa munculnya sebuah gerakan didasari oleh adanya satu keinginan kembalinya tatanan kehidupan mereka yang pernah hilang, baik itu di bidang sosial, ekonomi, politik dan agama. Dan untuk menggambarkan tatanan kehidupan yang hilang itu diartikulasikan melalui satu harapan datangnya Ratu Adil yang akan mengembalikan zaman *kerta* (sejahtera). Di sini kita menghadapi cakrawala harapan rakyat tradisional yang sebagai gejala universal juga dikenal sebagai mesianisme dan milenarisme.¹⁶

Mengapa ideologi itu secara inheren bersifat radikal? Gerakan mesia-nistis dipimpin oleh seorang pemuka yang mengaku sebagai pengejawantahan Ratu Adil atau yang dianggap demikian oleh para pengikutnya, dan dalam proses perkembangannya mau tak mau mengarah ke konsumsi, yaitu perwujudan atau “pemuahan” tujuan gerakan itu. Tuntutan mutlak ini membangkitkan *true believers* (kaum yang percaya penuh), loyalitas mutlak pula. Dalam hal ini hubungan guru-murid, atau patron-klien yang bersifat komunal lazimnya diperkuat oleh pelbagai kepercayaan akan kekebalan, jimat atau pusaka, sehingga para partisan, diperteguh partisipasinya dan gerakan menjadi total. Tentang kepercayaan akan kekebalan itu sebagian penduduk oleh sebagian orang bahwa pengikut-pengikut gerakan Anwar Warsidi memiliki ilmu kebal.

Dalam menghadapi perkembangan seperti ini, suatu konfrontasi sukar dielakkan. Ketika tahap konfrontatif berlanjut maka kekerasan dan konflik akan semakin tidak terkendali. Seperti peristiwa Mangkuwijaya di daerah Klaten (1865), Srikaton (Tawangmangu) dan Ahmad Suhada (Ponorogo) tahun 1888, Dermajaya (Nganjuk) tahun 1907, kesemuanya gerakan berakhir dengan pertumpahan darah.

Sikap-sikap yang mengarah kepada unsur radikalisme juga melekat pada gerakan-gerakan yang hendak memusnahkan pemerintah kolonial sebagai pemerintah kaum kafir, seperti peristiwa Cikandi Udik (1845), H. Wakhya (1850), Ciomas (1886), Cilegon (1888),¹⁷ dan Gedangan-Sidharaja (1904), kesemuanya gerakan yang mendengungkan *sabilillah* sewaktu bergerak menghadapi Kumpeni. Dalam gerakan-gerakan itu mile-nium (zaman *kerta* atau keemasan) digambarkan akan tiba apabila negeri telah dibersihkan dari penguasa kafir.¹⁸

Membicarakan peranan ideologi dalam gerakan protes dengan sendiri menyangkut masalah kepemimpinan di dalamnya. Tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa ideologi di tangan pemimpin mempunyai potensi besar memobilisasi pengikut karena dijadikan fokus gerakan yang memberi makna penuh serta sekaligus berfungsi sebagai lambang identitas kolektif sehingga dengan demikian solidaritas terbentuk dengan kukuhnya. Baik Sang Ratu Adil yang telah menerima wahyu atau pulung, maupun kiyai yang dipandang keramat, pemuka memiliki keramat, pemuka memiliki kharisma yang dengan sendiri membangkitkan otoritas serta wibawa di kalangan petani.

Tidak jarang pula terdapat pemimpin yang mempunyai cakrawala mental yang lebih luas dari rakyat kebanyakan sehingga mampu memberi inspirasi serta motivasi kuat kepada peserta gerakan, antara lain dengan keterampilannya memainkan ideologi untuk memperkokoh loyalitas di satu pihak, dan di pihak lain meningkatkan mobilisasi segala sumber daya di lingkungannya, baik material maupun spiritual. Tidak dapat diabaikan pula kenyataan bahwa sang pemimpin

sebagai “elite” dapat memakai jaringan sosial yang lebih luas, acap kali melampaui batas-batas desa, bahkan ada kalanya batas daerahnya. Namun dalam kasus Talang-sari ini, pengaruhnya hanya beberapa daerah saja yang ikut terlibat dalam konflik tersebut. Itupun daerah-daerah yang penduduknya sempat dibina oleh Anwar Warsidi.

Mengingat sifat-sifat kepemimpinan dalam gerakan protes tersebut di atas maka pada umumnya dapat dibenarkan teori yang menyatakan bahwa gerakan petani dipimpin oleh unsur dari luar kalangan petani kebanyakan. Kedudukan mereka sebagai “elite” dengan sendirinya menimbulkan pandangan serta sikap untuk mempertahankan tradisi sosial maupun keagamaan mereka di satu pihak dan menolak perubahan dan pembaharuan, tidak lain karena hal ini mengancam kepentingannya sebagai *establishment*.

Dalam membicarakan peranan pemimpin sesungguhnya timbul kecenderungan untuk menganggapnya sebagai faktor penentu utama *causa prima* (sebab utama), namun sebaliknya perlu diingat bahwa untuk menerangkan timbulnya gerakan protes juga perlu diperhitungkan kondisi-kondisi sosial dari keresahan. Lebih tepat lagi dalam eksplanasi perlu dicantumkan kondisi yang disebut kecenderungan struktural.

Pendapat senada juga dipaparkan Taufik Abdullah,¹⁹ ia menggaris bawahi bahwa kepemimpinan adalah soal penilaian masyarakat terhadap pribadi tertentu dalam kaitannya dengan sistem sosial yang berlaku. Interaksi yang dinamis antara kedua unsur pribadi dan sistem sosial ini adalah faktor utama yang memapankan kepemimpinan itu. Hal ini berarti bahwa selama pribadi yang disebut pemimpin itu dianggap atau dinilai telah memenuhi kebutuhan dari sistem sosial dan komunitasnya, maka selama itu pula ia dapat mempertahankan ikatan emosional dengan para pengikutnya. Dan selama itu pula kepemimpinannya berlanjut. Maka tidaklah salah bila pada akhirnya, penduduk di sekitar Talangsari telah menempatkan Anwar Warsidi sebagai pemimpin pergerakan mereka yang diharapkan mampu menjadi simbol perjuangan.

Dengan memakai uraian di atas sebagai kerangka referensi kiranya tidak sulit untuk mengidentifikasi beberapa faktor determinan peristiwa Talangsari, Way Jepara, Lampung. Perkembangan gerakan *Mujahidin Fisabilillah* menunjukkan pola umum ke arah radikalisme. Baik ideologi maupun kepemimpinan memiliki karakteristik mirip dengan gerakan di Cilegon dan Gedangan. Dari data media massa rupanya ada petunjuk bahwa terdapat jaringan yang jauh melampaui desa tersebut. Oleh karena itu, untuk kelengkapan eksplanasi sebenarnya perlu dikaji lebih lanjut kecenderungan struktural situasi setempat sehingga dapat diketengahkan sebab-sebab keresahan yang meliputi masyarakat kecil itu.

Bila melihat peristiwa Jenggawah, Jember (1978-1979),²⁰ di mana kasus Jenggawah berkisar sekitar masalah pembagian kembali (*heraveling*) tanah garapan milik perkebunan tembakau. Dalam menganalisa kasus Jenggawah ini selanjutnya dikomparatifkan dengan peristiwa Talangsari mungkin ada signifikansinya yaitu tentang persoalan tanah. Dalam kasus Jenggawah ataupun Talangsari dapat dipahami sepenuhnya mengapa soal tanah adalah soal penuh kepekaan, tidak lain karena tanah garapan merupakan sumber penghasilan utama dan acap kali tidak ada alternatif lainnya. Perubahan status tanah ataupun penggarapan lahan yang mengancam sumber penghidupan penduduk Talangsari akan membangkitkan deprivasi pada petani, maka sangat mudah terpengaruh oleh ajaran gerakan yang tidak hanya memberi gambaran realitas alternatif tetapi juga membakar semangatnya mengarah ke radikalisme. Ditambah lagi mengenai persoalan kewibawaan lokal, di mana klaiman siapa yang lebih berpengaruh di desa tersebut telah menjadi akar persoalan lainnya. Warsidi dengan komunitas barunya di sekitar Cihideung ternyata bagi “kelompok kiayi tertentu” bisa menghambat bagi kewibawaan mereka. Dengan demikian, kasus Warsidi bisa ditempatkan karena adanya perebutan pengaruh di tingkat lokal.

Dusun Talangsari III, desa Rajabasa Lama, Kecamatan Way Jepara, Lampung Tengah tak ubahnya seperti dusun-dusun yang lain, sebelum dijamah peristiwa berdarah, awal bulan Februari 1989. Dusun dengan luas sekitar 60 hektar dari 200 Ha luas desa Rajabasa Lama, termasuk kawasan yang subur dan terkenal makmur. Hanya dihuni kurang lebih 90 kepala keluarga. Walaupun sebagian besar terdiri dari para pendatang, berasal dari Jawa Timur terutama Banyuwangi dan Jember.²¹ Menurut Sukidi²², sebagian besar penduduk di wilayah itu adalah pendatang spontan. Bukan para transmigran. Mereka datangnya hanya ingin mengubah nasib hidupnya. Adapun tanah-tanah yang dikerjakan adalah tanah milik penduduk setempat. Seperti dirinya yang menggarap tanah milik Amir Puspa Mega.²³

Meskipun sebagian adalah para pendatang warga Talangsari pun cukup akrab dengan penduduk asli di desa Rajabasa Lama. Tidak ada rasa eksklusifisme—sebelum kedatangan Warsidi ke Talangsari yang tumbuh dalam diri para pendatang tersebut. Antara pendatang dengan penduduk asli yang kurang lebih sekitar 20 persen dari jumlah penduduk di Rajabasa Lama, hubungan mereka satu sama lain nampak terjalin akrab.

Dalam perkembangan masyarakat seperti ini, maka ciri menonjol adalah tradisionalisme.²⁴ Dusun yang terkenal subur itu, dengan pengairan yang cukup baik serta beberapa daerah tadah hujan, menghasilkan beberapa jenis hasil pertanian maupun perkebunan. Seperti palawija padi, coklat, kopi dan lain sebagainya. Sebagai bukti bahwa daerah itu makmur, ada penggilingan padi di dusun tersebut. Dan rata-rata para penghuninya sebagian besar telah mengolah tanah miliknya yang berhasil dia beli melalui jerih payah dari pemilik semula.

Letak dusun Talangsari III—yang dikukuhkan pada 1 Januari 1988—sebenarnya tidak terlalu sulit untuk dicapai, dusun yang terdiri dari umbul (*gerumbul*) terletak di antara Kebon Duren dan

Cihideung. Dari kantor desa Rajabasa Lama cuma berjarak kurang lebih 9 kilometer ke arah utara meskipun harus melalui jalan tanah, dan becek jika musin hujan. Sedangkan kantor desa Rajabasa Lama sendiri berada di Barat Laut perempatan jalan besar yang menghubungkan Sukadana Way Jepara dan Talangsari.

Dalam masyarakat desa yang tradisional dan bersifat pertanian, maka pranata-pranata yang menghubungkan antar personal di dalam masyarakat di Talangsari adalah (1) bersifat pribadi, (2) tak lengkap, (3) bersaluran sedikit, (4) ditandai oleh lebih banyak komunikasi ke bawah ketimbang komunikasi ke atas, dan (5) jarang dimanfaatkan. Sementara pilihan-pilihan “kekuasaan” yang digunakan dalam masyarakat pedesaan di Talangsari lebih menekankan aspek kewibawaan tradisional dan kekerasan fisik.

Sebagai suatu wilayah yang masih tergolong “tradisional,” dalam pola-pola struktur sosial masyarakat daerah Talangsari dan di daerah-daerah lain di Lampung lebih menekankan pola hubungan pribadi atau *patron client*. Jika struktur dipahami sebagai tingkatan status sosial yang berbeda dalam masyarakat secara sosiologis, maka struktur sosial daerah Lampung ditempati oleh: (1) golongan struktur atas, adalah kelompok orang-orang kaya, kiyai, aparat desa dan kaum terdidik yang memiliki “jabatan” terpandang; (2) golongan menengah adalah para petani yang mampu mengelola tanahnya dengan baik, agak mandiri, atau kelompok petani agak cukup; dan (3) golongan bawah, yaitu petani gurem, dan petani kekurangan, yang cenderung menjadi *client*, abdi dari patron atas.

Sebagaimana lazimnya masyarakat pedesaan, rasa sikap gotong-royong di Talangsari III memang cukup menonjol. Terbukti setelah rapat pemilihan RK usai, kemudian oleh pengurus dusun dibentuk berbagai tata-tertib maupun berbagai aturan desa. Sampai-sampai dalam menentukan aturan dan tata tertib, mereka mengundang para tokoh masyarakat maupun agama. Oleh karena itu, kehidupan warga desa Talangsari III nampak rukun dan penuh kedamaian. Tidak pernah terusik hal-hal yang menggelisahkan.

Rasa gotong-royong yang dimiliki dusun yang belum lama terbentuk itu ternyata banyak membawa hasil. Antaranya melakukan perbaikan jembatan atau jalan-jalan yang menuju di desa tersebut. Melakukan kegiatan Siskamling dan berbagai kegiatan musyawarah desa untuk menjadikan dusun lebih baik dari sebelumnya. Khusus untuk keamanan desa para warga pun tak lupa bergotong-royong membangun pos-pos penjagaan demi keamanan desa. Beberapa pos atau cakruk berhasil didirikan di setiap sudut-sudut desa yang dianggap rawan kejahatan.

Memang belum ada prestasi menonjol yang diraih desa Rajabasa Lama. Namun demikian menurut Drs. Zulkifli Maliki, (Camat Kepala Wilayah Way Jepara), bahwa Rajabasa Lama di banding 26 desa lainnya di wilayah kecamatan tersebut mempunyai satu kelebihan. Yakin mampu-nyai pasar desa yang besar, setelah Way Jepara.²⁵

Ditambahkannya, hal itu menunjukkan bahwa desa Rajabasa Lama mempunyai potensi lebih dibandingkan dengan desa-desa lainnya mengenai hasil pertaniannya. Termasuk maju di bidang ekonomi. Dan mampu-nyai posisi yang lebih baik dibandingkan dengan desa-desa lainnya. Karena berdekatan dengan jalan transportasi tidak berada pada daerah yang terpencil.

Mengenai kehidupan beragama, di daerah penghasil kopi tersebut cukup marak. Hal itu bisa ditandai dengan berdirinya berbagai mushola dan pendidikan pesantren. Di daerah tersebut, telah berdiri tiga Pondok Pesantren. Yakni *Al Islam* di Labuhanratu, *Darul Ulum* di Plangkawati dan *Darussalam* di Brajadewa. Namun letaknya cukup jauh dari desa Rajabasa Lama. Khusus di daerah Talangsari III, mayoritas Warga Talangsari sendiri, maupun Rajabasa Lama penduduknya memang pemeluk agama Islam yang taat. Maka tidak mengherankan bila di daerah tersebut berdiri Mushola-mushola atau Masjid. Di samping itu direncanakan akan berdiri pula tempat pendidikan semacam pondok pesantren oleh seseorang yang bernama Warsidi. Sayangnya, keberadaan pondok tersebut tidak dikoordinasikan baik dengan jajaran Pemda, aparat keamanan maupun kepala desa serta kepala dusun setempat. Padahal telah berduyun-duyun orang-orang yang tidak dikenal penduduk setempat datang dari pulau Jawa dan mulai bermukim di Dukuh Cihideung. Mereka membangun barak-barak bambu beratap pelapah kelapa kering di sana. “Kesemuanya itu tidak pernah melapor ke saya,” kata Sukidi, Kepala dusun Talangsari III.

Kejadian seperti itu membuat heran Sukidi dan warga sekitarnya serta aparat lainnya. “Dari mana bekal logistik mereka yang konon ingin belajar di pondok pesantren Mujahidin itu. Sebab mereka tidak ada yang bekerja atau mengolah ladang, padahal jumlahnya cukup banyak. Dari mana uang atau penghasilan mereka untuk hidup selama di barak itu? Begitu kira-kira rasa keheranan mereka atas komunitas di Cihideung. Apalagi, sebelum peristiwa berdarah itu terjadi di sekitar barak tersebut dibuka dapur umum. Dan bagi warga setempat memang banyak yang serba tak masuk akal tentang berbagai kegiatan kelompok itu. Terutama menyangkut kebutuhan sehari-hari mereka. Karena juga tidak mengherankan jika sebagian dari jama’ah Warsidi ada yang keluar jalur dengan mencuri ubi kayu tanaman penduduk. Kondisi yang tidak saling kenal dalam kehidupan desa yang penuh paguyuban menjadi sangat rentan terhadap terjadinya konflik sosial, meskipun hanya oleh sebab sesuatu ketidaksesuaian kecil sekalipun. Apalagi tatkala penduduk melihat kegiatan mereka yang lebih sering berupa latihan memanah daripada belajar agama dan mengaji.

Dalam kenyataan selanjutnya, kenapa dalam kehidupan masyarakat yang sudah baik itu kemudian timbul gejolak? Apakah gerakan Talangsari ini berdiri sendiri atau mempunyai kaitan dengan persoalan tanah atau mempunyai kemungkinan dengan pernyataan pemerintah yang

menga-nggap bahwa timbulnya gejala sosial di Talangsari ini—dalam hal ini direpresentasikan lewat gerakan Warsidi—merupakan bangkitnya kembali golongan ekstrim yang berusaha memperjuangkan kembali ideo-loginya?²⁶ Kesimpulan yang terakhir ini tidaklah dipastikan kebenarannya secara keseluruhan. Menurut Kapuspen ABRI Brigjen TNI Nurhadi,²⁷ “selama ini kita benar-benar larut dengan proyek pembangunan nasional. Di mana sasaran proyek nasional ini sudah jelas menuju terciptanya kesejahteraan masyarakat (*prosperity*). Tetapi di pihak lain, agaknya segi-segi keamanan (*security*) kurang maksimal tertangani.” Jadi, menurutnya, untuk menangkal munculnya gejala yang setiap saat muncul ke permukaan, perlunya pembinaan yang lebih matang tentang pembangu-nan politik atau kesadaran politik menuju tatanan demokrasi Pancasila. Dari pernyataan Kapuspen tersebut, kita mencoba menganalisa tentang demokrasi di pedesaan yang berlaku di negara kita, selanjutnya kita teliti adakah keterkaitannya dengan peristiwa tersebut. Yang akan kita permasalahan di sini adalah sampai sejauh mana sebuah sistem demokrasi di Pedesaan itu diterapkan di negara kita.

Berdasarkan pengamatan Bonnie Setiawan,²⁸ bahwa untuk mema-hami demokrasi di pedesaan perlu terlebih dahulu dipahami struktur sosial pedesaannya. Apakah struktur sosial yang ada saat itu dapat mendukung ke arah terlaksananya penyelenggaraan sistem yang demo-kritis. Struktur sosial yang timpang di desa, dengan sendirinya akan mengganggu pelaksanaan demokrasi, karena kekuatan-kekuatan di masyarakat desa yang diuntungkan akan tidak setuju dengan demokrasi tersebut. Demikian pula kekuatan supra desa, yang ada dalam struktur sosial makro, juga akan ikut mengendalikan berjalannya demokrasi. Dengan demikian terlihat jelas bahwa pelaksanaan demokrasi tidaklah sederhana. Suatu usaha penegakan demokrasi tanpa memperhatikan perubahan dalam struktur sosialnya akan mudah larut dan lenyap ke dalam situasi makro.

Struktur sosial biasanya tercermin dalam hubungan sosial masyarakat pedesaan. Termasuk tercermin dalam berbagai aktivitas kehidupan sehari-hari masyarakat pedesaan. Secara khusus ia juga dicerminkan oleh perangkat sosial yang berlaku, seperti aturan-aturan hukum, program-program pemerintah, tata niaga pedesaan, kebudayaan massa dan lain-lain. Dengan demikian kita perlu mengenali persoalan-persoalan demo-krisi yang dicerminkan dalam kehidupan sosial yang ada, dengan mengajukan sikap kritis terhadapnya, dapatlah demokrasi dalam pengertian yang asasi dikenali. Dan dengan begitu akan memudahkan dalam menyusun agenda penerapan demokrasi yang lebih murni dan menyeluruh.²⁹

Pedesaan di Dunia Ketiga pada umumnya, dan tentunya juga di Indonesia, tidak dapat lepas dari persoalan transformasi agraria. Persoalan ini merupakan persoalan besar yang juga dihadapi oleh negara-negara Barat pada masa lalu, termasuk juga Jepang. Transformasi agraria ini merupakan peralihan yang bersifat kompleks dan seringkali banyak menimbulkan konflik dan pertentangan. Namun transformasi di Barat lebih berjalan mulus dalam artian peralihan struktur sosialnya melewati tahapan-tahapan yang tetap dan terselesaikan.³⁰ Tidak demikian halnya dengan di negara-negara Dunia Ketiga yang struktur sosialnya diganggu oleh kehadiran kolonialisme Barat. Akibatnya, transformasi agraria yang berlangsung, untuk suatu waktu tertentu mengalami per-campuran dan intervensi dari berbagai bentuk hubungan sosial.

Peralihan yang kemudian terjadi merupakan peralihan yang terhamb-at (*blocked transition*), sehingga di dalam struktur sosial agraria bisa kita temui berbagai macam hubungan produksi pertanian.³¹ Dengan demiki-an dalam kehidupan sosial di pedesaan terdapat bentuk penyelenggaraan produksi yang bersifat baik komunal, feodal ataupun kapitalis. Ini yang menyebabkan terjadinya berbagai kekisruhan di masa-masa awal setelah kemerdekaan formal diraih oleh negeri-negeri tersebut. Konfigurasi golongan-golongan sosial dan politik yang ada di dalamnya merefleksikan berbagai sistem sosial yang berlaku. Demikian pula sistem demokrasi yang coba diterapkan dalam sistem pemerintahannya, yang pertama-tama menggunakan model demokrasi liberal, tidak dapat lepas dari perbedaan penafsiran. Demokrasi menjadi sesuatu yang diidamkan, tetapi juga diartikan menurut kemauan pemerintahan yang berkuasa.

Peralihan agraria di Indonesia, sama seperti di Dunia Ketiga lainnya, menghadapi dua model pembangunan agraria yang lebih banyak saling bertentangan. Yang pertama adalah penyelesaian struktur agraria lewat program pembaruan agraria (*landreform*).³² Dan yang kedua lewat program modernisasi pertanian atau revolusi hijau (*green revolution*). Yang pertama mempersoalkan mengenai hak-hak kaum tani atas tanah beserta berbagai macam kebijakan yang dapat merombak tatanan agraria yang masih dirasa timpang dan merupakan peninggalan sejarah kolonial dan feodal. Sementara yang kedua menitikberatkan pada pembangunan sektor pertanian yang mendukung perkembangan industrialisasi melalui penggunaan dan pemanfaatan seluas-luasnya hasil teknologi pertanian, serta pembangunan infrastruktur pertanian yang modern tanpa merombak tatanan agraria yang lama. Keduanya merupakan model yang mencoba menyelesaikan persoalan agraria guna mempercepat peralihan ke arah struktur pertanian yang lebih maju.

Dibandingkan dengan yang kedua, program pembaruan agraria (*landreform*), lebih banyak ditolak, dihindari atau dikaburkan pengertiannya oleh pemerintah yang bersangkutan. Padahal secara asasi program tersebut merupakan jawaban bagi ditiadakannya ketimpangan di pedesaan. *Landreform* secara umum diartikan sebagai kebijaksanaan pemerataan guna menghapus kemiskinan melalui pengikisan ketimpa-ngan bagi kemanfaatan rakyat desa yang paling miskin atau seluruh rakyat miskin. Dan pekerjaan yang paling mutlak bagi pembaruan agraria ini adalah lewat pembagian tanah. Dalam kenyataan di banyak negara, terbukti bahwa pembaruan yang

bersifat sebagian-sebagian, seperti pada perbaikan kondisi bagi hasil, penyediaan tanah-tanah baru, penyediaan input pertanian modern ataupun pajak progresif bagi pemilik tanah, tidak akan dapat mengubah ketimpangan.

Dengan melihat pentingnya program *Landreform* itu, maka tidak bisa lain bahwa suatu pencanangan sistem demokrasi di pedesaan haruslah mempermasalahkan hal tersebut. *Landreform* tidak sekedar masalah pem-bagian tanah, akan tetapi suatu prasyarat mutlak bagi suatu pembaruan demokrasi. Lebih jauh dari itu, demokrasi tidak sekedar masalah partisipasi dan pelembagaan politik, melainkan juga pengembangan kekuasaan rakyat miskin desa.

Arah bagi suatu sistem demokrasi yang lebih menguntungkan rakyat pedesaan kiranya menjadi lebih jelas, bila kita mengaitkannya kepada tekanan untuk memperkuat kekuasaan rakyat desa pada umumnya. *Landreform* adalah semacam wadah yang memungkinkan rakyat tani mengedepankan kepentingan-kepentingannya. Dengan kata lain, kesepakatan mengenai diadakannya program pembaruan agraria ini, berarti akan memperkuat demokrasi di tingkat paling bawah dari masya-rakat pedesaan. Pelaksanaan ini akan merupakan dukungan bagi di bentuknya organisasi-organisasi petani dan pekerja desa lainnya, serta jaminan bagi partisipasi aktif mereka dalam membawakan perubahan yang diinginkan. Dengan mengedepankan pembangunan dari bawah inilah, dapat dipastikan bukan hanya terjadi suatu peralihan yang cepat ke arah masyarakat baru, akan tetapi juga memperkuat dijalankannya *landreform* tersebut.³³

Dengan demikian adalah penting untuk memeriksa kembali bagian yang mendasar dari kehidupan politik dan demokrasi kita di pedesaan. Sampai sekarang masih ada kesangsian yang besar mengenai tujuan dan hasil yang dapat dicapai dari *landreform*. Setidak-tidaknya, terdapat anggapan bahwa masyarakat desa yang sudah menikmati stabilitas dan 'ketenangan' politik, tidak perlu lagi ikut serta di dalam usaha tersebut. Akan tetapi kenyataan yang terjadi kini adalah sebaliknya dari apa yang diharapkan. Keresahan mengenai masalah tanah serta tidak adanya badan atau organisasi yang menyalurkan kepentingan mereka, mengaki-batkan kasus-kasus tanah beserta eksesnya muncul begitu saja seperti ledakan.

Hal ini nampak ramainya kasus-kasus tanah yang dimuat berbagai mass media. Peristiwa di Talangsari, bisa merupakan bagian dari tidak berjalannya peraturan-peraturan agraria tersebut, sehingga masyarakat di sekitarnya memprotes dengan cara mereka sendiri. Sementara itu kelihatan bahwa hukum ternyata tidak berpihak kepada penduduk yang kemudian menjadi sebuah tragedi kemanusiaan.³⁴ Begitupun di tempat lain, kasus Kedung Ombu memperlihatkan pengusuran tanah oleh pemerintah tanpa memperhatikan kepentingan dan hak tanah rakyat desa, seperti pada ganti rungi tanah yang kecil.³⁵ Masih banyak lagi kasus-kasus tanah lainnya yang berkisar pada soal yang sama, yaitu mengenai tidak adanya kekuatan petani dalam memiliki atau menguasai tanah mereka secara legal, serta macetnya mekanisme demokrasi yang menim-bulkan kesewenang-wenangan di pihak yang kuat, dalam hal para pejabat birokrasi sipil dan militer dan juga para konglomerat.

Mekanisme demokrasi yang berlaku di pedesaan saat ini sangat menekankan pada pertimbangan *ketertiban* dan *keamanan*. Ini berakibat hilangnya dinamika rakyat pedesaan dan digantikan dengan berbagai organisasi dan kelembagaan desa yang merupakan perpanjangan tangan dari birokrasi Negara. Terdapat berbagai ragam birokrasi kelembagaan di tingkat pedesaan, seperti: Organisasi Bidang Sosial dan Kesejahteraan semisal Lembaga Sosial Desa (LSD) yang kemudian berubah menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), Organisasi Bidang usaha Ekonomi semisal KUD, Organisasi Bidang Produksi semisal Gera-kan Padat Karya, Organisasi Bidang Keamanan semisal Hansip, Organi-sasi Bidang Kependudukan semisal Gerakan Keluarga Berencana.³⁶

Dalam keputusan Mendagri No. 1/1981 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa dan perangkat desa, diletakkan pula fungsi LKMD³⁷ (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa) yang ikut membantu tugas-tugas yang dilakukan kades, di mana kades bertindak pula sebagai ketuanya.

Penekanan terhadap segi 'ketahanan, ketertiban dan keamanan' (*security approach*) telah dilakukan sejak dari tingkat atas. Sebagaimana diketahui, di tingkat provinsi telah ada badan yang bernama Muspida (Musyawarah Pimpinan Daerah). Dalam Keppres No. 10/1986, pasal 1 ditegaskan bahwa Muspida adalah suatu forum konsultasi dan koordinasi antara Gubernur Kepala Daerah Tk. I dan Bupati/Walikota madya Kepala Daerah Tk. II dengan pejabat-pejabat ABRI/TNI di daerah serta aparatur-aparatur pemerintah lainnya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara stabilitas nasional dan pembangunan nasional di daerah. Anggota dari Muspida ini adalah Bupati/Walikota, KODIM (Komando Distrik Militer), POLRES (Kepolisian Resort), dan Kejaksaan. Sedangkan di tingkat kecamatan adalah Camat, KORAMIL (Komando Rayon Militer), POLSEK (Kepolisian Sektor), dan Kejaksaan. Peranan TRIPIKA (Tiga Pembina Kecamatan), yaitu camat, koramil dan polsek di pedesaan ada-lah sangat besar, khususnya dalam memantau dan melaksanakan "keter-tiban dan keamanan" di desa-desa yang menjadi wilayahnya.

Keadaan di desa yang sangat menitik-beratkan pada Kamtibmas, di alam kemerdekaan dan situasi yang sangat stabil selama lebih dari dua dasawarsa ini, tentu ada baiknya ditinjau kembali. Keadaan yang terus demikian, pada gilirannya bisa menimbulkan kurangnya prakarsa dan inisiatif dari rakyat desa. Hal ini mungkin juga karena tidak jelasnya pengertian "ketahanan, ketertiban dan keamanan" tersebut, sehingga suatu kegiatan atau inisiatif dari warga desa dapat saja digolongkan ke dalam aspek ketertiban dan keamanan. Khususnya bila berkaitan dengan adanya

konflik atau potensi konflik antara pihak penguasa desa dengan rakyat warga desa pada umumnya, dan inilah kiranya kasus yang selalu berulang dalam peristiwa-peristiwa sengketa tanah ataupun masalah-masalah lainnya, apakah itu masalah sosial, politik dan ekonomi. Semua ini tentulah tidak kita kehendaki bersama di dalam sistem demokrasi politik yang kita pakai.

Pada akhirnya persepsi tentang pembangunan dan format politik Orde Baru, yang cenderung menempuh konsep birokratik-otoriter, ternyata menimbulkan implikasi mendasar. Misalnya, mengedepannya pro-ses atau mekanisme pengambilan keputusan atau kebijaksanaan yang sebagian besar dimonopoli oleh elit-elit politik atas (militer) yang lebih dominan arah dan aplikasi kebijaksanaan pembangunan yang semata-mata dipusatkan pada model pertumbuhan ekonomi berupa *trickle down effect*, ternyata melahirkan disparitas baru. Selanjutnya Negara menghadapi tantangan, karena kebijakan pembangunan yang selama ini dijalankan oleh pemerintahan Orde Baru dianggap telah melahirkan proses marginalisasi masyarakat Talangsari, Way Jepara Lampung. Bila situasi seperti demikian maka akan menyebabkan terjadinya gejala dikotomi antara pusat dan pinggiran, dan pada titik tertentu mengharuskan munculnya ketegangan.

Apa ekses selanjutnya yang akan menimpa para penduduk Talang-sari? Pada akhirnya mereka menjadi “korban” politik elit. Implikasinya, penduduk Talangsari tidak lagi mempercayai sistem politik yang ada. Kemudian muncul apa yang disebut dengan sikap *cuekisme* atau berdiam diri, tetapi berbicara dalam tindakan politik. Tindakan politik yang muncul akibat faktor-faktor yang dianggap memicu, berwujud perlawanan ber-senjata.³⁸

Bab 10-02 Persiapan-persiapan di Jakarta.

Daerah Lampung, bagi sebagian orang yang pernah menikmatinya adalah seperti gula, bila semut mengetahuinya maka tak ayal sekawanan semut pasti akan menyerbu gula tersebut.³⁹ Analogi ini bisa dipahami bahwa memang daerah Lampung adalah merupakan daerah yang terkenal dengan kesuburan tanahnya. Selain itu, di daerah Lampung tersebut sangat cocok untuk sebuah pemukiman. Begitu pula yang dikehendaki oleh Warsidi dan kelompoknya, selain bercocok tanam mereka ingin di desanya dibangun sebuah pemukiman yang Islami.

Sejak terjalannya kontak antara Warsidi dengan tiga orang pemuda Jakarta bernama: **Nurhidayat, Fauzi Isman** dan **Sudarsono** sebagian orang yang berhasil dipengaruhi dari Jawa Tengah⁴⁰ dan Jakarta berkeinginan untuk pindah tempat tinggal ke daerah Lampung. Dalam keyakinan agama kita terdapat sebuah adagium bahwa “seorang muslim yang baik harus tinggal di tempat yang baik”. Apalagi memang kenyataannya bahwa di negeri Indonesia begitu suburnya berbagai kezaliman, seperti penindasan, kesewenang-wenangan, pembunuhan, pemerkosaan, perjudian, perampokan dan kerusakan-kerusakan moral atau etika (akhlak) lainnya, membuat mereka merasa gerah juga. Jakarta, sebagai kota metropolis yang banyak menjanjikan kenikmatan hidup ternyata menghadirkan sesuatu di luar batas pikirannya. Maka jalan yang ditempuh adalah bagaimana mereka ingin mempurifikasi diri. Bagi mereka jalan satu-satunya untuk menghindari diri dari pengaruh-pengaruh negatif tersebut dengan jalan *hijrah*. Hijrah dalam pengertian, mencari tempat yang kondusif dalam rangka memproteksi diri (meninggalkan) dari apa-apa yang dalam keyakinannya diharamkan Allah.

Untuk menjalankan program hijrah tersebut, diadakan pertemuan khusus tanggal 12 Desember 1988 di Cibinong, Jawa Barat. Dalam pertemuan itu dihasilkan satu kesepakatan untuk membuat perkampungan Muslim, sebagai daerah basis perang, di Cihideung, Dusun Talangsari III, Kecamatan Way Jepara. Namun anehnya tidak ada nama, struktur dan yang menerima konsep *hijrah* di sana. Adapun yang bertanggung jawab menerima di sana adalah Warsidi dan Usman, sedangkan yang bertanggungjawab untuk meng-*hijrah*-kan mereka ke sana adalah: Nurhidayat, Darsono dan Fauzi. Kemudian Nurhidayat ditunjuk sebagai *Amir Musafir*.⁴¹

Pada tanggal 12 Februari 1988 sampai tanggal 6 Februari 1989, secara bertahap tanpa sosialisasi dan koordinasi dengan aparat dan penduduk sekitarnya yang akan didatangi kurang lebih 50 orang *hijrah* ke sana, diantaranya: keluarga Margono dan keluarga Sukardi. Selanjutnya, menghasilkan jamaah kurang lebih 300 orang baik dekat maupun jauh, termasuk dari kampus UNILA (Universitas Lampung), seorang mahasiswa *drop out* Muhlis.⁴²

Sementara itu di Jakarta, melalui peranan tiga orang yaitu Nurhidayat, Fauzi dan Sudarsono ini diadakanlah berbagai kegiatan. Melalui dakwah untuk menarik peminat dengan iming-iming dalam kegiatannya menuju kepada terciptanya kehidupan Islami dengan pembentukan perkampungan Islam (*Islamic Village*) terus diupayakan. Pemikiran yang sangat fundamentalis ini pada saatnya nanti dipersiapkan sebagai basis tegaknya syariat Islam dengan pola *Darul Arqam* di masa Rasulullah SAW di Mekkah. Dan dari usaha da'wah itu disusun beberapa *shaf*, di antaranya ialah: *shaf* Ali, *shaf* Umar, *shaf* Abu Bakar dan *shaf* Usman. Pusat kegiatannya berlokasi di Gg. Remaja I Prumpung, Jakarta.⁴³

Namun dalam perjalanannya, pembentukan *shaf* tersebut mengalami kendala internal. Menurut Sudarsono, salah satu penyebabnya adalah karena ketidaksinkronan arah dan tujuan perjuangan.⁴⁴ Salah seorang dari Ketua *shaf*, Nur Hidayat, seorang pemuda energik, emosional dan berjiwa meledak-ledak, mengajak untuk langsung berjihad (berperang angkat senjata). Yang menjadi dasar pemikirannya adalah karena ditubuh ABRI sudah terkotak-kotak dan rezim Soeharto sebentar lagi akan hancur. Hal lain adalah bahwa Islam hadir untuk membebaskan manusia dari perbudakan manusia.⁴⁵ Namun usaha tersebut ditentang oleh yang lainnya. Menurut Ridwan,⁴⁶ bahwa langkah yang tengah diusahakan Nur Hidayat terlalu tergesa-gesa dan bahwa

persoalan tersebut belum jelas arahnya. Ditambahkannya, bahwa dalam Islam kalau mau bergerak harus jelas motivasinya, yaitu untuk *li 'ila kalimatillah*, di samping itu harus adanya komandan jihad yang mumpuni sebagai imam, karena bila tidak ada *imam* maka perjuangan yang ditempuh pun tidaklah sah.⁴⁷ Hal senada juga dilontarkan oleh Ustadz Ilyas, ia berpendapat bahwa kaum muslimin tidak dibenarkan mengadakan agresi, dan itu bertentangan dengan sunah rasul.⁴⁸

Bab 10-03 Persiapan-persiapan di Lampung

Cihideung—satu lokasi yang dulunya dibuka orang-orang Sunda— merupakan Pedukuhan⁴⁹ Talangsari III desa Rajabasa Lama Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Tengah yang berjarak 90 Km dari Bandar Lampung. Pedukuhan seluas 1,5 Ha itu dikelilingi oleh kali beringin mirip sebuah semenanjung pulau. Sebelah utara berbatasan dengan Pakuan Aji, sebelah selatan berbatasan dengan Kelahang dan sebelah barat berbatasan dengan pusat Desa Rajabasa Lama.

Di daerah Talangsari itu, sedang disusun sebuah komunitas muslim jama'ah Warsidi terdiri dari para pendatang dari pulau Jawa dan hanya beberapa orang yang berasal dari penduduk setempat. Pada awalnya, Jama'ah Warsidi sangat santun dan baik dan tidak ada sedikitpun dari praktek keagamaannya yang ekstrim atau menyimpang. Meski jama'ah ini baru saja memulai sebuah “pesantren” ala kadarnya, namun kegiatan penggarapan tanahnya berjalan intensif. Beberapa anggota jama'ah bekerja di perkebunan Warsidi dengan upah yang layak.

Sebagaimana lazimnya di tempat merantau, di samping menggarap tanah untuk mata pencaharian, penduduk yang kebanyakan perantau itu pagi hingga siang harinya mengadakan rutinitas bercocok tanam. Dalam menjalankan aktifitas bercocok tanam di lokasi pertanian itu, Warsidi mengadakan koordinasi dengan seorang guru *ngaji* bernama Abdullah dari Sidorejo.⁵⁰ Radikalisme Warsidi mulai terbentuk dan secara tiba-tiba, dalam waktu yang relatif singkat, ia berubah menjadi tokoh radikal setelah bertemu dengan beberapa jama'ah yang datang dari Jakarta dengan semangat Islam yang membara.⁵¹ Mereka berusaha mengamalkan ilmunya dengan membuat perkampungan muslim (*Islamic village*) yang ada di pedukuhan Cihideung. Namun, anehnya apa yang diharapkan untuk menjadi “Perkampungan Muslim” ternyata, pengajian yang masih baru itu sudah langsung diarahkan belajar latihan memanah dan silat. Sebuah persiapan untuk perang, *a prelude to “revolution”* sedang terjadi di sana.

Keberadaan Warsidi sendiri di Cihideung bermula pada tahun 1987. Warsidi memperoleh hibah tanah seluas 1,5 Ha dari seorang penduduk bernama Jayus yang kemudian di atas tanah tersebut didirikan *Mushalla* berukuran 6 x 9 meter yang dinamakannya *Mujahidin*. Disekitar *Mushalla* didirikan beberapa rumah gubuk dan rencananya di lokasi itu pengajian-pengajian mulai dirintis. Warsidi yang dibantu oleh Imam Bakri dalam memberi materi pengajiannya baru sebatas penjelasan berupa doktrin untuk jama'ahnya saja.

Memasuki akhir tahun 1988, perkembangan pondok tersebut secara fisik dilakukan—di antaranya pembenahan pondok semi permanen (papan) dengan luas masing-masing 8x16 meter dengan jumlah 4 buah. Jama'ah Warsidi secara tiba-tiba pada bulan Januari 1989 bertambah dengan banyaknya pendatang yang dikirim dari Jawa. Jumlahnya mendekati 400 orang. Sehingga sampai awal tahun 1989 itu, jumlah jama'ah diperkirakan mencapai 550 orang yang terdiri dari laki-laki dewasa dengan keluarganya.

Pada hari Jum'at, 20 Januari 1989, ketika sepucuk surat dari Camat Way Jepara yang isinya mengundang Warsidi untuk datang ke kecamatan. Anwar Warsidi, sebagai pemimpin jama'ah mengirimkan surat balasan kepada Camat Way Jepara yang isinya keberatan untuk memenuh undangan camat. Alasan penolakan tersebut dikarenakan pihak Anwar Warsidi berpegangan pada hadist yang berbunyi: “*Sebaik-baiknya Umaro adalah yang dekat dengan ulama dan sejelek-jeleknya ulama adalah yang dekat dengan umaro*”.

Ketegangan terus menerus berlangsung sampai menjelang akhir Januari 1989, suasana ketegangan yang ada belum menunjukkan tanda-tanda reda. Sinyalemen kelompok pengajian Warsidi menyimpang dari ajaran agama terjadi di kalangan masyarakat dan diperkuat oleh tokoh-tokoh Agama yang ada saat itu. Di antara sinyalemen-sinyalemen terdapat dugaan antara lain bahwa di desa Talangsari ada beberapa orang yang melakukan kegiatan mencurigakan dengan berkedok agama. Mereka (kelompok Anwar Warsidi) sering memberikan khotbah yang bernada ekstrim, menghasut masyarakat untuk menentang Pemerintah dan anti-Pancasila, mengumpulkan botol-botol kosong untuk dibuat bom molotov dan membuat panah-panah beracun, dan melakukan latihan kegiatan beladiri.⁵²

Beberapa kali panggilan dari pemerintah setempat tidak dituruti Warsidi, padahal jama'ah dan akhirnya Nurhidayat sendiri minta Warsidi agar segera saja membuka komunikasi dengan lingkungan dan lapor kepada aparat setempat. Pada akhirnya tragedi yang sama-sama tidak diinginkan pun terjadi. ⁵³

Pada bulan Desember 1988,⁵⁴ terjadi peristiwa awal yakni kunjungan pertama seorang Camat beserta dua orang pamongpraja, Kepala Dusun, Kepala Desa Rajabasa Lama, Kepala Desa Labuhan Ratu. Disambut oleh Warsidi dengan ramah tamah dan disertai dengan diskusi serta perdebatan soal Islam. Sepulangnya rombongan itu disertai dengan sorakan dan sentilan warga yang memanas-manasi, dengan rasa tidak senang. Malamnya ada kegiatan ramai. Mereka mengumpulkan botol-botol, bambu hitam, golok, senjata tajam, dan mempersiapkan berbagai jenis senjata. Semakin lama semakin banyak jumlahnya.

Kemudian pada Kamis, 2 Februari 1989, Sukidi dan Dahlan yang meronda mendatangi mushala kecil di ujung Dusun Talangsari III perbatasan tempat Jamaah Warsidi. Di tempat itu telah berkumpul beberapa orang yang oleh warga Dusun Talangsari III belum dikenal. Satu persatu orang itu ditanyai. Mereka berasal dari dusun Meranding, dusun Proyek Pancasila, Lampung Utara, dan Jakarta. Tetapi mereka berada di wilayah dusun Talangsari III, tak ada laporan, tak ada KTP. Saat itu Warsidi tidak muncul karena sedang sibuk. Setelah itu Sukidi dan Dahlan hendak pergi dari tempat itu, tetapi orang-orang itu agak berkeberatan. Ketika hendak mengambil motornya, Sukidi melihat motor *de Lux 76* itu sudah tidak berada di tempatnya. Ternyata motor itu sudah pindah ke pinggir kali. Kemudian motor itu dikembalikan. Dahlan agak tersinggung dikentuti keras-keras, ketika Sukidi dan Dahlan hendak pergi dari tempat itu dengan motornya. Di tengah jalan itu mereka sempat dihadang oleh enam orang tetapi diterobos saja. Sempat mendengar komentar, "Jangan dua orang, tanggung!" Setelah itu menjauhi tempat⁵⁵ itu, Dahlan mengambil arah ke selatan dan Sukidi ke arah Timur.

Dalam perkembangan berikutnya, Jum'at, 3 Februari 1989 pagi harinya, Sukidi lapor ke Kepala Desa Rajabasa Lama Amir Puspamega tentang peristiwa yang dialaminya pada malam itu. Dan kemudian laporan ini disampaikan ke kecamatan Way Jepara. Hingga Sukidi diminta datang memenuhi panggilan Camat Drs. Zulkifli. Oleh Camat, Sukidi diminta kembali mengecek jamaah Warsidi kembali. Malamnya Sukidi mengecek sendiri, tetapi ia ketahuan, ia menghindari hingga tercebur ke kali. Dan besoknya melaporkan kembali ke Camat. Sejak saat itu, Sukidi tak berani terang-terangan menampakkan dirinya. Ia selalu sembunyi-sembunyi untuk mencapai rumah.⁵⁶

Berikutnya, Sukidi dipanggil oleh Danramil Kapt Inf. Sutiman. Sebelumnya Sukidi tidak pernah bertemu dengan Danramil. Di depan Danramil, Sukidi menceritakan apa adanya tentang keberadaan jamaah Warsidi itu. Bahwa sudah lima kali cek positif tentang jamaah Warsidi.

Selanjutnya, Danramil mengawal Pak Sukidi dan berserta dua orang ikut meronda dan seorang Babinsa, dan seorang Batu Ut (wakil Danramil). Sebelumnya Sukidi diperingatkan oleh warga supaya tidak datang, mengingat situasi yang genting, karena rumah Pak Sukidi didatangi oleh lima belas orang⁵⁷ berpakaian hitam-hitam mencari Sukidi.

Tanggal 5 Feb.1989. Patroli memantau kegiatan Warsidi, ramai-ramai jalan kaki. Sesampainya di *Cakruk* (pos ronda) sudah ditunggu oleh banyak orang jamaah Warsidi yang memegang senjata. Sebelumnya cakruk itu milik warga Sukidi, tetapi kini sudah ditinggalkan sejak kedatangan orang-orangnya Warsidi. Di pos ronda itu pada jam 11:30 wib. Gelap gulita. Senter Babinsa sempat beradu tatapan dalam jarak teramat dekat. Orang-orang itu dilucuti senjatanya. Empat orang ditangkap, sedang satunya melarikan diri. Dikumpulkan senjata-senjata yang terdiri dari botol-botol bom molotov, parang, dan ketapel-ketapel dan anak-anak panah yang terbuat dari jari-jari kendaraan sepeda dan motor dalam karung goni. Agar tidak diketahui oleh jamaah Warsidi, mereka mengambil jalan menerabas belukar.

Dengan barang bukti ini melaporkan ke Kepala Desa Rajabasa Lama Amir Puspamega yang kemudian dikirim ke Way Jepara. Sukidi dan warga juga melaporkan adanya konflik lokal antara warga Talangsari dengan anggota jamaah Warsidi. Menurut Riyanto,⁵⁸ mulai terjadi konflik ceritanya berawal. Sejak Sukidi (Kepala Dusun Talangsari III) memberikan laporan kepada Amir Puspamega (Kepala Desa) dan kemudian naik ke kecamatan bahwa ada banyak penduduk asing di tempat Warsidi yang tidak lapor dalam jumlah yang sangat banyak. Sukidi dan Amir Puspamega curiga. Waktu itu memang banyak pendatang baru berkumpul di tempat Warsidi yang luas tanahnya cuma 1 hektar persegi. tapi belum ada acara pengajian. Juga belum ada kurikulum. Cuma baris berbaris, latihan memanah. Jadi masyarakat bertanya-tanya.

Itu terjadi pada bulan Januari-Februari 1989. Jadi persiapan perang sudah dijalankan karena pengaruh dari para pendatang terhadap daerah pemukiman Warsidi. Dijanjikan pula kepada jamaah Warsidi di Lampung bahwa mereka nanti akan mendapat senjata sebanyak satu kapal melalui pelabuhan Bakauhuni. Dan pelabuhan Bakauhuni di Lampung akan ditutup nanti apabila Jakarta telah dikuasai. Menurut Riyanto yang mendengar penuturan langsung dari Warsidi, bahwa orang Jakarta mengatakan bahwa ia nanti akan mendapatkan senjata sebanyak satu kapal. Cerita ini dituturkan juga oleh Sugeng Julianto (sekarang berdomisili di Solo) di Lembaga Pemasarakatan (LP) Rajabasa Lama. Dikatakan juga untuk menghadapi Kodim cukup dilaksanakan oleh 5 (lima) orang jamaah saja, 5 (lima) Kodim cukup 25 (duapuluh lima) orang. Tentang itu semua termakan oleh orang Lampung. Pembawaan Warsidi yang sebelumnya tidak tegang, sejak kedatangan orang-orang Jakarta menjadi tegang, semangat dan emosi jihad

Tanah wakaf dari saudara Jayus warisan bapaknya dulu seluas sekitar satu hektar di seberang kali. Tetapi karena tidak ada perhitungan, logistik tidak ada, di sana orang-orang pendatang dari Jakarta kesulitan. Maka mereka mencari dalil, bahwa semua milik Allah untuk membenarkan melakukan tindakan mengatasi ancaman kelaparan. Jagung-jagung peta-ni dicabut karena milik Allah. Hingga mereka bentrok dengan para petani Talangsari dan menimbulkan ketegangan serta persoalan lokal..

Para jamaah Warsidi membayangkan daerah Cihideng sebagai *suffah* (*markas pendidikan*), dan menganggap Talangsari sebagai *Madinah* yang harus dipertahankan sampai titik darah penghabisan.⁵⁹

Sewaktu Camat sempat datang beserta rombongan menemui jamaah Warsidi untuk menyerahkan surat panggilan pertama. Warsidi menerima surat panggilan kedua dari Camat untuk datang menghadap. Tadinya Warsidi mau datang, mengingat keputusan musyawarah

jamaah dengan suara terbanyak menyarankan Warsidi untuk tidak datang ke kantor camat. Warsidi menyatakan *statement* “sebaik-baiknya umara mendatangi ulama”, ketika menerima surat panggilan. Warsidi mempertahankan *statement* itu. Puncaknya adalah, didatangnya Sukidi kepala dusun dari Talangsari III oleh beberapa orang anak buah Warsidi termasuk yang diakui Riyanto sendiri di antaranya, dan diancam akan dibunuh. Jadi jelas, itu puncak kekesalan, kecemasan dan kebencian masyarakat meledak. Bagaimanapun Sukidi adalah kepala dusun yang dipilih rakyat, bukan aparat pemerintah seperti yang ditulis-tulis selama ini oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi dia atas nama rakyat dan ini menurut dia sudah keterlaluan, dia yang sebagai pamong yang mengatur dusun, malah dia yang diancam. Kenapa diancam, karena dianggap mengganggu terus dengan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang diamau sdr. Warsidi waktu itu adalah bahwa sejelek-jeleknya Ulama, Umara yang sebaik-baiknya menghadap Ulama.⁶⁰

Rupanya ini dituruti, camat yang waktu itu datang ke sana menghadap, tetapi kemudian disorak-sorakin dan tidak dijawab atas pertanyaannya, sehingga camat pulang kembali. Dan kembali lagi ke Warsidi untuk yang kedua kalinya sudah dengan bersama-sama staf Kodim.⁶¹ Dari sini, situasi krusial menuju konflik dan bentrokan nampaknya kian sukar dielakkan karena proses dialogis tak bisa dilakukan dengan baik

Tidak lama setelah adanya penangkapan kelima orang jamaah Warsidi oleh orang-orangnya kepala desa pada waktu malam, tiada yang tahu. Menurut Riyanto, seminggu sebelumnya Warsidi telah mempersiapkan siagakan jamaahnya untuk mengantisipasi kemungkinan buruk terhadap kedatangan pihak aparat. “Siaga satu” kata mereka. Ia telah memberikan beberapa komando khusus kepada beberapa kelompok jamaahnya, setelah mendapatkan kabar lima orang jamaahnya ditahan di Kodim. Dalam situasi yang tegang, mendapat bocoran bahwa suatu saat lokasi akan didatangi aparat. Mereka jaga malam, kalau masuk ke dalam lokasi tertentu menggunakan kata-kata sandi seperti ‘*amit*’ dan ‘*syahid*’, kalau nggak jawab ‘*syahid*’ langsung bunuh, siapapun dia berarti musuh. Ia dan kawan-kawan anggota Kelompok Warsidi telah mengangkat sumpah di markas.

Menurut Danrem Hendro Priyono waktu itu sepulangnya dari Palembang dari rapat AMD (ABRI Masuk Desa), ia mendapatkan kabar telephone dari Mayor Abdul Aziz malam sebelumnya bahwa Sutiman disandera. Hendro segera mengadakan pengecekan. Ditanyakan kepada Mayor Abdul Aziz tentang rombongan siapa saja sampai Sutiman ditangkap. ⁶² Hendro menyampaikan demikian:

“Saya pulang dari rapat AMD di Palembang, saya tiba di Bandar Lampung, saya dapat laporan dari staf saya, Mayor Abdul Aziz. Bahwa salah seorang anak buah saya, Komandan Koramil, Kapten Inf. Sutiman itu disandera, menurut laporan itu disandera oleh satu kelompok misterius yang kita tidak tahu kelompok apa. Tetapi, ketika bertemu masyarakat, kelompok itu pemimpinnya Anwar alias Warsidi. Saya bilang Anwar Warsidi siapa? Tak seorang pun bisa menjelaskan. Lalu saya bilang, di mana persisnya lokasi itu, katanya di Way Jepara berjarak 1,5 km ke lokasi itu. Karena saya sudah lama sekali meninggalkan Bandarlampung, selama 6 bulan di Seskoad. Selama saya bertugas sebagai Danrem di Lampung, saya belum sempat pergi mengunjungi ke daerah-daerah. Kabarnya 3 jam pergi ke Way Jepara. Lalu saya melaporkan kepada Panglima Kodam Sriwijaya, yaitu Mayor Jenderal TNI Sunardi, yaitu tentang apa yang saya dengar dari staf saya tersebut.”

Hendro mendapat laporan dari pejabat Muspida/Muspika, kepala desa dan kepala dusun bahwa tanggal 6 Februari 1989. Menurut Sukidi, sebagaimana yang dilaporkan juga kepada Camat dan pejabat Muspida, pukul 11.00 WIB rombongan aparat lokal datang ke kediaman Warsidi. Rombongan terdiri dari:

1. Olan Sinaga (Kasdim).⁶³
2. Kapten Sutiman (Danramil Way Jepara)
3. Dulbakar (Kapolsek Way Jepara)
4. Amir Puspamega (Kepala Desa Rajabasa Lama)
5. Sarnubi (Kepala Desa Pakuan Haji)
6. Sukidi (Kepala Dusun Talangsari III)
7. Dahlan (Kepala Tata Usaha Koramil), satu-satunya tentara.
8. Drs Zulkifli (Camat Way Jepara)
9. Polisi Pamong Praja

Berjumlah sembilan orang dengan menggunakan kendaraan 2 (dua) mobil Jeep Jimny dan satu sepeda motor yang dinaiki oleh Sutiman. Rupa-nya, begitu datang langsung disambut oleh serangan, dan Kapt Inf. Suti-man langsung meninggal. Tidak disandera sebetulnya. Kehadiran mereka ini untuk berdialog dengan Warsidi, bukan untuk menyerang sebagai-mana yang dituduhkan oleh beberapa pihak yang tidak mengetahui duduk perkara sebenarnya..

Setelah mendapat laporan lanjut, Hendro lalu mengadakan *briefing* untuk mendapatkan suatu masukan baru dari seluruh staf. Di tengah-tengah *briefing* menjelang usai, mendapatkan suatu masukan baru, laporan dari aparat keamanan Sidorejo bahwa Pratu Budi Waluyo dibunuh, dan seorang rakyat bernama Agus Santoso. Terjadi perampasan mobil Kop Angkutan umum. Pada hari itu juga, ada pelemparan bom molotov ke kantor harian *Lampung Post*. ⁶⁴ Ini jelas bukan gerakan main-main. Sasaran aksi jamaah Warsidi tidak terbatas. Menurut teori politik, sasaran yang tidak terbatas dilakukan oleh suatu kelompok bisa dinamakan teror. Terorisme. Maka itu,

Hendro sendiri diminta jajaran dan kepala desa untuk datang. Dan ia tidak memerintahkan bawahan lagi. Kedatangan ini, disertai 3 peleton tentara dan Brimob ke desa Talangsari III.⁶⁵

Di lokasi, ternyata sudah disiapkan parit-parit setinggi dada. Dipersiapkan sistem tentara oleh jemaah Warsidi. Sehingga ada kesan bahwa berarti ini bukan tempat pengajian, tetapi basis untuk perjuangan. Oleh karena itu, tidak terlalu mudah, dan mau tidak mau membuka peluang untuk bentrok. Ada sejumlah anggota aparat keamanan kena panah. Hendro Priyono menggunakan megaphone untuk meminta kaum jemaah GPK Warsidi agar menyerahkan diri dan menyelesaikan masalah tanpa kekerasan. Para aparat Muspika dan desa juga berbuat hal yang sama, memina mereka menyerahkan diri dan jangan melawan petugas.⁶⁶

Sebetulnya, sehari sebelum 7 Februari 1989 rombongan Muspida mendatangi dan mengikuti apa yang disampaikan oleh Sukidi (Kepala Dusun Talangsari III), "*Sejelek-jeleknya Ulama, sebaik-baiknya Umara mesti menghadap Ulama*". Melihat komposisi ini, rombongan tersebut sudah mengalah dengan mendatangi kelompok Warsidi. Semua ini Muspika kecamatan yang datang. Komposisi tersebut jelas terlihat para pejabat itu beragama Islam, kecuali satu Olan Sinaga yang mengganti Nusbasyah yang tidak ada (Dandim yang orang Aceh, Islam juga). Jadi tidak ada cerita bahwa mereka rombongan yang membenci Islam seperti yang dilansir beberapa media massa. Mungkin kenyataannya akan bercerita lain, jika Warsidi dahulu memenuhi panggilan kecamatan, karena rapat yang diadakan oleh kelompok Warsidi yang melakukan *voting* memutuskan untuk tidak menghadap.

Mereka berkendara dua kendaraan Jeep Jimny dan sebuah sepeda motor yang dipakai oleh Kapten Sutiman. Olan Sinaga menembakan tembakan secara spontan yang membuat seseorang anggota jamaah Warsidi terkena peluru nyrasar di bagian kakinya. Peristiwa penembakan itu yang menyebabkan jamaah menyerbu. Rombongan pejabat itu melarikan diri, tetapi Kapten Sutiman tertinggal di belakang dengan motornya yang dibacok oleh Marsudi abang kandung Warsidi dan sebuah senjatanya dirampas.

Sementara itu di tempat lain di Siderejo tanggal 6 Februari 1989, pukul 23.00 wib, dari penuturan yang disampaikan oleh Riyanto⁶⁷, misi ini dipimpin oleh Riyanto sendiri yang mendapat perintah dari Umar, mantunya pak Warsidi beberapa hari sebelumnya. Misi ini untuk mencari senjata dan membuat kekacauan di Tanjung Karang. Terjadi perampasan secara diam-diam kendaraan Angkutan Umum di Sidorejo. Dua orang terbunuh dua orang penumpang kendaraan tersebut, yaitu: (1) Pratu Budi Waluyo yang tidak menyangka masuk ke dalam kendaraan yang dikira mobil angkutan, tadinya Pratu Budi Waluyo diminta untuk turun, tetapi Budi tidak mau. Di tengah perjalanan ia disikat habis, (2) seorang kenek angkutan umum Wasis L-300 bernama Agus Santoso.

Kemudian Riyanto cs menyerbu kantor *Lampung Post* di kota Bandar Lampung, karena telah memuat berita yang menyudutkan jamaah Warsidi. Jendela kaca Kantor *Lampung Post* itu pecah dilempari sebuah bom Molotov, tetapi bom itu tidak sempat meledak. Sewaktu dikejar-kejar oleh polisi lalu lintas, mobil itu menabrak polisi lalu lintas yang terpental, mobil kemudian dibawa ke dalam hutan, tetapi sebelum masuk hutan mobil itu rusak masuk parit, lalu meninggalkan mobil rusak itu, Riyanto cs lari masuk ke dalam hutan dan bersembunyi selama beberapa hari dalam hutan.

Tanggal 7 Februari 1989, Hendro Prijono dan timnya berjumlah 3 peleton masuk ke Cihideung pukul 05.30 wib untuk mengejar Riyanto Cs. Pada tanggal yang sama, (1) Serma Polisi Sudargo yang telah tewas sewaktu mengejar Riyanto Cs. dan senjatanya diambil oleh jamaah Warsidi, (2) Sersan Sembiring juga dibacok, senjatanya diambil, (3) Santoso Arifin (Luruh Sidoredjo tewas dibacok). Kejadian ini mereka berhasil merampas dua pucuk senjata api. Dua senjata tersebut yang dirampas kemudian direbut kembali oleh Hendro Prijono setelah terjadi baku tembak di Gunung Balak, juga senjata lainnya.⁶⁸ Dengan beberapa senjata yang telah terampas, artinya ini sudah terdesak, sebagai penanggung jawab keamanan, itu pun Amir Puspamega dan Sukidi mengatakan kepada Hendro Prijono dengan menilainya terlalu hati-hati dan penuh perhitungan sehingga terkesan lamban, padahal kehati-hatian pihak aparat sangat diperlukan untuk tidak menambah jumlah korban.⁶⁹

Hendro tidak dikasih tahu oleh para intelijen tentang latar belakang kejadian itu yang dikatakan bahwa kelompok Warsidi akan melawan pemerintah, yang ia tahu hanya dikabarkan bahwa Kapten Sutiman ditawan.⁷⁰

Setelah itu, ia juga mendapat berita bahwa kantor Kodim diserbu oleh kelompoknya Benny. Berawal dari Lima orang pemuda jamaah ditangkap oleh para penduduk dusun ketika mereka sedang ronda, lalu dibawa ke Kodim. Esoknya datang lima orang yang menyerbu Kantor Kodim yang berhasil menikam seorang penjaga pos Kodim dan merampas sebuah senjata M16 yang tidak bisa mereka gunakan karena tidak tahu, tak lama kemudian lima orang pemuda jemaah yang menyerbu itu tewas semua tertembak di bagian kepalanya, menurut keterangan orang-orang Kodim mereka berlima tidak mempan peluru di tubuhnya, tetapi mempan di bagian kepalanya.

Bab 10-04 Membentuk "Basis Perjuangan"

Pembentukan "basis perjuangan"⁷¹ Islam di Cihideung, Talangsari, Lampung terkait erat dengan persepsi mengenai bahwa kedudukan Islam dalam sejarah dunia adalah idealisasi dan romantisasi Nabi Muham-mad s.a.w. serta kaum muslimin yang awal. Nabi Muhammad SAW dengan risalah Islamnya dipandang telah berhasil secara sempurna dalam segala hal, termasuk di

dalamnya membentuk komunitas muslim di Madinah. Sebuah komunitas yang tidak pernah lagi menyembah berhala (*paganisme*), akan tetapi hidup di bawah naungan Al Quran (*waf of life*).⁷²

Perjalanan risalah suci ini tidak selesai pada diri Nabi Muhammad s.a.w. dan para sahabatnya saja, bahkan diperluas sampai seluruh periode empat khalifah (*khulafa al-rasyidin*),⁷³ dan generasi berikutnya. Sampai pada akhirnya wilayah-wilayah di luar Madinah menjadi pendukung setia dalam menciptakan perdamaian. Mereka yang hadir pada masa-masa awal itu telah terdorong terutama sekali oleh spirit pengabdian totalitas kepada ajaran Islam serta semangat untuk menyebarkannya. Semangat itu didukung pula oleh suatu pemahaman bahwa dalam ajaran Islam terkandung rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil 'alamin*). Idealisasi tentang kehidupan orang-orang tertentu dari generasi Muslim yang awal secara khusus terdapat sekelompok orang yang dikenal sebagai *ahl al-Shuffah*,⁷⁴ yang merupakan panutan dalam kefakiran dan kesalehan serta tidak memiliki tempat bernaung selain di *shuffah* atau di bagian serambi masjid Madinah yang tertutup.

Berangkat dari pemahaman sejarah menurut analisa Nur Hidayat⁷⁵—dihubungkan dengan kondisi sosial umat Islam sekarang yang terpecah belah dan tertindas, maka adanya keinginan untuk membentuk Basis Perjuangan yang pada tahap awal berbentuk "*Islamic Village*". Menurut kacamata Fauzi Isman,⁷⁶ kondisi sekarang ini sedang tidak berpihak kepada Islam. Artinya, Islam sudah dipisahkan dari kehidupan bernegara. Kebebasan umat untuk menjalani Islam dibatasi. Sementara umat Islam sendiri terpecah belah karena kejumudan dan kesempitan pemahaman mereka terhadap Islam. Kekuatan Islam yang terpecah menjadi dua, yang satu sama lain tidak saling mendukung. Dari dua kekuatan tersebut masing-masing terpecah-pecah kembali menjadi beberapa golongan yang kecil dan begitu seterusnya. Hingga gambaran umat Islam sekarang ini ibarat anak ayam yang kehilangan induknya, saling cakar-cakaran. Kondisi umat Islam yang seperti ini yang melatarbelakangi terbentuknya *Jama'ah Komando Mujahidin fie Sabilillah*.⁷⁷

Bila diurut ke belakang lagi, sebenarnya pandangan tentang dunia yang bermusuhan dengan Islam berasal dari periode sebelum *Hijrah*. Kebanyakan bagian Al Quran yang diwahyukan dalam periode paling awal sangat kritis terhadap sikap dan praktek kaum pedagang Makkah, serta para pedagang ini secara wajar mengambil sikap bermusuhan terhadap Muhammad dan para pengikutnya. Setelah hijrah dan setelah serangan kaum muslimin terhadap kafilah-kafilah Makkah, permusuhan mulai diungkapkan secara militer. Jadi, selama sepuluh tahun terakhir kehidupan Muhammad dapat digolongkan sebagai suatu perjuangan militer melawan musuh-musuh, bukan untuk menyebarkan agama Islam tetapi untuk menjamin kelangsungan hidup kaum Muslimin.

Pandangan bermusuhan ini memperoleh dimensi baru sebagai akibat kajian yang dilakukan kaum Muslimin atas sejarah barat. Kebanyakan kaum muslimin kini memandang kolonialisme sebagai suatu kelanjutan serangan Kristen terhadap dunia Islam yang diawali dengan Perang Salib. Hal ini sama sekali bukan kenangan rakyat (*folk memory*) tetapi suatu persepsi baru yang didasarkan pada apa-apa yang telah dipelajari kaum Muslimin di barat, barangkali dimulai oleh Muhammad Abduh. Tidak diragukan bahwa terdapat pembenaran tertentu untuk pandangan mereka terhadap Perang Salib sebagai tahap awal perjuangan antara dunia Islam dan Kristen Eropa untuk merebut daerah pesisir selatan dan barat laut tengah.

Sikap untuk memanfaatkan kekuatan bersenjata dalam agama merupakan butiran penting yang membedakan antara kaum Muslimin dan umat Kristen. Kaum tradisional Muslim, demikian pula kebanyakan kaum muslimin lainnya, memandang bahwa hak seorang Muslim untuk menjalankan praktek agamanya mesti dipertahankan dengan angkatan perang jika perlu. Dalam suatu buku terbaru ditemukan ungkapan: "Ketika hak seorang muslim untuk mempraktekkan kepercayaannya tidak diakui oleh suatu kekuasaan, maka ia harus memberikan perlawanan untuk mempertahankan diri, dan menjadi seorang *mujahid*, atau jika ia tidak dapat menentang atau gagal dalam perlawanannya, maka ia mesti berhijrah dan menjadi seorang *muhajir*".⁷⁸ Hal ini tentunya merupakan upaya yang agak sederhana untuk menerapkan gagasan-gagasan di masa nabi kepada kondisi-kondisi modern. Kebanyak kaum Kristen dengan cara semacam itu, dan akibat sikap inilah setidaknya sebagian besar mereka secara diam-diam menyetujui langkah-langkah yang mengarah kepada pembentukan negara Israel. Namun terdapat juga kelompok penting pandangan Kristen yang menolak penyerahan tempat-tempat suci Kristen kepada Yahudi. Titik pusat dalam masalah ini barangkali adalah: sementara agama pada dasarnya merupakan sesuatu yang bersifat spiritual, namun pengejawantahan lahiriyahnya juga penting dan bahkan merupakan bagian darinya; serta kaum Kristen mungkin sudah semestinya mencurahkan pemikiran yang lebih dalam terhadap masalah ini.

Kedudukan jihad atau "perang suci" dalam pemikiran Islam juga mesti disimak. Kata ini biasanya bermakna "berjuang" atau "berupaya", tetapi terdapat beberapa contoh di dalam Al Quran tentang ungkapan-ungkapan "mereka yang telah berjuang di jalan Tuhan dengan harta dan nyawa," dan hal ini dipandang bermakna turut serta dalam ekspedisi-ekspedisi di mana terdapat kemungkinan berperang. Juga terdapat ayat-ayat lainnya yang mengizinkan atau memerintahkan perang. Ayat paling awal barangkali adalah: "Diizinkan kepada mereka yang didzalimi untuk berperang (QS, 22: 39). Ayat lainnya dari masa awal: *Perangilah mereka (orang-orang kafir Makkah) hingga tidak ada fitnah dan agama semata-mata milik Tuhan* (QS. 8: 39). Ayat yang barangkali merumuskan kebijakan yang membimbing penaklukan-penaklukan belakangan adalah:

Hai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir di sekitarmu, dan biarkanlah mereka rasakan kekerasan darimu (QS. 9:123).

Jihad adalah bagian dari pertahanan menyeluruh Islam. Jihad berarti berjuang dengan seluruh kemampuan yang ada. Menurut Abul A'la Al-Maududi, seseorang yang berupaya sekuat tenaga baik secara fisik maupun mental atau mengeluarkan hartanya di jalan Allah sebenarnya tengah berjihad.⁷⁹ Namun, apa yang direncanakan oleh Nur Hidayat di Lampung adalah membangun basis perjuangan untuk perang. Rencana tersebut dijabarkan oleh Anwar Warsidi dengan menyelenggarakan latihan memanah dan bela diri silat yang dilatih oleh Dullah untuk memerangi kaum kafir. Celakanya kaum kafir yang dimaksud mereka adalah semua orang yang bukan jama'ah Warsidi sendiri. Di dalam Qur'an sendiri dikisahkan tentang orang-orang struktur elite Fir'aun yang menyembunyikan keimanannya sehingga eksklusifisme dengan memandang orang lain di luar kelompoknya sebagai kafir adalah tindakan yang tidak perlu.

Bab 10-05 Respon Masyarakat Sekitarnya

Setelah seminggu lebih Peristiwa Lampung berlalu, penduduk di daerah peristiwa itu masih gelisah. Cerita tentang gerakan *Mujahidin fi sabilillah* yang dipimpin Anwar Warsidi itu masih beredar. Memang peristiwa berdarah tersebut membuat sebagian penduduk trauma. Desa yang dulunya ramai, dengan sekitar 100 KK, kini dalam keadaan tertutup dan dijaga oleh para aparat keamanan. Orang yang tidak berkepentingan dilarang keras memasuki wilayah tersebut, tanpa terkecualian. Dusun yang kini kosong dalam keadaan porak poranda serta rumah-rumah yang rubuh dan terbakar itu ditinggalkan para penghuninya.⁸⁰ Kecurigaan selalu timbul bila melihat orang yang mereka baru kenal. "Awas ada mujahidin," begitulah celetuk penduduk Kota Bandar Lampung.⁸¹ Yang mencolok adalah di pusat Desa Rajabasa Lama itu sendiri, sekitar 8 km dari lokasi kejadian. Setiap tamu yang baru datang ke sini langsung diminta oleh masyarakat setempat untuk berhubungan dengan petugas ataupun kepala desa.⁸² Sebagian besar penduduk desa Rajabasa Lama yang seluruhnya berjumlah 6.575 jiwa itu masih dicekam rasa takut, sehingga masih ada yang mengungsi ke luar dari perkampungan.⁸³ Suasana yang masih agak tegang terlihat di desa Sidorejo. Penjagaan tidak saja dilakukan oleh anggota ABRI, tetapi juga para pemuda setempat. Di desa itu masih banyak penduduk yang tidak memasang lampu penerangan. Mereka juga banyak yang tidak berani tidur dalam rumah. Ketakutan mereka tidak hanya terhadap kemungkinan serangan gerakan *Mujahidin fi Sabilillah*, tetapi juga dari kemungkinan pihak ketiga, yaitu para pencuri dan garong yang akan memanfaatkan situasi.⁸⁴

Peristiwa yang dikenal dengan "*Komando Mujahidin fi sabilillah*" masih menjadi pembicaraan ramai orang di Bandar Lampung. Mereka merasa heran dengan peristiwa itu, karena sebelumnya mereka tidak pernah mendengar adanya keluhan ataupun usaha untuk melawan petugas keamanan.⁸⁵ Ada suasana terganggu secara psikologis bagi masyarakat dengan adanya kelompok-kelompok eksklusif agama yang membuat suatu "*such a nuisance*" yang mengganggu ketentraman mereka. Namun, konflik—sebagaimana disebut Thamrin Amal Tomagola⁸⁶—adalah hal yang inheren dalam masyarakat, sebagai suatu *sunnatullah*. Realitas haruslah diambil banyak pelajaran sehingga agama tidak menjadi sesuatu yang inferior.

Mengomentari tentang peristiwa yang terjadi di wilayahnya, Guber-nur Lampung, Poedjono Pranyoto mengatakan, para perusuh yang menamakan dirinya *Mujahidin fi sabilillah* tersebut terdiri dari para pendatang yang kemudian menghasut sebagian kecil penduduk setempat. "Mereka itu termasuk oknum-oknum yang berkedok agama tapi tindakannya menyalahi hukum agama dan berlaku sadis".⁸⁷

Bab 10-05 Kronologi Terjadinya Peristiwa Talangsari, Lampung, 1989

Seminggu sebelum kejadian merupakan puncak dari ketegangan yang ada. Zulkifli (camat Way Jepara) berdasarkan informasi yang diterimanya mengirimkan surat pada hari Jum'at, 20 Januari 1989 kepada Kapten Soetiman (Danramil Way Jepara) yang isinya memberitahukan bahwa di dukuh Cihideung ada yang melakukan kegiatan yang mencurigakan dengan berkedok pengajian. Tetapi, untuk bisa diterima undangan tersebut oleh Warsidi, camat Zulkifli memberi alasan dalam suratnya bahwa Warsidi diundang ke kantor kecamatan untuk melaporkan data pendatang baru di lokasi tempat kediamannya. Pada hari yang sama Warsidi mengirim sepucuk surat balasan kepada Camat Way Jepara. Isi dari surat itu mengatakan keberatan untuk memenuhi undangan Camat. Bahkan mengundang Camat untuk mengecek langsung ke Cihideung agar lebih jelas.⁸⁸

Atas dasar informasi tersebut, keesokan harinya Sabtu, 21 Januari 1989, Camat Zulkifli dan stafnya, Muspika dan aparat desa yang berjumlah 8 orang datang ke Cihideung, untuk memenuhi undangan Warsidi.

Hari Minggu, 22 Januari 1989 pukul 23.00, beberapa orang petugas bersenjata api menteror perkampungan jama'ah dan mengepungnya. Dua orang dari mereka masuk ke Mushala Al Mujahidin dan mencoba memancing kemarahan jama'ah yang sedang berdiskusi. Keduanya mengumpat dan mencaci maki jama'ah, bahkan mengancam dengan mengacungkan senjata api. Para jama'ah berusaha menahan diri untuk tidak terpancing. Merasa tidak dilayani, keduanya meninggalkan Mushala tanpa insiden.

Hari Minggu, 29 Januari 1989, salah seorang jama'ah memperoleh informasi mengenai Keputusan Muspika untuk menyerbu perkampungan jama'ah Cihideung. Tak lama kemudian, jama'ah menyaksikan Kepala Desa Cihideung dan masyarakatnya yang berada di sekitar perkampungan mengungsi. Karena tidak merasa melanggar peraturan, jama'ah tetap tinggal di Cihideung. Untuk menjaga kemungkinan yang tidak diinginkan jama'ah meningkatkan ronda malam.

Hari Kamis, 2 Februari 1989 sekitar pukul 20.00 WIB, dua orang tak dikenal yang diduga petugas memata-matai perkampungan jama'ah. Mereka disambut baik oleh jama'ah tanpa rasa curiga.

Hari Minggu, 5 Februari 1989 sekitar tengah malam, beberapa orang petugas bersenjata api di antaranya M-16 dibantu oleh beberapa aparat desa, menyergap salah satu pos ronda jama'ah Warsidi. Enam orang jama'ah yang berusia di bawah 16 tahun ditangkap. Mereka ditangkap kemudian dibawa ke Makodim Lampung Tengah. Pada saat penyerangan disita 61 pucuk anak panah dan ketapel kayu, parang dan golok.

Hari Senin, 6 Februari 1989 sekitar pukul 11.00 WIB, beberapa birokrasi sipil dan militer, di antaranya, Mayor E.O. Sinaga, (Kasdim 0411 Lampung Tengah) bersama-sama dengan Kapten Soetiman (Danramil Way Jepara), Zulkifli (Camat Way Jepara), Letkol Hariman S (Kakansospol Lampung Tengah)⁸⁹ beserta dua regu pasukannya menggunakan 2 buah jeep dan ± 8 buah sepeda motor pergi ke Cihideung untuk memenuhi undangan Warsidi. Namun tiba-tiba rombongan para pejabat itu diserang sebelum sampai di tempat tujuan dan akhirnya terjadilah bentrok fisik antara kedua pihak. Tanpa dikomando, jama'ah bangkit serentak mengadakan perlawanan mengepung para penyerang. Dengan teriakan "Allahu Akbar" dan bersenjatakan panah, golok, clurit dan senjata tajam lainnya. Pertempuran berlangsung $\pm \frac{1}{2}$ jam. Danramil Soetiman disan-dera dan 5 orang pasukannya tewas terkena panah beracun dan tubuhnya hancur karena bacokan-bacokan parang dan golok. Sedang yang lainnya melarikan diri. Jama'ah berhasil menyita sebuah jeep, dua buah sepeda motor, sepucuk pistol dan uang tunai \pm Rp1.000.000,- Sementara itu pada hari yang sama, sekitar pukul 20.000 WIB, Riyanto dan kawan-kawan jama'ah Warsidi menyergap sebuah mobil colt di Sidorejo. Pembajakan mobil ini mengakibatkan tewasnya seorang bernama Pratu Budi Waluyo, melukai sopir dan kenek bernama Agus Santoso hingga luka parah.⁹⁰ Disusul sekelompok jama'ah menyerang Kepala Pos Polisi Serma Sudargo hingga tewas dan dalam perkelahian ini dua polisi terluka. Kepala Desa Sidorejo, Santoso Arifin, masih dibunuh pula. Peristiwa tersebut membuat pihak aparat bereaksi keesokan harinya, Selasa, 7 Februari 1989 sekitar pukul 05.00 WIB, di bawah pimpinan Kolonel Hendro Priyono, (saat itu Danrem 043/Garuda Hitam) dengan kekuatan 3 (tiga) peleton tentara, 50 orang anggota satuan Brimob, aparat melakukan pengepungan ke lokasi Cihideung. Pasukan ABRI membentengi arah Barat. Praktis tidak ada jalan keluar bagi jama'ah. Sedang jama'ah bersenjatakan panah beracun, golok dan parang dengan mata yang cukup tajam dan pistol rampasan dari alm. Soetiman. Sementara di Sidorejo pasukan jama'ah Warsidi dipimpin Fadillah bersenjata 2 pucuk pistol rampasan dari para polisi selain panah beracun dan senjata-senjata tajam. Pertempuran berlangsung seru dalam jarak 5-10 meter, hanya dibatasi jalan desa.

Penyerbuan diperkirakan berlangsung hingga pukul 15.00 WIB, dan selanjutnya diikuti dengan penangkapan terhadap orang-orang yang diperkirakan terlibat. Cukup banyak yang asal tangkap terhadap orang-orang tersebut. Seorang anak yang usianya kurang lebih 7 tahun dibawa oleh anggota aparat ke pelabuhan Bakauheni, di sana ia dipaksa untuk mengenali dan menunjukkan orang-orang yang akan naik atau baru turun dari kapal yang menurutnya pernah bergaul atau masuk dalam kelompok pengajian tersebut. Siapa pun orang yang ditunjuknya langsung ditangkap oleh aparat.⁹¹

Yang menarik dari peristiwa ini, sesungguhnya bukan lagi dilihat pada pihak kelompok Warsidi atau pihak tentara. Rakyat dusun Talang-sari II, desa Pakuan Aji dan desa Rajabasa Lama yang suasana hubungannya bersitegang dengan "jama'ah" Warsidi dan berakhir dengan serangkaian pembunuhan terhadap 2 orang aparat keamanan dan se-orang kenek angkutan umum, secara massal menyerbu lokasi barak-barak perkampungan kelompok Warsidi di Cihideung dari berbagai jurusan. Perkelahian massal menyertai pengepungan terhadap pemukim eksklusif itu.⁹²

Bunyi tembakan aparat keamanan bergema merobohkan Warsidi dan beberapa orang pengawalinya setelah seorang prajurit yang bernama Kopda Yatin tersungkur dengan punggung tertancap panah beracun. Kejadian itu sungguh tak sedap dipandang, terlebih lagi ketika sekonyong-konyong dari arah Barat penampungan terlihat api berkobar. Gubuk-gubuk telah terbakar. Warga Talangsari yang menyaksikan serbuan warga wilayah lain itu bahkan ada yang melarikan diri tergepoh-gepoh.⁹³ Namun, bagi mereka yang sedang emosional malah mendekati gubuk-gubuk jama'ah yang tersebar. Dan dalam waktu yang sekejap saja gubuk-gubuk itu dibakar massa dari dusun-dusun dan desa lainnya. Pastilah banyak jatuh korban di sana apalagi barak-barak itu adalah tempat bermukimnya anggota keluarga para jama'ah. Siapa yang membakar ke-empat gubuk itu dalam suasana hiruk pikuk bak perang suku itu sukar sekali diketahui pada saat itu.⁹⁴

Menurut penuturan ceritera-ceritera dari rakyat mengatakan bahwa gubuk-gubuk itu dibakar oleh "jama'ah" Warsidi sendiri yang bertugas menjaganya. Dalam hingar-bingarnya pertempuran massal terdengar pekik jama'ah agar tak seorang pun boleh menyerah dan teriakan-teriakan

membakar semangat untuk “mati syahid” pun terus-menerus diserukan. Beberapa orang dari masyarakat Cihideung mengatakan mereka melihat seseorang perempuan remaja melompat keluar lewat jendela gubuk yang terbakar. Ia berusaha melompat keluar tetapi diikuti dengan ayunan parang terhadapnya oleh seseorang laki-laki dari dalam gubuk. Teriakan yang terdengar dari sang jagal adalah “Jangan keluar, mati kowe!”⁹⁵

Diketahui kemudian perempuan remaja itu bernama Thoyibah, anak Warsidi, yang dengan cepat ditolong para prajurit dan dilarikan ke Rumah Sakit Umum Dokter Abdul Muluk untuk menjalani perawatan intensif karena telinganya yang luka parah dan sisi kepala sebelah kanannya yang terluka akibat kena babat senjata tajam. Dari cerita orang pasca kejadian yang didengar oleh Suryadi—seorang mantan Warsidi yang kemudian bertolak belakang dengannya—gubuk-gubuk penampungan itu dibakar oleh Abbas dan salah seorang yang lainnya yang merupakan jama'ah Warsidi sendiri. Semua manusia di Cihideung yang sedang bertempur itu bagai kerasukan yang lepas kendali diri. Mereka saling berusaha membunuh lawannya dan sama-sama berteriak “Allahu Akbar”. Seolah-olah Allah SWT berada di pihak mereka yang berteriak itu. Dan dalam bentrokan yang mirip perang tawuran (jarak dekat) itu, menurut Sukidi, tewaslah 27 orang. Kesaksian yang sama pada peristiwa 7 Februari 1989 itu disampaikan oleh para warga setempat yang tak mau disebut namanya dengan alasan takut.⁹⁶

Sukidi mengatakan bahwa api menjalar dari dalam gubuk Warsidi, dilakukan oleh anak buah Warsidi, bukan dari massa, aparat desa atau aparat keamanan.” Sebab tahu-tahu kami melihat api membara dari dalam gubuk Warsidi, dan ternyata dilakukan pembakaran oleh anak buah Warsidi. Penyerangan dilakukan oleh aparat desa, warga (massa dusun) dan aparat keamanan bersama-sama karena kegiatan anak buah Warsidi sudah dinilai membahayakan keselamatan warga masyarakat.”

ABRI dan rakyat berada di satu pihak yang mendatangi tempat itu yang rupanya memang telah dipersiapkan untuk pertahanan. Warsidi dan pengikutnya berada di pihak lain yang bertahan di “Basis Perjuangannya” dengan berlindung di parit-parit perhanan yang diran-cang secara baik untuk kebutuhan taktik perang. Begitu ngerinya pertempuran itu dan betapa besarnya pengorbanan mereka yang terjerembab oleh ambisi dan kecongkakan sang “Imam”. Anwar Warsidi sebagai Imam bagi jama'ahnya memang sangat menyedihkan. Peralatan modern dihadapi hanya dengan pertahanan sekedarnya. Namun yang lebih menyedihkan adalah para aktor intelektualnya yang berada di Jakarta yaitu tiga pemuda tanggung avonturir—Nurhidayat, Fauzi Isman dan Sudarsono—yang mungkin tidak menyadari betapa besar akibat dari perencanaannya yang begitu ceroboh. Perencanaan yang dibuat tanpa koordinasi, tanpa legalisasi, tanpa komunikasi dan tanpa sosialisasi sebelumnya dengan masyarakat Way Jepara yang akan didatangi. Nafsu besar Amir Musyafir Nur Hidayat Assegaf tidak sesuai dengan kemampuannya dalam menyusun suatu rencana besar untuk menghijrahkan begitu banyak nyawa orang dari pulau Jawa ke Sumatra. Bahkan Rani,⁹⁷ istri Nur Hidayat yang kini telah diceraikannya, dulu ditipunya dengan “angin surga” yaitu hidup sejahtera di Medan. Untunglah hati kecil Rani membatalkan niatnya mengikuti ajakan sang penipu sehingga ia terhindar dari malapetaka di Cihideung. Rani kini tinggal menjanda dengan 2 orang anak yang dibesarkannya sendiri tanpa ayahnya. Kekerasan yang menghasilkan sebuah episode kesedihan di hati rakyat Indonesia memang bukan produk dari pemilik kuasa (negara), tapi dari masyarakat sipil pun bisa menciptakan drama kemanusiaan yang menyedihkan.

Yang kita sayangkan dari efek kekerasan yang sulit kita cari pelakunya ini adalah “penularan” kekerasan ke berbagai daerah lain selain di Lampung sendiri. Penularan kekerasan itu terjadi dalam bentuk penang-kapan-penangkapan tokoh-tokoh yang dicurigai di Lampung, pada orang-orang yang tidak bersalah. Juga di Bima dan Padang. Bahkan penangkapan tidak dilakukan pada orang-orang yang diindikasikan sebagai anggota kelompok pengajian. Terhadap keluarganya pun dilakukan penangkapan, penyiksaan. Azwar, salah seorang saksi korban menuturkan kejadian yang menimpanya, “Saya waktu itu sedang berada di pasar dan anak saya yang masih berumur 11 tahun mengikuti pengajian akbar ke Talangsari. Tapi kemudian hari itu anak saya tidak pulang ke rumah. Dan belum lagi terjawab kegelisahan saya, esok harinya saya ditangkap dan ditahan di Polsek dan kemudian dibawa ke Makodim Lampung Tengah, selanjutnya ke Makorem 043/Gatam,” kata Bapak Azwar.⁹⁸ Bahkan Istrinya, Ismini, yang pada waktu kejadian tersebut sedang pulang ke Padang, ditangkap di Painan dan mengalami siksaan yang sangat berat selama 6 hari. Di Padang ia juga disiksa selama 2 bulan 1 hari dengan perlakuan-perlakuan yang di luar kemanusiaan. Untung sajalah ibu mujahidah ini berani melawan perintah-perintah sang Koramil, Zulqarnain. Ia dipisahkan dengan tiga anaknya yang ikut bersamanya pulang ke Padang. Ia dituduh sebagai dokter mujahidin Lampung karena pekerjaannya sehari-hari adalah sebagai bidan.⁹⁹ Hidup memang perlu keberanian untuk melawan. Tanpa ada keberanian untuk melawan, maka hidup tidak ada artinya sama sekali.

Pada hari yang sama, di desa Sidorejo, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Tengah yang berjarak ± 30 Km. dari lokasi peristiwa di Talangsari, telah terjadi peristiwa berdarah. Kejadian itu merupakan rembesan dari peristiwa sebelumnya di Talangsari. Penularan kekerasan memang biasa terjadi di kalangan aparat sipil yang suka membesar-besarkan persoalan.

Saat itu, sekitar pukul. 08.00 WIB. Atim (nama panggilan) seorang anggota Bantuan Polisi (Banpol) sektor Gunung Balak mencurigai sebuah rumah milik Zamsuri bin Muhammad Raji sebagai tempat persembunyian anggota pengajian Anwar Warsidi. Ketika itu, Atim menghampiri

rumah tersebut dan bertemu dengan istri Zamsuri dan dipersilahkan masuk. Atim masuk ke dalam rumah dan tidak beberapa lama ia ke luar dikejar oleh seseorang yang ada di rumah dan tiba-tiba ia disangka maling. Maka ia lari sebisa mungkin, sebatas energi keperempuanannya yang masih dimiliki.

Proses kejar-kejaran sampai berjarak 200 m, dan Atim pun masuk ke dalam rumah Mukaji, penduduk setempat, untuk bersembunyi. Pengejar tidak masuk ke dalam rumah tersebut dan berbalik arah kembali, tetapi ternyata di depan kantor Polisi Sektor Gunung Balak, ia dijegat oleh Dargo dan disuruh berhenti sambil ditembak di arah kakinya. Tetapi permintaan tersebut ditolak, selanjutnya terjadi bentrok antar mereka berdua yang diakhiri dengan meninggalnya anggota pengajian tersebut karena ditembak oleh Dargo sebanyak empat kali di arah bagian dada.

Mendengar salah seorang kawannya meninggal akibat ditembak, beberapa anggota kelompok pengajian tersebut ke luar dengan membawa persenjataan. Penduduk yang sebelumnya ada dilokasi kejadian berlarian bersembunyi di rumah-rumah penduduk sekitar lokasi. Bentrokan pun berlanjut di dua lokasi yang tidak berjauhan dan berakhir dengan jatuhnya tiga orang meninggal, yaitu: Dargo (Dansek Gunung Balak) dengan luka kena bacok, Santoso penduduk setempat dengan luka kena bacok dan Giono (nama panggilan-bekas Guru SMP Muhammadiyah) anggota pengajian dengan luka tembak serta beberapa orang luka-luka. Selebihnya dari anggota pengajian ada yang kembali masuk ke rumah sebelumnya dan ada yang tertangkap.

Setelah terjadi bentrokan tersebut suasana di Desa Sidorejo tegang, pasukan Brimob yang dipimpin oleh Fauzi Azri (Danres Lampung Tengah) datang dari Lampung Tengah. Sore harinya sekitar pukul.15.00 WIB pengepungan terhadap rumah Zamsuri bin Muhammad Raji dilakukan dikarenakan di dalam rumah tersebut masih ada anggota pengajian Anwar Warsidi termasuk Zamsuri sendiri. Banyak penduduk yang menyaksikan proses pengepungan tersebut, bahkan sebelumnya mereka sempat mengintip keadaan di dalam rumah, dan dari dalam sempat terdengar pernyataan “Tolong jangan ganggu kami, kasihanilah kami.” Ratapan seperti ini mengisyaratkan suatu permohonan dari orang-orang papa dan lemah yang menghadapi gangguan, ancaman dan tekanan, sebuah fakta yang barangkali luput dari perhatian aparat yang bertindak pada saat itu. Pertikaian dan bentrokan fisik tak bisa dielakkan sang waktu, awal sebuah tragedi kelabu.

Penularan kasus Lampung juga sampai ke Bima, Mataram, Nusa Tenggara Barat. Hal ini dialami oleh Bapak Baharuddin¹⁰⁰ dan Abdul Ghani Masykur. Lihatlah pengakuan Baharuddin berikut ini: “Peristiwa penangkapanku terjadi tatkala kami yang menerima tamu musafir dari Bima (katanya asal dari Jawa) bahkan di antaranya terajak untuk istirahat dan tidur di rumahku, tergolong ulama, pemuda-pemuda dan pemudi, wanita muslimah yang sedang hamil yang memerlukan bantuanku untuk memperoleh keterangan di mana tinggalnya seorang ulama besar di Mataram, Tuang Guru Haji Zainuddin MA lulusan Universitas Al-Azhar, Cairo, Mesir.

Semua tamu dimuliakan dengan sekedar suguhan yang sederhana, makan malam bersama keluarga, bercakap-cakap tentang perjalanan yang melelahkan. Sebahagian berangkat mencari alamat itu yang dipandu oleh Ir Sauqi H Abdul Ghani Masykur dan sebahagian lagi tidur di rumah. Sebelum tidur akulah yang meminta mereka memberikan sedikit nasihat-nasihat agama mengingat mereka dipahami olehku tatkala mereka berbicara dan bersantai ternyata dalam diriku memastikan mereka adalah ulama-ulama yang benar dan orang suci dan yang pantas untuk dikorek ilmu pengetahuannya. Tak ada yang lebih istimewa yang disampaikanku kecuali agar kita-kita ini hendaknya benar-benar paham ke-Esaan-NYA dan pemilikan akan kekuasaan-NYA baik dilangit dan di bumi sekali-pun. Semua makhluk wajib tunduk dan pasrah kepada kekuasaan-NYA.

Ayat-ayat yang berkenaan dengan itu dijelaskan untuk menopang penyampaian itu. Tidak ada pembicaraan tentang da'wah mereka di Bima ataupun dimana saja bahkan tentang kata Lampung sama sekali tidak terdengar dari mulut mereka. Esok harinya mereka kembali ke Hotel yang mereka telah sewakan di bilangan Kota Cakranegara dan diantar olehku dengan mobil butut merk Datsun tahun 70-an. Itulah saja yang ku tahu sejak tamu-tamuku datang dan terperanjat aku ketika di bulan Ramadhan 89 diundang untuk hadir di CPM (Corps Polisi Militer) Mataram. Ditanya macam-macam sehubungan dengan kedatangan tamu itu, dan berawal dengan tidur di salah satu ruang kantor, berlanjut dengan dimasukkan di sel ukuran 1 meter x 2 meter di belakang kantor CPM itu. Sebelum dimasukkan di sel diadakan dulu interogasi dengan intensif dengan gaya mereka. Awalnya oleh CPM dan Polisi, dan akhirnya oleh Korem (saat itu mereka menyebutnya Organisasi Anti Pengacau). Prosesnya, dan intinya ingin mereka tahu apakah aku ini pernah dibai'at atau tidak? Mereka sangat bersikeras agar aku mengaku telah dibai'at karena menurut Kasi Intel Korem¹⁰¹ biasanya apabila mereka itu telah memberikan ceramah Agama di mana-mana haruslah semua yang mendengar ceramah mereka itu di *bai'at*. (Saat itu, aku kurang paham arti bai'at karena memang tidak pernah dibai'at oleh seseorang atau grup mana saja). Pemeriksaan dan interogasi sangat bervariasi, ada di waktu siang, dijemur di panas, di malam hari rata-rata pukul 02.00-03.00 dini hari. Aku dengan teman-teman sungguh memiliki perbendaharaan yang banyak dan cukuplah pengetahuan untuk dimaklumi cara dan tingkah masing-masing pemeriksa.

Antara lain di malam hari pukul seperti itu, dicemplung di bak air di belakang Kantor Korem, dan menurut teman-teman air itu penuh dengan balok es ataupun cukup dingin. Rasanya ketika dibangunkan, aku sedang sholat. Tidak puas dengan panorama seperti itu aku diperintah dengan gaya mereka dengan melepas bajuku melakukan push up entah berapa ratus kali. Dan ketika

mereka belum juga memperoleh keterangan, bukti dariku tentang *bai'at* itu, lalu mereka merakit taktik lain, yaitu menyuruh seseorang (Ir. Sauqi) untuk menyatakan bahwa memang benar Pak Bahar di-*bai'at* dan Pak Bahar itu orang jahat dst. Dipertemukan denganku, lalu kutanyakan apa isi Bai'at itu? Ir Syaqui yang kekar sebelumnya, membuatku terperanjat tatkala kutapak wajahnya yang sangat pilu dan merah dan serta berkerut karena kesakitan yang sangat. Terpatah-patah dikatakannya bahwa isi Bai'at Pak Bahar waktu itu adalah seperti: "Wallahi Watollahi, bahwa aku ini orang Muslimin'. Mendengar *bai'at* seperti itu, aku kumandangkan bahwa semua orang Islam lafaz harian-nya seperti itu, dizikirkan dan didiskusikan. Dan kunyatakan kepada yang memeriksa waktu itu, sekitar 5 atau 6 orang bahwa siapa- siapa di antara mereka saat itu mengaku beragama Islam ,maka tentunya mereka akan menyebut itu dalam waktu 5 kali sehari. Dan akupun katakan bahwa itu adalah wirid harianku, dan mengapa tidak aku tanda tangani apabila Bai'at itu hanya seperti itu. Sebelumnya dijanjikan akan disuruh pulang apabila aku sudah menandatangani, dan ternyata setelah aku tanda tangani, justeru aku disel seperti dikatakan di atas. Aku ber-puasa saja di dalam sel karena dahulu orang tuaku tatkala dituduh juga DII-TII Kahar Muzakkar di sel juga dengan ukuran yang sama. Dan makanan nya pun di periksa dan diteliti. Trauma itulah yang sehingga aku lebih baik puasa dari pada aku makan pemberian mereka.

Dua bulan di sel itu dengan penuh teror dan ancaman pembunuhan dan ternyata Allah punya skenario, disakitkan aku lalu dibawa ke rumah sakit mereka (RSAD) dan di sana sebulan dengan pengobatan yang ketat dan seperti pula sel dengan gaya Rumah Sakit. Penjenguk dibatasi katanya, sehingga keluarga dekat saja yang dapat lolos. Pemeriksaan akhir, bukan bertanya tentang apa-apa, kecuali stressing dari Patikai tadi agar aku tidak perlu jadi Bupati. Soalnya dan pasalnya ketika itu sedang masanya usul calon Bupati Bima. Nasihat Pak Patikai, "Tidak usah da'wah lah tapi kalau da'wah cukup tentang shalat-shalat saja." Disuruh pulang, dan kemudian diwajibkan laporan sekitar 4 bulan? yaah cukup lama dan harus hadir per minggu di Korem. Sementara itu saja dulu yang kuingat sampai saat sekarang, sahabatku, semoga sehari dua lagi mungkin bisa kutambahkan. Seperti penderitaan orang-orang tidak beriman tatkala kami semua berada di sel. Insya Allah di sel itulah justeru kami berbahagia yang sukar dibeli."

Pengakuan korban di atas menunjukkan betapa kejinya para intelejen Orde Baru yang telah mengorbankan banyak pihak baik dari sipil maupun militer sendiri. Negara Orde Reformasi di bawah Gus Dur dan yang akan datang tidak boleh mengulangi lagi kekejian seperti ini, yang jelas bertentangan dengan implementasi HAM dan demokrasi q

Bab 11 TOKOH PERISTIWA DAN PARA KORBAN MUSIBAH POLITIK LAMPUNG BERDARAH, 1989

EBERAPA tokoh yang terekam dalam lem-bar-lembar catatan sejarah berikut ini adalah profil yang berkarakter sangat beraneka ragam. Satu dan lainnya agak bersebarangan dan sementara itu banyak juga terjalin kerja-sama yang ganjil. Namun, apapun yang mereka telah lakukan, belumlah bisa menjelaskan siapa sebenarnya mereka. Beberapa tokoh berikut ini masih diselimuti oleh misteri dan kabut-kabut penjelasan yang terkadang samar-samar kita dengar. Namun, bagi penulis, siapa-pun mereka dan sesalah apapun media massa meng-hujat mereka, setidak-tidaknya mereka sudah berbuat untuk sebuah perubahan. Dan sebagian gambaran citra tentang mereka, dalam penelitian buku ini, dipengaruhi oleh sumber-sumber sekunder yang dihimpun oleh tim peneliti.

Bab 11-01 Tokoh-Tokoh Utama Peristiwa Talangsari

1. Anwar Warsidi sebagai Imam.

Yang paling tahu dengan peristiwa Talangsari, 1989, adalah Warsidi. Dialah tokoh utama dalam drama kehidupan para jama'ah yang berani menhadang kekuatan negara. Anak bungsu dari empat orang bersaudara, ini, lahir di desa Seberang Rawa, Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Warsidi adalah tokoh pembe-rontak yang konsisten dengan ajaran poligamis Islam. Ia mempunyai dua istri, Mariam dan Juairiyah. Dari hasil perkawinannya dengan Mariam, ia memperoleh satu orang putra yang tidak berumur panjang, beberapa tahun kemudian Mariam menyusul. Dan dari Juairiyah, ia memperoleh empat anak.

Warsidi menetap di Lampung pada tahun 1937, ia diajak oleh ayahnya seorang petani bernama Martoprawiro masuk ke kecamatan Batanghari, kemudian menetap di pedukuhan Talangsari III₂ pada bulan Juni 1988 bersama istrinya, Juairiyah, dan anaknya. Di pedukuhan inilah Warsidi mengamalkan ilmu spiritual dari aliran *Lelampah*₃ yang diperolehnya dari gurunya yang bernama Anwaruddin dari Banyumas, Jawa Tengah, kepada masyarakat. Ia mulai mengajarkan ajaran *Lelampah* ini pada tahun 1966. Karena pengajaran ini maka kemudian masyarakat Lampung mengenalinya sebagai tokoh spiritual. Bersamaan dengan itu pulalah, bakat kepemimpinannya terlihat dengan berkembang. Paralel dengan bakat kharismatik yang berkembang itulah, dalam waktu singkat ia memperoleh jamaah pengikut yang banyak. Beberapa kalangan menyebutkan bahwa jumlah jamaahnya hingga tiga ratusan orang itu sering berkumpul,

makan dan tidur bersama. Dalam mengembangkan jama'ah Islam, Warsidi dibantu oleh Ir. Usman.⁴ Konon, Ir. Usman ini pernah bermukim di Pesantren Al Islam milik Kyai Djunaidi di Desa Labuhan Ratu. Pembangunan jama'ah dan pengajian-pengajian di tengah-tengah zaman Soeharto yang anti Islam adalah sebuah pembanguan yang dianggap *counter-productive* oleh berbagai kalangan yang tengah terkesima dengan modernisasi dan modernisme gaya hidup yang gegap gempita.

Maka, secara psiko-sosial, masyarakat kurang menerima perkembangan ini sehingga, walaupun pengajian atau kelompok spiritual ini berkembang, maka ia tetap diterima secara *reluctant* oleh publik sekitar. Antara publik sekitar, yang cenderung lebih mentoleransi sekulerisme ketimbang Islam, dengan jama'ah terjadi perbedaan-perbedaan. Pada awalnya Warsidi adalah orang yang lemah-lembut, santun dan sangat mengerti terhadap orang lain.⁵ Sikapnya mulai radikal setelah kedatangan beberapa tokoh pemuda aktivis Islam yang memiliki semangat jihad yang menggebu di dadanya. Radikalisasi Warsidi mulai terjadi pada saat ia mendapat pengaruh fundamentalistik dari jama'ah pemuda yang datang ke Jakarta. Sikap *furqaan* (menarik garis pembeda) dari jamaah pun muncul. Ketika garis demarkasi perbedaan ditarik, maka yang kafir dan yang beriman pun segera kelihatan. Namun perbedaan pandangan dengan Lurah setempatlah yang kemudian menyulut peristiwa ini terjadi. Diawali dengan dipanggilnya Warsidi oleh aparat keamanan, maka hubungan kontradiktif antara jamaah Warsidi dan masyarakat serta aparat militer pun terjadi. Dari pihak Warsidi mensikapi undangan tersebut dengan caranya sendiri. Ia tidak mau datang memenuhi undangan tersebut. Menurut Sukidi, jika tokoh ini datang, tak seorang pun di luar jamaah '*Mujahiddin*' diperkenankan masuk ke lokasi kegiatan.⁶ Bahkan, terakhir sebelum meledaknya huru-hara tersebut, penjagaan dari pihak jama'ah '*Mujahiddin*' semakin diperketat. Dan betul *geger* '*Komando Mujahiddin Fi Sabilillah*' pun terjadi. Dalam kejadian tersebut Warsidi alias Anwar meninggal dunia. Dengan meninggalnya Warsidi, maka misteri yang melingkupinya pun seakan-akan ikut terkubur. Namun, beberapa keping informasi tentang dirinya, lebih jauh sebagai-mana dituturkan Soerjadi mungkin sedikit bisa menguak tirai misteri tersebut:

Soerjadi⁷ mengenal Anwar Warsidi pada tahun 1986-1987 di Cihideung. Anwar Warsidi nama aslinya adalah Warsidi. Karena ia mampu-nyai guru bernama Anwar, maka bergabunglah nama itu menjadi Anwar Warsidi. Anwar, gurunya Warsidi itu, adalah tokoh yang disebut-sebut punya hubungan dengan gerakan Negara Islam Indonesia (NII). Secara struktural, ia tidak terkait dengan NII secara langsung karena ia memiliki langkah inisiatif sendiri. Ia melangkahakan kakinya dalam suatu misi perjuangan yang tidak memakai ketentuan-ketentuan perintah dari NII struktural. Dari keterangan ini, agak sulit ditarik korelasi antara NII dan jamaah Warsidi. Mungkin secara ide, mereka memiliki sikap dan orientasi yang sama. Namun, setelah dalam perkembangan tahun pada tahun 1960-an, riwayat Anwar berubah setelah ia bertemu dengan Yusuf Roni, seorang Katolik yang masuk Islam. Pengaruh dari Yusuf Roni, seorang Katolik yang masuk Islam karena ketertarikan pada aspek *liberating forces* Islam yang luar biasa, telah memanas-manasi Anwar untuk terpengaruh, sehingga Anwar terbakar untuk membunuh seorang pastur di Jakarta sehingga ia divonis 20 tahun penjara. Penjara pertama di Cipinang Jakarta, lalu kemudian dipindahkan ke Tanjung Karang Lampung.

Sebuah ide memang memiliki kaki, maka radikalisme dan pencerahan tentang kekuasaan dalam Islam pun berjalan menemui determinisme kehidupan Warsidi di Lampung. Warsidi bertemu dengan gurunya, Anwar, setelah Anwar bebas dari hukuman. Anwar membina Warsidi untuk melanjutkan perjuangannya. Warsidi yang hanya menempuh SD hingga kelas 5 (tidak tamat) pun terpengaruh. Pengaruh ideologis memang terkadang tidak mengenal seseorang berpendidikan atau tidak. Pengaruh ajaran-ajaran agama dan ideologi Islam yang dialami Warsidi ternyata tidak tunggal. Warsidi juga mendapat pengaruh dari Imam Bakri dari tahun 1960-an sampai 1968-an.

Sebuah pengaruh biasanya tidak berhenti ketika sang guru masih ada. Setelah gurunya yang kedua itu wafat, ia meneruskan posisi gurunya. Maka, jadilah Warsidi sebagai guru bagi pendidikan informal agama bagi publik yang juga informal. Warsidi mempunyai 6 orang jamaah: Soerjadi, keluarganya sendiri, anaknya Bejo, keluarga Jayus, dan adiknya, Marsudi. Setelah itu, jamaah yang diasuhnya pun semakin berkembang. Satu per satu mulai masuk ke jamaah Warsidi untuk belajar Islam dan mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Arifin, misalnya, adalah jamaah Warsidi dari Brebes yang paling setia. Ia adalah saksi hidup ketika ada pembakaran di daerah jamaah Warsidi di Talangsari. Ketika jumlah jamaah ini membesar, maka ia mengidap paham tentang kekuatan yang dimiliki oleh komunitasnya yang sesungguhnya belum seberapa jika dibanding dengan kelompok jamaah lainnya. Apa lagi setelah didatangi oleh Nur Hidayat, Fauzi Isman dan Sudarsono, tiba-tiba kelompok jamaah Warsidi menjadi kelompok yang militan. Tidak ada kata mundur dalam gerakannya. Barangsiapa yang mundur, maka sank-sinya mati karena dianggap *murtad*.⁸ Banyak anggota jama'ahnya yang kemudian merasa sangat takut terhadap ancaman ini.

2. Sudarsono

Sudarsono divonis hukuman selama 17 tahun penjara oleh pengadil-an atas kasus GPK Lampung.⁹ Ia adalah Pujakesuma, putra Jawa kelahiran Sumatra. Sudarsono atau lebih akrab dipanggil "Mas Dar" ini lahir di Deli Serdang tanggal 21 April 1963. Dia adalah seorang pejuang

Islam sejati. Ia memiliki seorang ayah yang menjabat sebagai Anggota Korps Marinir. Karena tugas orang tuanya yang sering berpindah-pindah, ia telah banyak membawa pengalaman tersendiri bagi dirinya, di antara-nya mampu membawa diri dan mudah diterima oleh berbagai kalangan dari berbagai latar-belakang. Ia adalah tokoh Peristiwa Lampung yang sangat shabar dalam wawasan pergerakan.

Awal aktivitas keislamannya dimulai dari remaja masjid Al Falah di Surabaya. Bersamaan dengan kepindahan dinas orang tuanya ke Jakarta, Sudarsono muda aktif di BKPRMI (Badan Kontak Pemuda Remaja Masjid Indonesia) di Jakarta, di sana ia dekat dengan Jurdil Heri dan Arifin Agule. Karena semangat revolusionernya yang menggebu-gebu, tidak cukup di organisasi BKPRMI ini saja ia menyalurkan aktivitas, maka ketika duduk di perguruan tinggi dia masuk organisasi FORMAHI (Forum Mahasiswa Islam), hal itu dilakukannya pada tahun 1985. Ketika di FORMAHI inilah dia mengadakan gerakan pengkaderan Usroh. Tidak cukup sampai di situ, setelah menyelesaikan perguruan tinggi ia terlibat dalam kegiatan LSP (Lembaga Studi Pembangunan) di mana sering mengadakan berbagai training. Berbagai pengalaman hidup yang banyak dilaluinya lewat aktivitas gerakan, pada saatnya nanti ternyata telah menghantarkan dirinya sebagai salah seorang tokoh yang terlibat dalam kasus Talangsari.

Keterlibatan Sudarsono dalam kasus Talangsari ini bermula dari aktivitasnya dalam gerakan *usroh* yang dibina oleh Abdullah Sungkar di Jakarta tahun 1984-1985. Di tahun itu dia bersama rekan yang lainnya selalu mengadakan kegiatan rutin di rumah kontrakannya di Gang Remaja, Prumpung, Jakarta. Dalam gerakan *usroh* itu disusun beberapa shaf, di antaranya *shaf Ali*, *shaf Umar*, *shaf Abu Bakar* dan *shaf Usman*.¹⁰ Dia sendiri memegang tanggungjawab sebagai bagian pendanaan di shaf Usman. Dibentuknya shaf ini karena mereka terobsesi oleh pemikiran fundamentalisme Islam untuk persiapan basis tegaknya syariat Islam. Oleh karena itu perkampungan Islam merupakan langkah awal perjuangan dengan pola *Darul Arqam*. Selanjutnya, ditunjuklah daerah Cihideung Talangsari sebagai pengkonkritan programnya itu.

Berkaitan dengan kasus Cihideung Talangsari ini, menurut panda-ngannya bahwa daerah Cihideung dipilih sebagai tempat untuk mem-bentuk *Islamic Village*. padahal tujuan *Islamic village* ini adalah sebagai tempat awal bagi tegaknya Negara Islam.¹¹ Jika rencana membentuk Negara Islam diketahui, maka tentu akan dihantam habis-habisan oleh pemerintah yang sangat anti dengan segala hal yang berbau Islam. Menurut pemahaman Darsono ciri dan syarat Negara Islam adalah: (1) sahabat, (2) sistem, (3) informasi,¹² (4) pemimpin,¹³ dan (5) wilayah.¹⁴ Kalau kelima itu sudah kita penuhi, maka kita sudah memenuhi semua prinsip *de jure*, tinggal kita usahakan wilayah *de facto*-nya saja. Maka, untuk itu ia dan teman-teman memilih Lampung sebagai tempat *hijrah*. Dipilihnya Lampung sebagai tempat *hijrah* adalah karena kalau harus *hijrah* ke luar negeri visanya dan biaya perjalannya sangat mahal. Kelanjutan dari program aksi *hijrah* ini adalah menciptakan *amir-amir daulah* di suatu daerah yang tidak begitu jauh dari Makkah Jakarta, yaitu di Lampung. Pernah juga terpikir oleh Darsono kalau harus *hijrah* ke Patani (Thailand Selatan) sebagai tempat untuk membuat sebuah titik bagi basis perjuangan. Pikirannya ketika itu adalah mencari mati *syahid*, yakni, suatu mati yang diperoleh dalam keadaan seseorang sudah ber-*hijrah*. Sehingga kalau terjadi perang (misalnya AS membom para pejuang tersebut, maka matinya adalah *mati hijrah*.

Prinsip Darsono tentang *hijrah* pada saat itu adalah sebuah prinsip konsekuensi dari ajaran historik Rasulullah. “Kalau kita tidak *hijrah* —seperti NU dan Muhammadiyah yang pimpinan RI Pancasila— semua akan amburadul dan akan mati kafir semua,” yakinnya waktu itu. Namun, apapun pengetahuannya tentang prinsip-prinsip politik Islam, menunjukkan bahwa ide-ide tentang kekuasaan Islam telah begitu mempengaruhi banyak kaum muda. Tidak sedikit di antara mereka kemudian yang membentuk sebuah keyakinan *committed with Islamic state ideals*.¹⁵

Sudarsono adalah tokoh Peristiwa Lampung yang pada saat terjadinya peristiwa tersebut ia tidak sedang berada di Cihideung. Namun, ia memahami peristiwa tersebut dari teman-temannya. Kendatipun demikian, Darsono adalah tokoh yang sudah terlebih dahulu datang ke Warsidi setelah Warsidi mendapat panggilan dari Camat. Warsidi menolak “undangan” dari “umara” tersebut karena ia sangat teguh memegang prinsip bahwa: *umaro*¹⁶ yang harus datang ke Ulama, bukan ulama yang mendatangi umaro. Sebaik-baiknya umaro adalah yang mendatangi ulama dan sejelek-jelek ulama adalah yang mendatangi umaro. Karena keteguhannya memegang prinsip inilah, akhirnya sampai ada sebuah laporan di sana genting. Setelah mendengar adanya suasana yang semakin genting tersebut, utusan datang ke Jakarta yang meminta agar Darsono dan Nur Hidayat datang menemui Warsidi dan mengajak-nya untuk bersikap sedikit lunak dan strategis.

”Pak Warsidi datangi saja, kalau dibubarkan bubarkan saja,” saran Darsono ketika sudah tiba di Cihideung. Kemudian Warsidi bertanya, ”Boleh ya, mas Dar?” Ada semacam ketakutan yang tersimpan dalam benak Warsidi. Dari pertanyaannya ini, tersirat juga perasaan ragu. Dan, ketakutan atau keraguan ini adalah ketakutan umum dari masyarakat sipil yang awam. Ia memang menyadari dirinya sebagai transmigrasi gelap, sehingga ia berusaha tidak sampai kelihatan. Selain itu, ia juga ingin menyembunyikan kenyataan bahwa di daerahnya ia sudah mulai membina jamaah dan diam-diam jamaah menganggap bahwa “bumi ini milik Allah”. Namun, undangan pihak kecamatan ini sebenarnya menunjukkan sebuah kenyataan bahwa apa yang dilakukan oleh jamaah Warsidi sudah terdeteksi. Dari laporan-laporan masyarakat, mulai tersing-kap semua keresahan petani di daerah ini. Aksi dan tindakan arbitrer sering dipraktikkan oleh anggota jamaah yang sudah mendapatkan keyakinan tentang “semua yang di bumi adalah milik Allah dan

diwariskan kepada hambanya yang *shaleh*.” Karena menganggap dirinya sebagai “hamba yang shaleh” itulah, maka kelapa, pisang, singkong dan semua hasil pertanian lainnya main ambil saja. Lama-kelamaan, kondisi ini mengakibatkan munculnya akumulasi kekesalan dari masyarakat agraris sekitarnya.

Tindakan yang arbitrer ini dilakukan, mungkin, oleh orang-orang kota yang mendapatkan kesadaran agama secara destruktif dan memandangi diri dan kelompoknya sebagai “kaum *muhajirin*” yang mendapat segala macam kemudahan dari “kaum Anshar” yang menetap di sekitar wilayah tersebut. Bahkan, di antara para tokoh pelaku peristiwa Lampung ini, ada yang merasa dirinya sebagai “bayangan” Rasulullah. Nurhidayat —selaku pimpinan— akan datang *hijrah* ke Talangsari belakangan setelah semuanya selamat di-*hijrah*-kannya yang menurut *shirah*¹⁷ Rasul, Rasul dan beberapa sahabat memang datang belakangan.¹⁸

Menurut Darsono, ada lima anggota jama'ah Warsidi diculik oleh Koramil. Kelima orang ini berhasil dibebaskan kembali pada malam berikutnya setelah didatangi oleh dua puluh orang anggota jama'ahnya yang lain. Dan, setelah temannya dilepas, kantor Koramil dibakar. Maka akhirnya Warsidi pun dipanggil oleh Komandan Koramil Sutiman. Keadaan ini cepat diketahui oleh jamaah yang ada di Jakarta, sehingga ada kesepakatan Nur Hidayat dan Darsono berencana akan berangkat, tapi batal karena dilarang oleh Nur Hidayat. Di situlah kesatuan kedua tokoh ini terjadi dan mulai mengadakan koordinasi kembali karena di sana-sini mulai ada penggerebekan. Mulailah avonturisme aktivis ini terbentuk di masa-masa *formative age*-nya. Hidup mereka yang sudah berkeluarga ini berpindah-pindah mulai dari Gang Remaja I Prumpung sampai Kali Malang. Intelejen ada di mana-mana sehingga seakan-akan untuk keluar membeli permen pun sudah tidak bisa. Mata-mata dari sistem spionase negara bagaikan “mata Tuhan” yang mampu melihat apapun, siapapun, di manapun serta bagaimanapun tindakan seseorang itu.

Karena “mata” intelejen itu seakan-akan melingkupi setiap jengkal tanah yang diinjak, maka yang selama itu terjadi hanya kontak komunikasi telepon saja antara mereka. Pertemuan fisik dihindari untuk tidak menambah kecurigaan pihak intelejen. Namun, pancingan teman-teman dan sahabat-sahabat serta *ustadz* sangat sulit dihindari selama masa pelarian. Hingga akhirnya tertangkap, Darsono masih menyimpan rasa curiga yang besar terhadap Abdul Mafaid Faedah Harahap yang dianggapnya telah berkhianat dengan memberitahukan tempat persembunyiannya. Darsono ingat waktu tempat persembunyian di Kalimalang digerebek oleh aparat Intel Kodam Jaya. Yang ia ingat hanyalah sebuah episode tentang kunjungan Abdul Mafaid Faedah Harahap dengan istri-nya ke sana tempat ia bersembunyi. Hal ini tambah meyakinkan dirinya setelah ia teringat dengan kalimat emosional Nur Hidayat, “Mafaid Faedah Harahap penghianat”.

Darsono pernah bertemu dengan Abdul Mafaid Faedah Harahap di Depok. Dari pertemuannya inilah ia bisa mengambil kesimpulan bahwa *ustadz* ini adalah penghianat. Sebenarnya Darsono diperkenalkan dengan Abdul Mafaid Faedah oleh Nur Hidayat dan Maulana Latief. Setelah penggerebekan di Kalimalang Darsono sebagai *shaf Usman* (Darsono) terus mencari dana untuk konsolidasi dan dengan mengusahakan dana bersama tim *shaf Umar* (bagian PHB). Pada saat itulah terjadi penggerebekan. Sebelumnya, Darsono sudah meminta pendapat Pak Sulaiman Mahmud untuk *hijrah* ke Abdulah Sungkar dan Sulaiman Mahmud sebagai tokoh sepuh *Darul Islam Aceh* itu setuju dan sayangnya rencana *hijrah* ke negeri jiran ini tidak pernah terlaksana karena jaring-jaring intelejen ternyata lebih rapat ketimbang jaring ikan teri di laut.

Hijrah adalah sebuah perintah dalam agama Islam yang jika satu perintah saja kita laksanakan, maka kita akan selamat. Setelah ditemukan-nya Darsono, maka mulailah terlihat bagaimana sebenarnya jaring-jaring yang dipasang oleh negara intelejen Orde Baru tersebut. Namun, di tengah-tengah kuatnya kekuasaan represif Orde Baru, semua orang terkejut dengan resistensi orang-orang Islam di Lampung Tengah tersebut. Pihak ABRI sendiri juga kaget atas peristiwa yang tidak dinyana-nyana pada waktu itu. Di tengah-tengah suasana stabilitas politik dan keamanan yang ketat dan didukung dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi —serta semua komponen bangsa sipil tunduk kepada militer— *kok* bisa terjadi peristiwa musibah politik Talangsari tersebut. Bahkan tidak ada seorang pun dari anggota jama'ah Warsidi yang menduga akan terjadi hal yang demikian. Harapan mereka setelah dilatih dan dididik membuat panah dan anak panah beracun,¹⁹ mereka mengira akan dikembalikan ke pesantren karena panah-panah itu sudah disiapkan di pesantren-pesantren di Ujung Pandang, Kalimantan, dan di Pesantren Pak Kamil di Surabaya. Jadi setelah dilatih perang-perangan dengan senjata yang ala kadarnya itu, yang sangat mirip seperti latihan komando dengan jumlah tiga puluh orang sebagai pasukan komando, akan melanjutkan pendidikan agama di pesantren sebagai tempat mendapatkan bekal bagi kesabaran dalam berjuang. Namun, harapan ini jauh tertinggal, yang ada hanya rencana-rencana dan agenda-agenda jangka pendek untuk mempersiapkan perang yang bahkan lawannya pun belum sempat terumuskan secara jelas.

Setelah terjadinya peristiwa Talangsari itu, maka Darsono pun harus menyadari banyak kekeliruan yang telah dilakukan secara sadar atau tidak sadar. Yang paling terpenting adalah sikap terhadap orang-orang yang diduga bisa menjadi intelejen, walaupun ia seorang *ustadz* atau teman dekat, atau bahkan teman seperjuangan. Dari peristiwa yang telah menelan korban sipil yang banyak itu, ada banyak pelajaran dan hikmah yang harus dipetik. Darsono juga tidak dapat memastikan berapa korban dari ABRI, tapi yang jelas disiarkan 2 (dua) orang yaitu Kapt Inf.

Sutiman dan Kopral Satu Syahbudi yang disiarkan sedangkan yang lain tidak disiarkan, ini menciptakan Siaga I. Pembangkangan jamaah Warsidi memperoleh momentumnya karena secara kebetulan ketika itu masyarakat Gunung Balak—yang kasusnya kebun kopinya dibakari mau diganti oleh tanaman *sonokeling* untuk membuat gagang senjata—bersamaan merasa telah didzalimi oleh rezim Orde Baru sehingga masyarakat Gunung Balak melawan tentara juga.

3. Fadilah alias Sugito

Fadilah alias Sugito bin Wiryopoerwito lahir pada tanggal 13 Desember 1959 di Yogyakarta, Jawa Tengah. Ia didakwa oleh Jaksa Effendi Pane, SH telah memutarbalikkan, merongrong atau menyelewengkan ideologi negara Pancasila. Merongrong kewibawaan pemerintah atau aparatur negara serta telah menyebarkan rasa permusuhan, kegelisahan dalam masyarakat. Dengan sebab itu ia dituntut hukuman mati.

Dalam vonisnya setebal 64 halaman yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum secara gamblang, menguraikan bahwa tindakan yang pernah dilakukan oleh Fadilah—baik fakta yang diperoleh selama di persidangan dari 12 orang saksi maupun keterangan yang diberikan secara langsung sebelum resmi menjadi anggota kelompok Warsidi dengan terlebih dahulu di-*bai'at*²⁰ oleh Imam Warsidi—untuk memusuhi negara Republik Indonesia. Pem-*bai'at*-an ini sendiri amat penting, karena merupakan suatu ikatan janji setia para anggota kelompok tersebut untuk terus patuh dan menjalankan segala perintah sang Imam. Setelah menjadi anggota kelompok Warsidi, ia secara aktif mengikuti setiap pengajian yang dilangsungkan di Masjid Mujahidin di Cihideung. Serangkaian kegiatan itu merupakan manifestasi dan cita-cita anggota jama'ah untuk mendirikan Negara Islam yang berdasarkan Al Quran dan Hadist. Yang membe-ratkan hukuman Fadilah karena ia tidak menyesali perbuatannya, tidak mengakui Pancasila dan peraturan pemerintah. Selain itu, juga melaku-kan persiapan perang melawan pemerintah RI.

Mengenai keterlibatan Fadilah menurut Majelis Hakim, dialah yang memimpin “kelompok 12”²¹ yang menyerang kantor Koramil dan membakar pasar Way Jepara dalam rangka membebaskan lima peronda malam anggota jama'ah Cihideung yang ditangkap 5 Februari 1989 di markas Koramil Way Jepara. Akan tetapi tugas ini gagal dilakukan karena kesiangan, kemudian dia membawa kelompoknya ke desa Sidorejo. Melalui Benny, Fadilah mendapat perintah lagi dari Imam Warsidi untuk mengacau Sidorejo dan Bandar Lampung. Dalam rangka melakukan pengacauan ini, anggota jama'ah di Sidorejo melakukan musyawarah di Mushola Al-Barokah²² milik Zamzuri. Musyawarah ini disepakati pembentukan kelompok aksi yang kemudian dibagi dua: satu kelompok mengacau di Sidorejo sedangkan kelompok lainnya—yang di pimpin Riyanto—melakukan pengacauan di Bandar Lampung dengan melempar bom-bom molotov di markas Kodim 043 Garuda Hitam.

Terhadap putusan Majelis Hakim, Fadilah dengan tegas mengatakan “Saya hanya *ta'at* kepada hukum Allah. Soal hukuman yang dijatuhkan hakim, terserah”. Inilah sejatinya sikap seorang fundamentalis, begitu *legowo* menerima risiko apapun yang akan menimpa dirinya.

4. Marsudi

Marsudi alias Pak Su bin Martoperwiro mengakui kepada Majelis Hakim bahwa ia telah membacok Danramil Way Jepara, Mayor Inf Suti-man hingga tewas,²³ sewaktu rombongan Kasdim 0411 Lampung Tengah mengunjungi Desa Cihideung, Way Jepara, Lampung Tengah.²⁴ Marsudi diancam dengan hukuman oleh pasal 110 (1) jo 107 ayat 1 jo pasal 55 ayat 1 KUHP. Tentang Marsudi, Soerjadi memiliki memori sebagai berikut:²⁵

Marsudi adalah kakak kandung Warsidi yang berwatak sangat keras, pemberani dan nekat. Ia tidak peduli atau tidak ada rasa takut kepada siapapun. Siapapun *umaro* tidak ditakutinya, Ketua RT, Hansip dilawan. Tak ada seorangpun di Way Jepara yang berani berurusan dengannya. Yang ditakutinya hanya Allah SWT sahaja. Bahkan jago-jago manapun tidak ingin berharap berurusan dengannya. Sering pula terlihat Marsudi cekcok dan berkelahi dengan Warsidi, adiknya sendiri. Sebuah gambaran sosiologis keluarga kelas bawah Jawa di mana ketidakharmonisan memang sering terjadi antara adik dan kakak. Marsudi seringkali ditangkap oleh pihak polisi karena tindakan-tindakan tertentu yang merugikan banyak pihak dan ia dikenakan wajib lapor. Memang Marsudi mempunyai keunikan, hidup sendiri di tengah hutan tanpa tetangga. Kalau bicara dalam keadaan marah, selalu mengungkapkan kata “*tak pateni*”, jika ada golok ketika ia sedang marah, seseorang bisa ditebas oleh dia.²⁶

Mungkin masyarakat sekitar menaruh dendam terhadap Marsudi. Kepribadian unik dan ganjil Marsudi ini merupakan sikap eksklusif dan memiliki karakter tersendiri yang berbeda dengan karakter umum jamaah Warsidi lainnya. Shalat selalu disertai dengan menari-nari dan berlari-lari²⁷ (diduga ia mempunyai kepercayaan tersendiri, yaitu aliran *Lelampah*). Kepribadiannya yang nekat menjadikannya sebagai seorang yang tujuan hidupnya mencari mati. Tak ada seorangpun di Way Jepara yang berani berurusan dengannya. Ia tidak peduli atau tidak ada rasa takut kepada siapapun. Kapten Sutiman sendiri ditebas dengan memakai golok oleh Marsudi. Hubungan dengan warga di sekeliling desa Cihideung pun berjalan kurang harmonis karena beberapa sikap yang tidak berkenan dari Marsudi terhadap penduduk desa sekitarnya. Ada tiga desa yang mengelilingi lokasi jama'ah Warsidi. Konflik dengan penduduk desa pernah ada, yaitu dulu

pernah jama'ah Warsidi mendatangi penduduk di daerah Amir Puspamega. Peristiwa ini terjadi karena keinginan Marsudi mengambil bambu untuk membuat gubuk. Tapi dilarang oleh pihak warga desa tersebut.

Mengenai peristiwa pembacokan Kapten Inf. Sutiman, menurut Soerjadi, setelah mendengar penuturan yang disampaikan oleh Sugeng Yulianto, ia mendengar ada suara tembakan peringatan pada tanggal 6 Pebruari 1989. Tetapi santri Parjoko yang tertembak di tempat. Parjoko tertembak pahanya. Kapten Sutiman tidak menyangka ada seorang jama'ah yang kena tembak di pahanya. Kapten Sutiman yang sedang *bengong* dengan tembakan peringatan yang tak terduga itu, tiba-tiba terkena panah di kepala dan di dekat dadanya. Kapten Sutiman pun roboh seketika yang kemudian dikejar oleh Pak Marsudi dan membacoknya dengan *badik*.²⁸ Menurut Riyanto yang seruangan dengan Marsudi dalam tahanan, Marsudi trauma dengan Yulianto yang memfitnah Marsudi sebagai PKI. Tuduhan teman terkadang lebih menyakitkan ketimbang tuduhan resmi dari pemerintah. Fitnah —meskipun fitnah yang tidak menyangkut tentang pembunuhan— di mana-mana terasa lebih kejam dari pembunuhan itu sendiri. Ia tidak mau lagi mengungkapkan apa yang terjadi. Ia mengalami tekanan yang luar biasa selama berada di dalam penjara. “Stress terus di dalam sel, kalau sholat sambil lari-lari,” kata Soerjadi.

Dari penuturan Riyanto,²⁹ Marsudi mempunyai keanehan tersendiri. Hidup sendiri di tengah hutan tanpa tetangga. Banyak keanehan-keanehan pada diri Marsudi. Namun, oleh banyak orang, ia diyakini mampu mengobati orang gila. Pernah Marsudi berdiri di tengah-tengah tanah lapang, kemudian ia membuat gerakan tertentu yang membuat ia dihampiri dan dikelilingi beberapa ekor kerbau dan kemudian ia menggerakkan sesuatu dan kerbau itu kembali berpencar.³⁰ Tak ada orang yang ditakuti olehnya. Sehingga, semua orang tidak mau berurusan dengan dia. Jago-jago manapun tidak ada urusan dengan dia. Yang dia cari mati dulu, bukan hidup. Beberapa orang yang ingin mengesankan tentang dirinya, seperti Riyanto, hanya dengan sebuah adagium yang populer: “Biarlah yang tua dulu mati”. Di Nusakambangan pun tidak ada yang berani dengan Marsudi. Sewaktu dia hidup bertani, orang yang tinggi besar yang pernah nyepelekannya sebagai orang yang berbadan kecil. Tidak lama kemudian orang itu dibuat *nyungsep* KO tidak bangun-bangun sekali kena tempeleng oleh Marsudi di Nusakambangan. Semen-tara itu, suasana sedikit agak paradoks akan ditemukan jika sedang sadar, maka kita akan menemukan segala nasehatnya akan sangat bagus.

Marsudi ternyata, menurut Riyanto, sering berkelahi dengan saudara kandungnya, Warsidi. Ia, sebagaimana halnya dengan almarhum Warsidi, adalah juga pengikut Anwar, dan pernah ditangkap karena beberapa kasus-kasus politik sehingga ia dikenakan wajib lapor. Suryadi sendiri mengambil keputusan untuk pergi dari Cihideung gara-gara terlibat konflik dengan Marsudi. Pihak aparat sipil seperti RT, Hansip tidaklah segan-segan untuk dilawan olehnya.

5. Musdi.

Musdi yang pernah dihukum kurang lebih 7 tahun adalah anak asli daerah Sidorejo. Dia lahir pada tanggal 10 November 1980 yang ketika dilahirkan daerahnya masih hutan. Masa-masa pendidikannya dilalui di Cihideung, SD-nya di madrasah Muhammadiyah Al Barokah dan menamatkan SMP-nya di Tsanawiyah. Pada waktu kejadian dia baru berumur 15 tahun dan masih duduk di kelas tiga Tsanawiyah.³¹ Sebelum peristiwa berdarah, dia pernah ditempa aqidah dan pengetahuan agama lainnya dalam kelompok pengajian Warsidi selama dua bulan. Yang pertama membinanya adalah Kardi, kemudian Herdiawan, dr. Murdia-wan, Mursyid, Abdullah Abdurrahman, dan terakhir Ir. Usman.³² Karena rutinitasnya di pengajian itu pada akhirnya sekolah di Tsanawiyahnya jadi terbengkalai, selanjutnya dia dikeluarkan karena sering tidak masuk sekolah dan lebih sering mengikuti pengajian di Cihideung.

Sebelum tanggal 6 Februari 1989—ketika lima orang kelompok pengajian Anwar ditangkap Koramil—Musdi langsung dibawa ke Koramil. Tanpa proses apa-apa langsung saja dia digebuki oleh anggota Koramil, setelah itu dia dikirim ke Kodim Metro Bandar Lampung. Begitupun ketika berada di Kodim, dia mendapat perlakuan yang tidak wajar, yaitu disiksa tanpa diproses hukum terlebih dahulu. Mungkin, karena usianya yang masih sangat muda, maka akan sulit didelik dengan menggunakan KUHP, maka jalan satu-satunya disiksa tanpa proses hukum. Siksaan demi siksaan diterimanya, dari ujung kaki sampai ujung kepala dipukuli sampai babak belur tanpa rasa kemanusiaan sedikitpun, kemudian dimasukkan ke dalam sel yang luasnya hanya satu meter. Padahal, menurut pengakuannya sendiri, dirinya tidak tahu menahu terjadinya peristiwa Talangsari itu. Ia adalah korban tindakan oknum yang berusaha menunjukkan prestasi di hadapan pimpinan. Dan, setelah diketahui oleh Danrem 043 Gatam, ia dilepas.

Perlakuan serupa terus berlanjut ketika berada di ruang tahanan, sampai hendak *wudlu* pun dilarangnya. Tentu saja membuat dirinya tidak berdaya lagi menghadapi penyiksaan yang begitu kejam dan kejinya. Bahkan sudah berada di LP pun sama saja nasibnya, yaitu menerima hukuman-hukuman yang kelewat batas. Musdi dipaksa harus mengakui bahwa kelompok pengajian yang diikutinya itu sesat. Tuduhan aneh lainnya adalah tentang cara jamaah Warsidi melakukan shalat telanjang bulat. Pengakuan lainnya yang harus dilakukannya di bawah paksaan militer adalah: jika anggota jamaah punya istri bisa digilir sesama jama'ah lainnya. Sesuatu yang tidak pernah ada ini harus diakuinya, walaupun Musdi sendiri mengetahuinya bahwa perbuatan terlarang seperti itu tidak pernah dilakukan dalam kelompok pengajian Warsidi.

Sebagaimana yang dirasakan oleh orang-orang setelah keluar dari penjara, Musdi pun merasakannya. Ketika orangtuanya menyuruh untuk menamatkan sekolahnya, dia tidak bisa melanjutkan studinya. Cemoohan dan ejekan yang selalu dilontarkan masyarakat ketika bertemu membuat dirinya tidak tahan juga. Siksaan psiko-sosial dari peristiwa Talangsari ini begitu dahsyatnya. Hari-hari selanjutnya menjadi kelam entah apa yang harus diperbuatnya. Belum lagi tugas apel tiap minggu yang mesti dijalankannya di kantor Koramil dan Korem. Karena letak kedua instansi itu yang amat jauh membuat dirinya semakin menderita. Protes yang diajukan kepada aparat pada akhirnya meringankan tugas apalnya. “Sekarang tidak jauh lagi, mas.”³³

Dari cerita Musdi membuat diri kita mempunyai beberapa gambaran tentang kekejaman penguasa dan penderitaan rakyat yang tak berdosa. Fakta menunjukkan bahwa dalam operasi militer tersebut telah terjadi tindakan represif dan kekerasan militer yang tidak menghormati hak-hak rakyat di sekitar lokasi. Banyak rakyat yang menjadi korban tidak hanya rakyat yang ada dilokasi pengajian Warsidi tetapi juga rakyat yang ada di sekitar lokasi yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan kelompok pengajian Warsidi baik secara langsung ataupun tidak langsung.³⁴

Bentuk represi dan kekerasan militer yang dialami rakyat korban berupa penangkapan dan penahanan—seperti Musdi yang dicurigai sebagai anggota pengajian tanpa proses hukum—intimidasi paska pem-bantaian dan stigmatisasi melalui penyebutan GPK Warsidi yang seolah-olah menunjukkan bahwa mereka adalah kelompok pemberontak yang akan melakukan penggulingan terhadap pemerintahan dan akan membentuk negara sendiri.³⁵

6. Nur Hidayat

Nur Hidayat Assegaf lahir di Kuningan Cirebon Jawa Barat tanggal 26 Maret 1959. Nurhidayat yang dikenal sebagai pimpinan (*amir musyafir*) Front Komando Mujahidin (FKM) dalam peristiwa Talangsari ini. Dulu ia pernah bekerja pada kantor Bea dan Cukai di Riau. Ia berhenti kerja dan kembali ke Jakarta. Selama menganggur ia aktif dalam kegiatan di suatu LSM, dan sambil memperdalam pemahaman keislaman, ia kemudi-an mengikuti jamaah pengajian yang mengarah pada upaya *hijrah* ke Lampung. Pada tahun 1983 Nurhidayat diangkat sebagai Panglima Selatan.

Dalam sidang lanjutan perkara subversi yang dipimpin Majelis Hakim yang diketuai Yoesoef SH saksi Nurhidayat —yang juga terdakwa pada sidang lainnya ini— menegaskan “jangan orang lain keluarga sendiri sekalipun akan dibunuhnya jika menentang rencananya.”³⁶ Nurhidayat —yang juga dikenal sebagai karateka nasional ini— dalam keterangannya menguraikan penggunaan senjata panah yang dibuat sebagai persiapan mengadakan aksi keonaran dan pembakaran di pusat-pusat dan pompa bensin di Jakarta. Kebanyakan aktivis muslim pada masa itu, mereka selalu menerjemahkan makna *jihad* dengan tindakan-tindakan kekerasan yang seringkali berbentuk kriminal. Padahal tindakan kriminal bertentangan dengan semangat Piagam Madinah bagian 13 yang pernah diterap-kan Nabi Muhammad SAW.

Ia juga menguraikan sekitar rencananya membajak pesawat terbang, pembunuhan terhadap dua tokoh Islam yakni Kiyai Haji Hasan Basri (Ketua MUI) dan Haji Jeilani Naro (ketua umum PPP). Ia juga menjelaskan peranan “kelompok 4” yang terdiri dari Fauzi Isman, Sudarsono, Wahidin dan Nur Hidayat sendiri.

Khusus mengenai pembunuhan dua tokoh Islam tadi menurut Nur Hidayat baru sampai pada tahap kasak-kusuk sesama jema’ah pada setiap pertemuan yang diadakan di Jakarta—setelah peristiwa GPK Warsidi di Lampung meledak tanggal 6 Februari 1989. Menurut pendapat Nurhidayat, peraturan yang diberlakukan pemerintah Republik Indonesia seka-rang adalah pembuatan manusia yang bertentangan dengan perintah Allah dalam Al Quran. Dalam Al Quran, yang berhak mengatur bumi dan langit adalah Allah. Oleh sebab itu, “Saya tidak mentaati peraturan yang dibuat manusia yang penuh dengan kedzoliman.” Sebu-ah sikap konsisten yang sangat radikal. “Untuk itulah,” kata “Nurhidayat ia bermaksud mendirikan Negara Islam sekaligus berniat memisahkan diri dari Republik Indonesia tanpa merasa takut akan konsekwensinya.” Pergulatan Islam dan negara memang tidak pernah pupus di tangan-tangan para pejuang seperti ini. “Selama tidak dibenci dan tidak menen-tang Allah saya tidak takut kcpada siapapun,” demikian Media Indonesia mengutip keterangan Nur Hidayat ketika duduk di kursi terdakwa di pengadilan Jakarta.

Mengenai rencana yang akhirnya berbuah kegagalan untuk memba-jak pesawat terbang, Nurhidayat mengatakan ketika tantangan itu disampaikan kepada jama’ahnya ternyata ditolak dengan alasan tidak ada yang bisa berbahasa Inggris. Ternyata, menguasai “bahas kafir” ada-lah syarat yang juga penting untuk melaksanakan tugas-tugas seorang fundamentalis. “Meski bisa berbahasa Inggris belum tentu bisa dilakukan karena kami tidak mempunyai *duit* untuk biaya,” lanjut Nurhidayat lagi.³⁷ Persoalan finansial umat Islam dalam dunia pergerakan hampir sama tuanya dengan persoalan kemiskinan rakyat secara umum.

Ia juga pernah ke Lampung untuk mengecek keadaan perkampu-ngan Islam Warsidi itu, tetapi saat itu ia tidak bisa masuk karena diblokir pihak keamanan.³⁸ Dalam program jangka pendek kelompok Front Komando Mujahidin disebutkan bahwa mereka akan membentuk *Islamic village* atau *base camp*. Program tersebut berupa pendirian perkampu-ngan Islam dengan hukum di mana diberlakukannya hukum Islam secara *kaffah*. Terkadang, semangat melaksanakan hukum

Islam —yang oleh sebagian orang masih terkesan mengerikan dan menakutkan—adalah semangat yang luar-biasa. Bahkan sering tergambar tentang hukum potong-tangan sebagai satu-satunya hukum dasar dalam Islam. Padahal, meskipun hukum ini disyari’atkan dalam Al Qur’an, hukum potong tangan ini tidak pernah dilaksanakan oleh Rasulullah Muhammad SAW.³⁹

Menurut pendapat Nurhidayat, peraturan yang diberlakukan peme-rintah sekarang adalah pembuatan manusia yang bertentangan dengan perintah Allah dalam Quran. Dalam Al Quran kata saksi yang berhak mengatur bumi dan langit adalah Allah. Oleh sebab itu saya tidak mentaati peraturan yang dibuat manusia yang penuh dengan kedzoliman. Untuk itulah menurut keyakinannya bahwa dirinya bermaksud mendirikan Negara Islam Indonesia sekaligus berniat memisahkan diri dari Republik Indonesia tanpa merasa takut akan konsekwensinya. “Selama tidak dibenci dan tidak menentang Allah saya tidak takut kepada siapapun.”

7. Sugeng Yulianto.

Sugeng Yulianto alias Sugiman Yulianto bin Marto Djoyo lahir di Solo pada tahun 1959. Sugeng Yulianto —yang dalam sidang pernah meminta kepada majelis Hakim menghukum Jaksa Penuntut Umum karena telah memfitnah dirinya— adalah seorang patriot sejati. Menurut-nya, ia dituduh menjadi anggota jama’ah *Mujahidin Fi Sabilillah*, padahal dirinya datang ke Lampung karena dibujuk Soleh untuk tinggal di sana dengan alasan bahwa di Lampung gampang cari nafkah. Di samping itu, bisa menjalankan ajaran Islam dengan sebenarnya.⁴⁰

Dalam kertas tanggapannya yang ditulis sendiri, Sugeng Yulianto —yang didampingi Tim Penasehat Hukum yang hebat dari LBH Lam-pung— juga mengkritik pembelanya dan majelis yang mengadilinya. Ia menyebutkan, tim penasehat hukumnya telah bertindak terlalu jauh dengan menambah keterangan saksi-saksi yang tidak relevan dengan perbuatan yang dilakukan Sugeng Yulianto, pada pledoi Tim Penasehat hukumnya dalam sidang terdahulu. Sedangkan tentang Majelis, Sugeng menilai waktu yang dipergunakan majelis terlalu sedikit, sehingga fakta keterlibatan dalam anggota jama’ah belum jelas.

Sugeng Yulianto, warga asal Solo, Jawa Tengah di persidangan yang dipimpin Majelis Hakim diketuai M. Rifai, SH mengungkapkan bahwa dia datang ke Sidorejo karena bujukan temannya. Dan mengenai keterli-batannya dengan orang-orang yang melakukan huru-hara di Tanjung karang karena dipaksa oleh kelompok Warsidi itu, sebab bila tidak mau dirinya akan dibunuh. Di pihak lain Tim Penasehat Hukum Sugeng menilai, tuntutan Jaksa Penuntut Umum terlalu memaksakan diri agar Sugeng Yulianto dihukum berat. Padahal keterangan para saksi yang telah diajukan di persidangan, intinya ternyata mereka tidak ada yang mengenal Sugeng Yulianto secara pasti, dan tidak ada satupun yang mengetahui Sugeng Yulianto anggota jama’ah atau bukan. Oleh sebab itu, Tim Penasehat Hukum Sugeng Yulianto memohon kepada Majelis sebelum memutuskan perkara dapat mempertimbangkan dengan mata-ng dan seksama, sehingga hukuman buat Sugeng Yulianto benar-benar adil.

Menurut mereka, “apakah perbuatan Sugeng Yulianto benar-benar merugikan kepentingan negara, sehingga perlu adanya hukuman berat bagi Sugeng Yulianto, dengan demikian Sugeng Yulianto tidak ada kesempatan mendidik dirinya atau menyesali perbuatannya”. Dalam kasus persidangan itu Sugeng Yulianto dituntut dengan hukuman penjara seumur hidup.

8. Zamzuri

Zamzuri adalah profil seorang pejuang Islam sejati. Zamzuri lahir di Gunung Kidul, Yogyakarta pada tahun 1942. Meskipun riwayat pendidi-kannya sangat sederhana, ia adalah seorang yang sangat antusias menuntut ilmu. Ia menjalani Sekolah Rakyat (SR) dan Madrasah Ibtidai-yah sekaligus di Solo dan menamatkannya pada tahun 1951. Sekolah Menengah Pertama Al Islam dijalannya hingga kelas 2 karena pada tahun 1962 ia telah mengalami sebuah dampak besar dari krisis ekonomi masa Soekarno. Maka, pada tahun 1963, ia mengambil sebuah kebijakan penting, sebuah keputusan yang mengubah hidupnya hingga kini: ia *hijrah* ke Lampung. Dialah generasi pertama yang mendiami wilayah Way Jepara di Sidoredjo dengan membuka lahan baru sebagai wilayah harapan baru setelah Jawa mengalami proses involusi pertanian yang berkepanjangan.

Zamzuri adalah seorang tokoh dengan karakter Islam yang kuat. Penampilannya begitu menyejukkan hati, penyabar dan murah senyum. Tidak ada sedikitpun sikap kasar dalam dirinya. Ia, setelah menjalani hukuman di pulau Nusa Kambangan, tampil sebagai seorang sufi sejati dengan konsep-konsep Negara Madinah yang historik serta kental dalam dirinya. Segera setelah perpindahannya ke Lampung, pada tahun 1964, ia mengaji pada seorang ustadz, As Mu’in namanya. Ustadz As Mu’in inilah yang memberikan banyak fundamen dasar penting bagi keberis-laman Zamzuri. Ustadz As Mu’in adalah seorang ustadz yang berani merambah daerah-daerah baru untuk memastikan ada nur Ilahi di tanah tersebut. Namun, yang kemudian menyedihkan hati Zamzuri adalah ia harus menerima sebuah kenyataan pahit: ustadz As Mu’in dibunuh oleh orang Lampung karena kasus agraria. Untuk menutupi kesedihannya, ia menikah pada bulan Juni 1964 dengan seorang gadis bernama Sugirah, tempat ia bisa membenamkan segala persoalannya dan bersama istrinya inilah ia mengarungi lautan belantara kehidupan yang keras di daerah baru itu.

Konflik agraria adalah konflik permanen di Lampung. Hukum negara ini belum begitu mampu menyelesaikannya secara komprehensif sehingga jumlah korban berjatuh seperti belalang yang disemprot. Maka, pada tahun 1969, ia mengambil sebuah keputusan penting lainnya dalam hidupnya: ia pindah ke Sidoredjo. Ia membuka lahan yang masih hutan belantara di sana. Namun, ternyata usaha ini mengakibatkan pihak *Peseka* (sebutan untuk Polisi Kehutanan) berang. Pada tahun 1972 semua para pembuka lahan baru diusir oleh Peseka dan rumah-rumah mereka dibakar. Sebuah kebiadaban dan kekerasan negara berjalan dengan senyap di tengah belantara Sidoredjo tersebut. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang peduli, bahkan hingga kini. Kisah tragis ini merupakan sebuah *voice of the silence* untuk diceritakan olehnya. Semua pembuka lahan, penerobos jalan baru bagi sebuah peradaban Sidoredjo, merasa sangat marah. Maka, pada tahun 1972, seorang polisi kehutanan berpangkat *pager praja* dibunuh dalam sebuah keroyokan massa. Sejarah hidupnya begitu panjang yang sebagiannya menggambarkan kemuraman sejarah Lampung yang lebih panjang dari usianya.

Dengan masa lalu yang demikian, maka dirinya terbentuk menjadi seorang muslim yang ta'at serta berkarakter teduh. Namun, untuk mem-bela agama, apapun akan dilakukannya sehingga ia sendiri seperti terbawa dan larut dalam semangat zaman yang buram di masa lalu. Ia terlibat dengan kasus Lampung di dalam setting Sidoredjo di mana ia menebas batang leher Serma Sudargo hingga nyaris putus. Lihatlah bagaimana sikap hidupnya ini kemudian harus merespon pengadilan. Seusai mende-ngar tuntutan jaksa penuntut umum Zainuddin K, SH yang tetap menun-tutnya hukuman seumur hidup, Zamzuri bertanya: "apakah hukuman yang dijatuhkan kepada saya ini, karena saya salah terhadap hukum Islam atau hukum negara. Kalau saya salah dari hukum Allah, saya serahkan kepada Allah. Tetapi kalau salah dari hukum negara, saya terima semua itu, silahkan!" ujarinya dengan suara agak menantang.⁴¹ Orang-orang kecil terkadang kehilangan bahasa untuk mengungkapkan penderi-taan yang ditimpakan atasnya oleh institusi negara yang sangat berkuasa ini. Hanya dengan suara yang menantang sajalah ia bisa menghadirkan eksistensi dirinya yang kecil di hadapan negara yang besar.

Mendengarkan pertanyaan Zamzuri seperti itu, jaksa penuntut umum mengatakan, bahwa kesalahan Zamzuri adalah melanggar hu-kum negara, dengan kedok untuk menegakkan hukum agama di muka bumi. Atas jawaban jaksa tadi, Zamzuri lantas menyahut, "Ya, sudah, kalau begitu sudah jelas bagi saya. Kalau begitu silahkan, saya terima," kata Zamzuri yang tetap pada pendiriannya semula, tanpa merasa gentar, takut atau merasa keberatan atas tuntutan jaksa.

Itulah sekelumit kisah dalam persidangan Zamzuri, Majelis Hakim Pengadilan negeri Kelas I Tanjungkarang dalam putusannya menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Zamzuri bin Muhcroji berusia 46 tahun, karena terbukti sah dan meyakinkan melanggar UU No. 11/PNPS1963.⁴²

Cukup pahit memang hasil keputusan Hakim tersebut. Tapi bagi Zamzuri sendiri dia tidak merasa berkeberatan, karena apa yang diper-buatnya dengan kelompok Warsidi merupakan perintah Allah yang harus dijalankan. Walaupun mungkin pada kenyataannya bertentangan dengan hukum negara. Menurut keyakinannya, "lebih takut kepada Allah ketimbang mengikuti hukum-hukum yang dibuat oleh manusia." Dan setelah keputusan itu, hari demi hari hidup Zamzuri dilaluinya dalam tahanan.

Jauh sebelum meletusnya peristiwa di desa Sidorejo, Zamzuri tercatat di desanya sebagai salah satu penduduk yang berekonomi kuat. Ia mempu-nyai puluhan ekor sapi dan puluhan hektar lahan perkebunan. Zamzuri mempunyai seorang isteri dan lima orang anak.⁴³ Di akhir tahun 1988, baik siang maupun malam hari, rumah Zamzuri selalu ramai dikunjungi orang. Karena sebab itu pula masyarakat setempat merasa curiga.

Sebenarnya, ketika peristiwa berdarah itu terjadi, Zamzuri tidak ada di tempat kejadian. Karena merasa penasaran, ditanyakan kepada tetang-ganya. Tapi, dari sikap mereka menandakan bahwa mereka sudah menu-tup diri. Menurut Zamzuri, "penduduk di sekitar rumah saya sudah tutup pintu, mereka cuma mengintip-ngintip saja. Ketika berpapasan mereka menjawab tidak tahu."⁴⁴

Menurut penuturan Zamzuri berdasarkan informasi yang didapat dari kawan-kawannya di sana, bahwa sebelum meletusnya kejadian, sebenarnya tidak ada tantangan dari masyarakat mengenai pendirian pesantren di sana. Namun setelah mereka mendapatkan isu dari pemerin-tah, bahwa jama'ah itu sesat, PKI, pemberontak. Karena memang pendu-duk Talangsari itu dari awalnya tidak mengerti apa-apa, maka diterima-nya informasi itu secara mentah-mentah.⁴⁵ Rekayasa yang digalang oleh aparat itu pada akhirnya menjebak penduduk setempat untuk sama-sama menghantam habis kelompok Warsidi. Termasuk dalam rangkaian peristiwa itu, yang pada akhirnya menimpa pada Zamzuri. Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim bahwa perbuatan Zamzuri dinilai berba-haya terhadap ketentuan atau hukum negara dan pemerintah yang bagaimanapun tujuannya menegakkan, pelaksanaan niat jahat, merongrong ideologi dan kekuasaan negara.

Zamzuri bersama anggota jama'ah lainnya telah menyiapkan tempat-tempat bagi anggota sesama jama'ah, mengumpulkan dana dan turut bersiap siaga membuat keonaran di Sidorejo, dan ikut dalam pembunuhan Kades Sidorejo, Arifin Santoso dan anggota Polisi Sidorejo, Serma Sudargo selaku Ka Polpos Jaga di Sidorejo.

Menurut keputusan hakim, “Perbuatan Zamzuri merupakan mani-festasi pandangan hidup, ideologi dan cita-cita perjuangan jama’ah. Ini merupakan pelaksanaan dari cita-cita perjuangan jama’ah dan merupakan pelaksanaan dari cita politik, menegakkan berdirinya Negara Islam di Indonesia sekaligus menyebarkan syariat Islam.”

Setelah sepuluh tahun lebih mengalami hidup dalam penderitaan di penjara, kini Zamzuri bisa merasakan kembali kehidupan normal. Namun amat disayangkan, ternyata penduduk setempat masih trauma dengan kejadian masa silamnya. Zamzuri tidak bisa berkomunikasi dengan penduduk, karena setiap kali berhubungan dengannya sudah tidak boleh. Jadi, kini, dalam kesehariannya dia hanya bisa nongkrong di rumahnya saja. Tetapi, untungnya isteri tercinta masih bisa membantunya. Kalau ada tamu mencari ke sini dicurigai, Zamzuri sendiri bila merasakan hal yang demikian terbayang seperti masa-masa di penjara, bahkan kejadian yang dialaminya sekarang lebih membuatnya menderita. Menurut Zam-zuri, “Ya, rata-rata masyarakat itu heran saja, kalau mau ditanya sering nutup-nutup terus. Ada yang ditanya, tapi tidak mau membuka padahal mereka saksi. Mungkin sudah diintruksikan oleh Lurah Amir Puspa Mega dan oleh Tentara-tentara itu”. Namun, dalam percakapan terakhir dengan penulis, ia menyatakan bahwa Peristiwa Talangsari dan Sidoredjo tahun 1989 bukanlah kesalahan Hendro Prijono. Hendro Prijono, menurutnya, tertawan oleh situasi yang mengharuskan ia menjalankan tugasnya secara normatif TNI. Yang salah adalah para pengambil kebijakan di tingkat Pusat seperti Pangdam dan Menko Polkam serta Kopkamtib. Dan, di atas semua itu adalah Soeharto. Maka, ia pun tidak pernah menaruh sikap dendam terhadap Hendro Priyono pada saat orang-orang lain menggunakan kesempatan masa reformasi sekarang ini untuk menggugat dan meneror mental atas nama pelanggaran HAM. Bagi Zamzuri, orang-orang Islam tidak pernah menuntut HAM, karena tindakan di masa lalu adalah untuk perubahan di masa sekarang dan yang akan datang. Biar Allah sajalah yang akan membayarnya dengan surga-surga yang telah dijanjikan-Nya.

9. Zainal Arifin bin M. Amin

Zainal Arifin bin M Amin, lahir di desa Way Hano Teluk betung tahun 1936. Dalam dakwaannya Zainal dituduh sebagai salah seorang perencana —sekaligus sebagai “gubernur bayangan”— untuk mendirikan Negara Islam di Propinsi Lampung.⁴⁶ Jaksa Penuntut Umum J. Subiyanto dalam dakwaan mengatakan bahwa Zainal bersama-sama rekannya antara lain Farid Ghozali dan Abdul Kodir Baroja, mulai merintis kegiatan da’wah di bawah tanah guna mendirikan Negara Islam sejak tahun 1974, sebagai kelanjutan dari rencana Kartosoewirjo yang memproklamasikan NII tanggal 7 Agustus 1949.⁴⁷

Ketiga orang ini selama empat tahun (1974-1978) mencoba mencari kekuatan atau pengikut dari kegiatan terlarang tersebut. Waktu itu, Abdul Kodir Baroja ditunjuk sebagai Ketua NII Lampung, wakil ketuanya Farid Ghozali, sedangkan Zainal Arifin diangkat menjadi sekretaris. Di samping itu, Zainal juga pernah menjabat sebagai ketua Jama’ah Islamiah Teluk-betung antara tahun 1976-1977. Menurut Jaksa Penuntut Umum, Zainal aktif melakukan pertemuan di pantai Suka Maju Teluk betung Barat dengan rekan-rekan seperjuangannya, di antaranya adalah Slamet asal Jawa Tengah. Badran Hindarto asal Palembang. Di mana setiap kali bertemu, Zainal selalu menambah keyakinan rekan-rekannya agar terus berjuang. Tempat pertemuan lainnya adalah di Kali Pucung, Telukbetung Selatan.

Cara Zainal mencari massa cukup efektif, menyamar sebagai pedagang Jahe gajah disamping itu giat melakukan ceramah. Ketika melakukan ceramah di Umbul Mas, Lampung Tengah, Zainal sempat bertemu dengan Warsidi bahkan sempat bermalam di kediaman Warsidi, dia sempat berkenalan dengan Purson, seorang anggota NII asal Jakarta dan kawan dekat Abdul Kodir Baroja.

Anggota jama’ah NII asal Jakarta itu, secara lisan lantas mengangkat Zainal Arifin sebagai “gubernur bayangan” di Lampung. Setelah diangkat lantas dia mengadakan pertemuan dengan sejumlah anggotanya.⁴⁸ Mereka adalah Rajal, Rujito, Sai’an, Sumarno, Slamet, Warsidi, Imam Bakri serta Amir. Beberapa waktu kemudian kembali Zainal mengumpulkan anggota jama’ahnya di Telukbetung. Pada kesempatan tersebut dia lantas mengangkat Sai’an selaku “Bupati Lampung Tengah”. Sumarno sebagai Wakil “Bupati Lampung Tengah”. Amir sebagai “Camat Bandar Agung”. Warsidi sebagai “Camat Way Jepara.⁴⁹ Slamet sebagai Juru Da’wah, sedangkan Rajal, Imam Bakri dan Rujito diangkat sebagai anggota.

Namun, yang menarik dari kasus ini, ternyata Warsidi tidak puas sebagai Camat NII Way Jepara. Ia ingin menjadi “Imam” Lampung. Karenanya setelah terpengaruh oleh “orang Jakarta”, ia lalu berpaling dari Zainal Arifin dan ber-bai’at kepada Nur Hidayat.

10. Riyanto

Riyanto lahir pada tahun 1954. Menurut penuturan yang disampaikan oleh Riyanto (46 th),⁵⁰ di Jakarta pada tahun 1988 seorang bernama Aminuddin datang bertemu dengan salah seorang jamaah Nurhidayat. Aminuddin bercerita bahwa di Lampung ada sekelompok jamaah ditemuinya, jamaah itu dipimpin oleh seorang bernama Warsidi. Tertarik dengan cerita yang dituturkan oleh Aminuddin, tak lama kemudian dari Jakarta mengirim utusan ke Lampung. Pertemuan dengan Aminuddin memang belum lama terjadi.

Riyanto yang mendengar penuturan Aminuddin itu sedikit ragu akan kebenaran informasi itu, maka atas inisiatif sendiri ia mengecek kebenaran cerita tersebut dengan berangkat ke Lampung. Benar bahwa ada jama'ah di Lampung. Riyanto bertemu langsung dan berbincang-bincang dengan Warsidi. Setelah itu Riyanto balik lagi ke Jakarta.

Di Jakarta, Riyanto bertemu kembali dengan Nurhidayat yang sejak awal tahun 80-an sudah dikenalnya. Mengingat Nurhidayat mempunyai sebuah rencana tentang Lampung, Riyanto kemudian ber*baiat* kepada Nurhidayat, dan sekaligus Nurhidayat mengajak Riyanto untuk *hijrah* ke sana, tetapi Riyanto belum mau, karena belum ada bekal yang cukup untuk menetap di sana beserta keluarganya ke Lampung.

Di tengah perjalanan hendak mengunjungi kakak iparnya, Riyanto bertemu (alm.) Alex yang berniat *hijrah* beserta keluarganya. Alex minta tolong kepada Riyanto untuk berangkat ke sana. Segala ongkos ditanggung Alex. Riyanto menyetujui dengan niatan menolong membantu keluarga dan anak-anaknya yang masih kecil-kecil sebanyak tiga orang pindah ke Lampung. Tanggal 28 Januari 1989 berangkat ke Lampung tanpa bekal cukup. Setibanya di Lampung, Riyanto ingin pulang ke Jakarta, tapi tidak punya ongkos. Hingga meletus peristiwa tersebut. Mau keluar dari Cihideung tidak bisa, karena peraturan yang keras dari Warsidi. Pernah salah seorang, gara-gara membantah perintah Si Dullah yang menjadi panglima siaga satu, menugaskannya. Ia tidak mau. Langsung oleh Warsidi ditodong pakai keris. Semua menjadi takut keluar dari jemaah pada waktu itu.

Menurut Riyanto, mulai terjadi konflik ceritanya berawal setelah adanya kecurigaan Sukidi (Kepala Dusun Talangsari III) memberikan laporan kepada Amir Puspamega (Kepala Desa) dan kemudian naik ke kecamatan bahwa ada banyak pendatang asing di tempat Warsidi yang tidak laporkan keberadaannya dalam jumlah yang sangat banyak. Waktu itu memang banyak pendatang baru berkumpul di tempat Warsidi yang luas tanahnya cuma 1,5 hektar persegi. tapi belum ada acara pengajian. Juga belum ada kurikulum.

Gubuk-gubuk penampungan jemaah Warsidi yang Riyanto ingat terdiri dari. Rumahnya Pak Iman dan anak istrinya. Gubuk keluarga Marjuki, gubuk keluarga Jayus, gubuk keluarga Marsudi, gubuk keluarga Warsidi, gubuk keluarga Umar, gubuk keluarga Imam, 8 (delapan) gubuk baru penampungan rombongan Jakarta di dalam, kalau di gubuk Pak Warsidi ada 2 (dua) tingkat ada beberapa keluarga.

Tidak lama setelah adanya penangkapan kelima orang jemaah Warsidi, situasi menjadi sangat memuncak. Menurut Riyanto, seminggu sebelumnya memang Warsidi telah mempersiapkan siagakan jemaahnya untuk mengantisipasi kemungkinan buruk terhadap kedatangan pihak aparat. "Siaga satu" kata mereka. Ia telah memberikan beberapa komando khusus kepada beberapa kelompok jemaahnya, setelah mendapatkan kabar lima orang jemaahnya ditahan di Kodim.

Bersama Fadillah alias Sugito, Riyanto adalah pemimpin tim yang merampas mobil Colt angkutan umum dan membunuh penumpangnya, Agus Santoso, membunuh Pratu Budi Waluyo dan melukai sopir serta kernetnya di simpang tiga Sri Bawono pada 6 Pebruari 1989. Timnya juga melempar bom molotov ke kantor Harian *Lampung Post* di Bandar Lampung, namun tidak meledak.

11. Fauzi Isman

Fauzi bin Isman kelahiran Lampung, 27 Februari 1967, namun ia bukanlah orang asli suku Lampung. Ia adalah orang Jawa tulen. Sejak menamatkan pendidikan SMA nya, ia pindah untuk melanjutkan pendidikan formal *alimah* dan pesantren di Jombang yang ditamatkannya tahun 1985 dan kuliah di STIS Jakarta hingga selesai tahun 1988.⁵¹

Menurut Fauzi bahwa terdapat kondisi khusus yang ikut melatar-belakangi terbentuknya jama'ah di Cihideung. Kondisi khusus yang dimaksud Fauzi Isman adalah kondisi politik umat Islam di Indonesia yang ditandai dengan terpecahnya berbagai kekuatan Islam non-parlementer menjadi kelompok-kelompok kecil yang satu sama lain saling cakar-mencakar. Kondisi keterpecahan inilah yang sesungguhnya melatarbelakangi semangat untuk menyatupadukan kekuatan-kekuatan umat Islam yang dimulai di Cihideung ini. Keprihatinan kepada nasib persatuan umat Islam yang terkoyak-koyak inilah yang kemudian meng-hantarkan para tokoh Peristiwa Talangsari ini untuk berbuat sesuatu. Menurut Fauzi Isman, ada beberapa permasalahan yang menyebabkan timbulnya perpecahan di kalangan kekuatan Islam non-parlemen pasca *Darul Islam*. Perpecahan yang sebenarnya tidak perlu timbul, kalau saja kejumudan dan kepicikan pemahaman Islam dan pengalamannya tidak terjadi. Di antara permasalahan tersebut, *pertama* adalah tentang Imamah, kaitannya dengan persoalan ini menyangkut tentang siapa yang paling berhak menjadi *imamah*.⁵² *Kedua*, tentang masalah *jama'ah*, dalam masa-lah ini berkaitan tentang manakah yang paling benar sesuai dengan Al Quran dan Sunnah Rasul. *Ketiga*, tentang masalah *mujahadah*. Menyang-kut permasalahan kesungguhan dalam berjuang menegakkan hukum Allah. Ketiga permasalahan tersebut yaitu *imamah*, *jama'ah* dan *mujahidah* yang berkaitan langsung dengan pembinaan jama'ah, telah membelenggu para aktifis Islam selama lebih kurang 27 tahun dalam permasalahan menyusun *shaf*.

Berangkat dari kondisi ini, tumbuh upaya-upaya membentuk jama'ah baru yang lebih segar dan bersemangat. Kebetulan pula Fauzi bertemu Nur Hidayat dan Sudarsono yang masing-masing mempunyai pendapat yang hampir sama sehingga mereka bergabung. Meskipun berlatar-belakang mazhab dan aliran keagamaan yang berbeda, mereka saling bertukar gagasan, serta

bermusyawarah untuk mencari jalan keluar, memikirkan kondisi ummat Islam yang berada di tengah stagnasinya peran kalangan aktivis muslim non-parlementer di tengah percaturan masyarakat bangsa di Indonesia. Maka diadakan berbagai pertemuan untuk menindaklanjuti keseriusan perhatian mereka dengan aksi. Pertemuan-pertemuan rutin diadakan di sebuah rumah kontrakan milik Sudarsono di Prumpung Jakarta, mereka berhasil mematangkan gagasan sederhana yakni keinginan membentuk suatu jamaah yang independen. Sekaligus juga dapat menampung seluruh kalangan kelompok jama'ah yang ada. Mereka ingin membangun suatu jamaah dengan mengumpul-kan orang-orang yang satu *fikrah*. Dengan demikian maka seluruh kekuatan kaum muslimin non parlementer dapat disatukan. Dan untuk selanjutnya, adalah usaha untuk mempersatukan kekuatan kaum muslimin yang ada di Indonesia menjadi lebih mudah.

Dari pertemuan di Cibinong, mereka mengambil kesepakatan bulat, yakni ingin mewujudkan sebuah perkampungan Islami (*Islamic village*) di Lampung bagi kaum muslimin. Dengan demikian kaum muslimin dapat menerapkan aturan-aturan hidup Islami di tengah-tengah masyarakatnya sendiri secara *kaffah*. Dan bagi kaum muslimin lain yang ingin menetap di tempat baru itu dapat ber-*hijrah* ke sana. Ir Usman mengatakan bahwa *hijrah* itu tidak sama dengan konsep transmigrasi bukan hanya sekedar pindah dari tempat yang padat ke tempat yang jarang penduduknya—yang menimbulkan kesan ekonomistik dan materialistik semata. Tentang penawaran konsep *Islamic village* ini, banyak yang setuju dan banyak pula yang tidak setuju. Itu dibuktikan dengan adanya bergabung dan yang ragu-ragu serta ada juga yang menolak, disebabkan trauma politik peristiwa Tanjung Priok dan Usrah yang masih baru terjadi. Walau semua kelompok jamaah yang punya *fikrah* dan cita-cita yang sama.

Hampir pada waktu itu karena pandangan yang ekstrim, kelompok yang kemudian dikenal dengan jamaah Warsidi itu dikenal di antara kelompok ekstrim dan memang doktrin pada waktu itu adalah *qital*, perang. Kalau perang, sebenarnya segala resiko perang harus diterima. Setelah dari Cibinong itu kemudian harus disosialisasikan ke seluruh Indonesia, Fauzi diutus ke Lombok dan Bima, Darsono ke Kalimantan dan Surabaya, Pak Ridwan ke Sumatra sampai ke Medan sampai ketemu Timsar Jubil. Memang sambutan-sambutan beragam dan akan mengadakan pertemuan yang berskala nasional dipusatkan di Lampung pada tanggal 28 Febuari 1989. Namun sayang, tanggal 7 Februari itu terjadinya peristiwa Lampung, sehingga Fauzi Isman tidak tahu sampainya ke aparat tanggal 7 Febuari kita ingin melakukan hal-hal bagaimana tapi sebenarnya kita mau mengadakan Musyawarah serta pembentukan Imamah, karena pada waktu itu kan keimamahan jamaah itu terpencar-pencar bahkan kita menghubungi orang-orang DI yang tua-tua terpecah belah, kita mencoba menyatukan.

Sebetulnya secara garis besarnya sama yang kita ketahui. DI pasca Imam SMK itu mempunyai banyak perbedaan karena orang tua yang dianggap sebagai pimpinan ada yang ambisi mengklaim sebagai Imam yang sah yang lain tidak dan sebagainya, ya perbedaan hanya dari jalur itu.

Tadinya binaan dari kelompok Darul Islam, *assyahid* Abdulah Sungkar tapi kita semua kemudian mengkritik Abdulah Sungkar, itu sendiri sema-cam koreksi karena waktu itu kelompok *Usrah* begitu keras dan anti institusi dan kehidupan sosial.⁵³ Jadi orang itu merasa ketakutan orang itu pengajiannya sembunyi-sembunyi, mestinya harus dibedakan antara *dakwah dan harokah* kalau *dakwah* itu harus terbuka kalau perlu orang yang tidak satu *harakah* dengan kita diajak, *Harokah* baru diam diam sembunyi-sembunyi, *ini perbedaan dakwah dan harakah* tipis sekali. Penyampaian materi yang dianggap *harakah* akhirnya dicurigai gerakan *usrah* pada waktu itu, nah kita pada semacam mengkoreksi tapi akibatnya orang-orang tua balik memukul kelompok Lampung ini sebagai kelompok pembangkang, tapi pada satu sisi mereka menganggap tidak taat pada jalur mereka, di sisi yang lain tidak bisa menapikan keberadaannya, karena peristiwa Lampung itu sendiri mungkin gerakan satu-satunya di luar jalur komando mereka, jadi persamaanya eks Lampung istilahnya dulu ini kelompok sempalan DI.

Gerakan *hijrah* di Lampung ini banyak diwarnai oleh Abdullah Sungkar dan kelihatannya ada perbedaan juga pemikirannya. Ya kebanyakan memang baik Pak Warsidi, Usman, Nurhidayat dulu orang-orang yang dibina oleh Abdulah Sungkar tapi itu tadi akibat *hijrah* ke Malaysia kita melakukan semacam otokritik dan pada waktu itu sangat tabu di kala-ngan DI dan kita tidak maju-maju tapi kita sudah mengawali, sampai dikritik macam-macam di dalam penjara oleh Pak Aceng, Ules Sujai dan pak Adah pokoknya tidak mengakui kita. Itulah perjuangan Islam tidak perlu mendapatkan pengakuan dari dia, kita gitu saja, Islam memangnya punya dia dan negara bukan punya dia bukan berarti kita menafikan dia, bukannya sekarang masanya anak muda. Memang, ada kesamaan karena dibina orang orang Abdulah Sungkar, tapi kalau ada perbedaan itulah karena kita banyak kritik terakhir juga sebelum almarhum ketika di Malaysia dia melakukan otokritik sampai keluar dari jalur struktural, kita mendengar itu *alhamdulillah*. Mungkin di Malaysia lebih terbuka pikirannya ketika kita melakukan otokritik dia marah juga tapi pada satu sisi mengakui juga.

Pada masa *hijrah*, Fauzi Isman pernah ke Lampung, dan itu bukan sekali tapi 2-3 kali. Sebelum *hijrah* Fauzi Isman sendiri belum sempat *hijrah* waktu itu. Memindahkan teman-teman dari sini rekomendasinya dari Fauzi Isman, Nurhidayat dan Darsono sementara kita sedang menyi-apkan pertemuan 7 Februari 1989 sementara yang lain sudah *hijrah* bersama keluarganya seperti Kardi dan Usman.

Pada waktu itu kejadian di Lampung Fauzi Isman masih berada di Bali dalam perjalanan pulang dari Bima ke Jakarta, Nurhidayat sendiri ada di Jakarta, sebab Fauzi Isman melihat kejadiannya di mana pendeka-tan keamanan terlalu kuat, sebenarnya kalau Pak Warsidi tidak mau melaporkan orang yang pindah ke sana tidak sampai harus terjadi cuma pada waktu itu Islam dicurigai, cuma tidak mereka sangka oleh Kapten Sutiman cs mereka melakukan perlawanan. Jadi tidak ada rencana-rencana untuk mengadakan gerakan.

Jadi memang belum ada rencana apapun, mereka baru bertemu. Fauzi Isman kenal dengan Warsidi baru beberapa bulan. Pokoknya kelompok Jakarta dengan kelompok Lampung Warsidi cs (almarhum Soleh, menantunya, dan Ir. Usman) pada waktu itu secara *fikrah*⁵⁴ sama, cuma dalam penafsiran *fikrah* itu berbeda. Kalau Nurhidayat maunya *qital* kearah pembinaan bersenjata, sementara dari Pesantren Ngeruki tidak mau *qital* harus membina perkampungan muslim. Pada akhirnya Nurhidayat bisa mengurangi tuntutan *qital* dan kita membina hubungan sekali-gus membuat *base camp* bersama, pada waktu itu imam belum ada Nurhidayat terpilih sebagai *Amir Musafir*, baru setelah kumpul nanti akan dipilih *Imam Jamaah* jadi pada waktu itu belum ada pimpinan permanen.

Jadi pada waktu itu Pak Warsidi belum diangkat sebagai pimpinan. Tetapi sementara hanya sebagai komunitas pimpinan jamaah di Lampung. Jadi pada waktu hasil kesepakatan di Cibinong belum terlaksana. Pada waktu itu kesepakatan Cibinong belum memilih imam, jadi jamaah itu harus ada imam, Cibinong itu menentukan *Islamic Village* dan harus *hijrah* ke Lampung itu saja.

Jadi, *hijrah* ke Lampung seperti diceritakan pada tanggal 7 Februari 1989 bukan untuk gerakan. Itupun ada kesalahan, Warsidi dan teman-teman di sana orang-orang yang *dihijrahkan*, dikonsentrasikan di satu tempat, pada hal kita banyak tempat di Lampung. Kesepakatan waktu itu harus dipencar, tidak boleh dijadikan satu, tidak dikonsentrasikan. Dasar pemikiran pak Warsidi itu Fauzi Isman baru diketahui setelah kejadian-an Lampung, itu terkonsentrasi disatu tempat saja.

Jumlah korban terakhir yang didata menurut Fauzi Isman hampir 250⁵⁵ orang itu dari jamaah yang ia dengar dan ada juga penduduk setempat yang kena peluru nyasar, tidak tahu berapa persisnya, di samping dari aparat sendiri jumlahnya mereka tidak transparan. Jadi korban itu mulai dari anak-anak sampai orang tua dan cerita teman-teman katanya ada yang dimasukkan dalam satu rumah kemudian ditembaki lalu dibakar rumahnya. Namun, data ini belumlah merupakan sebuah data jumlah korban yang pasti karena Fauzi Isman sendiri tidak berada di lokasi kejadian pada saat peristiwa.

Ekses dari kasus Cihideung Talangsari terhadap beberapa kejadian seperti di Jakarta ada kaitan tapi dengan peristiwa itu tidak terlibat, pada waktu itu politik harus membatat rumput sampai ke akar-akarnya. Jadi orang-orang yang ada di Jakarta itu tidak lari, tapi mereka ingin melakukan gerakan lokal di Jakarta, kita pikir tadinya teman-teman masih banyak selamat jadi kita ingin melakukan untuk memecah perhatian mereka cuma rupanya ada teman-teman yang dari Lampung mereka sudah ditangkap dilepas lagi dan diikuti, jadi sebelum sempat melakukan gerakan di Jakarta sudah tertangkap, adapun yang di Bandung itu Ajengan Kecil karena Nurhidayat pernah bertamu ke rumahnya, dia orang DI kena ditahan 5 tahun dan yang di Bima karena Fauzi Isman pernah datang ke sana dan mereka punya fikroh yang sama, di Bima itu direkayasa seakan-akan mereka sudah latihan militer, pada hal itu foto latihan ABRI yang dijadikan barang bukti untuk persidangan, Haji Abdul Gani Masjkur dan jamaah akhirnya dimasukan penjara. Intelejen memang bertindak secara sangat busuk. Adapun kasus insiden yang lain di Lampung macam di Siderejo itu gerakan sporadis mendengar Cihideung dibumihanguskan, teman-teman yang tidak di Cihideung mereka bermu-syawarah melakukan perlawanan.

Pada waktu pertemuan-pertemuan ada tidak perasaan dari kawan-kawan bahwa pertemuan ini direkayasa dan dilaporkan ke intel. Kalau Fauzi Isman lihat sampai terjadinya Lampung itu rupanya ada teman-teman sengaja diloloskan oleh aparat dan gabung ke Jakarta yang sebelumnya dia sudah dalam pengawasan. Dugaan beberapa kawan-kawan karena ada hubungan dengan Abdul Mafaid Faedah Harahap. Setelah Lampung tapi sebelum peristiwa Lampung tidak pernah ikut, Mafaid Faedah Harahap itu sendiri karena kentalnya Nurhidayat jadi agak ceroboh gampang percaya sama orang dan kita pada waktu itu menerima karena jaminan Nur Hidayat tidak tanya latar belakangnya. Mafaid itu sendiri mengkhianati gerakan Komando Jihad (Komji) akhirnya jari tanganya dipotong oleh Timsar Jubil. Nah, di situlah fatalnya di situ Nur Hidayat mempercayai dia, dan mereka pun mengadakan pertemuan di rumah dia. Makanya, pasca Lampung itu sudah tidak steril rencana gerakan di Jakarta itu. Lampung sendiri sampai kejadiannya tidak ada rencana karena aparat itu sendiri terkejut kita mampu menyusun langkah perlawanan barisan di sana walaupun apa adanya. Jadi mereka tidak menyangka jadi ada suatu perlawanan lebih terorganisir ketika dibandingkan dengan Priok, Priok itu pembantaian tanpa ada perlawanan.⁵⁶ gerakan spontanitas Lampung itu gerakan jamaah, ini yang membuat aparat pada waktu itu terkejut ada suatu perlawanan atau pertempuran selama Soeharto. Memang pada waktu itu kita melihat ada pemikiran bahwa pada waktu itu dominasi Militer ABRI Soeharto baru disebut sebagai Bapak Pembangunan, mereka ada rencana dan orang pada waktu itu takut sekali kepada militer kita berpikir militer biasa saja tidak perlu takut, tapi wujudnya harus dengan mereka juga kan kalau sekarang orang berani mengkritik militer karena sudah lemah.

Bahkan menurut Fauzi Isman, peristiwa Lampung adalah peristiwa kejahatan intelejen negara Orba terhadap rakyatnya, khususnya umat Islam. Ia menganggap apa yang telah terjadi adalah

sebuah kondisi perang di mana segala konsekuensi dan risiko harus diterima, menang atau kalah, terbunuh atau dibunuh.⁵⁷

Pada waktu Fauzi Isman dan rekan-rekan mencoba menyelesaikan karena dasar pemikiran pada jaman itu militer masih kuat, reformasi hanya *euphoria* ternyata sekarang reformasi apa tetap sama saja cuma bungkusnya saja yang lain dan kemasannya yang berbeda. Pada waktu kami tawarkan dengan cara *ishlah* karena *ishlah* itu sendiri adalah langkah taktis tujuannya membebaskan teman-teman yang ada di penjara yang hukuman terbanyak adalah tahanan politik kasus Lampung ada 8 orang yang dihukum seumur hidup, sekarang hukuman seumur hidup berarti dia seumur hidup di penjara sampai mati kalau tidak dapat grasi. Itulah kemudian kita menuntut ke aparat pemerintah dan *ishlah* itu kita artikan penyelesaian hubungan nilai, *ishlah* itu kita ambil dari Al Quran dan sunah rasul.

Selama masa sidang ada delik-delik hukum yang memang sengaja ditampilkan supaya terjadi pembenaran untuk melegalitas orang Lampung ini ditahan. Banyak sekali bukan dalam sidang saja, sejak dari pemeriksaan mereka mengarahkan seakan akan tujuan kita itu mendirikan Negara Islam pada hal itu cita cita kemudian kita ingin mengganti ideologi pancasila yang mereka paksakan. Terhadap sikap demikian kami hanya menjawab dengan iman yang memang kami yakini kebenaran Islam dan pancasila memang harus diganti, jadi kami tidak menolak tuduhan itu memang kenyataan cita cita kami dan niat kami begitu.⁵⁸

Hubungan dengan kawan-kawan yang lain setelah kasus Lampung, baik masalah ada perbedaan wajar-wajar saja masing-masing sudah dewasa harus menentukan sikap sendiri-sendiri yaitu tadi dibesar-besarkan orang ada perpecahan dan sebagainya, Fauzi Isman kira, kita bebas memilih ke mana. Selama dipenjara yang dikerjakan dengan napi yang lain, Fauzi Isman mengajar ngaji dan membina permasalahan keluarga mereka supaya tidak ada persoalan-persoalan dengan petugas di penjara dan selama di penjara, Fauzi Isman mendapatkan haq cipta dari hasil karya Fauzi Isman untuk mempelajari membaca dan menulis Quran. Haq cipta No 016796 *Kotak Kataba Belajar Membaca dan Menulis Quran*. Selama ini orang bisa membaca quran tapi dia tidak kenal huruf.

Masalah pembinaan napi, kita diangkat sebagai pemuka agama oleh pihak LP karena membantu pihak LP di bidang pembinaan rohani mereka, jadi pada waktu itu kita disediakan ruangan mushola yang waktu itu kita perjuangkan, karena napi itu bisa sholat dalam sehari 4 kali kecuali subuh karena pintu sel belum dibuka dan dari situ kami punya kesimpulan bahwa kebanyakan mereka masuk penjara itu salah satu faktornya karena mereka belum pernah mendapat siraman rohani. Contoh ada yang habis kencing langsung sholat, tidak *istinja'* lagi.

Dikabarkan melalui berbagai media massa soal gerakan jamaah Warsidi yang tidak mengenal Islam, mereka diwarnai PKI. Selama di dalam tahanan Fauzi Isman lihat, tokoh-tokoh komunis yakin dengan komunisnya daripada Islamnya. Fauzi Isman mengatakan begini karena pernah satu blok dengan tokoh pemuda rakyat Kusno. Juga bekas sekretarisnya Aidit, Iskandar Seberjo. Kemudian bekas anggota biro khusus Pak Asep Suryaman, kolonel Latief. Fauzi Isman melihat walaupun mereka sudah di penjara selama berpuluh-tahun dan mereka diancam hukuman mati tidak ada kepastian kapan mereka akan bebas, ibarat menanti kematian mereka berpuluh tahun tetap yakin dengan kebenaran komunisnya.

Fauzi Isman lihat gerakan lainnya, sama memiliki basis perguruan tinggi⁵⁹ misalkan kasus Imron, Imron sendiri lulusan Universitas King Abdul Azis dengan Luqman Samrah, Ahmad Yani dari UNISBA, Ir Army dosen Unpad bahwa pada umumnya gerakan Islam dimotori oleh aktifis kampus yang memiliki basis intelektual pendidikan yang cukup tinggi. Cuma memang selama ini memang tidak pernah diungkap jadi hanya diberitakan militansi dan sikap ekstrimnya, sikap ekstrim itu sendiri lahir akibat tekanan yang cukup represif dari aparat. Jadi itu lahir sebagai sikap reaktif bahwa kita tidak mau ditindas.

Lampung itu sendiri penyelesaiannya pada waktu itu perbedaan kita dengan Kontras, Munir ingin membawa pada penyelesaian hukum sedangkan memakai proses hukum yang mayoritas terbukti membunuh pratu Budi harus dilihat konteksnya mengapa mereka membunuh Pratu Budi hal itu ada latar belakang politik. Karena itu Fauzi Isman melihat *ishlah* itu adalah penyelesaian politik perbedaannya di situ. Pemikiran kami begini, jangan terpaku kepada kejadian di masa lalu kita semua tahu kejadian itu adalah musibah politik dan *ishlah* bukan menutupi masalah Lampung karena salah satu syarat terjadinya *ishlah* harus ada klarifikasi persoalan, cuma dalam penyelesaian kita lebih berorientasi kepada perbaikan supaya kejadian di masa lalu jangan terulang kembali. *Ishlah* inilah yang ditawarkan oleh Rasul ketika *futuh* Mekkah, tidak pernah Rasul itu menyatakan Abu Sofyan itu penjahat perang, padahal perang Badar, Uhud dia yang memprovokasi, tapi rasul memaafkan karena Rasul lebih melihat ke depan bukan ke belakang tapi klarifikasi persoalan tetap ada. Inilah perbedaan antara *ishlah* dan yang sekarang digembargemborkan oleh para *lawyer* dan LBH melalui hukum itu nilai moralnya. Cuma saja oleh Pak Hendro ditafsirkan lain, *ishlah* itu hanya dijadikan sekedar penyelesaian politik untuk kepentingan politik. Dalam hal ini untuk meredam isu yang mendiskreditkan dia, makanya konsepsi *ishlah* yang murni tak bisa jalan, karena ada saja salah satu pihak dari orang yang *berishlah* niatnya karena tidak karena Allah, *ishlah* itu tidak bisa jalan.

Target *ishlah* hanya membebaskan teman-teman seperjuangan dalam berbagai kasus politik dari penjara.⁶⁰ Adapun pelanggaran HAM tahun 1999 ke bawah tidak tercakup dalam Perpu itu, perihal ini mendapat kritikan dari menteri Yusril Ihza Mahendra, peraturan dan perundangan yang

diajukan ke DPR lagi untuk dibahas yang intinya harus berlaku surut. Konsekuensi dari perpu itu otomatis Priok, Lampung pelaku pelanggaran HAM harus diadili.

Kenyataannya sekarang banyak orang menggunakan *ishlah* terlepas dari penafsiran pribadi masing-masing, mereka tentang *ishlah* tapi minimal sebagai konsep sospol, jadi dikenal oleh publik. Walaupun Fauzi Isman sadar ketika *ishlah* itu dicetuskan, waktu itu Yani Wahid ngobrol dengan AM Fatwa yang mempertemukan dengan Pak Hendro dan komentar AM Fatwa bahwa *Ishlah* memang bagus tapi tidak populer dalam kondisi sekarang ini jawaban politis dan diplomatis tapi kami mengambil resiko tidak populer, karena lebih menonjolkan kebaikan dan kebajikannya. Tidak populernya begini waktu itu arus menuntut Komnas HAM, sehingga pada waktu itu balas dendam adalah perbuatan mulia, dan memaafkan suatu perbuatan dosa adalah suatu akhlak tercela. Esensi *ishlah* itu memberi maaf ini dianggap nilai tercela ini yang harus dijelaskan kemudi-an bercampur aduk. *Alhamdulillah* kami dengar sekarang lagi mencoba *ishlah* dalam kasus Tanjung Priok dan yang lainnya termasuk konteks Ambon juga begitu. Di sinilah diperlukannya konsep *ishlah* itu, kalau kita masing-masing mengungkit kesalahan tidak selesai masalahnya.

12. Wahidin AR Singaraja

Pak Wahidin, atau akrab dengan panggilan Pak Zainal, adalah satu-satunya tokoh kasus Lampung yang memiliki kemampuan “menghilang” dari kejaran musuh. Hingga hari ini pihak intel Melayu kita tak pernah bisa menemukannya. Ia lahir di Komring, Dusun Betung, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Palembang, pada tanggal 24 Agustus 1948. Ia adalah salah seorang dari “Empat Sekawan” (Nur Hidayat, Fauzi Isman, Darsono dan Wahidin sendiri). Dalam kelompok empat inilah ia bertugas mengurus masalah jama’ah, Nur Hidayat mem-bidangi urusan konsolidasi, Fauzi Isman bidang Litbang dan Darsono mengurus soal keuangan. Namun, pengalaman dan pembentukan karakter masing-masing orang berbeda-beda. Bagi mereka yang di pen-jara, mungkin mengalami serangkaian terminal spiritual yang panjang sehingga berkesempatan memperdalam apa yang selama di luar penjara mereka tidak sempat memperdalamnya. Sedangkan yang berada di luar penjara, mungkin mengalami kerumitan hidup yang jauh lebih mencekap ketimbang dalam penjara. Namun, semua itu hanyalah ujian dari Allah SWT. Allah SWT hanya akan menguji hamba-hambanya yang sanggup menerima ujian yang setimpal dan tidak akan mengujinya dengan suatu ujian hidup yang tidak sanggup dilaluinya.

Kisah pelariannya mungkin bisa dikaji oleh para aktivis Islam tentang bagaimana menyiasati pihak intelejen dalam mencari mangsanya. Kisah-nya termuat secara utuh melalui *Tekad*⁶¹ yang penulis rasa perlu dikutip secara utuh dalam buku ini. Semenjak penumpasan Kelompok Pengajian Warsidi di Lampung Februari 1989, mendorong banyak anggotanya menjadi buron. Salah satunya Wahidin AR Singaraja. Ia sempat bersem-bunyi di rumah Motinggo Busye dan Jalaludin Rakhmat.

Tak pernah Wahidin AR Singaraja berpikir akan menjadi buron alat negara. Kisahnya dimulai pada 1988, se usai peristiwa penyerbuan militer atas perkampungan kelompok Warsidi di Lampung. Try Sutrisno, pang-lima ABRI kala itu, menegaskan bahwa Gerakan Pengacau Keamanan (GPK) Warsidi Lampung akan ditumpas sampai ke akar-akarnya. Wahidin memang rnenpunyai kaitan dengan Warsidi. Itu dimulai ketika ia memutuskan ke luar dari tempat kerjanya di Taman Impian Jaya Ancol (TIJA). Posisinya lumayan tinggi, asisten manajer. Tapi ia keluar karena tak tahan dengan teror di sana. Ia seringkali dituduh terlibat kasus Tanjung Priok, hanya karena ia lulusan Perguruan Tinggi Dakwah Islam (Seka-rang PTDI, Perguruan Tinggi Dakwah Islam) Tanjung Priok. Keluar dari TIJA (1987), Wahidin bergabung dengan suatu jama’ah, yang lantas ber-gabung dengan jama’ah pimpinan Nur Hidayat (yang belakangan juga dituduh terlibat GPK Warsidi), di Jakarta Pusat. Pada akhir 1988 mereka menggelar pelatihan-pelatihan. “Kami melakukan pelatihan-pelatihan itu untuk mengubah ego menjadi kami, kami menjadi kita, dan seterusnya,” kenang Wahidin. Lewat pelatihan-pelatihan itu pula mereka sepakat membentuk perkampungan Islam (*Islamic village*). Sebagai *pilot project*, mereka memutuskan perkampungan Islam itu berlokasi di Dukuh Talangsari III, Desa Rajabasa Lama, Kec, Way Jepara, Lampung Tengah. Ditemani rekannya, Fauzi Isman, dia datang ke Way Jepara melakukan studi kelayakan. Ketika itulah dia bertemu dengan orang-orang keperca-yaan Warsidi. “Tercapai kesepakatan antara kami dan Warsidi untuk membangun perkampungan Islam di sana,” ujar Wahidin yang kemudian memberangkatkan jamaahnya ke sana. Dia sendiri tetap di Jakarta.

Pada 7-8 Februari 1988, meletuslah Peristiwa Warsidi, sebuah tragedi kelabu tentang musibah politik yang sangat sering harus dialami oleh umat Islam. Selama Orde Baru, umat Islam sering menjadi korban yang dikorban (*the victimized victims*). Wahidin dan kawan-kawannya sempat shock dengan tragedi *crime against humanity* yang dilakukan oleh pihak intelejen. Soalnya, rezim Orde Baru memvonis pengajian Warsidi sebagai gerakan pengacau keamanan yang berencana mendirikan negara Islam. Mereka yang berada di Jakarta dianggap sebagai arsitek gerakan. Pangab Jenderal Try Sutrisno pun memerintahkan anak buahnya mem-buru kelompok Wahidin, termasuk yang ada di Solo, Bima, Palembang.⁶²

Wahidin sendiri lari dari kejaran petugas. Ia mulai hidup sebagai buron. Karena tak bisa keluar dari Jakarta, ia datang ke bekas tempat kerjanya, TIJA, untuk meminta bantuan teman-temannya. Namun, tak ada yang mau membantunya, sehingga ia sempat menggelandang di sana.

Wahidin kemudian memutuskan pergi dari TIJA dan berangkat ke rumah (alm) Motinggo Busye (pengarang novel—*Red*). Namun, Motinggo tak siap menerima. Ia menyuruh seseorang mengantarkannya naik bus ke Bandung. Berbekal surat itu, Wahidin menuju ke rumah Jalaluddin Rakhmat di Bandung. Tapi, keberadaan Wahidin di rumah Kang Jalal —sapaan Jalaluddin— tercium aparat. Sejumlah intel terus mengawasi rumah itu. Si buron lalu pamit kepada Kang Jalal. Usai shalat subuh, berbekal sepasang kaus kaki, baju, dan tasbih pemberian Kang Jalal, ia berangkat ke Palembang, Sumsel, kampung halamannya. Sampai di sana, aparat keamanan baru saja mengacak-acak rumah kakaknya. Namun, ia tetap memutuskan tinggal, karena merasa aman berada di tengah-tengah keluarga, meski mereka sebenarnya agak keberatan. Setelah sembuh dari sakit yang dideritanya selama enam bulan, akhirnya ia kembali ke Jakarta. Malang, teman-temannya di ibu kota malah menu-duhnya sebagai intel. Maka ia pun lalu berangkat ke Kalimantan untuk mencari pekerjaan, tapi gagal. Belum genap sehari di Kalimantan, pada 1990, Wahidin kembali ke Bandung. Kebetulan, Kirab Remaja yang digagas Siti Hardiyanti Rukmana (Mbak Tutut) mencari pendekar-pende-kar silat dari daerah. Wahidin pun mendaftar. “Mereka tidak tahu kalau saya buronan,” ucap lelaki yang sempat beberapa kali mengganti nama-nya selama buron. Dari situlah Wahidin berkenalan dengan orang-orang Tutut dan Titi Prabowo (istri mantan Pangkostrad Prabowo). Berkat perkenalan itu, bisa menjadi guru silat di Perguruan Silat Satria Mauda Indonesia yang didirikan Prabowo. “Saya mengaji silat di Kopassus, terutama di bidang rohani dan mental,” kenangnya.

Berkat kedekatannya dengan Kopassus, sejak 1991, ia mulai bisa mengunjungi istri dan keenam anaknya di Kuningan, Jabar. Selama men-jadi buronan, istrinya kerap didatangi aparat keamanan. “Mertua saya sering pingsan kalau aparat datang,” katanya. Sang mertua pun sempat akan menjodohkan istrinya dengan orang lain, tetapi istri menolak. Bahkan, anak Wahidin yang ketika itu masih duduk di kelas empat SD pernah diculik aparat untuk menunjukkan di mana bapaknya bersembunyi. “Anak saya yang sekarang baru tamat dari Politeknik ITB sempat trauma bila melihat tentara,” katanya.

Sejak mengajar silat itu, kehidupannya mulai normal. Kini ia mulai menuntut keadilan atas segala pelanggaran HAM yang menimpa diri dan kawan-kawannya. “Kami berharap Komnas HAM membentuk KPP HAM Lampung,” desaknya.⁶³ *We have arrived at the point of nowhere to return.*

Bab 11-02 Para Saksi dan Korban Intelijen Peristiwa Talangsari

1. Ridwan Casari

Menurut Ridwan Casari, yang dihukum 7 tahun dalam perkara Talang-sari ini, di Cihideung ada masyarakat yang terdiri dari berbagai suku dan latar belakang. Awalnya, para pendatang Cihideung ini mendapatkan pengajaran dari Abdullah Sungkar langsung atau tidak langsung dari pesantrennya, *Al Iman*, Ngruki, Solo, Jawa Tengah. Di sana kebanyakan umat yang dibina oleh Abdulah Sungkar berada di daerah Siderejo, Karanganyar, Way Jepara dan Talang Sari yang kemudian terjadi peristiwa sehingga Abdulah Sungkar pergi ke Malaysia, meninggalkan umatnya dan tanah beberapa puluh hektar yang belum dimanfaatkan.

Karena ditinggal mereka berguru kepada Pak Abdulah (Pak Dullah) yang di Siderejo Lampung, kemudian mereka mendapatkan didikan setelah mendapatkan didikan mereka berusaha ingin mengamalkan ilmu-nya dengan membuat perkampungan muslim yang ada di Talangsari Cihideng. Kemudian mereka dikoordinasikan oleh Pak Abdulah di Sido-rejo dengan dipusatkan di Talangsari di rumah Pak Warsidi yang cukup sukses mengelola Kebon Lada. Jadi bisa menjamin orang-orang yang *hijrah* ke sana baik dari Jawa Tengah dan Jawa Timur sehingga merupakan jama’ah —Jama’ah Islamiah— kemudian berkembang, termasuk Ridwan sendiri tahun 1987 pernah ke sana dan betul dia sukses.

Tapi kemudian tahun 1988 terjadi kontak dengan Jakarta termasuk yang ada kontak kesana Nurhidayat, Darsono, Wahidi dan Fauzi. Kemu-dian orang-orang Jakarta ingin memperbanyak orang yang hijrah kesana. Tapi sebelum ke sana ada pertemuan khusus dulu para pemuda Islam di Jakarta tanggal 12-12-1988 di Cibinong.

Pertemuan tersebut di sana karena bagaimanapun organisasinya atau jama’ah harus ada pemimpin baik orang hijrah maupun orang yang menerima hijrah, sehingga ada kesepakatan untuk membuat per-kampungan Muslim di Cihideng Way Jepara sehingga ada kesepakatan dengan anak-anak Jakarta sampai nama, struktur dan yang menerima Hijrah di sana. Sehingga yang bertanggung jawab menerima di sana Warsidi dan Usman, dan yang berhak untuk menghijrahkan Nurhidayat, Darsono dan Fauzi disebut Amir Musafir.

Maka dari tanggal 12-12-1988 itu menghijrahkan sampai tanggal 6-2-1989 itu menghasilkan kurang lebih 50 orang yang hijrah ke sana secara bertahap diantaranya keluarga Margono, keluarga Sukardi. Ridwan ber-pesan dalam pertemuan tersebut mengapa disebut Amir Musafir,

Amir sementara, Amir jalan karena di Indonesia banyak Amir. Takut dianggap menyaingi kelompok yang ada sehingga mempunyai ciri tersendiri, dan sifatnya sementara dengan tujuan tempat tersebut untuk konsolidasi pimpinan umat Islam yang terpecah-pecah dan untuk membicarakan perjuanganpun harus mempunyai tempat de facto kecil-kecilan yang tidak tersentuh oleh thogut. Maka ketika itu juga diupayakan adaptasi dengan mereka supaya tidak ada pertentangan di sana dengan mereka dan juga pakai KTP.

Setelah kurang lebih 2 bulan di sana menghasilkan jama'ah kurang lebih 300 orang baik dekat maupun jauh, termasuk dari kampus UNILA Ir. Muklis, Ir. Salamun (Muklis Syahid) dan kehadiran jama'ah di sana oleh masyarakat dianggap aneh karena dalam ajarannya: (1) Keluarga Berencana haram karena dianggap pembunuhan, (2) Larangan meng-hormat bendera karena lambang kemusyrikan.

Tentang peristiwa kejadian musibah politik Talangsari, ia menceritakan versinya sendiri. Hal ini dimulai setelah tak lama tercium oleh penguasa dan memanggil Pak Warsidi tapi karena punya pandangan mendatangi penguasa itu sesuatu yang tidak boleh (*umaro* yang harus mendatangi *ulama*). Warsidi tidak pernah datang. Kemudian karena Warsidi tidak datang diambil 9 orang anak buah Warsidi setelah beberapa hari kemudian ke Koramil dan tidak dipulangkan. Orang-orang jamaah di sana mengadakan persiapan untuk menghadapi tindakan kekerasan dari penguasa termasuk membikin panah dan ronda bergilir siang dan malam tua dan muda.

Setelah yang ditahan tidak dipulangkan tanggal 6-2-1989 Danramil dan Camat datang dengan jumlah kurang lebih 40 orang ke Warsidi dari pertemuan di rumah pihak Muspika merasa tidak dihargai sehingga sampai harus datang ke Warsidi dan pertemuan itu mengalami kegagalan, pihak keamanan membuang tembakan sehingga sampai jatuh korban dari pihak Warsidi. Karena merasa di-*dzolimi*. Sekalipun semut kalau diinjak akan melawan, maka dilawanlah sehingga pimpinan Danramil Sutiman di bacok oleh Marsudi, kakak dari Warsidi, dan yang lainnya kabur. Akibatnya yang lari itu melapor ke Kodim dan Korem, maka di-*steling*-lah wilayah itu dengan jumlah personil 1000⁶⁴ orang, sehingga orang yang keluar masuk kedaerah itu ditangkapi. Maka setelah itu pada jam 4 Subuh tanggal 7-2-1989 tanpa pemberitahuan dilakukan manuver militer dengan tembakan mortir kepada rumah-rumah penduduk kurang lebih 250 orang di daerah itu mati dan yang belum mati sekitar 50 orang dimasukkan juga ke dalam api, termasuk istri Sukardi dan anaknya mati ikut terbakar hangus, kebetulan Sukardi tidak sedang dilokasi. Walaupun ada perlawanan tapi apalah daya: hanya dengan panah yang jaraknya terbatas dan dalam radius itu desa-desa sekitarnya yang ada jama'ah Warsidi dihabsi dan yang tertinggal 24 orang, ditahan seumur hidup. 14 orang termasuk Pak Zamzuri dan Pak Maulana dari Siderejo.⁶⁵ Pak Muhidin, cucu dan menantunya habis di sana digusur pakai mobil, yang kedapatan masih hidup dan tidak terbakar Ridwan tidak dapat mengklafikasi yang jelas 250⁶⁶ orang habis, baik yang terbakar, dibunuh dan digusur.

Kemudian yang tertangkap hidup dipakai untuk mencari data dari mana sumbernya dan mereka menamakan "Front Mujahidin" mungkin karena ada nama itu dari yang ditangkap itu diinterogasi dan bocorlah pertemuan-pertemuan yang di Jakarta. Karena di Jakarta dianggap otak-nya sehingga dipandang perlu siapa yang terlibat. Sehingga pada tanggal 25-2-1989 diadakan penangkapan-penangkapan di Jakarta yang pernah mengadakan pertemuan di Cibinong. Ditangkaplah yang ada di Jakarta itu—di antaranya Sofyan, Kardi (yang ditangkap di Pangkalan Jati Pondok Gede) dan Nurhidayat.⁶⁷

Pada tanggal 6 Februari 1989 siang itu Ridwan tertangkap karena ada janji untuk pengajian, maka Ridwan datang ke rumah kontrakan itu sudah kosong, keluar dari rumah itu Ridwan langsung disergap oleh tentara yang sudah men-*steling* tempat itu. Hubungan Pak Ridwan awalnya dengan kasus Lampung ini adalah ia sering ke Jakarta dan mampir kerumah Pak Sulaiman Mahmud—seorang tokoh besar *Darul Islam* Aceh yang sekarang bermukim di Jakarta—dan Nurhidayat pun sering ke sana. Nurhidayat rupanya cukup proaktif menanyakan alamat Ridwan di Bandung. Dari alamat yang didapat Nurhidayat langsung ke rumah Saiful Malik—tempat kontrak Ridwan—maka diantarkanlah Nurhidayat ke rumah Ustadz Sofandi, maka Ridwan kejar ke sana. Di sana sudah mengadakan pembicaraan dengan Ustadz Sofandi, Muhidin dan Abdul Rahman. Agenda pertemuan itu dimana orang Bandung diminta untuk mendukung gerakan dengan isu ditubuh ABRI sudah terkotak-kotak dan Suharto sebentar lagi akan hancur.

Orang Bandung mempertahankan bahwa persoalan ini belum jelas dan orang yang datangpun belum jelas ketika Ridwan datangpun tidak kenal. Akhirnya Nurhidayat, Alek dan Dede Saefudin diperingatkan bahwa dalam Islam kalau mau bergerak, (1) Harus jelas motivasi untuk *Li'ila Kalimatillah*, (2) Harus ada komandan, *jihad* tanpa *imam* tidak sah, (3) Sasaran harus jelas dan alat perang harus ada, *masa'* mau *ngajak* perang tidak ada alat perangnya. Akhirnya tawaran itupun tidak diterima apalagi setelah Ridwan ditanya dalam forum tersebut kenal atau tidak, Ridwan katakan tidak kenal.⁶⁸

Tapi setelah mereka tidak diterima mereka menyampaikan undangan bahwa pada tanggal 12 Desember 1988 akan ada pertemuan di Jakarta. Karena Ridwan tidak kenal dengan Nurhidayat maka Ridwan mengecek ke Jakarta kepada Sulaiman Mahmud dan dia mengatakan bahwa ketiganya memang muridnya. Maka pada tanggal 12-12-1988 Ridwan ikut menghadirinya termasuk Fatah Kosim—bukan Abdul Fatah Wirananggapati—tapi beliau sempat diajak Ridwan ke Lampung tahun 1987 namun tidak berjumpa dengan Zaenal Arifin, anggota jamaah Ajengan

Masduki —seorang pemimpin *Darul Islam* yang masih aktif dan memiliki jumlah pengikut militan yang sangat banyak.

Pembicaraan di Cibinong itu ternyata mau membuat perkampungan Muslim dengan beberapa alasan: (1) Kita hidup di Jakarta beribadah campur yang *haq* dengan yang *bathil*. (2) Mempersiapkan kader, (3) Bukan untuk bergerak kecuali mereka dipaksa. Tapi Ridwan sendiri merasa kecolongan dengan adanya gerakan tersebut karena tidak sesuai dengan kesepakatan di Cibinong. Sebab setelah pertemuan di Cibinong itu Ridwan tidak pernah mengadakan kontak lagi dengan kawan kawan Cihideung. Sebenarnya karena tidak sesuai dengan rezim Soeharto —dan itulah bukti kekejaman— bahkan kawan sendiri yang tidak sesuai dengan konsepnya dibabat seperti Ali Sadikin dan H.R. Darsono.

Maka setelah itu Nurhidayat diacuhkan oleh anak buahnya —karena secara historik Rosul dan sahabat kalau berperang memimpin anak buahnya untuk berperang— tapi Nurhidayat tidak pernah. Sebab setelah kejadian baik di luar maupun di dalam dengan Darsono dan Fauzi pecah, respon sudah rendah dari anak buahnya dan akhlaknya kurang baik. Yang Ridwan ambil hanya yang baiknya saja karena Ridwan lihat waktu itu dia membuat “Front Islam”. Kemudian “Front Sabilillah” sehingga dia bisa turut membantu menangani kasus Lampung.

Sehingga tanggal 1 Juni 1998 Ridwan dengan Darsono dan 10 orang lagi—jadi berjumlah 12 orang—dengan perantaraan AM Fatwa, bertemu dengan Hendropriyono. Kami diajak bicara dan dia mengungkapkan bahwa dia merasa kaget kalau kami terlibat masalah Lampung pada hal itu tidak dalam agendanya itu kesalahan Kodam Jaya, jadi seolah-olah dia mengelak. Dia mengupayakan untuk merehabilitasi dan menawarkan kapal di Kendari. Kami pada waktu itu tidak menjawab, yang kami minta adalah untuk melepaskan kawan kawan kita. Dia menjawab bahwa dia tidak bertanggung jawab karena dia Mentrans. Kami menjawab bahwa dia bisa memberikan jaminan militer kepada Wiranto karena dia bekas Kasdamnya. Maka pada pertemuan kedua tanggal 5 Juni 1998 hari Jum’at dia membicarakan bahwa kawan kawan akan dibebaskan termasuk yang di Nusa Kambangan. Pada tanggal 5 Agustus 1998 dia membicarakan kalau kapal terlalu jauh maka dia menawarkan untuk menerima tambak udang di Lampung. Tapi karena harus bertemu dengan korban kasus Lampung dari pihak TNI akibat korban Warsidi sehingga kami bertemu dalam dua kubu dengan tujuan untuk di-*islah*-kan, setelah itu kami ditawarkan tambak udang sambil menunggu kawan-kawan yang dibebaskan.

Tanggal 20 Agustus Ridwan membawa 15 orang untuk ditrening di CPB (Central Perti Bahari) karena yang memelihara harus bisa dahulu. Akhirnya tanggal 1 Oktober 1998 Ridwan disuruh magang kerja menge-lola tambak udang ,tapi sampai pada hari ini Ridwan bicara bulan November 1999 tambak udang itu punya PT Center Prima Bahari di daerah Lampung, jadi kita sampai pada hari ini tidak dibiayai oleh Hendro dan pihak PT Bahari tidak mau membiayai karena itu tanggung jawab Mentrans. Dari pihak Lampung juga tidak mau diberi tambak karena dendamnya masih ada. Jadi ini bukti peristiwa Lampung masih terkatung katung.⁶⁹

Dengan tokoh Warsidi, Ridwan kenal akrab karena sebelum tahun 1987 ada hubungan langsung urusan NII —melalui Furson dan Wijayanto dari binaannya Abdul Qodir Baraja.⁷⁰ Dan, dia adalah salah seorang komandan wilayah perang DI Jawa Barat. Kasus Lampung ini “menular” hingga ke NTB karena Fauzi Isman setelah kasus Lampung ini dia pergi ke sana tujuannya untuk mencari tempat *hijrah*. Namun, yang sangat menarik dari semua itu adalah pengakuan Ridwan tentang adanya unsur-unsur intelegen yang memainkan skenario yang jahat terhadap umat Islam. Hal ini dianalisis olehnya berkaitan dengan Mafaid Harahap. Justru pertemuan semuanya di rumah Mafaid Harahap awal peristiwa Lampung—di Jalan Karet Kubur yang berakhir di Kalimalang— dan Ridwan curiga kenapa dia tidak ditangkap.

2. Muhammad Yusuf

Muhammad Yusuf lahir di Pandeglang Jawa Barat, 13 April 1963. Pendidikan yang ditempuh SD di Pandeglang tahun 1970-1976, SMP di Pandeglang tahun 1976-1979, SMA di Sukabumi 1979-1982/83. Dialah satu-satunya saksi yang paling dekat dengan dua hari kejadian Talangsari 1989 itu, ia ikut berperang dalam peristiwa yang kemudian ditinggalkan-nya. Penuturannya kepada penulis begitu lugas dan meyakinkan, sejauh yang masih bisa ia ingat dalam ingatannya yang sudah tidak segar lagi. Berikut ini wawancara penulis dengan Muhammad Yusuf:

Selama masa kecil atau masa sekolah, apa ada pengalaman belajar mengaji? Saya aktif mengaji di SMA, kebetulan saya sekolah di SMA Muhammadiyah di Sukabumi, itu ada acara kegiatan pengajian minggu-an sebelum pengajian bulanan. Sebagai aktivitas selama sekolah saja. Mendapat bimbingan pengajian dari ketua Muhammadiyah. Dari kemu-hamadiyah-an saja kita mendapat bimbingan dakwah, sebagaimana para pendahulu Muhammadiyah berdakwah. Selepas SMA bekerja di Nasional Gobel Cempaka Putih. Di Cempaka Putih itu saya bertemu dengan kawan-kawan yang memang aktif dakwah. Sejak tahun 1985 itu saya aktif di dalam kegiatan dakwah harakah DI yang dibimbing oleh orang Aceh yaitu ustadz Sulaiman Ma’fudz. Mulai dari situ, saya mengikuti dinamika dakwah-dakwah harakah, sehingga saya sampai bertemu dengan Abdul Fatah Wiranggapati dan saya diangkat sebagai ajudannya. Walau sering dimarah-marahi. Di situ Abdul Fatah Wirang-gapati, dirinya sebagai sosok dia sebagai tangan kanannya SM Kartosoe-wirjo. Dan dia memperkenalkan diri sebagai pelanjut kepemimpinan, yang saya ketahui juga dia sebagai KUKT, yang saya lihat di lapangan dia mencari kavling *infaq* sendiri. Waktu itu saya aktif pengajian di lingkungan Masjid Al Hidayah Serdang, Kemayoran tahun 1985-1989.

Bulan Januari sampai Maret saya berada di Lampung. Pada tanggal 7 Februari 1989 terjadi penyerangan oleh kelompoknya Kapten Inf. Sutiman. Tanggal 8 Februari 1989, kita (Warsidi dan jema'ahnya) dikepung pada waktu pagi pukul 5:00 WIB.

Selama pengajian bagaimana? Saya bertemu dengan Nurhidayat dan kawan-kawannya dan saya bergabung dengan kelompok Nurhidayat. Saya bertemu dengan Nurhidayat pada tahun 1986-1987. dua sampai tiga tahun perjalanan dakwah dengan Nurhidayat. Pada saya itu ke mana pun saya ikut dengan Nurhidayat. Ke mana pun Nurhidayat, di situ saya berada. Di kelompok Nurhidayat itu, saya banyak melakukan bimbingan-bimbingan dakwah yang lebih intensif lagi. Artinya dakwah terarah kepada pengajaran, bukan hanya *aqidah* yang kita tebalkan, tetapi juga mempersiapkan *mental*. Kemudian saya diperkenalkan dengan beberapa kawan, seperti Iskandar di Bekasi. Tidak saja secara finansial banyak membantu kita, tetapi juga secara moral sangat membantu kita dalam hal pergerakan ini. Terus kemudian pada tahun itu juga (1986-1987) saya bertemu dengan kru-krunya Abdul Fatah Wiranggapati, seperti Pak Khalil, Zainal Arifin. Mereka sebagai saksi-saksi hidup pergerakan DI/TII. Nampaknya Zainal Arifin juga sebagai saksi hidup *kasus Idul Adha* di Masjid Istiqlal beberapa puluh tahun yang lalu di masa Presiden Soekarno itu. Saya sering bertemu dengan dia. Zainal Arifin orang dari Jawa Barat. Terus kemudian pada tahun itu juga bertemu dengan orang yang mengaku dirinya orang dari Timor Timur. Yang merencanakan mendirikan negara Islam di Timor Timur. Dan berdiri tahun itu. Dia tokoh Negara Islam Timor. Saya lupa namanya. Orangnya kurus, setengah tua. Kalau ke mana-mana jalan kaki, tidak menggunakan kendaraan. Dia banyak memberi tahu tentang ketatanegaraan Negara Islam Timor Timur. Saya ke Way Jepara, Lampung. Di sana saya berkumpul dengan kawan-kawan. Kawan terdekat saya di sana adalah Heri Firdaus, dengan Heri Firdaus. saya berangkat dari Jakarta menuju Lampung. Kemudian saya bertemu dan berkumpul dengan Alex, Margono, Sofan (alias Sofyan). Di Lampung itu kami mempersiapkan senjata panah beracun dua-tiga minggu yang dirancang oleh Pak Alex sendiri. Tentang ramuan racun itu saya belajar dari Pak Alex. Dan pengetahuan tentang racun ini untuk daerah Pandeglang waktu itu belum saya wariskan, bahkan untuk daerah Jakarta pun belum saya wariskan. Hanya beberapa orang saja bisa bikin racun ini.

Bagaimana tentang panah-panah yang ada di Jakarta? Pembuatan panah di Jakarta itu belakangan, setelah pembuatan dari Lampung. Pembuatan panah di Jakarta itu dikerjakan di rumah Iskandar. **Kapan pembuatan panah itu?** Masa pembuatan panah itu selama satu bulan. Antara dua sampai tiga minggu. **Kapan Pak Yusuf datang ke Cuhideung Lampung?** Pertengahan bulan Januari 1989. **waktu pertama datang, Pak Yusuf langsung ke mana?** Saya mampir ke rumah orang tuanya mas Heriyanto Yusuf, pagi itu saya diantar oleh saudaranya mas Heri itu sendiri ke Way Jepara, dukuh Cihideung. Di sanalah saya membuat panah langsung. Pak Alex sudah ada di situ. Di situ, sewaktu membuat panah terjadi intimidasi dari aparat keamanan.

Waktu Pak Yusuf pertama datang, rumah dan keluarga yang ada di lingkungan jama'ah Warsidi di Cihideung ada berapa? Saya tidak tahu persis. Yang jelas sudah ada beberapa keluarga, sebelum orang-orang dari luar datang. keluarganya Pak Warsidi, keluarganya Pak Imam Bakri, keluarganya Pak Jayus, keluarganya Pak Marsudi, dan ada lagi saya lupa. Kurang lebih antara lima sampai enam rumah yang didiami oleh keluarga. **Berapa banyak Para pendatang?** Sedangkan para pendatang itu diperkirakan kalau dalam masjid pada waktu shalat sekitar kurang lebih 5 (lima) shaf. Kalau satu shaf 15 orang. Jadi kurang lebih 75 orang. Yang bujangan laki-laki dan perempuan diperkirakan sekitar 30 % (tiga puluh persen). Karena pada saat itu juga status saya masih bujangan. **Masih ada yang berdatangan lagi?** Sejak peristiwa itu tidak ada lagi berdatangan para pendatang dari luar yang *hijrah*. **Kira-kita Pak Yusuf tahu atau tidak jumlah kaum wanitanya berapa?** Sekitar antara 30-40 (tiga puluh sampai empat puluh) orang wanita yang gadis. 50 (lima puluh) orang yang sudah berkeluarga dan janda. Tambah dengan anak-anak dan bayi. Mas Kandi dengan istri dan dua orang putrinya. Margono putrinya tiga. Alex bersama istri dan dua orang anaknya. Di sana kurang lebih 10-15 bayi. 20 anak-anak.

Apa kegiatan di sana? Apa Cuma membuat panah saja? Ya. Cuma membuat panah saja. **Untuk apa panah-panah itu dibuat?** Untuk jaga-jaga dari kemungkinan buruk terjadi, kalau kita diserang oleh orang-orang yang tidak menyukai kehadiran para pendatang di sana. Semata-mata untuk pertahanan jamaah, apabila datang serangan tiba-tiba dari orang-orang luar. Karena tidak adanya senjata yang dapat diandalkan di lingkungan jama'ah. **Siapa saja di antara jama'ah yang mengecap pendidikan tinggi?** Usman Insinyur Pertanian Bogor dan istrinya Sarjana Teknik Kimia. Pak Fauzi juga. Temannya Pak Suryadi. Jadi bukan jama'ah primitif. **Berapa anak panah dan busur yang dibuat?** Jumlah anak-anak panah yang dibuat mencapai 500 (lima ratus) anak panah dan 75 (tujuh puluh lima) busur berupa ketapel untuk 75 (tujuh puluh lima) orang. Anak panah itu kita buat dari jari-jari sepeda motor, kemudian dilengkapi ujung anak panah itu dengan timah cor. Karena timah mudah dipanas-kan di dalam panci. Panahnya sendiri mudah ditarik, tetapi akan tertinggal racunnya. Panah itu dibuat dengan sangat sederhana sekali. Pak Alex sebagai perancang juga sebagai peramu racun. Pak Alex juga orang yang selalu berdzikir. Yang lama adalah proses memasukkan ramuan beracun itu, itu sampai empat puluh hari di dalam tanah. Bahan-bahannya kami rahasiakan sampai sekarang. Karena khawatir mudah digunakan untuk tujuan-tujuan lain. Ramuan itu bahan-bahannya mudah didapatkan karena tersebar di mana-mana dan biasa dipakai untuk obat sehari-hari. Bahannya banyak. Sepulangnya dari Lampung, saya pernah dibawa ke LBHI oleh Bang Mulyana dan kawan-kawannya. Pada saat

itu Ketua umum YLBHnya Abdul Hakim Garuda Nusantara. Waktu itu saya diwawancarai sebagai saksi mata setelah peristiwa itu, tetapi saya tetap mengelak untuk memberitahukannya dan saya memosisikan diri sebagai *survey printing* di sana, karena mereka bukan kawan kita. Karena paman saya punya percetakan di sana. Walaupun pada akhirnya sampai seka-rang pun saya tidak pernah bertemu dengan paman saya.

Apakah wanita juga memakai busur katapel dan panah? Kaum wanita hanya konsentrasi kepada pendidikan anak-anaknya. **Bagai-mana kejadian tanggal 7-8 Februari 1989?** Waktu kejadiannya pada hari Minggu dan hari Senin tanggal 7-8 Februari 1989 tidak lama. hari Minggu, 7 Februari 1989 itu kelompoknya Pak Camat berikut Kades dan kelompoknya Danramil Kapten Inf. Sutiman. Mereka datang ke sana. Dan saya ada menyaksikan peristiwa itu di sana. Mereka menggunakan kenda-raan satu mobil jeep dan enam sepeda motor. Jika 4 (empat) orang dalam satu mobil jeep dan satu motor 2 (dua) orang, maka mereka seluruhnya berjumlah 16 (enam belas orang) orang. Mereka menyerang dahulu. De-ngan tindakan itu pihak keamanan mengharapkan kita menyerang. Mereka memberondong kami dengan senjata-senjata pistol mereka. Tidak bisa dihitung berapa kali mereka melepaskan tembakan senjata pistol. Lalu kita balas menyerang sehingga Kapten Inf. Sutiman terkena anak panah pada langit-langit mulutnya. Lalu Pak Marsudi membabat Kapten Inf. Sutiman lehernya sehingga hampir putus dan tewas di tempat. Yang menjadi korban di pihak aparat hanya Kapten Inf. Sutiman saja, sedang lainnya melarikan diri. Satu-satunya kawan kita yang terluka adalah Heri Firdaus. Pada akhirnya kendaraan jeep itu lari dan tidak dapat kita rebut. Yang dapat kita rebut hanya 3 (tiga) kendaraan sepeda motor. Mereka lari karena keterbatasan peluru. Mereka tidak sanggup menghadapi kami di sana. Pada malam harinya kita mengadakan siskam-ling selama satu malam di sekitar wilayah waktu itu. Dan tidak terjadi apa-apa. Saya bilang kepada kawan-kawan, “Kali ini kok terasa suasana-nya lain.” Saya melihat langit cerah, bintang berkelip-kelip. Angin bertiup begitu indahya. Sepertinya besok akan terjadi apa.

Hari Senin tanggal 8 Februari 1989. Ketika pagi-pagi sekali, waktu sebelum shalat subuh. Saya dengar dari kawan-kawan. Dia bilang, “Mas, saya melihat tadi dari sana, dari arah barat itu. Sorotan baterai yang terus menerus”. Saya bilang, “Itu mungkin orang-orang yang hendak menengok kebunnya atau sawahnya. Bukan sesuatu yang harus kita khawatiri”. Sehabis shalat subuh. Saya turun ke sawah sebagai kegiatan rutin dengan cari bahan-bahan untuk ramuan-ramuan membuat racun yang ada di sekitar situ, kawan-kawan sering menangkap seperti kodok dan lain-lain. Pagi-pagi itu perkampungan itu ternyata sudah dikepung. Kurang lebih beberapa ratus tentara yang mengepung kita. Enam buah truk diparkir untuk mengepung. Mereka masing-masing dipersenjatai dengan M-16 lengkap dengan peluru. Pelurunya teruntai di kanan kiri badannya seperti *Rambo*.

Pada saat itulah saya ikut bermain. Pada akhirnya pulang dari sawah saya ikut bermain untuk melihat-lihat. Kemudian pada saat penyerangan, saya ikut bermain. Ada seseorang, ia berjalan mencurigakan. Saya tidak berpikir kalau itu adalah tentara yang diperlengkapi dengan senjatanya. Pada saat itu juga, pada 5:15 WIB, saya mendengar letupan peluru, yang ternyata itu adalah sebagai sandi komando mereka untuk menyerang. Tiba-tiba ketika sesampai saya di ujung jalan yang memasuki perkampungan ini. Berondongan di tengah kampung. Yang pertama kali *syahid* adalah Warsidi sendiri ditembak. Dan itu kejadiannya dengan penyerbu-annya. Penyerbuan itu dengan kekuatan sekitar 300-400 personil.

Berapa orang yang tewas yang anda sempat saksikan sendiri? Yang saya ketahui dari perhitungan mereka itu saya tidak melihat. Itu saya mendengar angka sampai dengan 27 orang yang meninggal di situ pada hari itu, itu yang prianya saja. Belum lagi, ibu-ibu dan anak-anak, remaja, kakek jompo serta bayi-bayi yang mati terpenggang api di tempat itu. **Apakah ada korban dari pihak militer?** Sampai saat itu saya belum melihat adanya korban dari pihak militer. Lama terjadi pertempuran. Sekitar Jam delapan, saya lari ke belakang terus saya duduk sejenak di kebun jagung. Saya duduk di kebun jagung. Kemudian saya melepaskan sarung dan panah saya, menyeberang rawa-rawa. Turunan. Sehingga saya masuk ke suatu kampung. Di kampung itu karena belum sarapan, saya sempat mampir di rumah salah satu penduduk yang ternyata orang Bali. Saya minta minum di situ dan ngobrol-ngobrol. Saya pura-pura tidak tahu tentang kasus itu. Saya tanya kepada dia, “Ada apa sebenarnya pak di sana. Saya tidak tahu apakah ia beragama Hindu atau tidak yang pasti ia tidak benci kepada kita. Dia hanya bilang, “Itulah yang diperangi oleh tentara itu. Saya tidak tahu mereka maunya apa.” Saya bicara-bicara sedikit kepada mereka. Saya bicara bahwa mereka mungkin menuntut keadilan. Mungkin bapak itu merasakan hal yang bagaimana mereka memperlakukan bapak di sini. Pada saya itu juga saya bertemu dengan anaknya Pak Salikun yang bernama Sidik di rumah itu juga. *Wallahu Alam*, bagaimana caranya Allah mempertemukan saya. Sidik berusia ± 12 tahun baru kelas 5 SD. Dia minta sama saya, ”Bang tolong antar saya pulang. Saya mana tahu jalan di sini.” “Ya okelah, ikuti saya saja”, jawab saya. Saya jalan dengan dia, hanya berbekal niat mengantarkan dia pulang ke rumahnya. Saya pulang dengan dia apa adanya. Makan pun makan kelapa muda di perjalanan mengantarkan dia pulang dari para petani penduduk di sekitarnya itu.

Waktu anda lari, apa nggak takut ditangkap karena dalam keadaan perang?

Atribut saya saya lepas semua, agar saya tidak membawa suatu ba-han yang mencurigakan mereka. Itu setelah terjadi pembakaran. Pembaka-ran itu sendiri terjadi sekitar jam delapan. Pembakaran rumah-rumah itu, baik itu rumah Pak Imam Bakri, Pak Warsidi, dan semuanya itu di

satu kampung itu terbakar hangus, sehingga tidak ada yang tersisa barang satupun di sekitar situ. **Berapa orang yang tertangkap?** Persisnya saya tidak tahu berapa orang yang tertangkap. Tentang catatan pada peristiwa itu. Dulu saya minta izin dulu kepada Pak Warsidi. Bisa dijadikan bukti. Nggak usahlah mas Yusuf. Jadi, nanti dia bilang, itu bisa dijadikan barang bukti oleh mereka. Kita adalah sebagai pengacau keamanan di sini. Jadi itu tidak harus dibuat. Saya urungkan buku itu. Sehingga sampai saat ini tidak ada sesuatu catatan yang berarti yang bisa dijadikan bukti yang tercatat.

3. Tardi Nurdiansyah

Tardi Nurdiansyah lahir di Karanganyar, 9 November 1977, Solo, Jawa Tengah. Pendidikan terakhirnya di Pondok Pesantren Ngruki Solo Jawa Tengah. Menurut penilaiannya, “Ada yang mengatakan bahwa gerakan Lampung ini adalah gerakan orang yang tidak mengenal Islam. Baginya sebagai muslim, tuduhan Jaksa itu sangat hina sekali, tapi kami di Lampung padahal sangat tulus dan ikhlas melakukan bakti karena Allah SWT sesuai dengan pola pikir ketika itu”.⁷¹

Dia berkenalan dengan tokoh-tokoh yang terkait Gerakan Lampung semasa di Jakarta Utara dan di Lampung. Bahkan dia sudah saling mengenal dengan baik dan akrab pada Pak Warsidi. Kemudian memu-tuskan untuk menetap di Lampung. Tardi berdiam di rumah kakaknya di Cihideung, Talangsari. Dengan bekal ilmu dari pesantren dia mengajar mengaji di daerah tersebut. Dia merasakan senang tinggal di sana, karena suasana Islami seperti di Pesantren Ngruki Solo.

Gerakan keagamaan yang dilakukan Warsidi itu menurutnya adalah gerakan untuk membangun masyarakat dengan suasana Islam, tidak ada tujuan untuk memberontak terhadap pemerintah. Yang jelas menu-rutnya, bahwa gerakan pengajian itu untuk menuju *mardhatillah*⁷², walau-pun tidak ditunjang penuh oleh kemampuan agama Warsidi yang tidak sehebat ulama di Solo. Tapi tujuannya sudah baik, Warsidi ingin menegak-kan syariat Islam. Namun karena sifat pengajiannya yang agak eksklusif mengakibatkan aparat menduga bahwa gerakan itu adalah gerakan perlawanan terhadap pemerintah.

Menurut Tardi, dalam kasus Talangsari ini sebenarnya tidak diren-canakan sebagaimana pernyataan pemerintah. Kasus ini sifatnya insiden atau musibah saja, karena ada miskomunikasi maka terjadilah tragedi Talangsari tersebut. Padahal masyarakat setempat tidak ada niat sedikitpun hendak melawan pemerintah. Pada saat kejadian, sebenarnya Tardi kebe-tulan tidak ada di tempat. Dia sedang berada di Rajabasa dan dalam perjalanan pulang ke Cihideung menemui kakaknya. Namun kenapa ketika sampai di daerah Talangsari dia ditangkap oleh aparat keamanan. Maka pada waktu penangkapan terjadilah insiden kekerasan itu. Tardi mengalami perlakuan yang tidak sesuai dengan hukum. Padahal dirinya tidak tahu menahu tentang perlawanan rakyat itu, dan dirinya langsung dibawa ke Kodim.

Sesampai di Kodim, Tardi diinterogasi oleh tentara Kodim. Selanjutnya setelah beberapa lama dalam sel dibawa ke Korem Gatam. Selama di Korem, Tardi ditanyai banyak oleh tentara tentang kakaknya. Ada terbetik kabar bahwa kakaknya telah meninggal tertembak di lokasi kejadian Cihideung pada waktu operasi penggerebekan. Berdasarkan kedekatan-nya dengan pengajian Warsidi itulah maka oleh aparat Tardi diperkirakan sebagai aktivis Islam gerakan Lampung. Uniknya dalam penangkapan itu tidak diberitahu dasar hukum apa sehingga ditahan selama itu. Dalam proses pemeriksaan di Rajabasa itu kurang lebih selama 1 (satu) bulan di Korem.

Selanjutnya perkara tentang dirinya di limpahkan ke pengadilan. Pada saat sidang di Tanjung Karang yang tanpa pembela itu dia meng-hadapi tuntutan hukuman mati dan penjara hukuman seumur hidup. Tardi dituduh merongrong pemerintah yang sah dan menghina aparaturnegara dan dipojokkan secara politik., bersama dengan 17 orang lainnya dari Lampung dan Jakarta ditahan di Nusakambangan.

Waktu mengalami pemeriksaan verbal di Lampung, Tardi sempat bertemu dengan aparat keamanan. Dalam perjumpaan itu ada proses dialog yang menanyakan perihal kejadian Talangsari. Karena jawaban-nya tidak tahu, akhirnya dkembalikan ke sel kembali. Namun selama proses tersebut tidak ada tindak kekerasan. Dalam perkembangan lebih lanjut, tatkala bertemu dengan oknum aparat yang lain, Tardi mengalami berbagai penghinaan/penyiksaan yang luar biasa, sampai badan tidak merasakan lagi bagaimana sakitnya dan darah berceceran akibat penyik-saan.

Tardi merasakan bahwa ada kalanya proses tindakan penyidikan itu betul-betul terlalu mengabaikan hak asasi manusia (HAM). Padahal kalau dilihat dalam status hukumnya haruslah mengacu kepada proses hukum praduga tak bersalah. Pada waktu penangkapan, tidak ada surat penangkapan. Malah yang ada penggebu-kan dan tindakan kekerasan. Jadi yang Tardi alami hanya itu, di luar dari aturan hukum yang berlaku. Yang jelas negara ini adalah negara hukum, apakah hukum itu berlaku? “Yang pada kenyataannya hukum telah tercampakkan oleh aparat yang tidak manusiawi.”⁷³

Terhadap perlakuan aparat keamanan yang semena-mena itu, Tardi tidak memiliki rasa dendam. Menurutnya, “kita tahu, aparat militer itu apa kata pimpinan dan saya lihat Pak Hendro dan kami memiliki kemau-an untuk *ishlah*. Pak Hendro ada kemauan untuk *ishlah*.” Ditambah-nya, karena kedua belah pihak telah mendapatkan korban, ia secara pribadi tidak ada perasaan dendam, tapi tidak menutup kemungkinan kalau dari yang lain untuk menuntut itu

terserah. Yang jelas dengan diprosesnya dia di pengadilan, masyarakat merasa senang karena mengetahui kejadian sebenarnya, di mana orang takut terhadap Presiden Soeharto, kita tantang ketakutan itu dan masyarakat respon terhadap kita. Ketika orang takut dijerat kasus subversif, kita tantang itu karena bagaimanapun masyarakat akan hidup dalam suasana demokrasi, kalau salah dijerat dalam kasus subversif.”⁷⁴

4. Arief

Arief lahir di Sidorejo, ketika terjadinya peristiwa Talangsari ia berusia 18 tahun. Yang ada dalam gambarannya tentang kejadian itu adalah suasana perang. Saat itu, tepatnya tanggal 7 Februari 1989, ia melihat telah terjadi bentrokan antara tentara dengan anggota jama'ah Warsidi, yang satu menggunakan senjata dan yang lainnya dengan memakai panah-panah beracun. Karena keberadaannya di tempat lokasi kejadian, maka bisa dikatakan bahwa dirinya merupakan saksi hidup yang melihat secara langsung peristiwa itu.⁷⁵

Ia sadar betul bahwa yang terjadi di desa Talangsari itu merupakan pengalaman pahit bagi dirinya. Untuk itu, sembilan tahun lebih peristiwa pahit itu dipendam dalam bathinnya, dan berusaha dengan susah payah dihilangkan dalam memorinya. Baginya peristiwa tersebut memberikan bukti nyata begitu mudahnya orang berbuat kekerasan apakah itu pihak militer maupun warga jama'ah Warsidi sendiri, padahal pada saat kejadian ia baru satu malam di pedukuhan Cihideung. Mungkin yang paling disesalnya adalah kecerobohan dan sikap keterlaluhan dalam menantang negara yang dilakukan oleh para tokoh tragedi ini dari Jakarta.

Jauh sebelum peristiwa terjadi, kejadian-kejadian kelam tidak nampak dalam kehidupannya. Ia tumbuh seperti anak-anak desa umumnya secara wajar, bermain dan bercanda. Tidak pernah dalam pikirannya akan mengalami hal-hal di luar jangkauan pikirannya, karena dirasakan ketika itu dia hidup di daerah yang aman-aman saja. Bahkan ketika menginjak usia 9 tahun, ia masih bisa menikmati bangku sekolah. Ia duduk di bangku sekolah kelas 4 SD. Di samping kegiatan di SD, ia juga aktif menjadi santri di Pondok Pesantren Al Islam pimpinan Muhammad Usman.

Siapa sangka bahwa musibah akan menimpanya, karena memang musibah itu datang tanpa diketahui sebelumnya kepada siapa dan kapan. Tepatnya, pada hari senin tanggal 6 Februari 1989 sekitar pukul 17.00 WIB, ia bersama rombongan dengan menggunakan dua truk mobil datang ke Cihideung untuk mengikuti pengajian akbar. Malam itu ba'da Maghrib sampai dengan menjelang isya, ia mengikuti pengajian bersama dengan jamaah lainnya. Setelah itu dia dengan rekan-rekan sebayanya disuruh untuk tidur.

Pada subuh harinya, Selasa, 7 Februari 1989, ia mendengar suara tem-bakan. Akibat desingan peluru yang amat keras membuat ia bangun dari tidurnya dan kemudian keluar untuk melihat apa gerangan yang sedang terjadi. Ketika ia sudah berada di luar rumah ternyata yang ia lihat adalah bentrokan antara tentara dengan jamaah. Suasana ketika itu persis seperti kejadian “perang” saja. Ketika sedang berkecamuknya “perang”, kemudian ia mendengar suara dari seorang jama'ah yang menyuruhnya masuk ke rumah. Lalu tanpa bertanya-tanya lagi ia pun menuruti perintah jama'ah tersebut. Rumah yang dimasukinya hanya berselang satu rumah saja dengan musholla Mujahiddin. Di dalam, ia bertemu dengan istri Abadi dan anak-anak seusianya. Mereka berada di sana kurang lebih 3 jam. Di balik persembunyiannya itu sayup-sayup ia mendengar suara orang meneriakkan “Allahu Akbar” dan suara tem-bakan. Dari bilik dinding rumah itu ia mengintip dan menyaksikan bentrokan itu masih terus terjadi.

Namun selang beberapa jam kemudian suasana berubah hening. Dalam suasana yang seperti itu Arief hanya cuma bisa berharap bahwa semoga Allah memberikan pertolongan kepadanya. Tidak lama kemudi-an ia mendengar seseorang memberikan aba-aba hitungan. “Saya hitung sampai 3, jika tidak keluar, rumah ini dibakar,” katanya. Mendengar itu, istri Abadi menyuruh Arief dan lainnya ke luar. “Dik, kamu ke luar saja, Masa Depan kamu Masih Panjang.” Ia bersama rekan yang lainnya keluar lewat pintu belakang, berlari, merunduk dan sesekali tiarap. Pada saat itu ia melihat banyak mayat bergelimpangan dan masih ada yang sekarat. Bahkan sempat menyuruh seseorang yang sekarat untuk mengucapkan Istigfar dan Syahadat. “Pak, *Istigfar*, Ucap *Syahadat*,” katanya. Selanjutnya mereka terus berlari ke arah kali beringin.

Sesampai di sana, kami memceburkan diri dan berendam, sesekali menyelam, sesekali menonggokkan kepala. Di saat itu juga, saya melihat 2 orang melakukan hal yang sama dalam kondisi tertembak. Waktu itu, tinggi air sedagu Saya. Karena merasa tidak tahan, 3 orang dari kami mencoba keluar untuk menjelamatkan diri dengan cara berenang. Tetapi tidak lama, Mereka ditangkap oleh tentara. Saya dan satu orang kawan usia mencoba untuk bertahan. Tapi karena sudah tidak tahan, kami mencoba bergerak berenang dengan cara melawang arus. Sama seperti 3 orang sebelumnya, kami pun tertangkap oleh tentara. Spontan saya sempat angkat tangan tanda menyerah. “Tidak usah angkat tangan.” Kata salah seorang anggota tentara. Kemudian saya dibawa melewati lokasi semula. Di sana saya melihat banyak mayat dan rumah-rumah sudah terbakar.

Saya beserta dengan yang tertangkap lainnya, dibawa keluar lokasi. Kami dikumpulkan berdasarkan umur disalah satu rumah penduduk. Kawan-kawan usia yang ada ibunya dijadikan satu. Kami disuruh duduk. Saya pikir kami mau ditembak, ternyata saya dan lainnya malah diberi uang recehan. Tidak tahu apa maksudnya.

Kami diangkut dengan mobil tentara dan dibawa entah kemana. Perjalanan diperkirakan memakan waktu 1 jam. Sesampainya tempat yang dituju ternyata tempat penjara, Saya dimasukkan ke dalam sel berlima dengan yang seusia saya. Saat akan masuk ke penjara, tahanan yang lain-nya mengata-ngatai kami sebagai GPK atau PKI. Saya dipenjara selama satu minggu. Kami yang tadinya berlima, karena yang dua menangis mencari ibunya.

Dari penjara, kami dibawa ke salah satu kompleks tentara. Di sana, kami diberikan pengarahan bahwa kami akan dibawa ke Pelabuhan Bakauheni untuk menunggu pelarian GPK. Selanjutnya kami dibawa lagi yang saya tahu kemudian kompleks tentara lagi. Sama seperti sebelumnya, kami diberi pengarahan yang sama. Dan untuk itu, kami akan dibagi seperti shift kerja. Salah satu orang anggota tentara sempat berkata dengan saya, “Dik, Kalau lihat Anggota GPK, kasih tahu Bapak, ya.”

Selam 24 jam secara bergantian kami menunggui orang-orang yang dianggap pelarian. Saya tidak pernah menunjukkan orang, walau ada satu yang saya kenal. Sedangkan kawan saya yang satunya bernama Abas, banyak menunjukkan orang. Setiap yang ditunjuk, pasti ditangkap aparat. Dan dibawa ke kompleks tentara tersebut. Terhadap orang-orang yang ditangkap, Mereka diinterogasi, disiksa dalam bentuk dipukul dengan tangan, dihantam senapan, disudut rokok, perempuan berjilbab dipaksa lepas dan yang laki-laki hanya memakai celana dalam. Saya tidak tahu dibawa kemana orang-orang yang ditangkap tersebut.

Di Komplek Tentara dan Pelabuhan Bakauheni, kami beberapa hari lamanya. Dan setelah operasi penungguan pelarian dianggap selesai, kami ditanyai alamat rumah. Saya tidak tahu rumah orang tua saya. Tetapi saya menjebut salah seorang saudara yang ada di Way Jepara. Saya sempat ditawarkan untuk menjadi anak oleh seorang anggota tentara tetapi saya tidak mau.

Dari kompleks tentara, kami dibawa pergi dengan menggunakan helikopter. Selanjutnya saya dibawa ke Makorem 043/Gatam. Saya terpisah dengan 2 orang kawan saya. Tidak tahu kemana mereka dibawa. Di Makorem 043/Gatam, Saya menginap satu malam. Keesokan harinya, saya dibawa ke Way Jepara. Setelah sampai, saya tidak langsung ditawarkan ke tempat Saudara saya. Saya menginap satu malam di Makoramil Way Jepara. Keesokan harinya, saya baru diantarkan. Setelah saya ditawarkan ke rumah Saudara saya, hampir setiap 2 bulan sekali, anggota koramil Way Jepara mengecek keberadaan saya atau sesekali saya dipanggil ke Makoramil. Dalam kedatangannya, kadang-kadang saya dibawakan oleh-oleh seperti baju atau diberi uang, sedang saya sendiri melanjutkan sekolah di tempat semula. Dan setelah lulus SMP, kunjungan tersebut tidak pernah lagi. Belakangan saya baru mengetahui, ketika saya ditangkap, seluruh saudara dari orang tua angkat diperiksa oleh tentara. Mereka diinterogasi berkaitan dengan keberadaan saya di lokasi Cihedeung dan sejauh mana keterlibatan saya.

Dalam pergaulan sehari-hari, baik dengan kawan di sekolah atau di rumah, saya terkadang mendapat ejekan. “Hei, kamu anggota GPK, ya.” Atau, “Kamu, PKI, ya.” Saya tidak menanggapi ejekan tersebut. Karena saya tahu mereka tidak mengetahui keadaan sebenarnya. Tapi, kadang-kadang Saya membantah ejekan tersebut dengan ucapan, “Kalau tidak tahu. Jangan ngomong.”

Saya ini tidak lagi bersekolah karena tidak sanggup biaya. Saya sebenarnya masih ingin sekolah. Bila memungkinkan sampai menjadi Sarjana. Padahal, kata orang tua angkat Saya, dulu katanya biaya sekolah saya akan ditanggung oleh pemerintah. Tapi ternyata tidak.

Saya ingin peristiwa tersebut diungkap lagi. Para pelaku pembunuhan diusut dan dihukum. Biar semuanya menjadi jelas dan terang.

Saat ini, Saya mendapat amanat untuk mencari anak Muhammad Usaman yang bernama Muhammad Faruk. Waktu itu, usianya kira-kira baru 3 Thn. Terakhir saya melihat waktu berjalan bersama-sama dengan orang-orang yang ditangkap ke rumah salah satu penduduk, Muham-mad Faruk digandeng oleh salah seorang anggota Tentara. Tetapi saya tidak tahu namanya. Saya yakin Muhammad Faruk masih hidup sampai sekarang.

Demikian kesaksian ini Saya sampaikan sesuai dengan yang Saya alami, Saya ketahui dan Saya lihat.

5. Masudi

Dihukum kurang lebih 7 tahun di Cihedeung. Tempat tanggal lahir di Siderejo 10 Oktober 1920, waktu itu masih hutan. Pendidikan SD Ma-drasah, SMP Tsanawiyah, waktu itu (waktu kejadian) masih kelas tiga. Pertama kali ia dibina oleh Kardi, Herdiawan, Murdiawan, Mursyid, Abdullah Abdurrahman, Ir. Usman.

Sewaktu ditangkap bersama 5 orang oleh Koramil tanggal 5 Februari 1989. Saya (Masudi), Herdiawan, Diman, (calon) Ir. Usman langsung dibawa ke Koramil dan langsung dipukuli dan digebuki oleh Koramil dan terus dikirim ke Kodim. Jadi tidak mengetahui peristiwa 7 Februari 1989. Itu waktu saya mengasih penjelasan selama diproses itu sama saya berangkat dari Siderejo berapa orang sampai di sana jam berapa terus pengajian terus ditangkap. Ya karena kenal jalan, teman saya yang termasuk ditangkap lima orang itu semuanya masih hidup. Saya, Her-diawan, Diman. Yang empat itu sebaya, yang satu agak dewasa, nama-nya Herdiawan itu. Dia sudah lama ikut di situ.

Di Kodim ia disiksa, dipukul, ditarik-tarik, diinjak pakai kursi, digencet jempol kaki pakai sepatu, dipopor pakai bedil, kepala digebuk, seujur tubuhnya, termasuk pakai kayu sampai patah dua terus dimasukkan di sel sebesar 1 meter. Tidur, kencing, shalat di ruang itu di Kodim Metro

Lampung. Yang periksa dan yang memproses ganti-ganti dan pakai baju preman. Lihat matanya saja tidak boleh, lihat wajahnya terus dipukuli. Di Korem 403 disiksa juga. Waktu diproses saya sudah mengantuk, sama seperti waktu di Cihideung tapi pihak pemerintah/ABRI itu yang memproses saya tidak juga percaya, ya main pukul main siksa. Di Korem itu lama. Saya di Korem 403 itu tempat proses kalau sore dibawa ke lembaga gelar Pramuka di Rajabasa kalau sore itu. Tapi kalau mau diambil dari lembaga itu tidak pakai berdiri tapi harus merangkak di LP Rajabasa. Di LP itu tidak disiksa, tapi kalau mau keluar dari LP itu harus merangkak di kerikil mau keluar LP selama 7 bulan.

Saya sering ditanya, apakah jama'ah Warsidi itu shalat telanjang? istri kamu, ya istri Warsidi? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu sengaja dituduhkan, dari penduduk kampung yang tidak senang kepada jama'ah Warsidi. Padahal, pelajaran agama di sana baik menurut Islam. Tidak ada untuk melenceng dari Al Qur'an dan Hadits. Waktu itu saya berumur 15-16 tahun. Nama saya diganti Mujiana, karena takut membawa nama yang asli untuk keluarga saya yang di rumah karena keluarga saya tidak tahu mereka turut menanggung resiko. Selain *Ibtidaiyah* itu ikut pengajian ikut di mana. Ya, *Ibtidaiyah*nya itu ya di sini masuk di Al Barokah, terus ya di *Madrasah* ini saya dipecah oleh guru saya karena terlambat setiap hari karena ikut pengajian di Cihideung, di sana ngaji berapa lama kemudian kejadian. Ya adalah. Ikut pengajian selama satu sampai dua bulan. Itulah pak tapi tidak terus menginap, kadang pulang tapi saya pakai sepeda lewat hutan. Jarak tersebut ditempuh selama tiga jam.

Saya ingin sekolah sampai tamat. Makanya setelah saya pulang masyarakat banyak yang mengejek, yaitu yang membuat saya tidak kuat. Sampai ada apel segala kok di Jagur baya setelah bebas itu tiap minggu apel. Saya protes, saya minta apelnya di sini, lalu apelnya di sini. Lalu waktu mau pindah saja lapor kebaikan polisi ke tempat ke Kecamatan saudara.

Ya kalau saya ketika itu masih dini, termasuk masih kanak-kanak. Itu pengajian dari mulai makan minum secara Islami di Cihideung. Makan sendiri-sendiri. Kalau pakai tangan kanan ya secara Islami. Itu juga kalau merokok waktu di kebon lada pak Warsidi merokok. Tidak ada yang sesat. Kalau bagi saya walaupun baru lima belas tahun bagi saya menilai mengajarkan Islam kepada saya itu tidak ada melesetnya. Benar tidak ada melesetnya. Masalahnya asli saya hadir, memang di sini agak kerasnya harus *sami'na wa 'atha'na* itu. Kalau *haq*, ya *haq*. Kalau *batil* ya *batil*.

Ya, makanya seperti tadi pak! Anwar Warsidi itu kan *amir* saya, tahu ya karena sepaham dengan adilnya. Itu kan yang membikin masalah. Ya masyarakat saja cuma selisih waktu. Bukan masalah tujuan. Dan ajaran sesuai dengan Al Quran dan Hadits tapi masyarakat yang masih awam kebanyakan menyalahkan duluan bukan disini di Siderejo, sedikit-sedikit bicara Al Quran banyak yang tidak senang. Terus ketika mengirimkan orang dari Jakarta. Saya tidak ingat, karena saya pulang ke rumah orang tua saya.

Soal bangunan di Cihideung, setahu saya, ada *gedek*, *musholla* itu, tempat orang tua, sama anak yatim. Itu cuma kayu bukan gedung. Yang berkeluarga itu bikin pondok satu kamar, kalau masak bisa di luar ada empat rumah. Terus *musholla* (rumah yang didiami pak Jayus). Biasanya saya menginap di Musholla dari kayu saja, lantainya sudah ada batu setengah badan. Makanan harian dari teman-teman kita yang ditemui di luar kompleks itu. Di kirim untuk yang ngaji di situ undangan dari teman. Beli sendiri. Jama'ahnya ngumpul duit, tidak ada paksaan. Kalau ada teman kita yang tidak ada ya kita bantu. Saya tidak pernah dipungut untuk infak. Kalau yang sudah punya ya wajib. Ya masukkan untuk infak itu. Kalau makan itu, yang diutamakan anak kecil, orang perempuan lalu kalau masih ada yang laki-laki. Ustadnya itu sisa. Kalau kebagian ya kebagian, kalau tidak ya tidak. Saya yakin itu, di sana itu saya sekitar sebulan tinggal. Saya pernah ngumpul di kebun ladanya pak Warsidi di jalan Sanding. Orangnya bagus persaudaraannya. Saya dulu pengajian di sini sama di Jamzuri di Al Barokah.

Itu dulu rencananya tanggal 12 Desember 1988 tempat Warsidi itu dijadikan tempat pelaksanaan pengajian supaya tidak campur antara hak dan batil sebab di kota besar kami punya pendapat atau pendirian tidak mungkin dapat menghindari dari maksiat. Ini merupakan bikin basis apa begitu? Jadi terjadi pengajaran-pengajaran Islam itu terlaksana sebab kami mengirimkan lima puluh orang itu tanggal satu Januari 1989. Jadi mereka tinggal sebulan. Jadi mereka belum ditata. Itu belum dilaksa-nakan karena baru perintah belum ditata masih bikin di pondok-pondok itu. Sentuhan-sentuhan sudah baik dan Soleh Munawar itu kan ada tanah wakaf pak Jayus karena ada perselisihan entah bagaimana tanah wakaf pak Abdullah Sungkar yang beli khusus untuk jama'ah dengan tujuan akan mendirikan pesantren di sana.

Saya tidak mengerti politik sebab umur saya masih 15 jadi saya dimasukkan ke kanak-kanak. Ada terlampir di buku induk tidak jadi di Tibum. Jadi waktu ditangkap saya itu tidak secara terang-terangan, masa Koramil menangkap saya di gardu, karena saya di musholanya pak Warsidi banyak tamu saya ingat di gardu saya tiduran di situ. Jadi waktu menangkapnya itu tidak secara wajar jadi aparat kalau mau benar-benar menangkap sebenarnya kok datang merangkak melewati pagar kemudi-an melompat sudah ada di depan gardu.

Selama dua bulan pengajiannya kalau sore membaca Al Quran kalau Isya mendapatkan sentuhan rohani. Pak Warsidi pernah termasuk ustad-ustad lain di situ. Ustadz Usman, Abdullah, Soleh. Isinya Aqidah Islam, menghantam Pancasila itu tidak pernah saya dengar. Tentang memben-tuk negara Islam dalam pelajaran sedikit sentuhan Islam yang lebih baik. Hukum menegakan Islam ya ada waktu itu. Abdullah Sungkar setelah peristiwa sudah di Malaysia.

Waktu di Korem sayakan dipukul karena dilarang hormat bendera dilarang tidak boleh pakai pancasila karena saya bilang tidak dipukul, saya bilang Insya Allah., yang memasukan saya kedalam kasus itu dengan sistem main pukul, itu termasuk paksaan supaya saya lebih dalam supaya saya nanti keluar bisa mengikuti perintah ajaran yang sebenarnya ya kita jawab Insya Allah kan cuma itu.

Pak Warsidi itu setahu saya tidak gimana ya orangnya gampang bersahabat, penyayang. Sama Pak Warsidi untuk pulang dan makan dikasih Rp. 15.000,- rupiah tiga hari. Jadi dia tidak kerja paksa, dia dermawan. Istrinya satu dan anaknya tidak tau ya itu yang saya tau karena waktu itu saya pernah diajak metik lada di way kambas. Ladang yang Pak Abdulah Sungkar saya kira masyarakat disuruh pergi tapi barangnya hilang kalau mau menandai kelompok ini saya tidak setuju mereka ngak mau bikin masalah saya pulang kerumah bertemu dengan tetangga lantaran saya bikin kesalahan tidak pernah.

Pada waktu terbunuhnya kapten Sutiman itu, saya sudah di Kodim. Sebelumnya Kapten Sutiman sebelumnya tidak datang karena sudah ada surat panggilan. Waktu mendapatkan panggilan untuk menghadap ke aparat itu saya tidak tahu, sebab kalau siang saya ikut menanam ubi, singkong di Cihideung. Kebunnya itu luas. Ustad Jamin, Sugih, Pakdenya Diman, Carsum. Waktu itu sedang ada panen

Waktu di koran dikatakan korban itu sekitar 70 orang. Padahal dari sini saja 7 orang dari Siderejo 11 orang, anaknya pak Takwa 3 orang, dikubur jadi satu dilempar begitu saja satu lubang yang ngubur rakyat. Orang yang dibunuh di Siderejo dan di Cihideng, 3 anak pak Takwa, 4 anak Jamjuri, 1 anak pak Saman, 2 anak pak Setum, 2 Bani dan Diun, 1 anak Zamzuri, 5 orang dari Jakaman, 4 keluarga Alex, 4 orang keluarga Kardi, 2 Arifin dan keluarga, 2 Sugeng, Musrin, 3 Runim, 3 Yanto, 3 Yatna, Supry dan Udin, 2 Heri, 3 Usman, Markum, 3 Kusnadi, Pak Tarik ini yang saya ingat nanti dijumlah saja.

Ya itu tadi mereka tinggal di gubuk gubuk dan mereka akan musyawarah untuk membuat perencanaan pembangunan dan dari Jakarta belum datang semua, nanti setelah datang dan rapat akan diajak ke pemerintah untuk mencari dana, tapi pemerintah sudah menuduh lebih dulu bahwa jamaah ini jamaah PKI itulah terjadinya panas memanas.

Yang mau mengeluarkan saya itu Muladi, Pak Rohani, Kardi, Muklis, 9 orang waktu itu, mungkin mereka mendengar tentang penyiksaan tentara yang gemuk-gemuk.

Tentang masyarakat tetangga dan Pak Warsidi bagaimana waktu itu.

Yang banyak tau itu Pak Iman yang bantu bawa beras selain itu belum kenal dan pengajian macam kuliah subuh. Berarti kejadiannya setelah di Cihideng baru kesini.

Ya sehari itu setelah selesai penyerangan di Cihideung terus ke sini tanggal 7-8 Februari 1989 di Siderejo waktu kejadian di sana itu tanggal 6 Februari 1989. Jadi tanggal 8 Februari 1989 itu sudah habis di sini hanya mengambil saya. Saya waktu ditahan di Lampung Metro itu 5 orang termasuk saya, yang satu dicekik, masa orang sudah ditahan disuruh telanjang kemaluannya ditarik dari belakang terali itu namanya An sampai sekarang sakit kemaluannya, saat penyiksaan pada waktu itu luar biasa, mengucur air mata saya itu waktu menyaksikan penyiksaan, sampai militer itu anak itu dengan ikat pinggang seperti anjing gila tidak ada rasa kemanusiaan sedikit juga sekenanya yang dipukul dada kepala kaki badan, kepada anak-anak ini mereka tidak punya perasaan, kepada saya mereka saya tanya apa kesalahan saya kalau benar silahkan tembak.

Orang tua saya, sebenarnya begini, dibilang setuju tidak. Dibilang tidak ya gimana. Karena orang ngaji waktu itu mau berangkat ke sana minta sarung dibelikan, minta baju koko dikasih setelah itu saya ke sana beberapa hari kejadian saya sudah dianggap mati di Cihideung, ternyata saya tanpa membawa-bawa bapak saya bisa pulang. Pas pulang orangtua terkejut. Ya pas begini, waktu magrib. Pas puasa.

Besoknya rumah Zamsuri dibawa teman ke rumahnya pak Nu RT 03. Ya warga masalahnya begini. Ada yang bilang orang yang jaga gardu sudah ada yang dipulangkan. Ada yang menjawab apa saya tidak tahu katanya. Yang juga masyarakat yang jadi korban tentara di belakang disuruh membawa lidi, kalau tidak hadir membawa lidi direndam di comberan seperti pak Sugeng Mantri, disuruh mandi di comberan. Ten-tara yang nyuruh pokoknya sudah di luar batas. Kalau saya dulu kesalah-han harus dibelokin. Kalau saya mengaku tidak, maka digebuki. Kejadian masalah ini, mau dijadikan saksi menuntut keadilan.

6. Azwar Kaili

Azwar Kaili lahir tahun 1942 di Painan, Sumatera Barat. Dia adalah seorang pejuang yang tak kenal menyerah, berbudi pekerti baik dan bersikap tegas. Dalam hidupnya, segala persoalan dihadapinya dengan lapang dada dan senantiasa bersabar mencari hikmah dari semua peristiwa-peristiwa sejarah. Ia berhijrah ke Lampung pada tahun 1960. Baru pada tahun 1969 ia pindah ke Sidoredjo, sebagai *the last frontier* bagi hidupnya dan keluarga. Pada tahun 1969 tersebut, jumlah kepala keluarga yang berpindah ke Sidoredjo sebanyak 600 KK. Dia adalah salah seorang yang diperlukan sebagai mantri pengobatan di daerah baru tersebut. Pada waktu itu, sekitar tahun-tahun 70-an, penyakit malaria adalah penyakit yang ditakuti semua warga. Ia menyediakan obat-obat pil kina yang mencoba mengatasi penderitaan rakyat di sana. Pada awalnya, sebagai mantri pengobatan, ia juga bercocok tanam kedele dan tanaman tumpang sari lainnya.

Hidup memang terasa sangat keras di Sidoredjo pada tahun-tahun awal pembukaan lahan. Ia juga mengalami peristiwa tragis yang juga dialami banyak orang di Sidoredjo pada tahun 1971. Pada tahun 1971 terjadi sebuah peristiwa yang tidak dimengertinya, segerombolan tentara republik, tentara kehutanan, datang dan mengusir mereka semua yang tinggal di lahan pembukaan baru di Sidoredjo. Peristiwa ini sangat mengejutkan karena terjadi tanpa sebab yang jelas. Namun, semua itu dianggap sebuah “kekerasan formal” yang mungkin harus terjadi pada waktu itu. Pada tanggal 3 Maret 1973, ia menikah dengan seorang perawat bernama Ismini. Dengan istrinya inilah ia mengarungi hidup yang penuh dengan suka duka bersama dengan lima orang anaknya.⁷⁶

Dia merupakan satu-satunya orang dari Sumatera Barat —di samping itu ada lagi yang bernama St. Malano— yang ditangkap karena peristiwa berdarah itu. Diketahui, keterlibatannya dalam kelompok Warsidi ini di bawah koordinasi Sudiono dan Zamzuri. Bahkan Azwar merupakan penyelenggara kursus kesehatan dengan mengambil instruktur dari RSAM Tanjungkarang.⁷⁷ Berkat ketekunan istrinya dalam mempelajari kursus tersebut, sehingga ia mendapat keahlian menyuntik dan mendapat gelar dari masyarakat setempat sebagai manteri kesehatan. Namun Azwar sendiri, sehari-harinya bekerja sebagai tukang jahit pakaian.

Sesungguhnya keberadaan dirinya di Lampung sudah sejak lama, kira-kira tahun 1969 di Teluk Betung. Jadi, hampir 30 puluh tahun lebih. Di daerah barunya itu lebih kurang ada 600 kepala keluarga. Menurut sepengetahuannya, yang pertama kali membuka daerah Teluk Betung itu adalah Taufik Hidayat dari Kostrad Bandung. Selanjutnya diikuti oleh yang lainnya, karena daerah tersebut merupakan lingkungan daerah tumpangsari.⁷⁸

Ketika pertama kali masuk ke Teluk Betung pada tahun 1969, Azwar menjadi pedagang obat. Waktu itu di sini karena masih daerah pembu-kaan, sangat rawan dengan berbagai penyakit, terutama penyakit malaria. Banyak penduduk di sekitarnya yang kena terjangkit penyakit malaria. Oleh karena itu, dirinya diminta oleh kepala pembukaan untuk menetap di sini untuk membantu mereka. Cuma karena waktu itu masih dalam pembukaan sebagian pamong-pamongnya mengeluh karena biayanya tidak ada. Setelah panen kedelai dan jagung, daerah ini supaya dikosongkan karena ada perintah pengosongan.

Ada tuduhan bahwa beberapa hari ketika gerakan Warsidi di Sidorejo akan melakukan aksinya, rumah Azwar dijadikan sebagai pusat logistik untuk mempersiapkan rencana mereka melakukan penyerangan tanggal 19 Februari 1989. Setelah mereka telah matang menyusun rencana, istri Azwar mendapat tugas mengatur persiapan logistik itu. Setelah dilakukan penyerangan oleh petugas keamanan, Azwar diketahui merupakan salah satu dari tujuh orang yang menyerang pos polisi Sidorejo. Perambah jalan baru bagi peradaban Sidoredjo ini beberapa kali mengalami peristiwa konflik agraria yang menyebar di Sidoredjo. Pada tahun tahun 1974 terjadi peristiwa perebutan lahan kebun antara orang-orang Jawa, Bali dan Lampung di Sidoredjo. Banyak korban yang jatuh dalam peristiwa tersebut. Namun, keadaan kembali berjalan normal setelah konsensus terjadi antara pihak-pihak yang bertikai. Keadaan damai ini berlangsung lama tanpa ada suatu peristiwa apapun. Baru setelah intervensi pihak pemerintah keadaan mulai berubah. Hubungan-hubungan sosial menjadi begitu kakunya pada tahun-tahun akhir 1980-an. Lurah Santoso dan Bapak Muharram sebagai Koramil⁷⁹ tetap bersikap sangat agamis, hingga setelah melihat ada perkembangan pengajian di Langgar Al Barokah, di samping Lapangan Alun-Alun Sidoredjo, sikap kedua aparat ini tidak berubah. Pengajian di Masjid Al Barokah ini sangat penting artinya dalam peristiwa Sidoredjo 7 Februari 1989.

Pengajian di Masjid Al Barokah telah berlangsung sejak tahun 1987 yang diisi oleh seorang yang fasih dalam pendidikan Al Qur’an dan Hadits, bernama ustadz Dallari. Namun, kemudian pengajian Al Qur’an dan Hadits yang telah mencerahkan orientasi keagamaan mereka diisi oleh Dullah (Abdullah) yang pada waktu itu masih bujang. Karena perbedaan status perkawinan inilah kemudian terjadi komunikasi yang kurang lancar. Namun, karena kegigihan Dullah, pada akhirnya pengajian ber-tambah ramai dan semarak. Banyak orang ingin mendapatkan pengetahuan agama di wilayah yang kering secara spiritual tersebut. Apalagi dengan pluraritas penduduknya yang menganut berbagai agama telah menyebabkan hawa sejuk Islam menyirami mereka semua. Pak Zamzuri, Pak Maulana dan Pak Azwir pun menjadi aktif dalam pengajian Ming-guan tersebut. Untuk mentransformasikan semua ilmu keislaman, maka jadwalnya pun ditambah sehingga pihak Lurah dan Kapolsek kepanasan dengan pengajian tersebut.

Maka, pada hari Senin, 7 Februari 1989, terjadilah peristiwa konflik antara pihak Koramil, Lurah dan beberapa angkatan muda dari jamaah pengajian biasa tersebut. Ketika didatangi oleh Kapten Polisi Sudargo⁸⁰, dari pihak Polsek, Nursalim, Sudiono dan Sony berhamburan keluar dan lari melintas lapangan alun-alun. Beberapa kali suara tembakan meletus dan mengenai Sony hingga tewas. Mayatnya tergolek lemas di pinggir lapangan. Merasa ada sesuatu yang kurang beres, maka Zamzuri, Mau-lana dan Azwir sebagai ketua dalam jamaah tersebut mendatangi lokasi. Rakyat sudah ketakutan dengan suara-suara letusan senjata dari Sersan Mayor Polisi Sudargo. Maka, Zamzuri pun segera mengambil sebilah parang panjang dan menebas batang leher Kepala Desa Sidoredjo Santoso Arifin hingga putus. Aksi para jamaah yang dianggap meresahkan itu juga sempat membunuh Serma Sudargo di hutan lindung Gunung Balak serta melukai Serda Arif Sembiring.

7. Munawar Warsidi

Munawar⁸¹ memiliki kesamaan nama dengan Warsidi, akhirnya jadi korban juga, yang menunjukkan lemahnya analisa intelejen Orde Baru. Ia masuk ke Lampung sejak September 1976 dengan menyusul keluarga dari adik dan pamannya. Ia dan adik-adiknya sudah aktif di lapangan pergerakan, karena dulu waktu pengajian dari Solo. Sesudah aktivis Islam Abdullah Sungkar di Solo dikejar-kejar aparat, kemudian *hijrah* ke Lampung mendirikan suatu pemerintahan pola Islami. Anak-anak dan adik-adiknya, memang cenderung ikut aktif dipergerakkan dan sudah ada dampak benci terhadap Soeharto dan kaset-kaset yang didengar polanya memang pengajian dari Ngeruki Abdullah Sungkar, memang dulu pengajian mesti menghujat pemerintahan. Masuknya adik-adik di sini tahun 1986, terjadinya Warsidi tahun 1989 bulan Februari. Tahun 1986 sudah mulai masuk sini dan pengajian itu belum begitu terkoordinir di daerah Lampung Tengah di Cihideung sampai sekarang saya belum tahu.

Munawar tidak mengetahui tentang bagaimana peristiwa kematian adik Munawar, sedangkan yang jadi korban di sini laki-laki yang nyata perlu didata sebagai sejarah yang benar kejadiannya dan berapa korban di sini. Kalau dulu pak Sis pendatang benar atau tidak karena seakan-akan menyalahkan yang ikut jamaah pak Sis itu, yang masuk jamaah itu kan semua termasuk keponakan pak Sis itu. Pak Sis dulunya menyalah-kan, karena belum tahu saja, baru sekarang ini dia tahu. Tapi dalam hati Munawar, dulu pernah orang-orang di Cihideng ada yang masuk sini, istilahnya bawa masuk mencari *ikhwan-ikhwan* di sini, mencari yang simpatik termasuk Abdullah dari Siderejo.

Kalau disini Munawar yang lainnya keluarga besar Munawar, adalah orang-orang yang buat surat pernyataan. Munawar difitnah karena nama Warsidi Munawar, tentara tim penjaga main timpuk sehingga Munawar menyebut *Allahu Akbar*, tidak Munawar tidak mau berhenti kalau masih membaca mantra-mantra seperti itu akhirnya Munawar *Allah-Allah* saja, ya *salam dholim* memang.

8. Ibu Munjiatun

Ibu Munjiatun yang bersuamikan Bapak Ahmad Zaini adalah keluar-ga korban dari Talangsari. Yang pertama, Siti Khairiyah berusia 18 tahun dan Siti Mutmainah berusia 17 tahun pada waktu kejadian itu.⁸² Mereka pindah ke Talangsari karena ikut bersama suaminya masing-masing. Kedua-duanya tidak tahu apa-apa, hanya karena ikut menyertai suami-nya masing-masing. Pernah ditanya Bapaknya, untuk menghindari ikut suami. “Apakah sudah ikhlas?”, tanya Bapak Ahmad Zaini melepas anaknya untuk selamanya. “Ya sudah ikhlas,” jawab mereka.

Nama suami Siti Khairiyah adalah Sofyan dan suami Siti Maimunah adalah Fahrudin. Siti Khairiyah dan suaminya dulu tinggal di Cempaka Putih, sedangkan Maimunah masih sekolah, tinggal tunggu ujian selesai sekolah Tsanawiyah, dia sudah ambil keputusan nggak ngurusi sekolah juga tidak apa-apa. Bapaknya cuma bilang, “Terserah kamu.” Sebuah kepasrahan keluarga muslim Jawa puritan melihat dinamika anaknya berpindah ke suatu tempat yang naif.

Ibu Munjiatun dan Bapak Ahmad Zaini mendengar tentang kejadian Lampung, dari orang yang pulang dari Lampung. Orang yang memberi-tahukan kepadanya tentang kejadian itu adalah Sopan (Sofyan)⁸³ yang mampir datang ke Jakarta. Sesampainya di Jakarta memberitahukan tentang kabar bahwa di Lampung telah terjadi pembunuhan Kapten Sutiman. Dan meminta orang-orang Jakarta untuk pergi ke Lampung. Dan memang benar, situasi tengah terjadi penyusuran dan pembakaran serta penembakan. Melihat gelagat ini, Bapak Ahmad Zaini tidak men-capai tempat kejadian, ia balik kembali ke Jakarta. Sementara itu Sofyan sendiri telah balik pergi kembali ke Lampung dan kemudian balik kembali ke Jakarta hingga Sofyan tertangkap pihak keamanan di tengah perjala-nan. Bapak Ahmad Zaini langsung pulang ke Jawa (Solo). Tetapi di Solo ia gelisah, lalu ke Jakarta lagi, ke Solo lagi, jadi buron-buronan dan tidak menentu karena perasaan yang tidak enak, pikiran tidak tenang, makan tidak doyan.

Yang menarik dari perjalanan Ibu Munjiatun ini adalah bahwa sela-ma kejadian Tragedi Talangsari tersebut, petugas keamanan tidak ada yang datang, tapi kalau mata-mata ada. Ia dan suaminya merasa selalu diawasi mata-mata intel. Negara Orde Baru benar-benar sebuah “Negara Intelejen”. Jika Wet Wet Wet menyebut “Love is all around”, maka di Indonesia “Intel melayu is all around”. Mereka tidak mengganggu tetapi Cuma mengawasi saja. Demikian tenangnya rakyat cilik menghadapi mata-mata negara intelejen ini.

Setelah merasa diawasi itu, suaminya pergi, tidak ada di rumah. Sebuah perlawanan halus yang bisa diberikan oleh seorang mukmin Jawa sejati. Sementara sang istri tetap di rumah bersama anak-anak yang masih kecil-kecil, sedangkan anak-anak yang besar-besar sudah pergi, walau mereka akhirnya tewas. Para tetangga itu tadinya tidak tahu, tapi lama-lama pada tahu tentang keluarga ibu yang meninggal karena karena peristiwa Lampung. Namun, sikap mereka di luarnya terlihat baik-baik saja atau pura-pura tidak tahu padahal tahu, tidak tahu di dalam batin, ya benci.

Kalau ngobrol-ngobrol dengan warga tetangga biasa biasa saja. Mereka tidak pernah menyinggung-nyinggung tentang peristiwa tersebut. “Mereka pada takut sendiri-sendiri dan diam-diam saja. Sama saya juga diam,” papar Ibu Munjiatun. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang sangat memahami dunia intelejen yang menakutkan ini sehingga untuk berbicara pun dia sudah sangat takut. Fir’aun terbesar yang berada di balik semua penyebab ketakutan rakyat adalah Soeharto.

Selama dalam buron Bapak Ahmad Zaini mondar-mandir Jakarta Solo. Begitu saja mereka menjalani kehidupannya. Dan Bapak Zaini tidak pernah ke tempat lain. Tidak ke mana-mana. Hanya Jakarta-Solo saja. Mundar-mandir. Sebuah dunia yang dipersempit. Tida ada upaya untuk bertanya ke pada pihak-pihak lain tentang kematian anaknya. Ia mene-rima kenyataan bahwa anaknya telah meninggal. “Kalau meninggal karena Allah, saya merasa ikhlas saja. Tetapi kalau dibunuh dan ditembak itu saya tidak ikhlas,” katanya dengan nada perlawanan. Ia jelas ingin menuntut keadilan, “Saya menuntut keadilan pemerintah.”

Pihak pemerintah menyebutkan bahwa ada 30 korban yang mening-gal di sana, tetapi pihak pemerintah tidak menunjukkan di mana kuburan anaknya. Tentu saja ia dan suaminya ingin tahu di mana kuburan kedua orang anaknya yang sangat ia cintai itu. Dan usahanya dua tahun terakhir ini, telah melapor tentang itu. Kalau kasus ini dibuka lagi, ia siap untuk memberikan kesaksian tentang anaknya yang meninggal di sana. Sebelum meninggal kedua anaknya itu, ia menyimpan foto mereka. Tetapi sejak mereka meninggal, ia menjadi tidak tahan untuk menyimpannya. “Kok foto-fotonya ada tetapi orangnya tidak ada. Saya jadi tertekan.....”

Ia tidak ikhlas mendengar kematian anak-anaknya itu, karena mereka telah pamit dari rumah masih sehat, masih segar bugar. Ketika sampai tempat yang dituju katanya cari ilmu, tetapi lain kejadiannya, kok ada sebuah persiapan perang di sana. “Saya tidak ikhlas. Tidak terima. Kalau ingat itu, saya merasa tidur tidak nyenyak, makan tidak enak.” Anaknya tidak mencuri apa-apa. Orangny baik-baik semua. Mereka Cuma mau cari ilmu. Cari kebenaran. Nggak nyolong atau ngambil-ngambil apa. Mereka mencari ilmu yang benar untuk dunia akhirat. Sebuah keihklasan manusia Jawa untuk menerima kenyataan luhur dari pencarian ilmu agama.

Maimunah, pendidikan terakhirnya adalah Tsanawiyah Negeri Kaca-ngan Solo, Kabupaten Boyolali, tidak sampai tamat.

Tentang peristiwa lampung ini tetangga-tetangganya di Boyolali, orang sekampung sudah pada tahu semua. Itu anaknya Pak Zaini dianu, ditembak atau dibakar itu semua orang sudah pada tahu. Cuma mereka diam-diam saja. Ia sendiri tidak mengerti aliran sesat itu apa. Baginya, tidak ada aliran sesat. Padahal mereka itu berpedoman kepada Al Qur’an. Itu yang mereka cari. Karena keadian itu sudah berlangsung lama, tentu ibu ini punya harapan. Harapan ibu ini hanyalah sebuah kepasrahan biasa, kalau mereka itu sudah mati, ia mengharapkan ditunjukkan kubur-nya. Ia ingin tahu dan berziarah ke tempat anak-anaknya itu. Dari delapan orang anaknya, yang meninggal tiga orang. Dua orang meninggal di Lampung. Yang satu meninggal sewaktu masih kecil, sedang yang enam masih hidup sampai sekarang.

Sekarang kegiatannya adalah berdagang sayur, untuk menutupi nafkah sehari-hari walau masih terasa kurang mencukupi. Sebuah pengharapan ekonomi dari semakin terjepitnya seorang rakyat kecil yang naif di tengah-tengah negara inetelejen yang kejam q

Bab 12 JENDERAL DI BALIK PEMBANTAIAN UMMAT ISLAM DI AMBON-MALUKU

KERUSUHAN yang terjadi hampir di selu-ruh Maluku, termasuk Maluku Utara telah berlangsung setahun lebih dimulai pada tanggal 19 Januari 1999, bertepatan dengan 1 Syawal 1419 H, yaitu saatnya ummat Islam merayakan hari Idul Fitri setelah berhasil menunai-kan ibadah Puasa sebulan penuh. Kerusuhan yang oleh pihak Kristen ini telah direncanakan dengan matang untuk mencapai tujuan politik Kristen di Indonesia di mana diperkirakan Negara Boneka buatan Belanda pada tahun 1950, Republik Maluku Selatan (RMS) telah digunakan untuk mencapai tujuan politik tersebut seka-ligus mencapai cita-cita RMS untuk melepaskan Maluku Selatan dari Negara Kesatuan RI, untuk merdeka dan berdiri sendiri.

Pekerjaan besar ini dilakukan dengan menghancur-kan ummat Islam yang, pada tahun 1950 telah ikut bersama TNI menggagalkan berdirinya RMS. Bagi mere-ka, ummat Islam adalah penghalang utama bagi berdiri-nya RMS karena itu harus dipukul dengan keras, seba-gai upaya memperkecil jumlahnya hingga mencapai titik minoritas yang tidak berarti.

Isu separatis ini muncul kembali karena suasana dalam negeri RI yang sedang dalam proses reformasi menunjukkan kekacauan hampir di seluruh wilayah Nusantara. Pemerintahan Soeharto dijatuhkan sedang-kan Pemerintahan B.J. Habibie rapuh karena dinilai tidak legitimated dan tidak sah.

Terlepasnya Tim-Tim dengan sutau proses yang di-dukung dunia internasional telah ikut merangsang pihak RMS untuk melepaskan diri dari Negara Kesa-tuan Republik Indonesia.

Bab 12-01 Kerusuhan dan Perrkembangannya

Kerusuhan yang bertujuan memperkecil jumlah masyarakat Islam di Maluku dilakukan dengan amat keji. Pembunuhan dan pembakaran terhadap ummat Islam yang tidak siap menghadapi ancaman itu mem-buat ummat Islam harus eksodus dari Maluku demi menyelamatkan diri dan keluarganya.

Akan tetapi, Ummat Islam ternyata tidak dapat dikalahkan semudah yang diperkirakan, sebab mereka bangkit melakukan perlawanan dan mampu bertahan sehingga kerusuhan terus berkecamuk walau berlangsung sudah hampir 1,5 tahun.

Pihak RMS yang menghantam ummat Islam pada sendi-sendi keagamaan seperti pembakaran masjid, penghinaan terhadap Rasulullah Saw. dan sebagainya telah menyulut konflik ini ke arah Perang Agama. Karena itu konflik yang amat sensitif ini cepat menjalar ke seluruh Maluku. Kerusuhan ini telah berkembang ke beberapa pulau di sekitar Ambon seperti pulau Kei, Banda, Seram, Haruku, Saparua, Sanana dan pulau-pulau lain yang kini termasuk Maluku Utara seperti Ternate, Halmahera dan Obi.

Perluasan konflik seperti itu terjadi karena tidak segera diatasi pada akar permasalahannya. Konflik antar masyarakat Kristen dan Islam ini selalu ditutup-tutupi dengan mengangkat permasalahan horizontal yaitu konflik sosial kemasyarakatan sebagai penyebab.

Sejak Januari 2000, kota Ambon dapat dikatakan mulai tenang, tetapi pulau-pulau lain terutama di Maluku Utara masih terus bergolak dalam bentuk perkelahian massal. Banyaknya aparat keamanan, memang membuat keadaan sedikit terkendali. Namun dikhawatirkan kalau akar permasalahannya tidak diselesaikan terutama bila RMS yang diduga sebagai otak dan penggerak kerusuhan tidak ditangani, maka konflik ini tidak akan dapat selesai begitu saja. Jika aparat keamanan yang besar ini (16 yon) ditarik, maka tidak mustahil kerusuhan berikut akan terjadi lagi.

Bab 12-02 Perlawanan Ummat Islam

Serangan mendadak yang dilakukan pihak Kristen, menunjukkan adanya suatu perencanaan melalui suatu organisasi yang solid. Kekuatan besar yang dikonsentrasikan, dihantamkan kepada ummat Islam yang tengah merayakan Idul Fitri, tidak mungkin dapat dilakukan begitu tiba-tiba tanpa perencanaan yang matang.

Menghadapi serangan demikian, maka dengan kemampuan seadanya, ummat Islam melakukan pembelaan diri sebagai upaya penyelamatan, walaupun terpaksa dilakukan oleh kampung demi kampung secara mandiri, dan tidak terkoordinasikan. Aparat keamanan yang juga terdesak tidak dapat berbuat banyak, karena itu dalam waktu satu minggu pertama keselamatan ummat Islam terletak pada bagaimana mereka mampu bertahan dengan kekuatan yang tersedia. Allah swt. telah memberikan perlindungan-Nya dengan membangkitkan semangat perlawanan ummat Islam yang tampak dengan berduyun-duyunnya masyarakat pedesaan di sekeliling kota Ambon bahkan dari berbagai pulau sekitar Ambon datang ke kota Ambon untuk menghadapi ancaman pihak Kristen ini.

Suatu kenyataan yang sulit dipercaya adalah menggelornya semangat Jihad Fie Sabilillah yang amat dahsyat, puluhan ribu mujahidin telah memasuki kota Ambon, sedangkan ditiap pedesaan telah mengorganisir kekuatan tambahan. Semangat sebesar itu telah mengakibatkan pukulan moril besar terhadap pihak Kristen, sehingga tidak gampang melakukan serangan-serangan seperti minggu pertama kerusuhan.

Namun demikian semangat jihad itu juga membawa dampak lain di pihak Muslim, berupa perawatan kepada belasan ribu mujahidin dari luar daerah itu. Walaupun berat beban perawatan ini ternyata masyarakat kota Ambon dengan segala keterbatasannya mampu menanggulangi bersama-sama sampai menjelang setahun mereka di kota Ambon. Pihak Kristen yang memang merencanakan kerusuhan untuk mencapai tujuan politik tertentu, jauh hari sebelumnya telah mempersiapkan kekuatan, baik personel maupun persenjataan, termasuk senjata api rakitan dan organik militer. Karena itu mereka mampu secara sistematis melakukan penyerangan walau dalam skala kecil sampai dengan akhir Juli 1999 yang telah menimbulkan kerugian terus-menerus di pihak Islam.

Dalam keadaan demikian, ummat Islam di akhir Juli 1999 itu bangkit melakukan serangan balasan, inilah awal offensif ummat Islam setelah bertahan terus menerus selama enam bulan. Bangkitnya ummat Islam melakukan pembelaan sesungguhnya hal yang terpaksa karena mereka belum cukup kuat untuk melakukan aksi pembelaan.

Ternyata dengan semangat Jihad Fie Sabilillah yang luar biasa, ummat Islam mendapat kemajuan yang berarti, sehingga September 1999 dapat dikatakan kondisi kekuatan dan kerugian kedua belah pihak menjadi relatif seimbang.

Karena itu pihak Kristen mulai mengalihkan kerusuhan ke luar Ambon, menjangkau beberapa desa di Seram dan seterusnya, dan pada Desember 1999 mencapai Maluku Utara dengan konflik fisik yang cukup dahsyat.

Bab 12-03 Kerugian Ummat Islam

Walaupun kerugian kedua belah pihak dapat dinilai seimbang, tetapi kerugian yang dialami ummat Islam, dampaknya lebih besar dan berakibat jangka panjang ke depan karena hancurnya sendi-sendi dasar perekonomian serta pendidikan bagi puluhan ribu pelajar dan mahasiswa.

Kerugian pada rata-rata kebutuhan hidup masyarakat Islam cukup besar tetapi dampak kerugian itu akan dapat diatasi dalam waktu 2 atau 3 tahun ke depan, sedangkan sektor perekonomian pada lingkup besar dan pendidikan akan memerlukan waktu lebih panjang dan akibat yang ditimbulkan besar.

Perekonomian dalam skala besar dengan investasi ummat Islam terutama yang dari luar Maluku terpukul sehingga kini mereka menarik diri, begitu juga penanam modal lainnya yang memberikan lapangan kerja bagi ummat Islam.

Pada sektor pendidikan boleh dikatakan terhenti 90 % karena letak sekolah-sekolah pada umumnya di luar sektor yang dikuasai ummat Islam. Konflik yang menimbulkan dendam horizontal mendalam ini akan sangat berpengaruh pada proses belajar mengajar yang dilaksanakan secara terpadu.

Lebih fatal lagi untuk perguruan tinggi khususnya Universitas Patti-mura (Unpatti) tempat menimba ilmu calon sarjana dan calon pemimpin masa depan, 3000 mahasiswa telah tertutup sama sekali bagi mahasiswa Islam, Dosen dan Karyawan Islam. Unpatti yang didanai 70 persen kekuatan Kristen telah dimanipulasi untuk menendang kepentingan Islam. Unpatti kini telah menjadi Kampus merah, warna yang diberikan sebagai pengenalan bagi pihak Kristen dan untuk Islam dikenal dengan putih.

Tidaklah berlebihan bila para tokoh memperkirakan akibat kerusuhan ini, ummat Islam akan kehilangan sumber daya berpendidikan selama satu generasi. Oleh karena itu, kondisi-kondisi strategis kerugian ummat Islam ini perlu mendapatkan penanganan khusus dari Pemerintah.

Bab 13 Fitnah Politik Gus Dur Melecehkan Ummat Islam Maluku

Bab 13-01 Kebijakan Pemerintahan Gus Dur

Sejak terjadinya gerakan reformasi di Indonesia, telah jatuh 2 Pemerintahan yaitu Orde Baru di bawah rezim Soeharto dan Pemerint-tahan transisi di bawah BJ. Habibie. Terbentuklah kini Pemerintahan baru di bawah Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur melalui proses Pemilihan Umum pada Juni 1999. Karena itu Pemerintahan ini dipandang lebih kuat dengan legitimasi yang diakui semua pihak termasuk manca negara.

Bila 2 pemerintahan yang lalu sangat disibukkan oleh berbagai perma-salahan perekonomian, politik dan keamanan yang mengancam kesela-matan bangsa dan negara tidak mampu diatasi dengan baik karena legitimasinya. Kini Pemerintahan Gus Dur telah berhasil mengatasi berbagai gejala tersebut walau hasilnya belum memadai, tetapi kete-nangan di bidang politik dan kemananan telah tampak sedangkan di bidang perekonomian telah tampak adanya peluang membaik.

Karena itu diharapkan adanya perhatian yang sungguh-sungguh dari Gus Dur untuk menangani kasus Ambon/Maluku, terutama menyangkut bagaimana konflik fisik yang berkepanjangan ini dapat dihentikan, hukum dapat di tegakkan serta akibat berat yang menimpa kedua belah pihak yang berperang dapat diatasi secara bertahap menurut cara yang benar dalam pengertian kerugian ummat Islam sebagai pihak yang di dzalimi harus mendapatkan perhatian khusus karena besarnya permasalahan yang ditimbulkan merupakan bekas mereka.

Langkah-langkah yang telah ditempuh oleh Presiden dirasakan belum memadai, bahkan sebaliknya merugikan ummat Islam.

1. Penunjukkan wakil Presiden Mega Wati untuk menangani kasus Ambon yang kemudian menunjuk lagi Prof. Dr Selo Sumardji sebagai penasehat Wapres untuk kasus Ambon. Ummat Islam pesimis akan mendapatkan perlakuan yang adil dengan penyelesaian yang tuntas. Megawati Sukarno Putri yang ketua umum DPP PDI.P dua periode tidak populer dikalangan ummat Islam sebab penabatangannya sebagai Ina Ratu (Ibu Raja) oleh DPP PDI.P Maluku berdampak membesar-besarkan peranan megawati terhadap PDI.P Maluku padahal PDI.P Maluku bukan ex PNI tetapi mereka ex Parkindo dan ex Partai Katolik yang pribadi-pribadinya berperang dengan ummat Islam.
2. Kedatangan Presiden Gus Dur dengan Wapres Megawati bersama para menteri dan rombongan besar pada tanggal 12 Desember 1999 ke Ambon untuk menyelesaikan kasus Ambon/Maluku ternyata mengeluarkan pernyataan yang sangat mengagetkan ummat Islam yaitu menyerahkan penyelesaian konflik kepada masyarakat Ambon/Maluku sendiri, Pemerintah Pusat hanya akan memberikan dorongan. Kerusuhan yang tidak kunjung berhasil diatasi selama 1 tahun ini oleh masyarakat Ambon/Maluku, kini justru diserahkan kembali untuk diselesaikan sendiri. Presiden seperti tidak berminat mengatasi konflik yang berlatar belakang agama ini. Apakah Presiden tak punya keberanian untuk menjatuhkan vonis bersalah kepada pihak Kristen yang nyata-nyata mendzalimi ummat Islam?
3. Aktivitas langkah-langkah F.PDI.P dan DPR RI ketika secara khusus ke Ambon untuk mencarikan model solusi sebagai saran kepada Wapres jelas berbau kepentingan PDI-P. Sedangkan mereka tidak pernah menghubungi pihak Islam selama di Ambon. Dikhawatirkan Wapres akan mendapat informasi keliru yang merugikan pihak Islam yang akhirnya kebijaksanaan Wapres sebagai yang diberi tugas khusus oleh Presiden akan menentukan kebijaksanaan yang jauh dari harapan ummat Islam.
4. Pernyataan Gus Dur setelah kembali dari kunjungan dari beberapa negara Eropa diantaranya ke Negeri Belanda menyatakan bahwa RMS seperti yang kita kenal sudah tidak ada, yang

RMS sekarang adalah organisasi Kemanusiaan, karena itu bantuan mereka untuk Maluku akan kita terima.

Pernyataan ini sekali lagi telah mengaburkan duduk permasalahan RMS yang dalam kerusuhan Ambon ini telah berperan aktif sebagai otak dan penggerak kerusuhan justru diselamatkan oleh Gus Dur. Pernyataan itu, sadar ataupun tidak, telah mendukung aktifitas pihak Kristen dan sekali lagi ummat Islam dikecewakan.

5. Telah turun ke Ambon panitia kerja DPR (Parja DPR) untuk Maluku ternyata sampai saat ini belum mengeluarkan sesuatu pendapat.
6. KPP HAM yang sengaja dibentuk untuk mencari penyelesaian yang di pimpin Bambang Suharto yang telah bekerja di lapangan cukup lama dan pasti menemukan penyebab dan siapa yang bersalah ternyata-ta belum membuat suatu laporan yang transparan untuk diketahui masyarakat. Pihak yang bersalah terkesan dilindungi, hal seperti ini justru akan mempersulit penyelesaian.
7. Pangdam XVI/Pattimura Brigjen TNI Max Tamaela yang telah empat kali diberitakan positif akan diganti ternyata pada kali terakhir yang sudah begitu santer tidak jadi dibatalkan bahkan yang tergeser Letjen TNI Suadi Ramabesi Kasum ABRI yang dalam penanganan kasus Ambon/Maluku ini telah memiliki konsep yang arahnya membongkar RMS yang terlibat. Penggantian ini oleh ummat Islam dikaitkan dengan pernyataan Gus Dur bahwa RMS sudah tidak ada lagi serta peran Megawati sebagai pemegang proyek Maluku yang meminta agar tidak ada pergantian pejabat di Maluku.

Sampai hari ini tidak jelas arah penanganan kasus Maluku, tetap pada pendapat bahwa yang terjadi ini adalah konflik horisontal tidak melibatkan RMS.

Pendapat seperti itu terlihat tidak ada upaya untuk mengejar RMS sebagai organisasi yang mengendalikn kerusuhan. Kerusuhan ini mustahil berjalan tanpa direncanakan dan dilaksanakan oleh suatu organisasi apapun namanya.

Akibat kebijaksanaan seperti itu tidak tampak kelanjutan dari segala upaya yang telah dilakukan oleh Gus Dur.

Bab 13-02 Penyelesaian Lewat Jalur Hukum dan Politik

Dalam situasi yang mulai tenang dicanangkan untuk dimulai proses rekonsiliasi yang bentuknya belum jelas, apakah rekonsiliasi akan dilakukn dalam bentuk maaf-maafan, tanpa adanya sanksi yang jelas bagi pihak yang bersalah? Kalau demikian, jelas persoalannya belum selesai, kemungkinan terulang di waktu lain sangat besar, sebab permasalahan-nya terus ditutup-tutupi sementara ada pihak yang diselamatkan. Karena itu ummat Islam memasalahkan bentuk rekonsiliasi seperti itu. Ummat Islam akan tetap menuntut Presiden Abdurrahman Wahid untuk lebih adil tidak melindungi pihak Kristen dengan menggelar peradilan yang transparan untuk membongkar keseluruhan permasalahan perang aga-ma ini sampai keakar-akarnya dan menindak para aktor intelektual dengan mereka yang terlibat agar bencana terhadap ummat Islam di waktu yang menjadi hilang.

Sikap presiden Gus Dur dalam menangani konflik Maluku, kian lama semakin memprihatinkan ummat Islam. Lebih-lebih setelah ia mengemukakan pernyataan saat membuka seminar “Internasional untuk mencari bentuk ideal negara Indonesia masa depan” di Istana Negara selasa tanggal 28 - 3 - 2000. Diberitakan oleh harian Republika terbitan tanggal 29 - 3 - 2000 bahwa Gus Dur menyatakan bahwa di mata dia, konflik dan kerusuhan di Maluku berawal dari ketidakadilan pemerintah sebelumnya (era Suharto) dalam memperlakukan ummat Kristen. Masa sepuluh tahun terakhir pemerintah lalu telah memberikan perlakuan istimewa sekaligus anak emas (*golden boy*) bagi masyarakat Islam di Maluku, mengakibatkan keseimbangan terganggu. Termasuk 38 jabatan penting di propinsi tersebut yang sebelumnya di bagi antara Muslim dan Kristen, kemudian diserahkan kepada Muslim semuanya, pihak Kristen merasa sempat terganggu, ketika masyarakat Kristen memprotes, pemerintah lokal dan pusat memutuskan untuk melindas protes tersebut, Konflik menjadi begitu besar. Dan karena militan muslim yang diperlakukn sebagai *golden boy*, maka menyerbulah mereka ke perkampungan Kristen sehingga eskalasi pun terjadi antara militan Kristen dan muslim.

Pernyataan presiden yang begitu ngawur membuat ummat Islam amat prihatin, karena apa yang disampaikan itu merupakan pemutar balikan fakta secara tidak bermoral, terutama oleh mereka yang membi-sikkan ke kuping Gus Dur. Keadaan menjadi terbalik 180 derajat bila ummat Islam di anak emaskan, apalagi menyerang ke perkampungan Kristen. Mengapa Gus Dur berat sebelah dan bersikap diskriminatif, lebih percaya pada cerita pihak Kristen yang selalu berbohong secara terang-terangan? Gus Dur secara khusus telah ke Ambon untuk mengetahui kasus ini, wakil presiden telah ditunjuk untuk menangani kasus kerusuhan Ambon. Ada panja DPR dan KPP HAM juga telah datang ke Ambon. Mengapa informasi dari pihak Kristen lebih dipercaya ?

Ummat Islam menuntut penyelesaian lewat jalur hukum, tetapi enggan dilakukan. Sikap presiden yang seperti itu , mungkinkah proses hukum dapat berlangsung secara adil? Apakah

tidak akan ada intervensi dari presiden yang mempengaruhi jalannya proses peradilan, sehingga yang salah dibenarkan dan sebaliknya, ummat Islam yang tidak bersalah harus menelan kepahitan karena di nyatakan bersalah. Jika demikian halnya, apa yang dapat diharapkan dari Gus Dur sebagai presiden dengan legitimasi kuat? Semua kekhawatiran ini akan terus mengganggu benak kaum muslimin, terutama saat-saat upaya rekonsiliasi sedang digalakkan sekarang ini q

TIDAK semua orang punya bakat besar yang mampu berperan ganda seperti Gus Dur. Terutama dalam hal memainkan karakter sebagai muslim, sekaligus memusuhi Islam dan ummat Islam. Di masa Rasulullah SAW karakter tersebut bisa kita temui pada sosok Abdullah bin Ubai. Dan pada dunia internet, karakter seperti itu bisa kita temui pada sosok Jusfiq Hadjar gelar Sutan Maradjo Lelo, Hasan Basri alias Proletar serta Edizal.

Bakat besar Gus Dur, sudah muncul ketika ia masih belum jadi “apa-apa”, ketika ia masih menjadi salah satu kader NU (Nahdlatul Ulama). Ketika pembantaian terhadap ummat Islam di Tanjung Priok, 12 September 1984, Gus Dur muda justru menunjukkan keberpihakan-nya kepada Beny Moerdani (Panglima ABRI kala itu), dan menemani Beny ke berbagai pesantren, untuk meyakinkan para Kyai pesantren bahwa peristiwa Tanjung Priok bukanlah peristiwa pembantaian terhadap ummat Islam, namun hanya kesalahan prosedur biasa.

Bab 13-03 Muslim Dibantai, Gus Dur Tak Berpihak

Karakter seperti itu terus hidup hingga kini. Ketika awal bencana pembantaian ummat Islam di Ambon pertama kali berlangsung, 19 Januari 1999, yang kemudian dikenal dengan istilah Idul Fitri Berdarah, ketika itu Gus Dur belum menjabat Presiden, ia sama sekali tidak menunjukkan simpati dan empatinya kepada korban, justru mencari-cari kambing hitam dengan menyebut-kan “Brigjen K” sebagai provokator, kemudian diralat-nya menjadi “Mayjen K” sebagai provokator bencana Ambon tersebut.

Ketika kasus pembantaian warga Muslim meledak akhir Desember 1999 lalu di Tobelo, Galela, Jailolo, Sahu dan Loloda (Pulau Halmahera Utara, Maluku Utara), dan menyebabkan ribuan nyawa orang-orang Islam melayang, Gus Dur sebagai Presiden RI justru mengatakan bahwa korban dari bencana itu cuma lima orang. Sebuah pernyataan yang sangat riskan dan tidak bertanggung jawab. Apalagi terbukti kemudian, Max Tamaela (Pangdam Pattimura, yang dijuluki sebagai algojo pembantai Muslim) akhirnya terpaksa mengakui, terdapat lebih dari tujuh ratus nyawa melayang dari bencana tersebut, dan hampir seluruhnya adalah ummat Islam.

Mengenai pembantaian Muslim di Halmahera Utara itu, ada sebuah informasi menarik yang dikemukakan oleh dudi-firmansyah@goplay.com, yang pernah dipublikasikan di milis Sabili edisi 17 Januari 2000, dengan judul: **Pembantaian Muslim Di Galela**

Pengepungan kecamatan Galela (komunitas Islam) oleh 7 kecamatan lain (komunitas Kristen) sudah dikhawatirkan oleh banyak tokoh dan orang Galela sendiri. Masalah ini sudah dilaporkan oleh masyarakat Galela kepada orang-orangnya di Jakarta, yang kemudian oleh Thamrin Amal Tomagola dilaporkan kepada Gus Dur.

Presiden Gus Dur pun kemudian langsung memanggil Suaidy Marasa-bessy guna mengatasi hal tersebut. Suaidy Marasabessy sempat heran juga pada mulanya, mengapa berita pengepungan itu tidak pernah sam-pai ke mabes TNI? Mengapa laporan itu langsung masuk ke telinga Presiden, sementara mereka sebagai aparat TNI tidak pernah mendapat laporan.

Dari sini sudah jelas terlihat bahwa TNI sendiri kecolongan, tidak mendapat informasi yang cukup tentang pengepungan kecamatan Galela (komunitas Islam) oleh orang-orang Kristen di sekitarnya, karena Panglima di sana adalah Brigjen Max Tamaela.

Berhubung orang-orang Maluku itu khawatir terhadap penyerbuan itu, maka Suaidy Marasabessy langsung menyetujui pengiriman pasukan ke kecamatan Galela (tempat di mana komunitas Muslim sedang dike-pung). Beberapa tokoh masyarakat yang menghadap Suaidy memperlihatkan sebuah peta Maluku-Halmahera, dan memberikan saran, bila hendak mengirim pasukan jangan didaratkan di Ternate, tetapi langsung saja ke Morotai. Karena perjalanan dari Morotai ke Galela hanya 1 jam (melalui udara), sedangkan bila dari Ternate memakan waktu 22 jam.

Kemudian Suaidy Marasabessy menghubungi Kodim di Tobelo agar menerima pasukan yang datang di Morotai dan hendaknya Dandim Tobelo melakukan koordinasi dengan Pangdam setempat. Kenyataannya pasukan tidak dipersilakan mendarat di Morotai tetapi mendarat di Ternate. Akibatnya perjalanan pasukan dari pelabuhan udara Ternate menuju Galela memakan waktu 22 jam. Padahal seharusnya hanya 1 jam, bila pasukan kiriman itu didaratkan di Morotai.

Dalam waktu 22 jam, sebelum tentara mendarat, terjadilah pembantaian besar-besaran di kecamatan Galela. Ini jelas skandal (pembantaian) luar biasa biadabnya yang dilakukan Brigjen Max Tamaela. Sebagai Pangdam, sebagai aparat TNI Max Tamaela sudah sangat berpihak kepada kalangan Kristen. Jelas sekali Max Tamaela dengan sadar dan kejam merencanakan pembantaian terhadap sekitar dua ribuan ummat Islam di kecamatan Galela (hanya) dalam satu malam.

Bagaimana sikap Gus Dur kemudian? Ternyata hingga kini Max Tamaela, sang algojo itu masih tetap aktif di institusi TNI, dan tidak termasuk Pangdam yang diganti pada musim mutasi Pati TNI baru-baru ini. Konon, Max Tamaela dipertahankan berkat lobby Wapres Megawati

kepada Gus Dur. Dan bisa dipastikan, Megawati juga telah dilobby oleh kalangan Kristen di Ambon, yang kesemuanya adalah aktivis PDI-P.

Hal ini menunjukkan, bahwa pemerintahan Gus Dur dan Mega adalah bencana bagi umat Islam, sebagaimana ditunjukkan melalui sikap dan ucapan mereka terhadap kasus Ambon. Ketika bencana pem-bantaian di Galela berlangsung, Wapres Megawati sedang berlibur ke Hongkong, bersama keluarganya, padahal oleh Presiden ia ditugaskan mengatasi kasus Ambon.

Ada informasi menarik yang menjelaskan alasan mengapa Mega dan keluarganya menjalankan liburan akhir tahun ke Hongkong.

Menurut Gus Dur, wapres Megawati ke Hongkong bukan untuk merayakan ulang tahun suaminya (Taufik Kiemas), bukan pula untuk menyongsong terbitnya matahari pertama tahun 2000. Tetapi untuk melakukan perjalanan bisnis.

Yang jelas, kepergian Mega ke Hongkong bersama Taufik Kiemas, beserta anak-anaknya, bukanlah dalam rangka mengadakan buka puasa bersama, shalat tarawih bersama, sahur bersama dengan masyarakat Muslim di sana, tetapi untuk menjalin hubungan bisnis dengan pengusaha Hongkong.

Sialnya, atau untungnya, ketika Mega bersama suami dan anak-anaknya ke Hongkong, para pebisnis di sana sedang cuti akhir tahun, sekaligus cuti Natalan, sehingga urusan bisnis seperti disebutkan Gus Dur tidak terlaksana dengan semestinya. Akibatnya, Mega dan keluarganya pun “terpaksa” berlibur dan berbelanja sepuas-puasnya di Hong-kong, sampai akhirnya Gus “Presiden” Dur memanggilnya pulang, karena adanya kasus Halmahera.

Kisah dibalik kisah “mengapa Mega ke Hongkong?” sebenarnya ada kaitannya dengan Tanri Abeng. Pada pemerintahan Habibie, Tanri Abeng telah menjual hak pengelolaan pelabuhan peti kemas di Jakarta kepada sebuah perusahaan milik keturunan Cina asal Hongkong. Pengusaha Hongkong tersebut yang telah mengetahui adanya penggantian kepemimpin-an nasional di Indonesia, segera mendekati Taufik Kiemas, suami wapres Megawati, dalam rangka melanggengkan bisnisnya itu.

Sang pengusaha Cina Hongkong itu pun menjamu keluarga Megawati untuk merayakan tahun baru di Hongkong sepuas-puasnya, dan semewah-mewahnya. Sepulangnya dari sana Taufik Kiemas mendapat hadiah satu unit TOYOTA Landcruiser terbaru, yang nilainya di Indonesia mencapai harga Rp 900 juta, juga satu unit mobil Mercy tipe terbaru.

Begitulah mentalitas pejabat kita saat ini, yang nampaknya tidak jauh berbeda dengan para pejabat di zaman Orde Baru. Bahkan kini, Taufik Kiemas pun mempunyai hak opsi pengelolaan pelabuhan peti kemas tersebut. Hebat bukan?

Sementara rakyat di tanah air kelaparan, dan ribuan muslim di Galela (Halmahera) dibantai, Megawati dan keluarganya justru asyik berlibur ke Hongkong, memenuhi jamuan seorang pengusaha keturunan Cina, berbelanja sepuasnya, sambil merayakan ultah suaminya dan menyong-song tahun 2000 dengan acara yang mewah meriah.

Dan kalau toh akhirnya Wapres Megawati mempercepat liburan akhir tahunnya di Hongkong itu, setelah Presiden Gus Dur memanggilnya pulang, bukan berarti bencana yang menimpa umat Islam agak sedikit terobati. Sebab, ketika Wapres Megawati mengunjungi Halmahera, yang ia datangi justru pengungsi non Islam bukan pengungsi dan korban dari kalangan Islam yang benar-benar menderita. Maka, bantuan sandang-pangan, obat-obatan, uang tunai sebesar 1,5 miliar rupiah dari Wapres Megawati pun dinikmati oleh pengungsi non Islam tadi, yang jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan korban dan pengungsi dari kalangan Islam.

Bab 13-04 Ambon Berdarah dan Anak Emas

Pada harian Republika edisi 29 Maret 2000 (23 Dzulhijjah 1420 H) Gus Dur mengeluarkan statemen politik yang diskriminatif dengan mengatakan, bahwa gejolak dan konflik di Maluku terjadi akibat pada era Soeharto kalangan Kristen diperlakukan tidak adil, sebaliknya masyarakat Islam diperlakukan bagaikan anak emas. Selengkapnya, pernyataan Gus Dur itu sebagai berikut: Gejolak Maluku terjadi, akibat Islam diana-kemaskan’

“Jika dulu Belanda mengambil orang-orang Kristen untuk posisi militer dan pemerintahan, dalam era Soeharto pemerintah merekrut Muslim.”

Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur kembali membuat pernyataan yang mengejutkan, kali ini tentang konflik Maluku. Di mata dia, konflik dan kerusuhan di wilayah Maluku berawal dari ketidak-adilan pemerintah sebelumnya (era Soeharto) dalam memperlakukan umat Kristen.

“Masa sepuluh tahun terakhir pemerintah lalu, telah memberikan perlakuan istimewa sebagai anak emas (golden boy) bagi masyarakat Islam di Maluku,” katanya saat membuka seminar Internasional “ Mencari Bentuk Ideal Negara Indonesia Masa Depan”, di Istana Negara, Selasa (28/3). Kondisi itu, sambungnya, kemudian mengakibatkan kese-imbangan antara Kristen dan Islam terganggu.

Menurut Abdurrahman, jika dulu Belanda mengambil orang-orang Kristen untuk posisi militer dan pemerintahan, dalam sepuluh tahun terakhir era Soeharto, pemerintah merekrut

Muslim sangat banyak diban-ding Kristen. “Ini termasuk 38 posisi penting di provinsi tersebut, yang sebelumnya, posisi tersebut dibagi antara Muslim dan Kristen, kemudian diserahkan kepada Muslim semua. Ini lalu menjadikan pemeluk Kristen merasa sangat terganggu.”

Ketika masyarakat Kristen memprotesnya, lanjut Abdurrahman, pemerintah lokal dan pusat memutuskan untuk melindas protes tersebut. Dan, akhirnya konflik jadi begitu besar. Dan karena militan Muslim yang diperlakukan sebagai *golden boy (anak emas)*, maka menyerbulah mereka ke kampung Kristen, sehingga eskalasi pun terjadi antara mlilitan Kristen dan Muslim.

Menurutnya, apa yang terjadi di Ambon, Maluku, dan Papua menunjukkan betapa aspirasi dari propinsi-propinsi tersebut tak tersalurkan. Sehingga, akhirnya merebak dalam bentuk protes massa. Solusi bagi masalah ini, kata Abdurrahman, pemerintah setempat harus banyak berkomunikasi dengan masyarakat luar tapi tetap menggunakan emosi lokal.

Pernyataan Gus Dur itu tak pelak mengundang sesal tokoh agama. Sekjen DDII Hussein Umar dan tokoh NU KH Ilyas Ruchiyat yang dimin-tai komentarnya soal pernyataan SARA Gus Dur itu, sama-sama menya-yangkan karena pernyataan tersebut tidak didukung data akurat

“Kasus-kasus yang terjadi di Ambon karena sebab lain. Bukan karena dimanjakan. Apanya yang dimanjakan?” kata Ilyas ketika dihubungi di kediamannya. Menurut dia, ada yang kurang serasi dalam pergaulan, sehingga yang besar merasa unggul dan yang kecil merasa dipinggirkan. Akibatnya satu sama lain saling curiga.

Ilyas berpendapat selama ini perlakuan terhadap semua agama sama. Dia mengambil contoh di Departemen Agama di mana di situ dibentuk dirjen dari semua agama. “Hanya saja, mungkin karena umat Islam jumlahnya besar maka kegiatannya terlihat lebih banyak,” katanya.

Hingga saat ini, menurut KH Ilyas, kerukunan yang didambakan memang belum berhasil. Ini bukan berarti pemerintah tak pernah berusaha. Karena, menurutnya, setiap pemerintahan selalu berupaya men-ciptakan keserasian hidup antar umat beragama. Dia berharap nantinya terjadi perubahan persepsi sehingga yang besar tidak merasa unggul dan yang minoritas tak merasa dipinggirkan.

Hussein sendiri selain menyesalkan, juga khawatir jika pernyataan Abdurrahman itu bisa membuat umat Islam marah dan kecewa. Dia menganggap pernyataan Gus Dur itu tidak akan menyelesaikan kasus tersebut. “Gus Dur terlalu menyederhanakan persoalan di Maluku. Padahal kasus sebenarnya tidaklah demikian,” tegas Hussein Umar.

Malah sebaliknya, menurut keterangan para tokoh Muslim Maluku yang datang ke Jakarta, selama ini umat Islam banyak menerima ketidak-adilan. Banyak posisi yang tidak dibagi secara proporsional. “Dan umat Islam selama ini selalu dipinggirkan,” kata Hussein.

Seharusnya, kata Hussein, sebagai Kepala Negara, Gus Dur tidak perlu melontarkan pernyataan sensitif seperti itu. Karena dikhawatirkan dari pernyataan tersebut akan menimbulkan bias, dan membuat kemara-han bagi umat Islam. “Pernyataan Gus Dur ini bisa menimbulkan kekece-waan bagi umat Islam. Apalagi kondisi di Maluku sendiri belum aman, masih banyak peristiwa sporadis di beberapa lokasi,” papar Hussein Umar.

Komentar berbagai pihak pun bermunculan, antara lain dari Sekjen PGI (Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia), “...Dr. Pattiasina, menyang-kal pandangan yang menyatakan konflik di Maluku dipicu sikap pemerintah era Soeharto yang menganak-emaskan umat Islam. Menurutnya, umat Islam justru mendapat perhatian Soeharto pada periode akhir pemerintahannya.” (*Republika Kamis 30 Maret 2000*).

Di majalah Forum Keadilan edisi 9 April 2000, Dicky Mailoa, Ketua *Crisis Center* PGI untuk masalah Maluku tidak menepis adanya penganak-emasan umat Islam pada dasawarsa terakhir era Soeharto, namun “...pada saat itu belum menghasilkan konflik, tapi hanya menghasilkan prakondisi yang tidak sehat.” Sedangkan Pendeta Arnold Nicolas Radjawane, anggota DPR asal Maluku, membantah adanya ketidak-puasan itu, “Tidak benar bahwa umat Kristen tidak puas, lalu marah dan berkonflik dengan saudara muslimnya.”

Di milis Sabili, Hasan Rasyidi berkomentar, bahwa pernyataan Gus Dur tidak hanya menyakitkan hati umat Islam, juga merupakan sebuah pernyataan yang tidak bermoral. Gus Dur Kambing Hitamkan Umat Islam Ambon, katanya.

Selanjutnya ia katakan:”Lagi-lagi Gus Dur membuat ulah. Kali ini dia mengatakan bahwa kerusuhan di Maluku terjadi karena umat Islam di Ambon dianak-emaskan.

Sosiolog UI, Ahmad Thamrin Tamagola membantah hal ini. Dia menganggap Gus Dur terlalu menyepelekan masalah. Sesungguhnya, pada zaman Belanda hingga awal pemerintahan Orba, umat Kristen yang dianak-emaskan. Mereka jadi pejabat-pejabat serta prajurit-prajurit militer. Toh dengan penganak emasan tersebut, umat Islam mampu bersikap sabar, karena mereka orang yang beradab.

Tapi begitu umat Islam yang disisihkan dari birokrasi dan militer, berwiraswasta dan menjadi makmur serta memperoleh pendidikan yang tinggi. Pada tahun 1980-an, setelah para sarjana Muslim pulang ke Ambon, maka barulah Muslim Ambon berhasil memperoleh posisi-posisi yang penting.

Nah, umat Kristen yang biasa dianak-emaskan ini begitu merasa ter-singkir, akhirnya marah dan membantai ribuan umat Islam. Inilah yang terjadi. Seandainya umat Kristen tidak biadab, tak mungkin pembantaian tersebut bisa terjadi.

Jadi statement Gus Dur itu benar-benar menyakitkan hati umat Islam. Umat Islam Ambon sudah dibantai, lalu disalahkan pula oleh Gus Dur. Benar-benar tidak bermoral.

Para komentator itu mungkin benar, bahwa pernyataan Gus Dur tentang akar masalah kasus Ambon-Maluku berupa dianak-emaskannya masyarakat Islam, merupakan pernyataan yang tidak bermoral, sebab pada kenyataannya kalangan Islam-lah yang selalu dirugikan.

Dalam buku “*Ambon Bersimbah Darah*” karya H. Hartono Ahmad Jaiz, sejarawan Ambon, Thamrin Ely mengatakan, “Orang Ambon yang Kristen mendapat perlakuan istimewa dari VOC dan pemerintah kolonial. Mereka menikmati pendidikan, belajar bahasa Melayu, dan akhirnya diperbolehkan memasuki jajaran administrasi...”

Thamrin Ely juga mencatat, “Gubernur Maluku yang pertama adalah seorang Kristen Protestan, Mr. Latuharhari. Begitu juga beberapa gubernur berikutnya. Banyak posisi kursi di pemerintahan sejak awal kemerdekaan dipegang warga Kristen. Umat Islam tidak memprotes.”

“Tapi saat dua gubernur terakhir, Akib Latuconsina dan Saleh Latuconsina, yang Muslim asli Maluku, memberi beberapa jabatan kursi kepada Muslim, dan itu pun masih belum representatif, kelompok Kristen tidak puas. Lantas mereka menghembuskan isu bahwa Islam menguasai lembaga pemerintahan...” demikian papar Thamrin Ely sebagaimana dikutip oleh H. Hartono Ahmad Jaiz.

Jadi, yang sebenarnya dijadikan anak emas (*golden boy*) bukanlah masyarakat Maluku yang Islam, tetapi masyarakat Maluku yang Kristen. Masyarakat Maluku Kristen ini sudah termanjakan oleh situasi sejak zaman kolonial Belanda, yang pada akhirnya tidak membuat mereka mampu menjadi anggota masyarakat yang fair dan demokratis.

Masih dalam buku yang sama, Thamrin Ely mencontohkan, “Organi-sasi-organisasi Kristen, misalnya, protes saat Kolonel Junaidi Panegoro diusulkan oleh ABRI untuk duduk di kursi Walikota beberapa tahun lalu. Alasannya, tak sesuai dengan keadaan penduduk kota Ambon yang jumlah pemeluk Kristennya lebih besar. Maka Junaidi pun ditarik, dan naiklah Chritanasale, seorang Kristen. Umat Islam menerima, bahkan yang pertama memberikan dukungan adalah HMI Ambon.”

Tidak hanya menyangkut jabatan struktural di birokrasi pemerintahan saja yang menjadi hajat Kristen Maluku, terhadap organisasi kepemudaan pun Kristen Maluku sangat menunjukkan sikap sektarianistis yang pekat, sebagaimana dicontohkan Thamrin Ely, “...Orang Islam diam saja saat ketua dan sekretaris KNPI dipegang Kristen. Tapi ketika Muslim menduduki jabatan ketua, kalangan Kristen langsung protes, dan meminta pertimbangan kekuasaan. Begitu juga di Golkar. Sebaliknya, umat Islam tidak bereaksi apa-apa terhadap dominasi Kristen di Universitas Pattimura.”

Sejauh ini, tidak pernah terdengar suara protes dari Gus Dur, mana-kala umat Islam di Maluku didzalimi oleh masyarakat Maluku Kristen. Gus Dur hanya bersuara ketika masyarakat Kristen Maluku menghembuskan adanya Islamisasi di tubuh pemerintahan daerah dan organisasi atau lembaga strategis lainnya.

Rustam Kastor, Brigjen TNI Purnawirawan kelahiran Ambon, dalam bukunya berjudul “**Fakta, Data dan Analisa: Konspirasi Politik RMS dan Kristen Menghancurkan Ummat Islam di Ambon-Maluku**” menyimpulkan bahwa kasus Ambon-Maluku bukan sekedar konflik antar penduduk berbeda agama, namun ada hal-hal yang lebih substansial sebagai penyebabnya yaitu, “...konspirasi besar yang telah memanfaatkan konflik Kristen-Islam yang telah berlangsung ratusan tahun untuk kepentingan politik Kristen di Indonesia dalam rangka merebut posisi yang lebih kuat setelah tergeser oleh kekuatan Islam dalam dasa warsa terakhir.”

Jadi, adanya eskalasi kecemburuan masyarakat Kristen Ambon-Maluku terhadap masyarakat Islam Ambon-Maluku, hanyalah media penghantar terjadinya konflik. Potensi konflik itu memang ada dan sewaktu-waktu meletup, namun masih dalam batas konflik yang tidak berkepanjangan dan nyaris tidak terencana.

Sedangkan kasus *Moslem Cleansing* atau *genocide* yang terjadi sejak 19 Januari 1999 (Idul Fitri Berdarah), adalah peristiwa politik (kepentingan politik Kristen) yang memanfaatkan potensi konflik tadi. Dan diselenggarakan dengan seksama, sistematis serta terencana. Fakta-fakta yang dianalisis oleh Rustam Kastor menunjukkan hal itu.

Sejauh ini, potensi konflik Islam-Kristen di Ambon-Maluku berhasil diredam melalui konsep Pela-Gandong, yang berhasil menelurkan sebuah perdamaian semu. Karena konsep itu sendiri merupakan konsep rekayasa semata yang hanya menguntungkan pihak Kristen.

Ada sebuah pandangan mengenai konsep Pela-Gandong ini, yang dipublikasikan oleh Markus Kapalapica <kapalapica@yahoo.com> di milis [Indonesia-Views], 19 Januari 2000 sebagai berikut:

Sebutan Pela Gandong yang dibangga-banggakan orang Maluku sebenarnya tidak benar adanya. Hubungan Pela Gandong yang terdapat pada orang Maluku sebenarnya hanyalah sebuah rekayasa Pemerintahan Belanda pada saat menjajah Indonesia dengan Maluku sebagai sasarannya karena rempah-rempah yang ingin dikuasai.

Ada kisah menarik mengenai hal ini: Awalnya kepulauan Maluku itu adalah sebuah jazirah yang penuh dan makmur dengan hasil alam yang berlimpah-ruah, dan berpenduduk mayoritas Muslim. Di saat Belanda menjajah dan menggarap Maluku, kaum Muslim Maluku tidak bisa menerima kehadiran mereka sehingga timbul perlawanan bersenjata dari Raja-raja dan Sultan-sultan yang berada di Maluku, antara lain Raja Leihitu, Raja Leitimur, Sultan Tidore, Sultan Ternate, Sultan Khairun, Sultan Babullah dan lain-lain.

Karena adanya perlawanan yang sengit dari masyarakat Muslim Maluku, maka Belanda mulai melancarkan Politik “Devide et Impera” alias Politik Memecah Belah. Belanda masuk ke Maluku membawa tiga misi yaitu: Gold, Glory, dan Gospel.

Gold, adalah misi Belanda untuk mengeruk harta. **Glory**, untuk mendapatkan kemuliaan di mata masyarakat. **Gospel**, membawa misi Kristen dengan iming-iming materi sehingga masyarakat Maluku yang tadinya adalah mayoritas Muslim menjadi terpengaruh dan terpecah dua: Muslim dan non Muslim.

Pada setiap kampung di Maluku selalu terbagi menjadi dua komunitas yaitu komunitas Muslim dan non Muslim, dan itu adalah keberhasilan Belanda dalam politik Pecah Belahnya. Contoh, kampung Iha (Muslim) dan Ihamahu (non Muslim), awalnya kedua kampung ini adalah satu yaitu Iha, tetapi karena penduduk Iha yang membangkang maka mem-bentuk daerah baru yang disebut Ihamahu (Iha yang membangkang).

Karena sering terjadi perkelahian antara kampung Muslim dan non Muslim yang pro Belanda, maka agar dapat diterima di semua komunitas masyarakat Maluku, Belanda mulai membentuk persahabatan yang tidak bisa dipisahkan dengan saling membantu dan bergotong royong dengan membuat Pela Gandong.

Untuk memperluas daerah jajahannya, Belanda menggunakan masyarakat Maluku yang pro kepadanya untuk memperluas daerah kekuasaannya dengan jalan membentuk pela gandong dengan daerah baru yang Muslim. Demikianlah kisah Pela Gandong yang selalu di-bangga-banggakan, padahal hanyalah politik penjajah.

Jadi, kalau Gus Dur mengatakan bahwa pada dasawarsa terakhir era Soeharto terjadi penganak-emasan terhadap masyarakat Islam di Ambon-Maluku, dan dari situlah terjadi peristiwa berdarah yang berke-panjang, Gus Dur sangat terkesan melantur. Kalau toh terjadi proses pengakomodasian terhadap masyarakat Islam Ambon-Maluku di posisi tertentu di dalam birokrasi dan sebagainya, itu semua tepatnya merupa-kan proses proporsionalisasi, sehingga masyarakat Islam di Ambon-Maluku tidak terus berada dalam posisi pecundang yang didzalimi. Apalagi kenyataan menunjukkan bahwa masyarakat Islam Ambon-Maluku yang selama masa kolonialisasi tertinggal di segala bidang, mulai menunjukkan jati dirinya. Sementara itu, Kristen Ambon-Maluku lebih cenderung merantau ke luar Maluku menjadi penyanyi, petinju, dan preman.

Sesungguhnya Gus Dur memang sudah sangat keterlaluan. Bila pada masa dasawarsa terakhir era Soeharto yang dinilainya menjadikan masyarakat Islam di Ambon-Maluku sebagai *golden boy*, mengapa Gus Dur seperti tidak mampu menilai masa suram dan kelam yang dialami masyarakat Islam di Ambon-Maluku sejak masa kolonialisasi hingga menjelang dasawarsa terakhir era Soeharto? Apalagi pada kenyataannya, Soeharto memang tidak pernah menganak-emaskan masyarakat Islam di Ambon-Maluku, sebab yang terjadi adalah mekanisme biasa yang kerap terjadi di mana-mana, yaitu meningkatnya kualitas SDM masyarakat Islam di Ambon-Maluku, sehingga mereka mempunyai nilai tambah (melalui pendidikan) yang memungkinkannya memasuki birokrasi dan posisi strategis lainnya. Sejalan dengan itu, masyarakat Islam dari luar Ambon-Maluku berdatangan mengisi sektor perdagangan dan sebagai-nya yang kosong ‘ditinggalkan’ oleh masyarakat Kristen Ambon-Maluku.

Melalui pernyataan-pernyataannya selama ini, kita berkesimpulan bahwa Gus Dur tidak saja cenderung *Asbun* (asal bunyi), yaitu gemar melontarkan data yang sangat tidak akurat mengenai sesuatu hal, juga tidak mempunyai keberpihakan moral terhadap berbagai bencana yang menimpa umat Islam q

Bab 14 PENUTUP

KATA-KATA yang bagaimanakah, demi Allah, yang dapat kita ucapkan dengan cara yang benar dan dapat diterima akal sehat, sehingga dapat mewakili rintihan hati orang yang, atas nama kekuasaan, dianiaya, dirampas hak-haknya, dan diperkosa martabat serta kehormatannya oleh diktator negeri ini?

Kata-kata yang bagaimanakah, demi Allah, yang dapat kita ungkapkan sebagai penutup buku ini, sehingga dapat berfungsi sebagai lisan sejarah yang mampu berkisah tentang duka nestapa anak bangsa ini kepada generasi sejarah yang datang kemudian ?

Jika membaca bab demi bab dari isi buku ini, kita seakan kehabisan kata-kata manusiawiyah untuk men-ceritakan betapa dahsyatnya bencana yang menimpa kaum muslimin sepanjang empat periode pemerinta-han di Indonesia.

Betapa banyaknya korban yang menanggung trau-ma masa lalu. Anak-anak yang menatap mentari dengan linangan air mata. Setiap malam ibu-ibu yang ditinggal mati suami atau diperkosa oleh jagal kemanusiaan, tidur dengan senandung nestapa. Sementara rantai represi penguasa tetap saja membelenggu kebebasan berbicara, bahkan kebebasan untuk bercita-cita.

Kini, ketika masyarakat menuntut, atas nama demokrasi dan hak asasi manusia, supaya mereka yang bertanggung jawab atas terjadinya bencana kemanusi-an itu diadili. Mereka semua, mencoba mengubur kebe-naran dengan sikap munafiq dan kalimat dusta.

Terhadap peristiwa Tanjung Priok, 1984, Try Sutrisno yang menjabat Kasad ketika itu berkata: “ Bahwa peristiwa tersebut merupakan usaha dari suatu kelompok yang ingin menggagalkan kerja wakil-wakil rakyat yang sedang membahas lima rancangan undang-undang.” Untuk itu ia menolak bertanggung jawab sebab, “ini bukan kesalahan pribadi melainkan kesalahan institusi TNI”, katanya. Sementara Hendro Priyono, Danrem 043 Garuda Hitam, 1989, yang bertanggung jawab atas peristiwa Lampung berkata: “Peringatan aparat keamanan dijawab dengan pekik Allahu Akbar dan seliweran anak panah serta lemparan bom molotov.” Hendro memimpin dan menugasi 3 peleton tentara dan sekita 40 anggota Brimob menyerbu ke Cihideung pusat gerakan”. Dan sekarang ketika masyarakat menuntut tanggung jawabnya dia berkata: “Oh, saya tidak sudi diperiksa. Sekali-lagi tidak sudi. Setelah saya menjalankan tugas dengan penuh dedikasi untuk negara dan bangsa, lalu mau diperiksa seperti pesakitan? *No way*”. Sikap yang sama juga ditunjukkan oleh Beny Murdani, mantan Pangab yang dinilai paling bertanggung jawab atas peristiwa Tanjung Priok berkata: “Mereka adalah sekelompok orang yang menyalahgunakan agama dan tempat ibadah untuk menghasut ummat beragama dan anak-anak sekolah...”. Suatu ketika Roekmini (mantan anggota DPR) bertanya soal kebijakannya yang cenderung merugikan ummat Islam. “Pak Beny itu sadis, suka membunuh ummat Islam,” kata Roekmini sambil menyebut kasus Tanjung Priok.

Apa jawab Beny? “Roekmini, kamu kira saya ini siapa. Jangankan untuk membunuh orang, untuk kentut saja, saya harus lapor (kepada Soeharto)”. (ADIL, No. 46. 25-8-98).

Dengan lengsernya Soeharto, rakyat negeri ini sebenarnya menitip harapan besar, terhindarnya negeri ini dari bahaya disintegrasi serta pulih-nya roda perekonomian dengan semakin kencangnya hembusan angin demokrasi. Dan harapan itu sempat memendarkan sinar terang, ketika Habibie memimpin negeri ini selama satu tahun. Semua Narapidana po-litik yang dihukum oleh rezim orde baru dibebaskan tanpa syarat.

Dan tampilnya Gus Dur sebagai Presiden Indonesia ke-IV, semakin memperkuat harapan rakyat banyak. Akan tetapi, sepanjang hari-hari kekuasaan Gus Dur, yang terjadi kemudian adalah anarkhi, konflik horizontal dan vertikal. Fitnah politik yang ke luar dari mulutnya menjalar bagai virus beracun. Kebenciannya kepada ummat Islam nampak dari kata-katanya, dan mungkin saja yang ada di dalam hatinya lebih jahat lagi. “... Mereka tidak akan henti-hentinya melakukan keonaran kepa-damu. Mereka senang berbuat yang menyusahkan kamu. Kebencian telah nyata dari mulut mereka. Dan yang tersembunyi di dalam hati mereka lebih besar lagi”. (Qs. Ali Imran, 3:118)

Fitnah politik yang dirasakan paling menyakitkan hati kaum musli-min, setelah anjurannya mencabut Tap MPRS 25/1966 adalah agitasinya tentang situasi di Maluku. Gejolak di Maluku terjadi, katanya, akibat ummat Islam dianak emaskan selama sepuluh tahun terakhir kekuasaan Soeharto. Padahal kenyataannya, justru ummat Islam-lah yang paling banyak menderita, sebagaimana dapat dibaca dalam buku ini. Maka sangatlah wajar, jika banyak dari kaum muslimin yang menilai, bahwa yang buta bukan cuma matanya Gus Dur, tapi yang buta adalah hatinya.

“Apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lantas hati mereka dapat memikirkan dan telinga mereka dapat mendengarkan? Maka sesungguhnya bukanlah mata yang buta, tetapi hati yang di dalam dada”. (Qs. Al-Haj, 22:46)

Keadaan semacam ini, tidaklah mustahil akan terus berlangsung pada hari-hari mendatang. Dan akan terus berlanjut sampai sidang umum yang akan datang atau sampai Gus Dur lengser dari jabatan kepresidenan sebagaimana pendahulunya.

Sekiranya bukan karena turunya rahmat serta pertolongan Allah, dan munculnya kesadaran dari kaum muslimin akan pentingnya merubah nasibnya sendiri, sehingga Allah merubahnya, dan menyadari eksistensi yang terinjak, maka bukan mustahil bencana yang lebih besar lagi akan datang menerpa.

Oleh karena itu, amatlah penting bagi kaum muslimin untuk mengu-payakan berlakunya hukum Allah, karena hal itu merupakan kebaikan abadi yang wajib diamalkan oleh semua orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan.

Yakinlah, *Nasrun minallah*, pertolongan dari Allah dan kemenangan akan datang manakala kaum muslimin menolong agama Allah, melaksa-nakan syari’at-Nya. *Intan shurullaha yan shurkum wayu tsabbit aqdamakum*.

Mengakhiri buku ini, adalah afdhal jika kita bermunajjat kepada Allah, sebagaimana orang-orang yang bertaubat berdo’a :

”*Ya Rab kami, janganlah Engkau siksa kami, sekiranya kami salah atau lupa. Ya Rab kami, janganlah Engkau pikulkan di pundak kami beban berat (yang tidak sanggup kami memikulnya) sebagaimana Engkau pikulkan kepada ummat sebelum kami. Ya Rab kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami tanggung jawab yang melebihi kekuatan kami. Maafkanlah kami, ampunilah dan beri rahmatlah kami.. Engkau Pembela kami, maka tolonglah kami untuk mengalahkan orang-orang kafir*”. (Qs. Albaqarah, 2:286).

Amin, Ya Mujibassailin ! q

